



**PERATURAN WALIKOTA SAWALUNTO
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023



Deri Asta, SH
Walikota Sawahlunto



H. Zohirin Sayuti, SE
Wakil Walikota Sawahlunto

R K P D
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022**



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat kebijakan pembangunan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)*.
- (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Juli 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA


Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 31

06 JUL 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-5
1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-7
1.3.1	Hubungan RKPD Kota Sawahlunto dengan RKP Tahun 2023....	I-8
1.3.2	Hubungan RKPD Kota Sawahlunto dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	I-9
1.3.3	Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.....	I-9
1.3.4	Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032	I-9
1.3.5	Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	I-9
1.4	MAKSUD DAN TUJUAN	I-10
1.5	SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023.....	I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-2
2.1.1.1	Aspek Geografi	II-2
2.1.1.2	Aspek Demografi	II-12
2.1.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-15
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-15
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-47
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-52
2.1.3	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-54
2.1.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-54
2.1.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-89
2.1.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-136
2.1.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-146
2.1.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-148
2.1.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-167
2.1.3.7	Unsur Kewilayahan	II-168
2.1.3.8	Unsur Pemerintahan Umum.....	II-168
2.1.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-169
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-169
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-177
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-180
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-188
2.2	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II-189
2.3	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-220
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-220
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-220

2.3.2.1 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-220
2.3.2.2 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-221
2.3.2.3 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan	II-223
2.3.2.4 Permasalahan Terkait Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-224
2.3.2.5 Permasalahan Terkait Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-224
2.3.2.6 Permasalahan Terkait Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-225
2.3.2.7 Permasalahan Terkait Unsur Kewilayahan	II-225
2.3.2.8 Permasalahan Terkait Unsur Pemerintahan Umum... ..	II-225
2.3.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	II-225

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah	III-2
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.1.1.2 Tingkat Kemiskinan	III-4
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran.....	III-4
3.1.1.4 Indeks Gini/Gini Rasio.....	III-5
3.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-6
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023....	III-7
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-9
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-10
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III-15
3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-1
4.1.2 Telaahan RPJMN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ..	IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	IV-4
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-18
4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi.....	IV-18
4.2.1.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional.....	IV-18
4.2.1.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat	IV-86
4.2.2 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023	IV-90
4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	IV-95
4.3.1 Arah Kebijakan Terkait dengan Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	IV-95
4.3.2 Arah Kebijakan Terkait Prioritas Pembangunan	IV-100
4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Terkait Pemulihan Ekonomi.....	IV-102
4.3.4 Arah Kebijakan Terkait Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-105



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.2 RENCANA INOVASI TAHUN 2023	V-408
5.3 INOVASI UNGGULAN LAMBANG MATA (LAHAN TAMBANG MENJADI AGROEDUWISATA).....	V-411

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO	VI-1
6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	VI-3
6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH	VI-7

BAB VII PENUTUP

7.1 KAJIDAH PELAKSANAAN	VII-1
7.2. TINDAK LANJUT	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan	II-2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto	II-4
Tabel 2.3	Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto	II-5
Tabel 2.4	Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan	II-9
Tabel 2.5	Luas Lahan Menurut Kepemilikan.....	II-10
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2021	II-12
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-13
Tabel 2.8	Jumlah Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-14
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Tahun 2017 – 2021 (jiwa/Km2)	II-14
Tabel 2.10	Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-15
Tabel 2.11	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-15
Tabel 2.12	PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021	II-16
Tabel 2.13	PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021	II-17
Tabel 2.14	PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021	II-18
Tabel 2.15	PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021	II-20
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021.....	II-23
Tabel 2.17	Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator Tahun 2017 – 2021	II-24
Tabel 2.18	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Variabel Pembentuknya Tahun 2017 – 2021	II-25
Tabel 2.19	PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021(juta/jiwa).....	II-26
Tabel 2.20	Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.21	Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.22	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021	II-31
Tabel 2.23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-34
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-35
Tabel 2.25	Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-35
Tabel 2.26	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-36
Tabel 2.27	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-37
Tabel 2.28	Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2.29	Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2018 – 2021	II-39
Tabel 2.30	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.31	Produktivitas Padi Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.32	Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2017-2021	II-43

Tabel 2.33	Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2017-2021	II-43
Tabel 2.34	Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2017 – 2021	II-44
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2017- 2021	II-45
Tabel 2.37	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-45
Tabel 2.38	Produk Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pariwisata (juta rupiah), Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.39	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-46
Tabel 2.40	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Tahun)	II-48
Tabel 2.41	Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II-49
Tabel 2.42	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Tahun)	II-50
Tabel 2.43	Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II-51
Tabel 2.44	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Satuan Dalam Tahun)	II-51
Tabel 2.45	Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-52
Tabel 2.46	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rupiah)	II-52
Tabel 2.47	Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.48	Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.49	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.50	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2021	II-54
Tabel 2.51	Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi Minimum) Tahun 2017-2021	II-55
Tabel 2.52	Angka Partispasi Kasar (APK) Tahun 2017 – 2021	II-56
Tabel 2.53	Data Kondisi PAUD Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021 (%)	II-56
Tabel 2.54	Angka Partispasi Murni (APM) Tahun 2017 – 2021 (%)	II-57
Tabel 2.55	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.56	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-58
Tabel 2.57	Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2018	II-58
Tabel 2.58	Persentase Sekolah SD/MI Berakreditasi A di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.59	Persentase Sekolah SMP/MTs Berakreditasi A di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.60	Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.61	Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-60
Tabel 2.62	Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021 (%)	II-60
Tabel 2.63	Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.64	Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik	II-62

Tabel 2.65	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%).....	II-62
Tabel 2.66	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021.....	II-63
Tabel 2.67	Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-64
Tabel 2.68	Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV	II-64
Tabel 2.69	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (%)	II-65
Tabel 2.70	Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-66
Tabel 2.71	Angka kematian Balita Tahun 2017-2021.....	II-67
Tabel 2.72	Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD Tahun 2018-2021	II-67
Tabel 2.73	Angka Kematian Bayi Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.74	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.75	Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.76	Persentase Belita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-69
Tabel 2.77	Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021.....	II-69
Tabel 2.78	Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.79	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2017– 2021	II-70
Tabel 2.80	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.81	Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.82	Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-71
Tabel 2.83	Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.84	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-72
Tabel 2.85	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.....	II-72
Tabel 2.86	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto Tahun 2017– 2021.....	II-73
Tabel 2.87	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021.....	II-74
Tabel 2.88	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021.....	II-74
Tabel 2.89	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Sawahlunto Tahun 2017– 2021	II-75
Tabel 2.90	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.91	Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.92	Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.93	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2017- 2021	II-76
Tabel 2.94	Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat Tahun 2017 – 2021.....	II-77
Tabel 2.95	Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat Tahun 2017 – 2021	II-77
Tabel 2.96	Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-78
Tabel 2.97	Penerima Bantuan RTLH Tahun 2017 -2021	II-78
Tabel 2.98	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.....	II-78

Tabel 2.99	Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017 – 2021.....	II-79
Tabel 2.100	Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-80
Tabel 2.101	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2017- 2021	II-81
Tabel 2.102	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2017- 2021	II-81
Tabel 2.103	Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2017- 2021	II-81
Tabel 2.104	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan Tahun 2017- 2021	II-82
Tabel 2.105	Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2017 – 2021	II-82
Tabel 2.106	Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-83
Tabel 2.107	Indikator pencapaian urusan ketentraman dan ketertiban pada aspek penanggulangan bencana daerah Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.108	Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-85
Tabel 2.109	Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-86
Tabel 2.110	Capaian SPM Bidang Sosial Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-86
Tabel 2.111	Program dan Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Sawahlunto	II-87
Tabel 2.112	Data Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.113	Data Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Sosial Tahun 2021	II-87
Tabel 2.114	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-88
Tabel 2.115	Jenis Bantuan pada Peserta DTKS tahun 2021	II-89
Tabel 2.116	Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial Tahun 2021	II-89
Tabel 2.117	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2.118	Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2.119	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-91
Tabel 2.120	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2017-2021.....	II-92
Tabel 2.121	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2018	II-93
Tabel 2.122	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019 s.d 2021.....	II-93
Tabel 2.123	Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-95
Tabel 2.124	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.125	Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-96
Tabel 2.126	Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2021	II-97
Tabel 2.127	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-98
Tabel 2.128	Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-98
Tabel 2.129	Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir Tahun 2017 – 2021.....	II-98

Tabel 2.130	Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-99
Tabel 2.131	Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021	II-99
Tabel 2.132	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan Tahun 2018 – 2021	II-100
Tabel 2.133	Data aset tanah milik Pemerintah Kota Sawahlunto	II-103
Tabel 2.134	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2017-2021	II-104
Tabel 2.135	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.136	Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.137	Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun 2017-2021	II-106
Tabel 2.138	Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-107
Tabel 2.139	Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017-2021	II-107
Tabel 2.140	Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-107
Tabel 2.141	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.142	Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020-2021	II-108
Tabel 2.143	Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021	II-109
Tabel 2.144	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan Tahun 2017 – 2021	II-109
Tabel 2.145	Status Desa berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-110
Tabel 2.146	Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-110
Tabel 2.147	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 - 2021	II-111
Tabel 2.148	Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 – 2021	II-111
Tabel 2.149	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-113
Tabel 2.150	Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto Tahun 2019-2021..	II-114
Tabel 2.151	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.152	Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021.....	II-117
Tabel 2.153	Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-117
Tabel 2.154	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-118
Tabel 2.155	Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 – 2021	II-118
Tabel 2.156	Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-119
Tabel 2.157	Data Nilai Investasi Tahun 2021.....	II-120
Tabel 2.158	Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021 ...	II-121
Tabel 2.159	Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-122
Tabel 2.160	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2.161	Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.162	Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-123
Tabel 2.163	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tahun 2017-2021	II-124

Tabel 2.164	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2017–2021	II-125
Tabel 2.165	Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2017–2021	II-125
Tabel 2.166	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-125
Tabel 2.167	Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahlunto Tahun 2017–2021	II-126
Tabel 2.168	Prestasi Olahraga Menurut Cabang Tahun 2017 – 2021	II-126
Tabel 2.169	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-127
Tabel 2.170	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.171	Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto	II-128
Tabel 2.172	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.173	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>) Tahun 2017 – 2021	II-130
Tabel 2.174	Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2018	II-130
Tabel 2.175	Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2017-2021.....	II-131
Tabel 2.176	Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-131
Tabel 2.177	Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-132
Tabel 2.178	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2021	II-132
Tabel 2.179	Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-134
Tabel 2.180	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-134
Tabel 2.181	Persentase Kesiapan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.182	SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.183	Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan Tahun 2021	II-135
Tabel 2.184	Produksi dan Konsumsi Ikan Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.185	Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha) Tahun 2017-2021.....	II-136
Tabel 2.186	Indikator Bidang Pariwisata Tahun 2017-2021	II-137
Tabel 2.187	Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk) Tahun 2017-2021	II-137
Tabel 2.188	Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2017-2021	II-138
Tabel 2.189	Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2017 – 2021	II-139
Tabel 2.190	Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi Tahun 2017 – 2021	II-140
Tabel 2.191	Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-141
Tabel 2.192	Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto Tahun 2016- 2021	II-142
Tabel 2.193	Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian Realisasi Tahun 2017 – 2021	II-143
Tabel 2.194	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.195	Jumlah anggota dewan berdasarkan partai politik dan jenis Kelamin	II-147
Tabel 2.196	Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021.....	II-147
Tabel 2.197	Jumlah Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-148
Tabel 2.198	Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja	

	Perencanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 – 2021	II-148
Tabel 2.199	Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-152
Tabel 2.200	Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-152
Tabel 2.201	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto Tahun 2017- 2021	II-153
Tabel 2.202	Persentase IKPAK Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.203	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.204	Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.205	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2017-2021	II-155
Tabel 2.206	Kegiatan Inovasi yang Telah Dilaksanakan Tahun 2020.....	II-155
Tabel 2.207	Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto	II-160
Tabel 2.208	Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020	II-160
Tabel 2.209	Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto	II-167
Tabel 2.210	Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-168
Tabel 2.211	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2017-2021	II-168
Tabel 2.212	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-170
Tabel 2.213	Produktifitas Tenaga kerja Kota Sawahlunto Per Sektor Tahun 2019 – 2021	II-173
Tabel 2.214	Jumlah Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020-2021	II-174
Tabel 2.215	Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021 ...	II-174
Tabel 2.216	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-177
Tabel 2.217	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-178
Tabel 2.218	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2016–2020.....	II-178
Tabel 2.219	Luas Wilayah Industri Tahun 2015-2019.....	II-179
Tabel 2.220	Luas Wilayah	II-179
Tabel 2.221	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2017-2021	II-180
Tabel 2.222	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP Tahun 2017- 2021	II-180
Tabel 2.223	Angka Kriminalitas di Kota Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-181
Tabel 2.224	Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2017–2021	II-183
Tabel 2.225	Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021.....	II-183
Tabel 2.226	Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021.....	II-185
Tabel 2.227	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2017 – 2021	II-188
Tabel 2.228	Rasio Lulusan S1/S2/S3Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-189
Tabel 2.229	Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021.....	II-189
Tabel 2.230	Evaluasi Terhadap Hasil RKPd, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Periode Pelaksanaan : Tahun 2021	II-190
Tabel 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2021	III-2

Tabel 3.2	Perbedaan Struktur APBD antara Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019....	III-9
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto 2020-2022 Dan Proyeksi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2023-2024	III-12
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022 Dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023-2024	III-17
Tabel 3.5	Rekapitulasi Dan Proyeksi Belanja Pemenuhan SPM Kota Sawahlunto	III-18
Tabel 3.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022 Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023-2024	III-25
Tabel 4.1	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-6
Tabel 4.2	Matriks keselarasan Visi dan Misi Nasional, Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto	IV-16
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional Tahun 2023	IV-21
Tabel 4.4	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pendukung Prioritas Nasional.....	IV-21
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-86
Tabel 4.6	Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 Dalam Mendukung Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	IV-87
Tabel 4.7	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023	IV-90
Tabel 4.8	Arah Kebijakan Terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	IV-95
Tabel 5.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Sawahlunto	V-2
Tabel 5.2	Rencana Inovasi Daerah Tahun 2023.....	V-408
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sawahlunto Tahun 2023	VI-3
Tabel 6.3	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Sawahlunto Tahun 2023.....	VI-8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-13
Grafik 2.2	Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2021 (%).....	II-19
Grafik 2.3	Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2021 (%).....	II-21
Grafik 2.4	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021 (%)	II-22
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021.....	II-22
Grafik 2.6	Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2017-2021	II-25
Grafik 2.7	Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-27
Grafik 2.8	Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-28
Grafik 2.9	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2017 – 2021 (Periode Maret).....	II-29
Grafik 2.10	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-31
Grafik 2.11	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021	II-34
Grafik 2.12	Rasio Penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021	II-37
Grafik 2.13	Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2021	II-40
Grafik 2.14	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	II-47
Grafik 2.15	Perbandingan IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2017 – 2021	II-48
Grafik 2.16	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto , Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-49
Grafik 2.17	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Sawahlunto, Provinsi dan Nasional Tahun 2017- 2021	II-50
Grafik 2.18	Persentase Lulusan SD yang Hafiz Alquran juz 30 Tahun 2017 -2021	II-55
Grafik 2.19	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021 (Dalam Rp). II-171	
Grafik 2.20	Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021.....	II-172
Grafik 2.21	Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021	II-176
Grafik 2.22	Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) Tahun 2017 – 2021.....	II-176
Grafik 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2021	III-3
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021.....	III-3
Grafik 3.3	Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2010-2021	III-4
Grafik 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2010-2021	III-5
Grafik 3.5	Indeks Gini Ratio Kota Sawahlunto Tahun 2010-2021	III-6
Grafik 3.6	Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2010-2021	III-6
Grafik 3.7	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2010-2021	III-14
Grafik 3.8	Quality of Spending Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	



	Kota Sawahlunto Tahun 2010-2021	III-16
Grafik 3.9	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Jumlah Total Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2010-2021	III-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD.....	I-3
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I-8
Gambar 2.1	Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) sebagai Warisan Dunia UNESCO tanggal 6 Juli 2019 di Baku, Azerbaijan	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kota Sawahlunto.....	II-3
Gambar 2.3	Peta Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto.....	II-4
Gambar 2.4	Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto.....	II-5
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto.....	II-6
Gambar 2.6	Peta Solum Tanah Kota Sawahlunto.....	II-7
Gambar 2.7	Peta Geologi Kota Sawahlunto.....	II-8
Gambar 2.8	Peta Hidrologi dan Sumber Daya Air Kota Sawahlunto.....	II-9
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan.....	II-10
Gambar 2.10	Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto	II-11
Gambar 2.11	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi.....	II-12
Gambar 2.12	Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto	II-41

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 JULI 2022
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat (22) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Regulasi mengenai RKPD salah satunya didasarkan menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah. Pasal dan ayat tersebut membahas mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah ditingkat pemerintah daerah. Dokumen perencanaan daerah antara lain; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yaitu, pertama pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metoda dan kerangka piker ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama pendekatan holistic-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pada saat ini yang menjadi permasalahan secara Nasional adalah Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 sampai 2021 sangat memberikan dampak terhadap beberapa sektor di semua wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Terkait dengan proses perencanaan pembangunan, dampak dari Covid-19 ini terlihat dari pelaksanaan dan penganggarannya, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui Penyediaan jaring pengaman sosial dan target capaian kinerja pemerintah Kota Sawahlunto.

Dengan melandainya kasus Covid-19 beberapa bulan terakhir Tahun 2022, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam, sehingga pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 mengangkat tema “**PEMULIHAN EKONOMI MELALUI KEUNGGULAN PARIWISATA DAN PRODUK LOKAL**”.

Dalam melaksanakan pembangunan sesuai tema tersebut maka, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui beberapa tahapan dan tata cara sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 berikut :

- perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - penelaahan terhadap sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
 - penelaahan terhadap arah kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
 - penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional;
 - penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2023;
 - perumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023; dan
 - perumusan rencana kerja program dan pendanaan Tahun 2023.
- b. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023, DPRD Kota Sawahlunto telah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Barenlitbangda dengan hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan hasil reses/jaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
- c. Rancangan Awal RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 dibahas bersama dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Januari 2022, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan untuk dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023, Penyusunan Rancangan RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 berdasarkan:
- a. Rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 11 Maret 2022; dan
 - b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKP Provinsi Tahun 2023, RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional Tahun 2023.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023, Musrenbang RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022, bertujuan untuk membahas Rancangan RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang dilaksanakan dalam rangka:
- a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2022.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023, Perumusan rancangan akhir RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan proses penyempurnaan rancangan RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 menjadi rancangan akhir RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023, Rancangan akhir RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perwako RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023.

6. Penetapan Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023, Rancangan Perwako tentang Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Barenlitbangda kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Walikota tentang Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RKPD peraturan/perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
 22. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
 25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

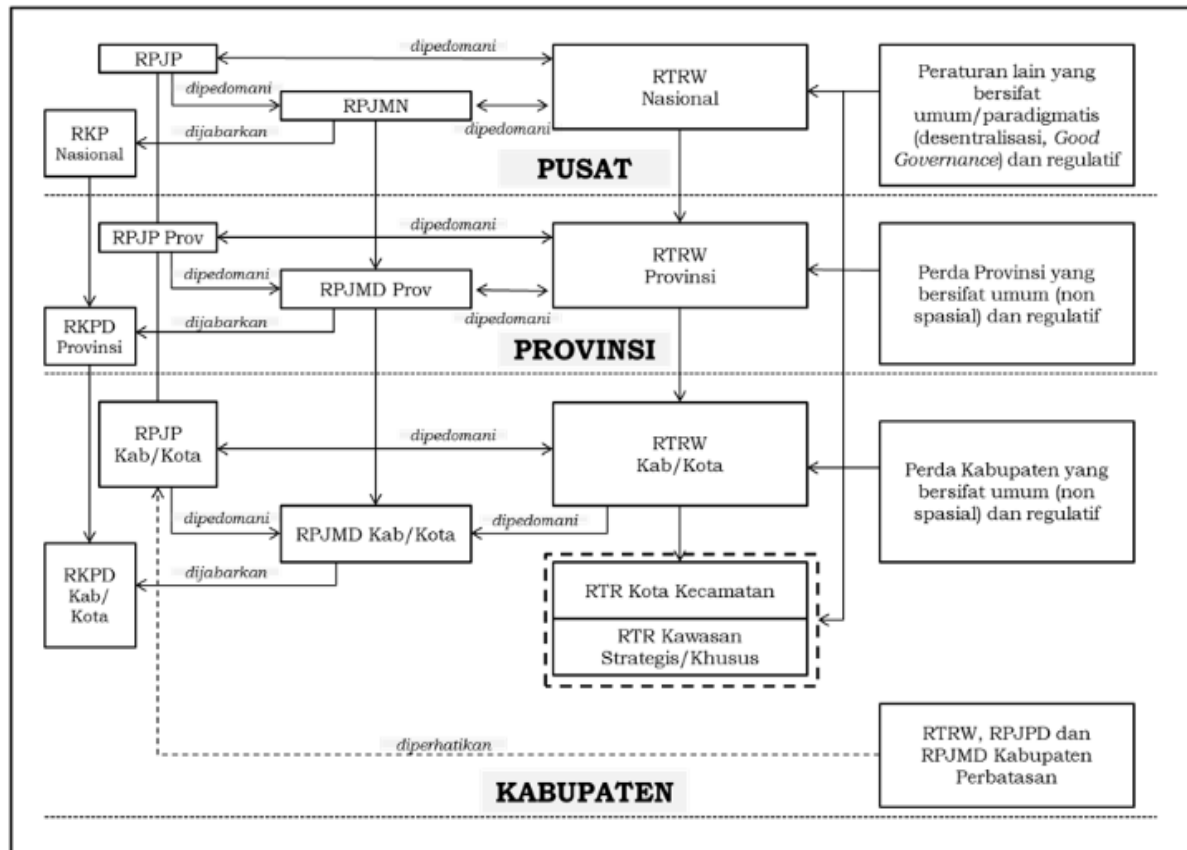
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
28. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunannya, RKPD Kota Sawahlunto 2023 telah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2012-2032, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang, seperti Pandemi Covid-19.

Dokumen RKPD ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024, RPJPD Perubahan Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hubungan Dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber Data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, 2017

1.3.1 Hubungan RKP Kota Sawahlunto dengan RKP Tahun 2023

RKP Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang mempunyai tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi: penguatan system jaminan social, percepatan modernisasi pertanian dan peningkatan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilaksanakan melalui strategi penguatan system kesehatan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter);
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, dilaksanakan melalui strategi perluasan penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi, percepatan revitalisasi pariwisata dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional;
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi percepatan revitalisasi dan hilirisasi industry dan penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), dilaksanakan melalui strategi, mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon dan percepatan transisi energi dengan pengembangan energi ramah lingkungan;

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dilaksanakan melalui strategi, peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan pemerataan infrastruktur digital dan percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas di IKN.

1.3.2 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 wajib mengacu pada Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan tema pembangunan Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”. Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2023 diarahkan kepada pemulihan ekonomi setelah pasca pandemic covid 19. Dalam memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto sangat perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena secara administratif Kota Sawahlunto berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat

1.3.3 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, yang mana Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa jabatan Kepala Daerah Kota Sawahlunto. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Rencana program serta kegiatan prioritas RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

1.3.4 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Dalam penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 memperhatikan RTRW Kota Sawahlunto yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya meliputi: struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya dan pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

1.3.5 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023. Perumusan Renja perangkat daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah:

1. Melakukan penjabaran terhadap Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipatif masyarakat.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
2. Menjadi pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS Tahun 2023 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sawahlunto Tahun 2023.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengatur sistematika penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023, dasar hukum penyusunan RKP Tahun 2023, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 sampai tahun 2022 dan realisasi Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP Tahun 2023, kebijakan ekonomi dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan rencana kerja rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan kinerja tahun 2023 dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak ± 95 km sebelah Timur Laut Kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto dikenal dengan Kota Tambang Batubara, dan hampir menjadi kota mati setelah terhentinya pertambangan batubara, namun saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada Tahun 2021 seuruh stakeholder Pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota tambang menjadi kota wisata. Kesepakatan ini dituangkan kedalam Visi Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu **“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”**. Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto.

Kerja keras Pemerintah Kota Sawahlunto perlahan telah mendapatkan hasil. Pada tanggal 6 Juli 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Ini merupakan langkah besar Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan mimpi menjadi Kota Wisata. Kawasan WTBOS yang ditetapkan meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yang meliputi : Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2. 1

Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) sebagai Warisan Dunia UNESCO tanggal 6 Juli 2019 di Baku, Azerbaijan



Sumber Data: Dinas Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, 2019

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Borobudur, Prambanan, Sangiran, dan Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini sudah dimulai sejak Tahun 2009 yang lalu, namun penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (tentative list) pada 30 Januari 2015 dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku Azerbaijan (<https://whc.unesco.org/en/list/1610>) yang dihadiri sebanyak 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua delegasi Prof. Rosa Surya Putra (Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO) dan Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) serta Deri Asta (Walikota Sawahlunto).

Berdasarkan konsep pembangunan tersebut serta analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan Tahun 2023 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga gambaran umum Kota Sawahlunto dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Sawahlunto secara umum.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Aspek Geografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi koordinat antara 100°41'00" - 100°49'60" Bujur Timur dan 00°33'40" - 00°48'33" Lintang Selatan sedangkan secara administrasi Kota Sawahlunto berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 273.45 kilometer persegi. Secara administrasi terdiri dari empat (4) kecamatan, 10 (sepuluh) kelurahan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km² atau sebesar 12.04 persen dari luas Kota Sawahlunto sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 kilometer persegi atau sekitar 36.35 persen dari luas Kota Sawahlunto untuk lebih jelasnya mengenai jumlah RT, RW, Dusun, dan luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan peta wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar 2.1:

Tabel 2. 1
Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM ²)
(1)	Kecamatan Barangin	32	13	25	88,55
01	Desa Lumindai	-	-	5	20,10
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3	12,95
03	Kel. Saringan	11	5	-	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-	1,00
05	Kel. Durian I	6	2	-	1,17
06	Kel. Durian II	8	4	-	1,25
07	Desa Talago Gunung	-	-	4	17,30
08	Desa Santur	-	-	5	8,69
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3	8,52
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5	16,76
(2)	Kecamatan Lembah Segar	32	14	22	52,58
01	Desa Lunto Barat	-	-	4	5,11
02	Desa Lunto Timur	-	-	4	4,89
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3	9,32
04	Desa Kubang Tengah	-	-	5	20,15
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6	11,56
06	Kel. Pasar	6	3	-	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-	0,16
11	Kel. Air Dingin	4	2	-	0,14
(3)	Kecamatan Silungkang	-	-	21	32,93
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4	6,57
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3	8,43
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6	8,58
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5	5,13
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3	4,22
(4)	Kecamatan Talawi		-	39	99,39

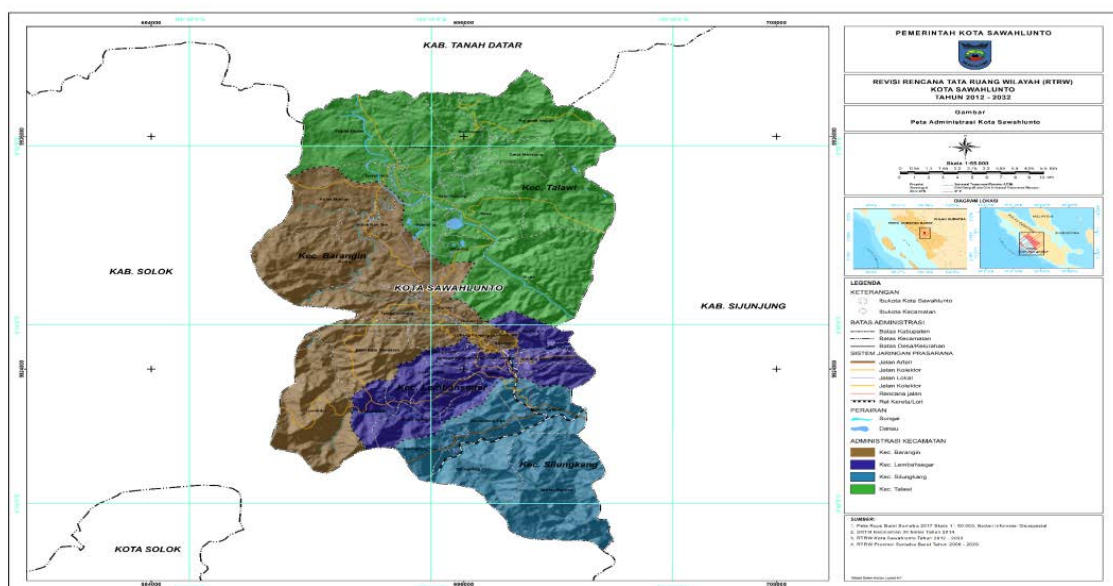
No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM ²)
01	Desa Sikalang	-	-	4	6,59
02	Desa Rantih	-	-	2	6,22
03	Desa Salak	-	-	3	6,60
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3	6,40
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4	10,21
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4	8,76
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3	7,74
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4	15,90
09	Desa Kumbayau	-	-	4	8,36
10	Desa Data Mansiang	-	-	2	6,29
11	Desa Tumpuak Tengah	-	-	6	16,32
Jumlah		64	27	107	273,45

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dari tabel diatas diketahui, bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga dan bahkan didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh Dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekati pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yang mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Untuk kategori Desa, Desa Kubang Tengah yang terletak di Kecamatan Lembah Segar adalah Desa yang terluas dengan Luas 20,15 kilometer persegi. Sedangkan desa terkecil menurut luasannya adalah Desa Silungkang Duo yang terletak di Kecamatan Silungkang dengan Luas Daerah Administratif 4,22 kilometer persegi. Sedangkan untuk Kelurahan Terluas adalah Kelurahan Durian II yang juga terletak di Kecamatan Barangin dengan Luas 1,25 kilometer persegi dan Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Air Dingin yang terletak di Kecamatan Lembah Segar dengan Luas Daerah Administratif hanya 0,14 kilometer persegi.

Gambar 2. 2
Peta Administrasi Kota Sawahlunto



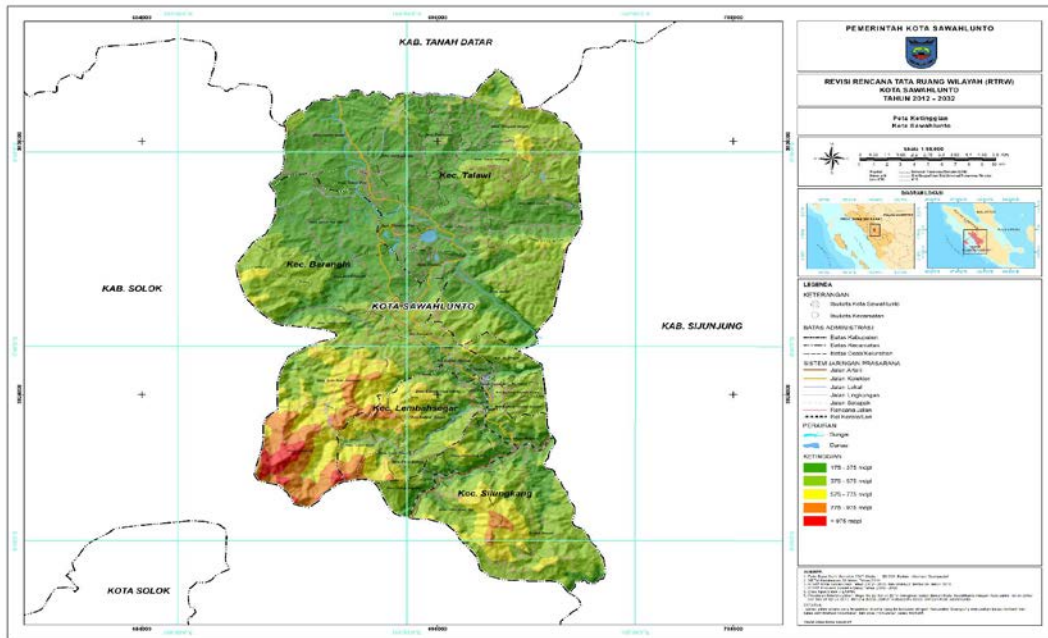
Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Topografi

Keadaan topografi Kota Sawahlunto sebagian besar berada pada perbukitan. Kota Sawahlunto memiliki kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% persen sampai

dengan lebih dari 40 persen. Mayoritas memiliki kelerengn 25 persen sampai dengan 40 persen seluas 6.768,08 hektar, terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto, meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Silungkang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 3
Peta Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Ketinggian wilayah Kota Sawahlunto cukup bervariasi mulai dari 175 meter di atas permukaan laut sampai dengan lebih dari 975 meter di atas permukaan laut. Mayoritas lahan terletak pada ketinggian 175–375 meter di atas permukaan laut dengan luas sebesar 10.392,39 hektar yang terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi, sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 meter di atas permukaan laut terletak pada Kecamatan Barangin. Ketinggian pusat daerah kecamatan di Kota Sawahlunto lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)	Ibu Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santur
Lembah Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Kemiringan Lahan

Kota Sawahlunto memiliki kemiringan **Lahan** dan morfologi yang begitu beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentan lereng 0-8 persen sampai dengan lebih dari 40 persen, mayoritas memiliki kelerengn 25 – 40 persen seluas 6.768,08 Ha. Dominasi Kemiringan lahan tersebut terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Silungkang.

Kemiringan lahan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah

Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18 persen dari luas wilayah.

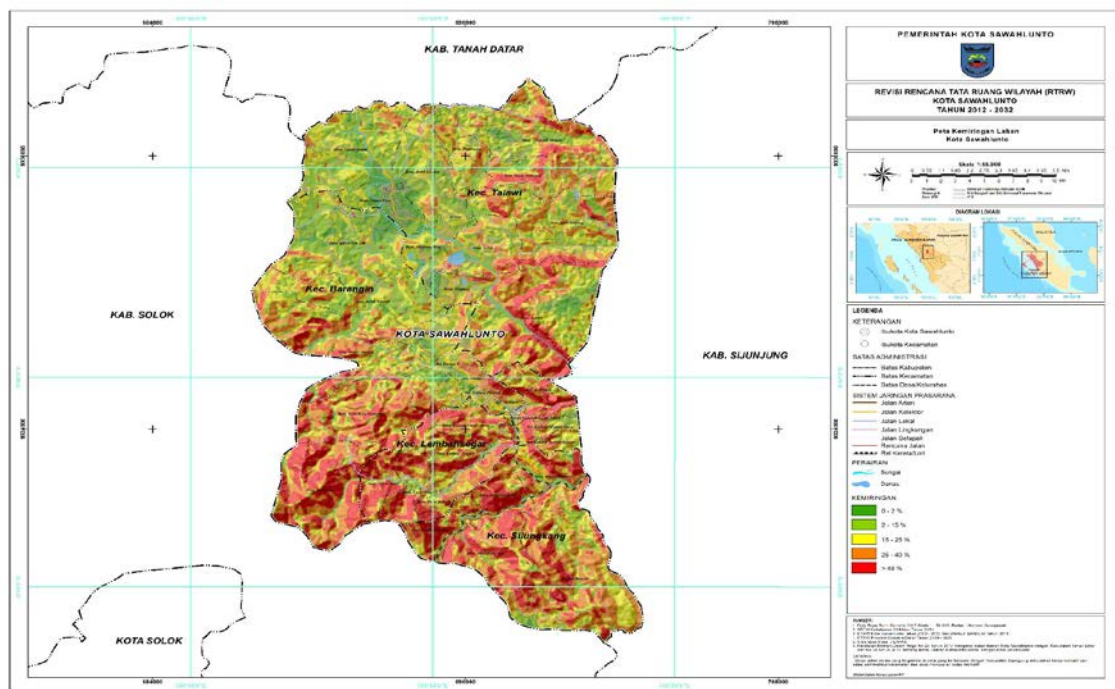
Untuk Kelas kemiringan lahan yang Tinggi 0 – 2 persen berada di Kecamatan Silungkang seluas 29 hektar dan yang cukup datar berada di Kecamatan Talawi Seluas 991 hektar sementara kelas kemiringan lahan besar dari 40 persen berada di kecamatan Silungkang. Selengkapnya Kemiringan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 3
Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto**

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)					Jumlah
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.855
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2.110	5.258
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

**Gambar 2. 3
Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto**

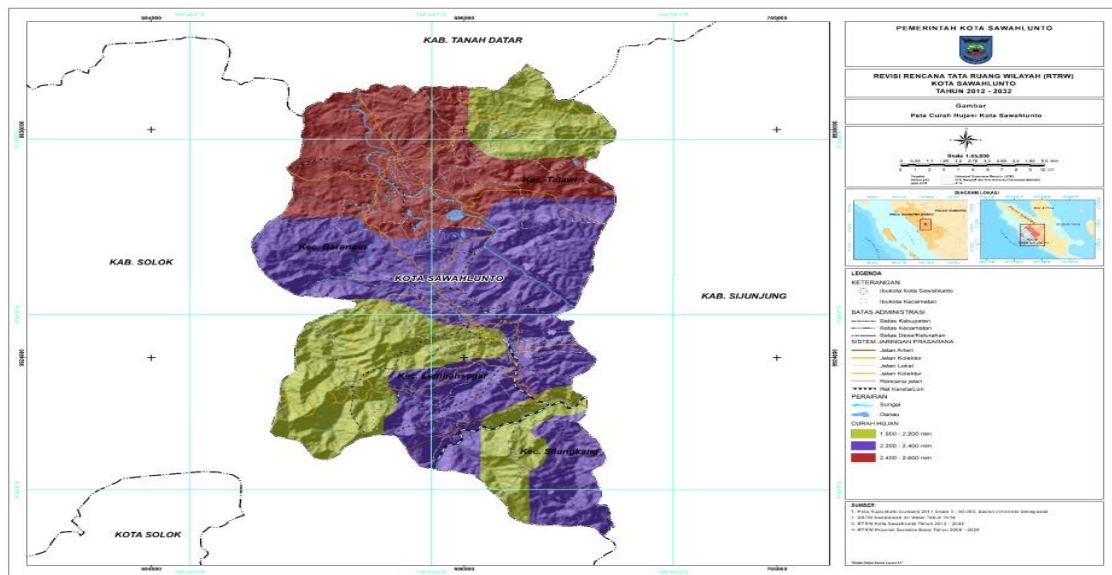


Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Sawahlunto secara umum suhu rata – rata di Sumatera Barat tercatat antara 22 derajat celsius sampai dengan 28 derajat celsius dengan perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 derajat celsius sampai dengan 7 derajat Celsius. Curah hujan di Kota Sawahlunto berkisar antara 2.200 milimeter per tahun sampai dengan 2.400 milimeter per tahun mayoritas terletak di Kecamatan barangin dan Lembah segar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Curah Hujan berikut ini :

Gambar 2. 4
Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Solum Tanah

Untuk struktur rupa bumi dalam Geologi di kenal ada tiga jenis truktur tanah yang dijumpai pada batuan sebagai produk dari gaya yang bekerja pada batuan yaitu :

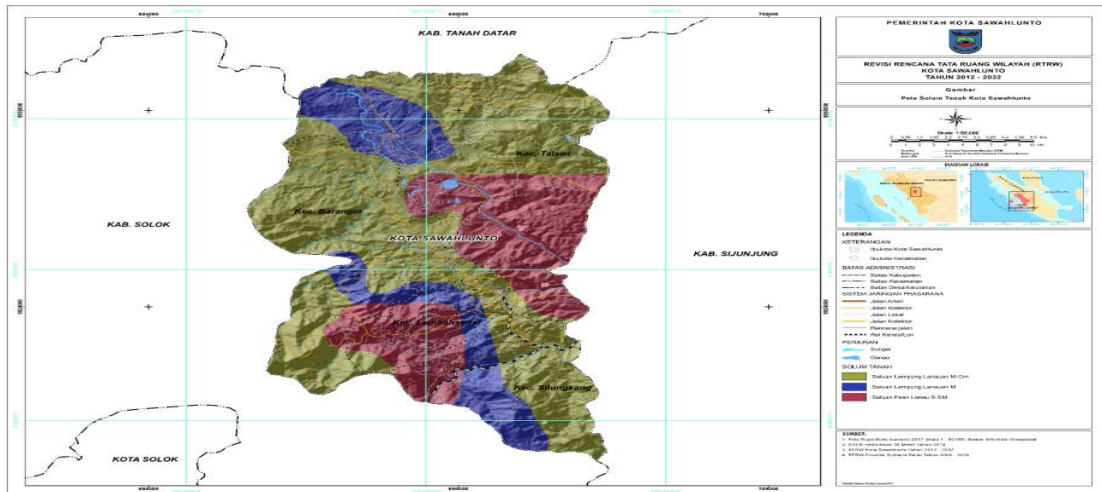
1. **Kekar (Fractures)**
Merupakan jenis struktur batuan yang berbentuk bidang pecah, sifat bidang ini memisahkan batuan menjadi bagian-bagian yang terpisah tetapi tidak mengalami perubahan posisinya.
2. **Perlipatan (Folding)**
Batuan berlapis pada awalnya berbentuk sedimen yang diendapkan dalam lembaran Horizontal datar
3. **Patahan/Sesar (Faulting)**
Fraktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan dimana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Menurut ilmu fisikan sesar terjadi ketika batuan mengalami tekanan dan suhu yang rendah sehingga sifatnya menjadi rapuh.

Solum tanah Kota Sawahlunto ada tiga jenis solum tanah yang berada di Kota ini, diantaranya yaitu:

- a. **Satuan Lempung Lanauan (S-sentimeter)**, merupakan pelapukan dari F. Sawahlunto dan F.Singkarewang yang berupa lempung lanauan (CH) dan lanau lempungan (MH) dengan sisipan tipis pasir, dengan ketebalan berkisar antara 0,5 meter sampai dengan 2 meter. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak sampai dengan sangat lunak, plastisitas sedang sampai dengan tinggi, kandungan lempung 26 persen sampai dengan 62 persen, lanau 25 persen sampai dengan 50 persen, pasir 4 persen sampai dengan 8 persen, berat isi tanah asli 1.301 gram sampai dengan 1.761 gram per sentimeter kubik, kohesi 0,10 kilogram per sentimeter bujursangkar sampai dengan 0,12 kilogram per sentimeter bujursangkar, sudut geser dalam 23.44 derajat sampai dengan 28.04 derajat.
- b. **Satuan Pasir Lanauan (S-sentimeter)** merupakan pelapukan dari F.Sawah tambang yang berupa pasir lanauan (SM) dengan sisipan serpih dan lempung lanauan (CH), dengan ketebalan berkisar antara 1meter sampai dengan 2 meter. Pasir lanauan, lempungan lanauan berwarna coklat, agak lunak, kandungan pasir 59 persen, lanau 29 persen, lempung 12 persen, berat isi tanah asli 1,579 gram per sentimeter kubik, kohesi 0,067 kilogram per sentimeter bujursangkar, sudut geser dalam 24.81 derajat.
- c. **Satuan Lempung Lanauan (M-sentimeter)** merupakan pelapukan dari F. Ranau (tufa) yang berupa lempung lanauan (CH) dengan ketebalan berkisar antara 0,5

meter sampai dengan 2 meter. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak sampai dengan sangat lunak, plastisitas sedang sampai dengan tinggi, kandungan lempung 52 persen, lanau 32 persen, pasir 16 persen, berat isi tanah asli 1,188 gram per sentimeter kubik, kohesi, 0,219 kilogram per sentimeter kubik, sudut geser dalam 25.46 derajat.

Gambar 2. 5
Peta Solum Tanah Kota Sawahlunto



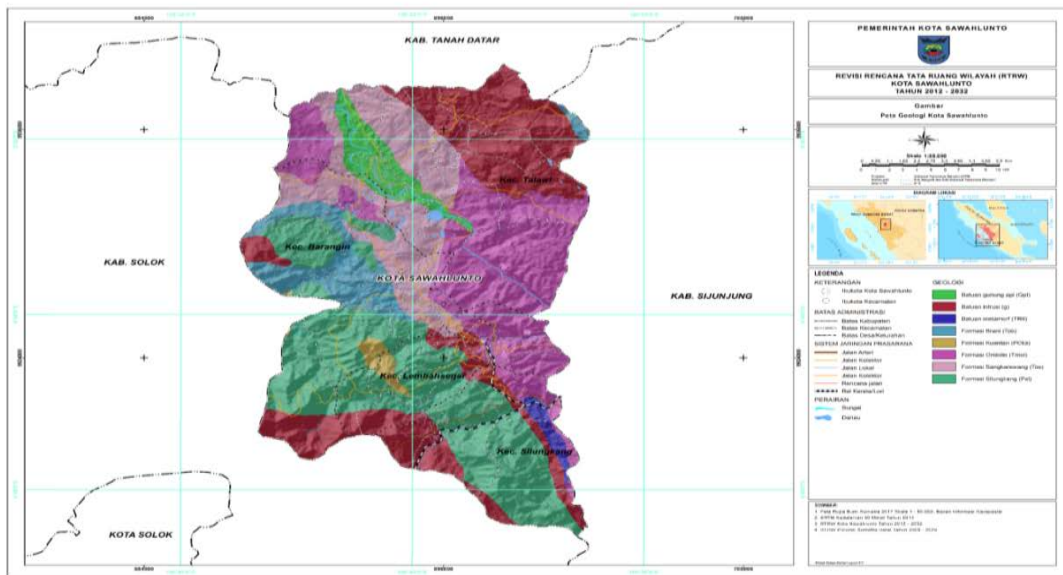
Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Geologi

Kondisi geologi Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tersier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 kilometer dan panjang 47,00 kilometer. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak diatas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 sampai dengan 60 juta tahun yang lalu.

Dalam geologi Kota Sawahlunto terdapat Struktur Geologi (patahan) dimana Aktivitas sesar (patahan) di Kota Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat laut sampai dengan tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat daya jalan raya Sawahlunto sampai dengan Santur. Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah Barat Laut sampai dengan Tenggara dan Timur Laut sampai dengan Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

Gambar 2.6
Peta Geologi Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

a. Batang Ombilin

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 meter kubik per detik.

b. Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

c. Batang Lunto

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

d. Batang Sumpahan

Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

e. Batang Lasi

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan kota Sawahlunto sampai dengan Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Air Tanah

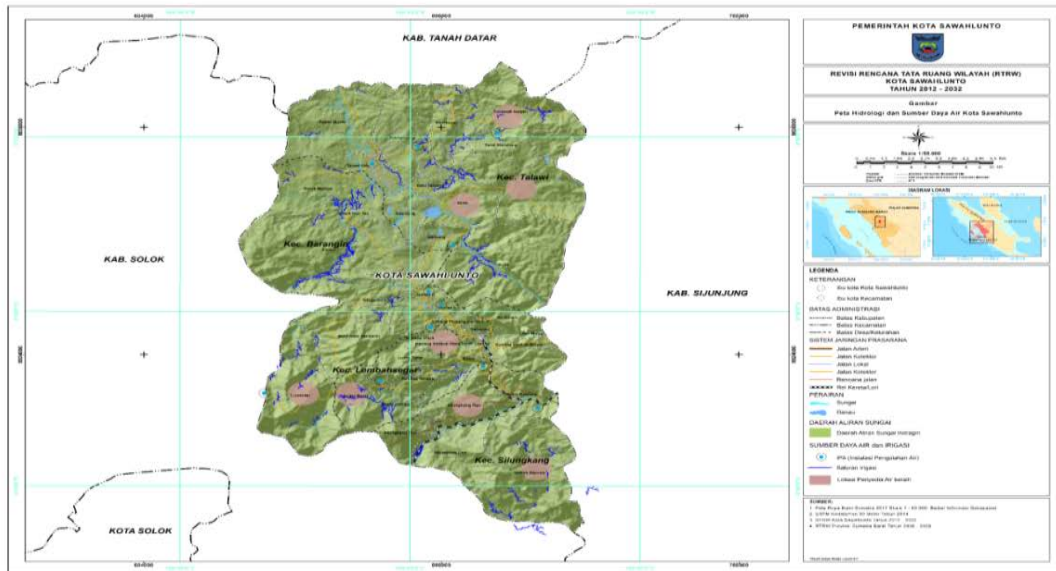
Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 meter sementara celahan batuan pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.

Mata Air

Mata air ini muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 liter per detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besarnya yaitu lebih 5 liter per detik dan mengalir

sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto.

Gambar 2. 7
Peta Hidrologi dan Sumber Daya Air Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

Penggunaan Lahan

Luas Kota Sawahlunto adalah 27.345 hektar. Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar wilayah merupakan kebun campuran yaitu seluas 10.057 hektar. Hutan merupakan lahan dengan luas terbesar kedua dengan luas 4.322 hektar. Selanjutnya, luas semak/alang-alang yaitu 3.909 hektar, kampung/pemukiman 3.068 hektar, sawah 2.094 hektar, dan kantor/Industri seluas 975 hektar. Tabel dibawah ini memperlihatkan luas lahan menurut penggunaannya per kecamatan.

Tabel 2. 4
Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan

No	Penggunaan	Luas per Kecamatan (Ha)				Persentase (%)
		Talawi	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	
1	Permukiman	927	496	732	925	11,26
2	Kantor/ Industri	903	6	12	54	3,57
3	Sawah	1.142	137	176	639	7,66
4	Tegal /Kebun	3	64	160	56	1,03
5	Kebun Campuran	1.609	1.202	2.977	4.273	36,70
6	Perkebunan	1.467	90	167	399	7,76
7	Hutan	3.226	510	368	194	15,98
8	Semak/ Alang-alang	187	754	664	2.279	14,37
9	Kolam/ Empang/ Danau	-	29	-	-	0,11
10	Tanah Terbuka/ Tandus Rusak	392	-	-	23	1,52
11	Taman Rekreasi	34	5	2	13	0,02
12	Lain-lain	49	-	-	-	0,02
	Total	9.939	3.293	5.258	8.855	100

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Kepemilikan lahan di Kota Sawahlunto sebagian besar dimiliki oleh ulayat yaitu sebesar 54,18 persen, sedangkan lahan yang paling sedikit dimiliki oleh Pemerintah/

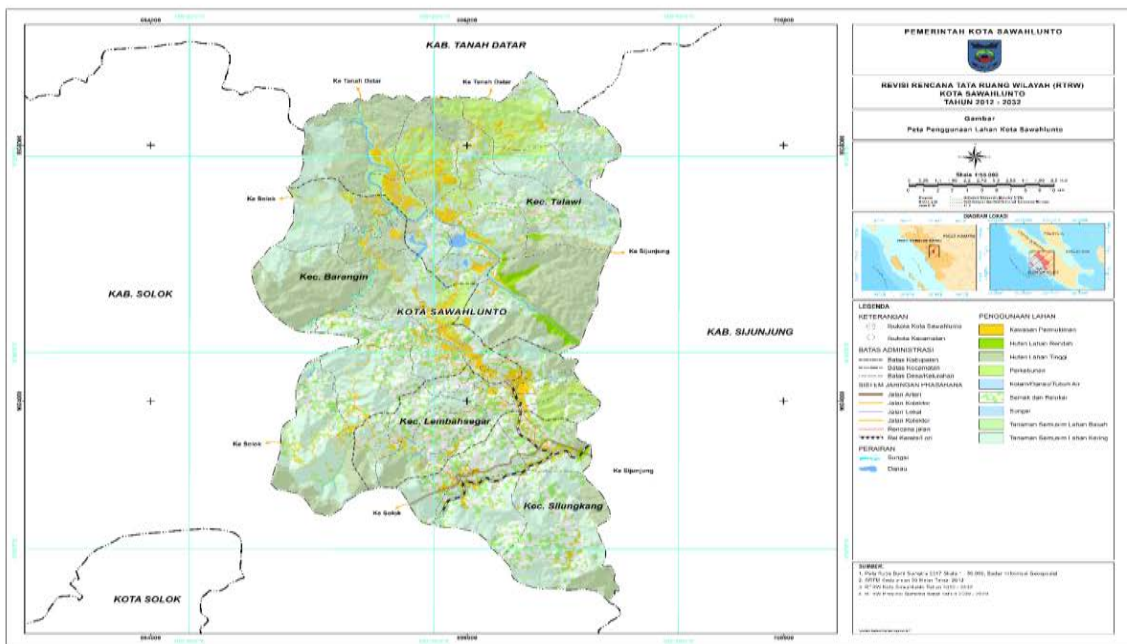
Negara yaitu sebesar 1,48 persen. Luas lahan menurut kepemilikan di Kota Sawahlunto secara lengkap disajikan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 5
Luas Lahan Menurut Kepemilikan**

No	Pemilik	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	PT. BA UPO (KP)	2.950,00	10,79
2	Ulayat	14.816,65	54,18
3	Pemda/ Negara	405,94	1,48
4	PT. KAI	8,40	0,04
5	Pertambangan AIC dan Kampung Swasta Lainnya	1,637,00	5,99
6	Lainnya	7.526,07	27,52
	Jumlah	24.394,06	100

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka,2022

**Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan.**



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

2. Potensi Pengembangan Wilayah

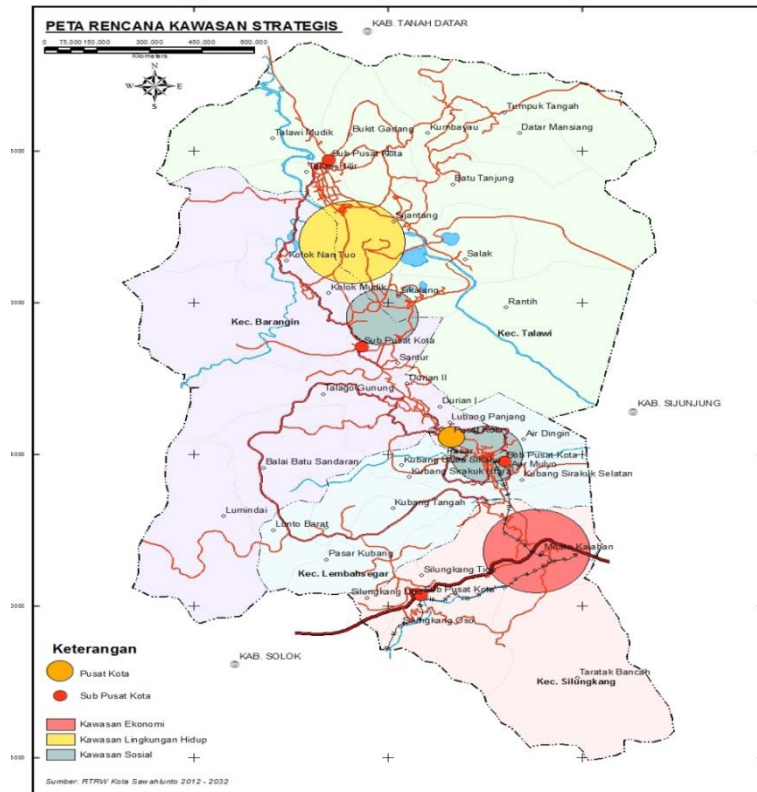
Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut. Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi:

- a. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** ditetapkan di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang. Desa Muara Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.
- b. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** terdiri dari; Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya; dan Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang, kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

- c. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi untuk pengembangan wisata

Berikut disajikan Peta pengembangan Wilayah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Gambar 2.10
Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana pada umumnya terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

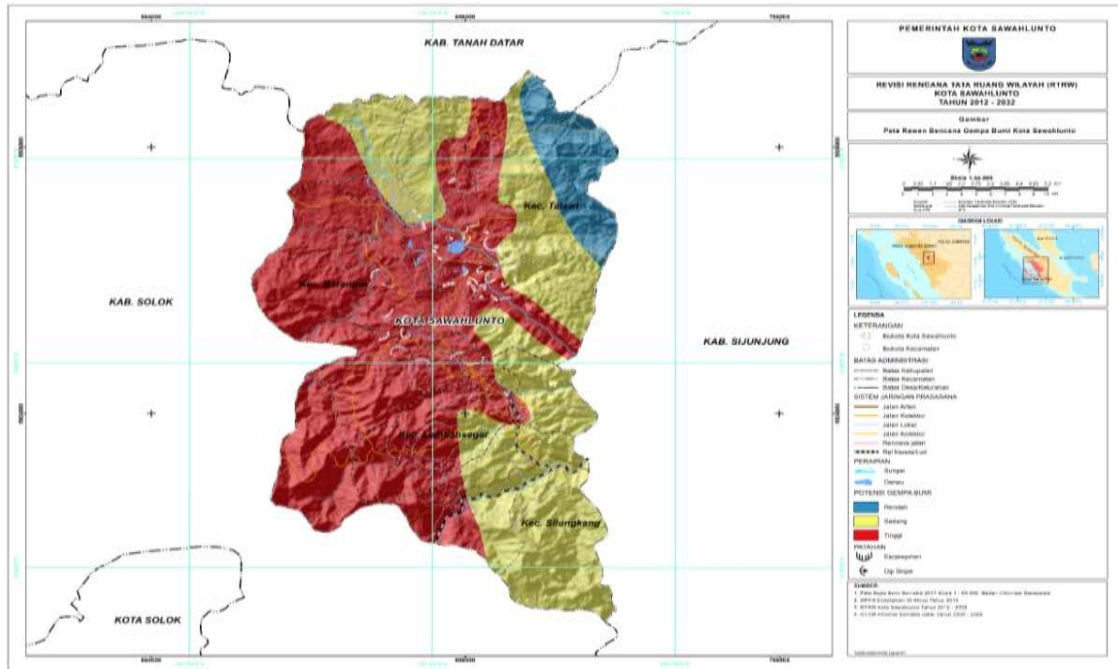
a. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsor dan struktur patahan akan cenderung mejadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spasial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada.

b. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor

Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsor di Kota Sawahlunto cukup bervariasi dari mulai kerawannya rendah, sedang dan tinggi. Kerawanan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ulah manusia, vegetasi, jenis tanah dan kelerengannya. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto yaitu Sedang dengan luas 15.003,77 hektar sedangkan untuk kawasan tingkat kerawanan Sedang sebesar 5.085,38 hektar mayoritas terletak di sebelah utara Kecamatan Barangin dan Talawi.

**Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi**



Sumber Data : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto, 2012-2032

2.1.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kota Sawahlunto tahun 2021, jumlah penduduk Sawahlunto sebanyak 65.687 orang. Terdiri dari 33.055 orang laki-laki dan 32.632 orang perempuan, dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 2.6
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2021**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2019		Jumlah	Jenis Kelamin 2020		Jumlah	Jenis Kelamin 2021		Jumlah
	L	P		L	P		L	P	
0 – 4	3.075	3.008	6.083	2.809	3.011	5.820	3011	2810	5821
5 – 9	3.082	2.897	5.979	2.545	2.624	5.169	2598	2528	5126
10 – 14	2.668	2.712	5.380	2.608	2.837	5.445	2797	2581	5378
15 – 19	2.507	2.344	4.851	2.622	2.867	5.489	2860	2617	5477
20 – 24	2.076	1.945	4.021	2.597	2.721	5.318	2708	2582	5290
25 – 29	2.320	2.361	4.681	2.546	2.620	5.166	2640	2547	5187
30 – 34	2.371	2.330	4.701	2.337	2.422	4.759	2447	2361	4808
35 – 39	2.191	2.304	4.495	2.310	2.396	4.706	2430	2333	4763
40 – 44	2.215	2.239	4.454	2.217	2.260	4.477	2289	2242	4531
45 – 49	2.190	2.069	4.259	2.125	2.138	4.263	2179	2154	4333
50 – 54	1.706	1.750	3.456	1.950	1.907	3.857	1943	1982	3925
55 – 59	1.470	1.616	3.086	1.761	1.753	3.514	1800	1795	3595
60 – 64	1.071	1.243	2.314	1.367	1.246	2.613	1280	1403	2683
65 – 69	904	986	1.890	1.092	942	2.034	986	1140	2126
70 – 74	480	571	1.051	627	743	1.370	545	679	1224
75 +	494	703	1.197	638	500	1.138	542	878	1420
Jumlah	30.820	31.078	61.898	32.151	32.987	65.138	33.055	32.632	65.687

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menggambarkan banyak hal diantaranya tingkat produktivitas serta konsumsi penduduk. Pada kelompok umur 0 sampai dengan 14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan, namun sisi produktivitas masih rendah, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Begitu pula dengan penduduk yang ada pada kelompok

umur diatas 65 tahun, dengan produktivitas yang secara umum mulai menurun, mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Penduduk pada kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun produktivitasnya secara rata-rata akan lebih tinggi dibandingkan konsumsinya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini terhadap kelompok umur lainnya, berpeluang untuk meningkatkan produktivitas di suatu wilayah.

Penduduk Kota Sawahlunto lebih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin penduduk di tahun 2021 adalah sebesar 101,30 artinya secara rata-rata dalam setiap seratus orang penduduk wanita akan terdapat 101 penduduk laki-laki. Ada tiga kecamatan yang rasio jenis kelamin penduduknya diatas 100 yaitu Kecamatan Barangin, Silungkang dan Talawi, seperti tabel berikut:

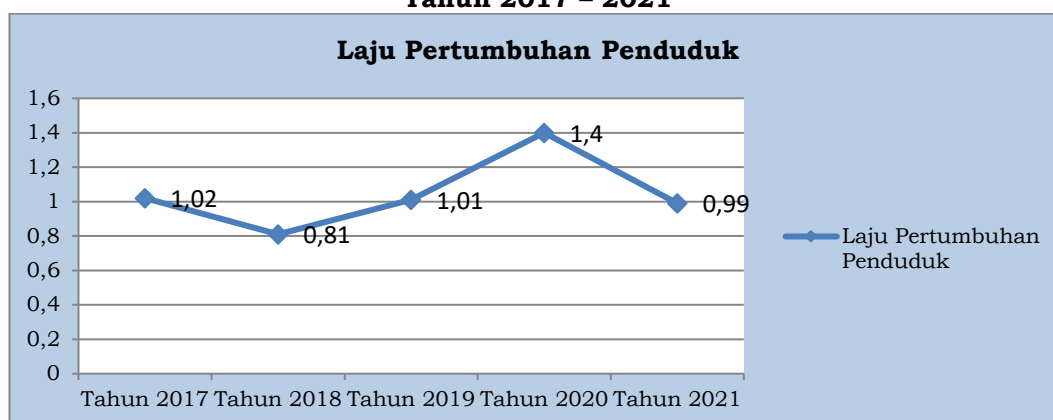
Tabel 2.7
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Kota Sawahlunto Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Lembah Segar	13.410	100,27
Barangin	20.546	99,94
Silungkang	11.486	102,50
Talawi	20.245	102,69
Total	65.687	101,30

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerjakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Garfik.2. 1
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Dari tabel diatas diperoleh laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka positif serta menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada tahun 2019 dan 2020 serta mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,99 persen. Pengaruh Pandemi Covid 19 yang menyebabkan aktifitas anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa dan beberapa tenaga kerja lainnya yang berada di luar sawahlunto pulang kembali ke kota sawahlunto untuk melakukan pembelajaran daring dan bekerja secara WFH. Berdasarkan konsep penduduk

dari statistik jika penduduk sudah menempati suatu daerah minimal 6 bulan, maka akan di hitung sebagai penduduk di daerah tersebut, inilah yang menyebabkan jumlah penduduk di kota sawahlunto tahun 2020 meningkat secara signifikan.

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan pangan, berbagai sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh penambahan dan pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Untuk Kota Sawahlunto, dinamika penduduk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jumlah Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2021

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pergi
Lembah Segar	152	93	238	248
Barangin	270	104	390	420
Silungkang	131	63	199	261
Talawi	281	83	356	377
Total	834	343	1.183	1.306

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Jumlah kelahiran tertinggi terjadi di kecamatan Talawi, tingkat kematian tertinggi di kecamatan Barangin. Penduduk datang dan pergi tertinggi terjadi di kecamatan Barangin. Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata (data seperti tabel dibawah) sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu wilayah di satu sisi dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 9
Kepadatan Penduduk
Tahun 2017 – 2021 (jiwa/Km2)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
	2017	2018	2019	2020	2021
Silungkang	342,54	343,88	344,94	346,46	348,80
Lembah Segar	230,24	237,64	247,98	253,94	255,04
Barangin	210,40	210,88	211,19	229,07	232,03
Talawi	194,99	195,25	195,44	202,16	203,69
Jumlah	224,53	226,36	228,65	238,21	240,22

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dari tabel diatas diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2021 kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Talawi paling luas dibandingkan dengan dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Untuk tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.10
Data Tingkat Pendidikan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tidak/Belum Sekolah	8.955	8.243	17.198	25,61
2	Belum Tamat SD/Sederajat	3.951	3.589	7.540	11,23
3	Tamat SD/Sederajat	5.568	4.950	10.518	15,66
4	SLTP/ Sederajat	4.556	4.214	8.770	13,06
5	SLTA/ Sederajat	8.231	7.732	15.963	23,77
6	Diploma I/II	196	379	575	0,86
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	591	1.015	1.606	2,39
8	Diploma IV/Strata-I	1.676	3.016	4.692	6,99
9	Strata-II	130	159	289	0,43
10	Strata-III	2	1	3	0,0045
SAWAHLUNTO		33.856	33.298	67.154	100,00

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Tingkat pendidikan penduduk di Kota Sawahlunto didominasi oleh penduduk yang tidak/belum sekolah (25,61 persen) dan SLTA/ sederajat (23,77 persen). Selanjutnya diikuti oleh tingkat tamat SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, belum tamat SD/ sederajat dan sisanya perguruan tinggi.

Tabel 2.11
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Belum/Tidak Bekerja	7.414	6.271	13.685	20,38
2	Aparatur/Pejabat Negara	1.528	1.853	3.381	5,03
3	Tenaga Pengajar	59	298	357	0,53
4	Wiraswasta	12.762	1.876	14.638	21,80
5	Pertanian/Peternakan	3.212	335	3.547	5,28
6	Nelayan	1	0	1	0,00
7	Agama dan kepercayaan	22	0	22	0,03
8	Pelajar/mahasiswa	7.842	7.652	15.494	23,07
9	Tenaga kesehatan	20	114	134	0,20
10	Pensiunan	982	589	1.571	2,34
11	Lainnya	14	14.310	14.324	21,33
Kota sawahlunto		33.856	33.298	67.154	100,00

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Jenis pekerjaan penduduk Kota Sawahlunto yang terbesar adalah pelajar/mahasiswa (23,07 persen), berikutnya wiraswasta (21,8 persen), lainnya (21,33 persen) dan belum/ tidak bekerja (20,38 persen). Hal ini menunjukkan 2 kelompok pekerjaan non produktif (pelajar/mahasiswa dan belum/ tidak bekerja) cukup mendominasi senilai 43,45 persen dan di tunjang oleh 9 jenis kelompok pekerjaan lainnya.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu : Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, IPM,

Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan, Rasio Kesenjangan Kemiskinan. Berikut ini disajikan hasil analisis dari indikator tersebut.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB Kota Sawahlunto digunakan 2 pendekatan, yaitu penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*). Kedua pendekatan PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2021 sebesar 2.829.590,03 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,49 persen atau naik sebesar 68.665,85 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2017-2021, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan, kecuali tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh negara. Perkembangan nilai PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan dan kontribusinya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Tahun 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	Nilai (Juta rupiah)	1.260.686,38	1.324.892,68	1.385.965,11	1.353.186,98	1.381.594,42
	Laju Pertumbuhan (%)	5,09	5,09	4,61	-2,37	2,10
	Kontribusi (%)	50,08	49,89	49,56	49,01	48,83
2. Konsumsi LNPRT	Nilai (Juta rupiah)	27.301,05	28.939,63	31.847,73	30.512,49	31.157,79
	Laju Pertumbuhan (%)	4,16	6,00	10,05	-4,19	2,11
	Kontribusi (%)	1,08	1,09	1,14	1,11	1,10
3. Konsumsi Pemerintah	Nilai (Juta rupiah)	411.255,89	429.006,82	448.192,86	403.772,39	408.451,72
	Laju Pertumbuhan (%)	-1,15	4,32	4,47	-9,91	1,16
	Kontribusi (%)	16,34	16,15	16,03	14,62	14,44
4. PMTB	Nilai (Juta rupiah)	620.446,40	642.653,32	676.779,05	652.459,53	680.067,27
	Laju Pertumbuhan (%)	4,51	3,58	5,31	-3,59	4,23
	Kontribusi (%)	24,65	24,20	24,20	23,63	24,03
5. Perubahan Inventori	Nilai (Juta rupiah)	11.310,59	13.135,17	2.064,62	6.310,83	3.241,42
	Laju Pertumbuhan (%)	-	16,13	-84,28	205,67	-48,64
	Kontribusi (%)	0,45	0,49	0,07	0,23	0,11
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	Nilai (Juta rupiah)	186.149,84	216.992,15	251.687,08	314.681,95	325.077,41
	Laju Pertumbuhan (%)	-	16,57	15,99	25,03	3,30
	Kontribusi (%)	7,40	8,17	9,00	11,40	11,49
PDRB	Nilai (Juta rupiah)	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.590,03
	Laju Pertumbuhan (%)	5,74	5,50	5,31	-1,27	2,49
	Kontribusi (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Besarnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan Pengeluaran (*demand side*) ditunjukkan dengan nilai lima komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan. Berikut secara berurutan dari kontribusi nilai pengeluaran yang terbesar : *pertama*, komponen Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai pengeluaran sebesar 1.381.594,42 juta rupiah atau sebesar 48,83 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi *kedua*, komponen PMTB dengan nilai pengeluaran sebesar 680.067,27 juta rupiah atau sebesar 24,03 persen. Selanjutnya

komponen Konsumsi Pemerintah dengan nilai pengeluaran sebesar 408.451,72 juta rupiah atau 14,44 persen. Posisi keempat adalah komponen Net Ekspor Barang dan Jasa dengan nilai sebesar 325.077,41 juta rupiah atau 11,49 persen, dan posisi kelima adalah komponen Konsumsi LNPRT dengan nilai sebesar 31.157,79 juta rupiah atau sebesar 1,10 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Sedangkan komponen Perubahan Inventori mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 3.241,42 juta rupiah, komponen ini memberikan kontribusi paling kecil terhadap PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2021, yakni sebesar 0,11 persen.

Berdasarkan nilai PDRB ADHK Menurut Pengeluaran tersebut, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sawahlunto tahun 2021 disumbangkan oleh pertumbuhan komponen PMTB sebesar 4,23 persen sebagai penyumbang paling tinggi, diikuti oleh komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,30 persen, komponen Konsumsi LNPRT sebesar 2,11 persen dan komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,10 persen serta komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 1,16 persen, sehingga mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 2,49 persen. Sementara komponen Perubahan Inventori mengalami kontraksi sebesar 48,64 persen, namun karena kontribusinya sangat kecil terhadap PDRB ADHK Kota Sawahlunto, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

Sedangkan struktur perekonomian Kota Sawahlunto ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran yang didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Konsumsi Pemerintah, Konsumsi LNPRT, serta Perubahan Inventori.

Tabel 2.13
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2017 – 2021

Komponen Pengeluaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	Nilai (Juta rupiah)	1.751.997,36	1.898.442,83	2.086.707,65	2.064.640,51	2.151.117,44
	Kontribusi (%)	55,35	55,76	56,71	56,46	55,86
2. Konsumsi LNPRT	Nilai (Juta rupiah)	35.699,58	38.809,24	43.438,32	41.996,11	43.545,57
	Kontribusi (%)	1,13	1,14	1,18	1,15	1,13
3. Konsumsi Pemerintah	Nilai (Juta rupiah)	615.491,29	665.450,65	706.753,61	648.449,88	666.201,87
	Kontribusi (%)	19,45	19,55	19,21	17,73	17,30
4. PMTB	Nilai (Juta rupiah)	840.086,55	902.513,32	978.905,63	956.908,69	1.037.551,56
	Kontribusi (%)	26,54	26,51	26,60	26,17	26,94
5. Perubahan Inventori	Nilai (Juta rupiah)	16.047,46	18.942,49	3.003,85	9.504,49	4.878,44
	Kontribusi (%)	0,51	0,56	0,08	0,26	0,13
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	Nilai (Juta rupiah)	-94.107,25	-119.639,69	-138.958,84	-64.908,72	-52.597,13
	Kontribusi (%)	-2,97	-3,51	-3,78	-1,78	-1,37
PDRB	Nilai (Juta rupiah)	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679.850,22	3.656.590,97	3.850.697,74
	Kontribusi (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai pengeluaran terbesar tahun 2021 adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 2.151.117,44 juta rupiah atau sebesar 55,86 persen dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, komponen Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 1.037.551,56 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 26,94 persen. Selanjutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 666.201,87 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 17,30 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dengan nilai sebesar 43.545,57 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 1,13 persen, serta komponen Pengeluaran Perubahan Inventori dengan nilai sebesar 4.878,44 atau berkontribusi sebesar 0,11 persen.

Selain menggunakan pendekatan pengeluaran, capaian perekonomian Kota Sawahlunto juga dapat dilihat dari pendekatan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*). Berikut capaian nilai PDRB ADHK per lapangan usaha, laju pertumbuhan dan kontribusinya pada periode 2017 – 2021 :

Tabel 2.14
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 – 2021

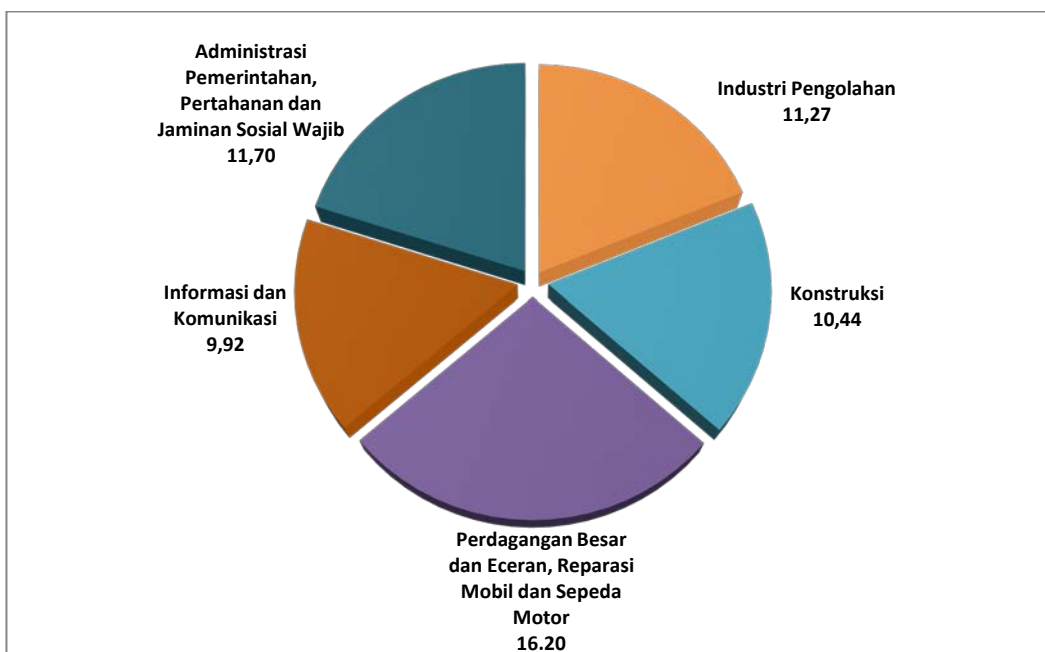
NO	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (Juta rupiah)	207,654.66	211,585.43	217,981.59	219,533.32	235,288.04
		Laju Pertumbuhan (%)	2,20	1,89	3,02	0,71	7,18
		Kontribusi (%)	8.25	7.97	7.79	7.95	8.32
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (Juta rupiah)	161,365.58	169,660.23	188,594.40	205,352.34	147,378.42
		Laju Pertumbuhan (%)	-7,56	5,14	11,16	8,89	-28,23
		Kontribusi (%)	6.41	6.39	6.74	7.44	7.44
3	Industri Pengolahan	Nilai (Juta rupiah)	318,901.57	323,282.84	313,187.26	303,849.59	318,768.95
		Laju Pertumbuhan (%)	5,84	1,37	-3,12	-2,98	4,91
		Kontribusi (%)	12.67	12.17	11.20	11.01	11.27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Juta rupiah)	50,107.79	54,651.56	57,970.38	54,396.42	57,240.64
		Laju Pertumbuhan (%)	10,60	9,07	6,07	-6,17	5,23
		Kontribusi (%)	1.99	2.06	2.07	1.97	2.02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Juta rupiah)	8,942.48	9,642.44	10,326.26	10,294.16	10,845.12
		Laju Pertumbuhan (%)	6,69	7,83	7,09	-0,31	5,35
		Kontribusi (%)	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38
6	Konstruksi	Nilai (Juta rupiah)	266,154.27	283,258.78	302,061.64	286,329.09	295,423.02
		Laju Pertumbuhan (%)	8,45	6,43	6,64	-5,21	3,18
		Kontribusi (%)	10.57	10.67	10.80	10.37	10.44
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Nilai (Juta rupiah)	397,072.49	420,304.73	443,168.27	440,089.10	458,365.75
		Laju Pertumbuhan (%)	7,25	5,85	5,44	-0,69	4,15
		Kontribusi (%)	15.77	15.83	15.85	15.94	16.20
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Juta rupiah)	226,211.88	241,737.27	262,482.13	233,712.10	243,867.65
		Laju Pertumbuhan (%)	8,89	6,86	8,58	-10,96	4,35
		Kontribusi (%)	8.99	9.10	9.39	8.46	8.62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Juta rupiah)	43,407.61	47,111.15	50,854.36	45,715.95	50,005.43
		Laju Pertumbuhan (%)	5,09	8,53	7,95	-10,10	9,38
		Kontribusi (%)	1.72	1.77	1.82	1.66	1.77
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Juta rupiah)	203,091.34	223,761.16	242,274.05	262,117.01	280,666.77
		Laju Pertumbuhan (%)	9,53	10,18	8,27	8,19	7,08
		Kontribusi (%)	8.07	8.43	8.66	9.49	9.92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Juta rupiah)	82,925.58	83,736.97	85,913.53	86,692.88	94,920.34
		Laju Pertumbuhan (%)	1,53	0,98	2,60	0,91	9,49
		Kontribusi (%)	3.29	3.15	3.07	3.14	3.35
12	Real Estat	Nilai (Juta rupiah)	41,576.63	44,662.12	47,283.00	47,346.67	49,685.83
		Laju Pertumbuhan (%)	3,70	7,42	5,87	0,13	4,94
		Kontribusi (%)	1.65	1.68	1.69	1.71	1.76
13	Jasa Perusahaan	Nilai (Juta rupiah)	3,272.14	3,438.59	3,649.43	3,534.17	3,655.43
		Laju Pertumbuhan (%)	6,66	5,09	6,13	-3,16	3,43
		Kontribusi (%)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Juta rupiah)	296,518.09	313,643.29	326,390.70	324,352.15	331,138.48
		Laju Pertumbuhan (%)	5,69	5,78	4,06	-0,62	2,09
		Kontribusi (%)	11.78	11.81	11.67	11.75	11.70
15	Jasa Pendidikan	Nilai (Juta rupiah)	69,651.85	74,013.47	80,700.00	84,258.65	88,342.02
		Laju Pertumbuhan (%)	9,83	6,26	9,03	4,41	4,85
		Kontribusi (%)	2.77	2.79	2.89	3.05	3.12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Juta rupiah)	27,676.73	29,463.29	31,118.42	33,066.55	35,496.93
		Laju Pertumbuhan (%)	9,99	6,46	5,62	6,26	7,35
		Kontribusi (%)	1.10	1.11	1.11	1.20	1.25
17	Jasa Lainnya	Nilai (Juta rupiah)	112,619.48	121,666.45	132,581.00	120,284.03	128,501.21
		Laju Pertumbuhan (%)	8,63	8,03	8,97	-9,28	6,83
		Kontribusi (%)	4.47	4.58	4.74	4.36	4.54
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		Nilai (Juta rupiah)	2,517,150.16	2,655,619.77	2,796,536.45	2,760,924.18	2,829,590.03
		Laju Pertumbuhan (%)	5,74	5,50	5,31	-1,27	2,49
		Kontribusi (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kota Sawahlunto yang tumbuh sebesar 2,49 persen pada tahun 2021 didukung oleh hampir semua lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan yang terkontraksi sebesar 28,23 persen. Lapangan usaha dengan capaian pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Jasa keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 9,49 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,38 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,35 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,18 persen, Informasi dan Komunikasi 7,08 persen.

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Sawahlunto tahun 2021, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah : *pertama*, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 458,365.75 juta rupiah atau sebesar 16,20 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi *kedua*, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 331,138.48 juta rupiah atau sebesar 11,70 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 318,768.95 juta rupiah atau 11,27 persen. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 295,423.02 juta rupiah atau 10,44 persen, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 280,666.77 juta rupiah atau sebesar 9,92 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Berikut disajikan kontribusi lapangan usaha yang dominan berdasarkan PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2021 pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.2
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto
Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2021 (%)



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Besarnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 3.165.214,99 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar 3.850.697,74 juta rupiah pada tahun 2021. Namun terjadi pengecualian pada tahun 2020 sebesar 3.656.590,97 juta rupiah yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.679.850,22 juta rupiah. Peningkatan dan penurunan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto ini sejalan dengan peningkatan dan penurunan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sawahlunto.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto tahun 2021, lima lapangan usaha yang dominan adalah : lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan

usaha Konstruksi serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto dan kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 – 2021

NO	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (Juta rupiah)	303.116,60	312.007,01	325.395,50	326.254,20	345.211,69
		Kontribusi (%)	9,58	9,16	8,84	8,92	8,96
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (Juta rupiah)	163.456,56	171.097,20	198.822,71	176.111,13	146.011,23
		Kontribusi (%)	5,16	5,03	5,40	4,82	3,79
3	Industri Pengolahan	Nilai (Juta rupiah)	404.956,76	415.867,46	392.312,53	395.495,23	432.174,39
		Kontribusi (%)	12,79	12,22	10,66	10,82	11,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Juta rupiah)	58.172,95	63.654,79	72.288,64	68.590,83	72.673,29
		Kontribusi (%)	1,84	1,87	1,96	1,88	1,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Juta rupiah)	11.649,49	12.972,09	14.330,30	14.314,83	15.250,27
		Kontribusi (%)	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40
6	Konstruksi	Nilai (Juta rupiah)	351.905,79	381.627,67	415.400,36	403.286,34	422.983,56
		Kontribusi (%)	11,12	11,21	11,29	11,03	10,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (Juta rupiah)	468.021,05	510.433,17	553.593,38	547.822,20	564.865,95
		Kontribusi (%)	14,79	14,99	15,04	14,98	14,67
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Juta rupiah)	268.809,90	295.266,52	326.940,02	300.659,50	319.458,45
		Kontribusi (%)	8,49	8,67	8,88	8,22	8,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Juta rupiah)	67.261,26	73.951,36	82.406,43	75.255,42	84.016,91
		Kontribusi (%)	2,13	2,17	2,24	2,06	2,18
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Juta rupiah)	213.016,78	241.581,40	274.872,29	295.510,95	322.463,99
		Kontribusi (%)	6,73	7,10	7,47	8,08	8,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Juta rupiah)	111.517,00	115.369,44	121.243,11	124.283,45	139.513,41
		Kontribusi (%)	3,52	3,39	3,39	3,40	3,62
12	Real Estat	Nilai (Juta rupiah)	56.708,73	61.185,70	64.826,29	65.438,51	69.189,40
		Kontribusi (%)	1,79	1,80	1,76	1,79	1,80
13	Jasa Perusahaan	Nilai (Juta rupiah)	4.524,13	4.878,82	5.358,88	5.233,12	5.465,47
		Kontribusi (%)	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Juta rupiah)	377.875,69	404.331,97	443.891,28	476.947,57	500.860,58
		Kontribusi (%)	11,94	11,88	12,06	13,04	13,01
15	Jasa Pendidikan	Nilai (Juta rupiah)	96.302,33	105.336,58	120.753,32	126.737,94	133.095,48
		Kontribusi (%)	3,04	3,09	3,28	3,47	3,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Juta rupiah)	36.125,21	39.255,93	43.368,01	47.200,00	51.988,85
		Kontribusi (%)	1,14	1,15	1,18	1,29	1,35
17	Jasa Lainnya	Nilai (Juta rupiah)	171.794,76	195.701,73	224.047,18	207.449,74	225.474,83
		Kontribusi (%)	5,43	5,75	6,09	5,67	5,86
PDRB ADHB Kota Sawahlunto		Nilai (Juta rupiah)	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679.850,22	3.656.590,97	3.850.697,74
		Kontribusi (%)	100	100	100	100	100

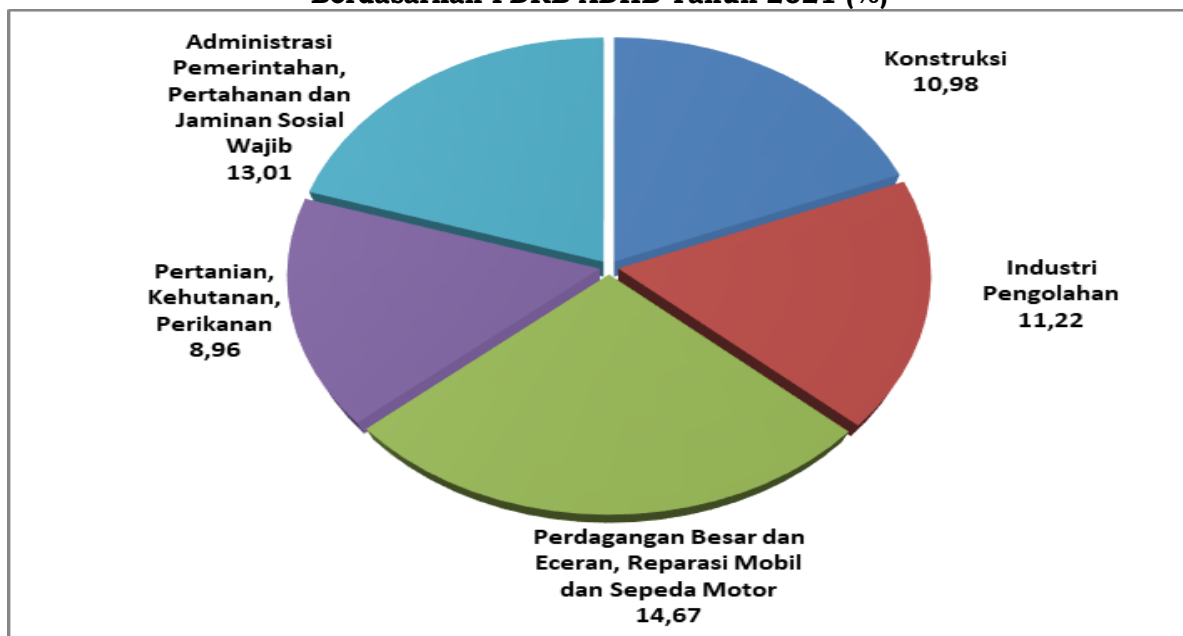
Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2017-2021 didominasi sektor tersier (sektor yang produksinya dalam bentuk jasa) dengan komposisi kisaran 59,14 - 62,75 persen. Hal ini terlihat dari jumlah distribusi PDRB ADHB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan seterusnya. Sebaliknya, sektor primer (sektor yang berkaitan dengan industri ekstraksi sumberdaya alam yang berasal dari tanah) memiliki kontribusi relatif kecil dengan kisaran 12,76 – 14,74

persen, yang terlihat dari kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian). Sedangkan kontribusi sektor sekunder (sektor yang berkaitan dengan manufaktur) memiliki kontribusi kisaran 24,11 – 26, 12 persen, yang terlihat dari kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Konstruksi

Pada tabel di atas juga terlihat bahwa nilai tambah produksi terbesar tahun 2021 terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 564,865.95 juta rupiah atau sebesar 14,67 persen dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 500,860.58 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 13,01 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 432,174.39 juta rupiah atau berkontribusi sebesar 11,22 persen, dan lapangan usaha Konstruksi berkontribusi sebesar 10,98 persen dengan nilai sebesar 422,983.56 juta rupiah, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,96 persen dengan besaran 345,211.69 juta rupiah. Berikut grafik lapangan usaha dominan pada PDRB ADHB Kota Sawahlunto.

Grafik 2.3
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2021 (%)



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

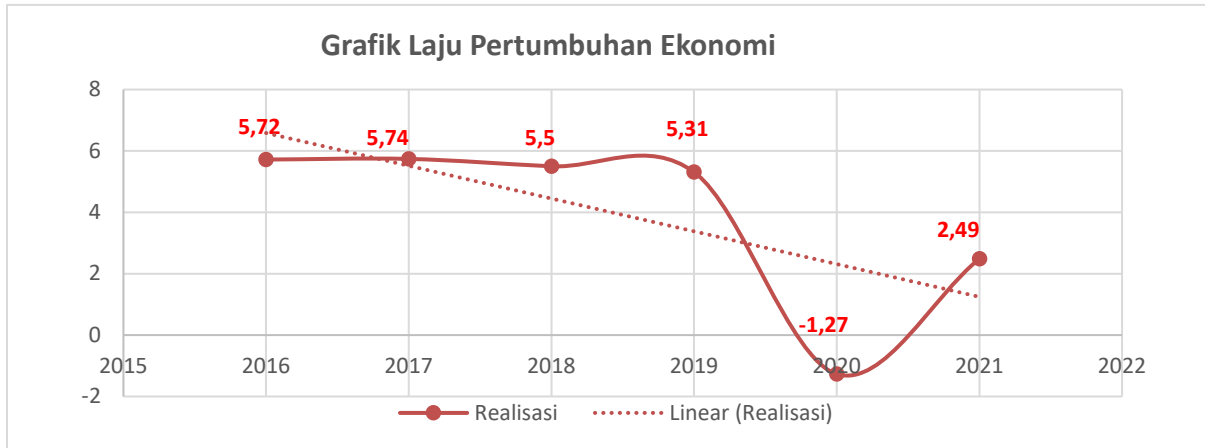
Berdasarkan grafik di atas terdapat kesamaan 2 lapangan usaha dominan pada komposisi PDRB ADHK dan PDRB ADHB, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan 3 lapangan usaha dominan lainnya berbeda.

Secara keseluruhan, PDRB ADHB Kota Sawahlunto tahun 2021 menyumbang sekitar 1,52 persen terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat. Nilai ini merupakan kontribusi terendah kedua terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang (1,44 persen). Kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat disumbangkan oleh Kota Padang sebesar 25,72 persen, sedangkan 74,38 persen sisanya disumbangkan oleh 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang kontribusi antara 1,44 persen hingga 8,42 persen. (Sumber: BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 Hal. 391)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 didukung oleh pertumbuhan semua komponen pengeluaran kecuali komponen Perubahan Inventori yang mengalami kontraksi sebesar 48,64 persen dan pertumbuhan hampir semua lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK Kota Sawahlunto, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 28,23 persen. Hal inilah salah satu penyebab tertekannya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021. Penyebab

lainnya adalah belum optimalnya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang kontribusinya kisaran 50 persen pembentukan PDRB dari *demand side* serta belum optimalnya pertumbuhan 5 lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB dari *supply side*, sehingga ekonomi Kota Sawahlunto tidak tumbuh signifikan sebagaimana daerah lainnya yang tumbuh rata-rata di atas 3 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tumbuh sebesar 2,89 persen dan Kabupaten Padang Pariaman yang tumbuh 2,18 persen (Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022). Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto periode 2017-2021.

Grafik 2.4
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021 (%)

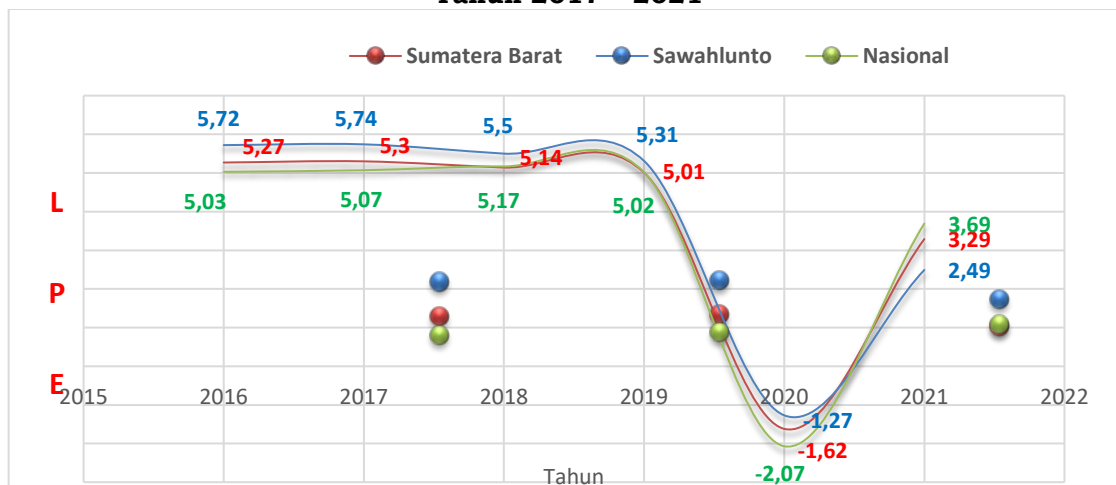


Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Memperhatikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2017 - 2021, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,74 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,27 persen. Minusnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 dikarenakan adanya berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah, perusahaan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home*, himbauan di rumah saja, dll yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi, konsumsi, perdagangan dan investasi Kota Sawahlunto, akibatnya terjadi kontraksi ekonomi. Dapat diambil kesimpulan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berdasarkan trend berada pada kisaran 5 persen.

Ekonomi Kota Sawahlunto selama periode lima tahun terakhir (2017 - 2021) senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional kecuali tahun 2021, hal ini terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Berdasarkan grafik di atas terlihat periode 2017-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sebelum pandemi covid-19 (tahun 2016 – 2019), pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di atas angka 5,30 persen, sedangkan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tumbuh di bawah angka 5,30 persen. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, kondisi ini juga lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto justru berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di posisi terendah kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	5,12	4,89	4,73	-1,85	2,89
Pesisir Selatan	5,41	5,32	4,78	-1,11	3,37
Solok	5,32	5,19	5,04	-1,12	3,32
Sijunjung	5,26	5,07	4,80	-1,10	3,15
Tanah Datar	5,11	5,05	4,98	-1,13	3,30
Padang Pariaman	5,58	5,44	2,40	-10,47	2,18
Agam	5,43	5,23	4,78	-1,38	3,70
Lima Puluh Kota	5,33	5,23	5,06	-1,16	3,33
Pasaman	5,08	4,97	4,80	-0,87	3,39
Solok Selatan	5,15	5,00	4,86	-1,24	3,35
Dharmasraya	5,44	5,28	4,94	-1,39	3,42
Pasaman Barat	5,34	5,21	4,45	-1,34	3,75
Kota					
Padang	6,23	6,06	5,65	-1,86	3,66
Solok	5,76	5,65	5,49	-1,42	3,56
Sawahlunto	5,74	5,50	5,31	-1,27	2,49
Padang Panjang	5,80	5,71	5,56	-1,44	3,46
Bukit Tinggi	6,08	6,00	5,84	-1,74	3,61
Payakumbuh	6,12	6,02	5,89	-1,66	3,58
Pariaman	5,61	5,47	5,30	-1,32	3,53

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pada tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum covid 19 melanda (2017-2019) selalu lebih baik dari pertumbuhan ekonomi kabupaten dan peringkat 6 di tingkat kota. Begitu juga saat Covid 19 melanda tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar -1,27 persen dan mengalami kontraksi terendah diantara kota lainnya di Sumatera Barat. Namun ketika perekonomian mulai membaik pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto jauh tertekan dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan laju pertumbuhan terendah kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini karena terjadinya pertumbuhan negatif yang sangat tinggi disektor pertambangan.

2. Laju Inflasi Kota

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan (BPS: <https://www.bps.go.id>). Cara menghitung laju inflasi dapat dilakukan dengan tiga metode, yakni Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB),

Indeks Harga Konsumen (IHK) dan GNP atau PDB (PDRB) Deflator. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK) dengan rumus :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Deflator PDRB } n - \text{Deflator PDRB } n-1}{\text{Deflator PDRB } n-1} \times 100\%$$

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan PDRB Deflator. Hal ini disebabkan perhitungan inflasi untuk Provinsi Sumatera Barat, hanya pada 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Jika inflasi Kota Sawahlunto merujuk ke salah satu dari kedua kota tersebut, dkuatirkan terjadi bias, karena struktur perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan kedua kota tersebut.

Struktur perekonomian Kota Sawahlunto didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kota Bukittinggi didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, sedangkan Kota Padang didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah merupakan sektor utama perekonomian ketiga kota ini, namun kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB ADHB Kota Bukittinggi lebih dari 30 persen, sedangkan kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Padang hamper sama dengan Kota Sawahlunto, namun lapangan usaha dominan lainnya berbeda. Dengan demikian, jika Kota Sawahlunto merujuk laju inflasi ke Kota Bukittinggi, laju inflasi tersebut akan bias.

Berikut disajikan perkembangan laju inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan PDRB Deflator selama kurun waktu 2017-2021 pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator
Tahun 2017 – 2021

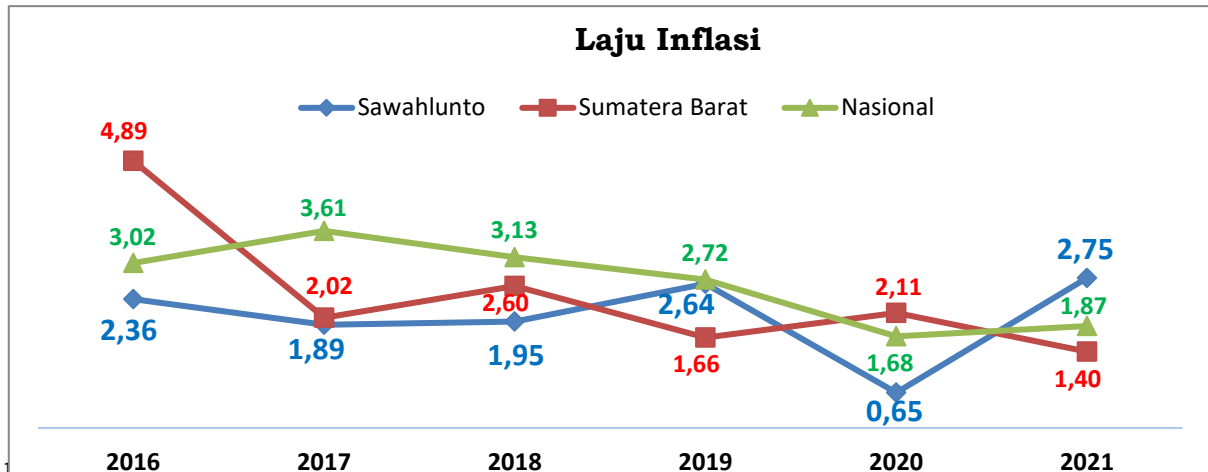
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Kota Sawahlunto	3.165,21	3.404,52	3.679,85	3.656,59	3.850,70
PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2.517,15	2.655,62	2.796,54	2.760,92	2.829,59
PDRB Deflator (Df)	1,26	1,28	1,32	1,32	1,36
Deflator PDRB (n – {n-1})	0,0189	0,0195	0,0264	0,0065	0,0275
Deflator PDRB n-1					
Inflasi Kota Sawahlunto (%)	1,89	1,95	2,64	0,65	2,75

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Laju inflasi Kota Sawahlunto selama tahun 2017–2021 cukup terkendali di bawah 3 persen. Pada saat terjadi wabah Covid 19 tahun 2020, laju inflasi Kota Sawahlunto sangat rendah yaitu 0,65 persen dan seiring mulai bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021, laju inflasi Kota Sawahlunto juga melonjak naik hingga 2,75 persen dan ini merupakan laju Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tinggi dan rendahnya laju inflasi Kota Sawahlunto selama tahun 2017–2021 tentu berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada grafik berikut ini :

Grafik 2.6
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Nasional, kecuali tahun 2019 dan 2021, dimana pada tahun tersebut laju inflasi Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari laju inflasi Kota Sawahlunto. Pada grafik di atas juga terlihat bahwa laju inflasi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 berada di bawah batas bawah dari kisaran target Bank Indonesia sebesar 2 persen, sedangkan laju inflasi Kota Sawahlunto berada di atas target Bank Indonesia (di atas 2 persen). Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2021 menjadi salah satu penyebab tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 2,49 persen dan merupakan kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan terendah kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah (daerah). Semakin besar nilai PDRB Per Kapita suatu wilayah semakin makmur wilayah tersebut. PDRB Per Kapita menunjukkan PDRB Per Satu Orang atau PDRB Per Kepala yang diperoleh dengan cara membagi PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut (Sumber : <https://sirusa.bps.go.id>). Oleh karena itu, meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah (daerah) tersebut.

Berikut disajikan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan variabel pembentuknya pada periode 2017-2021 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Variabel Pembentuknya
Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.165.215	3.404.519	3.679.850	3.656.591	3.850.698
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	7,74	7,56	8,09	-0,63	5,31
Jumlah Penduduk (Jiwa)	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,02	0,81	1,01	4,18	0,99
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	51,55	55,00	58,61	56,29	58,62
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	6,64	6,69	6,56	-3,96	4,14

Sumber data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data diolah)

PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebagai salah satu variabel pembentuk PDRB per kapita Kota Sawahlunto senantiasa meningkat setiap tahunnya selama kurun waktu 2016-2019 atau sebelum pandemi covid-19 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,9 persen. Sedangkan pada tahun 2020 dengan mewabahnya covid 19, PDRB ADHB Kota Sawahlunto “mengalami kontraksi pertumbuhan” sebesar 0,63 persen. Dan pada tahun

2021 setelah wabah Covid 19 melandai, PDRB ADHB Kota Sawahlunto kembali meningkat sebesar 5,31 persen.

Hal yang bertolak belakang dengan kondisi PDRB ADHB terjadi pada jumlah penduduk Kota Sawahlunto, dimana sebelum pandemi covid-19 atau selama periode tahun 2016-2019, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat rata-rata 585 orang per tahun atau tumbuh rata-rata 0,96 persen per tahun dan pada saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat sebanyak 2.614 orang atau tumbuh sebesar 4,18 persen. Diperkirakan selisih kenaikan jumlah penduduk sebesar 3,22 persen dari rata-rata per tahun sebelumnya karena keputusannya para perantau disebabkan usaha/tempat bekerja mereka tutup sebagai dampak pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto kembali seperti sebelum adanya wabah Covid 19 yang tumbuh sebesar 0,99 persen.

Dengan meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto dan jumlah penduduk Kota Sawahlunto menyebabkan PDRB Per Kapita juga mengalami peningkatan dan penurunan. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,63 persen per tahun. Dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2018 mencapai Rp. 55,00 juta per jiwa, meningkat sebesar 6,69 persen dari tahun 2017 dengan nilai Rp. 51,55 juta per jiwa. Nilai PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2019 kembali meningkat dengan capaian Rp. 58,61 juta/jiwa atau meningkat 6,56 persen dari tahun 2018. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar Rp. 58,61 juta rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto turun menjadi Rp. 56,29 juta/jiwa atau turun sebesar 3,96 persen disebabkan turunnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 0,63 persen sebagai dampak dari wabah covid-19 dan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 4,18 persen. Dan tahun 2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp. 58,62 juta/jiwa atau naik sebesar 4,14 persen seiring dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 5,31 persen dan jumlah penduduk meningkat sebesar 0,99 persen.

Berikut perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 pada tabel berikut:

Tabel 2.19
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021(juta/jiwa)

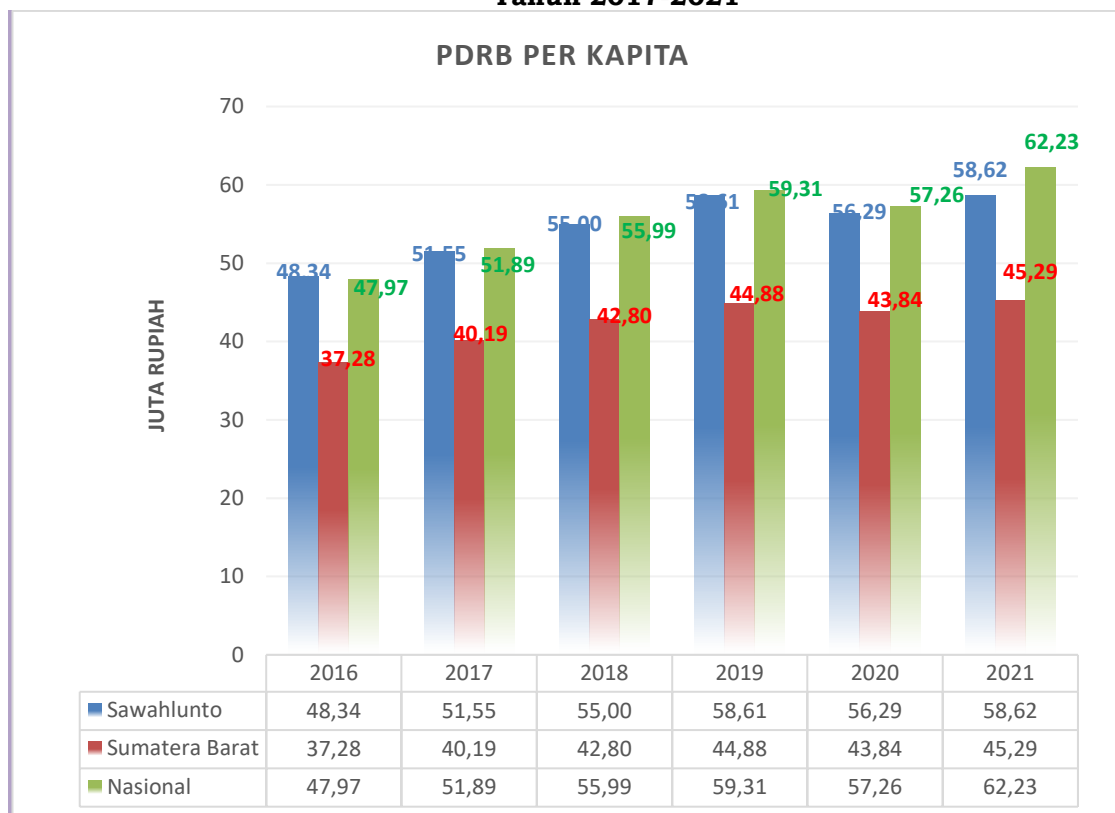
Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	45,12	47,06	50,12	53,19	54,80
Pesisir Selatan	26,39	28,32	30,1	28,04	29,29
Solok	31,96	34,10	36,21	34,62	35,72
Sijunjung	34,45	36,31	38,15	38,99	40,31
Tanah Datar	32,97	35,13	37,53	35,12	36,31
Padang Pariaman	46,32	49,45	50,95	41,72	42,62
Agam	36,83	39,24	41,61	38,62	39,96
Lima Puluh Kota	35,98	38,27	40,61	40,59	41,99
Pasaman	28,30	29,87	31,47	30,02	31,12
Solok Selatan	29,55	30,97	32,25	30,54	31,26
Dharmasraya	38,45	40,14	41,18	44,99	46,52
Pasaman Barat	32,06	33,52	34,32	35,46	36,51
Kota					
Padang	57,27	61,24	65,13	68,51	71,36
Solok	50,57	53,43	56,48	55,29	57,10
Sawahlunto	51,55	55,00	58,61	56,29	58,62
Padang Panjang	56,74	60,35	64,19	61,92	64,09
Bukit Tinggi	58,78	62,21	65,89	71,391	74,24
Payakumbuh	42,78	45,88	49,88	49,08	51,64
Pariaman	49,75	52,68	56,12	53,20	55,18

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Bahkan dengan adanya wabah Covid-19 sejak tahun 2020 yang telah menurunkan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020 dan mulai bangkit lagi pada tahun 2021 tidak merubah posisi Kota Sawahlunto pada peringkat keempat PDRB Per Kapita tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.

Untuk melihat perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.7
Perbandingan PDRB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Memperhatikan grafik di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB Per Kapita Nasional sejalan dan seirama selama kurun waktu tahun 2017-2021, dimana PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah ini konsisten meningkat dari tahun ke tahun pada periode 2017-2019. Dan ketika wabah Covid 19 melanda Indonesia tahun 2020, PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah sama-sama turun. Dan ketika perekonomian Indonesia mulai bangkit pada tahun 2021, PDB (PDRB) Per Kapita ketiga wilayah ini kembali meningkat. Hal ini terlihat dari PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2018 sebesar 55,00 juta rupiah per jiwa yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 51,55 juta rupiah per jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 58,61 juta rupiah per jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 56,29 juta rupiah per jiwa dan pada tahun 2021 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 58,62 juta rupiah per jiwa. Begitu juga dengan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2018 mencapai 42,80 juta rupiah per jiwa dan meningkat dari tahun 2017 dengan nilai sebesar 40,19 juta rupiah per jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 44,88 juta rupiah per jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 43,84 juta rupiah per jiwa dan pada tahun 2021 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 45,29 juta rupiah per jiwa. Demikian

juga dengan PDB Per Kapita Nasional pada tahun 2018 sebesar 55,99 juta rupiah per jiwa yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 51,89 juta rupiah per jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 59,31 juta rupiah per jiwa, kemudian dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 turun menjadi 57,26 juta rupiah per jiwa dan pada tahun 2021 dengan bangkitnya perekonomian meningkat menjadi sebesar 62,23 juta rupiah per jiwa

Sementara dari besar kecilnya nilai PDB (PDRB) Per Kapita selama kurun waktu 2017-2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lebih besar dari PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat namun lebih kecil dari PDB Per Kapita Nasional. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2017 dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 51,55 juta rupiah per jiwa dan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 40,19 juta rupiah per jiwa serta PDB Per Kapita Nasional sebesar 51,89 juta rupiah per jiwa. Begitu juga pada tahun 2021, dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 58,62 juta rupiah per jiwa dan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 45,29 juta rupiah per jiwa serta PDB Per Kapita Nasional sebesar 62,23 juta rupiah per jiwa.

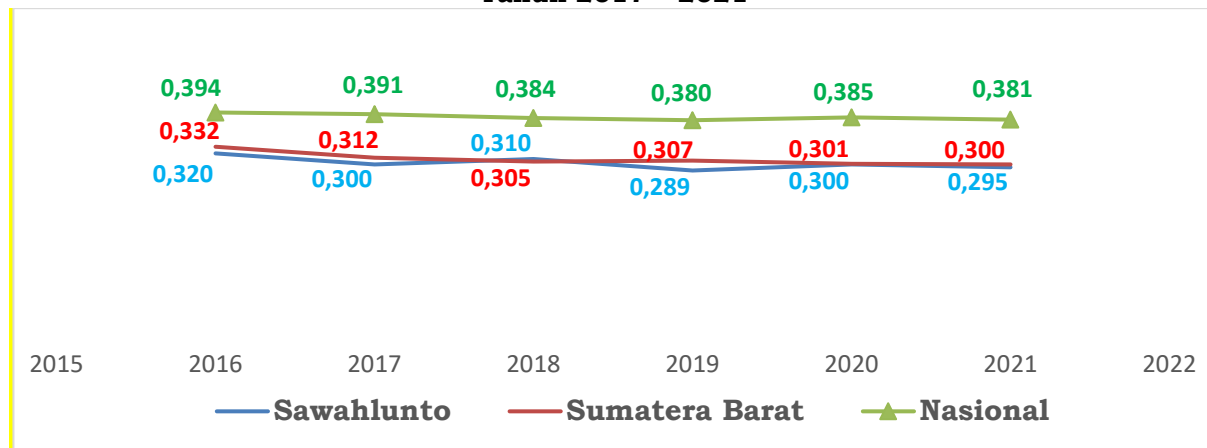
4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini (Koefisien Gini) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Indeks Gini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Jika Indeks Gini mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan (Sumber : <https://sirusa.bps.go.id>). Berikut disajikan klasifikasi berdasarkan nilai Indeks Gini:

1. Indeks Gini < 0,3, tergolong ketimpangan rendah
2. Indeks Gini \geq 0,3 dan \leq 0,5 tergolong ketimpangan moderat atau sedang
3. Indeks Gini > 0,5, tergolong ketimpangan tinggi

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pengeluaran antar masyarakat di Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.8
Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

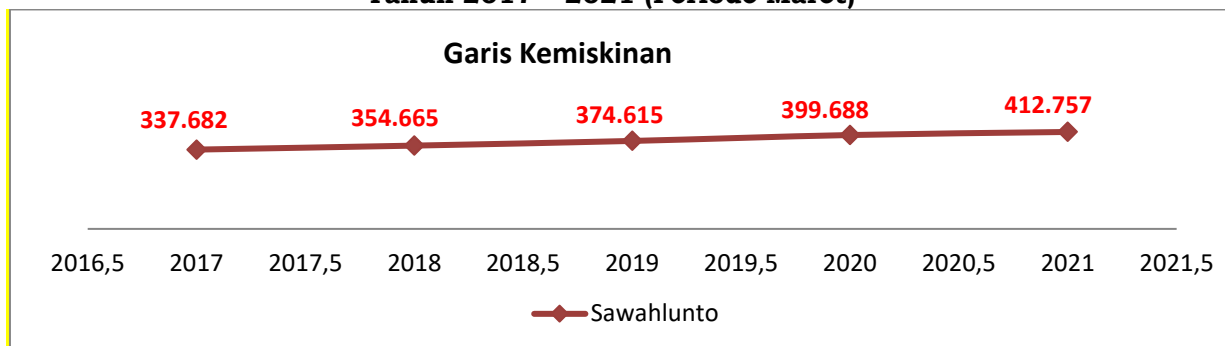
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Sawahlunto pada tahun 2017 sebesar 0,300. Kemudian meningkat menjadi 0,310 pada tahun 2018 dan selanjutnya turun kembali menjadi 0,289 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,300 dan turun lagi menjadi 0,295 pada tahun 2021. Meskipun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,001 persen per tahun.

Berdasarkan klasifikasi nilai Indeks Gini, ketimpangan pengeluaran di Kota Sawahlunto secara umum tergolong “sedang”, kecuali pada tahun 2019 dan tahun 2021 yang tergolong rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali pada tahun 2018 dimana Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di atas Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat.

5. Persentase Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM : merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM : kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya) (Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 212-213). Berikut perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto periode 2017-2021:

Grafik 2.9
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan)
Tahun 2017 – 2021 (Periode Maret)



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada periode Maret tahun 2017 Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada level Rp 337.682,- per kapita per bulan. Garis Kemiskinan ini kemudian meningkat sebesar 5,03 persen pada tahun 2018 periode Maret yang berada pada level Rp 354.665,- per kapita per bulan. Kemudian pada periode Maret tahun 2019 Garis Kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp 374.615,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,62 persen. Garis Kemiskinan ini terus meningkat sampai periode Maret tahun 2021 menjadi Rp 412.757,- per kapita per bulan, meningkat 3,27 persen dibandingkan dengan periode Maret tahun 2020 yang berada pada level Rp 399.688,- per kapita per bulan.

Berdasarkan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto diperoleh jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto dan selanjutnya dapat dihitung Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto dengan cara membandingkan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dan dikalikan dengan 100 persen. Dengan cara yang sama dapat diperoleh Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan dengan cara membandingkan jumlah penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto dengan jumlah penduduk Kota Sawahlunto. Dengan kata lain Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto merupakan komplementer dari Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto atau Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan diperoleh dengan mengurangkan angka 100 persen dengan Persentase Penduduk Miskin. Berikut perkembangan Persentase Penduduk Miskin Dan Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) :

Tabel 2.20
Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
Dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto	(Rp/kapita/bulan)	337.682	354.665	374.615	399.688	412.757
Jumlah Penduduk Miskin Kota Sawahlunto	Jiwa (Orang)	1.230	1.480	1.350	1.360	1.520
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	Jiwa (Orang)	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
Persentase Penduduk Miskin	%	2,01	2,39	2,17	2,16	2,38
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	97,99	97,61	97,83	97,84	97,62

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Persentase penduduk miskin di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto sebesar 2,01 persen, dimana jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto sebanyak 1.230 jiwa. Angka ini meningkat menjadi 2,39 persen seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 1.480 jiwa pada tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto turun menjadi 2,17 persen seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto menjadi 1.350 jiwa. Dan pada tahun 2020 saat terjadi wabah covid 19, jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto terus meningkat menjadi 1.360 jiwa, namun persentase penduduk miskin turun menjadi 2,16 persen, hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk miskin. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin meningkat lagi menjadi 2,38 persen seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi menjadi 1.520 jiwa.

Meskipun persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto tahun 2021 meningkat menjadi 2,38 persen, namun Kota Sawahlunto merupakan Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Masuknya Kota Sawahlunto dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional bukan hanya tahun 2021 saja, berikut posisi Kota Sawahlunto dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional pada beberapa tahun terakhir :

Tabel 2.21
Posisi Kota Sawahlunto Dalam
10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2017-2021

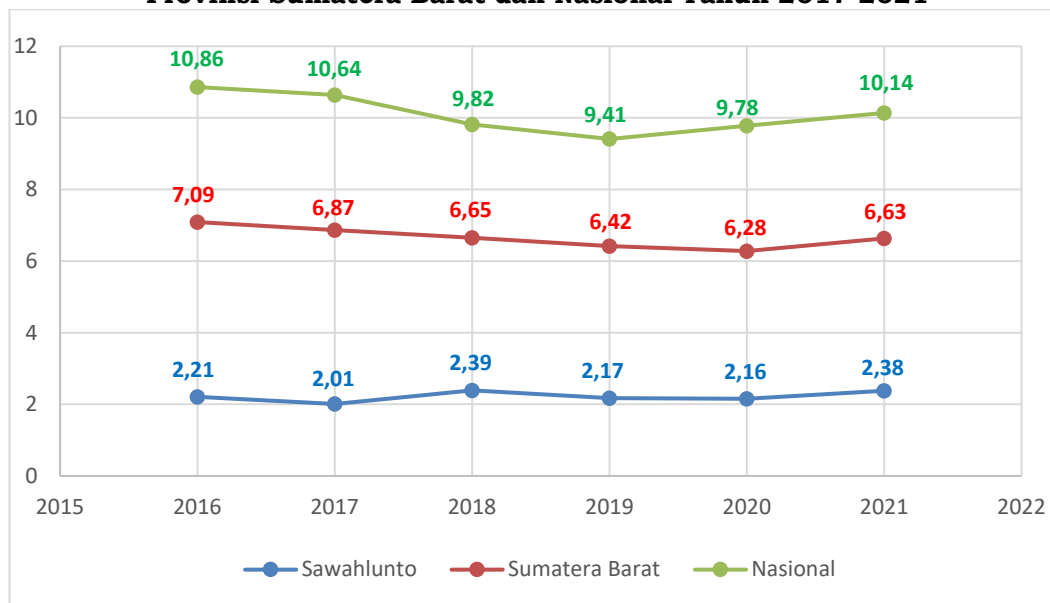
Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1. Kota Tangerang 1,76	1. Kota Tangerang Selatan	1. Kabupaten Badung	1. Kota Sawahlunto 2,38
2. Kota Sawahlunto 2,01	2. Kabupaten Badung	2. Kota Denpasar	2. Kota Tangerang Selatan 2,57
3. Kabupaten Badung 2,06	3. Kota Depok	3. Kota Sawahlunto	3. Kota Depok 2,58
4. Kota Denpasar 2,27	4. Kota Denpasar	4. Kota Tangerang Selatan	4. Kabupaten Badung 2,62
5. Kota Depok 2,34	5. Kota Sawahlunto	5. Kota Depok	5. Kabupaten Bangka Barat 2,75
6. Kota Ternate 2,73	6. Kota Balikpapan	6. Kabupaten Banjar	6. Kota Pekanbaru 2,83
7. Kota Sungai Penuh 2,78	7. Kota Pekanbaru	7. Kota Balikpapan	7. Kota Balikpapan 2,89
8. Kota Balikpapan 2,82	8. Kabupaten Bangka Barat	8. Kota Pekanbaru	8. Kota Denpasar 2,96
9. Kabupaten Banjar 2,96	9. Kabupaten Banjar	9. Kabupaten Bangka Barat	9. Kabupaten Banjar 3,04
10. Kabupaten Bangka Barat 2,98	10. Kota Jakarta Selatan	10. Kota Kota Solok	10. Kota Solok 3,12

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Berfluktuasinya persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto tentu saja seiring dengan Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto pada periode 2017-2021. Pada tahun 2017 Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mencapai 97,99 persen dan menurun pada tahun 2018 menjadi 97,61 persen. Namun pada tahun 2019 dan 2020 meningkat lagi mencapai 97,83 persen dan 97,84 persen dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 97,62 persen.

Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto yang berfluktuasi dari tahun ke tahun ini selama kurun waktu 2017 -2021 sangat jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.10
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Meskipun Persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto jauh di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun Pemerintah Kota Sawahlunto senantiasa melakukan berbagai upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pemberian Beasiswa dari pemerintah daerah, PKH dari Kementerian Sosial RI, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial RI, Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana sharing Rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu dan Program Listrik untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, <https://www.bps.go.id>). Berikut perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) :

Tabel 2.22
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Sawahlunto						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,29	0,27	0,23	0,07	0,33
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,07	0,07	0,05	0,00	0,06
Provinsi Sumatera Barat						
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1	1,04	0,94	0,92	1,04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,23	0,24	0,21	0,20	0,24

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2017-2021 berada pada kisaran 0,07 – 0,33. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Pada dasarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto ini tergolong rendah, hal ini mengandung arti rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto, mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2020 dan 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto adalah yang terendah dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 399).

Sedangkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2017-2021 berada pada kisaran 0,00 – 0,07. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto ini tergolong rendah, hal ini mengandung arti tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kota Sawahlunto ini tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, mengandung makna penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto adalah yang terendah dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 399).

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 2003 yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan di Kota Sawahlunto. Tahun 2004 sampai dengan 2013 memberikan penguatan modal melalui BDC, bantuan bibit kakao, karet dan ternak seperti sapi, kambing, itik dan ayam. Tahun 2009 sampai tahun 2012 dilakukan program sapu bersih kemiskinan dengan memberikan intervensi program kepada keluarga miskin sesuai dengan potensinya. Tahun 2014 dilakukan inovasi kampung produktif yang mana intervensi program kemiskinan berdasarkan potensi desa. Dengan adanya dana desa pada tahun 2019 mulai mengoptimalkan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Sawahlunto. Adapun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut :

BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 6 paket dengan jumlah lulusan 96 peserta, tahun 2020 sebanyak 8 paket dengan jumlah lulusan 128 peserta dan tahun 2021 sebanyak 9 paket dengan jumlah lulusan 144 peserta, tambah 16 peserta pbk;
2. Pelatihan tenaga kerja mandiri (TKM) (APBN), tahun 2019 sebanyak 1 paket dengan lulusan sebanyak 20 orang dan tahun 2020 sebanyak 5 paket dengan jumlah lulusan 100 orang;

3. Pelatihan TKM infrastruktur tahun 2020 dan 2021 sebanyak 3 paket dengan lulusan 120 orang;
4. Menjahit konveksi berbasis masyarakat (PT. Asiako batamindo). Telah menyerap tenaga kerja penjahit sebanyak 252 orang, tersebar di 26 desa/kelurahan;
5. Pendirian UPTD dana bergulir dan telah menyalurkan sebanyak 2,141 Milyar kepada 138 nasabah berupa UMKM perorangan dan koperasi;
6. Bantuan modal usaha bagi pengusaha pemula sebanyak 123 orang sampai dengan tahun 2020;
7. Bantuan gerobak bagi UMKM yaitu sebanyak 63 unit dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021
8. Bantuan satu set payung dagang (1 payung, 1 meja dan 4 kursi) sebanyak 110 unit dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

BIDANG PENDIDIKAN

1. Program bantuan pakaian seragam untuk siswa baru jenjang SD dan SMP negeri dan swasta dengan total penerima sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 6.327 orang yaitu 1 stel pakaian seragam sekolah senin-selasa, 1 stel pakaian pramuka dan 1 (satu) stel songket silungkang;
2. Program reward dan bantuan kuliah bagi mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi dengan akreditasi a dan b negeri dan swasta, dengan total penerima sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 737 orang dengan besaran 2 juta per orang;
3. Program reward dan bantuan kuliah bagi mahasiswa dengan nilai ip diatas 3,1 di perguruan tinggi dengan akreditasi a dan b negeri dan swasta, dengan total penerima sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini sebanyak 2.142 orang mahasiswa dengan besaran 1 juta per orang.

BIDANG KESEHATAN

1. Mempertahankan UHC di kota sawahlunto yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk dengan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat kota sawahlunto dengan 96,7 persen masyarakat kota sawahlunto sudah terjamin pelayanan kesehatannya;
2. Pembentukan 14 rumah atau pos gizi dari 27 desa yang ada di kota sawahlunto untuk menekan dan mengatasi jumlah anak astunting di kota sawahlunto.

BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
 - Tahun 2019, dengan anggaran 8,277 milyar sebanyak 473 rumah
 - Tahun 2020, dengan anggaran 3,440 milyar sebanyak 172 rumah
 - Tahun 2021, dengan anggaran 1,960 milyar sebanyak 98 rumah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan air minum masyarakat (pamsimas) sebesar 1,8 milyar untuk 21 desa/kelurahan;
3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat khusus kotaku tahun 2020 dan 2021 sebesar 10 milyar ;

BIDANG SOSIAL

1. Program bantuan uang transport bagi anak disabilitas 30.000 per hari sebanyak 67 anak dengan total anggaran total 600 juta;
2. Program bantuan permakanan bagi lansia berupa peningkatan gizi yaitu beras, kacang padi, biskuit, susu dan ikan kaleng dengan nilai sebesar Rp.800.000,- perpaket dengan realisasi sebanyak total 570 paket sejak 2019 sampai dengan 2021;
3. Penyaluran bpnt sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 4.013 keluarga penerima manfaat (KPM);
4. Program bantuan asistensi lanjut usia berupa Rp.200.000,- per bulan untuk 399 orang lansia sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
5. Penyaluran bantuan bagi kelompok penerima bantuan kube di kota sawahlunto tahun 2020 sebanyak 50 Kepala Keluarga;
6. Program bantuan penyediaan permakanan dan transportasi bagi anak berkebutuhan khusus sebanyak 214 orang.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Dalam suatu wilayah peranan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki komponen yang penting. Individu berperan dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah. Sehingga dengan membaiknya perekonomian maka akan berdampak pada membaiknya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan).

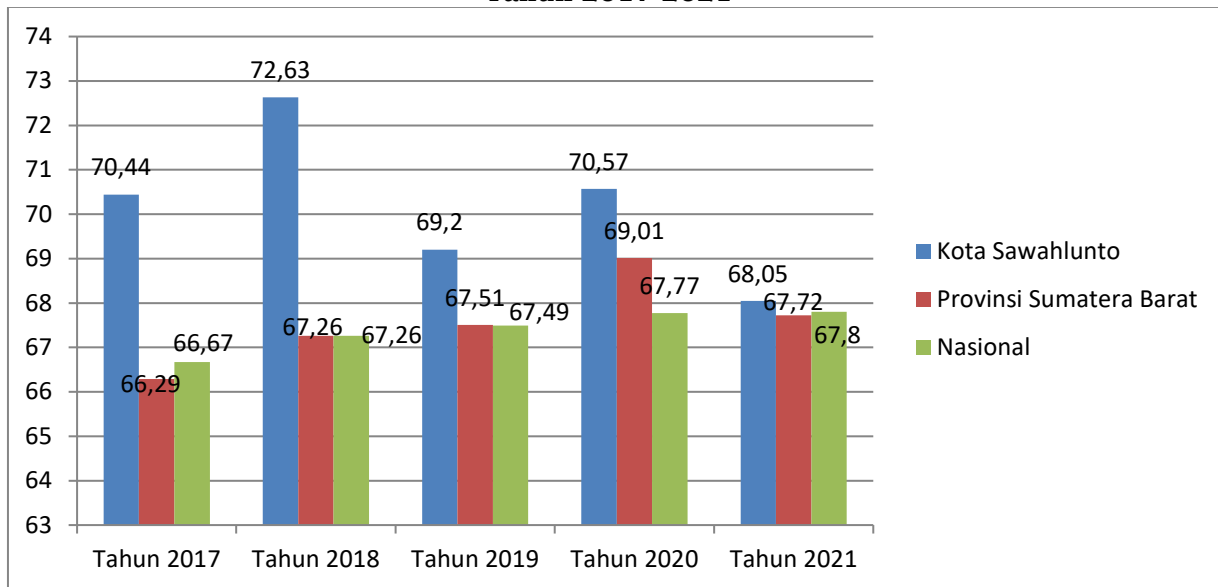
Tabel 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

Indikator	2017			2018			2019			2020			2021		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	17.830	13.219	31.049	18.084	14.087	32.171	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	21.717	22.360	44.077	21.796	22.501	44.297	22.349	22.808	45.157	23.138	23.648	46.786	23.450	23.930	47.380
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas (Jiwa)	21.682	22.279	43.961	21.995	22.461	44.456	22.297	22.756	45.053	24.295	24.409	48.704	25.204	25.287	50.491
TPAK (%)	82,10	59,12	70,44	82,97	62,61	72,63	80,82	57,82	69,20	81,89	59,50	70,57	80,81	55,55	68,05
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,23	59,33	70,63	82,22	62,72	72,37	81,01	57,95	69,36	77,99	57,65	67,80	75,19	52,56	63,86

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2017-2021, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto berfluktuatif dengan TPAK laki-laki lebih besar dari TPAK perempuan. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Sawahlunto adalah sebesar 70,44 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 72,63 persen, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 69,20 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 70,57 persen, dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 68,05 persen. Dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin berkurang proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja.

**Grafik 2.11
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021**



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Apabila dilihat pada tabel di atas perbandingan TPAK Kota Sawahlunto lebih tinggi bila dibandingkan dengan TPAK Provinsi dan TPAK Nasional. Ini menandakan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto lebih banyak dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Lima Tahun terakhir seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	1.062	860	1.922	1.152	699	1.742	1.124	1.008	2.132	1.538	1.171	2.709	1.362	6.95	2.057
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	17.830	13.219	31.049	18.084	14.087	30.320	18.062	13.187	31.249	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,96	6,51	6,19	6,37	4,96	5,75	6,22	7,64	6,82	8,12	8,32	8,20	7,19	5,23	6,38

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan TPT Perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT Laki-laki, pada tahun 2017 yaitu sebanyak 6,19 persen, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,75 persen, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6,82 persen, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 8,20 persen, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6,38 persen. Walaupun TPT ini mengalami penurunan tapi angka ini masih tinggi, hal ini disebabkan oleh dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Yang mana dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang mengurangi

aktivitasnya dan bahkan menghentikan semua operasionalnya seperti sektor yang besar terdampak adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi dan lain-lain. TPT ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan *unpaid leave*.

8. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan/ jasa, menggambarkan *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, menandakan bahwa tenaga kerja semakin produktif. Produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHK (juta rupiah)	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.538,21	2.760.934,37	2.829.590,03
2	Tenaga Kerja (orang)	29.127	30.320	29.117	30.310	30.186
3	Produktivitas Tenaga Kerja (per tenaga kerja/ tahun)	86,419	87,586	96,044	91,089	93,738

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan Tenaga Kerja /Angkatan Kerja yang bekerja. Produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto selama tahun 2017-2019 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2017 adalah sebesar 86,419 juta per tenaga kerja per tahun dan meningkat menjadi 96,044 juta per tenaga kerja tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,089 juta per tenaga kerja, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 93,738.

9. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

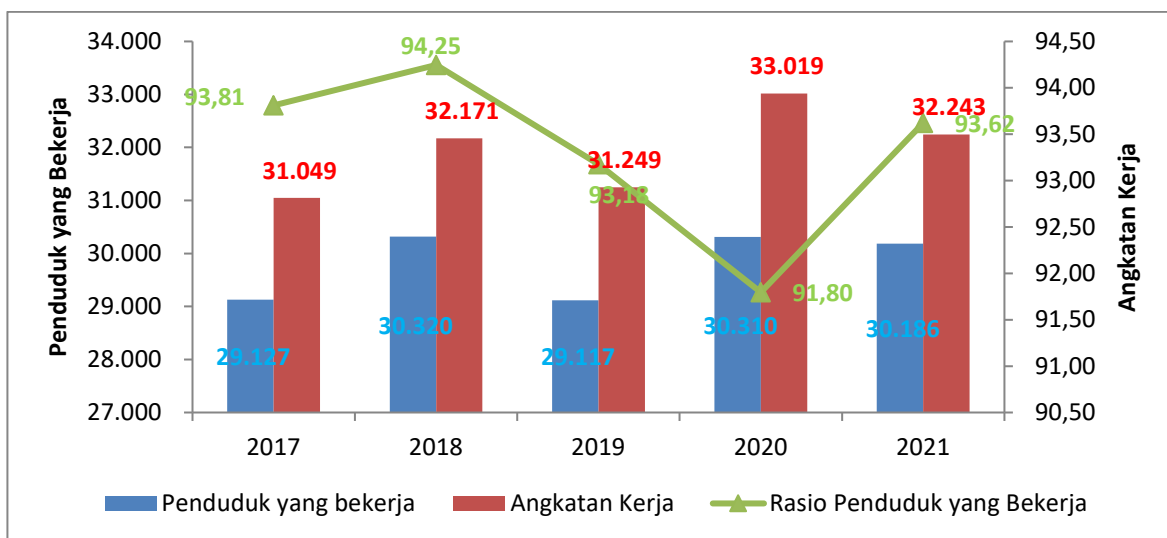
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Perubahan rata-rata per tahun (%)
1	Penduduk yang bekerja :	29.127	30.320	29.117	30.310	30.186	0,95
	- Laki-laki	16.768	16.932	16.938	17.410	17.589	1,21
	- Perempuan	12.359	13.388	12.179	12.900	12.597	0,72
2	Angkatan Kerja :	31.049	32.171	31.249	33.019	32.243	1,02
	- Laki-laki	17.830	18.084	18.062	18.948	18.951	1,56
	- Perempuan	13.219	14.087	13.187	14.071	13.292	0,34
3	Rasio penduduk yang bekerja :	93,81	94,24	93,18	91,80	93,62	-0,04
	- Laki-laki	94,04	93,63	93,78	91,88	92,81	-0,32
	- Perempuan	93,49	95,04	92,36	91,68	94,77	0,37

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto menunjukkan tren fluktuasi. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Sawahlunto tergolong baik, yaitu lebih dari 90 persen. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto pada periode

2017-2021 berfluktuatif dengan rasio laki-laki lebih besar dari rasio perempuan. Pada tahun 2017 rasio penduduk yang bekerja sebesar 93,81 naik menjadi 94,24 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 93,18, pada tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto mengalami penurunan kembali menjadi 91,80, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 93,62. Hal tersebut berarti 93,62 persen dari total angkatan kerja di Kota Sawahlunto telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 6,38 persen yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Pertumbuhan rasio penduduk bekerja di Kota Sawahlunto masih rendah yaitu sebesar 0,37 persen. Untuk pertumbuhan dari rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.12
Rasio Penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

10. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja adalah persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja terhadap angkatan kerja yang digunakan untuk mengukur besarnya angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja maka kesempatan kerja juga akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2017	29.127	44.077	66,08
2	2018	30.320	44.297	68,45
3	2019	29.117	45.157	64,48
4	2020	30.310	46.786	64,78
5	2021	30.186	47.380	63,71

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dilihat dari tabel diatas perkembangan rasio kesempatan kerja di kota Sawahlunto tiga tahun terakhir mengalami penurunan karena pengaruh pandemic covid 19 yang mempengaruhi keuangan perusahaan sehingga terjadi pengurangan pekerja dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan yang ada menjadi kecil.

11. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam memenuhi belanja daerah. Pemerintah Kota Sawahlunto belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah



pusat berupa dana transfer/dana perimbangan. Sebaiknya Pemerintah Kota Sawahlunto berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara menggali, mengembangkan dan mengolah potensi sumber daya yang tersedia agar menjadi kota mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan perkembangannya dari tahun 2017 sampai sekarang seperti pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.28
Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	PENDAPATAN DAERAH	585.505.104.148,37	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.082.758.816,37	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66	51.475.336.271,45
	Pendapatan Pajak Daerah	5.337.144.416	5.546.092.124	5.502.589.718	5.602.920.091,75	5.993.540.247
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.954.648.882	3.533.959.570	3.625.062.865	2.788.116.593	2.731.559.922
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.290.929.176	9.983.800.455	10.832.616.199	12.026.462.819	10.806.423.680
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.500.036.342,37	28.163.280.186,45	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45
2	PENDAPATAN TRANSFER	498.591.642.732	532.012.325.683	521.592.899.623	468.737.786.340	538.147.448.116
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	467.157.187.329	458.504.259.105	495.141.841.033	445.561.937.322	509.421.068.591
	Dana Perimbangan					442.021.996.681
	- Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)					28.949.393.592
	- Dana Bagi Hasil Pajak	9.580.967.835	9.193.493.607	7.929.496.961	8.109.612.714	-
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.583.728.211	9.950.258.859	17.783.593.665	6.705.943.539	-
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	375.131.128.000	374.920.211.899	390.050.861.000	347.498.276.000	341.393.550.000
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	75.861.363.283	64.440.294.740	79.377.889.407	83.248.105.069	71.679.053.089
	Dana Insentif Daerah (DID)					37.290.036.000
	Dana Desa					30.109.035.910
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.500.000.000	50.969.694.000	-	-	-
	- Dana Penyesuaian	7.500.000.000	50.969.694.000	-	-	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.934.455.403	22.538.372.578	26.451.058.590	23.175.849.018	28.726.379.525
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.184.455.403	22.538.372.578	26.451.058.590	23.175.849.018	28.726.379.525
	- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.750.000.000	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.830.702.600	7.224.320.000	59.262.570.000	48.582.691.793,90	8.418.079.800
	Pendapatan Hibah	-	7.224.320.000	8.858.200.000	8.148.061.693	-
	- Pendapatan Hibah Dana BOS					7.553.170.000
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	11.503.247.000	-
	Pendapatan Lainnya	164.841.600	0	50.404.370.000	28.931.383.100,90	-
	Dana Alokasi Desa	23.665.861.000	-	-	-	-
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)					864.909.800
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,77	8,05	8,96	10,32	8,61
	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah (%)	85,16	90,72	81,75	81,26	89,99

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 63.082.758.816,37 terdiri dari Pajak Daerah Rp. 5.337.144.416, Retribusi Daerah Rp. 3.954.648.882, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 10.290.929.176 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 43.500.036.342,37, dan mengalami penurunan menjadi Rp. 51.475.336.271,45 Tahun 2021 dengan rincian Pajak Daerah Rp. 5.993.540.247, Retribusi Daerah Rp. 2.731.559.922, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 10.806.423.680 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 31.943.812.422,45, sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 585.505.104.148,37 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 63.082.758.816,37, Pendapatan Transfer Rp. 498.591.642.732 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 23.830.702.600, dan mengalami kenaikan menjadi Rp. 598.040.864.187,45 Tahun 2021 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Rp. 51.475.336.271,45, Pendapatan Transfer Rp. 538.147.448.116 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 8.418.079.800. Selama tahun 2017-2021 rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 9,34 persen. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata persentase Pendapatan Transfer sebesar 85,77 persen, ini menyatakan bahwa ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap pendapatan transfer sangat tinggi, untuk itu perlu peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada di Kota Sawahlunto.

12. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk kedua kalinya pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016. Dimana sebelumnya juga memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dan secara berturut-turut tahun 2018, 2019, 2020, 2021 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

13. Pola Pangan Harapan

Pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat dari kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Untuk Kota Sawahlunto pola pangan harapan berdasarkan hasil survei seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.29
Pola Pangan Harapan Hasil Survei
Tahun 2018 - 2021

No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun			
		skor PPH			
		2018	2019	2020	2021
1.	Padi-padian	22,7	20,2	20,4	22,5
2.	Umbi-umbian	1,7	0,8	0,9	0,8
3.	Pangan hewani	24	21,5	22,7	22,5
4.	Minyak dan Lemak	5	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,9	1,0	1,0	0,9
6.	Kacang-kacangan	9,9	7,5	6,1	6,8
7.	Gula	0,6	0,9	0,8	0,5
8.	Sayur dan Buah	22,6	29,5	26,7	25,4
9.	Lain-lain	0,0	0,0	0	0
	Total	87,3	86,5	83,7	84,5

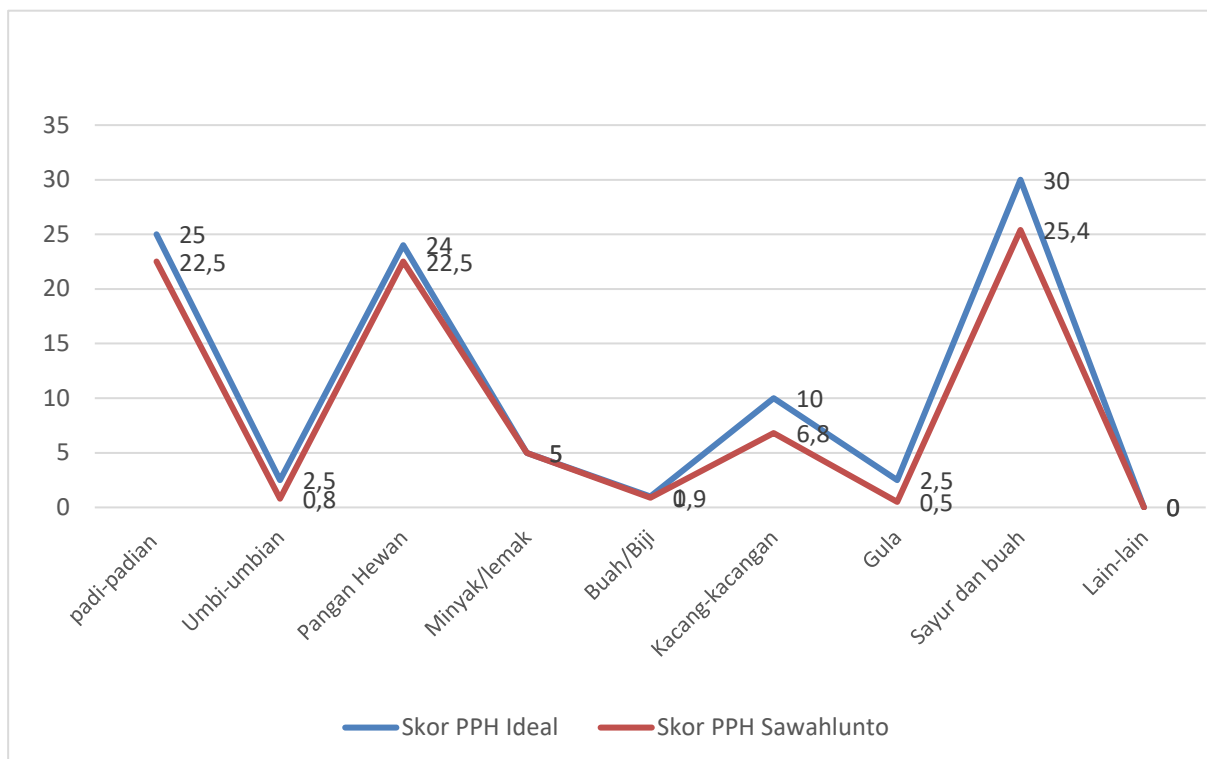
Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2021

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan hasil survey, proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi sangat berpengaruh

terhadap skor PPH suatu daerah, sehingga untuk mencapai skor PPH yang ideal, masyarakat harus dapat melakukan diversifikasi konsumsi pangan, caranya dengan meningkatkan konsumsi pangan khususnya umbi-umbian sumber protein, kacang-kacangan, sayur dan biji melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Selain itu juga telah dilakukan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pengembangan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non beras dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman. Untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang berbasis pangan lokal secara rutin telah diselenggarakan lomba cipta menu berbasis bahan pangan lokal. Lomba cipta menu kedepannya lebih diarahkan pada olahan pangan lokal bernilai komersil sehingga produksinya dapat lebih dikembangkan. Melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang lebih beragam bergizi seimbang sesuai kebutuhan pangan dan aman.

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kg/kap/hari), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Adapun perbandingan untuk penilaian terhadap konsumsi pangan secara kuantitas Kota Sawahlunto dengan skor idealnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2.13
Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal
Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2021



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2022

Dilihat dari grafik diatas untuk kelompok pangan rata-rata berada dibawah kondisi ideal, kecuali pada kelompok pangan minyak/lemak yang mempunyai skor sama dengan idealnya. Ini berarti yang menjadi permasalahan pada konsumsi pangan di Kota Sawahlunto adalah kelompok-kelompok pangan yang jauh dari skor idealnya, sehingga sangat perlu usaha-usaha melalui program/kegiatan dalam meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok pangan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan tersebut adalah :

1. Besar anggota keluarga, semua program masyarakat perlu menekan pentingnya keluarga berencana dalam pembatasan penduduk, sehingga dapat menekan cukup pangan guna menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan keluarga. Bila Keluarga Berencana terwujud maka ketersediaan konsumsi pangan akan

terpenuhi sehingga status gizi akan lebih baik sehinggadapat ditunjukkan untuk meningkatkan skor PPH.

2. Pengetahuan Gizi
3. Tingkat Pendidikan
4. Pengeluaran pangan rumah tangga
5. Pantangan makan

14. Penguatan Cadangan Pangan

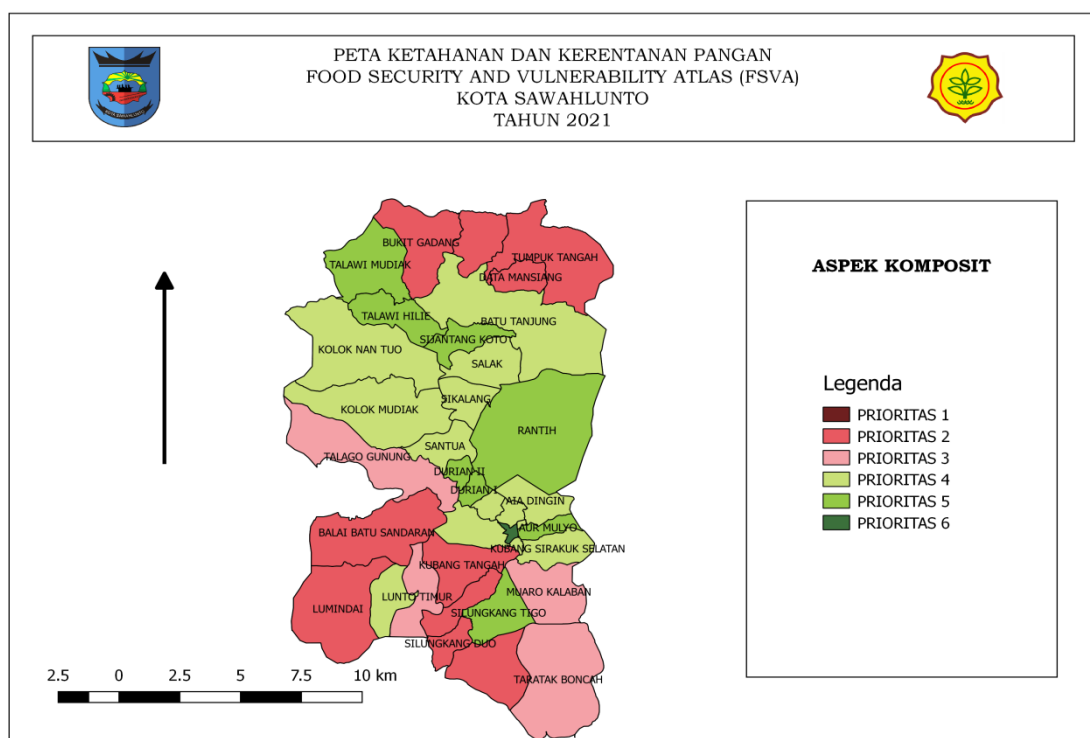
Dalam mewujudkan kedaulatan panga, kemandirian pangan dan ketahanan pangan pemerintah menetapkan cadangan pangan Nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan cadangan pangan Nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Keberadaan cadangan pangan pangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, perhitungan cadangan pangan pemerintah daerah pemerintah daerah menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Untuk Kota Sawahlunto pengadaan cadangan pangan dalam bentuk penguatan cadangan pangan belum dilaksanakan karena kondisi Kota Sawahlunto yang belum memerlukan cadangan pangan untuk kebutuhan pangan di Kota Sawahlunto, namun dalam perencanaan tetap dianggarkan untuk pengadaan cadangan pangan Kota Sawahlunto. Seharusnya Kota Sawahlunto harus menyediakan Cadangan Pangan sebesar 26,48 ton setiap tahun dilihat dari kriteria dan kondisi Kota Sawahlunto dan dalam penggunaan cadangan pangan ini harus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto.

15. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dalam penanganan dan pencegahan daerah rawan pangan perlu adaya sinergisitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di Kota Sawahlunto daerah rawan pangan dapat diklasifikasikan berdasarkan peta di bawah ini:

Gambar 2. 12
Peta Daerah Rawan Pangan Kota Sawahlunto



Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa di kota Sawahlunto tidak ada daerah yang sangat rawan pangan (prioritas 1). Namun berdasarkan prioritas penanganannya daerah-daerah rawan pangan adalah sebagai berikut :

1. Desa- Desa prioritas 2, Desa Silungkang Oso, Silungkang Duo, Desa Lumindai, Desa Balai Batu Sandaran, Desa Pasar Kubang, Desa Kubang Tengah, Desa Bukik Gadang, Desa Kumbayau, Desa Tumpuk Tengah dan Datar Mansiang;
2. Desa- Desa prioritas 3, Desa Taratak Bancah, Desa Muaro Kalaban, Desa Lunto Timur, Desa Talago Gunung;
3. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 4, Desa Luto Barat, Desa Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kelurahan Kubang sirakuk Selatan, Kelurahan Tanah Lapang, Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Saringan, Kelurahan Lubang Panjang, Desa Santur, Desa Kolok Mudik, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Sikalang, Desa Salak dan Desa Batu Tanjung.
4. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 5, Desa Silungkang Tigo Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Kelurahan Durian I dan Durian, Desa Rantih, Desa Sijantang Koto Desa Talawi Hilir dan Desa Talawi mudik.
5. Desa Kelurahan yang termasuk prioritas 6, Kelurahan Pasar

16. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Urusan pertanian meliputi Tanaman pangan, Tanaman hortikultura, Tanaman perkebunan, Peternakan dan Jasa pertanian. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu wilayah terhadap sektor pertanian dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. PDRB sektor pertanian ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah untuk lapangan usaha pertanian. Adapun perkembangan PDRB sektor pertanian dan kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.30
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2017-2021

KONTRIBUSI	2017	2018	2019	2020	2021
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	303.116,60	312.007,01	325.395,01	326.254,20	345.211,69
Total PDRB (juta rupiah)	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74
Kontribusi (%)	9,58	9,16	8,84	8,92	8,96

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dilihat dari tabel diatas Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 tidak begitu berpengaruh pada sektor pertanian terlihat dari kontribusi yang mengalami sedikit peningkatan sebesar 8,92 Tahun 2020 dan 8,96 Tahun 2021, ini berarti tetap terjadi penambahan nilai di sektor pertanian walaupun pengaruh terhadap PDRB kota menurun, dimana sektor pertanian menjadi urutan ke-5 dalam kontribusi terhadap PDRB kota. Meskipun kontribusi sektor pertanian menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian menurun, Penurunan itu karena keadaan lingkungan kita sekarang ini yang masih terdampak akibat adanya Covid19 walaupun dampaknya tidak terlalu banyak.

17. Produksi Sektor Pertanian

Untuk Produksi Sektor Pertanian ini diwakilkan pada perkembangan tanaman padi yang merupakan bahan pangan utama di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31
Produktivitas Padi Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi tanaman padi GKG (Ton)	14.274	16.108	17.926	17.874,45	16.691,71
Luas panen (ha)	2.650,2	3.433,46	3.476	3.461,84	3.002,50
Produktifitas (ton/ha)	5,38	4,69	5,16	5,16	5,56

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2021

Dilihat dari tabel di atas perkembangan produksi dan produktifitas tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2017-2019 rata-rata mengalami peningkatan, namun tahun 2020-2021 sedikit terjadi penurunan dikarenakan menurunnya luas panen, namun tidak mempengaruhi produktifitasnya. Selain luas panen, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah kuantitas dan kualitas benih, pemeliharaan (pupuk, pengendalian hama, dan lainnya), alsintan, sarana dan prasarana produksi. Adapun perkembangan luas sawah menurut jenis pengairan dari tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32
Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan
Tahun 2017-2021

No	Jenis Pengairan	tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Irigasi sederhana (ha)	762	762	762	738,5	693
2.	Sawah Tadah Hujan (ha)	918	918	918	941,5	878

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2021

Dari tabel diatas Tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap sawah tadah hujan dan penurunan terhadap jumlah sawah yang beririgasi sederhana, ini disebabkan karena tahun 2020 dimulai penghitungan secara detail mengenai luas sawah yang ada di Kota Sawahlunto dalam dokumen LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sehingga didapat data untuk tahun 2021 seperti diatas, selain itu juga refofusing anggaran untuk covid ini menyebabkan pengurangan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi sederhana di Kota Sawahlunto.

Untuk itu diharapkan tahun ke depannya kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan dari kegiatan lainnya, apalagi masa pandemic ini yang bisa berakibat terhadap kehidupan masyarakat terutama petani.

18. Produksi Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan. Tanaman perkebunan yang dominan di Kota Sawahlunto adalah tanaman karet dan kakao. Perkebunan karet dan kakao menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kota Sawahlunto terutama pada daerah yang tidak mempunyai lahan persawahan.

a. Perkebunan karet

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Perkembangan perkebunan karet di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33
Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas areal tanam (ha)	2.457,11	2.451,86	2.446,23	2.420,23	2.389,23
Produksi (ton)	1.240,85	1.262,63	1.540,16	2.012,87	2.223,87
Produktivitas (ton/ha)	0,51	0,51	0,63	0,83	0,93

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022(data olahan)

Dapat dilihat perkembangan perkebunan karet dari Tahun 2017-2021 relatif mengalami peningkatan baik produksi maupun produktifitas. Secara keseluruhan luas areal tanam mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan yang mana berbanding terbalik dengan jumlah produksi setiap tahunnya. Dari luas areal tanam karet yang ada, perlu revitalisasi terhadap tanaman karet dalam menambah luas area tanam untuk karet. Tahun 2021 belum menghasilkan, sehingga perlu perhatian lebih dimulai dari pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit. Pada pemeliharaan ini sangat diperlukan perhatian dari penyuluh pertanian dalam membimbing petani dalam rangka meningkatkan produksi tanaman karet. Selain itu secara teknis yang mempengaruhi produktivitas karet adalah mutu

bahan tanam (benih), pemeliharaan tanaman, proses panen, Pemeliharaan tanaman seperti Sanitasi Lahan dan Pemupukan Tanaman sesuai Anjuran Budidaya Tanaman Karet.

b. Perkebunan Kakao

Selain tanaman karet, tanaman kakao juga merupakan salah satu tanaman perkebunan yang utama di Kota Sawahlunto. Perkebunan kakao yang ada masih perkebunan rakyat, adapun perkembangan perkebunan kakao dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.34
Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas areal tanam (ha)	596,35	597,52	596,22	550,46	523,15
Produksi (ton)	519,74	542,01	565,73	566,11	572,44
Produktivitas (ton/ha)	0,87	1,02	1,08	1,14	1,09

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022(data olahan)

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan tanaman kakao dari Tahun 2017-2021, dari luas areal tanam untuk perkebunan kakao di Kota Sawahlunto cenderung mengalami penurunan, namun untuk produksi dan produktifitas tanaman kakao terus mengalami peningkatan. Program revitalisasi tanaman kakao dengan melakukan sambung pucuk dan sambung samping serta memberikan bantuan pupuk kepada petani kakao pada tahun 2021 dengan total 3000 kilogram pupuk untuk kurang lebih 6000 batang kakao. Revitalisasi dan optimalisasi terhadap tanaman kakao sangat dan pemupukan dilaksanakan di empat kecamatan dalam mendukung produksi tanaman kakao. Untuk memberi kemudahan dalam meningkatkan produksi melalui Gerakan masal Pemangkasan dan Pemupukan Tanaman Kakao. Upaya peningkatan produksi dan produktifitas masih perlu dilakukan, karena idealnya produktivitas kakao antara 1,5 sampai dengan 2 ton per hektar, meskipun secara target sudah melebihi target yang ditetapkan. Ini berarti produktivitas kakao Sawahlunto masih jauh dari standar, untuk itu sangat perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kakao ini.

19. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap, aktivitas perekonomian di Kota Sawahlunto. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB di Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2017-2021

KONTRIBUSI	2017	2018	2019	2020	2021
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	468.021,05	510.433,17	553.593,38	547.822,20	564.865,95
Total PDRB (juta rupiah)	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74
Kontribusi (%)	14,79	14,99	15,05	14,98	14,67

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pandemi covid yang terjadi selama tahun 2021 berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya sektor perdagangan, karena PDRB sektor perdagangan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha perdagangan dalam suatu wilayah. Pengaruh pandemi ini terlihat pada penurunan nilai PDRB secara umum dan nilai PDRB sektor perdagangan khususnya. Dari Tahun 2017-2020 kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB kota Sawahlunto. Untuk tahun 2021 kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 14,67 persen dengan nilai rupiahnya Rp. 564.865,95 juta rupiah sedikit menurun dari tahun 2020. penyebab dari turunnya daya beli masyarakat ini karena pengaruh masa pandemic covid ini, dimana masyarakat terbatas untuk keluar rumah

sehingga mempengaruhi jual beli di pasar-pasar yang ada, selain itu juga pada masa pandemic ini pengaruh pasar online juga menjadi salah satu alternatif yang sangat disukai konsumen dalam transaksi jual beli.

20. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan di Kota Sawahlunto merupakan salah satu sektor yang sangat dipertimbangkan dalam kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota. Besarnya nilai kontribusi sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing. Pembangunan industri ini diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang, adapun perkembangan kontribusi sektor industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Tahun 2017-2021

KONTRIBUSI	2017	2018	2019	2020	2021
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	404.956,76	415.867,46	392.312,53	395.495,23	432.174,39
Total PDRB (juta rupiah)	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74
Kontribusi (%)	12,96	12,12	10,66	10,82	11,22

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari tabel diatas terlihat perkembangan kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan walaupun naik secara melambat, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan seiring dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi dan Nasional. Tahun 2020 dan 2021 kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan mulai mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, namun pada masa pandemi ini merupakan suatu prestasi untuk industri pengolahan mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 11,22 persen dengan nilai rupiah Rp. 432.174,39 juta rupiah. Perkembangan industri dilihat dari PDRB sektor industri dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak mengalami peningkatan yang signifikan hanya rata-rata meningkat secara konstan, dan pada tahun 2021 ada mengalami kenaikan dari tahun 2020 karena itu sangat perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendorong industri pengolahan untuk meningkatkan produksinya. Dengan meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga Kota Sawahlunto, karena industri kecil dan industri rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan. Meningkatkan peranan industri kecil dan industri rumah tangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta memperluas lapangan kerja. Seperti melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga.

21. Pertumbuhan Industri

Kontribusi sektor perindustrian pada PDRB Kota Sawahlunto salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan industri yang ada di Kota Sawahlunto, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah unit Usaha	1.191	1.254	1.432	1.584	1.703
2	Nilai produksi	47.592.812.000	50.480385.000	53.423.210.000	32.215.322.519	35.173.529.700
3	Bahan Baku	20.462.791.000	21.595.549.000	23.466.143.000	14.180.596.950	15.511.583.950

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Dari tabel pertumbuhan industri diatas maka dapat di simpulkan yaitu Pada jumlah unit Usaha terjadi peningkatan setiap tahunnya, dan untuk jumlah Tenaga Kerja dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 juga mengalami peningkatan, untuk nilai produksi pada tahun 2020 mengalami Penurunan yang mana pada tahun 2019 Nilai Produksi Sebesar 53.423.210.000 sedangkan pada tahun 2020 menjadi 32.215.322.519 yang mana hal ini terjadi karena efek dari Pandemi covid-19 yang rdampak terhadap pertumbuhan industri Kota Sawahlunto, sedangkan untuk tahun 2021 Nilai Produksi sedikit lebih meningkat dari tahun 2020. Untuk Bahan Baku juga mengalami Penurunan Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 sebesar 23.466.143.000 dan 2020 sebesar 14.180.596.950 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019. Dan pada tahun 2021 Bahan Baku mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2020. Rendahnya nilai produksi dan bahan baku pada dua tahun terakhir ini sangat berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja, ini menandakan bahwa menurunnya permintaan terhadap produk yang sangat berpengaruh terhadap nilai produksi dan bahan baku yang digunakan. Pengaruh covid 19 sangat mengganggu pedapatan usaha-usaha yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk itu sangat perlu kebijakan daerah dalam membangkitkan kembali usaha industri setelah masa pandemi ini. Pembinaan-pembinaan yang intens pada usaha industri salah satu pembangkit semangat pengusaha dalam meningkatkan usahanya.

22. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat dari lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, adapun perkembangan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38
Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
terhadap PDRB Tahun 2017-2021

KONTRIBUSI	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (juta rupiah)	67.261,26	73.951,36	82.406,43	75.255,42	84.016,91
Total PDRB (juta rupiah)	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679,76	3.656.590,97	3.850.697,74
Kontribusi (%)	2,12	2,17	2,24	2,06	2,18

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

23. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan pendapatan ditinjau dari pajak hiburan pada tahun 2021 tidak ada tetapi ada penambahan pendapatan ditinjau dari Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	142.353.702	164.733.362	94.965.756	47.335.931	168.914.129
2	Pajak Restoran	640.309.687	638.615.093	532.945.719	477.464.758	617.303.460
3	Pajak Hiburan	462.892.300	394.309.900	109.485.500	1.650.000	
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	227.593.000	411.150.000	682.737.000	516.801.000	436.895.000
5	PT.WWS	0	0	0	0	
6	Bagian Laba Hotel Parai	0	0	0	0	

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	0	0	0	1.500.000
	PAD Sektor Pariwisata	1.473.148.689	1.608.808.355	1.420.133.975	1.043.251.689	814.886.146
	Total PAD	53.399.735.599,54	62.406.850.149,37	57.171.093.865,09	59.537.385.897,66	51.470.645.905,45
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	2,759	2,578	2,484	1,752	1,583

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2021

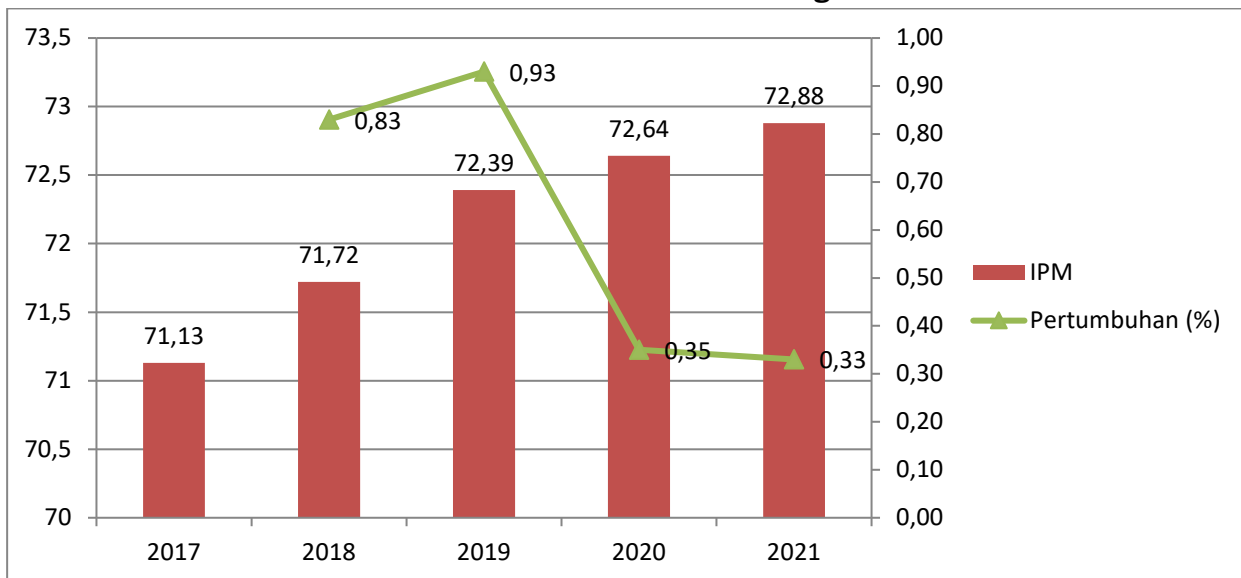
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kota Sawahlunto meningkat dari 71,13 tahun 2017 menjadi 72,88 tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kota Sawahlunto rata-rata tumbuh sebesar 0,61 persen per tahun dan berstatus tinggi. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto periode 2017 hingga 2021 ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat. Berikut adalah tabel perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto tahun 2017 sampai dengan 2021.

Pertumbuhan IPM pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan 0,83 persen dan pada tahun 2021 pertumbuhan IPM menurun menjadi 0,33 persen. Hal ini disebabkan karena Pandemi COVID 19 sehingga menurunkan pertumbuhan IPM Kota Sawahlunto.

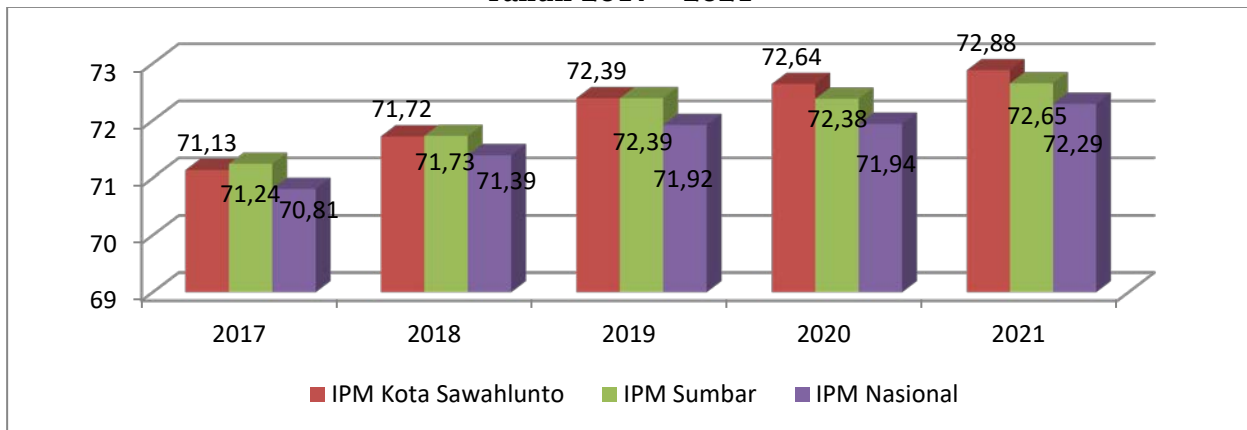
Grafik 2.14
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

IPM Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 akan tetapi pertumbuhannya berfluktuasi. Secara rata rata pertumbuhan IPM Kota Sawahlunto sebesar 0,61 persen. Dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain IPM Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-7 di Sumatera Barat.

Grafik 2.15
Perbandingan IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 lebih tinggi dari IPM Nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39 dan pada tahun 2020 sudah dapat melebihi IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,64. Pada tahun 2021 Nilai IPM Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional yaitu 72,88. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk **kategori tinggi** ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Apabila dilihat lebih detail pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan periode tahun 2017 sampai dengan 2021, kecuali unsur pengeluaran perkapita yang mengalami penurunan, dari 10.238.000 rupiah pada tahun 2019 menjadi 10.182.000 rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19 dan naik lagi menjadi 10.195.000 pada tahun 2021. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakatnya.

2. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah Selama periode 2017 hingga 2021, Rata-rata Lama Sekolah meningkat rata-rata 0,97 tahun per tahun.

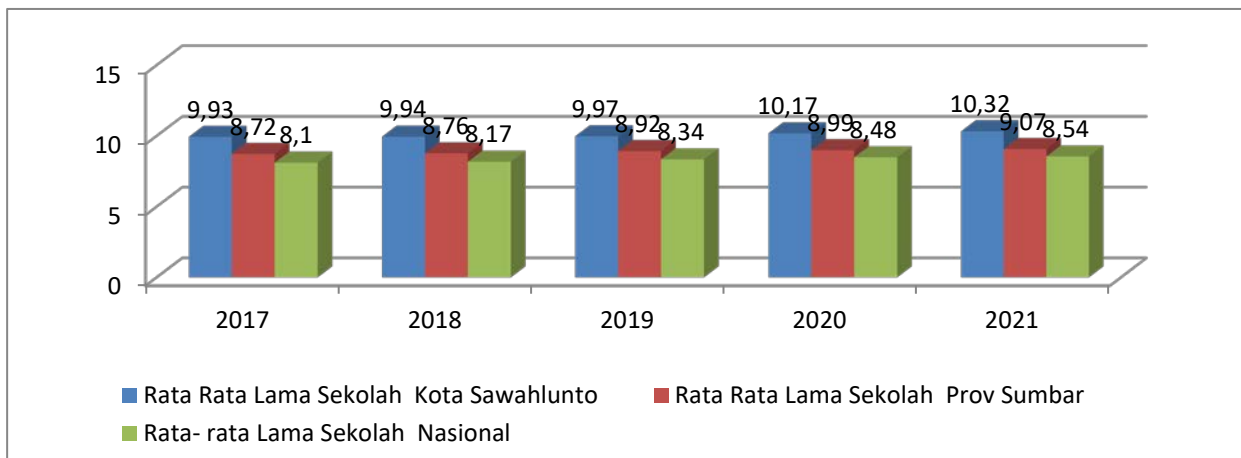
Tabel 2.40
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Tahun)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
RLS Kota Sawahlunto	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32
RLS Provinsi Sumatera Barat	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
RLS Nasional	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sawahlunto yang lebih baik. Pada tahun 2021 secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,32 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas X (kelas I SLTA). Rata-rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2017-2021 lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional

Grafik 2.16
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto , Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Angka Rata Rata Lama Sekolah 9,93 Tahun dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 10,32 Tahun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Sawahlunto adalah telah sampai duduk di bangku kelas II SLTA, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya Kota Sawahlunto menduduki peringkat ke 7 dari Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.41
Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kabupaten/Kota	ARLS (Tahun)	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	7,2	19
Kab. Pesisir Selatan	8,27	12
Kab. Solok	7,87	18
Kab. Sijunjung	8,12	14
Kab. Tanah Datar	8,62	9
Kab. Padang Pariaman	7,88	17
Kab. Agam	8,97	8
Kab. Lima Puluh Kota	8,07	16
Kab. Pasaman	8,1	15
Kab. Solok Selatan	8,32	11
Kab. Dharmasraya	8,55	10
Kab. Pasaman Barat	8,27	12
Kota Padang	11,59	2
Kota Solok	11,04	4
Kota Sawahlunto	10,32	7
Kota Padang Panjang	11,63	1
Kota Bukittinggi	11,34	3
Kota Payakumbuh	10,81	5
Kota Pariaman	10,67	6

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

3. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

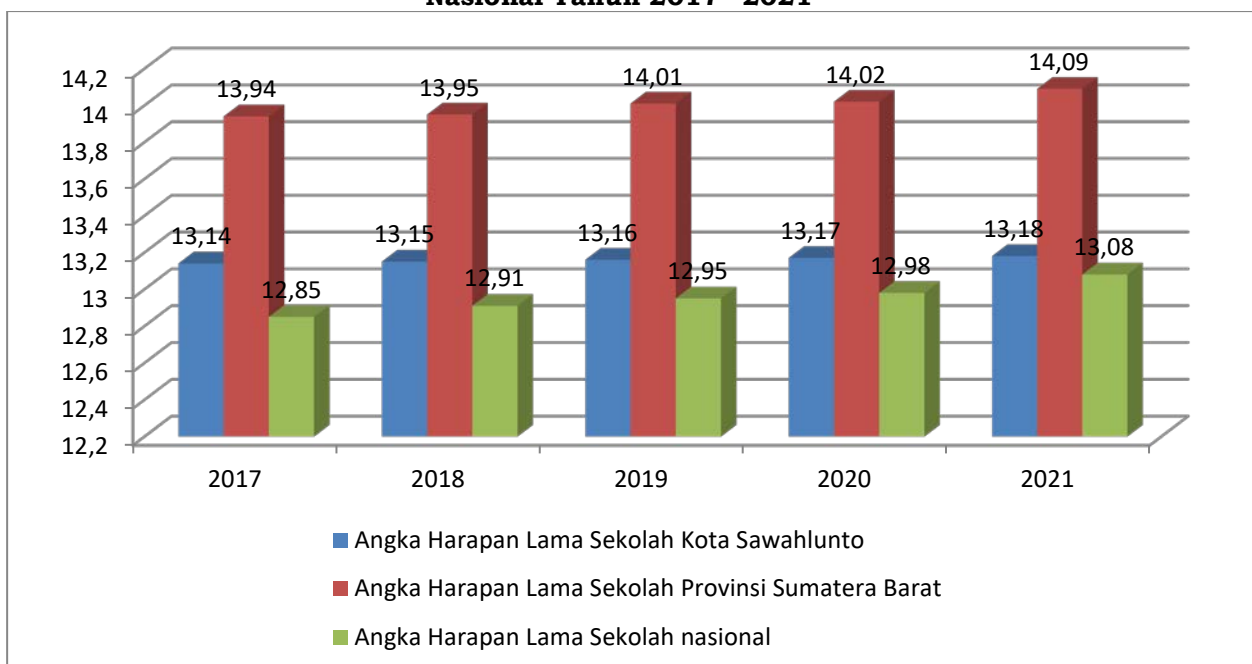
Selama periode 2017 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,08 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah mencapai 13,18 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,17 tahun. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,18 tahun atau minimal menamatkan pendidikan mereka hingga lulus jenjang Diploma. Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 lebih rendah dari Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.42
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (Tahun)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
HLS Kota Sawahlunto	13,14	13,15	13,16	13,17	13,18	0,08
HLS Provinsi Sumatera Barat	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09	0,35
HLS Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	0,45

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka dan Statistik Nasional, 2022 (data olahan)

Grafik 2.17
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Sawahlunto, Provinsi dan Nasional Tahun 2017– 2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2017 sampai pada tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2021 AHLS Kota Sawahlunto sudah mencapai pada angka 13,18. Angka ini merupakan peringkat ke 13 untuk

dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kabupaten/Kota	2021	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	12,89	15
Kab. Pesisir Selatan	13,33	11
Kab. Solok	13,05	14
Kab. Sijunjung	12,38	19
Kab. Tanah Datar	14,34	5
Kab. Padang Pariaman	13,68	9
Kab. Agam	13,88	8
Kab. Lima Puluh Kota	13,3	12
Kab. Pasaman	12,81	16
Kab. Solok Selatan	12,72	17
Kab. Dharmasraya	12,44	18
Kab. Pasaman Barat	13,68	9
Kota Padang	16,53	1
Kota Solok	14,33	6
Kota Sawahlunto	13,18	13
Kota Padang Panjang	15,07	2
Kota Bukittinggi	14,98	3
Kota Payakumbuh	14,27	7
Kota Pariaman	14,55	4
Provinsi Sumatera Barat	14,09	

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2017 hingga 2021, Kota Sawahlunto telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir rata-rata tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 69,39 tahun, dan pada tahun 2021 telah mencapai 70,10 tahun. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2021 memiliki angka harapan hidup 70,10 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 70,00 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Angka Harapan Hidup Nasional.

Tabel 2.44
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (Satuan Dalam Tahun)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
AHH Kota Sawahlunto	69,39	69,59	69,87	70,00	70,10	0,22
AHH Provinsi Sumatera Barat	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59	0,29
AHH Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57	0,18

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka dan Statistik Nasional, 2022 (data olahan)

Tabel 2. 45
Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

Kota/Kab	Tahun 2021	Peringkat
Kab. Kepulauan Mentawai	64,73	19
Kab. Pesisir Selatan	70,96	8
Kab. Solok	68,79	14
Kab. Sijunjung	66,36	18
Kab. Tanah Datar	70,12	10
Kab. Padang Pariaman	68,97	13
Kab. Agam	72,53	6
Kab. Lima Puluh Kota	69,84	12
Kab. Pasaman	67,59	17
Kab. Solok Selatan	68,01	15
Kab. Dharmasraya	71,53	7
Kab. Pasaman Barat	67,94	16
Kota Padang	73,69	4
Kota Solok	73,73	3
Kota Sawahlunto	70,10	11
Kota Padang Panjang	72,82	5
Kota Bukittinggi	74,50	1
Kota Payakumbuh	73,84	2
Kota Pariaman	70,38	9
Provinsi Sumatera Barat	69,59	

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Akan tetapi jika dilihat perbandingan dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat, ternyata Angka Harapan hidup (AHH) Kota Sawahlunto berada pada peringkat ke-11 (Sebelas).

5. Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sawahlunto mencapai Rp.10,190 juta per tahun. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh sebesar 2,42 persen per tahun, kecuali tahun 2020 yang turun sebesar 56 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto adalah yang terendah. Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 cenderung lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran per Kapita Nasional.

Tabel 2. 46
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rupiah)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto	9.343	9.765	10.238	10.182	10.190	2,42
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790	1,29
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Nasional	10.664	11.059	11.299	11.013	11.160	1,40

Sumber Data :Sawahlunto Dalam Angka 2022, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022. Statistik Indonesia 2022

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen

dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Perkembangan kesenian di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari perkembangan jumlah group kesenian dan jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Sawahlunto setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47
Group Kesenian Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	45	45	47	38	38
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	61,39	61,39	62,52	65,14	65,69
3.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Unit	0,73	0,73	0,75	0,58	0,58

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan group kesenian dari lima tahun terakhir mengalami penurunan yang mana tahun 2021 menjadi 38 group kesenian. Adapun penurunan ini terjadi disebabkan pasca pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadinya Refocusing Anggaran pada Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktifitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota. Dari 38 group kesenian, yang aktif hanya sebanyak 28 grup dan 10 grup kesenian tidak aktif, sedangkan 25 grup diantaranya sudah berbadan hukum.

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.48
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	10	10	12	20	20
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	61,39	61,39	62,52	65,14	65,69
3.	Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk	Unit	0,16	0,16	0,19	0,30	0,30

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 20 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (*indoor*) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (*outdoor*) 12 tempat.

Namun secara kenyataannya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertunjukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Jumlah Klub dan Gedung Olahraga

Perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Kota Sawahlunto dalam mendukung prestasi olahraga di Kota Sawahlunto seperti salah satunya gedung olahraga, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

No	Klub dan Gedung Olahraga	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Klub Olahraga	70	70	75	93	93
2.	Jumlah Gedung Olahraga	11	11	11	0	0

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah gedung olahraga dari 11 unit menjadi 0, ini disebabkan karena sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Sawahlunto tidak termasuk dalam kategori jenis gedung olahraga. Sedangkan untuk klub olahraga di Kota Sawahlunto terjadi peningkatan yang disebabkan banyaknya minat masyarakat dalam mengikuti setiap cabang olahraga yang ada.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yaitu Bidang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019 realisasinya 78,76 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 93,27 persen serta meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 100 persen. Pada Bidang Pendidikan Dasar juga mengalami peningkatan capaian SPM. Pada tahun 2019 capaian SPM sebesar 85,99 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 92,09 persen dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 100. Namun dari bidang Pendidikan Kesetaraan Pencapaian SPM mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 85,05 persen menurun menjadi 56,70 persen pada tahun 2020. Hal ini yang disebabkan masih kurangnya kemauan anak-anak yang putus sekolah ingin melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi melalui SKB, dan juga disebabkan kondisi Pandemi Covid 19 sulit untuk menemui anak-anak yang putus sekolah dan keterbatasan untuk melakukan tatap muka dalam belajar. Akan tetapi pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 70,64 persen.

Tabel 2.50
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun		
			2019	2020	2021
A	Pendidikan				
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	78,76	93,27	100
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	85,99	92,09	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum	85,05	56,70	70,64

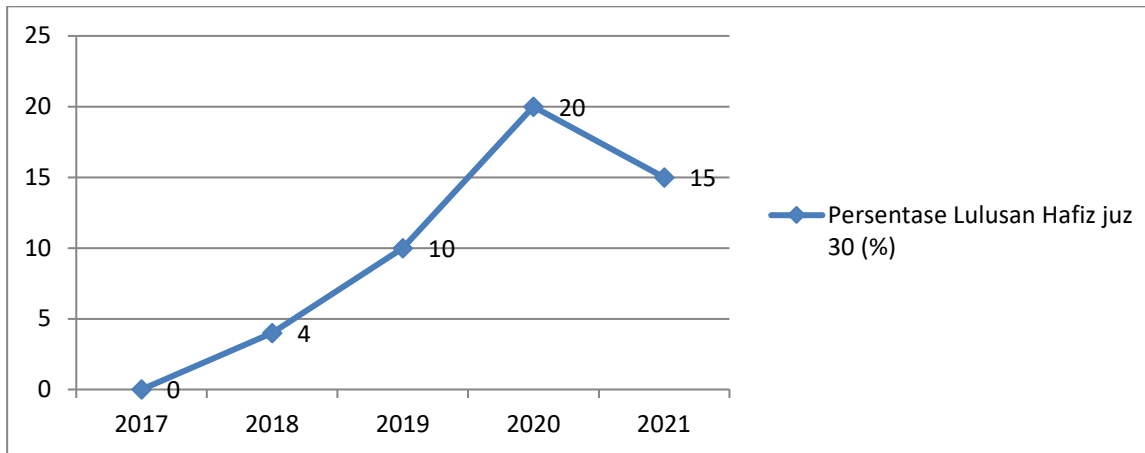
No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun		
			2019	2020	2021
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

2. Persentase Lulusan SD Hafidz Quran minimal Juz 30

Salah satu indikator kinerja daerah adalah Persentase lulusan SD Hafidz alquran minimal Juz 30. Adapun perkembangan siswa Sekolah Dasar yang lulus minimal Juz 30 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.18
Persentase Lulusan SD yang Hafiz Alquran juz 30
Tahun 2017 -2021



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 persentase lulusan SD Hafidz quran pada tahun 2018 adalah 4 persen meningkat pada tahun 2019 menjadi 10 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 20 persen. Pada tahun 2021 Jumlah persentase menurun menjadi 15 persen. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi jumlah persentase lulusan SD Hafidz quran minimal juz 30.

3. Persentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi Minimum)

Assesmen Nasional adalah Program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Ini adalah alat ukur keberhasilan sekolah sebagai pengganti dari Ujian Nasional yang selama beberapa tahun kebelakang ini dilaksanakan. Adapun perkembangan dari Nilai Assesment Kompetensi di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51
Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi Minimum)
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata nilai ujian UN SD	7,39	7,40	7,41	7,42	7,39
2	Rata rata nilai ujian UN SMP	5,51	5,52	5,53	5,55	
3	Persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (numerasi minimum) SD					56,87
4	Persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (numerasi minimum) SMP					64

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2020 indikator kinerja daerah adalah rata rata nilai ujian SD dan UN SMP. Akan tetapi pada tahun 2021 indikator itu tidak digunakan lagi karena tidak adanya ujian nasional pada tingkat SD dan SLTP. Sehingga indikatornya mengalami perubahan menjadi persentase siswa

dengan nilai assessment SD dan SMP. Pada tahun 2021 persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (numerasi minimum) SD adalah 56,87 dan persentase siswa dengan nilai assessment kompetensi (numerasi minimum) SMP dengan nilai 64.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan APK di Kota Sawahlunto yaitu:

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Angka partisipasi kasar (APK)(%)					
1	PAUD	99,40	60,52	61,24	59,35	83,47
2	SD / MI	105,93	108,96	107,13	100	99,94
3	SMP / MTs	95,21	92,57	91,47	91,5	97,67

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa APK PAUD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 APK PAUD sebesar 99,40 persen mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu menjadi 60,52 pada tahun 2018, 61,24 persen pada tahun 2019 dan 59,39 persen. Akan tetapi pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 83,47 persen. Menurunnya APK PAUD ini pada tahun 2020 disebabkan karena adanya Pandemi covid 19.

APK SD/MI di Kota Sawahlunto sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 APK SD/MI adalah 105,93 naik pada tahun 2019 menjadi 111,33 persen dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 99,94 persen. Adapun penyebab fluktuasi tersebut adalah: rendahnya minat siswa untuk bersekolah, kurangnya pemahaman guru terhadap angka partisipasi dalam Pendidikan, jarak sekolah yang jauh dari rumah, usia kurang/lebih dari usia cukup sekolah dan siswa tidak naik kelas. Beberapa faktor yang menjadi pendorong meningkatnya APK adalah: Pendidikan orang tua yang memberikan pengaruh positif bagi Pendidikan anak, ekonomi keluarga yang cukup/memadai dan kesehatan anak yang baik. APK untuk jenjang SMP/MTs di Kota Sawahlunto mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 dari 95,21 persen tahun 2017 menurun pada tahun 2020 menjadi 84,76 persen dan kembali meningkat meningkat menjadi 97,67 persen pada tahun 2021. Ini menunjukkan mulai meningkatnya anak usia sekolah yang bersekolah di kota Sawahlunto pada jenjang SMP/MTs. Perbandingan APK PAUD dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Data Kondisi PAUD Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021 (%)

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Apk paud nasional	33,84	37,92	36,93	37,52	35,59
2	APK PAUD PROPINSI	43,61	30,22	30,39	35,89	40,04
3	APK PAUD KOTA SAWAHLUNTO	99,40	60,52	61,24	59,35	83,47
4	JUMLAH PENDUDUK UMUR 3-6 TAHUN KOTA SAWAHLUNTO	4.678	4.661	4.641	4.618	4.450
5	JUMLAH SISWA PAUD	4.650	2.821	2.842	2.741	2.833

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas bahwa sejak tahun 2017 sampai 2021 APK PAUD umur 3 sampai dengan 6 tahun mengalami penurunan yang cukup besar, walaupun mengalami penurunan APK PAUD Kota Sawahlunto masih diatas rata-rata Nasional dan Propinsi Sumatera Barat setiap Tahunnya. Tahun 2017 APK PAUD mencapai 99,40 persen dan dengan adanya Pandemi Covid 19 APK PAUD tahun 2020 menurun menjadi 59,35 persen. Pada Tahun 2021

meningkat menjadi 83,47 persen lebih tinggi jika dibanding dengan Propinsi 40,04 persen dan Nasional 35,59 persen.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang Pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APM di Kota Sawahlunto dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 54
Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2017 – 2021 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD / MI	99,70	100	96,86	92	91,69
2	SMP / MTs	86,83	83,73	79,3	79,39	91,69

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

APM di Kota Sawahlunto untuk jenjang SD/MI sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 APM menjadi 99,70 persen dan naik kembali pada tahun 2018 sebesar 100 persen dan kembali turun sampai tahun 2020 sebesar 96,86 persen. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 91,69 persen. Ini berarti pada tahun 2021 menunjukkan penduduk Kota Sawahlunto pada umur 7 sampai dengan 12 tahun telah bersekolah SD/MI tepat waktu sebesar 91,69 persen. Adapun penyebab fluktuasi tersebut adalah: rendahnya minat siswa untuk bersekolah, kurangnya pemahaman guru terhadap angka partisipasi dalam Pendidikan, jarak sekolah yang jauh dari rumah, usia kurang/lebih dari usia cukup sekolah dan siswa tidak naik kelas. Beberapa faktor yang menjadi pendorong meningkatnya APM adalah: Pendidikan orang tua yang memberikan pengaruh positif bagi Pendidikan anak, ekonomi keluarga yang cukup/memadai dan kesehatan anak yang baik. APM di Kota Sawahlunto untuk jenjang SMP/MTs sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 rata rata mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 APM mencapai 86,83 persen, sedangkan tahun 2021 APM untuk jenjang SMP/MTs menjadi mengalami peningkatan menjadi 91,69 persen. ini menunjukkan pada tahun 2021 penduduk Kota Sawahlunto yang berumur 13 sampai dengan 15 tahun telah bersekolah SMP/MTs tepat waktu sebesar 91,69 persen.

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah persentase anak usia 7 sampai dengan 12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun dikalikan 100 persen. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2017-2021:

Tabel 2. 55
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
1.	2017	99,56	74,13	84,54
2.	2018	100	98,90	83,02
3.	2019	99,66	97,95	81,79
4.	2020	99,73	97,44	82,64
5	2021	99,94	97,67	82,99

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap kelompok umur. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umurnya. Pada kelompok umur 7 sampai dengan 12 tahun dari 99,73 persen menjadi 99,94 persen. Pada kelompok umur 13 sampai dengan 15 tahun dari 74,13 persen tahun 2017 menjadi 97,67 persen pada tahun 2021. Pada kelompok umur 16 sampai dengan 18 dari pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 menurun dari 84,54 persen menjadi 83,02 persen pada tahun 2018 lalu turun menjadi 81,79 persen pada tahun 2019 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 82,99 persen.

7. Rasio Murid dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.56
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto
Tahun 2017- 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1.488	1.543	1.200	1.335	1.335
1.2	Jumlah Kelas	109	100	99	89	71
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	13,65 : 1	15,43:1	12,12:1	18,80:1	18,80:1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	7.340	6.772	6.727	7.247	7.064
2.2	Jumlah Kelas	376	374	378	400	386
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	20,22 : 1	18,19 : 1	18,11 : 1	17,45	18,30:1
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	2.667	2.359	2.930	3.527	3.275
3.2	Jumlah Kelas	109	107	130	130	152
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	24,46 : 1	22,04 : 1	22,53:1	22,53:1	21,55:1

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2021 Kota Sawahlunto mengalami penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan TK, kecuali pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami kenaikan. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa perbandingan jumlah kelas dengan murid untuk tingkat TK satu kelas pada tahun 2021 berisi rata-rata 18 siswa pada tahun, untuk tingkat SD satu kelas berisi rata-rata 18 siswa dan untuk tingkat SMP berisi rata-rata 21 orang siswa. Jika dibandingkan dengan rombongan belajar yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2018, sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.57
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2018

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MURID/ KELAS
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dapat dilihat bahwa rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas untuk setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto telah memenuhi kondisi ideal yang telah ditetapkan. Secara kuantitas, jumlah guru telah dapat melayani jumlah murid sesuai dengan kondisi idealnya. Jenjang pendidikan SD dengan rasio satu kelas berisi 18 orang murid dan jenjang pendidikan SMP satu kelas dengan 23 orang murid telah sesuai dengan batasan yang ditetapkan Permendikbud. Tetapi ada kasus di beberapa sekolah yang jumlah muridnya tidak sesuai dengan kondisi ideal dan tidak memenuhi kuota untuk roombelnya. Hal ini disebabkan karena faktor topografi Kota Sawahlunto yang menjadikan jarak rumah penduduk ke sekolah sangat jauh. Sehingga jumlah murid di sekolah tersebut hanya sedikit dan tidak memenuhi untuk kondisi idealnya.

8. Persentase Sekolah yang Berakreditasi A

Persentase sekolah berakreditasi di Kota Swahlunto dibedakan antara sekolah SD dengan SMP.

Tabel 2. 58
Persentase Sekolah SD/MI Berakreditasi A di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SD/MI Berakreditasi A	39	37	42	41	41
2	Total Jumlah SD/MI	64	65	65	67	67
3	Persentase SD/MI Berakreditasi A	60,94	56,92	64,62	61,19	61,19

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2017-2021

Pada tahun 2017 jumlah persentase sekolah SD/MI yang berakreditasi tahun 2017 menjadi 60,94 persen dan menurun pada tahun 2018 menjadi 56,92 persen. Hal ini disebabkan karena adanya reakreditasi sekolah, sehingga adanya perubahan point penilaian. Pada tahun 2019 kembali naik karena sekolah berusaha memenuhi point tambahan pada akreditasi sehingga kembali naik menjadi A. Pada tahun 2021 persentase sekolah SD berakreditasi A menjadi 61,19 persen.

Tabel 2. 59
Persentase Sekolah SMP/MTs Berakreditasi A di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SMP/MTs Berakreditasi A	2	3	2	2	2
2	Total Jumlah SMP/MTs	14	14	14	15	15
3	Persentase SMP/MTs Berakreditasi A	14,28	21,43	14,28	13,33	13,33

Pada tingkat SMP persentase SMP yang berakreditasi A sebesar 14,28 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 21,43 persen Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 14,28 persen. Hal ini dikarenakan adanya reakreditasi sehingga adanya penambahan poin akreditasi sehingga terjadi penurunan. Pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase karena jumlah sekolah bertambah sedangkan jumlah sekolah yang berakreditasi A tetap.

9. Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur formal, non formal dan informal. Adapun kualitas dari lembaga PAUD yang ada di kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi			76	70	70
2	Total Jumlah Lembaga PAUD			88	87	87
3	Persentase Lembaga PAUD Berakreditasi			86,36	80,46	80,46

Sumber Data: Profil Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Data Persentase Lembaga PAUD berakreditasi pada tahun 2019 berjumlah 86,36 persen. Mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 80,46 persen, karena ada lembaga PAUD yang sudah tutup sehingga mengurangi persentase PAUD yang berakreditasi.

10. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 61
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD					
	Ikut Ujian	1148	1077	1139	1050	1065
	Lulus Ujian	1148	1077	1139	1050	1065
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	MI					
	Ikut Ujian	69	79	80	323	90
	Lulus Ujian	69	79	80	323	90
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
3.	SMP					
	Ikut Ujian	835	800	851	783	758
	Lulus Ujian	832	790	851	783	756
	Persentase (%)	99,64	99,69	100	100	99,73
4.	MTs					
	Ikut Ujian	118	188	192	252	258
	Lulus Ujian	118	188	192	252	258
	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2017 sampai 2021 tingkat SD dan MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100 persen. Pada tingkat SMP kelulusan siswa tahun 2020 tetap 100 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 84,90 persen. untuk tingkat SMP tingkat kelulusan pada tahun 2021 adalah 99,73 persen dan tingkat kelulusan MTs angka kelulusan siswa 100 persen.

11. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.62
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021 (%)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	2	4	11	0	0

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.2	Jumlah Murid	6.772	6.727	7.247	7.122	7.064
1.3	Angka Putus sekolah	0,03	0,06	0,03	0	0
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	12	11	5	38	0
2.2	Jumlah Murid	2.667	2.359	3.338	3.527	2.833
2.3	Angka Putus sekolah	0,49	0,46	0,15	1,07	0

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Angka putus sekolah pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah angka putus sekolah tingkat SD sebesar 0,03 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,06 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 0,03 persen, dan pada tahun 2020 serta 2021 tidak adanya siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs Pada tahun 2017 angka putus sekolah sebesar 0,49 persen dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 1,07 persen. Akan tetapi pada tahun 2021 tidak adanya angka putus sekolah pada siswa SMP/MTs. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

12. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dapat dilihat dari jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat atasnya, adapun perkembangan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah setelah kelulusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63
Angka Melanjutkan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	1.232	1.263	1.208	1.373	1.137
2	Jumlah Lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya	1.217	1.217	1.156	1.126	1.115
3	Angka Melanjutkan (%)	101,23	103,78	104,50	121,94	101,97

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Angka melanjutkan pada tingkat SMP mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 angka melanjutkan menjadi 101,23 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 121,94. Dan pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 101,97.

13. Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik

Sekolah dalam kondisi baik sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Secara keseluruhan keadaan kondisi sekolah yang ada di Kota Sawahlunto seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.64
Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)	jumlah	(%)
1	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam Kondisi baik	336	80,57	277	73,87	151	41,03	91	23,70	92	23,83
2	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam kondisi rusak ringan	72	17,27	82	21,87	189	51,36	293	76,30	294	76,16
3	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam kondisi rusak sedang	0	0	15	4,8	27	7,34	0	0	0	0
4	Total Jumlah Kelas SD/MI dalam kondisi rusak berat	9	2,16	1	0,27	1	0,27	0	0	0	0
5	Total Jumlah Kelas SD/MI	417	100	375	100	368	100	384	100	386	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Pada tabel di atas dapat digambarkan kondisi total jumlah kelas yang mengalami fluktuasi. Kelas dalam kondisi baik pada tahun 2017 menurun menjadi 23,83 persen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan, yaitu pada tahun 2017 dari 17,27 persen menjadi 76,16 persen pada tahun 2021. Ruang kelas rusak berat pada tahun 2017 sebesar 2,16 persen pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi yang mengalami rusak berat. Sedangkan keadaan kondisi sekolah untuk jenjang SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.65
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik (%)

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam Kondisi baik	131	87,92	54	45,00	60	55,05	60	39,47	60	39,47
2	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak ringan	8	5,37	64	53,33	49	44,95	92	60,53	92	60,53
3	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak sedang	0	0	2	1,67	0	0	0	0	0	0
4	Total Jumlah Kelas SMP/MTS dalam kondisi rusak berat	10	6,71	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Total Jumlah Kelas SMP/MTS	149	100	120	100	109	100	152	100	152	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Pada tingkat SMP jumlah ruang kelas kondisi baikjuga mengalami penurunan pada tahun 2017 dari 87,92 persen menjadi 39,47 persen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya jumlah sekolah yang mengalami kerusakan ringan dari tahun 2017sebesar 5,37 persen meningkat menjadi 60,53 persen ada tahun 2021. Pada tahun 2017 ada sekolah mengalami rusak berat sebesar 6,71 persen pada tahun 2019 hingga tahun 2021 ruang kelas rusak sedang dan berat tidak ada lagi di Kota Sawahlunto.

14. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Definisinya adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Interpretasinya adalah rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia dasar. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kota Sawahlunto seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.66
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK					
1.1	Jumlah Sekolah (jumlah TK,RA, Paud)	123	123	125	131	131
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6	3.390	3.390	3.360	3.404	3.394
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6	1:27,56	1:27,56	1:26,85	1:25,98	1:25,91
2	SD/MI/SDLB					
1.1	Jumlah Sekolah	65	64	64	67	67
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	6.977	6.994	7.222	7.122	7083
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:118,61	1:109,28	1:112,84	1:106,30	1:105,72
3	SMP/MTs/SMPLB					
2.1	Jumlah Sekolah	15	14	14	15	15
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3.562	3.506	3.532	3.602	3.561
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1:345,36	1:399	1:252,2	1:240,13	1:247,4

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Dari rasio ketersediaan sekolah diatas dapat kita lihat bahwa rasio ketersediaan sekolah di Kota Sawahlunto untuk tingkat Pendidikan TK termasuk didalamnya paud sudah sangat tinggi. Yaitu 1: 25,91. Sedangkan untuk tingkat ketersediaan sekolah usia SD sudah mencapai 1:105,72 pada tahun 2021. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah tingkat SMP masih berada pada 1:247,4.

15. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio Guru dan Murid di Kota Sawahlunto terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.67
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	183	172	123	400	399
1.2	Jumlah Murid	1.488	1.543	1.200	2.913	2.833
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 : 8	1 : 8,97	1:9,75	1:7,28	1;7,10
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	605	603	428	579	600
2.2	Jumlah Murid	6.772	6.691	7.247	7.122	7.064
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:11,08	1:11.02	1:16,93	1:12,30	1:11,77
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	287	285	322	320	320
3.2	Jumlah Murid	2.667	2.615	3.338	3.527	3.275
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:9,29	1 : 8,27	1:10,36	1:11,02	1:10,23

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Selama kurun waktu 2017–2021 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2021 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 7 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 12 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 10 murid SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini sama dengan tahun lalu akan tetapi untuk tingkat SMP/MTS mengakami penurunan, yaitu dari perbandingan 1;11 menjadi 1:10. Pada tingkat TK dan mengalami sedikit penurunan pada tingkat SD dan SMP. Jumlah ini telah memenuhi untuk kondisi idealnya, dimana untuk jenjang pendidikan TK 1 orang guru idealnya melayani 11 murid.

16. Guru yang Memenuhi Kualitas S1/D IV

Sesuai perkembangan zaman kualitas guru sangat menentukan kualitas proses dalam belajar dan mengajar di sekolah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1 dalam mendorong peningkatan kualifikasi guru. Kota Sawahlunto yang memenuhi Kualitas S1/D-IV sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.68
Guru yang Memenuhi Kualitas S1/ DIV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Guru Yang memenuhi kualitas SI/D IV	1.040	932	953	1.020	971
2	Total Guru	1.183	1.044	1.344	1.299	1.324
3	Persentase Guru yang memenuhi Kualitas SI/D IV (%)	87,91	89,27	70,91	78,52	73,34

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2021

Di Kota Sawahlunto jumlah guru yang memenuhi kualitas S1/DIV mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentasenya berjumlah 87,91 persen. Pada tahun 2021

menurun menjadi 73,34 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya total guru dan guru yang memenuhi kualifikasi banyak juga yang pindah.

B. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait bidang Kesehatan, untuk tahun 2019-2021 diperoleh fluktuasi capaian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (%)

No	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	64,60	67,66	71,70
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	75,54	76,78	79,90
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	79,49	79,68	83,66
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	74	76	74,60
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	100	68,36
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86,23	76,05	49,83
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	38,11	46,66	44,50
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	39,49	16,72	7,95
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	60,34	88,06	50,59
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	150	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27,14	13,10	26,03
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	30,83	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yaitu bidang kesehatan dari 12 indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6 indikator pencapaian SPM pada Dinas Kesehatan mengalami peningkatan, dan 6 indikator pencapaian SPM mengalami penurunan yaitu: indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus. Adapun penyebab penurunan capaian SPM ini adalah :

- Adanya terjadi penurunan SPM pada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar karena Pembagi beda pada tahun 2020 berdasarkan yang dilayani, sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan cakupan yang telah ditetapkan pusdatin.
- Selain itu terjadinya pandemic sehingga siswa belajar dengan sistem daring sehingga menyebabkan capaian SPM menurun.
- Adanya masyarakat yang enggan untuk datang ke rumah sakit karena adanya pandemic COVID 19

- d. Karena pandemic COVID 19 penderita dilarang oleh keluarga untuk berobat ke sarana kesehatan.

2. Kasus Stunting Balita

Pencegahan stunting dilakukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompentensi ditingkat global. Pemerintah Kota Sawahlunto juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan stunting, terbukti dengan menurunnya kasus stunting di dua tahun terakhir ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70
Persentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

NO	PUSKESMAS	2017	2018	2019	2020	2021
1	Talawi	20,2	18,6	6,6	8,0	7,5
2	Kolok	11,1	33,0	19,7	13,3	7,3
3	Sungai Durian	3,0	1,7	7,2	3,3	1,7
4	Kampung Teleng	8,8	20,7	3,3	4,3	4,4
5	Lunto	15,5	17,2	16,0	11,8	12,2
6	Silungkang	21,4	26,7	21,7	10,3	5,6
	KOTA	14,5	18,5	11,1	8,0	6,1

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

Persentasi kasus Stunting balita di Kota Sawahlunto pada tahun 2017 berjumlah 14,5 persen ini disebabkan oleh kurangnya intake gizi pada Balita, kurangnya Pola Asuh, faktor Perilaku, faktor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya oleh Dinas Teknis yaitu dengan memberikan motivasi dan konseling kepada keluarga, memberikan makan tambahan, melakukan pemantauan kepada balita serta membentuk pos-pos gizi di tingkat desa kelurahan, maka untuk tahun 2020 persentasi kasus stunting di Kota Sawahlunto mengalami penurunan berjumlah 8,0 persen. Dan pada tahun 2021 Jumlah kasus stunting di Kota Sawahlunto dapat ditekan menjadi 6,1 persen.

Upaya kovergensi Percepatan Pencegahan Stunting akan dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan. Upaya Konvergensi Stunting yang akan dilakukan melalui 8 Aksi yaitu : melakukan Analisis Situasi , Melakukan Pemetaan, Melaksanakan Rembuk Stunting, Membuat Perwako Tentang Peran Desa, Melakukan Pembinaan KPM, Membuat Sistem Manajemen Data, Melakukan Pengukuran dan Publikasi Stunting, Melakukan Evaluasi Stunting untuk memastikan :

- Perencanaan kegiatan Pencegahan stunting dengan berbasis Data
- Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh Daerah yang sudah dimasukkan pada perencanaan dan penganggaran
- Melakukan pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam program
- Melakukan Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan
- Menjadikan hasil evaluasi Kinerja digunakan dasar perencanaan dan Penganggaran

3. Jumlah Kasus Kematian Balita

Jumlah kasus kematian balita adalah jumlah kasus kematian balita pada usia 0-59 bulan. Pada tahun 2021 jumlah kasus kematian balita ini berjumlah 16 orang. 13 diantaranya dibawah usia 1 tahun yang termasuk juga bayi. Sedangkan usia diatas 1 tahun berjumlah 3 orang. Angka kematian balita dihitung dengan membandingkan jumlah balita yang mati dengan angka kelahiran hidup, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.71
Angka kematian Balita
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kasus Kematian Balita	17	24	27	21	16
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	1013	1001	998	973	970
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	16,78	23,97	27,05	21,58	16,50

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

Jumlah kematian balita di Kota Sawahlunto setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian balita ada sebanyak 17 orang. Sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 24 orang. Begitu juga pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 27 orang. Dan pada tahun 2020 menurun menjadi 21 orang. Pada tahun 2021 ini berhasil turun menjadi 16 orang.

4. Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan RSUD

Persentase cakupan ayanan rujukan di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik dengan capaian 100 persen setiap tahunnya. Begitu pula dengan rasio daya tampung Rumah Sakit persatuan penduduk jumlahnya dari tahun 2018 adalah 0,0023. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,155. Persentase Rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi maka nilainya adalah utama. Sedangkan indikator Rumah Sakit terakreditasi adaah 100 persen. Apabila dilihat secara keseluruhan maka indikator kinerja daerah yang berhubungan dengan RSUD ini telah mencapai target yang diharapkan.

Tabel 2.72
Indikator Kinerja Berhubungan dengan RSUD
Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	100
2.	Rasio daya tampung rumah sakit per satuan penduduk	0,0023	0,0022	0,0016	0,155
3.	Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	utama	utama	utama	utama
4.	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

5. Angka kematian Bayi

Angka kematian Bayi di Kota Sawahlunto tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 angka kematian bayi 12,83 persen meningkat menjadi 17,98 persen. Pada tahun 2019 megalami peningkatan tertinggi menjadi 22,04 persen. Dan pada tahun 2021 angka kematian bayi menurun menjadi 13,40 persen. Adanya angka kematian bayi ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kehamilan ke petugas Kesehatan, sehingga jika ditemukan resiko tinggi lainnya tidak terdekteksi secara Dini.

Tabel 2.73
Angka Kematian Bayi
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	13	18	22	19	13
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (bayi)	1013	1001	998	973	970
3	Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12,83	17,98	22,04	19,54	13,40

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan hidup Bayi Kota Sawahlunto mengalami fluktuasi . Pada tahun 2017 jumlahnya adalah 87,17 persen menurun pada tahun 2017 menjadi 77,96 persen. Dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 86,6 persen.

Tabel 2.74
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	13	18	22	19	13
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (bayi)	1013	1001	998	973	970
3	Angka Kematian bayi	12,83	12,99	22,04	19,54	13,40
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	87,17	87,01	77,96	80,46	86,6

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

7. Angka Kematian Ibu/Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cidera.

Tabel 2.75
Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Puskesmas	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Talawi	0	0	2	0	1
2.	Kolok	0	0	1	1	0
3.	Sungai Durian	0	0	0	0	0
4	Lunto	0	0	0	0	0
5	Kap Teleng	0	0	0	0	0
6	Silungkang	0	0	0	1	0
	Jumlah Kematian Ibu	0	0	3	2	1
	Jumlah Kelahiran Hidup	1013	1001	998	973	970
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	0	300,60	205,55	103,09

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas angka kematian ibu di Kota Sawahlunto tahun 2017 dan 2018 tidak ada terjadi angka kematian ibu namun di tahun 2019 terjadi angka kematian ibu sebanyak 3 orang, 2 di kecamatan Talawi 1 di Kecamatan Barangin dan ditahun 2020 angka kematian Ibu sebanyak 2 Orang, 1 orang di Kecamatan Barangin 1 di Kecamatan Silungkang, Dan pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang. Satu di kecamatan Talawi yang disebabkan karena pendarahan.

Adapun upaya yang dilakukan adalahmeningkatkan kemitraan bidan dengan dukun, meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, Pelaksanaan Review Maternal dan Perinatal (RMP) serta peningkatan sosialisai tentang kelas ibu dan program P4K.

8. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita. Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja karena penyebab timbulnya masalah gizi ini adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor terkait. Kurang gizi dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi karbohidrat dan protein dalam makanan sehari-hari, tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang pada usia balita, adanya penyakit infeksi, rendahnya ketahanan pangan keluarga dan pola asuh anak yang tidak baik serta faktor lingkungan yang jelek. Pada masyarakat dan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dan perilaku. Oleh karena itu penanganannya harus terpadu yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan ketrampilan asuhan gizi keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan. Balita

gizi buruk adalah balita usia 0 sampai dengan 59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 sentimeter bagi balita 6 sampai dengan 59 bulan.

Tabel 2.76
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Pencapaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,14	0,5	0,3	0,1	0,04

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan data diatas persentase balita gizi buruk di Kota Sawahlunto mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlahnya 0,14 persen menurun pada tahun 2021 menjadi 0,04 persen. Hal ini karena berbagai program dan kegiatan dengan cara tetap melacak kasus kasus yang muncul dilapangan, pemberian makanan tambahan pada balita ibu hamil dan menyusui, mengadakan konseling kedokteran spesialis dan monitoring evaluasi dengan melakukan pemetaan dan kunjungan rumah.

9. Rasio Posyandu per satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.77
Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Posyandu	Unit	103	103	103	103	103
2.	Jumlah Balita	Anak	6.138	6.138	6.040	5.983	4.578
3.	Rasio Posyandu/Jml Balita	Per 1.000 balita	16,79	16,79	17,05	17,22	44,01

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

Jumlah Posyandu dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Rasio Posyandu per jumlah balita pada Tahun 2021 yaitu 44,01 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun 2021 rata-rata melayani 44 orang. Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata di Posyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemilik posyandu yang didukung oleh Desa / Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait. Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.78
Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sasaran Balita dari PUSDATIN	6.138	6.083	6.040	5.983	5.716
2	Jumlah D/S	4.551	4.596	4.605	3.751	4.239
3	Persentase D/S	74,1	75,6	76,2	62,7	68,9
4	Jumlah N/D	4.107	2.953	4.605	3.751	2.476
5	Persentase N/D	68,5	69,5	67,5	66,7	63,9

Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, 2021

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan secara berkala dengan mengunjungi posyandu pada hari buka posyandu. Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu berkaitan dengan cakupan pelayanan Gizi pada Balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendahnya prevalensi gizi kurang. Cakupan balita ditimbang di Kota Sawahlunto Tahun 2017 adalah sebesar 74,1 persen dan yang naik timbangannya 68,5 persen dari jumlah balita sasaran 6.138 orang. Pada tahun 2021 cakupan balita ditimbang sebesar 68,9 dan yang naik timbangannya adalah 63,9 dari jumlah balita sasaran sebanyak 5.716 orang. Ini menunjukkan kegiatan Posyandu perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan OPD terkait serta pihak swasta lainnya.

10. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2.79
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas	Unit	6	6	6	6	6
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	29	29	48	48	48
3	Jumlah Pustu	Unit	23	23	26	26	26
4	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	Unit	58	58	80	80	80
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,94	0,94	1,27	1,22	1,22

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pada tabel diatas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan trend kenaikan. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang diiringi penambahan jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto.

11. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.80
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,0163	0,0165	0,0159	0,0153	0,0152

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerintah Kota Sawahlunto. Apabila dilihat dari rasio perbandingan rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dari tahun 2017 rasionya 0,0163 menurun menjadi 0,0152. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk.

12. Rasio Dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 0,049 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,064 persen.

Tabel 2.81
Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter umum	Jiwa	23	23	19	25	30
2	Jumlah Dokter Gigi	Jiwa	7	7	9	7	12
3	Total Dokter	Jiwa	30	30	28	32	42
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
	Rasio Dokter persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,049	0,0480	0,045	0,049	0,064

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Berdasarkan peraturan Kepmenko Bidang Kesra No 54 Tahun 2013 Standart target Rasio Kebutuhan SDM pada tahun 2013 target dokter per 100.000 penduduk adalah 45 orang pada tahun 2019. Kota Sawahlunto telah mencapai 30 orang dengan jumlah penduduk yang tidak sampai 100.000 orang. Sehingga dengan kondisi ini sudah mencapai target standar rasio dokter per 100.000 penduduk.

13. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

No	Nama Sarana	2017	2018	2019	2020	2021
1	Polindes	4	4	6	6	6
2	Poskesdes	5	5	1	1	2
3	Puskesmas	6	6	6	6	6
4	Pustu	23	23	26	26	25
5	Puskesmas Keliling	17	17	17	10	8
6	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)	1	1	1	1	1
7	Klinik/Praktek Dokter	29	29	48	48	48
8	Bidan Praktek	27	27	25	25	25
9	Klinik KB	7	7	7	7	7
10	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
	TOTAL	127	120	120	138	136

Sumber Data :Profil Kota Sawahlunto, 2021

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Dari empat kecamatan yang ada sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 25 Puskesmas Pembantu, 6 Polindes dan 2 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Tabel 2.83
Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Tenaga Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dokter umum	23	23	19	25	30
2	Dokter gigi	7	7	9	7	12
3	Perawat	214	214	127	231	234
4	Bidan	136	136	75	149	154
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	29	29	31	29	29
6	Ahli Gizi	24	24	18	20	22
7	Analisis Laboratorium	18	18	17	16	16
8	Perawat Gigi	12	12	10	10	10
9	Ahli Penyehatan Lingkungan	16	16	13	15	15
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	30	30	40	49	49

Dilihat dari tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tahun 2021 sudah cukup baik, hanya ada beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang masih rendah yaitu persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang 11,11 persen, persentase drainase dalam kondisi baik 44,21 persen, persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik 45,95 persen, dan persentase luas sawah yang terairi dengan irigasi 46,84 persen.

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi pendukung pembangunan di Kota Sawahlunto. Status jalan di Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Jalan nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan panjang 12,37 kilometer. Jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Ruas jalan provinsi yang ada di kota Sawahlunto yaitu Jalan Guguk Cino sampai dengan Sawahlunto (Lapangan Segitiga) dengan panjang 43,20 kilometer yang berbatasan dengan kabupaten Tanah Datar sangat strategis untuk pengembangan ntegrasi wisata sejarah (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung). Status jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah jalan kota dengan panjang jalan 454,87 kilometer. Sesuai dengan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum dan Penetaan Ruang, disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah kondisi jalan baik di bagi dengan panjang jalan kota. Berikut secara lengkap tabel proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kota Sawahlunto selama periode 2017-2021:

Tabel 2. 86
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kondisi Jalan Baik (Km)	287,35	298,15	298,15	310,75	315,80
2	Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
3	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	63,10	65,50	65,50	68,30	69,43

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2021

Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini menggambarkan tingkat aksesibilitas pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. Peningkatan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan sehingga dapat berkendara dengan selamat sampai tujuan. Sesuai tabel diatas, dari tahun 2017 hingga tahun 2021, terjadi peningkatan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 6,33 persen. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Langkah untuk meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik kedepannya adalah dengan pemeliharaan bangunan pelengkap seperti bahu jalan dan drainase karena salah satu penyebab kerusakan jalan adalah drainase dan bahu jalan yang tidak berfungsi dengan baik.

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didefenisikan dengan jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk kota sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 87
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Panjang Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi (Km)	30,65	30,65	30,65	30,65	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara (Km)	11,35	11,35	11,35	11,35	12,37
4	Jumlah panjang jalan total (Km)	496,52	496,87	496,87	496,87	510,44
5	Jumlah Penduduk (orang)	61.398	61.898	62.524	63.500	65.687
6	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (Km/orang)	0.0081	0.0079	0.0079	0.0078	0,0077

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2021

Dilihat dari tabel diatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan membuka jalan baru atau memperlebar jalan yang ada pada titik-titik tertentu.

Standar Pelayanan Minimal rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di kota Sawahlunto adalah 0.74 kilometer per 100 penduduk. Dari data rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2021 adalah 0,0077 kilometer per orang atau 0,77 kilometer per 100 orang. Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan pembangunan atau pembukaan jalan baru sehingga standar pelayanan minimal panjang jalan tercapai.

3. Panjang Dan Kondisi Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan diberi lebih tinggi dari permukaan jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dibagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100. Data lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 88
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar (%)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2021

Jalan yang memiliki trotoar di Kota Sawahlunto masih terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada, persentasenya hanya 1,82 persen dari panjang jalan. Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 panjang trotoar di kota Sawahlunto tidak mengalami peningkatan.

4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tersedianya sistem drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan perhitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota. Rincian drainase dalam kondisi baik kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 89
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Di Kota Sawahlunto Tahun 2017– 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	8,30	8,30	8,30	10,30	58,12
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	454,87	454,87	454,87	454,87	131,48
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.(%)	1,82	1,82	1,82	2,26	44,20

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2021

Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 panjang seluruh drainase yang digunakan adalah panjang seluruh drainase jalan. Sehingga tidak ada peningkatan yang begitu besar. Pada tahun 2021, data panjang seluruh drainase yang dipakai adalah panjang seluruh drainase perkotaan bukan drainase jalan, sehingga persentase panjang drainase dalam kondisi baik terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 2,26 persen menjadi 44,20 persen.

5. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irigasi keseluruhan dikali 100 persen. Irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 90
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	33,86	35,72	40,72	41,26	41,45
2	Panjang Saluran Irigasi (Km)	76,88	91,04	91,85	92,39	92,59
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	44,06	42,38	44,33	44,66	44,77

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2021

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu tinggi (7,59 kilometer), hal ini disebabkan karena adanya pembangunan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi tersebut. Dampak dari saluran irigasi yang baik adalah meningkatnya hasil pertanian dari masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

6. Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya dikali 100 persen. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001, status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.571 Ha. Persentase luas lahan pertanian yang terairi irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 91
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	762	762	762	762	787
2	Luas Lahan Budi Daya (Ha)	1.680	1.680	1.680	1.680	1.571
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	45,35	45,35	45,35	45,35	50,09

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2021

Perkembangan persentase luas lahan terairi irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2017 sampai 2021 memiliki nilai kecenderungan tetap, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu jaringan irigasi dan kondisi air yang kurang memadai serta adanya perubahan lahan pertanian.

7. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001, status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.680 Ha. Berikut tabel rasio jaringan irigasi kota Sawahlunto pada tahun 2017 – 2021 :

Tabel 2. 92
Rasio Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	76,88	91,04	91,85	92,39	92,78
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	1.680	1.680	1.680	1.680	1.571
3	Rasio Jaringan Irigasi	0,0458	0,0542	0,0547	0,0549	0,0590

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, 2021

Rasio jaringan irigasi dari Tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan panjang saluran irigasi. Semakin panjang saluran irigasi maka rasio jaringan irigasi akan meningkat.

8. Sanitasi dan Air Bersih

a. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat yang berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100° C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarannya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 93
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	16.542	16.542	16.542	16.542	16.542
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih (RT)	14.379	14.379	14.379	14.889	15.218
3	Persentase (%)	86,92	86,92	86,92	90,00	91,99

Sumber Data: PAMSIMAS Kota Sawahlunto, 2021

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2017 sampai tahun 2019 cenderung tetap dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan, hal ini disebabkan oleh tersedianya sumber-sumber air bersih yang baru, baik

yang disediakan oleh PDAM, maupun oleh program-program yang berbasis masyarakat, seperti Pamsimas.

b. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik Jamban

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 94
Persentase Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2017 - 2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah (unit)	13.488	13.607	13.601	14.257	14.314
2	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	13.488	13.607	13.601	14.257	14.245
3	Jumlah rumah dengan jamban (unit)	13.073	12.702	12.714	13.352	13.558
4	Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat (unit)	10.842	11.496	10.809	11.752	11.801
5	Persentase yang memenuhi syarat (%)	82,93	90,50	85,00	88,00	87,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2021

Dalam lima tahun terakhir ini Pemerintah Kota Sawahlunto telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa tahun 2018 ini capaian rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 90,50 persen. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan dan penurunan hal ini disebabkan perilaku penghuni terkait jamban sehat, kondisi jamban atau sarana prasarana yang tidak berfungsi atau tidak tersedia air. Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacangan dan lainnya.

Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada faktor ekonomi, kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septictank, sumur resapan, got dan lainnya. Persentase RT dengan SPAL yang memenuhi syarat sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2. 95
Persentase Rumah Tangga dengan SPAL yang Memenuhi Syarat
Tahun 2017 - 2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah (unit)	13.488	13.607	13.601	14.257	14.314
2	Jumlah rumah yang diperiksa (unit)	13.488	13.607	13.601	14.257	14.257
3	Jumlah rumah dengan SPAL (unit)	13.073	13.148	13.173	13.983	14.192
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat (unit)	10.842	12.702	11.434	11.363	11.903
5	Persentase yang memenuhi syarat (%)	82,93	90,50	86,80	81,00	83,9

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2021

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga rata rata sudah mencapai 83,9 persen. Diharapkan hal ini terus ditingkatkan melalui

penyuluhan dan pendekatan keluarga sehingga pemahaman akan fungsi dan manfaat SPAL dapat tercapai sesuai harapan serta angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan dan penurunan persentase yang memenuhi syarat ini disebabkan banyak faktor salah satunya terkait perilaku penghuni rumah seperti adanya genangan air, tersumbat dan sebagainya.

D. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman merupakan urusan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang mengampu Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 96
Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman**

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah warga negara terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/ kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup setiap tahun sudah mencapai 100 persen. Adapun setiap tahun diberikan bantuan untuk Rumah Layak huni dengan anggaran sebesar 17,5 juta rupiah bagi masing-masing rumah dengan rincian 15 juta rupiah untuk material pembangunan rumah dan 2,5 juta rupiah untuk upah. Sedangkan pembangunan rumah layak huni sebesar 35 Juta dengan rincian 30 juta rupiah untuk material pembangunan rumah dan 5 juta rupiah untuk upah. Perkembangan jumlah penerima bantuan sebagai berikut :

**Tabel 2. 97
Penerima Bantuan RTLH
Tahun 2017 -2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penerima bantuan RTLH	15	232	473	172	98

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Selain SPM Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman mempunyai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terlihat dari perkembangan indikator kinerja daerah (IKD) terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 98
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah**

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7
1	Penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani (%)	60,00	65,00	70,00	75,00

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni)(%)	6,40	5,40	11,29	10,08
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) (%)	62,00	65,00	70,00	75,00
5	Persentase RTLH (%)	7,48	4,01	2,62	10,63
6	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs)	42,58	9,96	133,21	85,84

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Sesuai dengan tabel diatas, realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2021 sudah cukup baik. Kegiatan untuk pengurangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh tetap dilaksanakan setiap tahunnya, berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh yang ada di Kota Sawahlunto.

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan disain unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). (Badan Pusat Statistik, 2015). Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berikut ini adalah data rumah tidak layak huni kota Sawahlunto dari tahun 2017 – 2021:

Tabel 2. 99
Data Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kecamatan Silungkang	231	151	29	9	246
2	Kecamatan Barangin	245	182	60	39	571
3	Kecamatan Talawi	154	116	110	31	365
4	Kecamatan Lembah Segar	301	221	99	85	339
	Total	931	670	298	164	1.521

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 – 2021 terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamatan, dengan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada tahun 2021 sebesar 1.521 unit rumah. Peningkatan jumlah RTLH yang sangat besar ini disebabkan karena perubahan standar rumah yang layak huni dan pendataan ulang bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Berdasarkan nota dinas dari Kementerian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor: 242/ND-CK/2019 tanggal 26 Desember 2019, seluruh kabupaten/kota harus melakukan verifikasi ulang terhadap luasan kumuh. Verifikasi luasan kumuh Kota Sawahlunto berdasarkan pada baseline program KOTAKU bulan Juni tahun 2020.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang, perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2019. Berikut Surat Keputusan Walikota Sawahlunto tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.100
Surat Keputusan Walikota Sawahlunto
Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020
Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KUMUH (Ha)
1	Talawi	Bukik Gadang	16,58
2	Talawi	Kumbayau	14,90
3	Talawi	Tumpuak Tengah	13,06
4	Talawi	Sikalang	2,94
5	Talawi	Rantih	11,03
6	Barangin	Durian II	14,89
7	Barangin	Santur	13,03
8	Barangin	Balai Batu Sandaran	2,00
9	Barangin	Lumindai	6,38
10	Lembah Segar	Air Dingin	3,20
11	Lembah Segar	Kubang Tengah	10,99
12	Lembah Segar	Pasar Kubang	7,45
13	Silungkang	Silungkang Duo	7,01
14	Silungkang	Silungkang Tigo	2,35
15	Silungkang	Taratak Bancah	3,60
16	Silungkang	Silungkang Oso	5,80
JUMLAH			135,21

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Adapun perkembangan pemukiman kumuh yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 101
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	42,58	42,58	9,36	135,21	85,84
2	Luas Permukiman)(Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	2,73	2,73	0,60	8,66	5,50

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh dari tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan sampai 0,60%, namun tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan adanya perubahan SK Kumuh pada tahun 2020 sehingga luasan kumuh Kota Sawahlunto bertambah menjadi 135,21 Ha. Untuk itu sangat perlu percepatan dalam mengatasi permukiman kumuh ini dalam menanggulangi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Sawahlunto dengan perbaikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi lingkungan kumuh tersebut.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan air bersih. Berikut ini tabel rasio rumah layak huni:

Tabel 2. 102
Rasio Rumah Layak Huni
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah yang layak huni (unit)	12.238	12.589	13.056	13.884	12.793
2	Jumlah rumah (unit)	13488	13.607	13.601	14.257	14.314
3	Rasio rumah layak huni (%)	90,73	92,52	95,99	97,38	89,37

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Sesuai tabel diatas, terjadi penurunan rasio rumah layak huni di tahun 2021, disebabkan karena adanya perubahan standar rumah yang layak huni, sehingga rumah yang awalnya termasuk kategori layak huni di tahun 2020 menjadi rumah tidak layak huni di tahun 2021. Seiring dengan peningkatan jumlah rumah yang ada di Kota Sawahlunto terjadi juga penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah rumah yang layak huni di tahun 2021, ini disebabkan oleh adanya bencana longsor, kebakaran dan sebagainya. Untuk itu bantuan untuk RTLH ini tetap dilaksanakan setiap tahun dalam mengantisipasi untuk rumah-rumah yang tertimpa bencana karena keadaan geografis kota Sawahlunto yang rawan bencana.

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman. Berikut ini tabel rasio permukiman layak huni:

Tabel 2. 103
Rasio Permukiman Layak Huni
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas permukiman yang layak huni (Ha)	1.519,05	1.519,05	1.552,27	1.426,42	1.475,79
2	Luas permukiman (Ha)	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63	1.561,63
3	Rasio permukiman layak huni	97,27	97,27	99,40	91,354	94,50

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan rasio permukiman layak huni pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena program penanganan permukiman kumuh di tahun 2021 melalui program KOTAKU pada Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, sehingga mempengaruhi rasio permukiman layak huni.

3. Persentase Luas Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan

Menurut UU No.1 tahun 2011, permukiman yang tidak layak huni terjadi karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh diperkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat. Berikut tabel persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan tahun 2017 – 2020:

Tabel 2. 104
Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan Perkotaan
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas permukiman kumuh diperkotaan (Ha)	10,26	10,26	9,36	18,09	18,09
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	42,58	42,58	9,36	135,21	85,84
3	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan (%)	24,09	24,09	100,00	13,38	21,07

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan SK Walikota Nomor : 188.45/249/WAKO-SWL/2015 tanggal 18 November Tahun 2015, luas permukiman kumuh di Kota Sawahlunto adalah 42,58 hektar dan setelah dilakukan penanganan melalui berbagai program diantaranya Program KOTAKU, Sanimas, Pamsimas, BPS dan DAK Perumahan sampai tahun 2019, tercatat luasan kumuh kota sawahlunto berkurang menjadi 9,36 hektar, dan seluruhnya berlokasi di wilayah perkotaan dan tidak bisa dilakukan penanganan atau intervensi karena berada di lokasi Tanah Milik PT. Bukit Asam dan PT. KAI. Pada tahun 2020 diterbitkan SK Walikota Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Kota Sawahlunto dan teridentifikasi seluas 135,21 hektar lokasi kumuh yang tersebar di 16 desa/kelurahan. Pada tahun 2021 sisa luas permukiman kumuh adalah 85,84 hektar, yang 21,07 persen diantaranya berada di wilayah perkotaan.

E. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk Penanggulangan Bencana dan Kebakaran)

Urusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Linmas. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Sawahlunto. Pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari indikator berikut ini :

Tabel 2.105
Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	0	0	0	0	0
Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda (IKD)	2,6	2,3	0,046	-50	-3300
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (IKD)	100	100	100	100	100
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda (IKD)	100	100	100	100	100

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Linmas per desa/kelurahan (IKD)	10	10	10	10	10
Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (linmas)	1 : 22,96	1 : 22,77	1 : 21,75	1 : 21,53	1 : 22,96
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100
Persentase penegakan perda	100	100	100	100	100

Sumber Data: Satpol PP & Pemadam Kebakaran, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator pencapaian keberhasilan urusan ketentraman dan ketertiban dari tahun 2017 sampai dengan 2021, secara keseluruhan pencapaian sudah 100 persen, yakni persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, persentase penanganan kasus pelanggaran Perda dan persentase penegakan Perda. Pada indikator persentase penurunan kasus pelanggaran Perda, dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan kasus namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan kasus. Hal ini disebabkan karena banyaknya terjadi pelanggaran kasus Covid-19 di Kota Sawahlunto di tahun 2021 sebanyak 553 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 7767 kasus.

Petugas Satpol PP menerapkan razia protokol kesehatan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Pada masa ini banyak warga Kota Sawahlunto yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sehingga tercatat oleh Satpol PP sebagai pelanggaran Perda, dan semua kasus dapat ditangani 100 persen oleh Satpol PP. Penanganan atas pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto merupakan bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto dimana semua pelanggaran 100 persen ditangani oleh Satpol PP. Ini merupakan salah satu cakupan SPM pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Selain pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat oleh petugas perlindungan masyarakat urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (angka kriminalitas) juga dipengaruhi oleh penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Petugas Satpol PP dan Linmas juga menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas di Kota Sawahlunto. Berikut data kriminalitas di Kota Sawahlunto:

Tabel 2. 106
Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Curat (pencurian dan pemberatan)	17	19	21	19	9
Penggelapan	6	3	2	3	1
KDRT	4	3	3	4	-
Penipuan	8	19	3	3	2
Pengrusakan	4	3	4	2	1
Curanmor	24	23	6	8	7
Pembakaran	-	1	1	-	-
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	-	-	1	1	1
Perkosaan	4	4	6	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	-
Jumlah kriminal	67	75	47	40	21
Jumlah penduduk	60.778	61.898	62.524	63.500	65.687
Angka kriminalitas (%)	0,110	0,121	0,075	0,059	0,031

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dilihat dari tabel di atas angka kriminalitas Kota Sawahlunto dari tahun 2017-2021 secara umum mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2018 saja yang mengalami peningkatan kasus dari tahun 2017. Selanjutnya tahun 2019 dari 0,121 menjadi 0,059. Kecuali pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan dari 67 kasus menjadi 75 kasus atau naik 0,011%. Selanjutnya angka kriminalitas mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai

tahun 2021. Penurunan angka kriminalitas bisa dikatakan secara umum bahwa Kota Sawahlunto adalah kota kecil yang aman dari tindakan kejahatan.

Permasalahan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto dan dalam rangka sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas. Tindak kriminalitas menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengatasinya, baik itu untuk menekan jumlahnya dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

Urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat juga mencakup pada indikator penanggulangan bencana daerah. Berikut indikator pencapaian urusan ketentraman dan ketertiban pada aspek penanggulangan bencana daerah :

Tabel 2. 107
Indikator pencapaian urusan ketentraman dan ketertiban pada aspek penanggulangan bencana daerah Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,47	0,49	0,44	0,56
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	210	210	238	395	330
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	185	185	213	147	290
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	197	204	117	599	339
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran (SPM)	93	78	85	75	56
6	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (IKD)	100	100	100	100	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKD)	0	0	0	100	100
8	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (IKD)	33	34	33	33	33
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKD)	100	100	100	100	100
10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKD)	100	100	100	100	100
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKD)	100	100	100	100	100
12	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana (IKD)	15	15	20	30	40
13	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100
14	Tingkat waktu tanggap (response time rute) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit) (WMK) (IKD)	20	15	15	15	15

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar BPBD Kota Sawahlunto, 2021

Indeks Ketahanan Daerah merupakan instrumen dalam mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di Kabupaten, Kota dan Provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana.

Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai 2021 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto berada pada tingkat “sedang”, yang telah melalui 7 pengukuran; Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyak kegiatan tidak terlaksana karena kondisi pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan rendahnya nilai isian dalam sistem aplikasi Indeks Ketahanan Daerah. Pada tahun 2021 nilai IKD sudah meningkat dikarenakan kegiatan sudah terlaksana kembali seperti biasanya dan adanya penambahan pembelian peralatan penanggulangan bencana.

Kota Sawahlunto merupakan kota yang relatif rawan longsor dan rawan bencana. Hal ini disebabkan karena tekstur wilayahnya berada di perbukitan dan pemukimannya banyak yang berada di lereng bukit. Sehingga beberapa kawasan di Kota Sawahlunto menjadi daerah rawan bencana. Berikut data bencana alam yang terjadi di Kota Sawahlunto:

Tabel 2. 108
Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banjir	16	4	12	-	2
2	Longsor	126	123	136	55	55
3	Gempa	-	-	1	-	-
4	Angin puting beliung	27	47	63	63	61
	Jumlah	169	174	212	118	118

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bencana yang paling sering terjadi adalah longsor dan puting beliung dengan jumlah kejadiannya fluktuatif tinggi. Bencana yang sering terjadi tidak hanya merusak infrastruktur kota tetapi juga menimbulkan kerugian materil bagi korban yang terdampak. Sebagai upaya penyelamatan bagi korban terdampak telah dilakukan dengan evakuasi korban ke daerah yang aman. Semua korban bencana telah mendapatkan pelayanan keselamatan 100 persen. Sebagai upaya pencegahan pemerintah Kota Sawahlunto juga mensosialisasikan zona rawan bencana kepada masyarakat agar masyarakat dapat berhati-hati dan mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi. Upaya ini adalah sebagai bentuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Selain bencana alam, bencana non alam juga sering terjadi di Kota Sawahlunto. Bencana kebakaran juga selalu terjadi di Kota Sawahlunto. Setiap peristiwa bencana kebakaran yang terjadi menimbulkan kerugian baik materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Berikut data kebakaran yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2021 di Kota Sawahlunto:

Tabel 2. 109
Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kasus kebakaran	51	20	29	16	16
2	Kasus kebakaran yang ditangani	51	20	29	16	16
3	Persentase penanganan kebakaran (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tiga tahun terakhir kasus bencana kebakaran telah mengalami penurunan jumlah. Hal ini tentunya tidak lepas dari kewaspadaan masyarakat Kota Sawahlunto serta kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam pencegahan dan penanganan kebakaran yang terjadi. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu indikator dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Sebagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, OPD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta Badan Kesatuan Politik dan Penanggulangan Daerah telah melakukan sosialisasi Perda dan Sosialisasi zona rawan bencana serta pelatihan penyelamatan dari bencana bagi masyarakat Kota Sawahlunto. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi serta penanganan jika terjadi bencana di Kota Sawahlunto dengan harapan masyarakat Kota Sawahlunto cepat tanggap dalam penanganan bencana yang terjadi.

F. Urusan Pemerintah Bidang Sosial (termasuk penanganan Pasca Bencana serta Taman Makam pahlawan)

Urusan Sosial adalah urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara melindungi rakyatnya. Kelompok masyarakat penerima layanan sosial antara lain adalah : masyarakat berkategori miskin, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan/ pengemis terlantar, orang dengan gangguan jiwa terlantar dan korban bencana. Pelaksanaan urusan ini memiliki pengaruh dalam mendukung kemajuan pembangunan manusia .

Memenuhi amanat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan SPM Bidang Sosial dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2. 110
Capaian SPM Bidang Sosial Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar luar panti	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti (%)	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2021

Terlaksananya capaian SPM ini adalah berkat kerjasama yang baik oleh semua pihak serta adanya dukungan dana baik oleh APBD Kota, Provinsi maupun APBN. Pelaksanaan SPM ini melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 111
Program dan Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial di Kota Sawahlunto

No	Program	Kegiatan
1	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
3	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2021

Salah satu sasaran SPM adalah masyarakat dengan kondisi disabilitas. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 112
Data Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Penyandang Cacat	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyandang Tuna Netra	31	29	21	21	21
2	Penyandang Tuna Rungu	22	23	19	19	19
3	Penyandang Tuna Wicara	33	33	30	30	30
4	Penyandang Tuna Daksa	28	25	140	140	140
5	Penyandang Tuna Grahita	193	187	133	133	133
6	Cacat Lainnya/Mental Psikotik	86	86	19	44	44
	Jumlah	393	383	362	387	387

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2021

Ukuran ketercapaian pelaksanaan SPM tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial berikut.

Tabel 2. 113
Data Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Sosial Tahun 2021

No	URAIAN	Jumlah	Target terbantu	Jumlah terbantu	% terbantu dari jumlah
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	387	144	144	37,2
2	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	161	74	74	45,96
3	Jumlah Penyandang gangguan jiwa (ODGJ)	96	45	45	46,87
4	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	635	287	287	45,19
	Jumlah	1.279	550	550	43,00

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2021

Capaian pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial dari target yang ditetapkan telah mencapai 100 persen. Namun jika dilihat dari keseluruhan jumlah penyandang masalah sosial, maka belum semuanya dapat terbantu oleh pemerintah (<50 persen). Diantara penyebab adalah ketersediaan anggaran yang terbatas serta jenis bantuan (kualitas dan kuantitas) yang diberikan tiap tahun belum menyentuh akar permasalahan sehingga tidak mampu mengangkat persoalan dan belum menaikkan derajat masyarakat menuju kesejahteraan.

Permasalahan kesejahteraan sosial ini cukup kompleks, perlu penanganan / partisipasi bersama antara pemerintah, tokoh agama/adat, masyarakat serta pihak ketiga lainnya. Program kegiatan harus lebih tajam, terpadu (lintas sektoral) dan berkelanjutan mengingat Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

Perhatian terhadap ABK di bidang kesehatan dan pendidikan/ keterampilan diharapkan dapat menjadikan ABK mandiri dan punya penghasilan sendiri. Untuk ODGJ sangat dibutuhkan upaya bersama berbagai pihak (keluarga, lingkungan, Pemerintah, tokoh masyarakat/ agama, dan lainnya) dalam mencegah faktor pemicu gangguan jiwa & penanganan yang komprehensif untuk yang sudah mengalami gangguan jiwa. Dan untuk pengelolaan Panti Asuhan (2 unit di Sawahlunto) diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar dalam memperoleh kasih sayang dan kebutuhan dasar lainnya. Sehingga kebutuhan tumbuh kembang (fisik & mental) mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan kondisi Kota Sawahlunto yang cukup luas dan keterbatasan ketersediaan panti asuhan di tiap kawasan Sawahlunto, maka diharapkan peran serta seluruh pihak / lapisan masyarakat untuk dapat saling membantu anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar lainnya yang ada dilingkungan masing-masing.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki fasilitas 1 unit panti anak yatim piatu di Mudik Air dan 1 unit panti penyandang cacat di Waringin Lubang Panjang. Pemerintah menyiapkan biaya permakanaan anak panti, transport ke sekolah, paket lebaran dan honor pengasuh.

Panti asuhan memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar. Keberadaan panti asuhan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar dalam memperoleh kasih sayang dan kebutuhan dasar lainnya. Sehingga kebutuhan tumbuh kembang (fisik & mental) mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan kondisi Kota Sawahlunto yang cukup luas dan keterbatasan ketersediaan panti asuhan di tiap kawasan Sawahlunto, maka diharapkan peran serta seluruh pihak / lapisan masyarakat untuk dapat saling membantu anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar lainnya yang ada dilingkungan masing-masing.

Berikut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto 2021 hasil pemutakhiran oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai dasar pemberian bantuan-bantuan pemerintah.

Tabel 2. 114
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto
Tahun 2021

URAIAN	L. SEGAR	BARANGIN	SILUNGKANG	TALAWI	JUMLAH
Jumlah penduduk DTKS (jiwa)	4.003	6.067	3.884	4.529	18.489
Jumlah kepala keluarga DTKS (jiwa)	1.311	1.930	1.234	1.491	5.972

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2021

DTKS ini memuat data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diverifikasi rutin secara berjenjang mulai dari Petugas Sosial Masyarakat (PSM) ditiap desa kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Teknis Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat. Kriteria penduduk yang belum sejahtera ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status kesejahteraan berkategori :

- Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- Desil 2, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- Desil 3, yaitu rumah tangga dalam kelompok 20-30 persen terendah (hampir miskin) yang berhak menerima bantuan : Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sedangkan kelompok rumah tangga pada Desil 4 (rumah tangga dalam kelompok 30-40 persen terendah / rentan miskin) tidak dimasukkan sebagai penduduk yang belum

sejahtera. Jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat yang terdata dalam DTKS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 115
Jenis Bantuan pada Peserta DTKS tahun 2021

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima (org)
1	Bantuan BPNT/Sembako Reguler (APBN)	646
2	Bantuan BPNT/ Sembako PPKM (APBN)	1786
3	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)(APBN)	803
4	Bantuan Sosial Tunai (BST) (APBN)	1878
5	Asistensi Lanjut Usia (APBN)	127
6	Perumahan Lansia kurang mampu (APBD)	287
7	Bantuan bagi penyandang disabilitas (bantuan UEP, alat bantu, kebutuhan dasar dan transpor ABK (APBD)	144

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2021

Pada tahun 2021, Kota Sawahlunto mendapat banyak jenis bantuan dari Pemerintah Pusat untuk peserta DTKS sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat akibat dampak Pandemi Covid 19. Namun jumlah bantuan ini secara kuantitatif masih rendah, karena hanya 5.671 orang yang mendapat bantuan dari total 18.489 peserta DTKS (30,67 persen).

Tabel 2. 116
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Sosial Tahun 2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	51,08
2	Persentase TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	n/a	15,5	38,57	53,28	89,52
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2021

Dari ke empat indikator IKD urusan sosial, masih terdapat 1 indikator dengan nilai masih rendah, yaitu persentase PMKS yang mampu hidup mandiri baru hanya 51,08 persen. Perlu upaya yang lebih besar lagi untuk mendorong PMKS agar terlepas dari masalah kesejahteraan sosial.

2.1.3.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja (15 sampai dengan 64 tahun). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada sisi tenaga kerja tidak hanya pengangguran, namun juga penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak. Penyebaran pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Sawahlunto untuk melakukan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya ditransmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan lockdown untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak

perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Berikut ini dijelaskan tentang ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto.

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah hak, masalah jamsostek, masalah upah pekerja, sistem kontrak kerja waktu tertentu dan PHK. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 117
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sengketa Pekerja - Pengusaha	-	2	2	2	3
2	Jumlah Sengketa Selesai	-	2	2	2	3
3	Jumlah Perusahaan	78	86	86	80	66
4	Rasio Sengketa	0	2,33	2,33	2,50	4,55

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto, 2021

Jumlah sengketa pekerja-pengusaha pada tahun 2017 tidak ada, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 2 sengketa, dan meningkat menjadi 3 sengketa pada tahun 2021. Sengketa pada tahun 2017 sampai dengan 2021 dipicu oleh masalah jamsostek, dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sengketa pengusaha dengan pekerja selama tahun 2018-2021 ini diselesaikan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dengan status 100 persen terselesaikan.

2. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Objek perlindungan tenaga kerja antara lain meliputi perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Tabel 2. 118
Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Capaian Indikator
Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan	78	86	86	80	66
2	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	3.031	4.023	4.061	3.070	2.922
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Peraturan Perusahaan)	3	3	5	7	11
	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (%)	3,85	3,49	5,81	8,75	16,67
2	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan (PKB)	2	2	2	2	2
	Persentase Perusahaan yang memiliki PKB (%)	2,56	2,33	2,33	2,50	3,03
3	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (Perusahaan)	-	1	3	4	6
	Persentase Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (%)	0	1,16	3,49	5,00	9,09
4	Struktur Skala Upah	-	-	-	-	-
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (Perusahaan)	7	9	11	12	18
	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 (%)	8,97	10,47	12,79	15,00	27,27

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	2.331	2.877	2.927	2.679	2.125
	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (%)	76,91	71,51	72,08	87,26	72,72
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	47,44	51,16	59,3	71,25	77,27

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto, 2021

Dilihat dari tabel diatas maka persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan, PKB dan LKS Bipartit dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sangat rendah yaitu kurang dari 20 persen. Sedangkan untuk struktur skala upah belum ada, selama tahun 2017 sampai dengan 2021 Kota Sawahlunto memakai dan berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat. Untuk persentase perusahaan yang menerapkan K3 menunjukkan tren yang meningkat yaitu 8,97 persen tahun 2017 naik menjadi 27,27 persen tahun 2021, tapi persentase ini juga rendah karena tidak sampai 30 persen dari perusahaan yang ada. Untuk persentase tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun 2017 sebanyak 76,91 persen, turun menjadi 71,51 persen pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 72,08 persen, pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 87,26 persen, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 72,72 persen. Sedangkan untuk persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari Kerja adalah individu yang berada dalam masa produktif yaitu umur 15-64 tahun dimana masih mencari pekerjaan. Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1. Dari tahun 2017-2019, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderung naik dengan pencari kerja perempuan lebih banyak dari pada pencari kerja laki-laki. Pada tahun 2017 jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 3,47 persen dan naik menjadi 23,75 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya sebesar 0,99 persen, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9,67 persen.

Tabel 2. 119
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	3	16	19	42	67	109	44	65	109	2	2	4	6	23	29
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1 (Orang)	282	265	547	402	540	942	238	221	459	181	222	403	165	135	300
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	1,06	6,04	3,47	10,45	12,41	11,57	18,49	29,41	23,75	1,10	0,90	0,99	3,64	17,04	9,67

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Persentase pencari kerja yang ditempatkan ini termasuk rendah karena tidak sampai 25 persen tiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, tidak adanya pencaker yang melapor/mengembalikan kartu pencari kerja (kartu AK-1) ke DPMPPTSPNaker saat mereka sudah diterima bekerja. Faktor lain yang menyebabkan pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Persaingan dunia kerja
- Banyaknya persaingan dalam dunia kerja dapat menyulitkan pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan impiannya.
- Kemampuan dan pendidikan

- d. Kemampuan dan pendidikan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.
- e. Pengalaman
- f. Pengalaman juga menentukan apakah seseorang layak bekerja untuk perusahaan tersebut atau tidak. Orang yang berpengalaman adalah orang yang terbiasa dengan dunia kerja dan memahami kemampuan yang dimilikinya.
- g. Minim informasi pekerjaan/networking.

4. Pelatihan Tenaga Kerja

Untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Sawahlunto maka Dinas yang membidangi tenaga kerja yaitu Dinas PMPTSPNaker telah melakukan berbagai upaya yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. Pada pertengahan tahun 2019 DPMPPTSPNaker telah mendirikan/membentuk UPTD Balai Latihan Kerja (UPTD dari Dinas PMPTSPNaker), yang mana UPTD BLK ini khusus bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu mendorong pencaker untuk bekerja atau berwirausaha, membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Pelatihan yang telah dilaksanakan di UPTD BLK antara lain adalah service hp, otomotif, menjahit, listrik, las, mebel, tata boga, bangunan, ac split dan lain-lain. Untuk melatih pencaker yang ingin mengikuti pelatihan yang tidak tersedia di UPTD BLK Sawahlunto maka Pemko Sawahlunto juga mengirim peserta pelatihan ke BLK Padang, ke BBPLK Medan, ke BBPLK Bekasi dan lain-lain.

Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja Pemerintah Kota Sawahlunto juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Universal Karya Mandiri Batam dan dengan PT. Jaya Perkasa Textile Sukoharjo tentang penempatan tenaga kerja, dan dengan beberapa perusahaan lokal tentang penginformasian lowongan kerja. Selain itu Pemko Sawahlunto juga menjalin kerjasama dengan perusahaan konveksi Batam (PT. Asiaco Batamindo) dalam hal menjahit seragam kerja. Dari tahun 2017 sampai dengan 021 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan, dan berbasis masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 120
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi,
Kewirausahaan Dan Masyarakat
Tahun 2017-2021

No	Kategori	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga Kerja yang dilatih (Orang)	Orang	51	106	166	86	160
2	Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi (Orang)	Orang	60	120	223	125	200
3	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi (Persen)	Persen	85	88	74	69	80
No	Kategori	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi (Orang)	Orang	80	40	40	-	40
2	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi (orang)	Orang	90	60	50	-	70
3	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (persen)	Persen	89	67	80	-	57
No	Kategori	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga kerja yang dilatih (orang)	Orang	-	-	-	-	75
2	Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat (orang)	Orang	-	-	-	-	100
3	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat(persen)	Persen	-	-	-	-	75

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto, 2021

Untuk mendukung program unggulan Provinsi Sumatera Barat dalam mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif maka Kota

Sawahlunto melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja dengan peserta pelatihan sebanyak 16 orang per paket untuk masing-masing jenis pelatihan, yang mana dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar para lulusan pelatihan bisa bekerja mandiri atau berwirausaha, dan membuka/menciptakan lapangan kerja baru. Dalam pencapaian target entrepreneur yang ditargetkan untuk Kota Sawahlunto sebesar 181 entrepreneur pada Tahun 2023, sudah diakomodir melalui program/kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD terkait seperti: Dinas PMPTSPNaker, Dinas Koperindag, DKP3 dan Dinas Parpora. Hal ini juga ditegaskan pada Kesepakatan Pramusrenbang Provinsi Sumatera Barat dengan Pemko Sawahlunto yang memuat Dukungan APBD Kota Sawahlunto terhadap pencapaian Progul Provinsi Sumatera Barat.

5. Lapangan Usaha Penduduk yang Bekerja

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Pada tahun 2017 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbesar di lapangan usaha lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan) yaitu sebanyak 7.688 orang (laki-laki sebanyak 6.864 orang dan perempuan sebanyak 824 orang), sedangkan pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017 dimana penduduk yang bekerja paling banyak juga pada lapangan usaha lainnya yaitu meningkat menjadi sebanyak 8.298 orang (laki-laki sebanyak 7.435 orang dan perempuan sebanyak 863 orang) yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.121
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2018

No	Menurut Lapangan Usaha	Tahun 2017			Tahun 2018		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pertanian	3.212	1.677	4.889	3.179	1.812	4.991
2	Industri Pengolahan	1.193	2.360	3.553	1.139	3.088	4.227
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	2.512	3.478	5.990	2.548	3.040	5.588
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	2.987	4.020	7.007	2.631	4.585	7.216
5	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)	6.864	824	7.688	7.435	863	8.298
Total		10.678	12.359	29.127	16.932	13.388	30.320

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2019

Sedangkan pada tahun 2020 terjadi perubahan penyajian data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana lapangan usaha dibagi menjadi tiga kategori saja yaitu pertanian, manufaktur dan jasa seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.122
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019 s.d 2021

No	Lapangan Usaha Tiga Kategori	Tahun 2019			Tahun 2020			2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	2.658	1.369	4.027	3.710	1.936	5.646	3.628	1.919	5.547
2	Manufaktur	6.350	2.017	8.367	5.521	1.840	7.361	5.295	2.055	7.350
3	Jasa	7.930	8.793	16.723	8.179	9.124	17.303	8.666	8.623	17.289
Total		16.938	12.179	29.117	17.410	12.900	30.310	17.589	12.597	30.186

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbanyak ada pada lapangan usaha Jasa yaitu berjumlah 16.723 orang (laki-laki sebanyak 7.930 orang dan perempuan sebanyak 8.793 orang). Dan pada tahun 2020 penduduk yang bekerja terbanyak juga ada pada lapangan usaha Jasa yaitu meningkat menjadi 17.303 orang (laki-laki sebanyak 8.179 orang dan perempuan sebanyak 9.124 orang), sedangkan pada tahun 2021 penduduk yang bekerja terbanyak juga ada pada lapangan usaha Jasa yaitu menurun menjadi 17.289 orang (laki-laki sebanyak 8.666 orang dan perempuan sebanyak 8.623 orang). Secara keseluruhan penduduk Kota Sawahlunto

yang berumur 15 tahun ke atas lebih banyak pada sektor jasa seperti; Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai perusahaan dan jasa kemasyarakatan lainnya. Untuk itu perlu peningkatan pelatihan bagi angkatan kerja dalam menambah skill untuk dapat mendirikan usaha sendiri dalam meningkatkan wirausaha yang ada di Kota Sawahlunto.

6. Tertinggi yang Ditamatkan

Jumlah pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir yang terbanyak adalah tamatan SLTA yaitu pada tahun 2017 sebesar 43,86 persen atau sebanyak 843 orang, dan pada tahun 2021 jumlah pengangguran terbuka yang tamat SLTA mengalami peningkatan menjadi 47,69 persen atau sebanyak 981 orang. Akan tetapi pada tamatan perguruan tinggi mengalami penurunan dari 30,49 persen atau sebanyak 586 orang tahun 2017 turun menjadi 26,15 persen atau sebanyak 538 orang pada tahun 2021. Sehingga pengangguran di Kota Sawahlunto banyak dari pengangguran terdidik yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.123
Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021**

No	Kegiatan Utama	2017					2018					2019					2020					2021				
		Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				Jml	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				Jml	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				Jml	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				Jml	Pendidikan yang ditamatkan				Jml
		SD ke bawah	SLTP/ Sede rajat	SLTA/Se de rajat	PT		SD ke bawah	SLTP/ Sede rajat	SLTA/ Sede rajat	PT		SD ke bawah	SLTP/ Sede rajat	SLTA/Se de rajat	PT		SD ke bawah	SLTP/ Sede rajat	SLTA/ Sede ra jat	PT		SD ke bawah	SLTP/ Sede rajat	SLTA/ Sede ra jat	PT	
1	Bekerja	7.734	5.517	10.815	5.061	29.127	3.642	5.543	9.819	10.961	29.965	7.761	5.336	10.325	5.695	29.117	8.867	4.841	9.969	6.633	30.310	8.299	4.995	10.275	6.617	30.186
2	Pengangguran Terbuka	206	287	843	586	1.922	292	272	999	288	1.851	488	285	840	519	2.132	476	286	1.377	570	2.709	170	368	981	538	2.057

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Banyaknya pengangguran terdidik di Kota Sawahlunto, sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto untuk itu perlunya pelatihan-pelatihan yang menambah skill sehingga dapat diarahkan untuk lebih membuka lapangan usaha. Setiap tahun Dinas PMPTSPNAKER khususnya BLK mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi, sehingga penganggur-penganggur terdidik yang banyak di Kota Sawahlunto mempunyai kompetensi yang dapat bersaing di dunia kerja dan juga dapat untuk membuka lapangan usaha sendiri. Namun dalam kenyataannya masih kurangnya minat para penganggur terdidik tersebut untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kota.

Tabel 2.124
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran (%)	6,19	5,75	6,82	8,20	6,38
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Orang)	19	109	109	4	29
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Berwirausaha (Orang)	5	5	10	15	31
4	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu Rencana Tenaga Kerja (%)	40	60	88	64	100
5	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	4,75	5,66	5,06	10,9	65,63
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	86,419	87,586	96,044	91,089	93,738
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	47,44	51,16	59,3	71,25	77,27
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)	3,47	11,57	23,75	0,99	9,67
9	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0	0	0	0
10	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	76,91	71,51	72,08	87,26	72,72
11	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0
12	Rasio Lulusan S1/S2/S3	5,78	6,34	6,59	6,91	7,42

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto,2021

B. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Gambaran umum pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125
Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KDRT	10	6	7	5	3
2.	Jumlah Rumah Tangga/ KK	14.452	19.394	19.394	20.330	23.323
3.	Rasio KDRT	0.02	0,03	0,03	0,02	0,0147
4.	Persentase bantuan penanganan	100	100	100	100	100

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	KDRT (%)					

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA Tahun 2021

KDRT ibarat fenomena gunung es, dimana kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data di atas rasio KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Sawahlunto harus tetap waspada. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diharapkan KDRT makin dapat ditekan.

Kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan penelantaran. Berikut data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan :

Tabel 2.126
Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A
Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban
Tahun 2021

NO	Jenis Kasus	Tahun 2021	
		Perempuan	Anak
1	Kekerasan Fisik	0	3
2	Kekerasan Seksual	1	14
3	Kekerasan Psikis	0	2
4	Penelantaran Rumah Tangga	0	0
5	Eksplorasi	0	0
6	Trafficking	0	0
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	0
8	Pemenuhan Hak Anak	0	0
9	Anak Berhadapan dg Hukum	0	8
10	Kenakalan anak	0	1
Jumlah Jenis Kasus		4	28
Total		32	
Persentase bantuan penanganan kasus (%)		100	

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Masih terdapat banyak kasus tahun 2021 yang harus diselesaikan oleh P2TP2A Kota Arang. Dari data diatas diketahui bahwa jumlah korban anak-anak lebih banyak. Anak-anak adalah warga Negara yang rentan dikenai tindakan kekerasan ketika ada masalah dalam keluarga atau lingkungannya. Faktor penyebab seperti : ketimpangan ekonomi, mental & spritual orang tua yang lemah, lingkungan yang tidak kondusif dan lainnya mengakibatkan perempuan dan anak-anak sering jadi korban. Hal ini adalah PR besar bagi Pemerintah Kota dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, bantuan hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan lainnya.

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis Hak Anak

dan pembangunan yang Responsif Gender. Sampai tahun 2019 sudah ada sebanyak 19 Desa/Kelurahan Ramah Anak Kota Sawahlunto.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang Pengarusutamaan Gender maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.127
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,50	95,68	95,51	95,48	95,73
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,86	65,33	66,18	65,87	n/a

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah keberperanan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Partisipasi Anak dalam Pembangunan dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-Diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghargai partisipasi anak. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan dalam wadah Forum Anak.

Tabel 2.128
Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Forum Anak Tk. Kota Sawahlunto	1	1	1	1	1
2	Forum Anak Tingkat Kecamatan	4	4	4	4	4
3	Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan	23	23	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memnuhi hak partisipasi anak. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Tabel 2.129
Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir
Tahun 2017 – 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kenakalan Remaja	7 orang	9 orang	3 orang	5 orang	-
Kasus Kenakalan Remaja yang Terselamatkan	7 kasus	9 kasus	3 orang	5 orang	-
Persentase (%)	100	100	100	100	-

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Tahun 2021 tidak terjadi kasus kenakalan remaja yang diselesaikan oleh P2TP2A. Diharapkan kedepan tidak ada kasus di tahun-tahun berikutnya. Perlu peran serta keluarga, lingkungan dan Pemerintah untuk menjaga, mengawasi dan melindungi remaja dari tindak kenakalan.

Data kenakalan remaja yang ditampilkan diatas merupakan data kenakalan remaja yang diselesaikan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto., Kasus tersebut berdasar laporan yang di terima melalui masyarakat dan di bantu penyelesaian nya oleh P2TP2A sehingga bisa normal kembali. Dalam hal ini belum termasuk data kenakalan remaja yang terdapat pada sekolah-sekolah. Untuk kedepannya akan di upayakan kerja sama dengan Instansi terkait sehingga keseluruhan data kenakalan remaja akan bisa terpantau dan terselesaikan dengan sempurna.

Tabel 2.130
Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2017- 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Predikat Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Dalam perwujudan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Kota Sawahlunto diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, maka dikembangkan Program Kota Layak Anak yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 Klaster pemenuhan hak anak, yaitu : 1. Hak sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pendidikan, 5. Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Dalam penilaian KLA terdiri dari predikat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Pemerintah Kota Sawahlunto akan berupaya untuk meningkatkan kriteria KLA menjadi Utama.

Tabel 2.131
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2021

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD)	65,86	95,68	95,51	95,48	n/a
2	Persentase Penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak (IKU OPD) (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)	15	20	20	20	20
5	Rasio KDRT	0,02	0,03	0,03	0,02	0,0147
6	Persentase Kelurahan ramah anak (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	51,35
7	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai (%)	100	100	100	100	100
8	Total fertility rate	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
9	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	-	-	6,13	85,56	-
10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	n/a	0,019	0,029	0,012	0,019

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk menekan angka Rasio KDRT dan Rasio kekerasan terhadap perempuan. Serta mendorong peningkatan nilai indikator lainnya.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.132
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Bidang Pangan
Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Indeks Ketahanan Pangan	64,17	65,89	67,36	68,91
Konsumsi keragaman pangan (kkal/kapita/hari)				
padi-padian	907,70	870,20	858,40	944
Umbi-umbian	66,20	35,90	38,60	32,2
Pangan Hewani	290,00	231,10	238,30	236,3
Minyak dan Lemak	279,90	350,80	310,50	343
Buah/Biji Berminyak	36,30	49,60	45,70	39,9
Kacang-kacangan	98,50	80,60	64,20	71,8
Gula	24,10	39,40	33,20	21,3
Sayur dan buah	90,30	126,80	112,30	106,7
lain-lain	9,30	9,60	10,60	9,5
Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi (%)	81,57	90,1	96,33	95,14
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	152	191	184	165
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	87,30	86,50	83,70	84,5
Ketersediaan Pangan Utama (Kal/hr)	3569,7	3564	3131	3027

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Energi Protein Perkapita Gr/Kap/hr)	127,6	114,3	108,3	100,46
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (kali)	4	4	4	4

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Mulai Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan indeks Ketahanan pangan ini menandakan bahwa kondisi terpenuhinya pangan kota Sawahlunto yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu yang mengalami peningkatan di lima tahun terakhir. Untuk konsumsi keragaman pangan seperti padi padian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 858,40 kal/hr dan tahun 2021 sebesar 944 kal/hr dan untuk umbi-umbian dan pangan hewani mengalami penurunan pada Tahun 2021, untuk minyak dan lemak mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak naiknya. Dan untuk buah dan biji berminyak mengalami penurunan dari pada Tahun 2020. Sedangkan Kacang- kacang mengalami penurunan. Untuk Gula, Sayur dan Buah dan lain lain pada Tahun 2021 rata rata mengalami penurunan dari pada Tahun 2020. Dan untuk Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi juga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 sebesar 96,33 persen sedangkan tahun 2021 sebesar 95,14 persen. Secara keseluruhan untuk konsumsi keragaman pangan yang paling besar konsumsi keragaman pangan kota Sawahlunto sampai 2021 adalah pada padi-padian, ini dikarenakan konsumsi keragaman pangan sangat berpengaruh dari pola konsumsi masyarakat, untuk Sumatera Barat pada umumnya menjadi padi-padian sebagai bahan utama yang wajib di konsumsi terutama beras. Dengan konsumsi keragaman pangan ini agar pola konsumsi tidak berfokus pada satu jenis bahan pangan saja , sehingga itu perlu adanya diversifikasi produk untuk makanan pokok di Kota Sawahlunto dengan menggiatkan sosialisasi terhadap aneka ragam konsumsi untuk beberapa bahan pangan. Untuk Ketersediaan Pangan Utama mengalami sedikit Penurunan yang pada Tahun 2020 sebesar 3131 Kal/hr pada Tahun 2021 Turun menjadi 3027 Kal/hr, yang mana seiring dengan menurunnya produksi tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2021. Untuk konsumsi keragaman pangan padi-padian di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan di Tahun 2021, namun secara ketersediaan pangan utama mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ini berarti Kota Sawahlunto masih perlu meningkatkan ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Ini terlihat dari persentase ketersediaan pangan terutama beras di Kota Sawahlunto mengalami penurunan di Tahun 2021, dimana jumlah protein yang tersedia mengalami penurunan di Tahun 2021. Begitu juga dengan Ketersediaan Energi Protein Perkapita juga mengalami Penurunan pada Tahun 2021 walaupun tidak begitu signifikan. Dilihat dari keamanan pangan Berdasarkan itu Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dari untuk tahun 2021 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan yaitu 95,14 persen ini ditandainya dengan dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan setiap triwulannya sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Pada Urusan Bidang Pangan Tahun 2021 mempunyai Inovasi Kampung manggis, dengan memfokuskan pengembangan kawasan Holtikultura khususnya tanaman manggis untuk menjadi satu desa/kampung sebagai sentra pengembangan tanaman manggis menjadi contoh atau model serta kedepannya dapat dijadikan tempat Agro Wisata. Selain itu ada juga inovasi Mamareso Kaladang (MAK ADANG) yaitu dengan Pemeriksaan Cemaran Pestisida pada lahan lahan para petani terpilih di Kota Sawahlunto sehingga pencemaran Pestisida dapat terdeteksi. Adapun Inovasi di Bidang Ketahanan Pangan yaitu Informasi Via Billboard Running Texts (Info Barek) yaitu menyampaikan Info Harga Pasar

Pagan hasil Survey pada 2 Pasar Utama di Kota Sawahlunto sebagai bahan Informasi Harga Pangan dan Fluktuasi Harga sehingga di ketahui Masyarakat.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program Kegiatan Pertanian yang dilaksanakan disusun sebagai upaya yang strategis pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengendalikan tata administrasi pertanian dan tata batas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien serta tetap menjaga stabilitas dan kondisi yang aman dan nyaman dalam penguasaan status hak atas tanah dengan meminimalisir timbulnya konflik dan masalah pertanian dan tapal batas wilayah Kota Sawahlunto.

Secara nasional isu pemberitaan bidang pertanian terfokus pada pengelolaan hutan, alih fungsi hutan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di Kota Sawahlunto, selain isu nasional tersebut, masih terdapat beberapa isu lainnya yang meliputi;

- a. Isu adanya 25 (dua puluh lima) dari 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan yang berada di Kota Sawahlunto seluas kurang lebih 8.970,37 hektar lahan atau 3,62 persen dari luas Kota Sawahlunto berada dalam kawasan hutan, hal ini mendatangkan persoalan khusus yang harus dihadapi karena sebagian besar berada di pusat-pusat pemukiman dan sentra ekonomi masyarakat, hal ini dibutuhkan pemikiran dan kebijakan khusus serta program inovasi dalam penataan lahan dan untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah di atasnya.
- b. Isu adanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Ulayat Nagari dan Kaum dari 10 (Sepuluh) Nagari yang ada di Kota Sawahlunto, belum pernah dilakukan inventarisasi dan identifikasi, saat ini baru diperoleh data awal penguasaan tanah ulayat dan kaum sebanyak 1500 persil tanah dari 2 (dua) Nagari, sementara 8 (delapan) Nagari lainnya belum diketahui sampai saat ini. Hal ini perlu dilakukan inventarisasi khusus.
- c. Isu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Pasca Tambang yang masih belum jelas penyelesaian status haknya, munculnya isu ini dipicu dengan akan berakhirnya IUP PT.BA Pertambangan Ombilin di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sehingga isu ini sangat berpotensi sebagai bom waktu yang sangat serius terutama adanya kepentingan-kepentingan banyak pihak, baik PT.BA, Pemerintah Daerah, Ulayat Nagari dan masyarakat banyak yang selama ini memanfaatkan dan menguasai tanah pasca tambang tersebut melalui SIPT dan sewa pakai dari PT.BA (Persero) UPO.Tbk. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan harus diantisipasi dengan melakukan dialog-dialog dan sosialisasi yang intensif, terutama dengan masyarakat adat, dan dilakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak PT.BA dalam pemanfaatan aset-aset pasca tambang yang saling menguntungkan semua pihak tanpa menerobos regulasi dan aturan hukum yang telah ada.
- d. Isu adanya persoalan-persoalan penyerahan P3D khususnya yang menyangkut tanah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Provinsi maupun sebaliknya terkait dengan diundangkannya PP No. 44 tahun 1990 tentang perluasan wilayah daerah.
- e. Isu adanya persoalan-persoalan tapal batas pasca diundangkannya PP No 44 tahun 1990 Tentang Perluasan Wilayah Daerah Kota Sawahlunto pada 27 tahun yang silam tanah pemda yang sudah dibebaskan tetapi belum dimanfaatkan, adanya tanah pemda yang dipakai oleh Instansi vertikal dan masyarakat umum.
- f. Isu adanya kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur daerah

g. Isu banyaknya tanah yang telah dikuasai tidak terpelihara dan termanfaat (Penatagunaan Tanah) sementara karena belum adanya kepastian hukum.

Untuk lebih jelasnya data aset tanah milik Pemerintah Kota Sawahlunto dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.133
Data aset tanah milik Pemerintah Kota Sawahlunto

NO	Nama OPD	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total Bidang Tanah
1	Dinas Pendidikan	51	30	81
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	11	22	33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	415	416
4	Dinas Sosial PMDes dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2
5	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan perikanan	5	3	8
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	2	0	2
7	Dinas Perhubungan	0	1	1
8	Dinas Koperasi UKM perdagangan dan Perindustrian	3	4	7
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga Kerja	1	0	1
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	2
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0	3	3
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1
13	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	1	0	1
14	Inspektorat	1	0	1
15	Sekretariat Daerah Kota	19	60	79
16	Sekretariat DPRD	2	0	2
17	PPKD	4	0	4
18	Badan Kesbang Politik dan PBD	1	0	1
19	Kecamatan Silungkang	2	1	3
20	Kecamatan Lembah Segar	6	8	14
21	Kecamatan Barangin	12	0	12
22	Kecamatan Talawi	1	0	1
	Total	125	550	675

Sumber Data: BPKAD Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota Sawahlunto sebanyak 22 Perangkat Daerah yang bersertifikat sebanyak 125 dan yang belum bersertifikat sebanyak 550 dengan total sebanyak 675.

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.134
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan (%)	-	-	-	-	0
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	-	-	100	-	0
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)		70,00	72,80	100,00	100,00
4	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)		-	-	56.25	0
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	0	0	0	0
6	Tersedianya tanah objek landreform 9TOL yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	0	0	0	0
7	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto tahun 2021 untuk persentase pemanfaat tanah dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin diterbitkan (IKD) yang tidak ada realisasinya tidak dapat didata, karena penerbitan izin dilaksanakan secara Online melalui aplikasi OSS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan untuk penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas untuk tahun 2021 tidak ada realisasinya dan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Perencanaan Tata Kelola Lingkungan

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun

waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.135
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	-	56,79	58,01	62,74	62,39
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	-	67,00	68,26	70,00	74,64
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin pph dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	%	-	81,25	81,36	75,00	75,00
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	-	-	-	-	-

Sumber Data :DKP2LH, 2021

2. Persentase Penanganan Sampah

Mobilisasi sampah dari tingkat *user interface* menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh DPKP2LH. Cakupan pelayanannya adalah:

- 1) Sudah dilayani : 68 persen atau 24 desa/kelurahan
- 2) Belum terlayani : 32 persen atau 13 desa/kelurahan

Berdasarkan kemampuan operasional sarana angkutan yang ada, sampah yang terangkut ke TPA Kayu Gadang sebanyak 25 sampai dengan 30 meter kubik per hari, sementara timbulan sampah per hari sekitar 45 meter kubik per hari (kurang lebih 45.235 kilogram per hari). Berikut adalah volume timbulan sampah dan yang dikelola di TPA, yaitu:

Tabel 2.136
Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

Pengelolaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Timbulan sampah kota (M ³ /hari)	153,50	153,50	185,11	187,75	187,49
Rata-rata Timbulan (M ³ /hari)	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8
Jumlah sampah terolah TPA dan TPST (M ³)	81	146	140	140	140
Persentase Sampah Terolah dengan Timbulan Sampah (%)	52,77	80,01	75,10	76,64	76,64

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto 2021

Timbulan Sampah Kota Sawahlunto pada tahun 2017 sebanyak 153,50 meter kubik per hari, sedangkan tahun 2021 terjadi peningkatan, dengan jumlah 187,49 meter

kubik per hari. Sedangkan sampah yang terolah di TPA dan TPST pada tahun 2017 meningkat dari 81 meter kubik per hari menjadi meter kubik per hari tahun 2021 sehingga sampah yang tidak terangkut pada umumnya menumpuk di Tempat Penampungan Sementara yang ada baik di desa – desa maupun di pinggiran perkotaan yang belum terjangkau pelayanan. Tingkat pelayanan sampah yang terolah meningkat tahun 2017 dari 52,77 persen menjadi 76,64 persen di tahun 2021.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk Kader Pengomposan Sampah desa yang mampu mengolah sampah di lokasinya sendiri. Dalam mengelola sampah tersebut sarana prasarana operasional yang sepenuhnya dikelola DKP2LH adalah berupa:

Tabel 2.137
Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun
2017-2021

NO.	JENIS SARANA	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1	TPA Lontiek Maloweh (Ha)	2	-	-	-	-	Tidak aktif
2	TPA Kolok Nan Tuo (Ha)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	Tidak aktif
3	TPA KayuGadang (Ha)	5	9,7	9,7	9,7	9,7	Dijadikan Sanitary Landfill
4	TPST (unit)	5	5	5	5	5	
5	TPS						
6	Truck Sampah						
A	Arm Roll Truck (unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1 rusak
B	Dump Sampah (unit)	4 unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	
7	Container (unit)	17 unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	
8	BakSampah (buah)	14 buah	30 Buah	30 Buah	30 Buah	30 Buah	
9	Drum/Tong Sampah (buah)				25	25	
10	Gerobak Sampah (unit)	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
12	Becak Motor (unit)	18 unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	
13	Petugas K3 (orang)	152	152	152	152	152	
14	Bulldozer	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
15	Incenerator	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	2 rusak 2 baik
16	MesinKompos	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	
17	Excavator	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2021

Kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Sawahlunto ini sudah perlu ditingkatkan terutama pengadaan truk sampah dan armroll truk karena sudah berusia tua. Saat ini TPA Kayu Gadang telah ditingkatkan metode pemusnahan sampah dari sistim control landfill menjadi sanitary landfill melalui dana APBN.

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) yang layak secara teknis. Keberadaan TPSS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah secara tidak beraturan.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.138
Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TPSS (unit)	344	344	344	344	344
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m ³)	147,92	147,92	147,92	147,92	147,92
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	61.398	61.898	62.524	65.138	65.696
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m ³ /1000 jiwa)	2,32	2,32	2,36	2,21	2,21

Sumber Data : DKP2LH Kota Sawahlunto 2021

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2017 sebanyak 344 unit dengan daya tampung 147,92 meter kubik, sampai pada tahun 2021.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Kota Sawahlunto pada kondisi lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.139
Data Kepemilikan Kartu Keluarga
Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga					Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lembah segar	4.019	4.208	4.222	4.312	4.376	4.019	4.208	4.222	4.312	4.345
2	Barangin	5.759	5.991	6.139	6.345	6.463	5.759	5.991	6.139	6.345	6.429
3	Silungkang	3.290	3.391	3.464	3.530	3.547	3.290	3.391	3.464	3.530	3.522
4	Talawi	5.285	5.804	5.993	6.143	6.272	5.285	5.804	5.993	6.143	6.236
	Total	18.353	19.394	19.818	20.330	20.658	18.353	19.394	19.818	20.330	20.532

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan gambaran tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga (126 KK). Namun capaian kepemilikan kartu keluarga sudah menyentuh angka 99,42 persen. Upaya jemput bola melalui pelayanan keliling tetap dilakukan oleh dinas teknis guna memberi kemudahan pengurusan dokumen kependudukan masyarakat.

Tabel 2.140
Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP					Jumlah Penduduk Memiliki KTP -El				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lembah segar	9.991	10.261	10.255	10.236	10.207	9.313	9.250	9.915	9.987	10.099
2	Barangin	13998	14.328	14.561	14.776	14.884	6.302	13.221	13.965	14.380	14.643
3	Silungkang	8.016	8.174	8.275	8.307	8.306	3.609	8.172	7.899	8.049	8.188
4	Talawi	13.857	14.291	14.563	14.678	14.753	6.386	14.198	14.086	14.408	14.591
	Total	45.862	47.054	47.654	47.997	4.815	42.569	44.841	45.865	46.824	47.521

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Sampai akhir tahun 2021, jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 98,69 persen dari 48.150 orang penduduk wajib ber-e KTP. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Sawahlunto terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (e KTP dan KK) sangat tinggi dan usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan seluruh Desa dan Kelurahan membuahkan hasil.

Tabel 2.141
Data Kepemilikan Akta Kelahiran
Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lembah segar	13.862	14.197	14.143	14.072	14.053	6.617	7.536	7.910	8.315	9.639
2	Barangin	19.849	20.250	20.474	20.700	20.812	4.956	10.928	11.942	12.824	13.891
3	Silungkang	11.620	11.782	11.820	11.780	11.732	2.744	10.574	6.163	6.676	8.236
4	Talawi	19.711	20.148	20.416	20.455	20.557	4.925	5.724	11.460	12.034	13.628
	Total	65.042	66.377	66.853	67.007	67.154	31.515	34.762	37.475	39.849	45.394

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Namun, dari keberhasilan diatas masih perlu upaya maksimal bersama seluruh pihak terkait guna meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah, dengan angka 67,32 persen untuk kepemilikan Akta Kelahiran dan 63,87 persen untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (seperti tabel dibawah berikut ini).

Tabel 2.142
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KIA		Jumlah Kepemilikan KIA	
		2020	2021	2020	2021
1	Lembah segar	4,075	3.846	2,505	2.466
2	Barangin	6,284	5.928	4,146	3.978
3	Silungkang	3,687	3.426	1,864	1.858
4	Talawi	6,161	5.804	4,239	4.064
	Total	20,207	19.004	12,754	12.366

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Tabel 2.143
Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Cakupan KTP (%)	66,86	99,50	99,14	106,36	97,87
2	Cakupan Akte kelahiran (%)	48,45	52,37	56,05	56,06	67,32
3	Cakupan KK (%)	100	100	100	100	99,52
4	Cakupan akte kematian (%)	100	100	100	100	100
5	Validitas database kependudukan (%)	99,99	100	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik (%)	94,83	99,62	98,05	106,64	97,49
7	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	0	0,00	38,44	57,55	63,87
8	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir) (%)	95,80	95,93	97,24	98,13	98,73
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	0	0,00	0,00	0,00	83,33

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Dari sembilan indikator diatas masih terdapat 2 indikator dengan nilai yang belum memuaskan pada tahun 2021, yaitu : cakupan akte kelahiran (67,32 persen) dan kepemilikan KIA (63,87 persen). Upaya maksimal harus tetap dilakukan agar dokumen kependudukan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu juga terus mendorong OPD untuk dapat memanfaatkan data kependudukan dalam melaksanakan program kegiatan.

G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan maka keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan. Masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lainnya dapat berperan aktif melalui wadah / lembaga yang ada di Desa / Kelurahan. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa / Kelurahan yang ada di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.144
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan
Tahun 2017 - 2021

No	Nama Lembaga	2017	2018	2019	2020	2021
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	19	22	23	23	23
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	42	42	42	42	41
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	42	42	42	42	41
4	Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (BPSPAM)	64	64	64	64	64
5	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)	37	37	37	37	37
6	Posyandu Balita	103	103	103	103	103

No	Nama Lembaga	2017	2018	2019	2020	2021
7	Posyandu Lansia	55	55	55	55	55
8	Badan Permusyawarahan Desa (BPD)	27	27	27	27	27
9	Karang Taruna	37	37	37	37	37

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Kemajuan suatu desa mempengaruhi iklim berinvestasi. Makin maju sebuah desa, maka akan makin menarik investasi untuk dapat berkembang diwilayahnya. Klasifikasi desa yang diharapkan untuk dapat menunjang iklim berinvestasi adalah dengan kategori Swasembada. Dimana pada kondisi ini daya dukung masyarakat/ Sumber Daya Manusia, potensi Sumber Daya Alam, kelembagaan, prasarana dan sarana memberikan efek positif bagi pengembangan investasi di wilayahnya. Untuk Kota Sawahlunto, status desa pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.145
Status Desa berdasar Profil Desa Kota Sawahlunto
Tahun 2021

No	Status Desa	Jumlah (desa)	Persentase (%)
1	Swasembada	8	21,62
2	Swakarya	9	51,35
3	Swadaya	10	27,82

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Desa dengan status swasembada adalah desa : Lunto Barat, Lunto Timur, Kubang Tengah, Balai Batu Sandaran, Taratak Bancah, Kolok Nan Tuo, Salak dan Data Mansiang. Upaya kedepan adalah meningkatkan status desa yang masih swakarya dan swadaya menuju swasembada. Dan sangat diperlukan inovasi positif dari tiap desa / kelurahan untuk dapat menarik banyak peluang investasi bagi kemajuan wilayahnya dari segala sumber.

Tabel 2.146
Status Desa berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Sawahlunto
Tahun 2021

No	Status Desa	Jumlah (desa)	Persentase
1	Klasifikasi Desa	0	0
2	Sangat Tertinggal	0	0
3	Tertinggal	0	0
4	Berkembang	14	51,85 %
5	Maju	12	44,44 %
6	Mandiri	1	3,7 %

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

IDM memotret perkembangan kemandirian desa, mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkolerasi dengan karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dan modal sosial. Desa Mandiri Kota Sawahlunto adalah desa Talawi Mudiak.

Tabel 2.147
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017 - 2021

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase pengentasan Desa Tertinggal (%)	n/a	100	100	100	100
3	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	n/a	19,04	23,8	52,94	85,71

Sumber Data : Dinas Sosial PMDPPA, 2021

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan berperan aktif dalam proses pembangunan di daerahnya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan program kegiatan dan pengawasan pembangunan di wilayah masing-masing.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terdapat tiga indikator tambahan yang berkaitan dengan KB dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 target 5b (Akses Universal terhadap Kesehatan Reproduksi) yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan ibu. Indikator tersebut adalah Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan unmet need.

Target nasional indikator tersebut pada tahun 2015 adalah CPR sebesar 65 persen, ASFR usia 15 sampai dengan 19 tahun sebesar 30 per 1000 perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun dan unmet need 5 persen. Dalam upaya akselerasi pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2010 sampai dengan 2014, maka telah direvisi sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014 adalah TFR sebesar 2,36 CPR sebesar 60,1 persen dan unmet need sebesar 6,5 persen. Dalam satu dekade terakhir keberhasilan pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia mengalami suatu keadaan stagnan yang ditandai dengan kurangnya perbaikan beberapa indikator KB yaitu CPR, unmet need dan Total Fertility Rate (TFR), Negara ASEAN dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan KB serta kesehatan ibu dan bayi.

Tabel 2.148
Capaian Indikator Kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/mCPR)	62	62	64	63	71,92
2.	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	13,73	23,51	19,31	17,58	10,87

No	Indikator Kinerja Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,02	0,18	1,01	1,4	0,99
4.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,30	2,1	2,38	2,33	2,00
5.	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui kampung KB	36	48	56	60	64
6.	Rata - rata jumlah anak perumah Tangga	4,19	4,18	2,75	2,32	2,00
7.	Rasio Akseptor KB	78.80	77,04	72,68	73,03	71,92
8.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-48	69,21	78,65	77,05	73,04	71,92
9.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37
10.	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2021

Capaian Kota Sawahlunto pada urusan pemerintah Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ada beberapa indikator Kinerja. Pada kinerja Persentase pemakaian Kontrasepsi modern mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebanyak 62 Persen meningkat menjadi 64 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi yaitu 63 persen, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 71,92 persen.

Unmet need menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (**BKKBN**) adalah kebutuhan PUS untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi dengan kata lain PUS tidak menggunakan kontrasepsi. Hal ini juga dipengaruhi dengan kondisi PUS yang sedang Hamil, Ingin anak segera dan Ingin Anak ditunda, namun angka Unmet Need dikota Sawahlunto, sudah baik dan berada dibawah angka Nasional. Indikator kinerja Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sebesar 13,73 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 23,51 persen dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 10,87 persen. Selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasinya PUS dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping.

Angka kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur nya. Angka kelahiran Total (TFR) ini digunakan Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Kondisi TFR tahun 2021 di Kota Sawahlunto sudah menuju perbaikan berada di angka 2,00 artinya Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun rata-rata sudah mempunyai anak 2



orang, sesuai juga dengan angka kemiskinan di Kota Sawahlunto mengalami penurunan secara signifikan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian pendudukan pembangunan keluarga adalah dengan penyelenggaraan keluarga berencana. Pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas merupakan langkah yang sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu keberhasilan dalam mencapai program keluarga berencana ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB dan hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan KIE. Secara demografi program keluarga berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Program Keluarga Berencana dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta kematian ibu. Dalam pola pemikiran dimasyarakat harus diubah dari pembatasan kelahiran saja tapi juga untuk meningkatkan kualitas manusia dan mensinergisitkan program keluarga berencana dengan sudut pandangan agama. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB dari tahun ketahun mengalami trend yang menurun. Pada tahun 2017 rasio akseptor B berjumlah 78,80 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,92 persen.

Angka Pemakaian kontrasepsi adalah cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di Kota Sawahlunto CPR ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 adalah 69,21 naik pada tahun 2018 menjadi 78,65 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 71,92.

Petugas pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan berjumlah 37 orang. Hal ini sama dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dimana disetiap desa ada satu orang petugas Pembina KB. Peran PPKDB ini adalah berperan aktif dalam mengelola program keluarga berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Sektor transportasi di Kota Sawahlunto hanya berupa transportasi darat dan perkeretaapian. Transportasi darat sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perkeretaapian merupakan sarana penunjang kepariwisataan kota tua Sawahlunto dan tidak lagi dijadikan sarana penghubung antar daerah, hal ini dikarenakan banyak hal penunjang yang tidak lagi memadai. Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.149
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota (IKD)	0,45	0,47	0,49	0,44	0,56
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (IKD)	41	45	45	56	65
3	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas (IKD)	25	25	32	26	35
4	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang (IKD)	2	2	2	2	2
5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan (IKD)	44	44	67	25	40
6	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (IKD)	100	100	100	100	100
7	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65.020	66.470	149.474	25.200	28.350
8	Jumlah uji KIR angkutan umum	1.135	1.105	981	382	24
9	Persentase layanan angkutan darat	75	75	70	55	75
10	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	63	72	73,4	30	65
11	Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan	1 : 75	1 : 83	1 : 85	1 : 75	1 : 80

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator urusan perhubungan pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun ada pada beberapa indikator mengalami penurunan yang signifikan, seperti indikator jumlah arus penumpang angkutan umum dan jumlah uji KIR angkutan umum sebagai dampak Covid-19. Jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan dikarenakan tahun 2020 sejak dimulainya wabah Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas orang dan barang sehingga jumlah orang dan barang yang keluar masuk Kota Sawahlunto jauh menurun dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR. Dengan alasan kendaraan tidak beroperasi sehingga tidak dilakukan uji KIR yang berdampak juga terhadap pendapatan daerah Kota Sawahlunto. Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, dipasang berbagai sarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sarana lainnya. Penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada jalur padat dan ramai aktivitasnya dan pada daerah rawan kecelakaan. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya tuntutan kebutuhan sarana transportasi. Berikut data sarana perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.150
Sarana Perlengkapan Jalan di Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2021

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kaca Tikungan (unit)	82	82	82	82	82
2	Warning Light (unit)	12	12	12	12	12
3	Traffic Light (unit)	1	1	1	1	1
4	Rambu-rambu (unit)	229	229	229	218	235
5	Guadril (unit)	147	147	147	147	147

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Diliniatur (unit)	100	100	100	100	100
7	Trapikun (unit)	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan (M')	113.885	113.885	113.885	113.885	113.885
9	Jembatan Penyebrangan (unit)	0	0	0	0	0
10	Papan Penunjuk Arah (unit)	46	46	46	46	46
11	Papan Informasi lalu Lintas	0	0	0	0	0
12	Zebra cross (unit)	724	724	724	724	724
13	Trotoar (M')	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
14	RPPJ (M')	10	10	10	10	10

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah perlengkapan jalan di Kota Sawahlunto. Secara keseluruhan tidak mengalami penambahan yang signifikan. Tetapi walaupun begitu ada penambahan yang signifikan pada pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 17 item dari tahun sebelumnya. Pengadaan perlengkapan jalan ini dalam mendukung Visi Misi Walikota Sawahlunto dan mendukung pencapaian Misi ke 7 RPJMD 2018-2023 "Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai", maka Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api. Jalur kereta api di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 1892. Pada saat itu pembangunan dimulai sebagai sarana pengangkutan batu bara Ombilin. Seiring waktu pengangkutan batu bara dengan kereta api semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Kereta api beroperasi sebagai kereta wisata dengan rute Sawahlunto - Muaro Kalaban - Padang Panjang. Namun pada saat ini kereta api memang tidak beroperasi sama sekali. Sesuai dengan adanya rencana Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT.KAI yang akan mereaktivasi kembali jalur kereta api dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok-Muaro Kalaban (Sawahlunto).

Melalui Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah dimulai pekerjaan pembersihan kawasan rel dengan bekerja sama dengan PT.KAI pada tahun 2021. Panjang rel kereta api yang aktif pada saat ini adalah 4,2 Kilometer dari stasiun Sawahlunto ke Stasiun Muaro Kalaban dengan kondisi 2 stasiun aktif. Sawahlunto masih mempunyai 2 lokomotif dengan rincian 1 lokomotif diesel dan 1 lokomotif uap. Keinginan Pemerintah Kota Sawahlunto sangat kuat menjadikan kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang pernah diandalkan seperti pada masanya.

Sebagai bentuk inovasi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah melakukan pencegahan dalam penyelamatan berlalu lintas, yaitu dengan menempatkan aparat perhubungan dalam zona selamat sekolah. Aparat bertugas pada jam masuk dan pulang sekolah dan bertugas di sekolah-sekolah yang berada di lokasi jalan utama. Inovasi ini sebagai bentuk pencegahan dan salah satu upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Sawahlunto.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya pengelolaan hot spot yang tersebar di Kota Sawahlunto sebanyak 15 titik dan pengelolaan website Pemko Sawahlunto, fasilitasi kegiatan PPID, fasilitasi penyediaan jasa jaringan

internet yang terintegrasi di seluruh Kota Sawahlunto terutama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 71 titik, Pengelolaan Siaran Stasiun Radio Daerah (Radio Sawahlunto FM). Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.151
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Website (website)	6	6	11	18	18
Jumlah Domain (domain)	1	1	1	1	1
Jumlah Stasiun Radio Daerah (unit)	1	1	1	1	1
Jumlah Media Online (unit)	5	5	5	5	5
Jumlah Aplikasi (aplikasi)	-	5	6	7	7
Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi (aplikasi)	-	-	3	3	7
Jumlah BTS (unit)	33	36	36	36	36
Jumlah Daerah Blankspot (Desa/Kel)	5	5	5	4	4
Jumlah Warung Internet (unit)	27	21	14	14	14
Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	38,46	70	70	70	60
Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	42,31	75	75	75	50
Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	-	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (nilai)	2,02	1,87	2,45	2,88	2,07
Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi (%)	-	100	100	100	100
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota (%)	-	100	100	100	100

Sumber Data: Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2021 dan Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai tahun 2017. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 nilai Indeks SPBE Kota Sawahlunto adalah 2,07 dengan Prediket “cukup”, nilai ini menurun dari tahun 2020 yang memperoleh nilai 2,88 dengan Prediket “baik”. Penurunan drastis nilai Indeks SPBE tahun 2021 dari tahun 2020 disebabkan beberapa factor, salah satu factor utama adalah masih belum terbentuknya Perangkat Daerah yang menaungi bidang Kominfo, bertambahnya indikator penilaian SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, serta belum dilakukannya audit internal penyelenggaraan SPBE.

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Adapun perkembangan koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.152
Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	60	56	56	53	54
2	Jumlah koperasi (unit)	68	68	68	68	68
3	Persentase koperasi aktif	88,24	82,4	77,9	77,9	79,4

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Dari Tahun 2017-2020 persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan. Tahun 2021 tidak mengalami perubahan karena terkait masa pandemic yang baru dimulai sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap koperasi sangat terbatas untuk dilaksanakan. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dilihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.153
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi (unit)	68	68	68	68	68
2	Jumlah Koperasi Aktif	60	56	53	53	54
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	8	12	15	15	14
4	Jumlah Koperasi RAT	49	48	50	43	35
5	Jumlah Anggota orang)	9.377	9.352	8.972	8.775	8.221
6	Jumlah Tenaga Kerja	113	113	113	113	113
7	Volume Usaha (Rp))	99.820.465.30 0	94.078.447.60 3	103.589.617.00 0	57.792.083.00 0	38.567.300.00 0
8	Modal Sendiri (Rp)	39.986.291.39 1	43.567.601.87 8	46.255.521.000	48.055.094.00 0	46.707.152.00 0

N O	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
9	Modal Luar (Rp)	36.933.732.57 7	32.997.713.25 0	33.295.190.000	33.169.494.00 0	29.679.215.00 0
10	Asset (Rp)	76.810.551.79 9	76.565.315.12 8	79.550.711.000	81.224.588.00 0	70.711.781.00 0
11	SHU (Rp)	3.314.674.427	4.137.934.098	4.510.185.000	4.427.901.000	2.921.196.000

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Dilihat dari tabel diatas volume usaha pada tahun 2021 menurun drastis seiring dengan berkurangnya jumlah anggota koperasi yang mana di tahun 2021 berjumlah 8.221 orang dengan volume usaha Rp. 38.567.300.000,-, disebabkan adanya kebijakan Provinsi tetang cara penghitungan volume usaha. Perkembangan SHU juga tidak begitu baik di sebabkan adanya pandemi yang berdampak pada perkembangan usaha koperasi di Kota Sawahlunto. Selain permodalan yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengurus koperasi. Untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Perkembangan koperasi sehat ini dari tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.154
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

No	Kriteria Koperasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sehat (%)	23,53	23,53	11,76	14,71	9,37
2.	Cukup sehat (%)	41,17	42,65	39,70	32,35	39,06
3.	Kurang sehat (%)	4,41	0	4,41	10,29	4,69
4.	Belum dinilai (%)	19,12	16,17	4,41	5,88	0
5.	Tidak dinilai (%)	11,77	17,65	39,72	36,77	46,87

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Penilaian kesehatan koperasi hanya untuk koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam sebanyak 49 koperasi dan telah melaksanakan RAT setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Dari 35 koperasi yang melaksanakan RAT, 1 diantaranya tidak di nilai karena usahanya tidak bergerak dibidang simpan pinjam. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk koperasi sehat yang ada di kota Sawahlunto mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu berjumlah 10 koperasi. Kondisi koperasi secara keseluruhan yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2017-2021 rata-rata masih dalam kondisi cukup sehat, ini berarti sangat perlu peningkatan pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi bahwa yang melaksanakan pengawasan koperasi ini adalah Walikota.

Tabel 2.155
Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Koperasi yang	82,35	82,35	77,94	77,94	10,29

	berkualitas (%)					
2.	Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Wira Usaha (%)	0,00	0,00	0,22	1,12	36,17
3.	Persentase UMKM yang meningkat Skala Usahanya (%)	0,00	0,00	0,22	1,12	0,40
4.	Persentase UKM Non BPR	3.588	3.588	3.708	3.708	4.114
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	95,77	95,77	99,78	99,78	100

Sumber Data : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi di Kota Sawahlunto, melalui kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan peran kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Kota Sawahlunto. Keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi dibawah ini.

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.156
Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang berinvestasi	168	158	19	11	67

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunt, 2021

Dari data diatas dapat terlihat bahwa perkembangan jumlah perusahaan yang berusaha/berinvestasi di Kota Sawahlunto menunjukkan perkembangan yang menurun dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan tahun 2021 mengalami kenaikan.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai investasinya dari tahun 2017 s/d 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh mulai menurunnya usaha pertambangan di Kota Sawahlunto dan kebijakan kota yang merubah perencanaan pembangunan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 587.975 milyar, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 86,377 milyar, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 200.440 milyar, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi 28.276 milyar, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 45.831 milyar. Belum stabilnya investasi ini dipengaruhi oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Kota Sawahlunto. Yang mana dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini mengakibatkan adanya pembatasan atau lockdown yang membuat aktivitas ekonomi terutama perdagangan

terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan negara-negara episentrum Covid-19 yang salah satunya adalah RRT, baik ekspor maupun impor dan semua ini berdampak pada penurunan nilai investasi. Atau wabah Covid-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi dan stabilitas termasuk investasi.

Tabel 2.157
Data Nilai Investasi
Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Alamat	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	Ferli Tirta Jaya	Dusun Kubang Gajah, Talawi	510.000.000	3
2	Putra Simaung	Pasar Baru Durian	90.000.000	3
3	Atha Multi Sarana	Jl. Prof. M. Yamin Sijantang	850.000.000	7
4	Riky Gypsum	Jl. Lintas Sumatera, Silungkang	60.000.000	3
5	Saribu Rumah Gadang	Blok PJKA Dusun Balai-Balai Muarakalaban	100.000.000	3
6	Sasikirana	Perumnas Lembah Santur	200.000.000	0
7	Zikri Mandiri	Sapan	100.000.000	1
8	Bahy Kreatif	Muarakalaban	950.000.000	8
9	Cahaya Baru Sejahtera	Jl. Prof. M Yamin Sijantang	60.000.000	3
10	Nusa Alam Lestari	Dusun Ibus, Salak	390.000.000	10
11	Sanggra Eka Saputra	Dusun Data Galundi, Batu Tanjung, Talawi	900.000.000	4
12	Saudara Andalan Niaga	Jl. Patapang Diatas No. 104 Dusun Kubang Gajah, Talawi	450.000.000	6
13	SkS Energy Abadi	Sawah Talang, Muara Kalaban	150.000.000	4
14	Sumartha	Dusun Balai Balai, Muarakalaban	800.000.000	4
15	Air Mata Emas	Jl. Gando Tumpuk Tengah Talawi	350.000.000	30
16	Al Fazza Consultant	Air Dingin	250.000.000	2
17	Putra Panyusunan Nasti	Dusun Kubang Gajah, Talawi	7.500.000.000	2
18	Tara	Dusun Muara Jaya, Sikalang, Talawi	350.000.000	2
19	TK Nurul Iman	Dusun Ranggung Bukit Gadang, Talawi	108.000.000	3
20	YAY. Pesantren	Jl. Kubang Lunto, Lunto Timur	303.300.000	4
21	Andronymous	Tangsi Gunung, Air Dingin	60.000.000	3
22	Multi Fajar Fahri	Jl. M Yamin Talawi	176.550.000	2
23	Putri Surya Pratama	Desa Salak	190.000.000	42
24	Waringin Perta Energi	Jl. Soekarno Hatta, Lubang Panjang	350.000.000	2
25	Ayu Kurnia Prandesta	Batu Tanjung Talawi	55.000.000	4
26	Dasrat Sarana Arang Sejati	Simpang Napar Talawi	1.000.000.000	37
27	Shinta Aflen	Parambahan, Talawi	60.000.000	5
28	Three De Cellular	Jl. A. Yani Pasar	725.000.000	8
29	TK Lignita	Komplek PTBA Durian I	350.000.000	2
30	Graha Amanah Selaras	Talawi	5.229.279.185	16
31	Syafruddin	Dusun Balai Balai, Muarakalaban	1.000.000.000	3
32	Tahiti Coal	Jl. Khatib Sulaiman, Barangin	4.250.000.000	42



No	Nama Perusahaan	Alamat	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
33	Miyor Prima Abadi	Parambahan, Talawi	5.650.000.000	217
34	Sulastri	Desa Batu Tanjung	2.000.000.000	8
35	Cempaka Motor	Muara Kalaban	1.001.028.000	12
36	Yopi Aries Saputra	Dusun Taratak Capo, Talawi	1.000.000.000	2
37	Bukit Asam	Saringan	1.029.193.239	5
38	Miyor Pratama Coal	Parambahan Talawi	1.890.434.572	30
39	Depot Air Rebus Akak Remon	Dusun Kundi Talawi	80.000.000	3
40	Home Stay Kasih Ibu	Mudik Air	100.000.000	1
41	Febirizal	Jl. Adam Malik, Barangin	100.000.000	3
42	Jawa Perabot	Dusun Tengah Sawah, Silungkang	300.000.000	16
43	Animarwilis (Pangkalan LPG)	Dusun Tanjung Medan	95.000.000	1
44	Lashira Resto	Pondok Batu	500.000.000	4
45	Indah Bra	Dusun Pasar Usang Silungkang	150.000.000	1
46	Lebah Madu Zamzam	Dusn Dalimo Gadang, Lembah Segar	200.000.000	2
47	Oca Bangunan	Sapan, Barangin	100.000.000	3
48	Andira PO	Dusun Ibus, Salak	380.000.000	2
49	Anisya Suryatni	Dusun Talago, Talawi	100.000.000	2
50	Kopi Cap Teko	Silungkang	190.000.000	8
51	Laiqa Hijab	Pasar Remaja Sawahlunto	175.000.000	3
52	Tokominang Basorak	Lintas Sumatera Silungkang	500.000.000	8
53	Gudang Kayu Syaiful	Dusun Data Galundi, Batu Tanjung, Talawi	200.000.000	5
54	Haikal Perabot	Kokes Barangin	51.000.000	1
55	Laundry Gokil	Kebun Jati	80.000.000	5
56	Usaha Ayam Fahris	Simpang Kubang Silungkang	51.000.000	1
57	Alfira	Pasar	250.000.000	2
58	Toko Alamsyah	Tangsi Baru	200.000.000	5
59	Andes Songket	Kubang Utara Sikabu	75.000.000	2
60	Toko Bangunan Berkah	Dusun Sialang, Talawi	450.000.000	1
61	MS Glow Sawahlunto	Jl. Zainudin Tembak Barangin	100.000.000	3
62	Bintang Perabot	Dusun Siambalau	200.000.000	3
63	Ruqy Store	Dusun Mata Air	100.000.000	3
64	Pt. Pati Buana Semesta		500.000.000	-
65	PT. Cahaya Usaha Jaya	Jl. A. Yani Pasar	78.398.000	138
66	PT. Wijoyo Oridina Properti	Jl. Adam Malik, Santur Barangin	28.331.000	3
67	PT. Cahaya Bumi Perdana	Parambahan	10.000.000	174
	Total		45.831.513.996	945

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto, 2021

Tabel 2.158
Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Jenis	Tahun/Rp. Juta				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PMDN	587.975	86.377	200.440	28.276	45.831
2	PMA	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto, 2021

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) tidak tercapai karena persoalan internal dan eksternal. Kendala eksternal antara lain adalah : 1)kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai,2) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau bahan mentah yang harus diproduksi, dan 3) kesulitan dana atau pembiayaan proyek. Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu : 1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; dan 2) adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal. Rekomendasi mendorong investasi di Kota Sawahlunto melalui pemberian insentif atau fasilitas investasi yang menarik, dan meningkatkan konsistensi peraturan tentang penanaman modal pada setiap jenjang pemerintahan perlu dilakukan.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Sawahlunto menunjukkan tren fluktuatif, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun penyerapan tenaga kerja di perusahaan asing. Di Kota Sawahlunto rasio penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun yang positif yaitu sebesar 26,17.

Tabel 2.159
Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	2.928	3.841	3.673	2.638	2.957	2,68
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	168	158	81	78	84	-12,67
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	17	24	45	34	35	26,17

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunt, 2021

Tabel 2.160
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kenaikan Jumlah Nilai Investasi (%)	56,11	-85,31	132,05	-85,89	62,08
2	Persentase Kenaikan Jumlah Investor (%)	-9,19	-5,95	-87,97	-42,11	509,09
3	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	587	86	200	28	45
4	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Aplikasi (%)	10	15	55	75	85
5	Persentase Layanan PTSP yang Memenuhi Standar Waktu Layanan sesuai SOP (%)	75	90	90	95	95
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	82,67	82,67	87,47	83,59	88,29
7	Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat (%)	50	60	50	30	50
8	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	0,56	-0,85	1,32	-0,86	0,62

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunt, 2021

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahawa di Tahun 2021 secara keseluruhan realisasi investasi mulai meningkat setelah adanya pandemi 19 yang sangat berpengaruh terhadap investasi di Kota Sawahlunto seperti di Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Meningkatnya investasi di Kota Sawahlunto tahun 2021 ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi Kota Sawahlunto pada umumnya. Kemudahan-kemudahan investasi yang diberikan seperti inovasi yang dilakukan dalam pelayanan perizinan sangat berpengaruh terhadap jumlah investasi yang ada di Kota Sawahlunto, ini terbukti dengan tahun 2021 Dinas PMPTSPNaker mendapatkan penghargaan inovasi terhadap pelayanan perizinan di Kota Sawahlunto. Untuk itu peningkatan pelayanan perizinan menjadi hal penting dalam peningkatan investasi yang ada di Kota Sawahlunto.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Sawahlunto sehingga masalah sosial ini dapat dituntaskan. Perkembangan kepemudaan dan Olahraga yang ada di Kota Sawahlunto terlihat dari realisasi kinerja daerah setiap tahunnya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.161
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	13	13	15	15	16
2	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	60	60	70	77	148
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sawahlunto mulai dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan dan dari tahun 2019 ke tahun 2020 tetap tapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan lagi menjadi 16%, peningkatan ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah Kota dilihat dari berbagai event event yang diikuti pemuda seperti pada tahun 2020, Sawahlunto mengutus salah satu pemudanya menjadi perwakilan dalam ajang pemuda pelopor dan berhasil mendapatkan peringkat pertama ditingkat nasional sehingga setelah itu banyak pemuda pemudi Kota Sawahlunto yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri seperti mengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun 2021 sebanyak 76 orang yang terbagi dalam :

Tabel 2.162
Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pemuda Kota Sawahlunto
Tahun 2021

No	Jenis Pelatihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1.	Pembuatan Roti dan Kue	1	7	8
2.	Teknisi Sepeda Motor Konvensional	26	1	27

No	Jenis Pelatihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
3.	Pengelasan SMAW Posisi 2F	27	-	27
4.	Kabinet Making	13	1	14
Total				76

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Organisasi kepemudaan dan olahraga adalah hal penting yang ada dalam suatu daerah seperti tergambar dalam tabel diatas dalam Peningkatan prestasi olahraga dari tahun 2018 yang hanya mendapatkan 60 medali kemudian tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 70 medali dan tahun 2020 menjadi 77 medali tetapi pada tahun 2021 terjadi kenaikan perolehan medali yang sangat signifikan menjadi 148 medali karena banyaknya event event yang diikuti, dari kegiatan tersebut banyak terbentuk organisasi kepemudaan yang cukup aktif dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan sangat mendukung seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto. Adapun Perkembangan Organisasi kepemudaan di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.163
Jumlah Organisasi Kepemudaan
Tahun 2017-2021

No	Nama Organisasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	HIPMI	V	V	V	V	V
2.	AMPI	V	V	V	V	V
3.	Fatayat NU	V	V	V	V	V
4.	Pemuda Muhammadiyah	V	V	V	V	V
5.	BM PAN	V	V	V	V	V
6.	Gema Kosgoro	V	V	V	V	V
7.	GM Kosgoro			V	V	V
8.	GP Anshor	V	V	V	V	V
9.	BKPRMI	V	V	V	V	V
10.	Garda Keadilan	V	V	V	V	V
11.	Nasyatul Assiyah	V	V	V	V	V
12.	IPTI			V	V	V
13.	KNPI Sawahlunto			V	V	V
14.	KNPI Kec. Talawi			V	V	V
15.	KNPI Kec. Barangin			V	V	V
16.	KNPI Kec. Lembah Segar			V	V	V
17.	KNPI Kec. Silungkang			V	V	V

No	Nama Organisasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
18.	GM FKPPi	V	V	V	V	V
19.	Pemuda Pancasila	V	V	V	V	V

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel : 2.164
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif (organisasi)	12	12	19	19	19
2	Jumlah Total organisasi Pemuda (organisasi)	19	19	19	19	19
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)	63,16	63,16	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tahun 2017 terdapat 12 organisasi kepemudaan yang aktif begitu juga dengan tahun 2018 tetapi tahun 2019-2021 terjadi peningkatan, karena seluruh organisasi kepemudaan tersebut sudah aktif. Dari 19 organisasi kepemudaan tersebut secara keseluruhan aktif serta mempunyai badan hukum serta masing masing organisasi mempunyai kegiatan yang selalu mendukung untuk visi misi dan arah pembangunan Kota Sawahlunto 5 tahun kedepan.

Tabel 2.165
Cakupan Pembinaan Olahraga
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina (cabor)	29	32	36	38	44
2	Jumlah Cabang Olahraga yang ada/terdaftar (cabor)	29	32	36	38	44
3	Cakupan pembinaan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah cabang olahraga yang terdaftar di Kota Sawahlunto tahun 2017 sebanyak 29 cabor, tahun 2018 sebanyak 32 cabor, tahun 2019 sebanyak 36 cabor, tahun 2020 sebanyak 38 dan tahun 2021 sebanyak 44 cabor. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 seluruh cabor tersebut dibina dengan baik melalui monitoring dan evaluasi ke cabor tersebut.

Tabel 2.166
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Kota Sawahluto
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelatih yang bersertifikat (orang)	10	10	11	12	22
2	Jumlah Seluruh Pelatih (orang)	58	64	72	76	88
3	Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)	17,2	15,6	15,3	15,8	25

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel diatas dapat terlihat pada tahun 2017 dari 58 pelatih yang ada hanya 10 orang pelatih yang bersertifikat, sedangkan tahun 2018 ada penambahan jumlah pelatih menjadi 64 orang tetapi tidak menambah pelatih yang bersertifikat dikarenakan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pelatih memang tidak mencukupi, pada tahun 2019 jumlah pelatih kembali bertambah menjadi 72 orang dengan penambahan pelatih bersertifikat menjadi 11 orang kemudian pada tahun 2020 kembali ada penambahan pelatih menjadi 76 orang dan penambahan pelatih yang bersertifikat menjadi 12 orang, dan pada tahun 2021 terjadi penambahan yang cukup banyak menjadi 88 orang dan penambahan untuk peatih yang bersertifikat menjadi 22 orang yang disebabkan ada rencana untuk pengadaan porprov pada tahun 2022. Sehingga anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pelatih ditingkatkan.

Tabel 2.167
Cakupan Pembinaan Atlet Pelajar Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Atlet Pelajar Yang dibina (orang)	109	100	101	110	113
2	Jumlah Seluruh Atlet Pelajar (orang)	165	178	181	188	200
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	66	56,2	55,8	58,5	56,5

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari cakupan pembinaan atlet pelajar Kota Sawaahlunto terlihat terjadi peningkatan dari tahun 2017 sampai 2021, begitu juga dengan jumlah atlet pelajar yang dibina secara tetapi secara persentase perbandingan antara jumlah atlet pelajar dan atlet pelajar yang dibina terjadi penurunan karena banyak nya tambahan atlet pelajar sedangkan yang dibina tidak semua atlet pelajar yang ada. Dari tingkat perolehan medali dalam setiap ajang turnamen olahraga juga terlihat fluktuatif dari tahun 2019-2021 karena adanya pengaruh wabah covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan olahraga tidak diikuti oleh Kota Sawahlunto seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.168
Prestasi Olahraga Menurut Cabang
Tahun 2017 - 2021

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	KEMPO	-	-	1	-	20
2.	FASI	-	-	1	1	2
3.	PABBSI	-	-	1	-	1
4.	KODRAT	-	-	13	-	1
5.	IMI	-	-	1	4	-
6.	CRICKET	-	-	2	-	1
7.	FPTI	-	-	30	40	33
8.	PTMSI	-	-	2	-	-
9.	FORKI	-	-	5	36	2
10.	TI	-	-	17	-	49
11.	GABSI	-	-	12	-	4
12.	PASI	-	-	4	-	3
13.	PERCASI	-	-	1	-	-
14.	PELTI	-	-	10	1	9
15.	PERTINA	-	-	2	-	-
16.	PERPANI	-	-	-	-	18
17.	PGSI	-	-	-	-	2

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
18.	WI	-	-	-	-	16
Total Medali				102	82	161

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel diatas juga dapat dilihat peningkatan perolehan medali pada tahun 2021 tidak lepas dari pengaruh pelatih pelatih yang sudah mempunyai sertifikat kepelatihan yang diperoleh Kota Sawahlunto sebanyak 22 orang yang tersebar dalam berbagai cabang olahraga. Begitu juga dengan tingkat pembinaan terhadap atlit muda yang selalu meningkat dari tahun 2019 sebanyak 181 orang, tahun 2020 menjadi 188 orang dan pada tahun 2021 menjadi 200 orang. Kemudian dari tabel diatas juga tergambar jumlah atlit yang dianggap berprestasi fluktuatif dari tahun 2019 yang berjumlah 78 kemudian tahun 2020 turun menjadi 59 orang karena adanya pengaruh wabah covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan olahraga tidak diikuti oleh Kota Sawahlunto dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 141 orang.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Data Statistik merupakan dasar dalam perencanaan daerah karena perencanaan pembangunan bertitik tolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, ketersediaan data statistik merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Lebih rinci kinerja urusan Komunikasi dan Informatika sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.169
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen statistik yang tersedia (dok)	2	2	2	2	2
Buku Kota Sawahlunto Dalam Angka (Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kota Sawahlunto (Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (dok)	1	1	1	1	1
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah(%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bagian Statistik, Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2021 dan Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa ketersediaan data statistik berupa buku Kota Sawahlunto Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Sawahlunto telah terpenuhi sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menjaga integrase bangsa. Urusan Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal

yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini yang sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Kinerja Urusan Persandian sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.170
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemda (bulan)	12	12	12	12	12
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2021

P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki keragaman seni dan budaya serta memiliki banyak seniman-seniman yang berpotensi dibidangnya. Sebagai Kota yang telah mendeklarasikan sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Kota Sawahlunto sering menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan event-event di bidang seni dan budaya. Budaya-budaya yang ada berkembang menjadi kelompok-kelompok seni dan komunitas budaya. Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu. Berikut ini data komunitas budaya yang ada dan berkembang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.171
Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto

No	Nama Komunitas	Jumlah
1.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	1
2.	Bundo Kandung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1
3.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	10
4.	Bundo Kandung Kerapat Adat nagari	10
5.	Paguyuban Jawa	1
6.	Paguyuban Batak	1
7.	Paguyuban Sunda	1
8.	Komunitas Kota Tua Sawahlunto	1
9.	Komunitas Anak Nagari Sawahlunto (KANS)	1
Total Komunitas Budaya		27

Sumber Data :Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

Jumlah Komunitas Budaya yang ada dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berjumlah 25 komunitas budaya sedangkan pada tahun 2021 bertambah 2 komunitas budaya sehingga menjadi 27 komunitas budaya, 5 komunitas budaya yang telah aktif melaksanakan kegiatan, baik berupa acara adat dan tradisi maupun pagelaran seni

dengan persentase sebesar 20 persen, sementara masih ada 20 komunitas budaya lagi yang belum aktif atau sebesar 80 persen artinya masih banyak komunitas budaya yang belum mampu menggali dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai dan seni budaya daerah yang akan menjadi karakter bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto. Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan serta dengan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Adapun Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.172
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian (set)	9	9	20	20	20
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (unit)	69	69	73	83	85
3.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	119	119	130	144	153
4.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (persen)	57,98	57,98	56,15	57,63	55,55
5.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (unit)	21	21	21	21	94
6.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	119	119	130	144	153
7.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (persen)	17,65	17,65	16,15	14,58	61,44

Sumber Data :Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

Pada tahun 2020, dari 20 jumlah sarana penyelenggara kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (outdoor) 12 tempat, dan dari 144 total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 153 dan terdapat 85 buah yang sudah dilestarikan.

Situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada terdapat 94 buah yang sudah dikelola, terjadi penambahan yang sangat banyak dari tahun 2020 yang hanya sebanyak 21 buah. Persentase jumlah benda cagar budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 55,55%. Kalau dilihat dari data persentase tahun sebelumnya terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya terjadi penambahan di tahun 2021, penambahan penetapan benda, bangunan, struktur dan situs serta kawasan cagar budaya sebanyak 9 cagar budaya, sehingga dari jumlah yang awalnya cuma 144 keseluruhan menjadi berjumlah 153 serta Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola juga meningkat dari tahun 2020 berjumlah 21 buah, pada tahun 2021 meningkat menjadi 94 buah.

Berdasarkan data di atas, dalam rangka pelestarian benda cagar budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata. Kota Sawahlunto tidak hanya melestarikan benda cagar budaya (tangible), tetapi juga akan melestarikan budaya tak benda (intangible). Untuk data awal, ada 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Sawahlunto sebagai Budaya Tak Benda (intangible). Berikut ini data warisan budaya tak benda (intangible) di Kota Sawahlunto berdasarkan Data Objek Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 2.173
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible)
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Manuskrip	5	5	5	5	5
2.	Tradisi Lisan	46	46	46	43	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40	40	40
4.	Ritus	12	12	12	13	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	27	27	19	19
7.	Seni	38	38	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2	2	2
	Total	225	225	225	215	215

Sumber Data :Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel di atas, dapat di lihat total objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah sebanyak 225 OPK sedangkan pada tahun 2020 terjadi pengurangan menjadi 215 OPK yang disebabkan karena setelah dilakukan registrasi/penelitian ulang yang dilakukan pada tahun 2020 ada beberapa kriteria yang tidak termasuk kedalam OPK, seperti Tradisi Lisan yang awalnya berjumlah 46 menjadi 43, begitu juga dengan Teknologi Tradisional yang awalnya 27 menjadi 19 sedangkan pada Ritus terjadi penambahan 1 buah, namun ada dua (2) buah warisan budaya tak benda (intangible) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTEBI) yaitu Songket Silungkang yang termasuk kedalam Pengetahuan Tradisional dan Bahasa Tangsi yang termasuk kedalam Bahasa. Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Tabel 2.174
Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2017-2018

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya	40,28	40,28	40,28	62,50	69,44
2	Persentase Penampilan kelompok seni budaya	25,58	25,58	27,78	37,50	55,56
3	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	6,05	6,05	22,2	26,7	31,1
4	Persentase Budaya Benda yang Lestari	63,85	63,85	66,37	68,46	70,56
5	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	13,187	13,187	18,598	20,458	22,504

Sumber Data :Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

3. Jumlah Kunjungan Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.30 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan menurun secara drastis karena disebabkan wabah pandemi covid-19 yang membuat seluruh tempat wisata atau tempat keramaian ditutup semua, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya “Mak Itam”. Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.175
Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Museum Goedang Ransum	18.851	14.139	15.309	5.980	5.605
2	Lubang Tambang Mbah Soero	10.653	8.151	8.492	3.957	3.884
3	Museum Kereta Api	12.220	7.977	6.503	3.250	2.869
	Jumlah	41.724	30.267	30.304	13.187	12.358

Sumber Data :Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Wajib Perpustakaan berdasarkan Indikator yang ada, menunjukkan perkembangan yang cukup baik terlihat dari rata-rata jumlah Kunjungan dari Tahun 2017 sampai dengan 2019. Namun Pada Tahun 2020 sampai dengan mengalami penurunan Kunjungan. Penurunan ini disebabkan karena munculnya Pandemi Covid 19 yang membawa dampak significant berbagai aspek. Mulai dari Aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali terhadap pelayanan perpustakaan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.176
Rasio Perpustakaan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (orang)	168.695	169.174	173.452	52.530	86.936
	Perpustakaan Daerah	61.922	61.314	64.500	26.860	27.089
	Perpustakaan SD/MI	66.963	67.639	68.322	9.627	34.385
	Perpustakaan SMP/MTs	18.859	19.049	19.241	5.399	7.878
	Perpustakaan SMA/SMK/MA	16.509	16.675	16.843	7.201	11.496
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1.413	1.433	1.450	613	1.229
	Taman Bacaan Masyarakat	3.029	3.064	3.096	2.830	4.859
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (%)		0.28	2.53	-69.71	65.50
	Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	61.398	61.898	62.524	63.500	65.687
3	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	2.75	2.73	2.77	0.83	1.32

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

Untuk perkembangan koleksi buku pada perpustakaan Kota Sawahlunto dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.177
Perkembangan Koleksi Buku di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (buku)					
	Perpustakaan Daerah	12.165	13.821	14.335	14.819	15.249
	Perpustakaan SD/MI			119.005	138.602	131.692
	Perpustakaan SMP/MTs			20.311	18.954	34.956
	Perpustakaan SMA/SMK/MA			6.044	6.354	6.373
	Perpustakaan Desa/Kelurahan			2.142	2.069	8.391
	Taman Bacaan Masyarakat			1.493	2.406	4.246
2	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat (orang)	8	8	11	12	14
3	Koleksi Buku yang tersedia Per satuan Penduduk (%)			8.62	8.72	10.99

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan Uraian diatas bahwasannya Koleksi Buku yang terdapat di Perpustakaan Di kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Komitmen kepala daerah dalam meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Sawahlunto dengan menganggarkan membeli Buku buku terbaru setiap tahunnya. Selain itu meningkatkan pelayanan Perpustakaan Di Kota Sawahlunto, Pemerintah Daerah Melakukan Penambahan SDM melalui penerimaan CPNS.



Tabel 2.178
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Layanan Perpustakaan (layanan)					
	Pustaka : Umum	3	3	3	3	3
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	27	27
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	92	92
	Pustaka : Perguruan Tinggi					
	TOTAL	122	122	122	122	122
2.	Jumlah Koleksi (koleksi)					
	Pustaka : Daerah	28,636	31,549	32,624	33,674	34,450
	Pustaka : SD/MI			119,005	138,602	131,692
	Pustaka : SMP/MTs			20,311	18,954	34,956
	Pustaka : SMA/SMK/MA			6,044	6,354	6,373
	Pustaka : Desa/Kelurahan			2,142	2,069	8,391
	TOTAL	28,636	31,549	180,126	199,653	215,862
3.	Jumlah Tenaga Perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Umum	8	8	11	12	14
	Pustaka : Desa/Kelurahan	27	27	27	27	27
	Pustaka : Sekolah	92	92	92	92	92
	Pustaka : Perguruan Tinggi					
	TOTAL	127	127	130	131	133
4.	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (orang)					
	Pustaka : Daerah	61,922	61,314	64,500	26,860	27,089
	Pustaka : SD/MI	66,963	67,639	68,322	9,627	34,385
	Pustaka : SMP/MTs	18,859	19,049	19,241	5,399	7,878
	Pustaka : SMA/SMK/MA	16,509	16,675	16,843	7,201	11,496
	Pustaka : Desa/Kelurahan	1,413	1,433	1,450	613	1,229
	TOTAL	165,666	166,110	170,356	49,700	82,077
5.	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi (pustaka)					
	Pustaka : Daerah	0	0	0	0	2
	Pustaka : SD/MI	0	0	0	0	1
	Pustaka : SMP/MTs	0	0	0	0	2
	Pustaka : SMA/SMK/MA	0	0	0	0	1
	Pustaka : Desa/Kelurahan	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	0	6
6.	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (taman baca)	4	4	4	5	5
7.	Jumlah Anggota Perpustakaan (anggota)	2,849	4,215	4,612	4,862	5,137
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)				72.13	72.45
9.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%)				50.2	50.4

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan Uraian diatas dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, setiap unsurnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana, akan berdampak pada indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun berikutnya.

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah. Karena akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungannya. Berdasarkan Uraian diatas dapat dijelaskan bahwasannya Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi di Kota Sawahlunto dari Tahun 2017-2021 mengalami Fluktuatif. Permasalahan Ini dikarenakan beberapa hal antara lain : 1. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai 2. Rendahnya Minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip. 3. Kurangnya kesadaran/kepedulian para pegawai terutama unsur pimpinan tentang arti pentingnya arsip dan kearsipan.

Tabel 2.179
Perkembangan Arsip Statis yang Diakuisisi Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi	Arsip	1.500	867	1.981	3.532	2.147

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah. Karena akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungannya. Berdasarkan Uraian diatas dapat dijelaskan bahwasannya Peningkatan Arsip Statis yang diakuisisi di Kota Sawahlunto dari Tahun 2017sampai dengan 2021 mengalami Fluktuatif. Permasalahan Ini dikarenakan beberapa hal antara lain : 1. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai 2. Rendahnya Minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip. 3. Kurangnya kesadaran/kepedulian para pegawai terutama unsur pimpinan tentang arti pentingnya arsip dan kearsipan,

Tabel 2.180
Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	7.7	11.5	11.5	7.7	11.5

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan Uraian Data diatas dapat dijelaskan masih rendahnya OPD dalam menerapkan Pengelolaan Arsip. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur pengelola Arsip tentang Kearsipan sehingga berdampak pada OPD Lainnya. Pola Pembinaan pengelolaan arsip selama ini hanya berupa bimtek dan monitoring saja, untuk kedepannya akan dilakukan pendampingan langsung pengelolaan arsip dilapangan secara intensif berkelanjutan sampai OPD mampu mengelola arsip secara mandiri sesuai standar baku kearsipan.

Tabel 2.181
Persentase Kesiediaan Arsip Sebagai Bahan AK, ABS dan PN Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Kesiediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	12	17	20	25	25

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan Uraian data diatas dapat dijelaskan Selama 5 tahun ini Tingkat Kesiediaan Arsip sebagai Bahan AK, Alat Bukti dan Pertanggungjawaban Nasional masih dibawah 30 %. Ini dikarenakan Sarana Prasarana, Kompetensi SDM, Manajemen system Kearsipan dan Komitmen Pimpinan belum memadai. Maka dari itu untuk kedepannya Perangkat Daerah yang bersangkutan akan melakukan pendampingan langsung ke OPD Lainnya.

Tabel 2.182
SDM Pengelola Kearsipan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	6	6	7	10	10

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan Uraian data diatas, Jumlah Pegawai yang mengelola kearsipan dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Walaupun Meningkatkan dari jumlah Pegawai Pengelola Arsip tetapi tidak didukung dari Pengetahuan dan Kompetensi untuk mengelola arsip, sehingga Tingkat Kesiediaan Arsip sebagai bahan AK, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban masih dibawah 30 Persen.

Tabel 2.183
Data Capaian Pembangunan Kota Sawahlunto Bidang Kearsipan
Tahun 2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	953 Berkas
2	Arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	1212 Berkas
3	arsip statis yang telah dibuatkan sarana Bantu temu balik	83.994 Lembar
4	Jumlah arsip yang di masukkan dalam SIKN melalui JIKN	-
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	97%
6	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip NSPK	901 berkas
7	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana NSPK	-
8	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau di bubarkan dan pemekaran Daerah kota dengan NSPK	50,30 %
9	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	80,66 %

10	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	5 %
11	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	1%

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2021

2.1.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan kota Sawahlunto bersumber dari bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budi daya karena kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berada 250 – 785 meter ketinggian dari laut. Untuk produksi ikan darat dan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.184
Produksi dan Konsumsi Ikan
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Ikan (Ton)	214,98	216,05	217,26	206,27	189,79
Konsumsi ikan (kg)	1.228.111	1.327.948	1.908.507	2.456.822	2.472.273
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	19,1	32,77	28,55	36,66	36,43

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2021

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ikan darat di Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai 2020 untuk produksi mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan. Namun tahun 2021 produksi ikan mengalami penurunan yaitu menjadi 189,79 ton. Namun dilihat dari jumlah konsumsi ikan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana tahun 2020 konsumsi ikan kota Sawahlunto adalah 36,66 kg perkapita per tahun dan pada tahun 2021 jumlah produksi ikan Kota Sawahlunto kembali mengalami penurunan menjadi 189,79 ton. Dilihat dari kinerja produksi ikan tahun 2021 signifikan penurunannya. Adapun yang mempengaruhi produksi dari perikanan ini adalah kualitas dan kuantitas benih, luas lahan budidaya ikan serta kualitas dan kuantitas makanan ikan. Dalam memproduksi ikan di Kota Sawahlunto mempunyai budidaya perikanan darat kolam dan perikanan perairan umum (rawa, danau dan sungai), adapun perkembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.185
Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha)
Tahun 2017-2021

Jenis	2017	2018	2019	2020	2021
Sungai/perairan umum	96	195,97	195,97	195,97	195,97
Kolam	52,77	62,621	62,621	39,02	39,02
Sawah	-	-	-	-	-
Total	148,77	258,591	258,591	234,99	234,99

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa luas area budidaya perikanan di tahun 2021 menjadi 234,99 hektar. Dilihat dari jenis areal budidaya perikanan tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan areal kolam tetap 39,02 hektar. Tidak adanya kenaikan budidaya ini sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi ikan yang dihasilkan, untuk tahun 2021 untuk produksi ikan budidaya sungai/perairan umum adalah 28,76 ton dan untuk budidaya kolam menghasilkan 177,52 ton. Untuk itu sangat perlu di lakukan perluasan untuk budidaya perikanan di Kota Sawahlunto dalam meningkatkan produksi

ikan. Upaya peningkatan luas areal budidaya perikanan darat diantaranya melalui salah satunya pelaksanaan fasilitasi pada kelompok tani untuk pembangunan kolam terpal dan permanen beserta bibit ikan yang diiringi pembinaan langsung dari penyuluh, selain itu juga memanfaatkan aliran sungai untuk budidaya ikan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencukupi konsumsi masyarakat akan ikan.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 2.186
Indikator Bidang Pariwisata
Tahun 2017-2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB sektor Pariwisata (Juta rupiah)	67,260	73.951,36	82.406,43	75.255,42	80.359,32
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,13	2,17	2,24	2,06	2,12
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	2,759	2,58	2,48	1,75	1,86
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	0	1,37	0,12	-0,98	2
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	-14,90	-22,0	-9	-59	14,59
6	Tingkat hunian akomodasi (%)	23,81	23,81	14,74	15,84	19,27
7	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	60	60	65	65	75
8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	32,25	32,25	32,25	38,24	50
9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (%)	60,55	60,55	60,55	60,55	64,26
10	Jumlah Wisatawan (orang)	331.483	260.214	235.524	95.995	88.248
11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang professional (%)	13,22	13,22	13,22	13,22	15,30

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Untuk mendukung Brand Image Pariwisata Halal, Pemko Sawahlunto telah menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2020 pada Program/Kegiatan dan beberapa Subkegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain: Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata dan subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.

Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki spesifik dibandingkan dengan pariwisata di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pariwisata Kota Sawahlunto selain memiliki wisata alam, wisata buatan dan wisata religius, juga memiliki wisata sejarah dengan icon Kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung dan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Data kunjungan objek pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.187
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto (Berdasarkan Tiket Masuk)
Tahun 2017-2021

Objek Wisata	2017	2018	2019	2020	2021
Museum Gudang Ransum	19.619	14.143	15.309	5.959	5.574
Museum Kereta Api	12.220	7.964	6.503	3.246	2.867
Water Boom	93.446	76.274	68.709	23.024	31.150
Taman Satwa Kandi	89.927	66.166	57.715	15.894	14.890
Lubang Tambang Mbah Soero	10.653	8.663	8.492	3.932	3.704
Desa Wisata Rantih	2.171	5.619	5.599	2.822	2.406
Kelok 16	7.326	-	-	-	-
Puncak Cemara	65.227	52.079	44.627	21.682	17.812
Taman Buah	12.339	9.545	4.897	3.363	6.556
Camping Ground Kandi	18.555	18.578	9.611	9.627	3.289
Total	331.483	260.214	235.524	95.995	88.248

Sumber Data : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung pada objek wisata berdasarkan tiket masuk pada masing-masing objek terjadi penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan bagi yang masih dibuka harus diterapkan protokol kesehatan yang ketat serta turunnya minat masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata yang disebabkan ikut turunnya pendapatan atau perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Camping Ground Kandi terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena adanya penambahan atraksi baru pada Camping Ground pada tahun 2019, sehingga secara keseluruhan akan berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata di Kota Sawahlunto yang tentunya akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto, baik dari sisi industri pariwisata maupun kelembagaan pariwisata, adapun rincian kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.188
Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Tahun 2017-2021

Pengunjung	2017	2018	2019	2020	2021
Wisatawan Mancanegara	-	360	403	7	7
Wisatawan Nusantara	331.483	259.854	235.121	95.988	88.241
Total	331.483	260.214	235.524	95.995	88.248

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung Wisatawan Mancanegara pada tahun 2018 cukup bagus sebanyak 360 orang yang berasal dari berbagai Negara, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 403 orang karena banyaknya kegiatan kegiatan yang bertaraf internasional seperti Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival dan Sawahlunto Internasional Musik Festival yang diadakan di Kota Sawahlunto, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 7 orang, penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata yang disebabkan juga karena perekonomian masyarakat yang juga ikut terdampak karena wabah covid-19 begitu juga dengan tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara tetap 7 orang tetapi kunjungan wisatawan nusantara terjadi sedikit penurunan dari 95.988 orang menjadi 88.241 yang masih disebabkan dampak wabah covid-19.

Ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022, Terkait dengan itu destinasi pariwisata sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat disampaikan bahwa dari target 9 Destinasi pariwisata yang dikembangkan telah terealisasi sebanyak 3 destinasi baru, sedangkan objek wisata baru yang dibangun adalah kelok 16 dan batu runcing (geopark). Terkait keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata baru terlihat dari gerakan PT.WWS yang mengelola Waterboom dan Bioskop 4 Dimensi. Potensi objek wisata yang terdata sampai 2021 tercatat sebanyak 30 Geosite yang sudah termasuk kedalam Geopark Nasional.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan beberapa indikator kinerja daerah yang menjadi target pencapaian pemerintah daerah di urusan bidang pertanian, adapun indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.189
Capaian Indikator Bidang Pertanian
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Sektor Pertanian	303.116,60	312.007,01	325.354,30	326.224,79	345.211,69
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	9,58	9,16	8,84	8,92	8,96
Produksi Padi	14.274	16.108,00	17.926,00	17.874,45	16.691,72
Produksi Kakau(ton)	519,75	542,02	565,73	566,11	572,44
Produksi Karet (ton)	1240,85	1262,63	1540,16	2012,87	2223,86
Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton)	214,98	216,05	217,26	206,27	215,92
Produktifitas Pertanian Per hektar/Tahun (padi sawah)(%)	5,39	4,69	5,16	5,16	5,56
Persentase Penurunan Kejadian danJumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	100	20,00	20,00	20,00	0
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi (%)	-5,19	12,85	11,29	-0,29	-6,61
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (%)	10,90	4,28	4,37	0,06	1,11
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet(%)	29,18	1,75	21,98	30,69	10,48
Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	-14,94	5,41	-3,91	-0,73	-4,45
Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam (%)	-34,64	-	-	-2,59	33,30
Indek Penanaman (IP)	2,03	2,23	2,14	2,07	2,12

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2021

Dari tabel diatas PDRB Sektor Pertanian dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami Peningkatan setiap tahunnya, dan untuk Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan kembali walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk Produksi Padi pada Tahun 2021 mengalami Penurunan dari tahun 2020 hal ini disebabkan karena berkurangnya luas Panen 459,35 hektar sebagai dampak dari berkurangnya luas baku

lahan sawah dari 1.860 hektar menjadi 1.571 hektar. dan untuk Produksi Tanaman Kakau dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh karena adanya pelatihan bagi Petani tentang pemeliharaan tanaman kakau dan diberikan bantuan pupuk npk, adanya bantuan gunting pangkas untuk memangkas Tanaman. Dan untuk Produksi Tanaman Karet juga mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 2012,87 Ton dan Tahun 2021 sebesar 2223,86 Ton hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan tanaman yang baik oleh petani dan pembinaan oleh penyuluh tentang pemeliharaan tanaman dan tentang pengendalian hama penyakit. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi pada Tahun 2021 juga mengalami sedikit kenaikan yaitu 215,92 Ton hal ini disebabkan oleh banyaknya pembudidayaan yang mengisi ulang kolam tersebut. Dan Untuk Produktifitas Pertanian Perhektar juga mengalami sedikit kenaikan yang Tahun 2020 Sebesar 5,16 persen sedangkan Tahun 2021 sebesar 5,56 persen. (padi Sawah) disebabkan karena adanya peningkatan pemakaian benih unggul berlabel sebanyak 3.000 kg benih gadang rumpun kumbayau, disamping itu juga ada bantuan pupuk NPK ponska plus sebanyak 22.500 kilogram untuk peningkatan Produksi dan Produktivitas padi. Untuk Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus Penyakit Hewan menular pada tahun 2021 ini dengan 0 persen. Untuk Persentase Peningkatan Tanaman Padi pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar -0,29 persen dan pada Tahun 2021 sebesar -6,61. Dan untuk Persentase Peningkatan Tanaman Kakao mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2021 ini yaitu sebesar 1,11 persen hal ini disebabkan karena adanya pembinaan oleh penyuluh pertanian dilapangan tentang pemeliharaan Tanaman. Dan Untuk Persentase Peningkatan Persentase Produksi Tanaman Karet mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,48 persen hal ini disebabkan anatarain karena harga murah biasanya petani enggan untuk memanen. Dan untuk Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi pada Tahun 2021 sebesar -4,45 persen. Untuk Persentase Peningkatan Produksi daging Ayam pada Tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 33,30 persen Dan Untuk Indek Penanaman juga menalail sedikit Kenaikan menjadi 2,12 persen pada Tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya perbaikan jaringan irigasi baik melalui dana APBD maupun APBN.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Dalam Urusan Bidang Perdagangan ini sangat berpengaruh dengan adanya Pandemi Covid-19 ini yang mana para pedagang banyak yang mengeluh karena Pandemi jual beli langsung menurun drastis karena orang takut untuk keluar rumah hanya sekedar buat berbelanja, dan cenderung membeli masakan siap saji saja, dan dengan adanya Pandemi Covid 19 ini juga berdampak banyaknya pengurangan karena Perusahaan kecil banyak yang tutup dan terjadi PHK Karyawan karena tidak sanggup membayar gaji. Adapun perkembangannya Sektor Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.190
Capaian Indikator Bidang Perdagangan Realisasi
Tahun 2017 -2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	468.021,05	510.433,17	553.593,38	547.822,20	564.865,95
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100)	%	14,79	14,99	15,9	14,98	14,67
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	10	10	10	10	10



Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
(IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)						
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	80	80	80	80	98
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0	0	40	0	37,7
jumlah omset dipasar pasar tradisional Sawahlunto	rupiah	-	23.635,4 1	23.900,00	22.885,00	25.048

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Dari Tabel Urusan bidang Perdagangan diatas dapat disebutkan pada PDRB Sektor Perdagangan Pada Tahun 2021 mengalami penungkatan dari pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 yaitu sebesar 264.865,95. Dan Untuk Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100) pada Tahun 2021 ini mengalami sedikit penurunan dari pada Tahun sebelumnya.

Untuk Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko dan Swalayan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 tidak mengalami kenaikan. Untuk Persentase Penilaian Realisasi Pupuk tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar 98%. Untuk Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada Tahun 2021 yaitu sebesar 37,7 %. Dan Untuk Jumlah Omset Pasar Tradisional Sawahlunto juga mengalami kenaikan dari Tahun 2020 sebesar 22.885, 00 dan Pada Tahun 2021 sebesar 25.048 hal ini dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 terjadi kepanikan Pasar dengan Prilaku Pembelian barang berlebihan sebagai stock pada Tahun 2021 seperti untuk kebutuhan Beras, gula , minyak dan bahan lainnya sehingga terjadi kenaikan omset Pasar Pada Tahun 2021.

Daya beli di pasar-pasar tradisional di Kota Sawahlunto ini didukung oleh penataan (delapan) pasar tradisional dan pembangunan pasar songket Silungkang yang dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang mana pasar merupakan tempat aktivitas perekonomian di kota Sawahlunto. Selain itu Kota Sawahlunto juga mempunyai 12 mini market dan 1.523 toko/warung/kios yang juga mempengaruhi proses perdagangan di Kota Sawahlunto. Untuk itu dapat dilihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.191
Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Nama Pasar	Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasar Sawahlunto	779	779	779	779	779
2.	Pasar Silungkang	72	72	72	72	72
3.	Pasar Talawi	140	140	140	140	140

No	Nama Pasar	Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
4.	Pasar Sapan	50	50	50	50	50
5.	Pasar Tak Bancah	3	3	3	3	3
6.	Pasar Tumpuak Tengah	0	0	0	0	0
7.	Pasar Lumindai	30	30	30	30	30
8.	Pasar Kolok Mudik	10	10	10	10	10
9.	Pasar Songket	75	75	0	0	0

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Dilihat dari tabel diatas jumlah pedagang tetap yang ada di setiap pasar yang ada di Kota Sawahlunto tidak mengalami penambah, ini seiring dengan peningkatan penataan pasar yang dilakukan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan tidak adanya penambahan pedagang yang menempati kedai di Pasar Sawahlunto ini dikarenakan karena keadaan Kota Sawahlunto yang dilanda Covid-19 sejak maret 2020. peningkatan usaha perdagangan di Kota Sawahlunto bisa dikatakan tersendat. Selain pedagang tetap, yang berpengaruh terhadap jual beli di pasar adalah pedagang kaki lima, untuk itu dapat dilihat perkembangan pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebagai berikut :

Tabel 2.192
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2021

No	Nama Pasar	Pedagang Kaki Lima											
		Asli Sawahlunto						Luar Sawahlunto					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasar Sawahlunto	139	145	154	160	160	160	189	200	213	213	213	213
2.	Pasar Silungkang	101	101	102	105	105	105	30	29	32	32	32	33
3.	Pasar Talawi	95	95	96	98	98	98	213	213	221	221	221	223
4.	Pasar Sapan	36	36	38	41	41	41	8	11	18	18	18	18
5.	Pasar Tak Bancah	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3
6.	Psr Tumpuak Tengah	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
7.	Pasar Lumindai	12	12	12	12	12	12	5	5	5	5	5	5
8.	Pasar Kolok Mudik	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2
9.	Pasar Songket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	383	401	407	420	434	434	451	464	495	495	495	497

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto tidak mengalami kenaikan, terutama di Pasar Talawi dan Pasar Sawahlunto. Kedua pasar tersebut mudah untuk diakses, transportasi lancar dan mempunyai konsumen yang banyak dari pasar lainnya, terutama pasar Sawahlunto yang merupakan pusat dari seluruh pasar yang ada di Kota Sawahlunto. Kedua pasar diatas berjalan 2 kali dalam seminggu, untuk pasar sawahlunto pada hari rabu dan sabtu dan untuk Pasar Talawi pada hari selasa dan jumat. namun untuk kebutuhan pokok masih tetap ada setiap harinya. Pedagang yang berasal dari luar Sawahlunto ini pada umumnya menjual sayur sayuran, ikan dan bahan lainnya yang mana produksi dari Kota Sawahlunto sendiri tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto seperti, ikan air tawar masih ada pedagang dari tanah datar begitu juga dengan pedaganga cabe merah, sayuran, daun bawang dan lainnya juga masih ada yang

berasal luar sawahlunto, seperti tanah datar dan solok. Adanya pedagang luar ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan sayuran, ikan dan lainnya di Kota Sawahlunto. Sebenarnya apabila pedagang kaki lima ini dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat jika semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima dari luar Kota akan berpengaruh terhadap lapangan usaha bagi masyarakat kota, untuk itu perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mengorganisir pedagang kaki lima dalam kota sehingga menjadi sumber daya baru bagi peningkatan ekonomi kota, sebagai katub pengaman dari pengangguran dan sarana pemenuhan kebutuhan konsumen dari golongan ekonomi lemah.

Untuk melindungi konsumen di pasar maka diwajibkan untuk setiap pasar untuk melaksanakan tera ulang. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah, kegiatan Tera Ulang UTTP ini merupakan kewenangan daerah, dimana tahun tahun sebelumnya daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan yang melakukan tera ulang di datangkan dari propinsi. Dengan telah diberlakukannya UU ini pada tahun 2017,2018 dan 2019 Dinas Koperindag tidak melakukan kegiatan Tera Ulang UTTP Karena sarana dan prasarana serta tenaga tera ulang di Kota Sawahlunto belum ada. Pada akhir tahun 2019 Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Tera Ulang UTTP berupa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tera Ulang UTTP, Tahun 2020 tidak melakukan tera ulang sehingga tahun 2021 tera ulang sebanyak 1650 buah timbangan yang ditera dengan kenaikan 80%.

Secara teoritis yang diharapkan dari pasar ini adalah bagaimana berfungsinya pasar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk itu salah satunya dapat kita lihat dari jumlah pendapatan/omset suatu pasar dalam menjalankan fungsinya tersebut. Rendah tingginya pendapatan/omset pasar inilah yang bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi kemajuan suatu pasar. Kenyamanan dan keamanan konsumen juga sangat diperlukan dalam meningkatkan jual beli di pasar. Tahun 2021 omset pasar-pasar Sawahlunto totalnya Rp. 25.048.000,- dimana ini masih dibawah target RPJMD, untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen sehingga menarik masyarakat untuk berbelanja di pasar. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap pasar terutama dalam pendapatan pasar perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan pasar dalam menjalankan fungsinya.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian indikator kinerja bidang perindustrian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.193
Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian Realisasi
Tahun 2017 -2021

uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB sektor Industri	Juta Rupiah	404.956,76	415.867,46	392.312,53	395.492,23	432.174,39
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100)	%	12,79	12,22	10,66	10,82	11,22
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota	%	-	10,62	10,62	10,62	10,62
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	%		0	0	0	0

uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		-				
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	-	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansiterkait	%	-	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	-	100	100	100	100
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	-	100	100	100	100
Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu	%	-	0	0	0	0,004
Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	%	-	0	0	0	0,007

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Dari tabel Urusan Pemerintahan Sektor Perindustrian dapat disebutkan antarlain yaitu ntuk Nilai PDRB Sektor Industri pada Tahun 2021 mengalami Kenaikan dari Tahun 2020. Pada Tahun 2021 sebesar Rp.432. 174,39. Dan untuk Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100) Tahun 2019 dan Tahun 2020 hampir sama yaitu diangka lebih dari 10 persen yaitu 2019 sebesar 10,66 persen dan Tahun 2020 sebesar 10,82 persen sedangkan pada Tahun 2021 sedikit mengalami Peningkatan yaitu sebesar 11,22 persen.

Untuk Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami kenaikan dan Penurunan tetap sama. Dan Untuk Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP masih belum ada. Untuk Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansiterkait dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021 mencapai 100 persen. Untuk Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri



(IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait Tahun 2018 sampai Tahun 2021 mencapai 100 persen. Untuk Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota Tahun 2018 sampai Tahun 2021 mencapai 100 persen.

Untuk Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tahun 2018 sampai Tahun 2021 mencapai 100 persen. Dan Untuk Persentase Produk IKM yang mempunyai standar Mutu Tahun 2021 sebesar 0,004 persen ada pergerakan sedikit di bandingkan Tahun tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penerimaan standar mutu Produksi. Dan Untuk Persentase IKM yang memanfaatkan Teknologi Industri untuk tahun 2021 sebesar 0,007 persen sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp.0,- hal ini disebabkan karena IKM pada Tahun 2021 ada menerima alat produksi seperti Komputer, Printer, Alat Pencacah Plastik, Spiner.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Kesekretariatan Daerah merupakan unsur pendukung. Kinerja dalam penyelenggaraan unsur pendukung pemerintahan daerah terlihat dari capaian Peningkatan Zakat, SAKIP, LPPD dan kepuasan masyarakat. Berikut capaian kinerja Kesekretariatan Daerah sampai tahun 2021:

Tabel 2.194
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota Sawahlunto (Rp)	Rp	3.047.495.915	2.851.276.684	2.914.863.869	2.856.875.200	4.579.938.198
Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota Sawahlunto (%)	%	-	- 6,44 %	2,23 %	- 1,99 %	60,31 %
Jumlah Muzaki (orang)	Orang	-	-	-	-	-
Jumlah Mustahiq (orang)	Orang	2763	2552	2050	2559	3207
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)(Nilai)	Nilai	CC	B	B	B	B
LPPD	Peringkat Provinsi	4	-	-	-	-
	Peringkat Nasional	47	-	-	-	-
	Skor	3,0139	3,0965	-	-	-
	Status	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	B (80)	B (81,21)

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2022, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 202 dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat peningkatan zakat di Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan potensi zakat ini tergantung pada jumlah muzaki. Kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah prosedur penyerahan zakat dilakukan melalui instansi/lembaga/perangkat daerah masing-masing muzaki tanpa melaporkan berapa jumlah konkrit muzaki pada instansi/lembaga/perangkat daerah tersebut, sehingga tidak diketahui perkembangan jumlah muzaki di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun. Namun Baznas Kota Sawahlunto rencananya mulai tahun 2022 akan melakukan pendataan muzaki berdasarkan nama, instansi dan alamat.

Dan nilai SAKIP masih bertahan pada nilai B sampai tahun 2021. Sedangkan nilai IKM mengalami peningkatan dari tahun 2020, dari 80 menjadi 81,21 dengan kategori B. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota Sawahlunto mulai terlaksana pada tahun 2020 bekerja sama dengan Lembaga Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sumatera Barat dengan sampel 10 Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum tahun 2020, penilaian IKM dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Sementara itu, penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019-2021 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum ada pengumuman hasilnya.

B. Sekretariat DPRD

- Adanya tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap kelengkapan alat -alat DPRD Kota
- Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen kerja Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Tahunan (RKPD)

- c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto untuk periode 2019 – 2024 adalah 20 orang, dengan 4 fraksi, yaitu:

- Fraksi PKPI
- Fraksi Persatuan Pembangunan, Demokrat, Perindo
- Fraksi PAN, Golkar, PDI Perjuangan
- Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya

Tabel 2.195
Jumlah anggota dewan berdasarkan partai politik dan jenis kelamin

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golkar	1	1	2
PPP	1	2	3
PKPI	2	1	3
PKS	2		2
PAN	2		2
Perindo	1		1
Demokrat	2		2
PDIP	2		2
Gerindra	1		1
Nasdem	2		2
Jumlah/total	16	4	20

Sumber : Sawahlunto dalam angka 2022

Tabel 2.196
Jumlah kegiatan Sidang dan Rapat DPRD Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

No.	Rapat	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rapat Paripurna/Istimewa	32	33	14	18	20
2	Rapat Pimpinan/Gab. Pimpinan	18	19	43	43	42
3	Rapat Badan Musyawarah (Bamus)	20	21	19	18	20
4	Rapat Badan Anggaran (Banggar)	12	13	25	14	16
5	Rapat Panitia Khusus (Pansus)	15	16	-	8	10
6	Rapat Konsultasi	9	9	12	12	10
7	Rapat Fraksi	10	11	14	18	18
8	Rapat Kerja/Dengar Pendapat/gabungan Komisi	8	8	38	38	36
9	Rapat Badan Kehormatan (BK)	6	6	5	-	3
10	Rapat Badan Legislatif Daerah	6	6	64	64	60
11	Rapat Komisi	33	35	30	36	36
	Jumlah/total	169	177	268	269	271

Sumber : Sawahlunto dalam angka 2022

Tabel 2.197
Jumlah Keputusan DPRD menurut Jenis Keputusan di Kota Sawahlunto,
Tahun 2017-2021

	Jenis Keputusan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keputusan DPRD	24	13	14	8	30
2	Keputusan Sekwan	28	23	37	48	13
	Jumlah/total	52	36	51	56	43

Sumber : Sawahlunto dalam angka 2022

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Kota Sawahlunto pada urusan perencanaan untuk lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.198
Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perencanaan Urusan
Pemerintahan Tahun 2017 - 2021

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN				
			TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
I	PERENCANAAN						
1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat	1	-	-	4	4
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	92	99
3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	%	100	100	100	100	99
4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	50	19,22	21,43	26,55	28,3
5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	100	100	100	100	100
<i>INDIKATOR KINERJA</i>							
6	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA (Ada/tidak)	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan	(ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI CAPAIAN				
			TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERDA (ada/tidak)						
10	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	92	99
11	Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	99
12	Kesesuaian Rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: RPJMD 2018-2023 (Data olahan)

1. Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)

Indek kualitas Perencanaan Kota Sawahlunto merupakan indikator Kinerja Daerah pada tahun 2021, dengan target 3 realisasi capaian peringkat 4, indikator ini merupakan indikator pada perubahan RPJMD 2021-2023. Tahun 2017 indek kulaitas PPD mendapatkan peringkat 1 merupakan Indek kualitas perencanaan yang di berikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan. Menurunnya peringkat PPD Kota Sawahlunto di provinsi, ini mencerminkan bahwa ditingkat provinsi kualitas perencanaan Kota Sawahlunto juga mengalami penurunan, terutama dokumen perencanaan. Secara umum perlu adanya peningkatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari perencanan tersebut, dimulai dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana, sarana dan prasarana. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah proses perencanaan itu sendiri, perubahan regulasi sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan secara keseluruhannya.

2. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Persentase keselarasan program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Berdasarkan data tahun 2018- 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen, tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 92 persen. Tahun 2021 sebesar 99 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan sudah memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras

Indikator persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras yaitu perlu memperhatikan/rujukan RPJPD, RPJMD. Renstra OPD yang akan diturunkan dalam dokumen RKPD yang akan menjadi Renja OPD. OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras tahun 2017 sampai dengan 2020 capaian kinerja 100 persen. Tahun 2021 capaiannya 99 persen disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan sudah memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator ini merupakan indikator kinerja Daerah setelah perubahan RPJMD 2018-2023.

4. Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan

Pada perubahan RPJMD 2018-2023 Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan merupakan indikator kinerja Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan pada unsur perencanaan menunjukkan capaian indikator 28,3 Persen pada tahun 2021 dilihat dari capaian indikatornya menunjukkan peningkatan usulan masyarakat yang diakomodir melalui musrenbang dalam perencanaan pembangunan ini menunjukkan perencanaan telah melalui proses perencanaan. Dua tahun terakhir ini usulan masyarakat dilakukan melalui aplikasi SIPD sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap pengajuan usulan masyarakat yang belum begitu paham dalam proses aplikasi tersebut. Namun di dua tahun terakhir tersebut secara bertahap usulan masyarakat yang ditampung dalam perencanaan pembangunan mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan. Untuk itu sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi dalam menampung usulan masyarakat tetap dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi SIPD, karena usulan masyarakat ini sangat penting dalam proses perencanaan yang partisipatif.

5. Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan harus mengutamakan partisipasi masyarakat sebagai wujud bottom-up planning. Hal ini dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait dengan mekanisme perencanaan pembangunan. Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu dukungan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap perencanaan pembangunan kota. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan mencapai 100 persen, ini menandakan masyarakat mempunyai keinginan yang sama dalam mewujudnya perencanaan pembangunan yang lebih baik. Ini harus selalu dipertahankan setiap tahunnya dengan mengingatkan masyarakat melalui sosialisasi terhadap regulasi-regulasi proses perencanaan pembangunan yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

6. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto telah tersedia atau ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21).

7. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Sawahlunto telah tersedia atau ada. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Setelah tiga tahun berjalan, dengan dasar hasil evaluasi dan perubahan-perubahan regulasi maka disusunlah RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. *Ini* menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan pada Perangkat Daerah baik lima tahunan maupun satu tahun.

8. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut: (a) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2016; (b) Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2017; (c) Peraturan Walikota Nomor 25

Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2018; (d) Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2019, (f) Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2020, dan (i) Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2021.

9. Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak)

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 telah tersedia atau ada. RTRW 2012-2032 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7); sebagai Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kota dalam Pelaksanaan penataan ruang terdiri atas kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, memuat secara Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang untuk mewujudkan keseimbangan, keterpaduan, keserasian pembangunan dalam wilayah kota. Sawahlunto serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota Sawahlunto yang berkualitas.

10. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Capaian proporsi penjabaran program RPJMD yang konsisten kedalam RKPD yaitu Program RKPD tahun berkenaan jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Berdasarkan data tahun 2018- 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen, tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 92 persen, tahun 2021 meningkat menjadi 99 persen. Dua tahun terakhir konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tidak mencapai 100 persen, hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan sudah memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan penggunaan aplikasi SIPD yang merupakan amanat dari *Permendagri* Nomor 70 Tahun 2019 Tentang *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD).

11. Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD

Indikator Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, indikator adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program APBD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan, konsistensi mulai RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD), RKPD hingga menjadi APBD. Indikator ini merupakan indikator kinerja Daerah setelah perubahan RPJMD. Berdasarkan Hasil evaluasi dilihat Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD pada tahun 2018-2020 mencapai 100 persen tahun 2021 konsistensi program RKPD kedalam APBD sebesar 99 persen Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan sudah memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan penggunaan aplikasi SIPD yang merupakan amanat dari *Permendagri* Nomor 70 Tahun 2019 Tentang *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD).

11. Kesesuaian Rencana pembangunan dengan RTRW

Proporsi kesesuaian program terhadap pola struktur ruang dengan RTRW. merupakan kinerja Perencanaan Daerah selama periode Tahun 2018-2023. Indikator ini merupakan indikator kinerja kunci Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2018-2023, yaitu merupakan Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dibagi Dokumen RTRW, capaian Indikator tahun 2018-2022 telah mencapai target 100 persen.

B. Keuangan

Di dalam Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Realisasi keuangan Kota Sawahlunto yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.199
Realisasi APBD Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

Uraian	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	585.505.104.148,37	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45
Belanja	587.085.097.056,19	582.394.700.607,61	622.472.823.122,01	544.263.658.204,79	599.185.054.472,27
Pembiayaan	8.394.077.299,69	779.342.925,21	-2.184.587.830,61	11.474.898.868,81	39.863.898.029,58
SILPA	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas terlihat realisasi APBD Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 585.505.104.148,37 mengalami kenaikan menjadi Rp. 598.040.864.187,45 tahun 2021. Realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp. 587.085.097.056,19 mengalami kenaikan menjadi Rp. 599.185.054.472,27 tahun 2021. Realisasi pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp. 8.394.077.299,69 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 39.863.898.029,58 tahun 2021. Realisasi SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 6.814.084.391,87 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 38.719.707.744,76 tahun 2021.

Tabel 2.200
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota
Sawahlunto Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Peningkatan PAD (%)	0,18	-0,25	0,21	0,04	-0,14
3	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja (%)	90,36	90,95	89,04	89,58	92,11
5	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%)	32,79	38,81	37,40	50,50	96,21
6	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)	21,10	13,31	15,16	11,70	13,16
7	Laporan Keuangan Berbasis Akrua (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,77	8,05	8,96	10,32	8,44
9	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	102,20	100,33	92,12	98,88	97,71
10	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (%)	96,94	90,85	88,56	89,70	83,54
11	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah (buah)	21	20	19	19	20
12	Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55
13	Rasio PAD (%)	1,49	1,49	1,68	1,74	1,95
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (%)	73,93	68,21	68,21	60,02	10,15
15	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (%)	89,36	90,95	89,04	89,58	91,10

No	Indikator	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
16	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	95,16	94,36	94,98	98,19	100,94
17	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (%)	1,03	0,75	2,09	6,30	6,37
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	-	-	-	-	-
19	Apakah ada Daftar Asset Tetap (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	Apakah Ada Manual untuk Menyusun Daftar Asset Tetap (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
21	Apakah Ada Proses Inventarisasi Asset Tahunan (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
22	Apakah Nilai Asset Tercantum Dalam Laporan Anggaran (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
23	Persentase SILPA (%)	2,38	1,05	0,69	2,19	6,72
24	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	2,38	1,05	0,69	2,19	6,72
25	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana (%)	0	0	0	0	0
26	Persentase Belanja Pendidikan (20 %)	22	20	20	20	20
27	Persentase Belanja Kesehatan (10 %)	16	18	18	23	24
28	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%) → Perbandingan antara Belanja Langsung dengan APBD	55	51	54	46	62
	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (%) → Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan APBD	45	49	46	54	38
29	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2022

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)mengalami penurunan dimana persentase peningkatan PAD di Tahun 2021 mencapai minus 0,14 persen. Minusnya penigkatan PAD ini sangat berpengaruh terhadap kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Sawahlunto yang juga mengalami penurunan di Tahun 2021. Dari dua sumber pendapatan yaitu penerimaan pajak dan penerimaan retribusi daerah, namun penurunan yang cukup signifikan terjadi pada penerimaan retribusi daerah yaitu 83,54 persen. Karena penutupan tempat wisata di dua tahun terakhir akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga retribusi daerah yang berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu retribusi dari pelayanan kesehatan juga mengalami penurunan, karena belum optimalnya pelayanan yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Untuk itu dengan pasca pandemi ini perlu di optimalkan kembali pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada.

C. Kepegawaian

Tabel 2.201
Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian	%	0.36	0.42	0.84	0.58	0.38

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2021

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Berdasarkan uraian data diatas bahwasannya PNS di Kota Sawahlunto Dalam Segi Disiplin maupun Administrasi Lainnya relative kecil. Ini dikarenakan PNS di Kota Sawahlunto Sadar Akan Tanggung Jawabnya sebagai ASN.

Tabel 2.202
Persentase IKPAK Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2021

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa maupun media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah, misalnya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya diantaranya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat.

Dengan Dikeluarkannya Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat dan Berdasarkan Uraian data diatas memperlihatkan Kota Sawahlunto berkomitmen dalam hal Pelayanan Publik.

Tabel 2.203
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Instansi Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	26	26	26	26	26
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	99	99	99	99	99

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan uraian data diatas dapat dijelaskan bahwasannya Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Sebelum dan Setelah dikeluarkannya Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2603/OTDA tanggal 22 April 2021 mengenai penyederhanaan Birokrasi tidak mengalami Perubahan. Ini Dikarenakan Inspektorat Bersama Bag. Organisasi Setdako telah melakukan kajian kajian secara mendalam.

Tabel 2.204
Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu
Kota Sawahlunto Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1186	1123	1143	1125	1279

Sumber Data : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan PERMENPAN & RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional dan didukung dengan Uraian data diatas dapat digambarkan bahwa Jumlah ASN di Kota Sawahlunto yang beralih dari Struktural menjadi Fungsional dari Tahun 2017-2021 mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan 9 misi Presiden yang dikenal dengan Nawacita Kedua.

D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan diharapkan tersedianya inovasi-inovasi baru untuk Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan *global* dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan, disamping itu perlu dilakukan menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.205
Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Kategori
1	2017	Sangat inovatif
2	2018	Sangat inovatif
3	2019	Sangat inovatif
4	2020	Sangat inovatif
5	2021	Inovatif

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat Inovasi Daerah Kota Sawahlunto mengalami penurunan pada tahun 2021, dengan adanya perubahan beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri yang menjadi *leading sector* dalam penilaian indeks inovasi daerah. Selain itu pemahaman yang belum sama betapa pentingnya inovasi, kurangnya pengetahuan terkait kematangan nilai sebuah inovasi, pergeseran pejabat pelaksana dalam pelaksanaan inovasi pada perangkat daerah menjadi beberapa alasan penurunan nilai indeks inovasi daerah Kota Sawahlunto. Untuk itu saat ini Kota Sawahlunto gencar melakukan sosialisasi terkait inovasi daerah dengan tujuan munculnya inisiator-inisiator inovasi pada setiap perangkat daerah. Bahkan kedepannya Kota Sawahlunto melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto mendorong adanya inovasi pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sehingga peningkatan daya saing daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih prima.

Tabel 2.206
Kegiatan Inovasi yang Telah Dilaksanakan
Tahun 2020

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	Pendidikan Digital untuk SD dan SMP	Pendidikan Digital bertujuan menggabungkan dua kemampuan (Blended learning) yaitu kemampuan dengan menggunakan otak secara keseluruhan antara otak kiri dan kanan secara seimbang sekaligus menggunakan alat bantu berupa teknologi komputer dan multimedia antara lain : Audio, Visual, Text elektronik dan logica.	Dinas Pendidikan
2	Pengadaan sarana belajar siswa baru untuk kurang mampu	Membantu siswa baru yang kurang mampu pada tingkat SD dan SMP di Kota Sawahlunto	Dinas Pendidikan

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
3	Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kota Sawahlunto	Menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat melalui suatu kegiatan menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat khususnya anak dan perempuan melakukan aktivitas belajar mengenal, mendekatkan dan mencintai membaca sehingga terbentuk budaya gemar membaca yang akhirnya terjadi pencerahan, transformasi dan perubahan ke arah perbaikan karakter sehingga masyarakat mampu berbuat produktif	Dinas Pendidikan
4	Poliklinik Geriatri	Pelayanan khusus yang diberikan kepada pasien kategori Lansia (umur ≥ 60 tahun) dengan multiple diagnosa/ multi penyakit, atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Pelayanan poliklinik geriatri dapat dilayani oleh lebih dari satu orang dokter spesialis.	RSUD
5	Bisa RSUD Sawahlunto	BISA RSUD Sawahlunto (<i>Bed Information System App.</i>) adalah aplikasi untuk menampilkan display kamar/ tempat tidur RSUD Sawahlunto terkini secara <i>realtime</i> . Aplikasi ini memanfaatkan pengolahan database SIM-RS yang terintegrasi di setiap ruangan perawatan. Aplikasi ini terdiri dari 2 (dua) output laporan diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed Display untuk informasi pasien 2. Bed Display dan daftar pasien rawat inap RSUD Sawahlunto bagi petugas pusat informasi 	RSUD
6	REMEDI RSUD Sawahlunto	REMEDI (REkam MEDis DIGital) RSUD Sawahlunto memungkinkan penulisan rekam medis (diagnosa, tindakan intervensi, dan obat-obatan) pasien dapat diinputkan melalui sistem informasi berbasis teknologi. Sehingga pembacaan rekam medis dapat dilakukan melalui aplikasi yang bisa di akses dengan cepat oleh dokter, perawat dan tenaga medis lainnya di RSUD Sawahlunto dengan tidak harus menunggu lagi kurir Rekam Medis membawa berkas ke ruangan pemeriksaan	RSUD
7	BOR RSUD Sawahlunto	BOR (Booking Online Rawat jalan) RSUD Sawahlunto merupakan sistem pendaftaran pasien rawat jalan/poliklinik spesialis RSUD Sawahlunto secara online melalui aplikasi WA (What's up Appointment dan website RSUD Sawahlunto). Aplikasi ini dapat dimanfaatkan bagi pasien Rawat Jalan/ poliklinik yang akan mendaftar minimal satu hari sebelum hari kunjungan/ pemeriksaan	RSUD
8	HEBAT RSUD Sawahlunto	HEBAT (Hitung kinErja Berbasis Aplikasi yang Terintegrasi) RSUD Sawahlunto merupakan aplikasi untuk menghitung kinerja pegawai RSUD perencanaan kegiatan harian, target, capaian Sawahlunto. Aplikasi ini mencakup kegiatan, hasil dari pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan setiap hari terintegrasi ke SIM-RS RSUD Sawahlunto	RSUD
9	Bridging SISRUITE dan SIRANAP Kemenkes RI	Aplikasi ini memungkinkan terintegrasinya SIMRS RSUD Sawahlunto dengan SISRUITE (Sistem Informasi Rujukan Terpadu) dan SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) milik Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi ini mengurangi double entri data yang dapat memungkinkan kesalahan input dan update data rawat inap secara manual. Cukup satu kali entri dan memanfaatkan link dengan Database SIMRS, data SISRUITE dan SIRANAP dapat terupdate secara <i>realtime</i>	RSUD
10	Si GUNTU	Si GUNTU singkatan dari Sistem Informasi Guna Tanggap Umum dan istilah Si GUNTU merupakan inovasi bidang pelayanan yang diberikan oleh Desa Lunto Barat kepada Masyarakat. Melalui Si GUNTU ini masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan surat-surat yang terkait di Desa dari mana saja. Tanpa terikat tempat dan waktu. Asalkan bisa mengakses computer atau gedget berupa android atau iphone yang terkoneksi dengan jaringan internet	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
11	BANK DESA	kebutuhan masyarakat tentang unit simpan pinjam/ perkreditan BUMDes , BANK desa sebagai alternative bagi masyarakat dalam unit simpan pinjam dengan pola syariah bagi hasil	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	BANK RAB	Pada Penyusunan APBDes 2019, Bukik Gadang merupakan desa yang mengumpulkan paling awal se Kota Sawahlunto . Hal ini bisa dilakukan karena Desa bukik Gadang menerapkan Sistem BANK RAB yang berisi kumpulan dari RAB kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	BUMDES EKSPOR KOMODITI PINANG	Tidak hanya berinovasi dengan pendirian BANK DESA, BUMDes Kumbayau juga melakukan Ekspor Pinang ke Mancanegara seperti India, Nepal dan Turki . Dalam Hal Pengiriman dan administrasi BUMDes KMB bekerjasama dengan PT POS Indonesia Region Sumatera Barat , Riau dan Jambi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	COFFEE MORNING	Coffee Morning Merupakan nama keren dari kegiatan wirid subuh yang dilakukan setiap hari Minggu di Desa Lunto Timur Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang jamaah setela sholat Subuh, menambah wawasan keagamaan dan adat juga untuk menanamkan kembali falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Menuju KPM PKH Mandiri	Merubah pola pikir masyarakat miskin melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Tujuan dari Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan dalam Pengadaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan data pendukung lainnya. 2. Memudahkan dalam pencarian data laporan yang diperlukan setiap saat, baik itu perhari, perbulan ataupun per periode. 3. Meningkatkan akurasi proses analisis yang cermat dan cepat untuk dapat merumuskan kebijakan terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. 4. Kedepannya dapat menjadi alat bantu pelayanan bagi pemiliki kendaraan wajib uji dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 5. Memudahkan dalam penyimpanan data sehingga suatu saat terjadi force majeure data akan aman karena data dapat di backup di media storage yang lain 	Dinas Perhubungan
17	Pemetaan Lokasi Sarana dan Prasana Lalu Lintas se Kota sawahlunto	Pemetaan lokasi yang digunakan untuk dapat mempermudah pendataan sarana prasarana yang tersedia maupun yang belum tersedia. Dan juga dapat memudahkan dalam penempatan dan pemasangan titik lokasi sarana prasarana tiap tahunnya. Saat ini pemasangan sarana prasarana lalu lintas tersebut hanya berdasarkan survei lapangan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Dinas Perhubungan
18	Workshop Desain Komunikasi Visual Bahan Promosi Sawahlunto	Melaksanakan pelatihan "Digital Marketing" untuk para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto melalui pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi E-Commerce	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19	Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan ini merupakan usaha untuk mengaktifkan para pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 Sub Sektor. Bentuk kegiatan berupa pengiriman kelompok2 kreatif ke berbagai iven-iven Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan dan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		peningkatan pemasaran produk lokal	
20	Monitoring Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah lanjutan tahapan kegiatan untuk melihat dampak dari hasil Workshop pelaku ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
21	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Perlunya komitmen yang tajam dari pelaku pariwisata Sawahlunto terutama pelaku industri pariwisata untuk dipromosikan dan dituangkan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan para pelaku promosi pariwisata di Sumatera Barat (biro perjalanan)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	Pengadaan sarana dan prasarana promosi pariwisata yang bersifat inovatif perlu dilaksanakan, diantaranya membranding sarana mobilitas milik Pemko Sawahlunto dan bahan promosi lainnya, baik bersifat cetakan, media luar ruang dan bentuk lainnya yang tepat sasaran untuk meningkatkan awareness kepariwisataan Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23	Penyusunan Site Plan Destinasi Wisata	Perencanaan dalam bentuk desain maupun anggaran untuk pembuatan kawasan destinasi baru	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
24	Festival Sawahlunto Kreatif	Perlunya mengangkat potensi kreatif dari pelaku Ekraf di Kota Sawahlunto dengan mengundang Academic, Business, Community, Government. Kolaborasi ABCG dalam bentuk festival akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
25	Penyusunan Profil Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Penyusunan Profil Pelaku Ekonomi Kreatif akan membantu mempermudah mempublikasi potensi Produk dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 16 Subsektor Ekonomi Kreatif.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
26	Penyusunan data base kepariwisataan	Perlunya data dasar kepariwisataan yang akan menjadi bahan analisa dan rekomendasi untuk strategi pariwisata selanjutnya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	Evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata	Pelunya evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata berdasarkan indikator yang telah disepakati agar menghasilkan strategi pemasaran yang tepat dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan pemasaran pariwisata efektif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
28	Fasilitasi Hari jadi Kota Sawahlunto	Pelaksanaan HJK merupakan salah satu agenda rutin dan event unggulan Kota Sawahlunto. Perlu persiapan yang lebih matang untuk peningkatan kualitas pelaksanaan HJK Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
29	Festival Prof M.Yamin	Perlunya mengangkat ketokohan M.Yamin sebagai salah satu tokoh nasional yang berasal dari Sawahlunto melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan lokal sehingga semangat nasionalisme M. Yamin tetap mengalir di tengah masyarakat Sawahlunto dan Nasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
30	Bimtek Pengembangan SDM Pemasaran Pariwisata	Perlunya peningkatan kapasitas pelaku promosi pariwisata dari berbagai kalangan untuk menghasilkan pelaku promosi pariwisata yang profesional dan bersertifikasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
31	Pembangunan Historikal Park	Agar kawasan kandi semakin berkembang, dengan bertambahnya destinasi baru untuk menjawab dari kebutuhan wisata untuk menjadikan kawasan kandi menjadi kawasan wisata, maka perlu pengembangan Historikal Park untuk dijadikan salah satu kawasan baru dengan memunculkan kota Sawahlunto zaman dulunya.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
32	Fasilitasi Pengembangan Geopark Nasional	Untuk melengkapi sapsras dari Geopark, dengan pembuatan sign/tanda/petunjuk yang mencirikan Geopark Sawahlunto serta kegiatan penunjang untuk menjadikan Geopark Nasional menjadi UNESCO GLOBAL GEOPARK	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
	sawahlunto	(UGG) Taman Bumi Warisan Dunia.	
33	IJAZAH (INSENTIF BAGI PENYELENGGARA JENAZAH)	Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah penyelenggara jenazah. Di mana jumlahnya semakin berkurang dari waktu ke waktu sementara keberadaannya sangat diperlukan. Di kota Sawahlunto petugas penyelenggara jenazah diprioritaskan untuk dua kecamatan yaitu kecamatan Lembah Segar dan Barangin. Hal ini disebabkan karena dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Talawi dan Silungkang memiliki nagari dimana untuk urusan keagamaan diserahkan sepenuhnya kepada pengurus nagari yang dalam istilah adat disebut dengan Malin. Selama ini penyelenggara jenazah melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.	Setdako
34	IMMAGARI (INSENTIF BAGI IMAM DAN MUADZIN MASJID NAGARI)	Sawahlunto merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa. Di samping itu Sawahlunto juga memiliki wilayah administratif berupa nagari. Jumlah nagari di Sawahlunto sebanyak 10 nagari yaitu Talawi, Sijantang, Salak, Kolok, Talago Gunung, Balai Batu Sandaran, Lumindai, Lunto, Kubang dan Kajai. Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah imam dan muadzin masjid nagari. Di kota Sawahlunto masing-masing nagari memiliki masjid yang petugas keagamaannya ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setiap masjid nagari memiliki petugas berupa imam dan muadzin. Di mana keduanya bertugas membantu kelancaran dan menciptakan kenyamanan pelaksanaan ibadah sehingga menambah kekhusyukan beribadah. Selama ini kedua petugas keagamaan tersebut melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi Kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.	Setdako
35	GERAKAN SAWAHLUNTO MENGHAFAK AL-QUR'AN	Mengingat Sawahlunto saat ini sedang gencar mempersiapkan diri menjadi salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat, salah satu cara untuk membentengi generasi muda dari dampak modernisasi dan westernisasi yang mendukung kepariwisataan adalah melalui pendidikan hafalan Al-Qur'an. Di samping itu tidak kalah pentingnya pendidikan hafalan Al-Qur'an ini mampu meningkatkan kecerdasan generasi muda. Begitu pentingnya pendidikan di bidang hafalan Al- Qur'an, alangkah baiknya Pemerintah Kota Sawahlunto menciptakan suatu terobosan yaitu melalui "Gerakan Sawahlunto Menghafal Al-Qur'an" dengan target hafalan minimal 1 juz/orang/tahun.	Setdako
36	Pembangunan Command Center	Ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi command center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Tetapi tidak hanya itu, command center sangat membantu dalam mempermudah jalannya meeting dan koordinasi antar bidang. Command center juga dapat membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil adalah seakurat mungkin sesuai data yang ada. Command center sangat penting bagi kantor instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang	Setdako

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		memerlukan manajemen krisis. Beberapa kantor pusat daerah di Indonesia telah memiliki command center sebagai pusat integrasi data mereka, untuk koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lebih efisien	
37	Kliping Digital	Sebuah aktifitas / kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari sebuah koran yang memuat berita tentang kota Sawahlunto dan kemudian dilanjutkan dengan proses menempelkan guntingan-guntingan tersebut pada sebuah media kemudian di scan dan di upload ke website pemerintah kota	Setdako
38	Jaringan antar OPD/Jaringan Terintegrasi	Suatu sistem di mana semua OPD di pemerintah kota sawahlunto diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas yang keuntungannya berupa fleksibilitas dan penghematan biaya, karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang terpisah	Setdako

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Berdasarkan data dari tabulasi diatas dapat kita sajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.207
Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	3	7.89
2	RSUD	6	15.79
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	15.79
4	Dinas Perhubungan	2	5.26
5	Dinas Pariwisata	15	39.47
6	Setdako	6	15.79
Total		38	100

Tabel dibawah ini merupakan kumpulan kegiatan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto di Tahun 2021.

Tabel 2. 408
Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	BOS	a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online; c. Melakukan verifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi dan selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik; d. Melakukan Verifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi agar memperoleh alokasi Bantuan	Dinas Pendidikan

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		<p>Operasional Sekolah minimal.</p> <p>e. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah menandatangani naskah Perjanjian Hibah mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;</p> <p>f. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan dasar, komite sekolah dan masyarakat;</p> <p>g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan;</p> <p>h. Memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Operasional sekolah;</p> <p>i. menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;</p> <p>j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dari Sekolah;</p> <p>k. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring;</p> <p>l. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.</p>	
2	BASEKOLAH	<p>Kesadaran untuk melakukan inovasi dan menunjang berbagai masukan pengembangan pendidikan suatu daerah</p> <p>menjadi kunci karena tanpa inovasi maka suatu daerah atau organisasi/instansi akan menjadi kekurangan visi dan tujuan ke depan sehingga dirasa perlu menggenjot kinerja melalui inovasi, memaksakan inovasi sampai menjadi</p> <p>sebuah budaya/habbit serta kebutuhan. Ketidakmampuan dalam membeli seragam sesuai data dinas pendidikan kota sawahlunto, Pertimbangan apakah lebih bersih penampilan dan cemerlang prestasi anak didik serta pertumbuhan semangat</p> <p>belajar anak didik menjadi sebuah bahan diskusi hangat. Keinginan walikota - wakil walikota terpilih untuk membantu warganya berupa pakaian seragam bagi siswa yang</p> <p>baru masuk dan Tidak tersedianya menu belanja untuk pakaian seragam bagi siswa miskin di dana BOS umum nasional dari pemerintah pusat, DAK non fisik, maka muncul ide dan gagasan untuk menggunakan APBD sebagai solusi dari hal ini.</p>	
3	MERPATI	<p>Untuk mewujudkan Kota Sawahlunto yang cerdas dan kompetitif dengan ini Pemerintahan Kota Sawahlunto mengadakan program MERPATI (Memberikan Reward/Penghargaan Masuk Perguruan Tinggi) kepada Mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto</p> <p>Penghargaan ini bertujuan untuk mewujudkan kompetensi sumber daya manusia Kota Sawahlunto yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, Penghargaan ini dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Kota Sawahlunto.</p>	
4	PENDEKAR	<p>Dinas Pendidikan selaku Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai kewajiban dan</p> <p>tanggung jawab dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan yang ada wilayah Kota Sawahlunto. Dalam rangka memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar telah menyusun program pendidikan berkarakter.</p>	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
5	DISDIK TV	DISDIK TV adalah program alternatif Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto dalam mengatasi pembelajaran di era pandemi dan akan tetap eksis di masa normal Melalui siaran televisi dan siaran youtube maka guru guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah dapat terhubung dengan leluasa melalui internet dan jaringan LAN dalam pembelajaran. Berbagai kelas virtual dan model pembelajaran serta latihan soal soal dapat dijadikan program pengisi kegiatan di dalam nya.	
6	KELOK ES	Kelompok Edukasi Game Sawahlunto Heritage. Kelompok ini di inisiasi untuk di bentuk di setiap sekolah SD dan SMP Se Kota Sawahlunto sehingga menjadi Gerakan Massal yang proaktif	
7	RENI	RENI adalah bentuk reward yang diberikan kepada mahasiswa/i kota Sawahlunto yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang berakreditasi A atau B. Dimana Mahasiswa/i memperoleh nilai Indeks Semester 3,1 ke atas. Program RENI merupakan program unggul Pemko Sawahlunto yang menjadi program Dinas Pendidikan. Tujuan program RENI adalah untuk memotivasi mahasiswa/i melanjutkan dan mengikuti pendidikan di jenjang PT dan selalu meningkatkan dan mempertahankan nilai semester.	
8	KAHFI	KAHFI dirancang dan diimplementasikan untuk mendorong minat dan bakat peserta didik terhadap Tahfih Al Qur'an, meningkatkan hafalan yang sudah ada maupun memulai hafalan Qur'an sehingga bertumbuh dan banyak memiliki peserta di seluruh sekolah yang ada di Kota Sawahlunto baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP.	
9	PESAN KESASAR	Pesan Kesar ini termasuk kategori inovasi kesehatan, karena dalam pengelolaan kasus PTM dibutuhkan upaya promosi Kesehatan dan pencegahan yang tepat dan terpadu. Selama ini masyarakat belum menyadari pentingnya kesehatan karena PTM merupakan penyakit tidak memiliki gejala atau tanda klinis yang khas. Hal ini menyebabkan individu tidak mengetahui dan tidak menyadari kondisi tersebut sejak permulaan perjalanan penyakit. Kondisi ini berdampak terhadap keterlambatan dalam penanganan dan menimbulkan komplikasi bahkan berakibat kematian lebih dini. Pada point ini tidak menjelaskan tentang kontribusi pada SDGs melainkan hanya penjelasan inovasi sesuai dengan kategori yang di pilih, misalnya kalau memilih kategori kesehatan, maka ceritakan bahwa inovasi ini adalah inovasi kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	PEER KU SIAP	Dalam rangka peningkatan pemanfaatan pelayanan pengobatan tradisional pemerintah terus mendorong pengembangan dibidang pengobatan tradisional dengan mempersiapkan beberapa rumah sakit yang mampu memberikan pengobatan tradisional dan puskesmas dengan poli pengobatan tradisional selain itu beberapa rumah sakit swasta berinisiatif memasukkan pengobatan tradisional	
11	CERDAS	Dengan tingginya angka stunting maka dibentuk lah inovasi yang bisa menurunkan angka stunting di desa tersebut. Inovasi yang terbentuk adalah CERDAS (Cegah Resiko, Deteksi Dini, Atasi Stunting). Inovasi CERDAS adalah suatu kegiatan yang mencakup semua sasaran (Remaja, Ibu hamil, dan balita).	
12	BATUA BANA	Bantuan Untuk Keluarga Terdampak Bencana, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang non tunai yang nantinya diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Mekanisme pemberian bantuan diatur dalam Peraturan Walikota	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social yang dananya tersedia.	Bencana Daerah
13	SITU YAPANA	Sinergitas Terpadu Pelayanan Penanggulangan Bencana, Prosedur Tetap Tim Kaji Cepat Kota Sawahlunto yang juga Tim Sinergitas Terpadu dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam (Situ Yapana) ini bertujuan memberikan panduan bagi personil yang bergabung dalam tim untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencanayang terjadi.	
14	SILO	Dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi perempuan yang telah menikah (istri) tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang tangguh dan mampu memberikan pengasuhan yang berkualitas bagi anak, Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai gagasan/ide untuk membentuk sekolah khusus bagi perempuan yang telah menikah yang dikenal dengan nama SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto)	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	LAKEH SATO	LAKEH SATO Merupakan Pelayanan dengan menggunakan pendekatan by name by address yang dilakukan petugas teknis dengan mendatangi kandang ternak milik masyarakat Kota Sawahlunto berupa pelayanan : 1. Pemeriksaan hewan secara umum, 2. Pemberian multivitamin, 3. Pemberian Anti elektro dan, 4. Pemeriksaan kebuntingan dan status reproduksi	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
16	Rancak Digital	Aplikasi Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	SIRANGGA SATU	SIRANGGA SATU (Siap ceRAi laNGsung GAnti StATUs) merupakan sebuah inovasi pelayanan terhadap masyarakat dalam melakukan perubahan data kependudukan sehabis melakukan perceraian di Pengadilan Agama (setelah terbitnya akta cerai).	
18	SI CEPAT KILAT	Pelayanan Pengiriman Dokumen Perizinan Via Pos Kilat Khusus, DPMP TSP Naker Kota Sawahlunto bekerja sama dengan Kantor Pos Sawahlunto untuk melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pengiriman dokumen izin guna memberikan kemudahan dan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan sinergi kedua belah pihak dalam menyokong program Pemerintah.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
19	SIBARO	Sistem Informasi Perizinan Berbasis Masyarakat Sawahlunto, Teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan sebagai media informasi pelayanan kepada publik, menampung dan mengolah pengaduan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik dengan mengusung prinsip mudah, terpadu dan tuntas dalam menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat, yang dapat diakses secara online. Portal ini juga menyediakan link ke layanan perizinan OSS dan sicantik cloud disertai dengan berbagai informasi dan tata cara menggunakan layanan perizinan perizinan.	
20	BIKIN LAPAR	Bikin Izin Layanan Paralel, Pelayanan paralel memberikan kemudahan kepada Badang Usaha atau Perorangan untuk mengurus izin secara paket dengan waktu yang relatif lebih cepat sesuai dengan SOP 7 hari kerja, sedangkan untuk pengurusan reguler membutuhkan waktu hingga 14 s/d 60 hari kerja, pelayanan ini juga mempersingkat alur perizinan.	
21	LARIS	Layanan Perizinan dengan SMS, Inovasi sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back	

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		office Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mendapat notifikasi sms ketika ada perizinan yang harus diproses.	
22	MAS LAPOR	Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online, Inovasi Smartphone berbasis android dimanfaatkan untuk memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien, komunikasi via WhatsApp ini dimaksudkan untuk menghubungkan layanan informasi perizinan, layanan pengaduan dan potensi kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Tenaga Kerja.	
23	USUS BUNTU	Urus Izin Susah, Kami Bantu, masyarakat yang mengurus izin berusaha melalui aplikasi OSS akan diarahkan langsung dan diberi edukasi tentang bagaimana mengoperasikan Aplikasi OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha. Sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan secara terintegrasi yang berbasis online.	
24	SUPER ONLINE	Surat Pengantar Online, Super Online yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan serta menghemat waktu, dilakukan pengiriman data / dokumen perizinan ke OPD Teknis secara online sehingga diharapkan petugas teknis dapat melakukan respons yang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diminta.	
25	PTSP CERAH	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik dan Mudah, masyarakat yang mengurus perizinan tidak harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, tetapi cukup mengakses secara online pada aplikasi tersebut, kemudian mendapatkan output melalui email yang bertandatangan dan tersertifikasi sah secara elektronik. Pemohon mendapat notifikasi melalui sms, whatsapp dan email, selanjutnya dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon, sehingga akan menghemat waktu dan biaya serta meminimalisir resiko atas pengurusan perizinan terutama dalam masa pandemi Covid – 19 ini.	
26	PS PARENT	Pelestarian Songket Silungkang dalam bentuk Pergelaran Event, pelestarian nilai budayadan kunjungan wisata juga hal yang harus diwujudkan. Dari sisi nilai-nilai budaya, mengacu pada amanat Undangundang no. 5 tahun 2017 tentang Kebudayaan, maka Tenun Songket Silungkang setidaknya mengandung 5 (lima) Unsur Objek Pemajuan Kebudayaan OPK). Salah satu unsur OPK yang dominan adalah masih dipertahankannya Teknologi Tradisional.	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
27	Penetapan Sawahlunto Warisan Dunia	Sawahlunto: Dari Lubang Tambang Hingga Situs Warisan Dunia UNESCO	
28	DOKTER ONLINE	Digitalisasi koleksi/ dokumen terbitan pemerintah daerah yang nantinya akan dilayankan secara online	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	KEJAR LITERASI	Pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi	
30	PEMBAJAK LAUD	Peningkatan Minat Baca dengan Layanan Kunjungan TK/ PAUD, Perpustakaan Umum Kota Sawahlunto mengupayakan peningkatan minat baca tersebut dengan mengadakan layanan kunjungan TK/ PAUD ke Perpustakaan dengan acara-acara yang menarik, mengadakan games, memberikan hadiah serta menyediakan pendongeng berkompeten.	
31	PRT	Pembinaan Rumah Tahfiz, Dalam rangka meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara baik dan benar serta meningkatkan jumlah generasi penghafal Al-Qur'an di Kota Sawahlunto diperlukan adanya lembaga Taman	Sekretariat Daerah

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		Pendidikan Al-Qur'an/Madrasah Diniyah Awaliyah (TPQ/TPSQ/MDA) dan Rumah Tahfidz.	
32	PENYUSUP PT	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Terdepan, melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa dan OPD melalui koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi secara berkala.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33	E-MONEV	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi pembuatan e-Monev ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, kenyamanan, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas yang menuju pada peningkatan kualitas sistem monev pembangunan daerah.	
34	UCLG Aspac	Sawahlunto Join Mayor Academy Asia Pasific 2020, Program Asia Pacific Mayors Academy merupakan program executive courses bagi Walikota-walikota lingkup Asia Pasific yang diselenggarakan oleh Organisasi Non-Pemerintah dibawah PBB, seperti United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), UN HABITAT, UN ESCAP, APRU, IGES, dan melibatkan akademi-akademisi dari universitas ternama di luar negeri.	
35	BISA	<i>Bed Information System App</i> RSUD Sawahlunto, aplikasi untuk menampilkan display kamar/ tempat tidur RSUD Sawahlunto terkini secara realtime. Aplikasi ini memanfaatkan pengolahan database SIM-RS yang terintegrasi di setiap ruangan perawatan.	Rumah Sakit Umum Daerah
36	AMBULANCE DESA	Penyediaan Ambulance Desa untuk keperluan masyarakat, desa sikalang terletak di wilayah kecamatan talawi kota sawahlunto, dalam rangka meningkatkan pelayan kesehatan masyarakat desa sikalang harus ditunjang dengan sarana transportasi sebagai bentuk pelayanan yang baik. ambulan desa merupakan bentuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa sikalang dan ambulan desa merupakan cita-cita pemerintah desa sikalang sejak lama dan baru terealisasi tahun 2020. untuk dapat kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah desa sikalang untuk pembelian mobil grand max blind van tahun 2015 (gambar terlampir) yang akan digunakan sebagai mobil ambulan desa, yang mana mobil tersebut dibeli dari hasil juara nasional bpjs ketenagakerjaa pada tahun 2019.	Kecamatan Talawi
37	KELOPAK DARA	Kelompok Ternak Pemuda Saringan, banyaknya pengangguran di Kelurahan Saringan, maka Lurah dan Bhabin Kamtibmas Kelurahan Saringan berinisiatif untuk membuat wadah untuk berkumpulnya para remaja tersebut , selain untuk pengontrolan dan juga diarahkan menjadi remaja aktif yang produktif dengan membentuk sebuah kelompok ternak dimana tujuan akhirnya adalah menurunkan angka pengangguran dan kenakalan remaja di Kelurahan Saringan.	Kecamatan Barangin
38	POKDARWIS	Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Saringan, Pembentukan Pokdarwis berawal dari kemauan dan inisiatif masyarakat di Kelurahan Saringan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang kepariwisataan, maka pada tanggal 01 Oktober 2019 dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Saringan yang difasilitasi oleh Kepala Kelurahan Saringan dan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
39	GAMES ROTAN	Gathering positif bermedia Media Sosial Dalam Birokrasi Kecamatan, Sebagian besar masyarakat menggunakan perangkat teknologi hampir dua pertiga waktu yang dimilikinyakepemiikan media sosial jejaring facebook dan whatsapp merupakan suatu inovasi yang sangat trend dan sangat dibutuhkan dalam melayani dan	Kecamatan Silungkang

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		menyebarkan informasi.	
40	KE CANTIK	Kecamatan Cinta Statistik, Inovasi pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan statistik ini merupakan upaya untuk penguatan dan pemberdayaan fungsi kelembagaan desa/kelurahan di bidang data dan statistik melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi dan metodologi di bidang data statistik yang didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan sumberdaya lainnya.	Kecamatan Lembah Segar
41	SISSCA ONLINE	Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival) Online 2020, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Inovasi event yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu, diapresiasi oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan masuknya SISSCa ke dalam daftar 1 dari 100 Wonderful Event di Indonesia 2020.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
42	SISABER RT	Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga, (SISABER RT) merupakan inovasi yang melibatkan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup tentang sampah yang dilakukan oleh seksi perencanaan dan tata lingkungan pada bidang lingkungan hidup dengan kegiatan pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh seksi operasional kebersihan pada bidang kebersihan dan pertamanan. SISABER RT rancang bangun inovasinya didasari atas semakin meningkatnya timbulan sampah di masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih belum optimal terwujud di rumah tangga.	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
43	MATA ELANG	Mari Tata dan Evaluasi Langsung	Inspektorat
44	BPHTB	HOST TO HOST BPHTB, sebuah sistem yang mengoneksikan aplikasi e-BPHTB milik BPKAD dan aplikasi milik Kantah Sawahlunto. Koneksi tersebut bersifat online dan real time, sehingga wajib pajak yang telah menyelesaikan pembayaran BPHTBnya di BPKAD langsung tervalidasi di aplikasi Kantah Sawahlunto.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
45	JALAH SELALIN	Layanan Jaga Sekolah Selamat Berlalu Lintas, Dimasa pandemi sekarang ini diharuskan kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga jarak agar terhindar atau mengurangi dampak penyebaran virus covid 19 ini, oleh sebab itu banyak nya penjagaan serta pemeriksaan protocol kesehatan yang sangat ketat di berbagai daerah. dan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah membuat inovasi yang bernama Layanan Jaga Sekolah serta sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah sekitah wilayah Kota sawahlunto untuk menerapkan inovasi tersebut.	Dinas Perhubungan

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Berdasarkan tabulasi data diatas dapat kita sajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto sebelum tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.209
Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	8	17,78
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6,67
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	2	4,44
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1	2,22
5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	1	2,22
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	4,44
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	17,78
8	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2	4,44
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	6,67
10	Sekretariat Daerah	1	2,22
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	6,67
12	Rumah Sakit Umum Daerah	1	2,22
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	2,22
14	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	2,22
15	Inspektorat	1	2,22
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	2,22
17	Dinas Perhubungan	1	2,22
18	Kecamatan Silungkang	1	2,22
19	Kecamatan Lembah Segar	1	2,22
20	Kecamatan Talawi	1	2,22
21	Kecamatan Barangin	2	4,44
Total		45	100

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 22 dari 26 Perangkat Daerah yang ada di Kota Sawahlunto atau 84,6 persen Perangkat Daerah yang sudah melaporkan inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 dimana target kedepannya 90 persen lebih Perangkat Daerah sudah berinovasi, selain bersumber dari inovasi Perangkat Daerah kedepannya Desa dan Kelurahan akan menjadi sasaran penciptanya kegiatan-kegiatan inovatif melalui lomba inovasi tingkat Desa/Kelurahan.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan harus diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara prioritas. Perkembangan indikator pembangunan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.210
Jumlah Auditor dan P2UPD di Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian Jabatan Fungsional	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	Auditor	8	8	10	10	13	13	
	Utama	-	-	-	-	-	-	
	Madya	3	3	4	7	7	7	
	Muda	3	3	4	1	2	2	
	Pertama	1	1	1	1	2	2	
	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksana Lanjutan	1	1	1	-	1	1	
	Penyelia	-	-	-	1	1	1	
2	P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)	4	4	9	10	17	17	
	Madya	2	2	3	3	6	6	
	Muda	2	2	3	3	5	5	
	Utama	-	-	-	-	-	-	
	Pertama	-	-	3	4	6	6	
3	Auditor Kepegawaian	0	0	0	0			
	Total	13	13	19	20	30	30	

Sumber Data : Inspektorat Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa SDM di Inspektorat setiap tahunnya meningkat. Ini berdampak pada pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien sehingga terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

A. Kecamatan

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.211
Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	-	100	100	100	100

Sesuai dengan tabel realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) persentase lembaga kemasyarakatan di Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai 2021 sudah cukup baik. Untuk tahun 2020 dan 2021 pelaksanaannya lebih banyak ke penanggulangan Covid 19.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di Kota Sawahlunto urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Situasi pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami kendala. Seperti halnya kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan politik pada pelajar yang terkendala karena sistem belajar siswa secara daring dan pelaksanaan upacara hari besar yang terkendala dengan jumlah peserta yang terbatas. Untuk kegiatan pencegahan potensi dan konflik sosial masih berjalan seperti biasa dengan tetap melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pencegahan terjadinya konflik sosial. Sebagai bentuk inovasi pada kegiatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto menggaet perwakilan masyarakat di masing-masing kelurahan dan anggota kepolisian sebagai pemantau dalam rangka mencegah konflik sosial dan mengamati gejala-gejala konflik yang ada di masyarakat.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita merupakan rasio atau perbandingan Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan Jumlah Rumah Tangga (Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : 205) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut BPS (<https://sirusa.bps.go.id>), Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dari kedua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita adalah Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Makanan, Minuman, dan Rokok; 2) Pakaian dan Alas Kaki; 3) Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4) Kesehatan dan Pendidikan; 5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6) Hotel dan Restoran, dan 7) Lainnya. Dan Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan (Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 903-904 dan BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016-2020 : 11). Sementara itu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran (*demand side*). Komponen lainnya adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, Net Ekspor Barang dan Jasa. (Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022 : 375)

Berikut disajikan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto beserta variabel pembentuknya selama kurun waktu 2017-2021 pada tabel berikut :

Tabel 2.212
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Kota Sawahlunto	Juta Rupiah	1.751.997,36	1.898.442,83	2.086.707,65	2.064.640,51	2.151.117,44
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	Jiwa	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto	Juta Rupiah/ jiwa	28.54	30.67	33.37	31.70	32.75

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2022 (data diolah)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 saat merebaknya wabah pandemi covid 19, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto mengalami penurunan sebesar 1,67 juta rupiah per jiwa atau turun sebesar 5 persen. Sedangkan sebelum mewabahnya Covid-19, yakni periode 2016 sampai dengan 2019, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 33,30 juta rupiah per jiwa dengan peningkatan 8,58 persen dari tahun sebelumnya dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 28.54 juta rupiah per jiwa.

2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita merupakan rasio atau perbandingan Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan dengan Total Pengeluaran dikali dengan 100 persen (Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : 205) dengan rumus sebagai berikut :

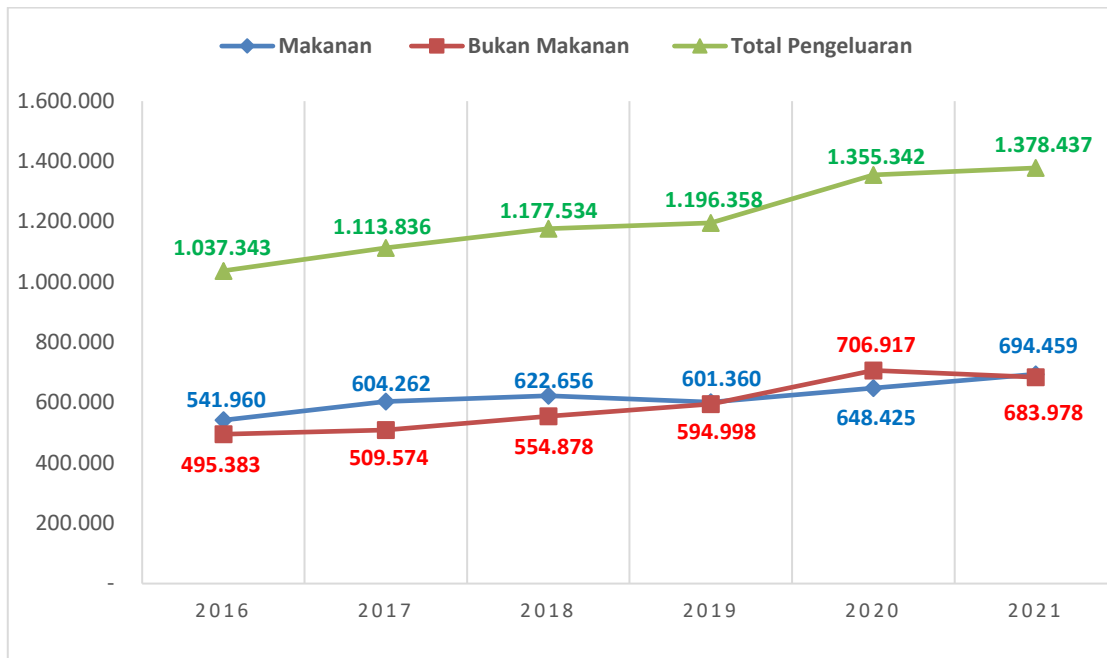
$$\% \text{ Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Atau dengan kata lain, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Disamping itu data pengeluaran dapat mengungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan terhadap total pengeluaran, makin membaik tingkat kesejahteraan (Sumber : BPS, <https://sirusa.bps.go.id>).

Pengeluaran konsumsi untuk makanan digunakan untuk membiayai padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, bahan makanan lainnya, makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau. Sedangkan pengeluaran konsumsi untuk non makanan digunakan untuk membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka barang dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; keperluan pesta dan upacara/kenduri (Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 : 855).

Berikut disajikan perkembangan rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan Kota Sawahlunto tahun 2017-2021 pada grafik berikut :

Grafik 2.19
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021 (Dalam Rp)

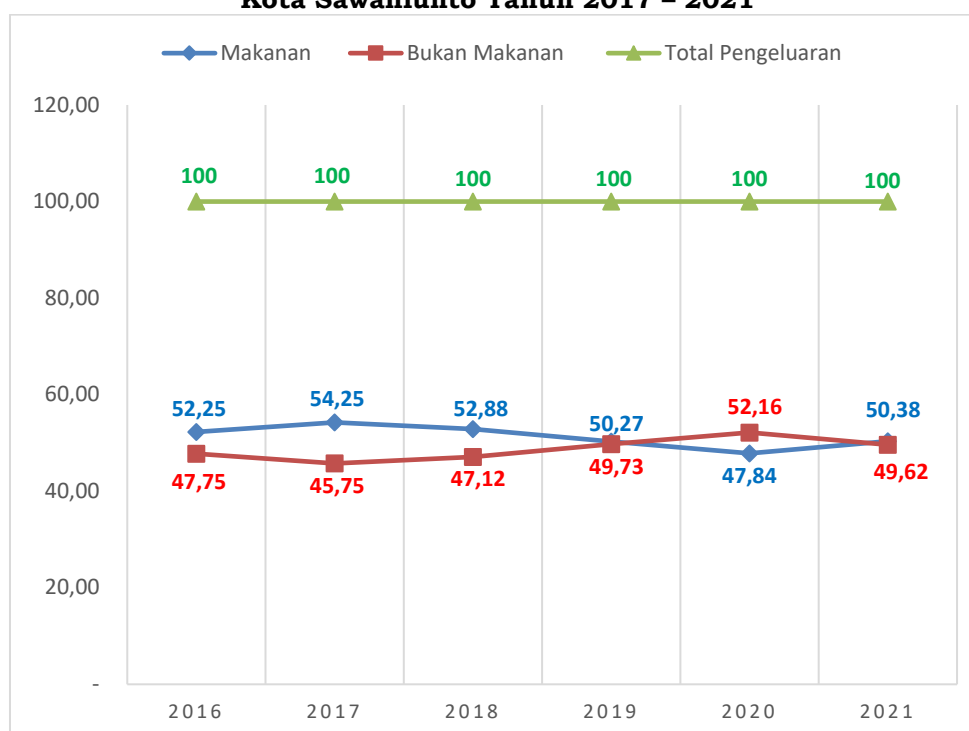


Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2022 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 2017-2021, pengeluaran konsumsi kelompok makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sawahlunto, terkecuali tahun 2020 dimana pengeluaran konsumsi kelompok non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi makanan. Pada Tahun 2021, rata-rata pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar 694.459 rupiah per kapita per bulan, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar 648.425 rupiah per kapita per bulan. Meningkatnya rata-rata pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto tahun 2021 disebabkan tingginya laju inflasi di Kota Sawahlunto pada tahun 2021 yang berada di atas 2 persen.

Untuk melihat komposisi pengeluaran konsumsi kelompok makanan dan non makanan dapat dilihat pada besarnya Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan. Berikut disajikan perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto tahun 2017-2021 pada grafik berikut :

Grafik 2.20
Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2022 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 di atas 50 persen kecuali tahun 2020 dengan kecenderungan berfluktuasi. Hal ini berarti pembiayaan rumah tangga di Kota Sawahlunto lebih dari separohnya digunakan pengeluaran kelompok makanan. Pada tahun 2020, pengeluaran untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar 47,84 persen dan untuk konsumsi non makanan sebesar 52,16 persen. Dengan demikian pada tahun 2020, distribusi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk non makanan di Kota Sawahlunto lebih besar dari pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk makanan (52,16 persen lebih besar dari 47,84 persen).

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun sebelumnya dan setelahnya. Karena proporsi pengeluaran konsumsi non makanan lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini sejalan dengan teori dari ekonomi modern / maju menurut Walt Whitman Rostow, salah satu ciri perekonomian yang paling modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Atau dengan kata lain, semakin tinggi perekonomian suatu masyarakat, konsumsi untuk kebutuhan non makanan semakin tinggi.

Penyebab kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun-tahun adalah diduga karena turunnya laju inflasi pada kelompok bahan makanan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan pasar sepi sehingga harga-harga menjadi turun. Disamping itu, penyelenggaraan sekolah dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring sehingga memerlukan tambahan biaya untuk kuota internet (pengeluaran kelompok non makanan).

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan **rasio atau perbandingan** Nilai Tambah Sektor Tertentu dengan Jumlah Angkatan Kerja pada sektor tertentu dimaksud (Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : 205) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Produktivitas Total Daerah} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor ke-i}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dengan kata lain Produktivitas total daerah diperoleh dengan membandingkan PDRB menurut lapangan usaha tertentu yang dihasilkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tertentu dimaksud. Produktivitas total daerah dihitung menurut sektor atau lapangan usaha dengan tujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor atau lapangan usaha perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kelompok lapangan usaha terdiri dari tiga sektor besar, yaitu : Pertanian; Manufaktur; dan Jasa. Sektor *Pertanian* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *Manufaktur* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *Jasa* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan Makan Minum; Pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2018, kelompok lapangan usaha di Kota Sawahlunto terdiri dari lima sektor besar, yaitu : Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan Lainnya. Sektor *lainnya* terdiri dari Pertambangan dan Penggalan; Listrik, Gas dan Air; Kontruksi; Angkutan; Pergudangan; Komunikasi; Keuangan; Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

Dengan adanya perubahan kelompok lapangan usaha tersebut, maka data yang disajikan hanya selama 3 tahun, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.213
Produktifitas Tenaga kerja Kota Sawahlunto Per Sektor
Tahun 2019 – 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)			
Sektor	2019	2020	2021
Pertanian	217,981.59	219,533.32	235,288.04
Manufaktur	872,139.94	860,221.60	829,656.15
Jasa	1,706,414.89	1,681,169.26	1,764,645.84
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja (Jiwa)			
Sektor	2019	2020	2021
Pertanian	4.027	5.646	5.547
Manufaktur	8.367	7.361	7.350
Jasa	16.723	17.303	17.289
Produktivitas Total Daerah (Jutaan Rupiah / Jiwa)			
Sektor	2019	2020	2021
Pertanian	54,13	38,88	42,42
Manufaktur	104,24	116,86	112,88
Jasa	102,04	97,16	102,07

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Sawahlunto pada tahun 2019-2021 adalah sektor Manufaktur yang menghasilkan produktivitas sebesar 104,24 juta rupiah per jiwa pada tahun 2019 dan 116,86 juta rupiah per jiwa pada tahun 2020 serta 112,88 juta rupiah per jiwa pada tahun 2021. Meskipun sektor manufaktur merupakan sektor yang paling produktif, namun dari sisi nominal terjadi penurunan, hal ini disebabkan menurunnya produksi manufaktur secara signifikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor yang paling banyak menyerap jumlah tenaga kerja adalah sektor Jasa, yakni sebanyak 16.723 orang pada tahun 2019 dan 17.303 orang pada tahun 2020 serta 17.289 orang pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor jasa merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Sawahlunto, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor Manufaktur. Sedangkan sektor yang paling rendah produktivitasnya adalah sektor pertanian.

Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas, dimana sektor formal dalam hal ini sektor manufaktur mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada 2020-2021, dimana jumlah tenaga kerja sektor manufaktur berkurang sebanyak 1.006 orang pada tahun 2020 dari 8.367 orang pada tahun 2019 menjadi 7.361 orang pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 berkurang lagi sebanyak 11 orang. Sementara sektor pertanian tenaga kerjanya bertambah sebanyak 1.619 orang pada tahun 2020, dari 4.027 orang pada tahun 2019 menjadi 5.646 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tenaga kerja berkurang lagi sebanyak 99 orang, dari 5.646 orang menjadi 5.547 orang. Sedangkan tenaga kerja sektor jasa bertambah sebanyak 580 orang pada tahun 2020, dari 16.723 orang pada tahun 2019 menjadi 17.303 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tenaga kerja berkurang sebanyak 14 orang, dari 17.303 pada tahun 2020 menjadi 17.289 pada tahun 2021.

Berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja Kota Sawahlunto ada yang bekerja sebagai pegawai/karyawan, petani, buruh, dan lain-lain. Berikut jumlah tenaga kerja Kota Sawahlunto berdasarkan status pekerjaan utama pada tahun 2020 dan 2021:

Tabel 2.214
Jumlah Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2020-2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki		Perempuan		Total		Persentase Tenaga Kerja (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Berusaha Sendiri	4732	4799	3110	3586	7842	8385	25,87	27,78
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	1769	1349	1890	1350	3659	2699	12,07	8,94
Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar	481	664	77	229	558	893	1,84	2,96
Karyawan/Pegawai/Buruh	7556	8415	5250	5602	12806	14017	42,25	46,44
Pekerja Bebas di Pertanian	398	133	265	186	663	319	2,19	1,06
Pekerja Bebas di Non Pertanian	1580	1468	230	64	1810	1532	5,97	5,08
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	894	761	2078	1580	2972	2341	9,81	7,76
Jumlah Tenaga Kerja	17.410	17.589	12.900	12.597	30.310	30.186	100,00	100,00

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tenaga kerja Kota Sawahlunto sebagian besar adalah karyawan/Pegawai/Buruh sebanyak 42,25 persen pada tahun 2020 dan 46,44 persen pada tahun 2021, kemudian tenaga kerja yang berusaha sendiri sebanyak 25,87 persen pada tahun 2020 dan 27,78 persen pada tahun 2021, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap sebanyak 12,07 persen pada tahun 2020 dan 8,94 persen pada tahun 2021, dan seterusnya.

Pada dasarnya Produktivitas total daerah merupakan indikator daya saing daerah yang dihitung dengan cara membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan total tenaga kerja. Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.215
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.590,03
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	29.127	30.320	29.117	30.310	30.186
Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa/ tahun)	86,42	87,59	96,04	91,09	93,74

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2022 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto pada tahun 2021 ketika kasus pandemic covid 19 mulai melandai meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 93,74 juta rupiah/jiwa. Sementara ketika wabah pandemi covid-19 melanda pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja turun dari tahun sebelumnya menjadi 91,09 juta rupiah/jiwa. Hal ini sangat jauh berbeda dari kondisi sebelum adanya pandemi covid-19 (tahun

2017 sampai dengan 2019), dimana produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari 86,42 juta rupiah/jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 87,59 juta rupiah/jiwa pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 96,04 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019.

4. Nilai tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks yang diterima petani (IT) dengan indeks yang dibayar petani (IB) dikali dengan 100 (Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : 205) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tukar Petani} = \frac{\text{Indeks yang diterima petani (IT)}}{\text{indeks yang dibayar petani (IB)}} \times 100 \%$$

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hanya menghitung Nilai Tukar Petani sampai tingkat Provinsi. Dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Sawahlunto merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat.

Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budidaya).

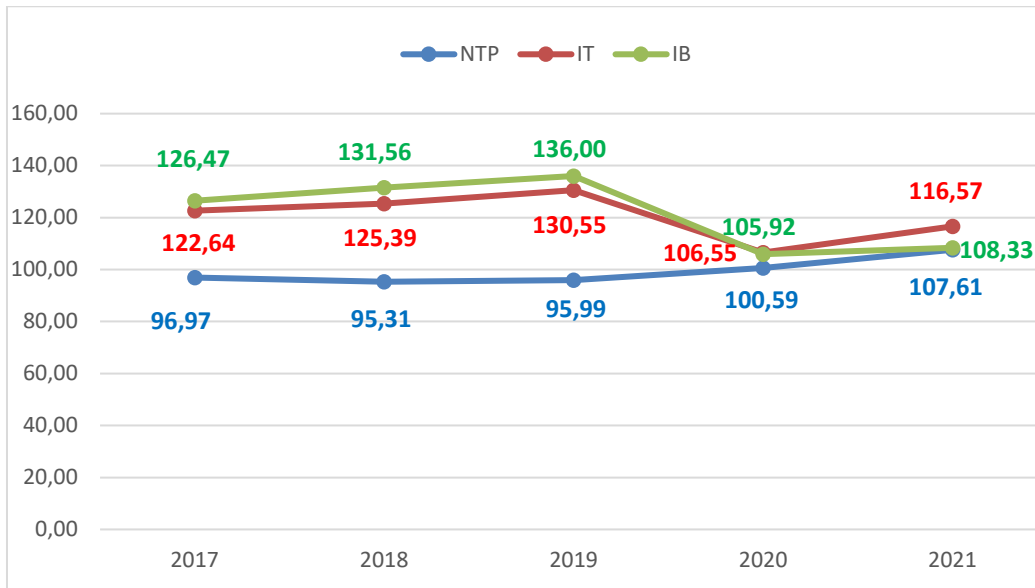
Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1. NTP > 100 atau IT > IB
Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani lebih besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami surplus.
2. NTP = 100 atau IT = IB
Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani sama besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami titik impas.
3. NTP < 100 atau IT < IB
Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *defisit*.

Berikut disajikan grafik perkembangan Nilai Tukar Petani Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 bersamaan dengan Indeks harga yang dibayar petani (IB) dan Indeks harga yang diterima petani (IT) :

Grafik 2.21
Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 – 2021



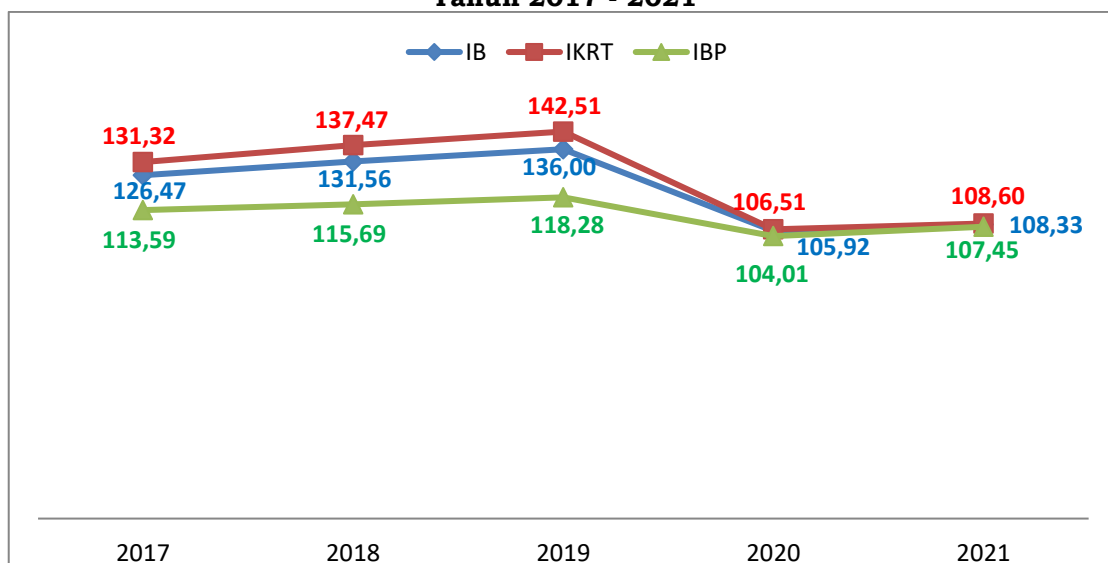
Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Nilai Tukar Petani dari tahun 2019 hingga tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan pada tahun 2018. Mulai tahun 2020 Nilai Tukar Petani atau NTP sudah lebih dari 100 (NTP >100). Hal ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) lebih besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami surplus.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi periode tahun 2017-2019, dimana petani terus menerus mengalami *defisit* (NTP <100), yang berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) lebih kecil dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB). Sebetulnya pada periode ini sudah terjadi peningkatan pendapatan petani (IT), namun peningkatan pendapatan petani tersebut diiringi oleh peningkatan Indeks harga yang dibayar petani (IB) yang lebih tinggi. Akibatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi lebih kecil dari 100 (NTP < 100) atau defisit.

Indeks harga yang dibayar petani (IB) meliputi indeks harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga (Indeks Konsumsi Rumah Tangga/IKRT) maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian (Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP). Berikut disajikan perkembangan Indeks harga yang dibayar petani (IB) periode 2017 sampai dengan 2021.

Grafik 2.22
Perkembangan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)
Tahun 2017 - 2021



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022 (data diolah)

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada periode 2017-2021, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lebih dominan dari pada Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP). Ini berarti para petani menggunakan sebagian besar pendapatan yang diterimanya untuk kebutuhan rumah tangganya dari pada untuk Penambahan Barang Modal. Oleh sebab itu perlu campur pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengendalian harga hasil pertanian, dimana pengalaman selama ini menunjukkan bahwa harga barang-barang pertanian cenderung rendah dan tergantung pada harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul hasil pertanian.

3.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi topografi dan terjadinya pergerakan tanah di beberapa daerah di Kota Sawahlunto sangat mempengaruhi kondisi fasilitas wilayah dan infrastruktur yang telah terbangun di Kota Sawahlunto. Hal tersebut membutuhkan penanganan dengan perlakuan khusus terhadap infrastruktur yang dibangun agar dapat bertahan lebih lama. Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi fasilitas wilayah/infrastruktur tersebut, yaitu : rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

1. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan

Nilai rasio panjang jalan terhadap kendaraan bermotor menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (kilometer). Nilai ini berarti 1 kilometer jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Untuk Panjang jalan, dihitung baik itu jalan kota, jalan propinsi maupun jalan nasional. Sementara untuk jumlah kendaraan, mengacu pada data jumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Indikator ini untuk melihat kelayakan jalan di Kota Sawahlunto dalam menampung jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.216
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto
Tahun 2017 – 2021

NO	JENIS DATA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	6	7	8	9	9
1	Jumlah Panjang Jalan Kota	Km	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87
2	Jumlah Panjang Jalan Provinsi	Km	30,65	30,65	30,65	30,65	43,20
3	Jumlah Panjang Jalan Negara	Km	11,35	11,35	11,35	11,35	12,37
4	Jumlah panjang jalan total	Km	496,52	496,87	496,87	496,87	510,44
5	Jumlah Kendaraan	unit	17.532	18.755	19.858	20.389	21.567
6	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		0.028	0.026	0.025	0.024	0.023

Sumber Data: Pengolahan data Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, 2022

Dilihat dari tabel di atas rasio jumlah kendaraan per panjang jalan di Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Faktor yang mempengaruhinya adalah bertambahnya jumlah kendaraan tiap tahunnya, sedangkan panjang jalan hanya bertambah pada tahun 2021.

Berdasarkan tabel Kota Sawahlunto mempunyai panjang jalan total sepanjang 510,44 kilometer. Jalan di Kota Sawahlunto masih memenuhi untuk menampung jumlah kendaraan dan tidak terjadi kemacetan di Kota Sawahlunto.

2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2.217
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	65.020	66.470	149.474	25.200	28.350

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto , 2021

3. Ketaatan terhadap RTRW

Peningkatan kebutuhan ruang semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, sementara itu keberadaan lahan di Kota Sawahlunto tetap dan terbatas. Akibatnya terdapat konflik kepentingan lahan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan pada ruang yang tetap dan terbatas agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang ada secara serasi antara untuk kepentingan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta efisiensi dalam alokasi investasi.

Disamping itu, penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persolan wilayah kota yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang, pembangunan di daerah diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Adapun persentase ketaatan ruang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.218
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kota Sawahlunto
Tahun 2016–2020

no	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi RTRW	17	17	17	17	17
2	Rencana Peruntukan RTRW	20	20	20	20	20
3	Persentase	85	85	85	85	85

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012 sampai dengan 2032 untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat 20 komponen rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Untuk realisasi hingga tahun 2021 baru 17 dokumen rencana yang terealisasi sehingga baru 85 persen dari rencana pada tahap I RTRW di RPJMD tahun 2013 sampai dengan 2018.

Dokumen RTRW Kota Sawahlunto 2012 sampai dengan 2032 dalam proses revisi dan dilegalkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Perubahan kebijakan dan perubahan isu akan menjadi dasar dalam revisi RTRW Kota Sawahlunto, sehingga menyebabkan persentase ketaatan terhadap RTRW sampai tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

4. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di kota Sawahlunto sejak tahun 2012 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2016 pada kisaran 15.330. Hal ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, dimana wilayah produktif hanya kurang lebih 18 persen dari luas wilayah kota atau seluas 4.922,10 hektar.

5. Luas wilayah industri

Luas wilayah industri di kota Sawahlunto sejak tahun 2015 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2019 pada kisaran 70 hektar, seperti tabel berikut:

Tabel 2.219
Luas Wilayah Industri Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Wilayah Industri (ha)
2015	39.84
2016	39.84
2017	39.84
2018	39.84
2019	39.84

Sumber Data : Profil Daerah Kota Sawahlunto, 2019 , Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2022

6. Luas wilayah banjir

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 persen, tidak memungkinkan terjadi banjir di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Malakutan kenagarian Kolok, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi genangan antara 0,10 sampai dengan 050 meter yang berlangsung selama 1 sampai dengan 3 jam.

7. Luas wilayah kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

8. Luas wilayah perkotaan

Walaupun disebut sebuah “Kota”, Wilayah Kota Sawahlunto secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan, 27 desa dan 10 Kelurahan, dengan luas 27.345 hektar. Dalam mengkategorikan wilayah perkotaan, yang dijadikan acuan perhitungan luas wilayah perkotaan adalah luas wilayah kelurahan.

Tabel 2.220
Luas Wilayah Kota Sawahlunto

No	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kecamatan Barangin	
03	Kel. Saringan	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	1,00
05	Kel. Durian I	1,17
06	Kel. Durian II	1,25
2	Kecamatan Lembah Segar	
06	Kel. Pasar	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	0,16
11	Kel. Air Dingin	0,14
Jumlah		5,78

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

9. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel 2.221
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	15.163	15.351	15.534	16.225	16.542
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	11.476	11.858	12.314	12.884	13.109
3	Persentase Rumah Tagga yang menggunakan listrik (%)	75,68	77,24	79,27	79,40	79,24

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik. Jika dilihat dari pelanggan rumah tangga, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun jika dilihat dari persentasenya mengalami kondisi naik turun. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah rumah tangga tidak sebanding dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Sawahlunto bagaimana agar semua masyarakat Kota Sawahlunto dapat terlayani dan menikmati energi listrik yang ada.

10. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Perkembangan zaman menuntut masyarakat menjadi pintar dalam teknologi. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Banyak media yang memberikan akses teknologi dan informasi kepada masyarakat, seperti telepon selular/Handpone (HP) dan komputer/laptop. Telepon selular/Handpone (HP) adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi modern yang paling banyak digemari. Handpone menjadi barang wajib bagi setiap orang saat ini.

Tabel 2.222
Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP
Tahun 2017- 2021

NO	Alat Komunikasi dan Informasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	HP / Telepon	83,27	84,31	84,72	86,43	89,21

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Sawahlunto yang memiliki telepon selular sudah mencapai 86,43 persen. Hal ini dinilai tinggi dengan artian sebagian besar masyarakat Kota Sawahlunto telah menggunakan HP sebagai sarana komunikasi. Didukung dengan jaringan komunikasi yang sudah baik sehingga memudahkan akses dan keterbukaan informasi di Kota Sawahlunto.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Tabel 2.223
Angka Kriminalitas di Kota Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Tindak Kejahatan <i>Crime</i>	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Curat (Pencurian dengan Pemberatan	17	19	21	19	9
2	Penggelapan	6	3	2	3	1
3	KDRT	4	3	3	4	-
4	Penipuan	8	19	4	3	2
5	Pengrusakan	4	3	4	2	1
6	Pencurian Kendaraan Bermotor	24	23	6	8	5
7	Pembakaran	-	1	1	-	-
8	Anirat (Penganiayaan dengan Pemberatan)	-	-	1	1	1
9	Perkosaan	4	4	6	-	-
10	Pembunuhan	-	-	-	-	-

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022

Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban, sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Sawahlunto.

3. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya dan lain-lain. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas. Di Kota Sawahlunto dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak ada terjadi aksi demonstrasi alias nihil (*sumber data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto*).

4. Lama Proses Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Selain prosedur perijinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah.

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Penerbitan dokumen izin dan non izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh

beberapa faktor, salah satunya adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Perwako No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwako Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPSTPNaker Kota Sawahlunto terdapat 138 jenis perizinan dan non perizinan. Dan berdasarkan Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 dan Perpres RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka Pemerintah Kota Sawahlunto melalui DPMPSTPNaker telah membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP), yang pada saat ini sudah aktif dan sudah selesai penandatanganan naskah kerjasama atau MoU dengan beberapa lembaga terkait perizinan dan non perizinan (Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Organisasi Perangkat Daerah, Swasta, dan Lembaga sebanyak 24 gerai). Yang mana MPP ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi, efektif dan efisien (pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTPNaker juga telah dilaksanakan beberapa inovasi antara lain : 1) PTSP CERAH (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik dan Mudah) yaitu menyelenggaraan pelayanan penerbitan izin melalui aplikasi SiCANTIK CLOUD dan menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilakukan secara online, darimana saja dan kapan saja, cukup melalui aplikasi ini, 2) Super Online (Surat Pengantar Online) yaitu pengiriman data/dokumen perizinan ke OPD Teknis secara online sehingga diharapkan petugas teknis dapat melakukan respons yang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diminta, 3) SiBaro (Sistem Informasi Perizinan Berbasis Rakyat Sawahlunto) yaitu teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan sebagai media informasi pelayanan kepada publik, menampung dan mengolah pengaduan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik dengan mengusung prinsip mudah, terpadu dan tuntas dalam menyalurkan aspirasi dan aduan masyarakat, yang dapat diakses secara online, 4) Bikin Lapar (Bikin Izin Layanan Paralel) yaitu memberikan kemudahan kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk mengurus izin secara paket dengan waktu yang relatif lebih cepat sesuai dengan SOP 7 hari kerja, sedangkan untuk pengurusan reguler membutuhkan waktu hingga 14 sampai dengan 60 hari kerja, pelayanan ini juga mempersingkat alur perizinan, 5) Si Cepat Kilat (Pelayanan Pengiriman Dokumen Perizinan Via Pos Kilat Khusus) yaitu DPMPSTPNaker bekerja sama dengan Kantor Pos untuk pengiriman dokumen izin guna memberikan kemudahan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan sinergi kedua belah pihak dalam menyokong program Pemerintah, 6) Mas Lapor (Media Sosial untuk Layanan Perizinan Online) yaitu Penggunaan Aplikasi WhatsApp Untuk Layanan Perizinan, 7) LARIS (Layanan Perizinan dengan SMS) yaitu dengan sistem SMS gateway yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan sicantik cloud, dimana front office dan back office mendapat notifikasi sms ketika ada perizinan yang harus diproses, 8) Usus Buntu (Urus Izin Susah, Kami Bantu) yaitu dengan layanan OSS Mandiri, masyarakat yang mengurus izin berusaha melalui aplikasi OSS akan diarahkan langsung tentang bagaimana mengoperasikan Aplikasi OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan secara terintegrasi yang berbasis online, 9) KIPER (Klinik Perizinan) yaitu merupakan sebuah sarana konsultasi dan bimbingan pelayanan untuk seluruh jenis perizinan yang ada pada DPMPSTPNaker. KIPER ini juga diperuntukan bagi para investor yang membutuhkan segala macam perizinan untuk dapat memulai usaha ataupun mengoperasikan usahanya agar proses perizinan dapat menjadi lebih cepat, hemat biaya dan tidak melanggar aturan, 10) LIPAN (Layanan Informasi PPAT dan Notaris) yaitu membantu memberikan informasi praktis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan service Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.224
Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto
Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan	
		Jumlah Perizinan	Jumlah Non Perizinan
1	2017	1.093	-
2	2018	1.563	338
3	2019	700	867
4	2020	272	680
5	2021	411	428

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berfluktuatif setiap tahunnya. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2017 adalah 1.093, pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.901, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.567, tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 952, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 839. Penurunan ini terjadi karena dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Kota Sawahlunto. Yang mana dengan adanya pembatasan sosial (*social distancing*) akibat Covid-19 maka masyarakat banyak yang menunda pengajuan perizinannya untuk permohonan perizinan yang tidak terlalu urgent. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan yang dilaksanakan dapat secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.225
Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTPNaker Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	OPD	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dinas PMPTSPNaker	6 orang	10 orang	9 orang	9 orang	10 orang
2	Dinas Teknis	11 orang	29 orang	35 orang	43 orang	43 orang
	Jumlah	17 orang	39 orang	44 orang	52 orang	53 orang

Sumber Data : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto, 2021

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas bahwa tenaga yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagian besar tenaganya adalah pegawai yang berada diluar DPMPSTPNaker, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada Dinas Teknis.

5. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi KTP dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/penguburan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi jasa usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi



penyebrangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto periode 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.226
Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	Pajak Daerah	5.222.500.000	5.337.144.416	5.527.610.850	5.546.092.124	5.973.337.400	5.502.589.718	5.666.500.000	5.602.920.091.75	6.134.000.000	5.993.540.247
1	Pajak Hotel	165.000.000	164.733.362	160.000.000	132.597.836	105.000.000	94.965.756	22.500.000	47.335.931	148.000.000	168.914.129
2	Pajak Restoran	685.800.000	638.615.093	514.223.450	529.988.908	514.000.000	532.945.719	399.700.000	477.464.758.75	704.500.000	617.303.460
3	Pajak Hiburan	506.500.000	394.309.900	394.687.400	283.599.800	400.137.400	109.385.500	5.300.000	1.650.000	107.000.000	-
4	Pajak Reklame	32.200.000	34.597.079	34.200.000	47.786.507	34.200.000	47.810.243	38.000.000	48.692.318	39.500.000	42.613.818
5	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000	2.857.339.658	3.100.000.000	3.189.233.765	3.500.000.000	3.339.015.131	3.500.000.000	3.344.827.881	3.300.000.000	3.434.721.546
6	Pajak Mineral Bukan Logam	25.000.000	17.905.600	15.000.000	16.382.400	15.000.000	12.979.400	1.000.000	769.600	23.000.000	10.651.360
7	Pajak Parkir	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-
8	PBB-P2	1.055.000.000	975.816.873	1.055.000.000	937.788.713	1.055.000.000	958.272.261	1.100.000.000	963.603.643	1.112.000.000	1.057.891.430
9	BPHTB	250.000.000	250.826.851	250.000.000	404.214.195	350.000.000	407.215.708	600.000.000	718.575.960	700.000.000	661.444.504
II	Retribusi Daerah	4.079.675.450	3.828.111.382	3.889.736.594	3.533.959.570	4.093.327.838	3.625.062.865	3.108.095.850	2.787.376.593	3.108.095.850	2.724.639.922
A.	Retribusi Jasa Umum										
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.102.326.750	1.375.996.000	686.913.300	919.339.000	511.926.030	518.014.000	582.406.850	483.055.400	582.406.850	293.176.700
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	78.556.000	56.371.000	78.556.000	62.770.000	78.556.000	85.986.000	92.000.000	114.030.000	92.000.000	132.276.000
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	154.400.000	135.400.000	151.150.000	146.020.000	166.750.000	166.750.000	78.200.000	78.200.000	78.200.000	169.400.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	745.348.000	475.960.000	795.348.000	446.051.000	765.348.000	494.482.500	419.034.000	428.224.000	419.034.000	363.876.000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000	107.959.199	100.000.000	124.817.160	100.000.000	119.509.740	32.000.000	33.630.580	32.000.000	1.035.000
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	54.600.000	45.365.000	53.700.000	54.550.000	53.700.000	32.150.000	28.700.000	29.900.000	28.700.000	30.100.000
8	Retribusi Pengendalian Menara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Telekomunikasi										
B	Retribusi Jasa Usaha										
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.306.100.000	1.051.482.405	1.296.269.294	1.022.463.010	1.443.747.808	1.359.739.525	1.039.855.000	966.718.013	1.039.855.000	1.173.842.422
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	-	-	13.200.000	-	13.200.000	1.800.000
3	Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	53.300.000	46.040.000	54.200.000	57.255.000	54.200.000	59.927.500	53.500.000	60.745.000	53.500.000	57.182.500
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	415.200.000	411.150.000	543.200.000	557.373.000	788.700.000	683.052.000	698.800.000	516.801.000	698.800.000	436.595.000
C	Retribusi Perizinan Tertentu										
1	Retribusi IMB	62.000.000	114.823.078	130.000.000	143.201.400	130.000.000	105.131.600	70.000.000	75.992.600	70.000.000	65.196.300
2	Retribusi Izin Gangguan	7.244.700	7.244.700	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Izin Trayek	600.000	320.000	400.000	120.000	400.000	320.000	400.000	80.000	400.000	160.000
	JUMLAH TOTAL	9.302.175.450	9.165.255.798	9.417.347.444	9.080.051.694	10.066.665.238	9.127.652.583	8.774.595.850	8.390.296.684.75	9.242.095.850	8.718.180.169

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2021

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2017 target sebesar Rp. 9.302.175.450 dan terealisasi sebesar Rp. 9.165.255.798, tahun 2018 mengalami kenaikan dengan target sebesar Rp. 9.417.347.444 dan terealisasi sebesar Rp. 9.080.051.694, tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dengan target sebesar Rp. 10.066.665.238 dan terealisasi sebesar Rp. 9.127.652.583, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan target sebesar 8.774.595.850 dan terealisasi sebesar Rp. 8.390.296.684.75, dan tahun 2021 mengalami peningkatan dengan terget sebesar Rp. 9.242.095.850 dan terealisasi sebesar Rp. 8.718.180.169.

Target dan realisasi Pajak Daerah dari tahun 2017-2019 selalu menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 5.222.500.000 pada tahun 2017 menjadi Rp. 5.973.337.400 pada tahun 2019 dengan realisasi Rp. 5.337.144.416 pada tahun 2017 menjadi Rp. 5.502.589.718 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 target pajak daerah turun menjadi Rp. 5.666.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.602.920.091,75, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan terget sebesar Rp. 6.134.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.993.540.247. Pada tahun 2017 pajak daerah yang realisasinya melebihi target yang paling besar adalah pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp. 357.339.658, kemudian disusul oleh pajak reklame yaitu sebesar Rp. 2.397.079, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2020 pajak daerah yang realisasinya melebihi target paling besar adalah BPHTB yaitu berturut-turut sebesar Rp. 154.214.195, Rp. 57.215.708, Rp. 118.575.960, dan pada tahun 2021 pajak daerah yang realisasinya melebihi target yang paling besar adalah pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp. 134.721.546, kemudian disusul oleh pajak hotel yaitu sebesar Rp. 20.914.129. Pajak daerah yang menjadi kontributor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto yang terbesar adalah pajak penerangan jalan, disusul oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah pajak parkir, bahkan pada tahun 2019-2021 pajak parkir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Pajak parkir ini mulai tahun 2019 tidak lagi dikelola oleh Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tapi dikelola oleh Pemda/diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak termasuk objek pajak.

Target dan realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2017-2021 menunjukkan trend fluktuatif, yaitu menurun dengan target dari Rp. 4.079.675.450 pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.108.095.850 pada tahun 2021 dengan realisasi Rp. 3.828.111.382 pada tahun 2017 menurun menjadi Rp. 2.724.639.922 pada tahun 2021. Retribusi jasa umum pada tahun 2017 s.d 2018 yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi pelayanan kesehatan yaitu berturut-turut sebesar Rp. 273.669.250 dan Rp. 232.425.700, dan pada tahun 2019 s.d 2020 retribusi jasa umum yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu berturut-turut sebesar Rp. 7.430.000 dan Rp. 22.030.000, sedangkan pada tahun 2021 retribusi jasa umum yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu sebesar Rp. 91.200.000. Retribusi jasa usaha pada tahun 2017 s.d 2018 yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu berturut-turut sebesar Rp. 4.050.000 dan Rp. 14.173.000, pada tahun 2019 s.d 2020 retribusi jasa usaha yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi rumah potong hewan yaitu berturut-turut sebesar Rp. 5.727.500 dan Rp. 7.245.000, sedangkan pada tahun 2021 retribusi jasa usaha yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu Rp. 133.987.422. Dan retribusi perizinan tertentu yang realisasinya melebihi target yang paling besar adalah retribusi IMB.

Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah dari tahun 2017-2021 berfluktuatif. Retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling besar untuk PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang mana dalam periode 5 tahun terakhir retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Hal ini disebabkan oleh retribusi penggantian biaya cetak peta sudah tidak ada lagi di Perda. Retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD

Kota Sawahlunto adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sedangkan retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir, bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir retribusi terminal tidak ada memberikan kontribusi sama sekali terhadap PAD, sedangkan retribusi tempat khusus parkir selama 4 tahun terakhir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil dan pada tahun 2021 retribusi tempat khusus parkir memberikan sedikit kontribusi yaitu sebesar Rp. 1.800.000. Hal ini disebabkan oleh retribusi terminal sudah menjadi tanggungjawab provinsi sedangkan retribusi tempat khusus parkir tahun 2021 hanya sedikit yang terealisasi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Untuk retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi izin trayek.

6. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.227
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha yang Ditetapkan	Buah	9	1	-	-	-

Sumber Daerah : Bagian Hukum Setdako Sawahlunto, 2021

Dari data di atas dapat dilihat jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan adalah 9 perda sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak ada satu perda pun yang dikeluarkan/ditetapkan. Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto. Dengan adanya perda maka dapat meningkatkan usaha di Kota Sawahlunto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus berkomitmen, dengan memberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru. Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Sawahlunto yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Sawahlunto. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Sawahlunto.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atau sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan

kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.228
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan S1	3.557	3.957	4.149	4.358	4.692
2	Jumlah lulusan S2	203	248	255	270	289
3	Jumlah lulusan S3	2	3	3	2	3
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3.762	4.208	4.407	4.630	4.984
5	Jumlah penduduk	65.041	66.377	66.854	67.007	67.154
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	5,78	6,34	6,59	6,91	7,42

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya. Data rasio ketergantungan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.229
Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	16.759	16.918	16.836	16.632	16.663
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	4.251	4.661	4.884	4.897	4.911
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	21.010	21.579	21.721	21.529	21.574
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	44.031	44.798	45.133	45.478	45.580
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	47,72	48,17	48,13	47,34	47,33

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan Kota Sawahlunto tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan trend fluktuatif, tahun 2017 sebanyak 47,72 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 47,33, artinya tiap 100 orang penduduk yang berusia kerja/usia produktif (15 sampai dengan 64) pada tahun 2021 mempunyai tanggungan sebanyak lebih kurang 47 orang penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin tinggi produktivitas angkatan kerja

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPDP SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2021, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPDP tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.230
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6 x 100%		9= 5+7		10= 9/4 x100%		11	12	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	101.30	81,254,090,000		100	28,900,288,357	94.69	25,416,236,877	95	87.94	95	25,416,236,877	93.47	31.28	DINAS PENDIDIKAN	Belum Memenuhi Target
				APM SMP (%)	93.50			92.5		91.69		99		92		98.06		DINAS PENDIDIKAN	Belum Memenuhi Target
				Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	30.00			20		15.00		75		15		50.00		DINAS PENDIDIKAN	Belum Memenuhi Target
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikat pendidik (%)	90.30	13,961,448,000		87.3	6,390,862,200	80.00	6,129,447,129	92	95.91	80	6,129,447,129	88.59	43.90	DINAS PENDIDIKAN	Belum Memenuhi Target
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	97.00	104,671,560,000		95	22,535,230,276	96.4	18,943,890,059	101	84.06	96	18,943,890,059	99.38	18.10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Memenuhi Target
				Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82.00			80		80.5		101		81		98.17		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Memenuhi Target
				Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD (%)	≤ 4,00			≤ 4,50										DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Memenuhi Target
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar (%)	92.00	383,370,000		90	1,093,900,000	90	401,597,680	100	36.71	90	401,597,680	97.83	104.75	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (%)	78.00	372,500,000			76	250,016,000	93	121,223,200	122	48.49	93	121,223,200	119.23	32.54	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sudah Melebihi Target	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Keluarga Sehat (%)	37.00	1,128,010,000			33	543,909,000	24	411,102,895	73	75.58	24	411,102,895	64.86	36.44	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Memenuhi Target	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50.35	22,847,900,000			48.35	5,957,029,118	45.95	5,740,089,230	95	96.36	46	5,740,089,230	91.27	25.12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik (%)	91.00	14,456,770,000			89	2,735,511,444	87.25	1,660,243,050	98	60.69	87	1,660,243,050	95.88	11.48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Air limbah yang ditangani (%)	88.00	4,326,430,000			89	1,919,661,550	87.00	1,847,262,000	98	96.23	87	1,847,262,000	98.86	42.70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	52.34	7,710,000,000			46.75	1,834,550,000	44.21	1,737,633,245	95	94.72	44	1,737,633,245	84.47	22.54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	79.34	28,704,790,000			77.34	8,251,235,578	77.33	8,103,602,795	100	98.21	77	8,103,602,795	97.47	28.23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	89.00	40,947,940,000			87	8,170,824,130	86.71	7,704,269,637	100	94.29	87	7,704,269,637	97.43	18.81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target	
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	66.00				64		91		142		91		137.88		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sudah Melebihi Target	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	72.21	128,165,140,000		68.8	31,515,244,012	68.23	29,015,938,465	99	92.07	68	29,015,938,465	94.49	22.64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target
				Persentase jembatan dalam kondisi terpelihara (%)	79.00			78		85		109		85		107.59		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sudah Melebihi Target
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)	22.22	4,956,030,000		11.15	204,270,550	11.11	139,515,950	100	68.30	11	139,515,950	50.00	2.82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	90.00	2,383,550,000		80	820,452,493	80	782,413,164	100	95.36	80	782,413,164	88.89	32.83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	85.00	3,332,500,000		75	2,026,460,515	75	1,999,261,100	100	98.66	75	1,999,261,100	88.24	59.99	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	19.08	2,132,500,000		83.54	12,650,000	47.37	12,550,272	57	99.21	47	12,550,272	248.27	0.59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Melebihi Target
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang tertata (%)	85.00	12,289,700,000		75	2,851,096,630	75	2,803,743,066	100	98.34	75	2,803,743,066	88.24	22.81	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda (%)	100.00	2,406,610,000		100	1,151,077,550	100	1,146,486,191	100	99.60	100	1,146,486,191	100.00	47.64	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sudah Memenuhi Target
				Persentase penegakan perda (%)	100.00			100		100		100	100	100	100.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sudah Memenuhi Target
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar (%)	100.00	18,865,965,000		100	10,467,228,730.00	60.00	10,195,433,015.00	60	97.40	60	10,195,433,015	60.00	54.04	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran (%)	100.00	1,169,690,000		100	1,108,535,300	100	1,100,398,324	100	99.27	100	1,100,398,324	100.00	94.08	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sudah Memenuhi Target
				Persentase kerjasama penanganan pencegahan kebakaran (%)	100.00			100		100		100	100	100	100.00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sudah Memenuhi Target
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan (%)	100.00	1,278,990,000		100	423,880,661	25	315,176,154	25	74.35	25	315,176,154	25.00	24.64	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum Memenuhi Target
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi (%)	100.00	2,543,830,000		89.84	750,944,050	89.84	736,417,444	100	98.07	90	736,417,444	89.84	28.95	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum Memenuhi Target
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100.00	156,390,000		100	26,662,000	100	26,642,966	100	99.93	100	26,642,966	100.00	17.04	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sudah Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	100.00	103,960,000		n/a									DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum Memenuhi Target	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terfasilitasi (%)	100.00	243,050,000		100	86,860,000	100	86,403,330	100	99.47	100	86,403,330	100.00	35.55	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sudah Memenuhi Target
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	100.00	216,175,000		100									DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	70.00	2,764,322,000		50	1,052,177,460	75	814,408,499	150	77.40	75	814,408,499	107.14	29.46	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Sudah Melebihi Target
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75.35	384,702,000		73.68	76,472,000	60	67,762,600	81	88.61	60	67,762,600	79.63	17.61	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	10.00	145,880,000		6	41,426,000	4	39,063,250	67	94.30	4	39,063,250	40.00	26.78	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65.65	3,936,668,500			65.63	131,241,000	65.62	120,113,567	100	91.52	66	120,113,567	99.95	3.05	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum Memenuhi Target
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)	100.00	476,070,000			100	86,070,000	100	24,155,150	100	28.06	100	24,155,150	100.00	5.07	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sudah Memenuhi Target
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	100.00	849,069,900			100	460,424,700	100	432,453,711	100	93.92	100	432,453,711	100.00	50.93	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sudah Memenuhi Target
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (%)	Utama	198,425,000			Nindya	31,077,000	100	29,022,966	100	93.39	100	29,022,966	100.00	14.63	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sudah Memenuhi Target
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)	100.00	140,562,000			100	302,840,000	100	194,459,545	100	64.21	100	194,459,545	100.00	138.34	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sudah Memenuhi Target
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	75.00	233,245,000			70	17,920,200	68	17,557,128	98	97.97	68	17,557,128	91.00	7.53	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	86.00	1,130,170,000			84	290,967,150	84.50	258,091,414	101	88.70	85	258,091,414	98.26	22.84	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	16.00	41,275,000			4	4,004,000	4.30	3,978,000	108	99.35	4	3,978,000	26.88	9.64	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	91.00	166,500,000			90.14	40,397,500	95.41	36,481,000	106	90.31	95	36,481,000	104.85	21.91	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sudah Melebihi Target	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan (%)	80.00	25,000,000			n/a										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	100.00	127,500,000			100	2,029,400	100	2,029,400	100	100.00	100	2,029,400	100.00	1.59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target	
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	100.00	363,760,000			100	93,697,830	100	90,057,100	100	96.11	100	90,057,100	100.00	24.76	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target	
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	100.00	97,670,000			100	21,816,100	100	20,107,022	100	92.17	100	20,107,022	100.00	20.59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2			3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)	100.00	231,000,000			100	47,977,557	100	47,155,600	100	98.29	100	47,155,600	100.00	20.41	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)	80.00	113,500,000			70										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)	100.00	410,000,000			100										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan (%)	75.00	1,376,050,000			75	236,116,080	75	216,831,360	100	91.83	75	216,831,360	100.00	15.76	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	100.00	3,965,060,000			100	1,482,494,390	100	1,349,669,573	100	91.04	100	1,349,669,573	100.00	34.04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)	75.00	49,000,000			75										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (%)	75.00	212,780,000		75	68,204,750	75	53,427,000	100	78.33	75	53,427,000	100.00	25.11	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/ Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup (%)	100.00	285,350,000		100	51,394,583	100	42,244,100	100	82.20	100	42,244,100	100.00	14.80	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sudah Memenuhi Target
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh (Penghargaan)	3.00	205,000,000		1	37,837,800	1	35,668,000	100	94.27	1	35,668,000	33.33	17.40	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	100.00	33,000,000		n/a										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	77.00	8,423,650,000		75.1	3,611,920,660	74	3,479,999,647	99	96.35	74	3,479,999,647	96.10	41.31	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
				Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%)	22.00			20				23				115			23
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan (%)	100.00	1,296,850,000		97	686,941,950	100	628,104,553	103	91.43	100	628,104,553	100.00	48.43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sudah Memenuhi Target
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (%)	100.00	798,970,000		50	226,027,550	97.5	220,667,548	195	97.63	98	220,667,548	97.50	27.62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum Memenuhi Target
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validasi data kependudukan (%)	100.00	345,910,000		97	148,188,000	100	134,976,375	103	91.08	100	134,976,375	100.00	39.02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sudah Memenuhi Target
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang ditata (%)	100.00	329,790,000		100										DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum Memenuhi Target
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi desa yang dibina (%)	100.00	2,864,098,600		90	755,792,068	90	729,927,944	100	96.58	90	729,927,944	90.00	25.49	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum Memenuhi Target
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	100.00	2,301,163,000		90	442,378,470	90	422,902,928	100	95.60	90	422,902,928	90.00	18.38	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum Memenuhi Target
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk (%)	2.22	354,970,000		2.29	40,999,000	2.29	36,360,506	100	88.69	2	36,360,506	103.15	10.24	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sudah Melebihi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	69.21	1,980,540,000		67.78	1,876,254,400	67.78	1,092,976,593	100	58.25	68	1,092,976,593	97.93	55.19	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Memenuhi Target
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif (Kelompok)	235.00	554,750,000		235	57,454,000	235	49,014,000	100	85.31	235	49,014,000	100.00	8.84	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sudah Memenuhi Target
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	45.0	10,698,160,000		35	4,181,417,750	35	4,000,334,732	100	95.67	35	4,000,334,732	77.78	37.39	DINAS PERHUBUNGAN	Belum Memenuhi Target
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)	65.00	510,000,000		30	360,000,000	27	8,653,250	89	2.40	27	8,653,250	41.23	1.70	DINAS PERHUBUNGAN	Belum Memenuhi Target
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	95.00	1,509,870,000		70	485,512,500	60	436,927,950	86	89.99	60	436,927,950	63.16	28.94	SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target
				Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)	n/a	377,940,000		3	166,000,000	3	60,600,000	100	36.51	3	60,600,000	100.00	16.03	SEKRETARIAT DPRD	Sudah Memenuhi Target
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	95.00	7,399,540,000		75	1,335,673,370	50	365,749,092	67	27.38	50	365,749,092	52.63	4.94	SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	26.47	753,900,000		21	-	18	-	86	-	18	-	68.00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat (%)	26.00	720,720,000		22	16,350,000	57.4	11,315,250	261	69.21	57	11,315,250	220.80	1.57	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sudah Melebihi Target
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	60.00	295,420,000		30	389,163,800	27	330,612,986	90	84.95	27	330,612,986	45.00	111.91	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	53.00	870,960,000		47	310,315,850	34	193,061,375	72	62.21	34	193,061,375	64.15	22.17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	1.50	289,800,000		0.8	241,099,945	0.4	1,100,000	50	0.46	0	1,100,000	26.67	0.38	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	25.00	342,946,000		20	-	62	-	310	-	62	-	248.36	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Sudah Melebihi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)	80.00	285,030,000		25	28,400,000	-	24,482,000	-	86.20	-	24,482,000	-	8.59	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target
				Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	30.00			10				-	-	-		-		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target
				Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	3.00			1				-	-	-		-		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker (%)	B	919,218,000		B	337,759,350	B	269,349,175	100	79.75	100	269,349,175	100.00	29.30	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Sudah Memenuhi Target
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)	100.00	105,650,000		100	344,409,390	100	139,766,555	100	40.58	100	139,766,555	100.00	132.29	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Sudah Memenuhi Target
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP (%)	B	511,860,000		n/a										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	45.00	4,045,530,000		15	1,302,347,632	15	1,210,533,218	100	92.95	15	1,210,533,218	33.33	29.92	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional /inter nasional (atlit)	160.00	9,462,650,000		148	2,489,566,500	148	1,913,206,414	100	76.85	148	1,913,206,414	92.50	20.22	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	75.00	2,045,090,000		75	311,672,000	75	298,765,666	100	95.86	75	298,765,666	100.00	14.61	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sudah Memenuhi Target
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	90.00	670,000,000		88	44,480,900	80	44,366,950	91	99.74	80	44,366,950	88.89	6.62	SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	36.00	202,100,000		12	59,321,700	12	53,513,100	100	90.21	12	53,513,100	33.33	26.48	SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	31.10	2,554,500,000		22.2	612,205,550	20.00	568,465,050	90	92.86	20	568,465,050	64.31	22.25	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	Belum Memenuhi Target
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13.30	2,017,925,000		13.3	474,475,000	7.89	375,898,175	59	79.22	8	375,898,175	59.36	18.63	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	Belum Memenuhi Target
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	60.00	1,190,640,000		39	111,849,250	32.56	73,665,500	83	65.86	33	73,665,500	54.26	6.19	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	63.92	4,889,680,000			57.18	1,146,741,600	57.1	1,141,368,215	100	99.53	57	1,141,368,215	89.33	23.34	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	Belum Memenuhi Target	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	96,000	4,144,180,000			31,000	1,907,593,700	15,937	1,884,766,151	51	98.80	15,937	1,884,766,151	16.60	45.48	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	Belum Memenuhi Target	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	36.0	1,567,500,000			12	2,590,464,310	86.28	2,243,649,764	719	86.61	86	2,243,649,764	239.67	143.14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sudah Melebihi Target	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	12.0	29,000,000			4	8,361,450	88.52	7,401,450	2,213	88.52	89	7,401,450	737.66	25.52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sudah Melebihi Target	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terkelolanya arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (Bulan)	36.0	775,305,000			12	62,743,960	63.89	42,490,546	532	67.72	64	42,490,546	177.46	5.48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sudah Melebihi Target	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terlaksananya perlindungan & penyelamatan arsip (Bulan)	36.0	465,000,000			12	17,218,000	12	17,217,200	100	100.00	12	17,217,200	33.33	3.70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Belum Memenuhi Target	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan (ton)	218.0	1,417,460,000			217	179,219,007	218.76	163,951,553	101	91.48	219	163,951,553	100.35	11.57	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sudah Melebihi Target	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	36.7	200,000,000			33.2	49,994,250	36.92	49,744,200	111	99.50	37	49,744,200	100.68	24.87	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sudah Melebihi Target	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	90.0	26,261,680,000		75	8,361,704,608	44.12	6,959,570,794	59	83.23	44	6,959,570,794	49.02	26.50	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target
				Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	61.8			50	771,725,075	50	746,976,558	100	96.79	50	746,976,558	80.96		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan (orang)	2,734,128	7,384,140,000		434,128	771,725,075	434,130	746,976,558	100	96.79	434,130	746,976,558	15.88	10.12	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	0.50	293,750,000		0.5	188,465,000	0.5	183,747,000	100	97.50	1	183,747,000	100.00	62.55	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sudah Memenuhi Target
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	20.00	2,059,000,000		18	1,059,252,600	18	1,043,113,097	100	98.48	18	1,043,113,097	90.00	50.66	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target
				persentase MoU kemitraan aktif (%)	90.00			75		25		33		25		27.78		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	1:10	10,014,320,000		1:14	2,740,114,584	1 : 12,6	1,398,308,536	2	51.03	0	1,398,308,536	1.73	13.96	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target
				Jumlah Produksi Padi (Ton GK)	46040.00			14700		16,691.71		114		16,692		36.25		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12
		Jumlah Produksi Karet (Ton)	4719.00				1260		2,223.86		176	2,224	47.13		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target		
		Jumlah Produksi Kakao (Ton)	1677.00				540		572.44		106	572	34.13		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target		
		Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton)	1064.04				353.68		319.97		90	320	30.07		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton)	2698.38				898.66		996.91		111	997	36.94		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target		
		Jumlah Produksi Telur (Ton)	406.08				134.86		308.03		228	308	75.85		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	12.50	9,562,170,000	5	1,143,708,250	11.02	1,130,448,312	220	98.84	11	1,130,448,312	88.16	11.82	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	10.00	1,399,191,750	20	346,627,360	100	320,626,513	500	92.50	100	320,626,513	1,000.00	22.92	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sudah Melebihi Target
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	10.00	662,100,000	10	124,737,950	15.96	117,654,143	160	94.32	16	117,654,143	159.56	17.77	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sudah Melebihi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6 x 100%		9= 5+7		10= 9/4 x100%		11	12	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5.55	1,632,650,000		5.55	276,843,350	19	227,866,761	342	82.31	19	227,866,761	342.34	13.96	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sudah Melebihi Target
				Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)	5.00			5		11		220		11		220.00		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Sudah Melebihi Target
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	50.00	1,202,540,000		14	787,737,100	14	536,533,100	100	68.11	14	536,533,100	28.00	44.62	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
				Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	422.00			382		382		100		382		90.52		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto (Rupiah)	27,015.91	559,260,000		25,837.33	77,200,400	25,000	45,596,825	97	59.06	25,000	45,596,825	92.54	8.15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	60.00	897,500,000		50	165,112,310	50	70,191,710	100	42.51	50	70,191,710	83.33	7.82	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	30.00	460,760,000		30	67,831,910	30	55,862,860	100	82.35	30	55,862,860	100.00	12.12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Sudah Memenuhi Target
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	300.00	623,700,000		75	108,666,000	13,500	-	18,000	0.00	13,500	-	4,500.00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	5.70	2,929,540,000		1.8	903,683,176	1.8	95,467,353	100	10.56	2	95,467,353	31.58	3.26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	30.00	699,160,000		5	234,764,350	6.28	77,502,150	126	33.01	6	77,502,150	20.93	11.09	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis (%)	100.00	170,000,000		80										DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01		SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase santri rumah/pondok tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (%)	50.00	29,263,077,244		30	7,550,722,882	31	7,101,512,930	102	94.05	31	7,101,512,930	61.40	24.27	SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target
				Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	60.00			36		36		100		36		60.00		SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
		Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (%)	100.00				100		20		20		20		19.60		SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa (bulan)	36.00	2,926,500,000		12	445,864,740	12	274,527,319	100	61.57	12	274,527,319	33.33	9.38	SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target
4	02		SEKRETARIAT DPRD																
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100.00	33,830,030,000		100	14,313,054,673	100	10,214,798,455	100	71.37	100	10,214,798,455	100.00	30.19	SEKRETARIAT DPRD	Sudah Memenuhi Target
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01		PERENCANAAN																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	100.00	3,258,000,000		100	781,598,750	100	700,542,728	100	89.63	100	700,542,728	100.00	21.50	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sudah Memenuhi Target
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPd (%)	100.00	3,358,718,000		100	459,473,330	100	372,259,905	100	81.02	100	372,259,905	100.00	11.08	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sudah Memenuhi Target
					100.00			100		100		100		100.00		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Sudah Memenuhi Target	
					100.00			100		100		100		100.00		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Sudah Memenuhi Target	
5	02		KEUANGAN																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	228,596,070,000		WTP	1,895,231,890	WTP	1,591,086,247	100	83.95	100	1,591,086,247	100.00	0.70	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sudah Memenuhi Target
				Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)	90.00			90		92		102		92		102.22		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sudah Melebihi Target
				Maksimal Defisit APBD (%)	4.10			4.1		4.1		100		4		100.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sudah Memenuhi Target
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	95.00	2,580,620,000		93	2,664,752,400	88	667,813,039	95	25.06	88	667,813,039	92.63	25.88	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belum Memenuhi Target
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100.00	2,151,080,000		100	1,370,470,887	99.93	1,308,870,466	100	95.51	100	1,308,870,466	99.93	60.85	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belum Memenuhi Target
5	03		KEPEGAWAIAN																
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)	100.00	5,333,480,000		100	1,678,567,380	100	1,537,500,546	100	91.60	100	1,537,500,546	100.00	28.83	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sudah Memenuhi Target
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)	2.00	600,000,000		n/a										BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Memenuhi Target
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	40.00	824,000,000		20	131,347,360	45	104,565,820	225	79.61	45	104,565,820	112.50	12.69	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sudah Melebihi Target
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
6 01 INSPEKTORAT DAERAH																			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	100.00	2,166,340,000		100	304,940,390	181	193,206,559	181	63.36	181	193,206,559	181.00	8.92	INSPEKTORAT	Sudah Melebihi Target
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP (Level)	4.00	1,105,970,000		3	147,384,584	25	92,525,765	833	62.78	25	92,525,765	625.00	8.37	INSPEKTORAT	Sudah Melebihi Target
7 UNSUR KEWILAYAHAN																			
7 01 KECAMATAN																			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100.00	8,068,000,000		100	174,378,100	100	174,017,525	100	99.79	100	174,017,525	100.00	2.16	KECAMATAN BARANGIN	Sudah Memenuhi Target
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100.00	557,000,000		100	128,377,980	100	126,408,417	100	98.47	100	126,408,417	100.00	22.69	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Sudah Memenuhi Target
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100.00	676,000,000		100	169,577,550	100	167,157,632	100	98.57	100	167,157,632	100.00	24.73	KECAMATAN SILUNGKANG	Sudah Memenuhi Target
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	100.00	989,690,000		100	97,427,800	100	93,116,400	100	95.57	100	93,116,400	100.00	9.41	KECAMATAN TALAWI	Sudah Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100.00	4,017,080,000		100	199,999,800	100	197,394,475	100	98.70	100	197,394,475	100.00	4.91	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Sudah Memenuhi Target
				Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100.00	324,000,000		100	85,190,960	100	80,951,681	100	95.02	100	80,951,681	100.00	24.99	KECAMATAN SILUNGKANG	Sudah Memenuhi Target
				Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100.00	3,374,000,000		100	-	100	-	100		100		100.00	-	KECAMATAN BARANGIN	Sudah Memenuhi Target
				Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	100.00	452,000,000		100	93,439,680	100	77,374,700	100	82.81	100	77,374,700	100.00	17.12	KECAMATAN TALAWI	Sudah Memenuhi Target
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100.00	202,170,000		100	39,367,000	100	39,180,575	100	99.53	100	39,180,575	100.00	19.38	KECAMATAN BARANGIN	Sudah Memenuhi Target
				Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100.00	54,710,000		100	18,148,800	100	16,734,270	100	92.21	100	16,734,270	100.00	30.59	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Sudah Memenuhi Target
				Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100.00	24,800,000		100	9,320,000	100	9,233,250	100	99.07	100	9,233,250	100.00	37.23	KECAMATAN SILUNGKANG	Sudah Memenuhi Target
				Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100.00	88,500,000		100	56,975,450	100	55,575,000	100	97.54	100	55,575,000	100.00	62.80	KECAMATAN TALAWI	Sudah Memenuhi Target
				Persentase fasilitasi penanganan kasus covid (%)	100.00	455,000,000		100	698,067,000	100	642,002,200	100	91.97	100	642,002,200	100.00	141.10	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sudah Memenuhi Target
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100.00	164,550,000		n/a										KECAMATAN BARANGIN	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100.00	108,000,000			100										KECAMATAN SILUNGKANG	Belum Memenuhi Target	
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	n/a	25,000,000			n/a										KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Belum Memenuhi Target	
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100.00	43,500,000			100										KECAMATAN TALAWI	Belum Memenuhi Target	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100.00	334,350,000		100	17,391,200	100	15,797,550	100	90.84	100	15,797,550	100.00	4.72	KECAMATAN BARANGIN	Sudah Memenuhi Target
				Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100.00	42,250,000		100	13,252,850	100	13,002,000	100	98.11	100	13,002,000	100.00	30.77	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Sudah Memenuhi Target
				Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100.00	130,200,000		100	7,620,000	100	7,531,675	100	98.84	100	7,531,675	100.00	5.78	KECAMATAN SILUNGKANG	Sudah Memenuhi Target
				Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	100.00	94,700,000		100	34,309,900	100	33,153,425	100	96.63	100	33,153,425	100.00	35.01	KECAMATAN TALAWI	Sudah Memenuhi Target
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penurunan Angka Krimilitas (%)	15.00	720,680,000		5	49,190,200.00	19.75	42,506,802.00	395	86.41	20	42,506,802	131.67	5.90	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sudah Melebihi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		11	12	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	85.00	1,184,660,000			n/a								BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target	
				Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (%)	80.00				n/a								BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target	
				Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur (%)	65.00				n/a								BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi (%)	100.00	25,000,000			n/a								BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forum Strategis (%)	100.00	2,362,560,000		65	1,206,960,424.00	80.00	1,156,080,319.00	123	95.78	80	1,156,080,319	80.00	48.93	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi hasil rapat yang ditindaklanjuti (%)	100.00	421,500,000			n/a								BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target	
x																			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6 x 100%		9= 5+7		10= 9/4 x100%		11	12	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	258,968,750,000		12	87,011,950,391	103	82,825,964,427	856	95.19	103	82,825,964,427	285.32	31.98	DINAS PENDIDIKAN	Sudah Melebihi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	261,680,740,000		12	28,920,281,448	12	27,843,061,472	100	96.28	12	27,843,061,472	33.33	10.64	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	35,342,480,000		12	8,248,257,649	12	7,672,497,459	100	93.02	12	7,672,497,459	33.33	21.71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	27,173,360,000		12	6,137,858,702	12	5,783,300,779	100	94.22	12	5,783,300,779	33.33	21.28	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	14,115,670,000		12	764,932,000.00	12	561,125,538.00	100	73.36	12	561,125,538	33.33	3.98	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	23,992,400,000		12	6,471,583,776	12	6,396,688,712	100	98.84	12	6,396,688,712	33.33	26.66	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	16,160,830,000		12	4,122,641,975	100	4,034,830,023	833	97.87	100	4,034,830,023	277.78	24.97	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sudah Melebihi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6 x 100%		9= 5+7		10= 9/4 x100%		11	12	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	18,592,540,000		12	7,714,305,098	12	7,373,237,907	100	95.58	12	7,373,237,907	33.33	39.66	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	40,167,540,000		12	10,251,500,806	12	10,099,033,465	100	98.51	12	10,099,033,465	33.33	25.14	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	13,264,630,000		12	2,455,155,952	100	2,334,680,303	833	95.09	100	2,334,680,303	277.78	17.60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sudah Melebihi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	19,779,360,000		12	6,393,223,019	12	6,183,079,084	100	96.71	12	6,183,079,084	33.33	31.26	DINAS PERHUBUNGAN	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	18,046,040,000		12	4,301,518,426	14	4,152,723,132	117	96.54	14	4,152,723,132	38.89	23.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	16,899,660,000		12	3,941,990,461	12	3,876,987,883	100	98.35	12	3,876,987,883	33.33	22.94	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	9,988,010,000		12	3,064,223,644	93.46	2,894,556,330	779	94.46	93	2,894,556,330	259.61	28.98	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sudah Melebihi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	8,021,445,000		12	23,785,452,499	12	20,906,955,055	100	87.90	12	20,906,955,055	33.33	260.64	SEKRETARIAT DAERAH	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	44,387,670,000		12	13,529,691,539	12	12,272,622,286	100	90.71	12	12,272,622,286	33.33	27.65	SEKRETARIAT DPRD	Belum Memenuhi Target



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d. Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kriteria Penilaian Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8= 7/6 x 100%		9= 5+7		10= 9/4 x100%		11	12	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	15,183,460,000		12	5,118,042,703	12	4,841,941,875	100	94.61	12	4,841,941,875	33.33	31.89	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	26,770,180,000		12	8,090,545,567	12	7,564,168,315	100	93.49	12	7,564,168,315	33.33	28.26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	22,143,630,000		12	4,605,931,882	12	4,182,754,157	100	90.81	12	4,182,754,157	33.33	18.89	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	13,167,150,000		12	6,764,866,528	12	6,374,333,433	100	94.23	12	6,374,333,433	33.33	48.41	INSPEKTORAT	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	19,027,000,000		12	5,834,181,564	12	5,734,626,319	100	98.29	12	5,734,626,319	33.33	30.14	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	7,911,000,000		12	2,453,275,652	12	2,393,473,107	100	97.56	12	2,393,473,107	33.33	30.26	KECAMATAN SILUNGKANG	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	8,364,100,000		12	2,291,402,400	12	2,214,120,537	100	96.63	12	2,214,120,537	33.33	26.47	KECAMATAN TALAWI	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	15,259,000,000		12	4,529,939,437	12	4,463,277,710	100	98.53	12	4,463,277,710	33.33	29.25	KECAMATAN BARANGIN	Belum Memenuhi Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	36.00	18,438,000,000		12	4,107,715,246	12	3,271,658,659	100	79.65	12	3,271,658,659	33.33	17.74	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Belum Memenuhi Target



Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, 2022 (data diolah)

Keterangan :

Jumlah program keseluruhan	158	program
Jumlah program yang sudah memenuhi target	33	program
Jumlah program yang sudah melebihi target	23	program
Jumlah program yang belum memenuhi target	102	program

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto, melalui peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah;
2. Masih perlunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di kota sawahlunto, melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH);
3. Tingginya pembiayaan infrastruktur akibat topografi daerah yang berbukit, kondisi tanah yang labil akibat penambangan di beberapa titik sentral kota sawahlunto;
4. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, melalui pengurangan kawasan kumuh di Kota Sawahlunto;
5. Upaya untuk menekan angka pengangguran ;
6. Sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah sawahlunto ;
7. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;
8. Penimngkatan kesejahteraan dan pendapatan petani ;
9. Peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

2.3.2.1 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Belum optimalnya Pemenuhan kemampuan siswa dalam rangka peningkatan kemampuan Numerasi
2. Rendahnya kemampuan Literasi peserta didik dalam memahami pembelajaran
3. Persentase sekolah yang berakreditasi A masih rendah
4. Pembelajaran berkualitas belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah
5. Masih belum optimalnya Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Masih rendahnya konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan
2. Masih Kurangnya peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
3. Masih tingginya angka kematian bayi
4. Masih tingginya kasus kematian balita
5. Adanya pandemic Covid 19 yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal
6. Masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu
7. Masih kurang optimalnya peran lintas sektor dan anggota keluarga untuk mendukung program Kesehatan ibu dan ank
8. Fasilitas pelayanan Kesehatan belum dimanfaatkan secara maksimal
9. Fasilitas pelayanan Kesehatan masih dimanfaatkan sebatas rujukan/pengobatan belum pada konseling, kosultasi maupun kegiatan promotive preventif dan pemberdayaan secara inisiatif masyarakat setempat
10. Banyaknya masyarakat yang berkunjung kerumah sakit lain yang diakibatkan masih berkurangnya pelayanan di Rumah Sakit Sawahlunto.

11. Masih belum mencukupi ruangan puskesmas untuk melakukan upaya inovasi atau pengembangan pelayanan Kesehatan dasar yang sudah dilaksanakan.
12. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran ibu tentang pentingnya imunisasi anak.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Adanya kenaikan target yang tidak didukung dengan anggaran.
2. Kegiatan dan sub kegiatan tidak mendukung langsung capaian Program.
3. Belum tersedianya database kesesuaian tata ruang dengan IMB
4. Persentase jalan yang memiliki trotoar terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada.
2. Topografi yang curam di Kota Sawahlunto.
3. Tingginya Pembiayaan terhadap Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto akibat kondisi tanah yang kurang stabil
4. Status lahan yang sebagian masih dikuasai oleh PT. KAI, PT.BA dan Tanah Ulayat
5. SDM yang masih terbatas (tenaga terampil atau tenaga Ahli)
6. Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
7. Banyaknya daerah yang rawan bencana di kota sawahlunto
8. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum
9. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan terutama pembukaan jalan baru dan pelebaran jalan
10. Kurangnya sumber air bersih yang ada dikota Sawahlunto
11. Kurangnya Kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak
12. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata
13. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
14. Belum terwujudnya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Anggaran yang disediakan untuk rumah tidak layak huni tidak sebanding dengan kebutuhan dilapangan.
2. Susahnya menggali swadaya masyarakat karena faktor perekonomian yang tidak memungkinkan
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman
4. Kualitas permukiman pada kawasan kumuh yang ada masih rendah
5. Masih banyaknya kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (termasuk Penanggulangan bencana dan kebakaran)

1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto untuk menjaga ketertiban.
3. Masih terbatasnya operasional dan SDM penanganan kebakaran di Kota Sawahlunto
4. Masih rendahnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana
5. masih rendahnya kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (termasuk penanganan Pasca Bencana serta Taman Makam)

1. Masih banyak masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu sebanyak 27,53 persen (18.489 peserta DTKS dari 67.154 jumlah penduduk Sawahlunto tahun 2021).
2. Belum maksimalnya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penerima bantuan yang terfasilitasi sebanyak 43 persen (550 orang) dari 1.279 PMKS.
3. Belum semua bantuan yang diberikan memberikan daya ungkit optimal dalam mengangkat persoalan sosial (terutama ekonomi) bagi penerima bantuan

2.3.2.2 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya skill angkatan kerja
2. Masih rendahnya kesempatan kerja/lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja

3. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
4. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek
5. Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak, salah satu contoh masih rendahnya persentase kelurahan ramah anak (51,53 persen).
3. Belum optimalnya ketahanan keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis agama, adat dan budaya.
4. Keberdayaan ekonomi perempuan (wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan) masih rendah.
5. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih belum optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Rata-rata kelompok konsumsi pangan yang masih dibawah batas ideal,
2. Masih adanya daerah yang rawan pangan berdasarkan hasil FSVA.

Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup

1. Kurangnya Kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah
2. Kurangnya SDM tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai
3. Minimnya Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendalian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan
4. Belum berjalannya sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
5. Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan masih rendah
6. Kurangnya partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup
7. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan
8. Kurangnya pengendalian pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
9. Belum optimalnya pemulihan lahan bekas tambang
10. Belum optimalnya penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah
11. Kualitas pengelolaan persampahan belum optimal
12. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah
13. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan publik

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masuk dalam DTKS (27,53 persen).
2. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama antar desa dalam peningkatan pendapatan desa. Dimana tahun 2021 baru hanya 1 desa dengan status mandiri berdasar IDM.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
2. Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
4. Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;

5. kekurangan data dasar program KB di daerah sebagai dasar dalam penyusunan peta kerja untuk memudahkan penyusunan perencanaan pelaksanaan program KB.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Masih kurangnya pelayanan dan keselamatan transportasi jalan seperti rambu dan marka jalan di Kota Sawahlunto
2. Kurang optimalnya fasilitas pelayanan gedung uji kendaraan di Kota Sawahlunto
3. Masih kurangnya kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih rendahnya jumlah koperasi yang sehat di Kota Sawahlunto

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Masih rendahnya realisasi investasi
2. Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi
3. Permasalahan kepemilikan lahan/tanah ulayat

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya daya saing kepemudaan yang disebabkan Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.
2. Masih rendahnya daya saing olahraga disebabkan Belum tersedianya sarana dan prasana olah raga yang berkualitas, Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara propinsi dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan dan Kurangnya Pelatih yang bersertifikasi.

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Belum Optimalnya Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Beberapa bangunan atau benda cagar budaya belum terpelihara dan dilestarikan dengan baik disebabkan Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian warisan budaya dunia yang perlu ditingkatkan, Tingginya biaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya, Sebagian besar bangunan/benda cagar budaya yang terdaftar sebagai warisan dunia dimiliki oleh perusahaan tambang/pihak ketiga sehingga dalam pengelolaan mengalami masalah, Masih rendahnya kualitas SDM situs warisan dunia, Belum ditetapkan badan pengelola WT BOS dan Sebagian besar situs/cagar budaya belum dilestarikan dengan baik
2. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi budaya lokal disebabkan Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan dan kurang optimalnya kelembagaan budaya

2.3.2.3 Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Menurunnya jumlah produksi ikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dan Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota Sawahlunto disebabkan Beberapa objek wisata strategis belum mempunyai dokumen perencanaan, Kualitas sarana pendukung objek wisata belum memadai, Kurang optimalnya pemeliharaan objek wisata, Akses dan konektivitas menuju destinasi wisata belum memadai dan kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan objek pariwisata
2. Kurangnya Atraksi pada setiap objek wisata disebabkan Sarana dan prasarana atraksi tidak memadai, SDM pelaku atraksi belum mendukung
3. Kualitas Promosi masih rendah disebabkan SDM pelaku promosi pariwisata belum mendukung, Kemitraan/kerjasama biro perjalanan belum aktif, Sarana dan prasarana promosi pariwisata belum memadai dan Promosi pariwisata dilakukan secara manual
4. Industri Pariwisata belum berkembang disebabkan Kurangnya sarana dan prasarana penginapan dan Akomodasi yang representative, Belum tersedianya rumah makan yang representative, Sarana dan prasarana transportasi belum memadai dan Belum tersedianya Biro perjalanan yang profesional
5. Kelembagaan Pariwisata yang belum profesional disebabkan Belum tepatnya pembagian tupoksi dalam kelembagaan, Belum meratanya penguatan organisasi

- kelompok sadar wisata yang ada, Kurangnya koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah dan Kurangnya SDM dari pokdarwis
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi Kreatif disebabkan SDM pelaku ekonomi kreatif belum memadai, Sarana dan prasarana pendukung ekonomi kreatif belum ada dan Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan belum luas

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Lebih luas lahan Tadah hujan 878 Ha dari pada luas lahan Irigasi 693 Ha.
2. Rendahnya Penggunaan Benih Unggul Bersertifikasi.
3. Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaan pertanian masih terbatas
4. Masih kurangnya diversifikasi dan konsumsi Masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi seimbang dan aman).
5. Masih Rendahnya Motivasi petani dalam berusaha tani

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Banyaknya UKM yang tidak berkembang
2. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.
3. Masih rendahnya kemampuan UMKM untuk menggunakan teknologi informasi dalam berusaha
4. Terbatasnya jaringan perdagangan antar daerah
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar serta ketertiban dan kebersihan pasar
6. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang upaya terhadap perlindungan konsumen melalui tertib ukur.
7. Besarnya pengaruh pasar online terhadap jual beli di pasar pada masa pandemic
8. PKL dilingkungan pasar dapat mengakibatkan gangguan terhadap pasar dan para pedagang didalamnya

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Besarnya potensi komoditi unggulan yang belum dikembangkan secara optimal
2. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil
3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha industri kecil dan menengah
4. Minimnya standarisasi produk industry
5. Masih lemahnya SDM pelaku industry
6. Belum optimalnya fasilitas yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitas kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan

2.3.2.4 Permasalahan Terkait Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
2. Belum optimalnya fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
3. Masih terbatasnya informasi dan jejaring kerjasama pemerintah kota dengan pihak lain
4. Belum optimalnya kualitas ASN yang bersih dan inovatif

2.3.2.5 Permasalahan Terkait Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

1. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
2. Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
3. Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan

Keuangan

1. Masih terbatasnya potensi pendapatan asli daerah
2. Belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah

3. Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan membayar retribusi daerah
4. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu peningkatan

Kepegawaian

1. Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya
2. Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
3. Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
5. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani
6. Belum terlaksananya penerapan standar pelayanan

2.3.2.6 Permasalahan Terkait Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

Belum optimalnya komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah

2.3.2.7 Permasalahan Terkait Unsur Kewilayahan

Kecamatan

2.3.2.8 Permasalahan Terkait Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Belum optimalnya peran kelembagaan Kesbangpol Kota Sawahlunto
2. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto
3. Masih kurangnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dari angka kriminalitas
4. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan

2.3.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata serta Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter

Pelaksanaan pendidikan berkarakter tetap menjadi isue yang harus diperhatikan dalam pembangunan sektor pendidikan tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan isu pembangunan pendidikan ditingkat provinsi dan Nasional. Konsep pendidikan berkarakter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus betul-betul diaplikasikan oleh sekolah dan guru. Perbaikan sikap mental anak, pengamalan ajaran agama, sikap kekeluargaan dan gotong royong serta karakter budaya dan adat istiadat yang mulai ditinggalkan generasi muda menjadi fokus perbaikan dalam mengembangkan pendidikan karakter ini. Perlunya pengawasan dan evaluasi secara rutin dari dinas pendidikan selaku leading Sektor pelaksanaan pendidikan di Kota Sawahlunto. Pendidikan berkarakter ini menjadi sangat penting sekarang ini sebagai proteksi akhlak anak dalam terhadap dampak negatif perkembangan informasi dan teknologi yang mudah untuk diakses generasi muda dan penduduk usia sekolah.

Kecenderungan orangtua siswa menyekolahkan anaknya di Sekolah-sekolah tertentu menyebabkan pemerataan pendidikan menjadi isu yang penting untuk dikedepankan. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Zonasi sekolah. Akan tetapi beberapa sekolah yang sudah terlanjut dicap sebagai sekolah favorit, tetap menerima calon siswa baru jika nilai mereka diatas rata-rata. Hal ini dapat menghambat pemerataan pendidikan di Kota Sawahlunto.

Kebijakan di bidang pendidikan dalam mengantisipasi pembatasan sosial kegiatan masyarakat perlu menjadi perhatian khusus mengingat kualitas pendidikan tetap harus ditingkatkan meskipun dihadapkan dengan tantangan keterbatasan dalam proses pembelajaran. Dinas Pendidikan perlu mengambil langkah-langkah inovatif dan mengembangkan pola pengajaran yang kreatif yang melibatkan semua pihak baik pihak sekolah, guru, orang tua dan murid.

Kebijakan Merdeka Belajar dan Pembelajaran Adaptif Pandemic di Kota Sawahlunto belum dituangkan ke dalam surat edaran resmi oleh Dinas Pendidikan . Namun semua Satuan Pendiidkan perlu melakukan evaluasi pembelajaran masing-masing. Jka selama ini ada ujian standar kota, dimana soal ujiannya sama untuk setiap tingkat pada setiap jenjang pendidikan, maka sekarang sudah diberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk

merancang dan melaksanakan evaluasi bagi siswanya. Antara satu sekolah dengan sekolah lain tidak ada kesamaan soal yang diujikan lagi.

Dengan melaksanakan beberapa kebijakan pemerintah, merdeka belajar dengan sendirinya terlaksana di jenjang pendidikan. Sekolah telah mengetahui merdeka belajar melalui Webinar sehingga merdeka belajar sudah terosialisasikan ke sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Perihal pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Masa Kondisi Khusus, pada masa pandemi satuan pendidikan pada daerah dalam kondisi khusus melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik. Pada tahun pelajaran 2021/2022 kurikulum khusus masih digunakan karena belum diterbitkannya keputusan menteri tentang penggunaan kurikulum. Kota Sawahlunto khusus Dinas Pendidikan belum menerbitkan edaran terbaru terkait pemakaian kurikulum karena kurikulum yang digunakan masih kurikulum darurat.

UN/USBN merupakan ujian yang diselenggarakan oleh pusat, naskah soal dan pemeriksaan jawaban bukan dilakukan di sekolah. Penghapusan UN diedarkan sejak tahun 2020. Menurut edaran, bentuk ujian diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, mulai dari penyusunan soal, pemeriksaan, dan pemberian nilai. Ujian yang diselenggarakan bernama ujian sekolah. Ujian sekolah adalah ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Ujian Sekolah berbentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen lainnya. Sementara penentuan kelulusan adalah nilai rapor selama lima semester. Sementara, asesmen adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Sasarannya adalah siswa kelas 5 dan 8 pada pendidikan dasar. Mata ujian berupa AKM (literasi dan numerasi) dan survey karakter, guru melaksanakan survey lingkungan, hasil asesmen adalah pemetaan sekolah terhadap peralatan, mutu, dan karakter siswa.

Asesmen Nasional merupakan instrumen bagi pusat untuk menentukan mutu pendidikan eluruh Indonesia, sehingga nantinya akan ada tindak lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam pemerataan mutu pendidik di seluruh Indonesia. Baik dari sisi sarana dan prasarana, kompetensi guru, Kompetensi siswa dan mutu sekolahnya.

Sedangkan UN/USBN adalah penentuan kelulusan siswa. Asesmen tidak memiliki KKM atau target, UN/USBN memiliki target. Jadi asesmen bukan pengganti UN/USBN, asesmen salah satu bentuk penilaian terhadap sekolah bukan penentuan nilai seorang siswa. Untuk pengganti UN/USBN pada RPJMD adalah Ujian Sekolah (US). US dapat ditetapkan target yang akan dicapai. Nilai US diperuntukkan kepada masing-masing siswa untuk semua mata pelajaran.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas serta keluarga sehat

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, kota Sawahlunto memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup penduduk Kota Sawahlunto sendiri dan sebagian penduduk dari kabupaten Sijunjung dan Kab. Tanah Datar. Kapasitas tampung juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Seiring dengan program nasional, perilaku hidup bersih dan sehat ini akan dilanjutkan dengan program keluarga sehat dengan ukuran keberhasilan indeks keluarga sehat.

Penegakan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat sangat vital di masa Pandemi ini. Kesadaran menerapkan 3 M dan membatasi kegiatan di luar rumah belum terlaksana secara maksimal sehingga peningkatan kasus Covid dan kematian akibat Covid

masih terus terjadi di Sawahlunto. Perlu kesadaran dan pengawasan yang ketat dari seluruh elemen untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai Covid 19 di Sawahlunto.

Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

3. Penanganan Isu Stunting

Stunting menjadi isu yang masih menjadi perhatian di tingkat nasional hingga daerah. Upaya perbaikan gizi balita ditunjukkan dengan penurunan kasus stunting di Kota Sawahlunto dalam beberapa tahun terakhir. Namun, adanya Pandemi dan efek sosial ekonomi yang berdampak kepada masyarakat dikuatirkan dapat menjadi ancaman terhadap peningkatan kasus balita dengan gizi buruk di tahun mendatang.

Program perbaikan kualitas gizi untuk penanganan stunting di tingkat kota hingga ke pelayanan kesehatan terendah di masyarakat masih perlu untuk digiatkan seiring dengan isu PHBS dan penerapan protokol kesehatan yang menjadi jargon dalam pemutusan rantai penyebaran Covid.

4. Peningkatan peran lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan bermasyarakat

Perbaikan karakter dan mental masyarakat tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta lembaga agama dan adat itu sendiri. Sesuai dengan falsafah Adat Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, terlihat karakter masyarakat minangkabau pada umumnya, dan Sawahlunto khususnya, terbentuk dari kebiasaan adat istiadatnya yang didasari oleh agama Islam. Hal ini juga dijadikan salah satu misi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hal ini pulalah yang harus dijadikan kekuatan dalam pembangunan karakter masyarakat di Kota Sawahlunto lima tahun kedepan. Seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dibutuhkan peran lembaga keagamaan dan adat dalam memfilter dan mengantisipasi dampak negatifnya. Jika hal ini tidak diperhatikan, nilai-nilai keagamaan dan budaya akan hilang dengan sendirinya. Semangat kekeluargaan, gotong royong, hormat-menghormati dan saling menghargai harus selalu menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep kembali ke Surau yang juga merupakan aplikasi dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, perlu diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, peran ninik mamak dan alim ulama yang telah mengakar dalam karakter masyarakat Kota Sawahlunto sebagai panutan ditengah masyarakat harus mendapatkan porsi yang lebih dalam pembangunan Kota ke depan. Falsafah “Kanakan Sapanuruikan Parintah Mamak” menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah.

5. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Untuk mendukung Visi Kota menjadi Kota Wisata tambang yang berbudaya, harus disiapkan produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing sebagai suatu kemasan dengan pariwisata. Peningkatan sektor pariwisata tidak akan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, jika tidak diimbangi dengan kejelian mengoptimalkan multiplier efek dari kunjungan wisatawan tersebut. Masyarakat kota sawahlunto harus mampu menyediakan produk-produk unggulan dari yang akan dijual kepada wisatawan. Inilah yang akan menjadi titik temu permasalahan peningkatan perekonomian masyarakat akibat aktivitas pariwisata. Peningkatan daya saing ini dimulai dari bahan baku yang berkualitas, proses pengolahan yang baik, pengemasan yang menarik dan sesuai standar serta promosi yang tepat sasaran. Produk unggulan yang baik merupakan hasil olahan yang menjadi ciri khas Kota Sawahlunto. Beberapa produk yang bisa ditingkatkan kualitas dan daya saingnya seperti Songket Silungkang, Kerajinan Tangan Daeri Batu Bara, Panganan Khas Kota Sawahlunto (Kerupuk Kubang), Konveksi Baju, Makanan Soto, dan lainnya. Selain itu usaha pendukung pariwisata seperti Homestay dengan ciri khas suasana rumah pun dapat dijadikan Ikon Kota sebagai Kota dengan Karakter Wisata.

Selain itu, inovasi dalam pengembangan wisata di Kota Sawahlunto juga sangat diperlukan. Adanya gap antara permintaan konsumen pariwisata dengan konsep pariwisata tambang yang ditawarkan, mengharuskan Pemerintah Kota sawahlunto untuk dapat mengkolaborasi atau mengintegrasikan antara Objek Wisata Modern/rekreasi dengan wisata Tambang atau wisata alam lainnya. Wisata Tambang yang dapat didefinisikan sebagai wisata minat khusus, membutuhkan inovasi dan ide kreatif untuk dirpomosikan. Akan tetapi, objek ini akan bertahan lama karena merupakan cirikhas daerah yang tidak dimiliki daerah

lain. Disisi lain, objek wisata modern seperti Wisata Selfie dan Wisata Rekreasi, merupakan objek wisata yang booming tetapi bersifat sementara dan dapat diduplikasi oleh daerah lain.

6. Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perlu menjadi perhatian lebih dalam pembangunan Kota Sawahlunto kedepan. Perubahan paradigma aparatur agar lebih mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, harus didukung oleh kualitas aparatur itu sendiri. Selain itu juga harus didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Seiring perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, aparatur pemerintah di Kota Sawahlunto juga harus mampu memanfaatkannya dalam efisiensi pengelolaan dan birokrasi pemerintahan.

7. Kesetaraan Pembangunan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas, gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal, Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selama ini, kampanye untuk keadilan bagi Lansia terlantar, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok marginal lainnya selalu digelorakan. Akan tetapi, khusus untuk Kota Sawahlunto, kampanye bagi kelompok-kelompok ini seakan hanya jadi alat politik semata. Kelompok ini seakan memang termarginalkan dalam pembangunan. Konsep pengarus utamaan Gender ini harus diaktualisasikan secara nyata dalam pembangunan. Kelompok-kelompok ini harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan Kota Sawahlunto lima tahun kedepan. Karena, selain menyangkut hati nurani, urusan Sosial ini merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Salin itu, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam pembangunan, sebagai upaya mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Layak Anak.

8. Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Pasca Tambang Oleh PT BA, PT KAI, Perusahaan Tambang Lainnya Dan Masyarakat

Status kepemilikan lahan di Kota Sawahlunto merupakan issue yang perlu dikedepankan dalam pembangunan Kota. Status Kota sebagai daerah bekas penambangan Batu Bara, bahkan beberapa Perusahaan masih melakukan penambangan di Kota Sawahlunto, dapat menjadi kendala yang serius dalam membangun Kota. Objek Wisata Danau Biru merupakan contoh terdekat terkait kepemilikan lahan tambang yang dapat digunakan untuk Objek Wisata. Letak Danau Biru yang berada dalam Wilayah Kuasa Penambangan suatu Perusahaan Swasta, membatasi ruang gerak pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan objek wisata tersebut.

Kepemilikan Aset PT.BA dan PT.KAI yang dapat dijadikan sebagai objek wisata tambang juga harus diselesaikan dengan baik. Konsep wisata tambang mengharuskan Kota Sawahlunto menjual ikon-ikon bekas penambang sebagai bukti sejarah keberadaan Tambang Batu bara tertua diindonesia berada di Kota sawahlunto. status World Heritage dari UNESCO juga akan menuntut Kota Sawahlunto untuk selalu melestarikan bukti peninggalan-peninggalan bersejarah yang sebagaimana kepemilikannya ada pada PT.BA dan PT.KAI. Masalah kepemilikan ini akan menjadi dasar proses pelestarian kedepannya.

9. Optimalisasi Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO dan Geopark Nasional dalam Pengembangan Sektor Pariwisata

Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto sebagai warisan dunia tersebut Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto merupakan warisan budaya yang benar-benar signifikan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Penetapan status warisan dunia bukanlah tujuan utama dari diplomasi budaya. Selain perlindungan dan edukasi, status warisan dunia sudah seyogyanya juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi dan meningkatkan harkat hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Sebagai situs warisan dunia, Kota Sawahlunto akan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan pariwisata Dampaknya tentu sangat besar. Ini akan jadikan sebagai destinasi baru bagi wisata dan pemerintah dan masyarakat sama-sama berkomitmen untuk menjaga warisan budaya dunia ini, karena tentu akan mendatangkan kebaikan, pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan di tetapkan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto menjadi destinasi wisata baru di Sumbar, dan tentunya keberadaanya sebagai warisan budaya dunia perlu kita jaga bersama untuk



mendorong kemajuan ekonomi berupa akses, infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, sebagai bentuk upaya peningkatan pengalaman kunjungan yang lebih baik dan pariwisata berkelanjutan. Selain itu penobatan status Geopark Nasional pada beberapa situs geologi yang tersebar di seluruh wilayah Sawahlunto turut menjadi keunggulan komparatif bagi perkembangan kepariwisataan di Sawahlunto. Hal ini menjadi daya tarik potensi investasi, sekaligus mendorong inovasi maupun kreatifitas ekonomi, baik di sektor barang dan jasa. Dari aspek pengetahuan, dapat meningkatkan profil dan daya saing perekonomian ke tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya tahun 2023. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks gini dan indeks pembangunan manusia. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2023.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020- 2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur berdasarkan nilai PDRB Harga Konstan untuk mengetahui perubahan riil ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator kunci dalam pembangunan dan merupakan sasaran utama dalam penyusunan fundamental ekonomi daerah.

Berbagai aspek/variabel, baik ekonomi maupun non-ekonomi mempengaruhi dan atau dipengaruhi (secara simultan) oleh pertumbuhan ekonomi : inflasi, pendapatan, ketimpangan, kemiskinan, kependudukan, tenaga kerja, pengangguran, kesehatan, pendidikan, politik, demokrasi, pembangunan manusia, budaya, lingkungan, infrastruktur, investasi dan sebagainya.

Rumus :

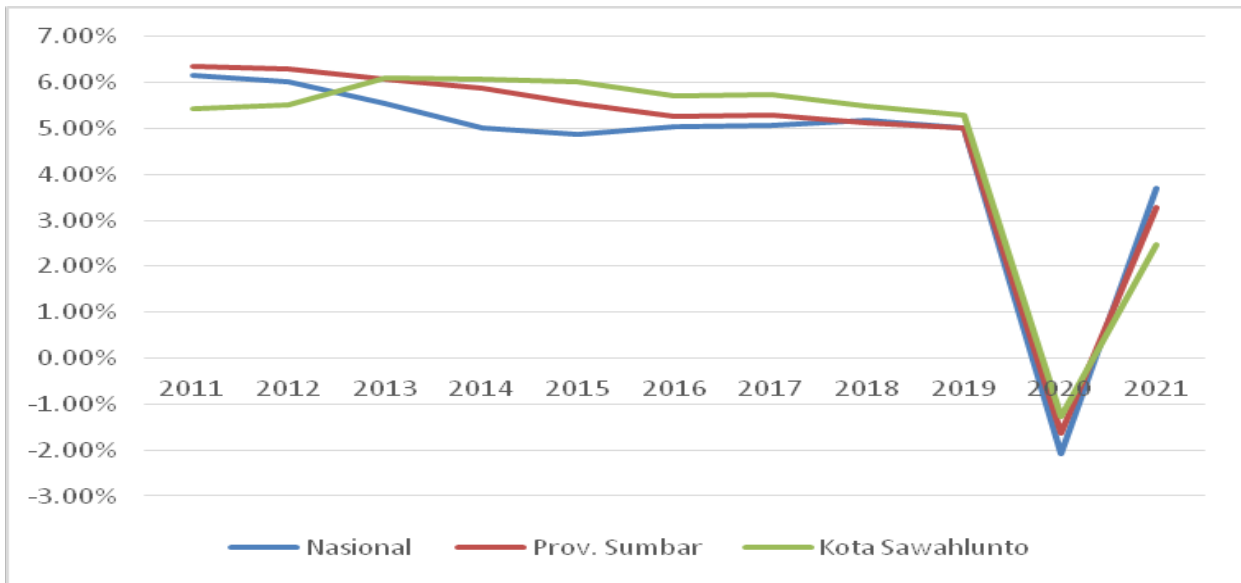
$$r_t = ((PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}) \times 100\%$$

Tabel. 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2021

Tahun	Nasional	Prov. Sumbar	Kota Sawahlunto
2011	6,17%	6,34%	5,45%
2012	6,03%	6,31%	5,53%
2013	5,56%	6,08%	6,11%
2014	5,01%	5,88%	6,08%
2015	4,88%	5,53%	6,03%
2016	5,03%	5,27%	5,72%
2017	5,07%	5,30%	5,74%
2018	5,17%	5,14%	5,50%
2019	5,02%	5,01%	5,31%
2020	-2,07%	-1,62%	-1,27%
2021	3,69%	3,29%	2,49%

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun, 2021 (diolah)

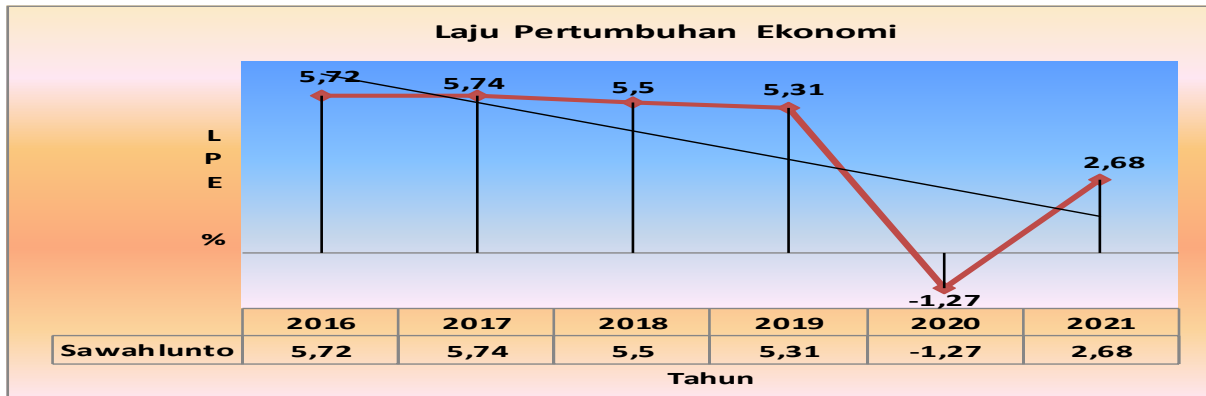
Grafik 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun, 2021 (diolah)

Pada tahun 2013 sampai tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berkorelasi lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kota Sawahlunto lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi.

Grafik 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021



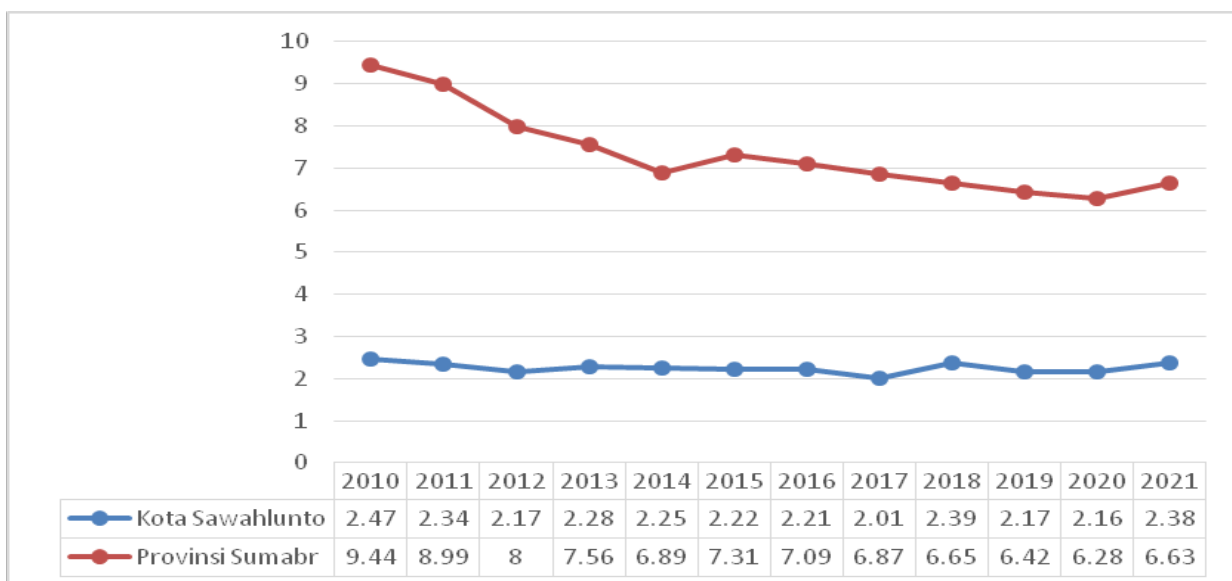
Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun, 2021 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selama tahun 2016 – 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di atas 5 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen dan terdapat sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dan 7 (tujuh) lapangan usaha yang tumbuh positif. Lapangan usaha yang positif adalah : 1).Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,71 %); 2).Pertambangan dan Penggalian (8,89 %); 3).Informasi dan Komunikasi (8,19%); 4).Jasa Keuangan dan Asuransi (0,91 %); 5).Real Estat (0,13); 6).Jasa Pendidikan (4,41); dan 7).Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,26).

3.1.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016 – 2021 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2018 terdapat peningkatan dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto terendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun Kota Sawahlunto tidak luput dari wabah pandemi Covid-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020 yang mengakibatkan tingkat kemiskinan nasional dan sebagian besar daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan, namun hal ini tidak terjadi dengan Kota Sawahlunto. Di tengah wabah pandemi covid-19, **tingkat kemiskinan** Kota Sawahlunto tetap menurun, dari 2,17 persen pada tahun 2019 turun menjadi 2,16 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan menjadi 2,38. Hal ini disebabkan banyaknya bantuan sosial yang didistribusikan ke Kota Sawahlunto, mulai dari bantuan pusat sampai bantuan tingkat desa, sehingga masyarakat miskin dapat meningkatkan perekonomiannya. Kondisi ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 masih terjadi dan bantuan sosial masih menjadi salah satu solusi untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, maka diperkirakan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto masih akan tetap berkisar 2,15 - 2,16 persen dengan asumsi bantuan sosial masih terus berjalan.

Grafik 3.3
Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021

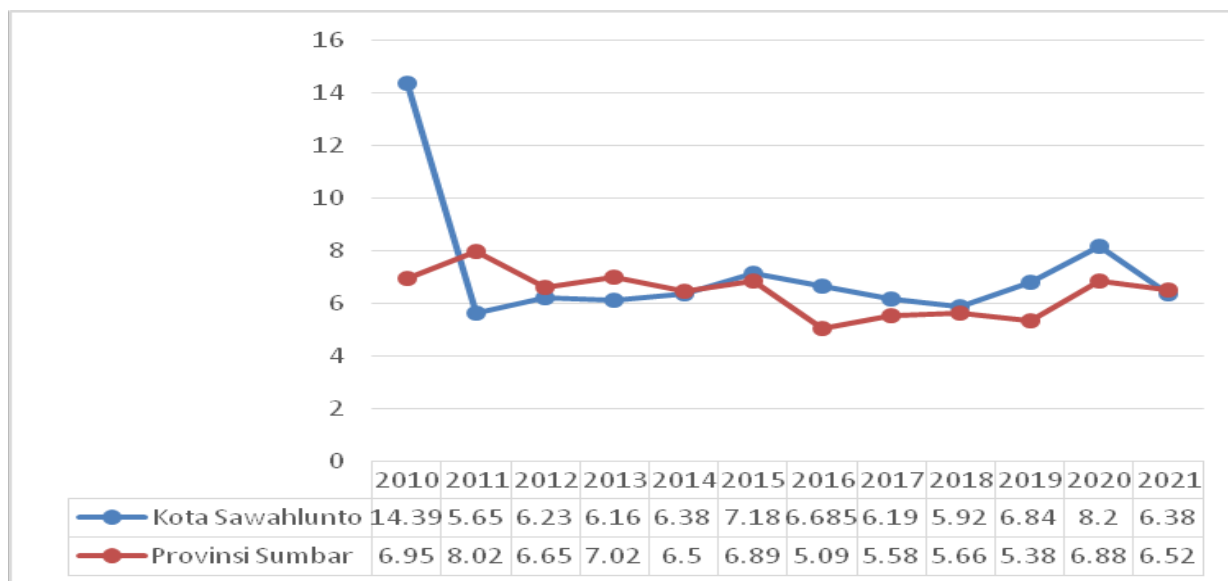


Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun, 2021 (diolah)

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto cenderung mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Dari 6,84 persen pada tahun 2019, menjadi 8,20 pada tahun 2020. Angka ini merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2016-2020. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto pada tahun 2020 tertinggi ketiga setelah Kota Padang dan Kota Solok, di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021



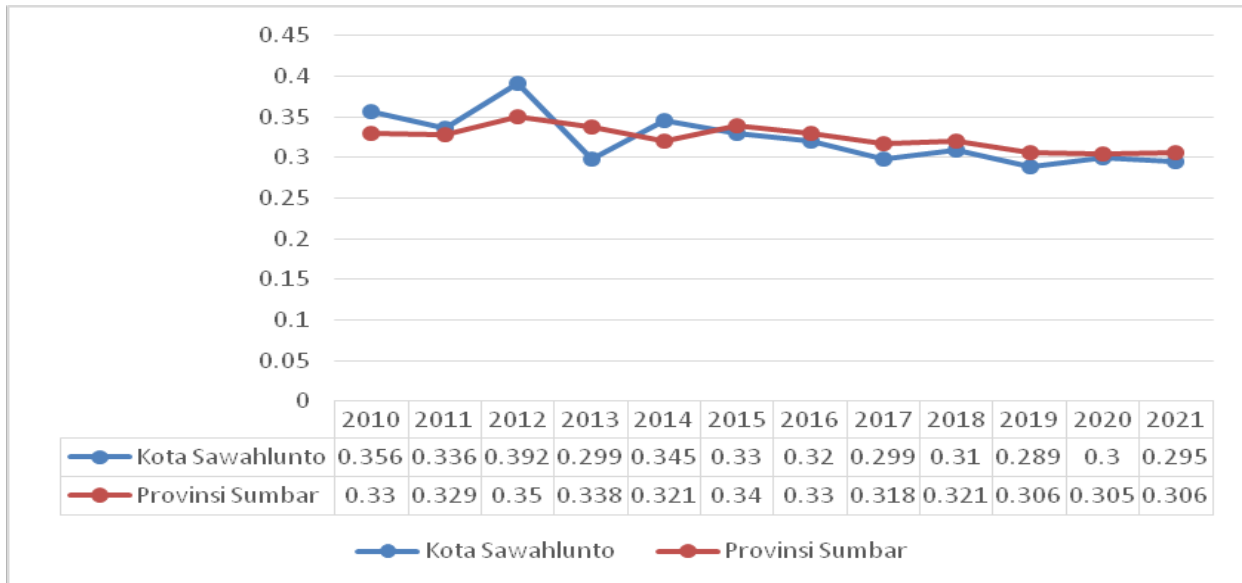
Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun, 2021 (diolah)

Tingginya lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 diperkirakan karena adanya kebijakan PSBB dan himbauan untuk dirumah saja untuk mengurangi wabah covid-19. Disamping itu juga adanya dugaan tambahan pengangguran dari kepulauan para perantau yang kehilangan pekerjaan di rantau. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2020 yang meningkat empat kali dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto per tahun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 dalam kondisi masih mewabahnya Covid-19, namun tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto turun menjadi 6,38 persen. Hal ini disebabkan kebijakan *social distancing* sudah tidak diberlakukan lagi, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja secara normal dan diperkirakan untuk tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan seiring dengan perubahan status covid-19 dari pandemi menjadi endemi.

3.1.1.4 Indeks Gini/Gini Rasio

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto tergolong relatif baik. Secara umum, Gini Rasio Kota Sawahlunto selama rentang waktu 2016 – 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan Gini Rasio Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa makin meratanya tingkat pendapatan penduduk di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2020 Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,300 dengan prediket moderat/sedang. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yang sudah mencapai 0,289. Artinya ketidakmerataan pendapatan meningkat di Kota Sawahlunto sepanjang tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19, yang menyebabkan banyak penduduk yang tidak dapat bekerja, terutama penduduk yang bekerja di sektor informal. Dengan masih mewabahnya covid-19 pada tahun 2021, Gini Rasio Kota Sawahlunto menjadi 0,295. Diperkirakan untuk tahun 2022 indeks gini ratio akan mengalami penurunan. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2021.

Grafik 3.5
Indeks Gini Ratio Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021

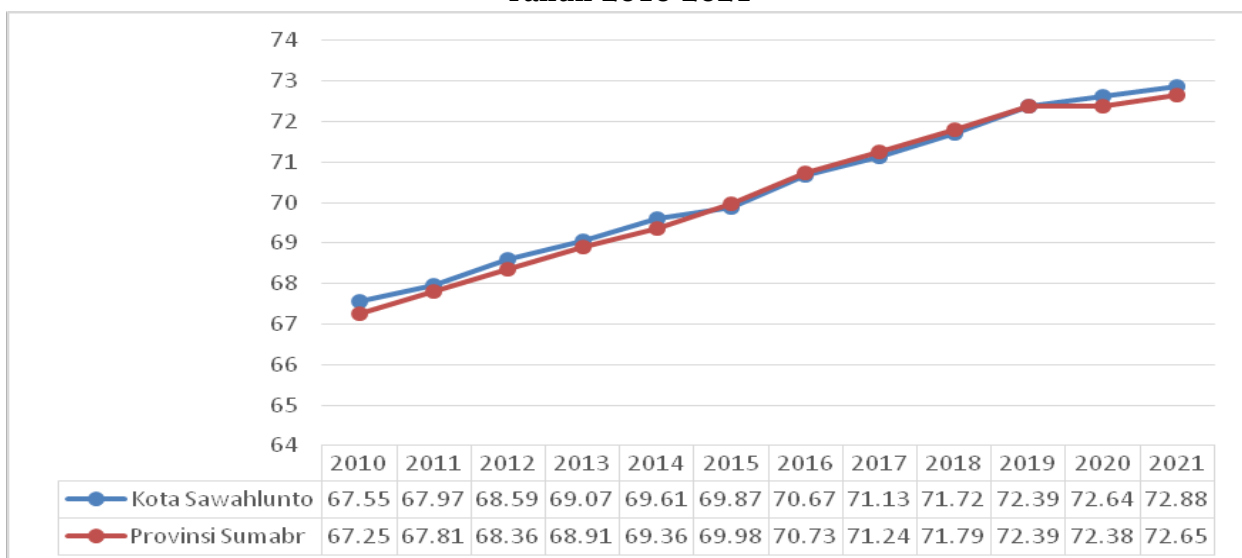


Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun, 2021 (diolah)

3.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2019 cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2019, IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Apabila dilihat lebih detil pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Grafik 3.6
Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka Tahun, 2021 (diolah)

Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2016 – 2020 **sudah mengikuti trenline**, dan pada tahun 2021 masih berada pada trenline dengan angka 72,88. Pandemi Covid-19 diperkirakan tidak terlalu mempengaruhi indikator-indikator pembentuk IPM, kecuali indikator Pengeluaran per Kapita disesuaikan yang akan sedikit berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan tiga indikator lainnya, UHH, HLS, RLS diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh wabah Covid-19, karena ketiga indikator tersebut di Kota Sawahlunto sudah terlayani dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Kondisi ini didukung oleh instruksi pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran kepada Perangkat Daerah terkait pada masa pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian pada tahun 2022, IPM Kota Sawahlunto diperkirakan meningkat menjadi 72,97.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Prospek perekonomian Kota Sawahlunto Tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 pada kisaran 4,8 persen. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Sawahlunto antara lain :

1. Jika wabah COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2022, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berpotensi tumbuh tinggi.
2. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kota Sawahlunto;
3. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.
4. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antar negara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
5. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Sawahlunto, akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
6. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Sawahlunto yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non migas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2023 diperkirakan mengalami perbaikan kisaran 5,69 persen sampai dengan 5,87 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi regional Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023 dengan fokus pada pemulihan ekonomi yang diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4 persen sampai dengan 6,0 persen. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi dan strategi sebagai berikut:

Asumsi

1. Investasi yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
2. Pulihnya mobilitas manusia dan barang antar wilayah.
3. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Konstruksi.
4. Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian.
5. Terealisasi stimulus fiskal, program restrukturisasi kredit, penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia.

Strategi

1. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sertifikasi produk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta;
2. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;
3. Meningkatkan proses hilirisasi industri manufaktur berbasis produk pertanian sebagai sektor unggulan Kota Sawahlunto;
4. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal sebagai pendukung pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemerataan, pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal dan non formal.
7. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Sementara itu, inflasi Kota Sawahlunto tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 2,01 persen sampai dengan 2,11 persen dengan asumsi terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat, optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2023 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 serta alokasi penanganan Covid 19. Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak perubahan dan penyempurnaan peraturan dengan harapan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dengan diterbitkannya PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah harus diterapkan pada penyusunan APBD Tahun 2021, menggantikan PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih digunakan pada penyusunan APBD Tahun 2020, Pemerintah Daerah diharuskan melakukan transisi dan persiapan serta melakukan konsolidasi terhadap penyajian laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel sesuai dengan PP 12 Tahun 2019.

Sekilas dapat digambarkan perbedaan struktur APBD antara Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbedaan Struktur APBD antara Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

Uraian	Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Pendapatan Daerah	Pasal 20 ayat (2) semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.	Pasal 28 ayat (1) semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD): (Psl 22 ayat (1)) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan: (Pasal 23) Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan yang Sah: (Pasal 22	Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Transfer: Transfer Pemerintah Pusat: Dana Perimbangan Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan

Uraian	Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
	ayat (2)) Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otsus Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	Dana Desa Transfer antar Daerah: Pendapatan Bagi hasil Bantuan Keuangan Lain-lain Pendapatan yang Sah: Hibah Dana Darurat Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan pemerintah
Belanja Daerah	Pasal 20 ayat (3) semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.	Pasal 28 ayat (2) semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Struktur Belanja Daerah dalam APBD	Pasal 27 ayat (7) Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung: Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	Pasal 55 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasional: pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas jenis: Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Modal: pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga: pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer: pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan
Pembiayaan daerah	Pasal 20 ayat (4) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Pasal 28 ayat (3) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi dan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program-program pembangunan kedepan. Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri dalam melaksanakan program pembangunan adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi normal, walaupun diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi bencana sosial tersebut

atau tidak sampai berkepanjangan sampai tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa Pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat COVID-19 di Tahun 2022. Setidaknya ada empat sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kota Sawahlunto.

Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

- a. Ekstensifikasi penerimaan
Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.
- b. Menata proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah.
- c. Meningkatkan pengawasan
Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Penyederhaan Mekanisme Penyetoran
Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.
- e. Harmonisasi SKPD yang Berwenang
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk percepatan penerapan e retribusi yang bekerjasama dengan Bank Nagari sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi khususnya dan PAD pada umumnya. Hal ini didukung dengan fleksibilitas metode pembayaran oleh wajib pajak dan retribusi.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan).
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk objek pendapatan sesuai wewenang provinsi.
4. Menggagas peluang kerjasama antar pemerintah daerah yang dapat didanai dari alternatif pendanaan selain APBN, misalnya bantuan (hibah), Pinjaman Lunak (Soft Loan) dari lembaga internasional dan organisasi lainnya.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b). Jasa giro, c). Pendapatan bunga, d). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, f). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan denda pajak, i). Pendapatan denda retribusi, j). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k). Pendapatan dari pengembalian, l). Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, n). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Adapun realisasi pendapatan selama kurun waktu 2018-2021 dan proyeksi untuk tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022 Dan Proyeksi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2023-2024

NO	URAIAN	REALISASI			PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	PENDAPATAN	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	211.943.405.508,99	644.525.458.210,00	651.593.090.351,58
A	Pendapatan Asli Daerah	59.537.385.897,66	51.475.336.271,45	35.806.048.992,99	67.683.299.734,00	68.079.905.159,47
1	Pajak Daerah	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	2.028.682.358,40	7.642.338.900,00	7.718.762.289,00
2	Retribusi Daerah	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	1.485.986.758,00	6.227.414.584,00	6.289.688.729,84
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	16.449.870.000,00	16.614.368.700,00
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	18.814.111.867,59	37.363.676.250,00	37.457.085.440,63
B	Pendapatan Transfer	497.369.022.340,00	538.147.448.116,00	174.679.408.816,00	572.968.839.886,00	598.388.855.783,52
1	Pendapatan Trf Pemerintah Pusat	474.193.173.322,00	509.421.068.591,00	170.859.399.164,00	546.449.894.101,52	551.914.393.042,54
2	Pendapatan Trf Antar Daerah	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	3.820.009.652,00	26.518.885.784,48	27.725.473.559,58

NO	URAIAN	REALISASI			PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.951.455.793,90	8.418.079.800,00	1.457.947.700,00	3.873.318.590,00	3.873.318.590,00
1	Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan	19.951.455.793,90	8.418.079.800,00	1.457.947.700,00	3.873.318.590,00	3.873.318.590,00

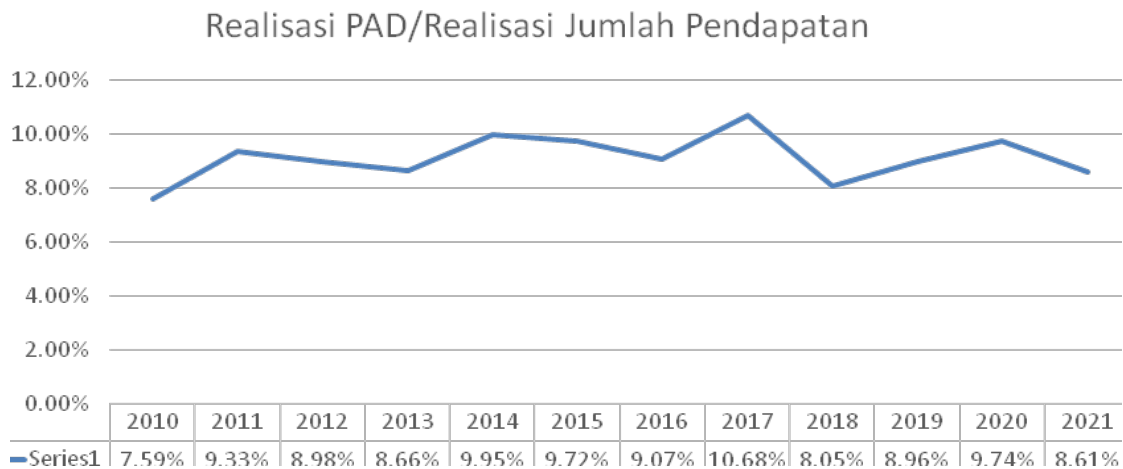
Sumber Data : Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, 2018-2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan Kota Sawahlunto berfluktuasi namun mulai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan seiring dengan makin membaik tingkat perekonomian nasional. Untuk itu proyeksi tahun 2022-2023 pendapatan di asumsikan naik sebesar persentase pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap).

Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kota Sawahlunto.

Grafik 3.7
Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2010-2021



Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022 (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat kemandirian yang sangat rendah, dimana tingkat ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap dana perimbangan sangat tinggi. Hal ini diakibatkan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah pada Kota Sawahlunto.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari eMonitoring Pajak Daerah antara lain :
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Pemberian Reward dan Punishment, antara lain :
 - Reward yakni dengan pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan dan pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada eventevent yang digelar oleh Pemkot Sawahlunto
 - Punishment yakni dengan Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- 4) Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
- 5) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi dalam perekaman dan pemungutan pajak.
- 7) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
- 8) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.

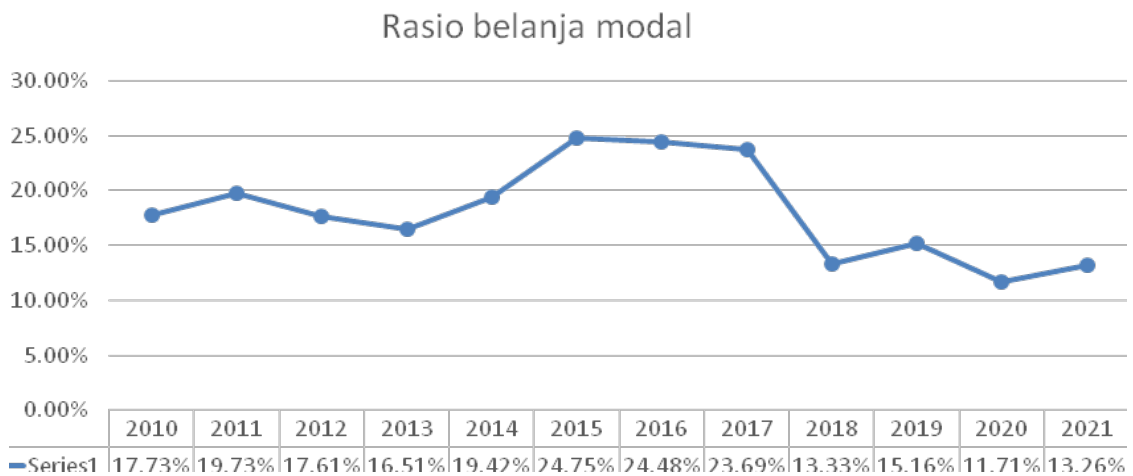
- 9) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- 10) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak
- 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan .
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
- 15) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 16) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- 17) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga.

Salah satu cara untuk mengukur kualitas belanja adalah dengan menghitung Quality of spending, yakni seberapa besar alokasi belanja modal dari total belanja. Quality of spending Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

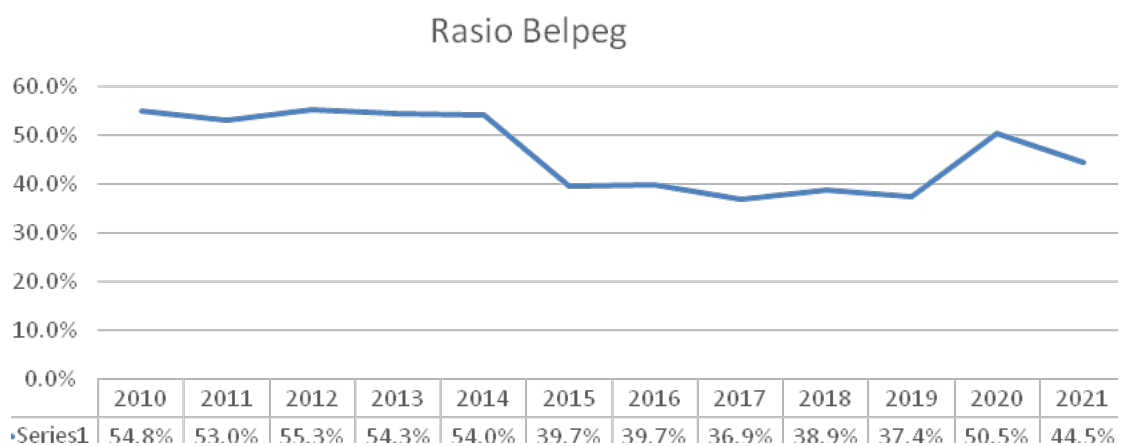
**Grafik 3.8
Quality of Spending
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021**



Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022 (diolah)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa belanja modal pada Kota Sawahlunto berfluktuasi dan cenderung naik dari tahun 2013-2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat tajam dan pada tahun 2019 meningkat dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 seiring dengan mulai membaiknya tingkat perekonomian daerah. Sedangkan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 3.9
Rasio Belanja Pegawai Terhadap Jumlah Total Belanja Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2021**



Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022 (diolah)

Dari grafik diatas dapat diketahui untuk belanja pegawai Kota Sawahlunto masih berada pada kisaran yang relatif tinggi dari apa yang diamanatkan oleh UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yakni hanya sebesar 30 persen dari APBD. Perlu upaya khusus terkait pemenuhan kewajiban yakni pengurangan porsi belanja pegawai dimasa yang akan datang. Untuk data realisasi belanja Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022 dan proyeksi Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022 Dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023-2024

Uraian	REALISASI			PROYEKSI	
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja	544.263.658.204,79	599.185.054.472,27	318.573.549.156,00	644.525.458.210,00	670.596.500.185,28
Belanja Operasi	397.517.138.143,22	444.009.727.121,27	287.807.540.348,00	497.210.985.851,54	526.127.098.449,15
Belanja Pegawai	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	204.436.973.940,00	246.305.758.051,80	258.621.045.954,39
Belanja Barang dan Jasa	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	77.094.839.791,00	230.892.261.163,22	247.092.826.525,51
Belanja Bunga	1.152.516.275,72	796.043.279,27	364.262.493,00	1.251.000.000,00	1.276.020.000,00
Belanja Hibah	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	4.844.664.124,00	15.945.517.838,28	16.264.428.195,05
Belanja Bantuan Sosial	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	1.066.800.000,00	2.816.448.798,24	2.872.777.774,20
Belanja Modal	63.699.147.392,57	85.611.045.938,00	4.258.095.930,00	109.622.478.589,85	111.814.928.161,65
Belanja Tidak Terduga	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	239.250.000,00	3.675.887.226,45	3.749.404.970,98
Belanja Transfer	67.371.834.124,00	66.908.297.413,00	26.268.662.878,00	28.338.302.552,45	28.905.068.603,50

* Realisasi Belanja 2022 periode 1 Mei s.d 31 Mei 2022

Sumber Data : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, 2018-2021

Untuk belanja daerah sesuai tabel diatas dapat dilihat bahwa mulai pada tahun 2021 terjadi peningkatan belanja seiring dengan mulai terkendalinya penanganan Covid-19 yang berpengaruh pada tingkat realisasi belanja daerah. Hal yang sama juga diharapkan terjadi pada tahun 2022-2023.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- Alokasi anggaran pengawasan sebesar 1 persen dari APBD sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 (dua puluh lima) persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
- Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (Specific Grant: DAK, DBHCHT, ,belanja untuk SKPD yang

- melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- h. Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yakni bidang pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibumlinmas serta Sosial.
 - i. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kota dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kota dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- Berikut ini proyeksi pengalokasian untuk SPM pada Kota Sawahlunto untuk Tahun 2023

Tabel 3.5
Rekapitulasi Dan Proyeksi Belanja Pemenuhan SPM
Kota Sawahlunto

NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
A. SPM Bidang Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	319.962.556,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.362.756.348,00	2.495.062.350,00	8.351.484.223,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	351.621.410,00	97.179.500,00	135.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	97.804.980,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	568.747.125,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.085.952.661,00	801.125.000,00	1.470.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.955.000,00	-	-
			Pengadaan Mebel Sekolah	206.771.500,00	900.828.425,00	1.330.000.000,00
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	293.950.000,00	298.500.000,00	690.000.000,00
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	323.024.334,00	-	-
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.963.958.826,00	6.902.543.812,00	6.946.793.812,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.072.376.000,00	4.184.265.452,00	200.000.000,00
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	79.385.900,00	-	-
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	247.748.800,00	222.957.500,00	543.998.300,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	5.038.000,00	5.038.000,00



NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	103.062.400,00	185.256.000,00	189.887.400,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.000.000,00	63.050.000,00	64.626.250,00
		Total SPM Pendidikan Dasar		16.083.077.840,00	16.155.806.039,00	19.926.827.985,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	496.107.946,00	-	-
			Penambahan ruang kelas baru	25.000.000,00	-	-
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	224.714.940,00	-	-
			Pembangunan asrama sekolah	607.055.450,00	-	-
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	103.909.680,00	201.375.000,00	206.409.375,00
			pengadaan mebel sekolah	22.756.114,00	423.922.808,00	434.520.878,20
			pengadaan perlengkapan sekolah	646.229.182,00	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	50.000.000,00	-	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	19.563.700,00	-	-
			Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	5.038.000,00	5.038.000,00
			pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	21.549.000,00	128.493.200,00	269.636.000,00
			Penyediaan biaya personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.734.632.435,00	3.709.065.166,00	1.391.585.022,00
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	3.154.869.000,00	155.674.200,00	316.700.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	673.196.400,00	750.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	-	225.366.350,00	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	1.375.071.350,00	405.000.000,00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	273.270.900,00	273.000.000,00
		Total SPM Pendidikan Menengah		9.106.387.447,00	7.170.473.374,00	4.051.889.275,20
		Total Pendidikan Dasar		25.189.465.287,00	23.326.279.413,00	23.978.717.260,20
2	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	264.052.900,00	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	28.000.000,00	414.095.000,00
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	383.598.020,00	89.056.143,00	273.000.000,00
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.846.000,00	-	-
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	67.200.000,00	85.404.930,00	81.900.000,00
			Pengembangan Karir	-	52.846.250,00	140.000.000,00



NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-	450.000.000,00	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	174.500.080,00	
	Total Pendidikan Kesetaraan			743.696.920,00	879.807.403,00	908.995.000,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	201.749.800,00	623.767.000,00	1.981.920.000,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	358.548.680,00	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	231.748.920,00	439.590.000,00	
			Pengadaan Mebel PAUD	-	-	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	-	-	-
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	435.580.500,00	53.521.100,00	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	36.139.000,00	430.095.500,00	499.280.000,00
			Pengelolaan dana BOP PAUD	1.479.000.000,00	1.575.599.550,00	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	252.573.250,00	231.360.050,00	399.757.700,00
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	518.360.000,00	1.653.860.000,00
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-	132.960.000,00	226.658.250,00
	Total Pendidikan Anak Usia Dini			2.995.340.150,00	4.005.253.200,00	4.761.475.950,00
	Total SPM Bidang Pendidikan			28.928.502.357,00	28.211.340.016,00	29.649.188.210,20
B. SPM BIDANG KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	209.777.510,00	420.622.100,00	8.450.000,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				209.777.510,00	420.622.100,00	8.450.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	128.845.000,00	98.174.799,00	8.270.000,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				128.845.000,00	98.174.799,00	8.270.000,00
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	103.363.500,00	102.890.500,00	35.750.000,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				103.363.500,00	102.890.500,00	35.750.000,00
4	Pelayanan Kesehatan balita		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	168.782.200,00	100.867.000,00	7.500.000,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				168.782.200,00	100.867.000,00	7.500.000,00
5	Pelayanan		Pengelolaan Pelayanan	165.551.215,00	285.001.650,00	7.750.250,00

N O	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
	Kesehatan pada usia pendidikan dasar		Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				165.551.215,00	285.001.650,00	7.750.250,00
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	87.787.235,00	48.439.850,00	22.250.500,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				87.787.235,00	48.439.850,00	22.250.500,00
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	117.293.000,00	193.442.720,00	8.215.000,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				117.293.000,00	193.442.720,00	8.215.000,00
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.652.050,00	20.087.500,00	14.087.500,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				9.652.050,00	20.087.500,00	14.087.500,00
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	5.879.800,00	9.000.000,00	12.075.000,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				5.879.800,00	9.000.000,00	12.075.000,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.870.650,00	4.600.000,00	11.275.000,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				11.870.650,00	4.600.000,00	11.275.000,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	89.887.800,00	48.440.000,00	55.445.250,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				89.887.800,00	48.440.000,00	55.445.250,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28.105.110,00	35.813.800,00	30.815.750,00
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				28.105.110,00	35.813.800,00	30.815.750,00
	Total SPM Bidang Kesehatan			1.126.795.070,00	1.367.379.919,00	221.884.250,00
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/kota	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	771.743.944,00	2.987.000.000,00	3.600.000.000,00

NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	1.372.000.000,00	4.574.706.000,00	60.000.000,00
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	591.767.500,00	-	-
Total SPM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				2.735.511.444,00	7.561.706.000,00	3.660.000.000,00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.080.000.000,00	4.451.775.000,00	799.775.000,00
Total SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik				2.080.000.000,00	4.451.775.000,00	799.775.000,00
Total SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				4.815.511.444,00	12.013.481.000,00	4.459.775.000,00
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	120.685.000,00	180.785.000,00	400.785.000,00
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	63.717.750,00	
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	15.932.500,00	
		Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	8.898.000,00	
Total SPM Bidang Kesehatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				120.685.000,00	269.333.250,00	400.785.000,00
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi Dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1.019.551.580,00	65.520.000,00	65.520.000,00
			Penindakan atas Gangguan Ketenraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	6.604.000,00	6.604.000,00	32.100.000,00
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia	-	-	-
			Sosialisasi Penegakan	14.663.550,00	11.175.000,00	30.000.000,00



NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
			Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	114.040.000,00	14.040.000,00	40.000.000,00
	Total			1.154.859.130,00	97.339.000,00	167.620.000,00
	Total Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.154.859.130,00	97.339.000,00	167.620.000,00
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota Sawahlunto (Per Jenis Bencana)	70.530.150,00	28.749.800,00	40.000.000,00
	Total Pelayanan Informasi Rawan Bencana			70.530.150,00	28.749.800,00	40.000.000,00
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Benana	Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	53.322.400,00	21.122.650,00	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	190.580.760,00	88.639.500,00	88.639.500,00
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	58.867.400,00	99.999.900,00	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	280.000.000,00	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	43.000.000,00	393.000.000,00
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	123.725.550,00	1.908.725.550,00
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	79.494.500,00	79.494.500,00
	Total Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			302.770.560,00	735.982.100,00	2.469.859.550,00
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kota Sawahlunto	843.725.500,00	305.000.700,00	305.000.700,00
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	-	17.999.500,00	17.999.500,00
	Total Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			843.725.500,00	323.000.200,00	323.000.200,00
5	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/ Kota	Pencegahan Kebakaran dalam daerah kab/kota	11.840.000,00	8.996.000,00	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kab/kota	1.101.619.888,00	20.025.000,00	254.573.750,00
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	3.952.000,00	10.500.000,00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	3.952.000,00	
	Total Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			1.113.459.888,00	36.925.000,00	265.073.750,00
	Total SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			3.485.345.228,00	1.221.996.100,00	3.265.553.500,00

NO	URAIAN			2021	2022	2023
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
F. SPM Bidang Sosial						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	138.336.700,00	4.300.000,00	8.000.000,00
			Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spritual, dan Sosial	3.415.300,00	-	-
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	34.400.000,00	45.540.000,00	45.450.000,00
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	215.258.000,00	122.100.000,00	176.000.000,00
			Pemberian Layanan Kedaruratan	175.500.000,00	152.400.000,00	270.000.000,00
			Penyediaan Permakanan	31.802.000,00	57.964.800,00	59.413.920,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			598.712.000,00	382.304.800,00	558.863.920,00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-
			Penyediaan Permakanan Lansia Kurang Mampu Tidak Produktif	77.232.050,00	-	-
	Total Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			77.232.050,00	0	0
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	383.719.520,00	329.319.520,00	5.000.000,00
	Total Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ kota			383.719.520,00	329.319.520,00	5.000.000,00
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	-	6.000.000,00	30.000.000,00
				-	6.000.000,00	30.000.000,00
	Total SPM Bidang Sosial			1.059.663.570,00	717.624.320,00	593.863.920,00
	TOTAL SPM			39.536.502.669,00	43.801.154.605,00	42.251.049.880,20

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022 (diolah)

3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman

Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022 Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023-2024**

Uraian	REALISASI			PROYEKSI	
	2020	2021	2022	2023	2024
Surplus/defisit	32.594.205.785,77	-1.144.190.284,82		-974.003.346,50	
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	13.393.565.535,47	44.095.564.695,58	0,00	6.387.940.967,00	6.547.639.491,18
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	0,00	6.357.940.967,00	6.516.889.491,18
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	24.513.000,00	26.460.000,00	0,00	30.000.000,00	30.750.000,00
Uraian	REALISASI			PROYEKSI	
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Piutang Daerah					
Jumlah	13.393.565.535,47	44.095.564.695,58	0,00	6.387.940.967,00	4.880.972.822,18
PENGELUARAN DAERAH					
Penyertaan Modal Daerah	0	3.000.000.000,00		0	0
Pembayaran Pokok Utang	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	0,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00
Pemberian Pinjaman Daerah	752.000.000,00	65.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah	1.918.666.666,66	4.231.666.666,00	0,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00
Pembiayaan Neto	11.474.898.868,81	39.863.898.029,58	0,00	4.721.274.298,00	4.880.972.822,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	44.069.104.654,58	38.719.707.744,76	0,00	3.747.270.951,50	3.214.306.153,18

* Realisasi Pembiayaan 2022 periode 1 Mei s.d 31 Mei 2022

Sumber Data : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, 2020-2021

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD. Aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan Pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya penentuan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-lima atau tahun terakhir dari RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang telah dirubah pada tahun ke-tiga dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Adapun yang menjadi dasar perubahan RPJMD Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19.
2. Telaahan KemenPAN RB terkait SAKIP Kota Sawahlunto
3. Perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2020 dengan visi Presiden yaitu “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian**

Berlandaskan Gotong Royong". Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam Sembilan poin Nawacita yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan Misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.1.2 Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Adapun pengertian dari visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai

sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Visi diatas akan diwujudkan melalui misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

Tujuan yaitu : untuk mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai adaah: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah kehidupan masyarakat.

Tujuan yaitu : untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandasan ABS SBK, meningkatnya budaya literasi dan meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tujuan yaitu : untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Hortikultur, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), meningkatnya pendapatan petani hutan.

4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital

Tujuan yaitu : untuk mewujudkan perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai : Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor, meningkatnya

pertumbuhan investasi, Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah dan meningkatnya peran ekonomi digital.

5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan yaitu : meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat

6. Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan yaitu : terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian serta meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan yaitu : terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Sasaran yang ingin dicapai adalah : terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya kapabilitas birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

Visi Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBERSAMAAN dalam visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun kota disegala bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, pemerintah, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu “ SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA ” serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

KREATIF maksudnya pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk Sawahlunto, baik itu penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, agama, adat istiadat, infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

Dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, maka dapat dilaksanakan melalui beberapa misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
9. Mewujudkan kota berbasis *smart city* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Untuk mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diuraikan pada masing-masing misi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik								
1	Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya		Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto	$((\text{Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun } n - \text{Jumlah zakat pada BAZNAS tahun } n-1) \times 100 \%) / \text{Jumlah zakat pada BAZ } n-1)$	1,23	1,43	1,77	1,77
			Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto	$((\text{Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun } n - \text{Jumlah zakat pada BAZNAS tahun } n-1) \times 100 \%) / \text{Jumlah zakat pada BAZ } n-1)$	1,23	1,43	1,77	1,77
			Persentase Komunitas Budaya yang aktif	$(\text{Jumlah Komunitas budaya yang aktif} / \text{total komunita budaya}) \times 100 \%$	76	84	88	88
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK								
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	$((\text{Nilai PDRB ADHK Tahun } n - \text{dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun } n-1) / \text{Nilai PDRB ADHK tahun } n-1) \times 100\%$	2,9	3,24	4,53	4,53
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	$\text{PDRB ADHB} / (\text{Penduduk Pertengahan tahun})$	59,99	62,93	66,03	66,03



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
			Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,10	2,05	2,01	2,01
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,281	0,280	0,278	0,278
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja / Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	7,55	6,81	6,43	6,43
		Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	401.862,74	409.417,45	418.106,23	418.106,23
		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	10.307,58	10.632,26	11.024,59	11.024,59
			PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	556.832,20	582.684,76	615.823,20	615.823,20



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
		Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	329.730,34	336.849,19	344.355,30	344.355,30
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	68,91	70,56	72,33	72,33
		tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	36	36	41	41
Misi 3: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)								
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	73,17	73,63	74,09	74,09
		Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,18	13,19	13,20	13,20



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
		karakter diseluruh jenjang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,75	11,01	11,30	11,30
			Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	20	25	30	30
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif								
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintahan Daerah oleh Kemenpan RB	52,93 (CC)	60,05 (B)	61,54 (B)	61,54 (B)
		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	B (64,57)	B (68,22)	BB (72,83)	BB (72,83)
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	4,04	4,19	4,45	12,68



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
		Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	66	70	75	75
2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman		Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,044	0,046	0,049	0,139
	dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,044	0,046	0,049	0,139
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat								
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	73,17	73,63	74,09	74,09
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,14	70,28	70,42	70,42

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
		Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	6,10	6,0	5,90	5,90
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan								
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	2,9	3,24	4,53	4,53
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	59,99	62,93	66,03	66,03
			Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,1	2,05	2,01	2,01
			Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,281	0,280	0,278	0,278
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	80.359,32	87.536,71	95.714,10	95.714,10
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	1,86	1,98	2,13	2,13
Misi 7: Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai								
1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan		Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	79,69	81,71	83,57	83,57



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir	
					2021	2022	2023		
	lingkungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	63,42	65,07	66,73	66,73	
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	47,72	49,22	51,22	51,22	
		Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,53	0,55	0,57	0,57	
				Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	47,72	49,22	51,22	51,22
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	-	-	-	-	
				Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	65,18	65,70	66,22	66,22	
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	88	89	90	90	

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	10,08	8,9	7,5	7,5
			Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	83,54	72,93	19,08	19,08
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	88,01	89,05	90,1	90,1
Misi 8: Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya								
1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,50	95,51	95,52	95,52
		Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	89,84	94,78	100	100



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Target			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,50	95,51	95,52	95,52
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor								
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	52,93 (CC)	60,05 (B)	61,54 (B)	61,54 (B)
		meningkatkan kualitas pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,92	2,96	3,10	3,10
			Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	83,34 (B)	86,55 (B)	89,87 (A)	89,87 (A)



Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel persandingan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Visi dan Misi Nasional Adapun keterkaitan antara misi Nasional, misi Provinsi Sumatera Barat dan Misi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Matriks keselarasan Visi dan Misi Nasional, Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto

NASIONAL 2020-2024		PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASAN GOTONG ROYONG		VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA	
MISI 1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	MISI 1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengalaman, terampil dan berdaya saing	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)	MISI 3
				Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat	MISI 5
				Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	MISI 8
MISI 2	Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing	MISI 3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK	MISI 2
		MISI 4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital		
		MISI 5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan	MISI 6



NASIONAL 2020-2024		PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASAN GOTONG ROYONG		VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA	
NASIONAL 2020-2024		PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
MISI 3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	MISI 6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai	MISI 7
MISI 4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan				
MISI 5	Kemajuan budaya mencerminkan kepribadian bangsa	MISI 2	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	MISI 1
MISI 6	Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	MISI 4
				Mewujudkan kota berbasis <i>smart city</i> dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor	MISI 9
MISI 7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	MISI 2	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	MISI 1
MISI 8	Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya	MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	MISI 4



NASIONAL 2020-2024		PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASAN GOTONG ROYONG		VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA	
MISI 9	Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan	MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	MISI 4

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19.

Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) serta selaras dengan pembangunan Nasional dan Provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan mengangkat tema pembangunan “ **Pemulihan Ekonomi Melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal** “ adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
2. Peningkatan produktivitas sektoral ekonomi
3. Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark
4. Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
5. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Mall Pelayanan Publik (MPP)
6. Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah

4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

4.2.1.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Preside, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi covid-19 dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Adapun tema RKP Tahun 2023 adalah “ **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan** “.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional Tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 yaitu:

Dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 sudah ditetapkan tujuh agenda pembangunan nasional yang juga sekaligus Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. PN 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10– 18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;

2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3. kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton); (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
5. Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta mempedomani RPJMN 2020-2024. Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan prioritas Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas sektoral ekonomi Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Tabel 4.4 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pendukung Prioritas Nasional

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.587.225.434
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik	



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Kantor	358.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	348.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	673.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	474.300.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.559.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.675.965.648
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.675.300
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.875.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	350.000.000
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	700.000.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.351.484.223
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	135.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	125.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	125.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.470.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000
				Pengadaan Mebel Sekolah	1.330.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	690.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.946.793.812
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	36.800.000
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	50.000.000
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	543.998.300
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.038.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	391.864.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	316.700.000
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	200.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Asrama Sekolah	500.000.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	405.000.000
				Pengadaan Mebel Sekolah	640.031.200
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	320.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.391.585.022
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.200.000
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	273.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.038.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	269.636.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	270.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.981.920.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	446.512.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	250.000.000
				Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-
				Pengadaan Mebel PAUD	202.449.900
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.653.860.000
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	200.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	52.000.000
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	402.446.440
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	226.658.250
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	20.500.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	701.800.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Satuan PAUD	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	499.280.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	399.757.700
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	-
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	82.900.000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200.000.000
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	200.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	414.095.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	135.000.000
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	150.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	273.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.900.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	140.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	600.000.000
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-
				Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	375.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			raan		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.018.873.038
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.561.000
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.824.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.986.500
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.643.500
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.570.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.649.700
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.157.928
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.408.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	790.800.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.790.000
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.500.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	25.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	375.000.000
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	102.550.000
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	35.000.000
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64.347.350
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.450.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.270.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.750.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.500.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.750.250
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.250.500
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.215.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.087.500
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.075.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.275.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	55.445.250
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.815.750
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	IV-27 35.750.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	205.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.322.150
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.100.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.500.000
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.500.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.500.000
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	20.000.000
				Pelayanan Kesehatan	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.754.000
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.991.653.650
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10.650.000
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.000.000
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	45.000.000
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	209.476.700
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	4.500.000
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	35.000.000
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.500.000
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	31.503.850
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	15.193.300
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.550.000
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.500.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.720.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.730.000
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	8.050.000
			Penerbitan	Pengendalian dan	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	18.500.000
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5.650.250
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.790.000
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.594.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8.500.000
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11.000.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.050.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000
				Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5.250.000
			Pemetaan	Pencatatan dan	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Keluarga	4.895.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3.750.000
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.525.000
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5.250.000
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.350.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	4.500.000
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.750.000
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	379.232.376
				Operasional Pelayanan Puskesmas	58.975.250
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	570.736.860



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Operasional Pelayanan Puskesmas	70.248.797
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	612.158.172
				Operasional Pelayanan Puskesmas	81.645.588
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.201.371.972
				Operasional Pelayanan Puskesmas	142.428.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	465.189.840
				Operasional Pelayanan Puskesmas	66.608.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	355.450.512
				Operasional Pelayanan Puskesmas	36.907.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	125.000.000
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	IV-31 132.550.000
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.620.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
				Pengadaan Mebel	-

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	892.976.640
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.180.530.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425.580.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-
				Pengadaan Obat, Vaksin	-
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	-
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.175.000.000
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	268.400.000
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	177.500.000
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	200.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.513.015.196
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	275.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	451.600.000
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.430.436.191
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	205.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023						
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6		
Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	UMUM DAN PENATAAN RUANG		Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Penampung Air Lainnya			
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	-	
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	305.000.000	
					Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	800.000.000	
					Pembangunan Unit Air Baku	-	
					Normalisasi/Restorasi Sungai	1.860.000.000	
					Operasi dan Pemeliharaan Sungai	600.000.000	
						605.000.000	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000
						Pembangunan Bendung Irigasi	1.200.000.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	550.000.000
						Rehabilitasi Bendung Irigasi	400.000.000
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	650.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	3.600.000.000		
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	60.000.000 IV-33		
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	799.775.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000		
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	875.000.000		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	500.000.000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	7.535.000.000		

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		PERMUKIMAN	Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300.000.000
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000.000
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	736.907.253
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.000.000.000
				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.000.000.000
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000
				Pembangunan Jalan	4.709.438.750
				Rekonstruksi Jalan	9.090.000.000
				Rehabilitasi Jalan	4.155.000.000
				Pemeliharaan Rutin Jalan	3.458.575.000
				Pembangunan Jembatan	6.550.000.000
				Rehabilitasi Jembatan	600.000.000
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	500.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	200.000.000
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	-
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	33.242.750
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	200.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	800.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan	130.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Daerah	
				Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	75.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.202.526.792
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.930.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.350.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.663.210
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.475.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.847.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.148.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.868.650
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.879.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.950.962
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.709.200.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	398.177.400
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.940.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.200.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000
Membangun Lingkungan Hidup,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	5.200.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	LINGKUNGAN HIDUP	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	22.511.800
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	16.813.200
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	227.387.000
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	43.641.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.744.223.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	63.717.750
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	400.785.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.530.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.300.000
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.867.500
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	236.512.980
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5.200.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Iklim					
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	22.511.800
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	16.813.200
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	227.387.000
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	43.641.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.744.223.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	63.717.750
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	400.785.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.530.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.300.000
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.867.500
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.848.313.537
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	428.880.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.499.100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.122.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.529.950
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.131.685
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.315.481.600
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.110.250
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.360.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	65.520.000
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	32.100.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	70.000.000
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.000.000
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.896.000
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.000.000
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.000.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	254.573.750
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	28.700.000
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	50.000.000
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	10.500.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	28.500.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	11.900.000
				Penyediaan Sandang	-
				Penyediaan Alat Bantu	8.000.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	45.450.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	176.000.000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	270.000.000
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	-
				Penyediaan Permakanan	100.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	327.115.600
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	30.000.000
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11.700.000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	5.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.346.000
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	32.184.700
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	393.006.168
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5.000.000
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	450.000.000
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	13.600.000
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	51.847.250
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	18.162.000
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	70.000.000 IV-41
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	74.551.750
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.667.032.834
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.400.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.966.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.400.000
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	419.186.500
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.000.000
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.000.000
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	IV-43 20.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	835.977.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.000.000
				Pemeliharaan Mebel	8.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	16.000.000
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36.000.000
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	290.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	11.000.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7.500.000
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	50.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu	30.000.000



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.000.000
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	2.500.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	15.000.000
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	84.474.200
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	86.000.000
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	70.000.000
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	298.000.000
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	50.000.000 IV-45
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	100.000.000
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.395.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	30.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	150.000.000
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	960.000.000
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	200.000.000
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	725.000.000
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	800.000.000
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	10.000.000
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	95.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	15.000.000
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	223.000.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	30.000.000
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	25.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	160.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	330.000.000
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	35.000.000
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20.000.000
				Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	20.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRAS I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.534.393.468



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Berdaya Saing	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.189.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.670.047
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IV-47 100.000.000
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	138.330.800
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15.000.000
				Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	14.420.410
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang	25.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	30.000.000
				Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	25.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	10.000.000
				Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16.500.000
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	33.560.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	350.000.000
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	640.000.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	50.000.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	525.000.000
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	56.588.600
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	500.000.000
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21.240.000
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	45.796.250
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11.425.215
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin	480.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.777.035.083
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	116.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.461.900
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.941.100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.460.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.105.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.650.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.750.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.570.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.880.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.500.000 IV-49
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7.150.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	500.000.000



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Dasar					
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	70.000.000
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	80.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	35.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.591.676.877
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.785.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.624.946.771
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	152.145.500
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.854.500
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	IV-51 25.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	45.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	70.000.000
Meningkatkan	URUSAN	PROGRAM	Penyelenggaraan	Pameran Dagang Lokal	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PEMERINTAH AN BIDANG PERDAGANGAN	PENGEMBANGAN EKSPOR	Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	135.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	200.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	140.000.000
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.544.643.378
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.249.200
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.971.442
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.936.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.151.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.423.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.655.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.108.600
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	974.350.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.050.650
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.220.000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	55.000.000
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	55.000.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	775.523.070
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	71.397.800
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	150.000.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	40.000.000
				Perluasan Kesempatan Kerja	120.000.000
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	20.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.000.000
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.000.000
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.160.000
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	150.000.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	31.250.400
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis	80.509.200

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		MODAL	Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	25.335.000
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3.119.900
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.472.832.633
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.579.190
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.075.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.190.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.183.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.340.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.497.383
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.191.874.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.147.050
				Pemeliharaan Mebel	3.750.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.500.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	144.105.000
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	85.000.100
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	120.000.000
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	53.830.000
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	20.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	172.572.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	135.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	8.000.000
				Penetapan Cagar Budaya	15.000.000
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	213.855.000
				Pengembangan Cagar Budaya	565.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum	40.000.000
				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	IV-55 3.263.855.510
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.806.722.727
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.350.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.652.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	18.043.750
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.596.932
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.754.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.987.950
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.236.080
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	7.557.500
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.641.750
				Pengembangan Bahan Pustaka	31.981.000
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	7.400.450
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	20.975.000
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	66.516.000
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	19.278.900
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	20.000.000
				Pengawasan Arsip Dinamis	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Kewenangan Kabupaten/Kota	51.414.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	8.462.500
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	20.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.976.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.518.508.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.801.193
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000
				Pemeliharaan Mebel	5.808.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.078.800
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.223.200
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.154.140
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.781.777.913
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.245.030
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.179.800
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.317.100
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.683.525
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.136.000
				Penyelenggaraan Rapat	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.310.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	30.000.000
				Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	338.619.500
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	300.000.000
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	30.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	700.000.000
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	217.500.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	150.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.835.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	245.000.000
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	50.000.000
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	100.000.000
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	230.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	435.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.000.000.000
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.349.278.180
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.471.924.565
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	6.600.000
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	6.600.000
				Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	230.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	201.963.490
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	989.085.160 IV-59
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	70.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	30.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	20.373.280

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		EKONOMI KREATIF	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	50.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	35.000.000
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5.000.000
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.000.000
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	5.000.000
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	75.000.000
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	295.272.200
				Pelayanan Informasi Publik	48.546.400
				Layanan Hubungan Media	426.195.925
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	10.000.000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	114.220.000
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.800.000.000
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	5.000.000
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	250.000.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	15.000.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	30.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	30.000.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	10.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47.123.420
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8.324.100
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	12.877.800
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	11.049.080
				Pengembangan Infrastruktur	1.736.200
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.465.000
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.996.350
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	21.246.500
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.200.000
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.200.000
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV-61 2.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.712.392.182
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.640.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.190.425
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.806.275
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	339.751.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.227.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.181.167.735
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.928.616.200
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	503.055.658
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.254.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	707.022.640
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.343.740.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.364.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.620.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	658.000.000
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	273.840.623
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	379.600.000
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59.500.000
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	427.442.680
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	335.482.260
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	47.917.440
			Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	48.560.100
				Fasilitasi Pelayanan Publik	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				dan Tata Laksana	95.512.000
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	128.968.500
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	314.358.000
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	93.850.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	201.774.300
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	131.024.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	312.884.000
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.655.038.340
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.714.074.250
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.167.259.500
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	37.755.500
				Fasilitasi Bantuan Hukum	255.400.000
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	32.973.700
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.192.800.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	93.925.000
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	85.766.000
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20.327.750
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	83.170.000
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	28.596.150
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	113.709.500
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	141.515.750
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SEKRETARIA T DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.818.795.771
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.500.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.500.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425.000.000
				Pemeliharaan Mebel	15.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	250.000.000
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000
			Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	250.000.000
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	300.000.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	150.000.000
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	50.000.000
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD	700.000.000
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	60.000.000
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	1.500.000.000
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	175.000.000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50.000.000



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	300.000.000
			Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.229.760.000
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.830.750.520
			Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.121.164
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.375.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.004.300
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IV-65 100.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	62.632.800
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	43.116.660
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9.261.035
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	147.446.035
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	423.421.179
			Analisis Data dan	Pembinaan dan Pemanfaatan	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	64.882.000
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	27.851.900
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.793.460
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.000.000
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.000.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.000.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.000.000
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.000.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.000.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.768.750
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.278.300
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.500.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.193.450
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.131.250
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	13.100.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.500.000
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.000.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.500.000
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	164.000.000
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	156.831.000
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitangan	-
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.000.000 IV-67
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000.000
			Administrasi Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.585.114.600
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.250.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.250.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000
			Administrasi	Penyediaan Komponen	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Umum Perangkat Daerah	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.390.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.500.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	963.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.500.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.500.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.500.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	225.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	197.015.000
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	39.527.000
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	38.455.000
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30.000.000
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	228.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	228.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	115.100.000
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	69.900.000
			Koordinasi dan Pengelolaan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	49.500.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Perbendaharaan Daerah		
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	33.000.000
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	85.000.000
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	20.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34.500.000
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	20.000.000
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	65.500.000
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	15.000.000
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	27.500.000
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	IV-69 23.089.000
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	110.000.000
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	15.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	54.000.000
				Penyusunan Sistem dan	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	15.000.000
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.250.000.000
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	57.169.231.000
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.382.909.465
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.239.217.000
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	62.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	45.000.000
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	45.000.000
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	15.000.000
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	75.000.000
				Pengamanan Barang Milik Daerah	300.000.000
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	490.000.000
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.500.000
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11.000.000
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	16.500.000
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	44.000.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	44.000.000
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	55.000.000
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	82.500.000
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	27.500.000
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	16.500.000
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	90.200.000
				Penagihan Pajak Daerah	165.000.000
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	16.500.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023					
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	33.000.000	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.823.251.439	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.400.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.980.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.800.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.750.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.440.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.920.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.700.000
					Pengadaan Mebel	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.775.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.651.815
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.413.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.926.750
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Pemeliharaan Mebel	5.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.010.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.636.000 IV-71
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	241.215.269			
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	35.200.000		
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30.173.750		
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	250.000.000		
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.000		
			Pengelolaan Promosi ASN	6.000.000		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	499.962.000		
			Pengelolaan Assessment Center	75.000.000		
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	150.000.000		
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40.000.000		

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	183.250.000
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	100.000.000
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	50.000.000
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40.341.000
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	15.000.000
				Pembinaan Disiplin ASN	10.625.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	50.000.000
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	133.486.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.327.300.516
			Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.434.669
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.322.059
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.745.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.198.910
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.350.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	162.554.500

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Daerah	Jabatan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	83.319.350
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37.230.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	53.524.000
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.800.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.220.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IV-73 45.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	30.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370.000.000
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	10.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	479.500.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	479.500.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	477.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.398.893
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	655.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IV-75 4.800.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.220.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370.000.000
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	10.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	479.500.000



RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Berkualitas Dan Berdaya Saing		DAN PELAYANAN PUBLIK	yang Dilimpahkan kepada Camat	yang Dilimpahkan	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	479.500.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	477.000.000
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.398.893
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	655.000.000
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.783.336.020
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		DESA DAN KELURAHAN	Desa	Pembangunan di Desa	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	235.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.500.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.000.000
				Pemeliharaan Mebel	3.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.000.000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73.000.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.920.300
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	6.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		UMUM	Penugasan Kepala Daerah	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.000.000
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	114.400.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42.710.100
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	695.788.900
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.783.336.020
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IV-579.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	235.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
Berdaya Saing		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.500.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.000.000
				Pemeliharaan Mebel	3.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.000.000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73.000.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.920.300
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.000.000
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	640.650.750
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	129.350.000
				Pemberdayaan Masyarakat di	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan	82.898.250
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	550.899.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	282.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	114.400.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42.710.100
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	695.788.900
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	552.899.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	250.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	573.048.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	212.450.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IV-81 67.400.200
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	570.899.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	250.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32.000.000
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.320.000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.899.900
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	5.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			yang Dilimpahkan kepada Camat	yang Dilimpahkan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.760.000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	175.745.300
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.465.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.010.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.263.554.004
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.500.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.850.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.431.200
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.913.200
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	830
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.670.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.261.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.756.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.688.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.258.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.604.000
				Pemeliharaan Mebel	2.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.530.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.276.504.568
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.750.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.898.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IV-83 41.710
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.869.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000
				Pemeliharaan Mebel	1.500.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	5.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.499.850
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	272.318.255
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.300.000
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.499.900
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.500.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.500.000
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	147.949.800
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	47.653.000
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	399.999.900

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	88.639.500
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	393.000.000
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.908.725.550
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	79.494.500
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	305.000.700
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	17.999.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.887.000
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	634.664.124 IV-85
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	15.000.000

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	335.000.000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	205.015.300
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	350.000.000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216.560.700
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.648.400
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.612.024.088
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.647.500
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.825.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.800.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.827.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.750.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000
				Penyelenggaraan Rapat	

RPJMN 2020-2024	RKPD 2023				
Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.875.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	844.254.000
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila dan KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000
				TOTAL	644.525.458.210

4.2.1.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat

Selain berpedoman terhadap prioritas Nasional, Pembangunan Kota Sawahlunto juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan pembangunan Nasional tema pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan daerah yang terdampak pandemic covid-19 yaitu “ **Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi** ”.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, berikut merupakan sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adaah sebagai berikut:

IV-87

Tabel 4.5
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produktivitas sektoral ekonomi
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Peningkatan produktivitas sektoral ekonomi
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata melalui keunggulan warisan budaya dunia dan geopark
6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang	Penyelesaian permasalahan layanan

No	Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023
	berkeadilan dan berkelanjutan	infrastruktur kota
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Dalam mendukung program unggulan provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Kota Sawahlunto telah merencanakan beberapa program pendukung yang selaras dengan program/kegiatan yang ada di Kota Sawahlunto untuk Tahun 2023. Adapun dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Program Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 Dalam Mendukung Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

No	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	Dukungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023		
		Program Pendukung	Indikator	Target
1.	Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2023	96 orang
		Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	10 orang
		Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	60 orang
2.	Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10 persen anggaran Pemerintah Provinsi untuk sektor pertanian	Pengadaan Benih/Bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	225 ekor
		Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	4 unit
		Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dokumen
3.	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 Laporan
		Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	225 ekor
		Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala	12 laporan

No	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	Dukungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023		
		Program Pendukung	Indikator	Target
		kecil	kecil	
		Penyediaan pelayanan jasa medic veteriner	Jumlah pelayanan jasa medic veteriner	12 laporan
4.	Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan	Perlindungan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	1 objek
		Pengembangan Cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	1 objek
		Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	Jumlah sumber daya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	6 orang
5.	Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1053 orang
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1120 orang
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar	1100 orang
6.	Intervensi Gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni remaja putri dan wanita usia subur dan anak berusia 24 – 59 bulan	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	3944 orang
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	9957 orang
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	700 orang
7.	Intervensi gizi sensitive yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen hasil bimbingan teknis 7 supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	1 dokumen
		Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BLK), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BLK), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	37 kelompok
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis masyarakat	7 lokasi
8.	Meningkatkan kapasitas pelayanan Kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 dokumen

No	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	Dukungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023		
		Program Pendukung	Indikator	Target
	dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 dokumen
9.	Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	1 paket
10.	Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	25 orang
		Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	80 orang
		Pengadaan Perlengkapan siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	2 unit
11.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertaniandan perikanan	Pembangunan embung dan penampungan lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya	1 unit
		Rehabilitasi Jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	1 Km
		Operasi dan pemeliharaan bending irigasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0,5 Km
12.	Percepatan Pemerataan konektivitas dan integrasi system infrastruktur transportasi (darat, laut, udara) untuk meningkatkan	Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	Luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan	12000 M2

No	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	Dukungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023		
		Program Pendukung	Indikator	Target
	efisiensi pergerakan orang dan barang			
		Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	2 KM
		Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekontruksi jalan	6 KM

4.2.2 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD tahun 2023, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang bersifat mendukung atau *supporting*. Berikut merupakan sasaran pembangunan dan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2023

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program
1	2	3	5	7	8
1	Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing				
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun (%)	50	Setdako (Bagian Kesra)	13.700.983.590
		Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	60		
		Persentase Imam Masjid yang berkualitas (%)	100		
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	100	Dinas Sosial PMDPPA	616.350.000,91
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	101,3	Dinas Pendidikan	38.583.247.847
		APM SMP	93,5		
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	30		
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	97	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	17.188.707.617
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	82		
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan	≤ 4,00		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program
1	2	3	5	7	8
		RSUD			
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Keluarga Sehat (%)	37		48.550.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	92		46.770.000
7	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	100	Dinas PM PTSP Naker	110.000.000
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	90	Dinas PM PTSP Naker	996.920.870
9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,35	Dinas PM PTSP Naker	180.000.000
2	Prioritas 2 : Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2		340.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	1,5		70.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	53	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	70.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	50		
		Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	422		500.000.000
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	2,5		3.075.000.000
6	POGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	01:10	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
		Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	15.747		3.075.000.000
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1.730		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	569		

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program
1	2	3	5	7	8
		Daging Sapi (ton)	355,68		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	900,26		
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135,86		
3	Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	90	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6.444.402.745
		Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	61,76		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	33.000	Dinas Kebudayaan PBDP	366.855.510
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase budaya benda yang lestari (%)	63,92	Dinas Kebudayaan PBDP	801.855.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	105.373.280
		Persentase MoU kemitraan aktif (%)	90		
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan (orang)	1.300.000		
4	Prioritas 4 : Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	50,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.675.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	72,21		31.363.013.750
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	89		IV-93
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	66		22.036.907.253
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	22,22		1.538.242.750
		Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota	21		
		Persentase bangunan ber IMB	66		
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase PSU yang tertata (%)	85	Dinas KP2LH	1.530.000.000

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program
1	2	3	5	7	8
	(PSU)				
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	90		814.686.715
5	Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	90	Setdako	81.110.600
2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP	B	Dinas PM PTSP Naker	500.000.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	25	Dinas PM PTSP Naker	150.000.000
4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)	30		31.250.400
		Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	10		
		Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	1		
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPPTSPNaker	B		108.964.100
6	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	95	SETDAKO	1.064.234.525
		Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)	3		
7	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	95		
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	12		104.107.850
6	Prioritas 6 : Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah				
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	40	Barenlitbangda	320.831.000

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	OPD Pelaksana	Pagu Program
1	2	3	5	7	8
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	100	Inspektorat	120.549.350
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP (Level)	level 4		53.524.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)	2	BKPSDM	183.486.000
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	Barenlitbangda	831.405.069
6	PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	100	Barenlitbangda	315.971.750
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	100		
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah kedalam RKPD (%)	100		
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	BPKAD	65.992.943.465 IV-95
		Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)	90		
		Maksimal Defisit APBD (%)	4,1		
8	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	95	BPKAD	1.025.500.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100	BPKAD	601.700.000
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar	12	SETDAKO	356.507.544.480

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.3.1 Arah Kebijakan Terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

Tabel 4.8
Arah Kebijakan Terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	Meningkatkan kapasitas dan kualitas, pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan
	Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat
	Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
	Memfasilitasi peningkatan kualitas imam di masjid-masjid
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
	Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan
	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto
	Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan
	Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas
	Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK
	Melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan
	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri
	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi
	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum pendidikan dalam mengarahkan minat bakat siswa
	Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi
	Menyediakan data dan informasi yang up to date terkait tenaga kerja secara online
	meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online
	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
	Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan
	Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri
	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.1
	Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas
	Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri
	Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update
	Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
	Meningkatkan koordinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
	Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi
	Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi
Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi	
Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi	

MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
	<p>Meningkatkan daya saing usaha koperasi</p> <p>Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM</p> <p>Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan</p> <p>Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto</p> <p>Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir</p> <p>Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan</p> <p>Mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam penggunaan Teknologi dalam pemasaran dan peningkatan usaha</p> <p>Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah</p> <p>Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat</p> <p>Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif</p> <p>Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur</p> <p>Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto</p> <p>Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)</p> <p>Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan</p> <p>Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan</p> <p>Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat</p> <p>Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan</p> <p>Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi</p> <p>Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak</p> <p>Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian</p> <p>Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran</p> <p>Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat</p> <p>Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial</p> <p>Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan</p> <p>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat</p> <p>Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidaya ikan</p> <p>Meningkatkan kualitas promosi investasi</p> <p>Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal (P)</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan</p> <p>Memberikan kemudahan bagi investor</p> <p>Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto</p> <p>Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto</p>
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia dini</p> <p>Memberikan reward dan penghargaan terhadap siswa dan Mahasiswa berprestasi</p> <p>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millennial, nyaman dan menyenangkan secara merata</p>

MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
Pintar)	Memberikan bantuan sarana dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru SD dan SMP
	Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
	Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik serta Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan
	Melakukan Kerja Sama dengan guru di Daerah lain dengan bentuk Magang guru dan studi Banding
	Peningkatan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan
	Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan luar sekolah dan Mengoptimalkan fungsi SKB
	Meningkatkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi/Universitas Favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan Pendidikan termasuk Pendirian Kampus Dikota sawahlunto
	Mempermudah Perizinan di bidang Pendidikan
	Peningkatan pengelolaan dan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
	Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
	Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
	Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif
Pengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan	
Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan	
Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian	
Meningkatkan komitmen daerah terhadap pemanfaatan hasil penelitian	
Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan	
Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan	
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT	
Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi	
Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah	
Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD	
Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri	
Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif	
Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan	
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan	
Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya	
Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD	
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	
Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda	
Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat	Melakukan Pengekrutan dan Penyebaran tenaga Kesehatan termasuk pengembangan sistim Karir dan penjenjangan serta insentif finansial dan non finansial untuk pemenuhan tenaga Kesehatan
	Memperkuat Kerja Sama dengan daerah/ Negara lain sebagai Upaya Peningkatan SDM Kesehataan dalam melayani Masyarakat
	Memberikan Fasilitas dan insentif bagi dokter Spesialis untuk menjamin kenyamanan bekerja di Kota Sawahlunto
	Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya

MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
	<p>pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan</p> <p>Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat</p> <p>Menyusun, Menetapkan dan melaksanakan berbagai standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistem <u>monitoring dan evaluasinya</u></p> <p>Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan</p> <p>Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak</p> <p>Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik</p> <p>Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia</p> <p>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam <u>pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</u></p> <p>menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)</p> <p>Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat</p> <p>Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat</p> <p>Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran</p> <p>meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga</p> <p>Meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19</p> <p>Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan</p> <p>Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui</p> <p>Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak</p>
<p>Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan</p>	<p>Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah</p> <p>Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark</p> <p>Menyediakan fasilitas umum dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya di objek wisata</p> <p>Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus</p> <p>Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto</p> <p>Melaksanakan event-event kepariwisataan yang berskala nasional dan internasional</p> <p>Menyediakan atraksi wisata yang berkualitas dan aman bagi pengunjung</p> <p>Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran</p> <p>Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM promosi Pariwisata</p> <p>Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata</p> <p>Melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri pariwisata</p> <p>Meningkatkan Kualitas serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata</p> <p>Meningkatkan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah terdepan dengan lembaga pariwisata</p> <p>Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto</p> <p>Memberikan fasilitas dan pembinaan terhadap peningkatan kualitas SDM</p>

MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
	<p>pelaku ekonomi kratif</p> <p>Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan</p> <p>Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan</p> <p>Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan</p> <p>Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan</p> <p>Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum</p> <p>Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WT BOS</p> <p>Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka</p> <p>Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat</p> <p>Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya</p> <p>Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum</p>
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai	<p>Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto</p> <p>Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota</p> <p>Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi daerah</p> <p>Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi utilitas kota</p> <p>Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial</p> <p>Meningkatkan pelayanan moda transportasi Kota</p> <p>Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api</p> <p>Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas</p> <p>Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya</p> <p>Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban</p> <p>Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata</p> <p>Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum</p> <p>Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan</p> <p>Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana</p> <p>Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak</p> <p>Memperjelas status hukum kepemilikan tanah garapan di Kota Sawahlunto</p> <p>Meningkatkan kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah</p> <p>Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto</p> <p>Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan</p> <p>Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana</p> <p>meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana</p> <p>Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana</p> <p>Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana</p> <p>Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana</p> <p>Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat</p>

MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 UNTUK TAHUN 2023
	<p>dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah</p> <p>Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendalian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan</p> <p>Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup</p> <p>Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan</p> <p>Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup</p> <p>Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan</p> <p>Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan</p> <p>Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,</p> <p>Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan</p> <p>Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan</p> <p>meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata</p> <p>Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang</p> <p>mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman</p> <p>Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh</p> <p>Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh</p>
<p>Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya</p>	<p>Memberikan bantuan dan fasilitasi permukiman, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya</p> <p>Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota</p> <p>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal</p> <p>Melaksanakan pemeliharaan TMP</p> <p>Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan</p> <p>Meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>Menerapkan anggaran berbasis gender</p> <p>Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan</p> <p>Meningkatkan perlindungan terhadap anak</p> <p>Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender</p>
<p>Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor</p>	<p>Menyediakan regulasi tentang tata kelola smart city</p> <p>Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi</p> <p>Menyediakan dan meningkatkan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi</p> <p>Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah</p> <p>Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City</p> <p>Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi</p>

4.3.2 Arah Kebijakan Terkait Prioritas Pembangunan

Untuk melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2023, kebijakan yang akan diambil adalah :

1. *Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing*

Kebijakan yang akan diambil prioritas pembangunan ini adalah lebih meningkatkan kualitas pengelolaan rumah tahfidz. Selain itu, Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan juga akan diterapkan untuk tahun 2023. Disektor pendidikan, reward bagi mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi akan tetap dilanjutkan, selain bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru di SD dan SMP sederajat. Mengoptimalkan fungsi BLK dalam mengadakan pelatihan juga akan jadi perhatian untuk menjamin kualitas tenaga kerja meningkat. Pada tahun 2023, Penambahan prodi baru pada program PSDKU akan tetap diwujudkan

2. *Kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi*

Dengan dibangunnya sentra IKM tahun 2022, kebijakan utama yang akan diambil tahun 2023 adalah bagaimana mengoperasikannya mulai dari alur pengelolaan sampai pengorganisasiannya. Untuk sector pertanian, kebijakan pemberian bantuan bibit tanaman dan ternak tetap dilanjutkan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pertanian. Pada tahun 2023, juga akan diupayakan pusat pelayanan dan pendampingan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dalam bentuk Pusat Layanan Usaha terpadu

3. *Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional*

Tahun 2023 diharapkan sektior pariwisata sudah dapat beroperasi dengan normal kembali. Momen ini akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keunggulan pariwisata Kota sawahlunto dalam mendatangkan wisatawan. Kebijakan yang akan diambil adalah bagaimana pengelolaan dan penataan bangunan dan benda cagar budaya menjadi objek daya Tarik wisata dengan penataan kawasan kota lama sebagai pusat daya Tarik nya. Disamping itu, status geopark nasional sawahlunto yang belum berdampak signifikan terhadap pariwisata daerah, akan dioptimalkan kembali. Pembentukan badan pengelola yang ditargetkan selesai tahun 2022 ini, diharapkan dapat berfungsi dengan baik pada tahun 2023. Mengoptimalkan Peran Pokdarwis untuk pengemangan desa wisata (diutamakan Kawasan Geopark dan WT BOS) juga akan ditingkatkan. Pelaksanaan event-event yang setara dengan Siscca juga akan ditambah, untuk menambah daya Tarik wisatawan berkunjung

4. *Kebijakan terkait Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota*

Kebijakan utama dalam permasalahan infrastruktur kota pada tahun 2023 adalah penataan kawasan Kota lama, yang diawali penataan batang lunto. Kebijakan lain yang jadi focus adalah konektivitas dari dan ke Kota sawahlunto.

5. *Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP*

Kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan public ini adalah mengoptimalkan fungsi Mall Pelayanan Publik. Ditambah dengan penetapan Peraturan daerah tentang SOTK Baru dengan ditetapkannya Dinas Kominfo, diharapkan kualitas pengelolaan teknologi informastika Kota sawahlunto dapat menjadi lebih baik. Jika hal ini dapat terlaksana, Sawahlunto yang smart city pun akan dapat terwujud.

6. *Kebijakan terkait Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah*

Penyederhanaan dan pemappingan jabatan structural yang telah dilaksanakan paada akhir tahun 2021, akan dimalsimalkan pada tahun 2023 pelaksanaannya. Terkait alur pelaksanaan kerja, pembagian kerja dan penyepakatan kinerja harus optimal pada tahun 2023. Kebijakan utama yang diambil adalah peningaktan kapasitas SDM fungsional penyetaraan dan penetapan alur kinerja yang jelas sebagai bentuk pemantapan reformasi birokrasi pemerintah.

4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Terkait Pemulihan Ekonomi

Dengan melandainya kasus pandemic covid 19, Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2023 :

1. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan* terhadap sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat seperti Kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM yang terdampak covid-19. Kemudahan ini ^{IV-103} berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Prioritas kebijakan disini adalah memaksimalkan fungsi Mall Pelayanan Publik pada tahun 2023.

2. *Fokus Pada Kemampuan Masyarakat Terkait Peningkatan Pendapatan*

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

a. Mengoptimalkan Balai Latihan kerja dalam Meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja.

Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru.

Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya. Pada tahun 2023, dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Sawahlunto yang berlokasi di Parambahan, ditargetkan sebanyak 6 Paket pelatihan, dengan target peserta sebanyak 96 peserta.

- b. Mengoptimalkan UPTD Dana bergulir untuk Memfasilitasi bantuan permodalan
Permasalahan lain yang menjadi focus dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah permodalan. Pemerintah Kota sawahlunto berkomitmen untuk memberikan solusi cepat ini, terkhusus bagi UMKM yang terdampak covid-19 yang membutuhkan dukuangna permodalan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto akan mengoptimalkan lembaga bantuan permodalan UPTD Dana bergulir sejak tahu 2018, tetap mengupayakan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat. Kondisi terakhir tahun 2021, telah disalurkan pinjaman permodalan sebanyak 1,5 Milyar kepada masyarakat. Untuk tahun 2023, ditargetkan akan ditambah modal UPTD Dana bergulir sebanyak 500 Juta lagi. Dalam rangka peningkatan upaya recovery ekonomi dampak Covid 19, dibutuhkan strategi dan inovasi terhadap kemudahan mendapatkan bantuan permodalan ini. Salah satu rencana yang dapat diambil adalah pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerjasama dengan lembaga perbankan yang ada.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan pertanian.
Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi Sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2023, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi.
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya

dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya

3. *Meningkatkan Sinkronisasi Pengelolaan Dana Desa dan APBD Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Recovery Ekonomi.*

Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumberdaya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi dana desa. Pada tahun 2023 nantinya, setiap Desa juga ditargetkan untuk mengalokasikan anggaran minimal 20 % untuk pemulihan ekonomi di Desanya. Kegiatan yang disarankan terfokus pada sektor real yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

4. *Peningkatan Kualitas Dan Pengelolaan Objek Wisata*

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 dan 2023. Penundaan beberapa kegiatan strategis khususnya terkait pariwisata tahun 2020, akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini dan terus akan dilanjutkan pada tahun 2023. Sektor wisata Kota Sawahlunto yang merupakan konsep utama dalam pembangunan Kota, dengan pelaku pariwisata seperti Penyedia Rumah Makan, Penginapan, dan agensi travel tentunya tetap menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan tahun 2023. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto dibanding tahun sebelumnya tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu, Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan kebijakan untuk mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WTBOG dan status Geopark Nasional Sawahlunto dalam menarik wisatawan.

5. *Mengoptimalkan Sentra IKM dan Pengembangan Pusat layanan usaha terpadu dalam meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan*

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisata, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata. Dengan dibangunnya Sentra IKM yang terdiri dari Rumah Produksi Sentra IKMi, Fasilitasi Rumah Kemasan, serta mendirikan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) tahun 2022 ini akan

dioptimalkan fungsinya untuk meningkatkan daya saing produk IKM dan UMKM yang ada.

4.3.4 Arah Kebijakan Terkait Penanggulangan Kemiskinan

Keberhasilan Kota sawahlunto dalam menekan pertumbuhan masyarakat miskin ditengah pandemic Covid 19 ini, berimplementasi terhadap peringkat kemiskinan Kota sawahlunto terendah se Indonesia pada tahun 2021. Ini merupakan capaian yang harus dipertahankan. Kebijakan pembangunan yang akan diambil untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus mempertahankan peringkat kemiskinan terendah se Indonesia adalah :

1. *Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin,*

Untuk meringankan kondisi ekonomi masyarakat miskin, permasalahan yang akan diprioritaskan untuk ditangani adalah mengurangi beban pengeluaran. beberapa kebijakan khusus untuk menindaklanjuti ini adalah :

a. Melanjutkan program bantuan dibidang pendidikan

Walaupun program ini tidak secara khusus diberikan untuk masyarakat miskin, akan tetapi, yang menjadi prioritas untuk pelaksanaannya adalah keluarga miskin. Dalam memasuki ajaran baru, beban penbgeluaran untuk pengadaan seragam dan perlenbgkapan sekolah, tentunya akan memberatkan bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Inilah yang akan menjadi perhatian pemerintah. Ditambah lagi adanya reward bagi mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi. Diharapkan, dengan kebijakan ini tetap dilanjutkan, bneban pengeluaran masyarakat miskin untuk biaya pendidikan dapat berkurang.

b. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

Pengeluaran disektor kesehatan juga merupakan suatu beban yang berat bagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Kebijakan untuk memberikan jaminan kersehatan inilah yang diambil pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah penduduk miskin. Jika krepala keluarga dari masyarakat miskin tersebut mengalami sakit apalagi sampai diraway inap, akan menyebabkan kemampuan berusahanya berhenti, sedangkan biaya pengobatan akan tetap berjalan. Inilah yang menjadi perhatian. Saat ini, seluruh masyarakat miskin yang terdata pada data DTKS sudah mempunyai jaminan kesehatan di Kota sawahlunto.

c. Melanjutkan program-program bantuan sosial

Secara spesifik, program bantuan social ini tidak hanya dari APBD, juga didapat dari APBN. Program seperti BPNT, Subsidi Listrik, Bantuan KUBE dan BLT oleh sebagian masyarakat miskin, menjadi hal mutlak yang harus diberikan. Terutama bagi masyarakat miskin yang rendah produktivitasnya. Ditingkat kota, bantuan bagi masyarakat dengan status PMKS tetap jadi prioritas. Hal ini

dikarenakan, rata-rata PMKS di Kota sawahlunto berasal dari keluarga kurang mampu.

2. *Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Pendapatan Bagi Masyarakat Miskin*

Kebijakan berikutnya yang akan tetap diambil adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan pendapatannya. Dari analisa usahanya, sebagian besar lapangan usaha masyarakat miskin adalah sector pertanian. Beberapa program seperti bantuan ternak ayam dan kambing, bantuan bibit ternak sapi, dan juga itik, akan tetap dilanjutkan untuk tahun 2023. Seperti halnya program lainnya, prioritas kelompok sasaran penerima manfaat adalah masyarakat miskin. Untuk jangka panjangnya, bantuan bibit manggis, karet dan pinang juga akan tetap dilanjutkan.

Disktor perdagangan, bantuan permodalan dari UPTD Dana bergulir juga diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang terdata pada data DTKS. Bantuan gerobak dan payung juga akan tetap dilanjutkan, terutama bagi keluarga miskin. Hal ini dilaksanakan untuk memberdayakan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin

3. *Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Lingkungan Dan Kawasan Permukiman/ Perumahan Bagi Keluarga Miskin*

Salah satu factor penyebab seseorang dikategorikan sebagai masyarakat miskin adalah dengan keterbatasan sarana perumahan yang dimilikinya. Tidak tersedianya sarana perumahan yang standar, sarana MCK yang baik, dan lingkungan yang bersih akan menyebabkan seseorang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kebijakan inilah yang akan digunakan untuk mengantisipasi. Program bantuan RTLH, program santiasi, program Kotaku dan program pamsimas

4. *Melakukan inovasi Pembinaan oleh perangkat Daerah kepada masing-masing Desa dan Kelurahan.*

Pimpinan daerah sudah merencanakan untuk tahun 20203, akan ditetapkan PD pembina desa, dengan target sasaran OPD dapat mengawal langsung dan bertanggung jawab langsung terhadap pengentasan kemiskinan di masing-masing desa. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dari program penanggulangan kemiskinan di masing-masing desa serta program dan bantuanm yang telah diberikan dapat tepat sasaran dan berhasil guna

5. *Mengoptimalkan dan Koordinasi Terhadap Sumber Pendanaan Lain Untuk Penanggulangan Kemiskinan.*

Untuk menanggulangi kemiskinan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lembaga dan pihak lainnya. Lembaga lain seperti BAZ, Perusahaan Tambang melalui CSR-nya dan Lembaga swadaya masyarakat seperti Farisha Peduli akan lebih dioptimalkan. Untuk Baznas Kota sawahlunto, total anggaran yang dikelola lebih dari 4 Milyar rupiah. Focus utama penyalurannya adalah masyarakat miskin yang ada di Kota sawahlunto.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Sawahlunto.

RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2023 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan menurut Perangkat Daerah dan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA SAWAHLUNTO**

OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									119,464,348,229		117,575,047,113		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	80,506,100,382					12 Bulan	76,701,874,948		
1	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	120,500,000					9 Dokumen	125,500,000		
1	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18 Dokumen	120,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	125,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	12 Orang/ Bulan	69,587,225,434					12 Orang/ Bulan	65,700,000,000		
1	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			735 Orang/bulan	69,587,225,434	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	735 Orang/bulan	65,700,000,000	DINAS PENDIDIKAN	



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Berkualitas Dan Berdaya Saing									
1	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	265,000,000			4 Dokumen	265,000,000				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	20 Orang				20 Orang					
1	1	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			4 Dokumen	15,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai Dinas Pendidikan	4 Dokumen	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	250,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai Dinas Pendidikan	20 Orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	1,919,000,000						12 Laporan	1,919,000,000	
						Jumlah Paket	Paket	Paket	4 Paket							4 Paket		



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										t						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	Paket	3 Paket							3 Paket						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket							1 Paket						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	6 Paket							6 Paket						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	Paket	5 Paket							5 Paket						
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tersedia ya Alat Listrik Untuk Penerangan Kantor	1 Paket	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	490,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Tersedia ya Alat Listrik Untuk Penerangan Kantor	6 Paket	490,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Berdaya Saing									
1	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	40,000,000	Kota Sawahlunt o, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedian ya Alat Listrik Untuk Penerang an Kantor	5 Pake t	40,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	358,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedian ya Alat Listrik Untuk Penerang an Kantor	4 Pake t	358,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	348,000,000	Kota Sawahlunt o, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		Tersedian ya Alat Listrik Untuk Penerang an Kantor	3 Pake t	348,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Lapo ran	673,000,000	Kota Sawahlunt o, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya		Tersedian ya Alat Listrik Untuk Penerang an Kantor	12 Lapo ran	673,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									Saing								
1	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	3 Unit	474,300,000				3 Unit	474,300,000		
1	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	474,300,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tersedia Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	474,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	7,791,524,648					12 Laporan	7,869,524,648	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan						12 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan						12 Laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	12 Laporan						12 Laporan		
1	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan			12 Laporan	6,000,000	Kota	Dana	Meningkatkan	Tersedia	12 Laporan	6,000,000	DINAS



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			ran		Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ya Jasa Surat Menyurat Kantor	oran		PENDIDIKAN
1	1	1	2.0	2	12 Laporan	92,559,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tersedia ya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Laporan	92,559,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0	3	12 Laporan	17,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tersedia ya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Laporan	17,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0	4	12 Laporan	7,675,965,648	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tersedia ya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Laporan	7,753,965,648	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.0		64 Unit	348,550,300						64 Unit	348,550,300	
	Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan	Unit	Unit										



OPD : DINAS PENDIDIKAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	150 Unit							150 Unit							
1	1	1	2.0	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			64 Unit	250,675,300	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	64 Unit	250,675,300	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	2.0	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			150 Unit	97,875,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	150 Unit	97,875,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD			101,3	38,583,247,847					101,3	40,498,172,165		
						APM SMP			93,5									93,5	
						Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	%	%	30 %									30 %	
1	1	2	2.0	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah alat praktik dan peraga siswa	Paket	Paket	7 Paket	23,417,678,335					7 Paket	22,932,231,965		



OPD : DINAS PENDIDIKAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		yang tersedia																	
		Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	Paket	1 Paket							1 Paket							
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	Orang	185 Orang							185 Orang							
		Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Unit	Unit	1 Unit							1 Unit							
		Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	Ruang	Ruang	1 Ruang							1 Ruang							
		Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Ruang	Ruang	5 Ruang							5 Ruang							
1	1	2	2.0	1	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			1 Ruang	350,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	1 Ruang	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.0.1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	250,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	1 Ruang	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.0.1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			2 Ruang	700,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	2 Ruang	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.0.1.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			3 Unit	400,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	3 Unit	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.0.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			38 Ruang	8,351,484,223	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	38 Ruang	8,301,484,223	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.0.1.9	Rehabilitasi	Jumlah Ruang			2 Ruang	135,000,000	Kota	Dana	Meningkatkan	Peningkatan	Siswa SD	2 Ruang	148,500,000	DINAS



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	1	2	2.0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	125,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	1 Ruang	137,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	125,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	1 Ruang	137,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			20 Unit	1,470,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	20 Unit	1,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Dinas Kepala	Jumlah Rumah Dinas Kepala			8 Unit	800,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan Kualitas	Siswa SD	8 Unit	880,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat						o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM yang berdaya Saing							
1	1	2	2.0	1	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			11 Paket	1,330,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	11 Paket	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	1	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			2 Unit	690,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	2 Unit	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			5446 Peserta Didik	6,946,793,812	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa SD	5446 Peserta Didik	6,946,793,812	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa			65 Paket	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas SDM yang	Siswa SD	65 Paket	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		yang Tersedia					Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berdaya Saing									
1	1	2	2.0 1	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			62 Satuan Pendidikan	36,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	62 Satuan Pendidikan	40,480,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 1	2	4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			62 Satuan Pendidikan	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	62 Satuan Pendidikan	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 1	2	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			544 Peserta Didik	543,998,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	544 Peserta Didik	609,198,130	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 1	2	6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia			15 Orang	5,038,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya	Siswa SD	15 Orang	5,541,800	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							n, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
1	1	2	2.0	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			278 Orang	391,864,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	278 Orang	391,864,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			62 Satuan Pendidikan	316,700,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	62 Satuan Pendidikan	468,370,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	3	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			1 Ruang	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SD	1 Ruang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0		Pengelolaan Pendidikan	Jumlah asrama sekolah yang	Unit	Unit	0 Unit	5,701,490,222						0 Unit	7,710,097,800	



OPD : DINAS PENDIDIKAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Sekolah Menengah Pertama	dibangun													
		Jumlah asrama yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	1 Unit								1 Unit		
		Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	Paket	6 Paket								6 Paket		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ Golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	Orang	86 Orang								86 Orang		
		Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Orang	Orang	20 Orang								20 Orang		
		Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Paket	Paket	0 Paket								0 Paket		
		Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Peserta Didik	0 Peserta Didik								0 Peserta Didik		



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	Peserta didik	Peserta didik	0 Peserta didik							0 Peserta didik		
		jumlah ruang guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Ruang	Ruang	1 Ruang							1 Ruang		
		Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Ruang	Ruang	5 Ruang							5 Ruang		
		Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	Ruang	Ruang	0 Ruang							0 Ruang		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Unit	Unit	4 Unit							4 Unit		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	2 Unit							2 Unit		
		Jumlah satuan pendidik sekolah menengah pertama yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidik an	Satuan Pendidikan an	0 Satuan Pendidik an							0 Satuan Pendidik an		
		Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan	Satuan Pendidik an	Satuan Pendidikan an	0 Satuan Pendidik an							0 Satuan Pendidik an		



OPD : DINAS PENDIDIKAN																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		pembinaan																		
		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/ lomba akademik dan non akademik	Peserta Didik	Peserta Didik	0 Peserta Didik							0 Peserta Didik								
1	1	2	2.0	2	8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	1 Unit	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	800,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	2 Unit	620,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	750,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	5 Ruang	825,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1 Unit	405,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas SDM yang	Siswa SMP	1 Unit	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	dan Utilitas Sekolah	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berdaya Saing									
1	1	2	2.0	2	5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			8 Paket	640,031,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	8 Paket	572,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			1 Paket	320,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	1 Paket	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			2185 Peserta Didik	1,391,585,022	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa SMP	2185 Peserta Didik	3,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			12 Peserta Didik	27,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya	Siswa SMP	12 Peserta Didik	29,920,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							n, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Saing								
1	1	2	2.0 2	3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			12 Satua n Pendidik an	50,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	12 Sat uan Pendid ikan	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomb a Akademik dan Non Akademik			488 Pes erta Didik	273,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	488 Pe serta Didik	273,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 2	3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			15 Oran g	5,038,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	15 Ora ng	5,541,800	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 2	4 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan			153 Ora ng	269,636,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Meningka tkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	153 Or ang	269,636,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Kelurahan	Umum	Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing									
1	1	2	2.0 2	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			12 Satua n Pendidik an	270,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Siswa SMP	12 Sat uan Pendid ikan	270,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	Orang	Orang	17 Oran g	7,120,084,290						17 Ora ng	7,631,837,400	
					Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dibangun	Unit	Unit	6 Unit								6 Unit		
					Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	Unit	6 Unit								6 Unit		
					Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah	Unit	Unit	8 Unit								8 Unit		



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		direhabilitasi sedang/ berat												
		Jumlah mebeluer PAUD yang telah diadakan	Paket	Paket	7 Paket							7 Pake t		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	Orang	77 Oran g							77 Ora ng		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersedia pada satu PAUD	Orang	Orang	370 Ora ng							370 Ora ng		
		Jumlah peraga siswa PAUD yang telah menerima biaya personil peserta didik	Orang	Orang	45 Oran g							45 Ora ng		
		Jumlah perlengkapan PAUD yang telah diadakan	Paket	Paket	6 Paket							6 Pake t		
		Jumlah perlengkapan siswa PAUD yang telah diadakan	Paket	Paket	2 Paket							2 Pake t		
		Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar di PAUD	Orang	Orang	2590 Or ang							2590 O rang		



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah peserta didik PAUD yang telah menerima biaya personil peserta didik	Orang	Orang	91 Orang							91 Orang		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	Unit	Unit	5 Unit							5 Unit		
		Jumlah saran, prasarana dan utilitas sekolah PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	8 Unit							8 Unit		
1	1 2 2.0 3 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		2 Unit	1,981,920,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	2 Unit	81,920,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1 2 2.0 3 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		1 Unit	446,512,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	1 Unit	246,512,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1 2 2.0 3 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah		0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	0 Unit	737,198,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Direhabilitasi Sedang/Berat						Umum	Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing		al			
1	1 2 2.0 3 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			0 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonform al	0 Unit	198,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1 2 2.0 3 5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang PAUD			0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonform al	0 Unit	209,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1 2 2.0 3 7	Pengadaan Mebel PAUD			1 Paket	202,449,900	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonform al	1 Pake t	202,450,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1 2 2.0 3 9	Pengadaan Perlengkapan PAUD			3 Paket	1,653,860,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonform al	3 Pake t	1,324,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Berkualitas Dan Berdaya Saing									
1	1	2	2.0 3	1 0	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia			1 Paket	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	1 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 3	1 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1500 orang	52,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	1500 orang	52,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 3	1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			2 Paket	402,446,440	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	2 Paket	402,450,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 3	1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			600 Peserta Didik	226,658,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	600 Peserta Didik	226,800,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
									Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	1	2	2.0	3	1	4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				3 Satuan Pendidikan	20,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	3 Satuan Pendidikan	20,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	3	1	5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				77 Orang	701,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	77 Orang	701,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	3	1	6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				419 Orang	499,280,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	419 Orang	582,550,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	3	1	7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan				3 Satuan Pendidikan	399,757,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Satuan PAUD Formal dan Nonformal	3 Satuan Pendidikan	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		dan Manajemen					Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		al							
1	1	2	2.0	3	1	8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0		DINAS PENDIDIKAN			
1	1	2	2.0	3	1	9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				2 Orang	82,900,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DINAS PENDIDIKAN			
1	1	2	2.0	4			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa nonformal/ kesetaraan yang tersedia	Paket	Paket	7 Paket	2,343,995,000					7 Paket	2,224,005,000
								Jumlah alat rumah tangga pendidikan nonformal/ kesetaraan yang diadakan	Paket	Paket	1 Paket						1 Paket	
								Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru nonformal/	Unit	Unit	1 Unit						1 Unit	



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kesetaraan yang telah dibangun												
		Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang guru pendidikan nonformal/ kesetaraan yang direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	1 Unit							1 Unit		
		Jumlah kelengkapan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang tersedia	Paket	Paket	5 Paket							5 Paket		
		Jumlah mebel pendidikan nonformal/ kesetaraan yang diadakan	Paket	Paket	4 Paket							4 Paket		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	Orang	4 Orang							4 Orang		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia	Orang	Orang	92 Orang							92 Orang		



OPD : DINAS PENDIDIKAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bagi satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan												
		Jumlah peserta didik nonformal/ kesetaraan yang menerima biaya personil	Orang	Orang	200 Orang							200 Orang		
		Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Peserta didik	Peserta didik	250 Peserta didik							250 Peserta didik		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang direhabilitasi sedang/ berat	Unit	Unit	1 Unit							1 Unit		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/ kesetaraan yang telah dibangun	Unit	Unit	2 Unit							2 Unit		
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal/ kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin	Unit	Unit	2 Unit							2 Unit		
		Jumlah satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan siap dievaluasi dan melaksanakan	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan							1 Satuan Pendidikan		



OPD : DINAS PENDIDIKAN																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		rekomendasi																		
		Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan							1 Satuan Pendidikan								
		jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan							6 Satuan Pendidikan								
		Jumlah sekolah nonformal/ kesetaraan yang mengelola dana BOP kesetaraan	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan							2 Satuan Pendidikan								
		Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/ kesetaraan	Orang	Orang	3 Orang							3 Orang								
1	1	2	2.0	4	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	3 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	4	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas SDM yang	SPNF-SKB dan PKBM	0 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun						Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berdaya Saing								
1	1	2	2.04	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan			2 Unit	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	2 Unit	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.04	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia			1 Paket	200,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	1 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia			5 Paket	414,095,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	5 Paket	504,095,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang			250 Peserta Didik	135,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya	SPNF-SKB dan PKBM	250 Peserta Didik	135,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	raan	Menerima Biaya Personil Peserta Didik					n, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Saing								
1	1	2	2.0 4	1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			450 Pak et	150,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	450 Pa ket	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 4	1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keseta raan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			450 Pes erta Didik	273,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	450 Pe serta Didik	273,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 4	1 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta raan			6 Orang	81,900,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	6 Oran g	81,900,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0 4	1 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan			50 Oran g	140,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Meningka tikan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	50 Ora ng	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Nonformal/Kesetaraan	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
1	1	2	2.0	1	6	3 Satuan Pendidikan	600,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	3 Satuan Pendidikan	95,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	1	7	0 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	0 Satuan Pendidikan	279,510,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	1	8	0 Orang	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	SPNF-SKB dan PKBM	0 Orang	5,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.0	2	2	3 Satuan Pendidikan	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas SDM yang	SPNF-SKB dan PKBM	3 Satuan Pendid	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN



OPD : DINAS PENDIDIKAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Nonformal/Kesetaraan	an Ujian					Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berdaya Saing		ikan						
1	1	4			90,3 %	375,000,000						90,3 %	375,000,000					
1	1	4	2.01		4 Dokumen	375,000,000						4 Dokumen	375,000,000					
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	375,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan n Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	12 Dokumen	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
TOTAL										119,464,348,229				117,575,047,113				

OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2					42,728,425,166							54,963,690,481					
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	31,783,105,666					12 Bulan	36,839,188,539		
1	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	0	0	3 0	27,026,873,038					3 0	28,401,316,690		
1	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			273 Ora ng/bula n	27,018,873,038	Kota Sawahlun to, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN	273 Ora ng/bula n	28,369,816,690	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD			18 Lapo ran	8,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN	18 Lapo ran	31,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Sub kegiatan	0	0	3 0	7,311,000					3 0	1,281,000,000		



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana															
1	2	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	2,561,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Barang Milik daerah	2 Dokumen	10,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	2,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Barang Milik daerah	1 Dokumen	1,260,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Barang Milik daerah	2 Laporan	10,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	0	0	70	216,024,000						70	427,889,711	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Daerah yang terlaksana																
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ya			4 Paket	12,824,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	4 Paket	21,427,067	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	51,986,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	3 Paket	147,420,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	17,643,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	3 Paket	34,181,259	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	22,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	2 Paket	36,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Saing									
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	2 Dokumen	6,245,085	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	109,570,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Kantor	12 Laporan	181,866,300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	0	0	30	89,000,000						30	529,230,888	
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Perkantoran	1 Unit	397,980,888	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	1	2.0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		1	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	74,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Logistik Perkantoran	2 Unit	131,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terlaksana	0	0	30	3,622,807,628					30	4,168,080,000		
1	2	1	2.0	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1,649,700	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Honor Kontrak, Logistik Kantor	12 Laporan	10,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	213,157,928	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Honor Kontrak, Logistik Kantor	36 Laporan	288,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan		12 Laporan	3,408,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Tenaga Honor	12 Laporan	3,868,830,000	DINAS KESEHATAN,



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas SDM yang berdaya Saing	Kontrak, Logistik Kantor			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.09		30	816,590,000						30	1,929,270,000	
1	2	1	2.09	1										
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	0	0	30	816,590,000						30	1,929,270,000	
1	2	1	2.09	1										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			187 Unit	790,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sarana dan Prasarana perkantoran	187 Unit	1,076,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.09	9										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi			1 Unit	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sarana dan Prasarana perkantoran	1 Unit	787,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.09	1										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung			15 Unit	10,790,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas	Sarana dan Prasarana perkantoran	15 Unit	65,520,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM yang berdaya Saing	n			IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.1 0		0	0						7 0	102,401,250	
1	2	1	2.1 0	1								6 Unit Kerja	102,401,250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 Unit Kerja		
1	2	2										97 %	17,528,889,692	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			%	%								
					%	%						≤ 4,00 %		
												82		
1	2	2	2.0 1		0	0						3 0	2,256,935,625	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP												



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	untuk UKM dan UKP yang disediakan															
1	2	2	2.0 1	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			1 Unit	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	420,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Unit	375,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	840,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	420,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas			10 Unit	102,550,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat	10 Unit	254,677,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	yang berdaya Saing				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.0 1	1 5		100 Unit	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	100 Unit	131,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	2 0		100 Unit	64,347,350	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	100 Unit	191,008,125	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2			30	9,953,590,750						30	14,931,281,567	
1	2	2	2.0 2	1		1263 Orang	8,450,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas SDM yang	Masyarakat	1263 Orang	29,873,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Sesuai Standar					Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	berdaya Saing				DAN KELUARGA BERENCANA				
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1205 Orang	8,270,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1205 Orang	10,783,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1100 Orang	35,750,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1100 Orang	74,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3944 Orang	7,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	3944 Orang	90,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan			9957 Orang	7,750,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya	Masyarakat	9957 Orang	52,237,763	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kesehatan Sesuai Standar							Berkualitas Dan Berdaya Saing	Saing				KELUARGA BERENCANA				
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			23265 Orang	22,250,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	23265 Orang	78,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4259 Orang	8,215,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4259 Orang	23,325,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1445 Orang	14,087,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1445 Orang	25,291,875	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan			498 Orang	12,075,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	498 Orang	23,178,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Sesuai Standar							Dan Berdaya Saing					BERENCANA				
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			248 Orang	11,275,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	248 Orang	32,838,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			557 Orang	55,445,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	557 Orang	97,650,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1284 Orang	30,815,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1284 Orang	63,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi			1 Dokumen	35,750,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	189,022,798	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							Berdaya Saing									
1	2	2	2.0 2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			1 Dokumen	205,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	315,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	157,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6 Dokumen	8,322,150	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	6 Dokumen	11,888,258	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	35,100,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Masyarakat	1 Dokumen	46,305,000	DINAS KESEHATAN,



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Kesehatan Lingkungan	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas SDM yang berdaya Saing			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	2	2	2.0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			6 Dokumen	7,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	6 Dokumen	68,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	7,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	47,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1119 Orang	6,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1119 Orang	37,275,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Upaya	Jumlah			2 Dokumen	20,000,000	Kota	Dana	Meningkat	Peningkat	Masyarakat	2 Dokumen	68,250,000	DINAS



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					men		Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	an Kualitas SDM yang berdaya Saing	t	men		KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	2 5	1 Dokumen	54,754,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	155,925,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	2 6	4 Dokumen	8,991,653,650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	12,631,270,260	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	2 9	1 Dokumen	10,650,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	172,475,100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	3 4	2 Dokumen	20,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Masyarakat	2 Dokumen	56,227,500	DINAS KESEHATAN,



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas SDM yang berdaya Saing			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	2	2	2.0 2	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			1 Dokumen	45,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1 Unit	209,476,700	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	280,875,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan			10362 Keluarga	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	10362 Keluarga	46,987,763	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										Berdaya Saing								
1	2	2	2.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang terlaksana	0	0	20	48,500,000				20	135,922,500			
1	2	2	2.0 3	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			3 Dokumen	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	95,497,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 3	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	13,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	40,425,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	70	46,697,150						70	204,750,000	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			6 Unit	31,503,850	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	6 Unit	152,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			4 Dokumen	15,193,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	52,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	%	%	92 %	46,770,000						92 %	186,092,550	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota	0	0	50	2,550,000						50	26,250,000	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	2,550,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	26,250,000	DINAS KESEHATAN,



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	2.0 3	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			8 Orang	40,720,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tenaga Kesehatan	8 Orang	138,842,550	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	%	78 %	49,314,250						78 %	187,019,700	
1	2	4	2.0 1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sub kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/kota yang terlaksana	0	0	10	5,730,000						10	36,466,500	
1	2	4	2.0 1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko			10 Dokumen	5,730,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sarana Kefarmasian	10 Dokumen	36,466,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
1	2	4	2.0 2		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sub kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilaksanakan	0	0	10	8,050,000			10	28,875,000				
1	2	4	2.0 2	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu			6 Dokumen	8,050,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	6 Dokumen	28,875,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Perusahaan Rumah Tangga																
1	2	4	2.0 3		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P_IRT sebagai Izin Produksi, Untuk produk makanan, minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang diterbitkan	0	0	65 0	18,500,000			65 0	39,375,000				
1	2	4	2.0 3	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman			36 Dokumen	18,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sarana P-IRT	36 Dokumen	39,375,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
1	2	4	2.0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restor an dan Depot Air Minum (DAM)	0	0	100 0	5,650,250				100 0	36,750,000			
1	2	4	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restor an dan Depot			1 Doku men	5,650,250	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tempat pengolaha n makanan, jasa boga, rumah makan dan restoran, depot air minum	1 Doku men	36,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Air Minum (DAM)																
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	0	25 0	5,790,000				25 0	21,829,500			
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			2 Doku men	5,790,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sentra makanan jajanan	2 Doku men	21,829,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sub kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pos market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0	0	10	5,594,000					10	23,723,700		



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		dilaksanakan																
1	2	4	2.0 6	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			20 Unit	5,594,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	20 Unit	23,723,700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Keluarga Sehat (%)	%	%	37 %	48,550,000						37 %	222,500,000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Advokasi Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota terlaksana	0	0	10	8,500,000						10	86,000,000	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	8,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat, Lintas Sektor	1 Dokumen	86,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Saing									
1	2	5	2.0 2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/ko ta yang terlaksana	0	0	10	11,000,000				10	78,750,000			
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			1 Dokumen	11,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya Saing	Promosi Kepada Masyaraka t	1 Dokumen	78,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Pengembang an dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Ko ta terlaksana	0	0	10	29,050,000					10	57,750,000		
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan			1 Dokumen	29,050,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkat kan Sumber Daya	Peningkat an Kualitas SDM	UKBM pada masyarakat	1 Dokumen	57,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	yang berdaya Saing				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			65,270,000					496,308,750						
2	1	4	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk (%)	%	%	2,22 %	30,145,000			2,22 %	125,889,750					
2	1	4	2	2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	0	0	10	25,250,000			10	67,200,000					
2	1	4	2	2.0 1	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan			1 Dokumen	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat, Lintas sektor	1 Dokumen	31,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							Dan Berdaya Saing					BERENCANA				
2	1 4	2	2.0 1	5	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			3 Dokumen	5,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat, Lintas sektor	3 Dokumen	35,700,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	2	2.0 2		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang dipetakan dan didata	0	0	19000 0	4,895,000						19000 0	58,689,750	
2	1 4	2	2.0 2	1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			1 Dokumen	4,895,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	58,689,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	%	%	69,21 %	16,875,000						69,21 %	167,947,500	
2	1 4	3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Jumlah stakeholder, organisasi yang	0	0	19 0	8,275,000						19 0	44,625,000	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																
2	1	3	2.0	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			40 Organisasi	3,750,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	40 Organisasi	15,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1	3	2.0	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			4 Dokumen	4,525,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	28,875,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal												
2 1 4	3 2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0	0	60	5,250,000						60	47,250,000	
2 1 4	3 2.0 2	3 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			4 Laporan	5,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyaraka t	4 Laporan	47,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 1 4	3 2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	0	0	70	3,350,000						70	76,072,500	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	distribusi alkon												
2.1.3.8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			12 Laporan	3,350,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Laporan	76,072,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif			235	18,250,000						235	202,471,500	
2.1.4	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	0	0	30	18,250,000						30	202,471,500	
2.1.4	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat			37 Kelompok	4,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Keluarga dan masyarakat	37 Kelompok	44,971,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang Dibentuk							Berdaya Saing									
2	1 4	4	2.0 1	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			85 Orang	3,750,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Keluarga dan masyarakat	85 Orang	57,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	4	2.0 1	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan			3 Laporan	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya	Keluarga dan masyarakat	3 Laporan	99,750,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Berkualitas Dan Berdaya Saing	Saing				KELUARGA BERENCANA					
										Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2								438,207,626				543,262,856						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	438,207,626				97 %	543,262,856				
						Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %					≤ 4,00 %					
						Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)			82					82					
1	2	2	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan		0	0	30	438,207,626			30	543,262,856				
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Jaminan	Jumlah				1 Doku	379,232,376	Kota	Dana	Meningkat	Peningkat	Masyaraka	1 Doku	427,762,856	DINAS



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	6			men		Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	an Kualitas SDM yang berdaya Saing	t	men		KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3			12 Dokumen	58,975,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Dokumen	115,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2					640,985,657							765,835,463	
1	2	2				640,985,657							97 %	765,835,463
													≤ 4,00 %	
													82	
1	2	2	2.0			30							30	765,835,463
													30	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		layanan kesehatan yang disediakan																		
1	2	2	2.0	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	570,736,860	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	643,774,226	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.0	3	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	70,248,797	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Dokumen	122,061,237	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					693,803,760						877,024,102			
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	693,803,760						97 %	877,024,102		
					Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD		%	%	≤ 4,00 %										≤ 4,00 %	
					Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)				82										82	
1	2	2	2.0			Penyediaan Layanan	Jenis layanan	0	0	3 0	693,803,760						3 0	877,024,102		



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	2	2.0	2	6	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan												
							Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	30			30						
1	2	2	2.0	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	612,158,172	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	690,496,235	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0	3	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	81,645,588	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Dokumen	186,527,867	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,343,799,972							1,572,587,900	
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	1,343,799,972							97 %	1,572,587,900
							Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %								≤ 4,00 %	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
					82							82							
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	0	0	30	1,343,799,972			30	1,572,587,900					
					Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	30				30						
1	2	2	2.0 2	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	1,201,371,972	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,355,111,900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 2	3	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	142,428,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Dokumen	217,476,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												531,797,840		656,608,722			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan	%	%	97 %	531,797,840							97 %	656,608,722	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kesehatan																
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %							≤ 4,00 %						
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)			82							82						
1	2	2	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	3 0	531,797,840			3 0	656,608,722				
					Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	3 0					3 0					
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	465,189,840	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	524,720,322	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	66,608,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	12 Dokumen	131,888,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	2				392,357,512							495,339,970		
1	2	2				392,357,512							97 %	495,339,970	
													≤ 4,00 %		
													82		
1	2	2	2.0 2			392,357,512							3 0	495,339,970	
													3 0		
1	2	2	2.0 2	2 6		355,450,512	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	400,937,620	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.0 2	3 3		36,907,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya	Masyarakat	12 Dokumen	94,402,350	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Berkualitas Dan Berdaya Saing	Saing				KELUARGA BERENCANA				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2					326,170,000							707,995,050					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	326,170,000				97 %	707,995,050			
						Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %					≤ 4,00 %				
						Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)			82					82				
1	2	2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	3 0	257,550,000				3 0	497,227,500			
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan			1 Paket	125,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	1 Paket	242,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan			1 Paket	132,550,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Paket	254,677,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN



OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	yang berdaya Saing				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.0 2		3 0	68,620,000						3 0	210,767,550		
1	2	2	2.0 2	3 4		12 Doku men	68,620,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	operasional IFK	12 Doku men	210,767,550	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TOTAL						47,160,817,533							61,078,653,294		

OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Program/	Target Akhir	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	Prioritas		12	13	14	15				
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						65,400,038,027						70,171,891,070						
1	2	1				63,379,138,027						12 Bulan	68,141,401,070					
1	2	1	2.0 2			31,788,015,196						3 0	33,391,165,956					
1	2	1	2.0 2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan									
1	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	0	0	3 0				3 0	33,391,165,956				
1	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			256 Orang /bulan	31,513,015,196	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai RSUD	256 Ora ng/bula n	33,088,665,956	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD			12 Dokum en	275,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai RSUD	12 Doku men	302,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	0	0	2 0	451,600,000					2 0	496,760,000		
1	2	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti			256 Orang	451,600,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang	Peningkat an Kualitas SDM yang berdaya	Pegawai RSUD Sawahlunto	256 Ora ng	496,760,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDAL IAN PENDUDUK



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan					Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Saing				DAN KELUARGA BERENCANA				
1	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	0	0	7 0	210,000,000			7 0	231,000,000				
1	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	60,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai dan Pasien RS	1 Paket	66,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	150,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai dan Pasien RS	1 Paket	165,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	0	0	3 0	0						3 0	0	
1	2	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SDM yang berdaya Saing				IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	2	1	2.08			30	3,073,506,640					30	3,380,857,304					
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	892,976,640	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai dan Pasien RS	12 Laporan	982,274,304	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	2,180,530,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai dan Pasien RS	12 Laporan	2,398,583,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	0	0	30	425,580,000						30	468,138,000	



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		terlaksana																
1	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			29 Unit	425,580,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai RS	29 Unit	468,138,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD	0	0	70	27,430,436,191						70	30,173,479,810	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	27,430,436,191	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai RS dan pasien	1 Unit Kerja	30,173,479,810	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	97 %	2,020,900,000						97 %	2,030,490,000	
						Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	%	≤ 4,00 %							≤ 4,00 %		
						Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)			82							82		
1	2	2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	0	0	30	1,643,400,000						30	1,615,240,000	



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	yang disediakan															
1	2	2	2.0 1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			2 Unit	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2 Unit	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan			1 Paket	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	SDM yang berdaya Saing				IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	2	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan			1 Paket	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	1 8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan			1 Unit	1,175,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	1 Unit	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	1 9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan			2 Unit	268,400,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	2 Unit	295,240,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0 1	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			205 Unit	200,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	205 Unit	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	2	2	2.0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1			2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	0	0	3 0	177,500,000					3 0	195,250,000		
						Jumlah layanan kesehatan yang disediakan	0	0	3 0						3 0			
1	2	2	2.0	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	177,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	1 Unit	195,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.0	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	0	0	7 0	200,000,000					7 0	220,000,000		
1	2	2	2.0	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			12 Dokumen	200,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pasien RS	12 Dokumen	220,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TOTAL									65,400,038,027						70,171,891,070			

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/	Target Akhir	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah



1	2	3	4	5	6	7	8	9	Prioritas		12	13	14	15				
									Nasional	Daerah								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						86,548,594,767						120,005,000,000						
1	3	1				10,465,656,014						12 Bulan	9,415,000,000					
1	3	1										13	6,000,000,000					
1	3	1	2.0 2									13	6,000,000,000					
1	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48 Orang/bulan	7,202,526,792	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	48 Orang/bulan	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kemampuan dan Kapasitas sumber daya aparatur (bulan)			12	90,930,000				12	100,000,000			
1	3	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			48 Orang	90,930,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	48 Orang	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi Umum (bulan)			12	500,483,210				12	526,000,000			
1	3	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi			1 Paket	20,350,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	Penyelesaian Permasalahan	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	han Layanan Infrastruktur Kota				DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	2.0	6	2	1 Paket	120,663,210	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	125,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0	6	4	1 Paket	30,475,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	31,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0	6	5	1 Paket	44,847,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Paket	45,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0	6	9	12 Laporan	284,148,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)			12	149,868,650						12	150,000,000	
1.3.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Unit	149,868,650	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Unit	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)			12	1,945,529,962						12	2,039,000,000	
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	8,879,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	223,950,962	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	225,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		yang Disediakan					Kelurahan		Saing										
1	3	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	3,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	4,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,709,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	12 Laporan	1,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)			12	576,317,400						12	600,000,000		
1	3	1	2.0	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			34 Unit	398,177,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	34 Unit	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung			1 Unit	128,940,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Penyelesaian	Pegawai Pemerintahan	1 Unit	150,000,000	DINAS PEKERJAAN



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					nto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	han			N UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.0	1	1 Unit	49,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	1 Unit	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			50,35 %	7,675,000,000						50,35 %	9,550,000,000	
1	3	2	2.0	1	20	3,770,000,000						20	3,200,000,000	
1	3	2	2.0	1	2 Doku men	205,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	2 Doku men	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.0.1.2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun			0 Dokumen	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.0.1.3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun			1 Dokumen	305,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.0.1.6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			2 Unit	800,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	2 Unit	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.0.1.8	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun			0 KM	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.0.4.6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi			1 KM	1,860,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 KM	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.0.6.5	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			0.5 KM	600,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0.5 KM	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.0.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)			4000	3,905,000,000						4000	6,350,000,000	
1.3.2.0.2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			6 Dokumen	605,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	6 Dokumen	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2.0.2.2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			0.5 KM	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Penyelesaian Permasalahan Layanan	Masyarakat	0.5 KM	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							an, Semua Kelurah an	Umum	an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastrukt ur Kota				N RUANG				
1	3	2	2.0 2	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun			2 Bendu ng	1,200,000,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesai an Permasala han Layanan Infrastrukt ur Kota	Masyaraka t	2 Bendu ng	1,800,000,000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1	3	2	2.0 2	1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			1 KM	550,000,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesai an Permasala han Layanan Infrastrukt ur Kota	Masyaraka t	1 KM	1,300,000,000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1	3	2	2.0 2	1 5	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			2 Bendu ng	400,000,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesai an Permasala han Layanan Infrastrukt ur Kota	Masyaraka t	2 Bendu ng	900,000,000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1	3	2	2.0 2	2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			0.25 KM	650,000,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesai an Permasala han Layanan Infrastrukt ur Kota	Masyaraka t	0.25 KM	650,000,000	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase sarana dan	%	%	91 %	3,660,000,000						91 %	4,000,000,000	



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	prasarana air minum dalam kondisi baik (%)																
1	3	3	2.0	1		900	3,660,000,000					900	4,000,000,000					
1	3	3	2.0	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih (RT)			1 Dokumen	3,600,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Mayarakat	1 Dokumen	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	2.0	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			0 Liter/Detik	60,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Mayarakat	0 Liter/Detik	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	2.0	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				0	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Mayarakat	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Air limbah yang ditangani (%)	%	%	88 %	799,775,000						88 %	1,000,000,000	
1	3	5	2.0		Pengelolaan dan	Jumlah Rumah			216	799,775,000						216	1,000,000,000	



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)																	
1	3	5	2.0	1	2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			216 Rumah Tangga	799,775,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	216 Rumah Tangga	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	%	%	52,34 %	1,475,000,000						52,34 %	3,600,000,000	
1	3	6	2.0	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara (m)			1000	1,475,000,000						1000	3,600,000,000	
1	3	6	2.0	1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun			1 Dokumen	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 Dokumen	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	2.0	1	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			1000 M	875,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1000 M	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Kelurahan		Pelayanan Dasar									
1	3	6	2.0 1	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara			1000 M	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1000 M	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	%	%	79,34 %	7,535,000,000						79,34 %	15,000,000,000	
1	3	7	2.0 1		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara			73	7,535,000,000						73	15,000,000,000	
1	3	7	2.0 1	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			73 Sistem Jaringan	7,535,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	73 Sistem Jaringan	15,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	%	%	66 %	22,036,907,253						66 %	45,975,000,000	
						Persentase gedung	%	%	89 %							89 %		



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		pemerintah dalam kondisi baik (%)													
1	3	8	2.0	1		100	22,036,907,253					100	45,975,000,000		
1	3	8	2.0	1		100	300,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan dan masyarakat	100	175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						0	0					0	0		



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Implementasi SIMBG																	
1	3	8	2.0	1	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			11 Dokumen	21,000,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan dan masyarakat	11 Dokumen	45,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	2.0	1	2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui			0 Unit	736,907,253	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan dan masyarakat	0 Unit	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai				5 Unit							5 Unit		
1	3	#				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	%	%	72,21 %	31,363,013,750						72,21 %	28,600,000,000	
							Persentase jembatan	%	%	79 %							79 %		



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		dalam kondisi terpelihara (%)																
1	3	#	2.0	1		13.9	31,363,013,750					13.9	28,600,000,000					
1	3	#	2.0	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			7 Dokumen	1,000,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	7 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			0 M ²	1,000,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 M ²	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			2 Dokumen	300,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	2 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			2 KM	4,709,438,750		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penyelesaian Permasalahan	Masyarakat	2 KM	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
								Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Layanan Infrastruktur Kota				PENATAAN RUANG				
1	3	#	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			3.4 KM	9,090,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	3.4 KM	9,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			6.5 KM	4,155,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	6.5 KM	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			2 KM	3,458,575,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	2 KM	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun			50 M	6,550,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	50 M	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0	1	Rehabilitasi	Panjang			20 M	600,000,000	Kota	Dana	Memperkuat	Penyelesai	Masyarakat	20 M	700,000,000	DINAS



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Jembatan	Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi					Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	an Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	t			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	#	2.0	1	9	40 M	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	40 M	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#				22,22 %	1,538,242,750						22,22 %	2,865,000,000	
1	3	#	2.0			5	233,242,750						5	1,335,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	%											
1	3	#	2.0												
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (dok)													
1	3	#	2.0	1		1 Dokumen	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0	1		1 Dokumen	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Penyelesaian Permasalahan Layanan	Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	RRTR Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/ Kota						Umum	an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Kota				N RUANG				
		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			0 Dokumen							0 Dokumen						
1	3	#	2.0	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			4 Dokumen	33,242,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	4 Dokumen	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah (kali)			1	1,000,000,000						1	1,200,000,000	
1	3	#	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi			1 Dokumen	800,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penyelesaian Permasalahan	Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Layanan Infrastruktur Kota				PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0 3		32	230,000,000						32	250,000,000	
1	3	#	2.0 3	1		30 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	30 Dokumen	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0 3	2		2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	#	2.0 4		100	75,000,000						100	80,000,000	
1	3	#	2.0 4	4		100 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Maasyarakat	100 Dokumen	80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							an		Dasar									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								1,300,000,000					
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	555,000,000				12 Bulan	1,300,000,000			
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya a Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)			12	55,000,000				12	50,000,000			
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9 Unit	55,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pegawai Pemerintahan	9 Unit	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya a Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)			12	500,000,000					12	1,250,000,000		
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau			4 Unit	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Penyelesaian Permasalahan	Pegawai Pemerintahan	4 Unit	1,250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Layanan Infrastruktur Kota				PERENATAAN RUANG
TOTAL						87,103,594,767						121,305,000,000		

OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	4					15,409,877,718							15,180,212,523		
1	4	1			12 Bulan	11,117,098,468						12 Bulan	12,141,155,348		
1	4	1	2.0		bulan	4,744,223,000						14 bulan	5,218,645,300		
1	4	1	2.0	1		14 bulan	4,744,223,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat daerah	14 bulan	5,218,645,300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Pelayanan Dasar									
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi pegawai (%)	%	%	2 %	25,000,000				2 %	27,500,000			
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 orang	25,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	8 orang	27,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	667,989,300					100 %	734,788,030		
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	4,727,800	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	1 paket	5,200,580	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	360,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	1 paket	396,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.0	4	Penyediaan Bahan	jumlah paket			1 paket	40,002,000	Semua	Dana		Penyelesaian	Perangkat	1 paket	44,002,000	DINAS



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
							Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota				LINGKUNGAN HIDUP			
1	4	1	2.08			100 %	4,864,024,918					100 %	5,262,774,643				
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	15,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 Laporan	16,830,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	242,799,918	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 laporan	267,079,910	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 laporan	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 laporan	8,250,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
														LINGKUNGAN HIDUP				
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 laporan	4,598,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	12 laporan	4,970,614,733	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	%	%		100 %	815,861,250					100 %	897,447,375	
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				71 Unit	790,881,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	71 Unit	869,969,375	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	13,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Perangkat Daerah	35 Unit	14,388,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang				1 unit	11,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur	Perangkat Daerah	1 unit	13,090,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dipelihara/dir ehabilitasi					an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Kota				PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	2			90 %	494,665,750						90 %	544,132,325	
1	4	2	2.0		10 unit	63,717,750						10 unit	70,089,525	
1	4	2	2.0	5	1 Dokumen	63,717,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana atau Relokasi	1 Dokumen	70,089,525	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	2	2.0	2	2 kali	21,265,000						2 kali	23,391,500	
1	4	2	2.0	1	60 Orang	21,265,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer		Penyelesaian Permasalahan	Kelompok masyarakat	60 Orang	23,391,500	DINAS PERUMAHAN



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota					, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		n Layanan Infrastruktur Kota				AN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	2	2.03									10 unit	440,863,500	
1	4	2	2.03	1								20 Unit Rumah	440,863,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	2	2.04									10 unit	8,898,000	
1	4	2	2.04	2								1 Doku men	9,787,800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					Semua Kelurahan	Umum						MAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	4	3			85 %	2,145,617,500						85 %	1,656,179,250		
1	4	3	2.0			5,617,500						16 kawasan	6,179,250		
1	4	3	2.0	2		5,617,500					Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat sesuai SK kawasan kumuh	2 Dokumen	6,179,250	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	3	2.0		90 %	2,140,000,000						90 %	1,650,000,000		
1	4	3	2.0	2		2,140,000,000					Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur	Masyaraakat berpenghasilan rendah dan	75 Unit Rumah	1,650,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Kota	prasejahtera			PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	4			19,08 Ha	122,496,000						19,08 Ha	134,745,600	
1	4	4	2.01		6 unit	122,496,000						6 unit	134,745,600	
1	4	4	2.01	1	6 Unit Rumah	122,496,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	6 Unit Rumah	134,745,600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	5			85 %	1,530,000,000						85 %	704,000,000	



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	4	5	2.0 1		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang tertata	paket	paket	19 paket	1,530,000,000					19 paket	704,000,000		
1	4	5	2.0 1	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			8 lokasi	1,530,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan perumahan dan permukiman	8 lokasi	704,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					97,708,500							107,479,350	
2	1	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	%	%	100 %	26,167,500						100 %	28,784,250	
2	1	4	2.0 1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	kasus	kasus	1 kasus	26,167,500						1 kasus	28,784,250	
2	1	4	2.0 1	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	6,300,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat pemilik dan penggarap tanah	1 dokumen	6,930,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 1 0	4 2.0 1	2			3 berita acara	19,867,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat pemilik dan penggarap tanah	3 berita acara	21,854,250	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1 0	6			100 %	35,301,000						100 %	38,831,100	
2	1 0	6	2.0 1		1 dokumen	35,301,000						1 dokumen	38,831,100	
2	1 0	6	2.0 1	1	1 dokumen	19,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan hutan HPK	1 dokumen	21,861,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1062.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		1 Dokumen	7,127,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan hutan HPK	1 Dokumen	7,839,700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1062.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	8,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kawasan hutan HPK	1 Dokumen	9,130,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	107	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)	%	%	100 %	14,400,000					100 %	15,840,000	
2	107.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yang akan dikeluarkan surat penetapannya dalam satu tahun	laporan	laporan	1 laporan	14,400,000					1 laporan	15,840,000	



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		anggaran												
2.1.7.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	14,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Ulayat nagari dari 4 (empat) kecamatan	1 laporan	15,840,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)	%	%	100 %	17,910,000						100 %	19,701,000	
2.1.9.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	dokumen	dokumen	1 dokumen	17,910,000						1 dokumen	19,701,000	
2.1.9.2.01.2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara			1 dokumen	17,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	masyarakat pemilik tanah dan Pemerintah Kota	1 dokumen	19,701,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.1.0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)	%	%	80 %	3,930,000						80 %	4,323,000	
2.1.1.0.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya	Jumlah koordinasi dan	laporan	laporan	1 laporan	3,930,000						1 laporan	4,323,000	



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	sinkronisasi pada OPD terkait penggunaan tanah																
2	1 0	1 0	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			1 laporan	3,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	masyarakat pemilik dan penggarap tanah	1 laporan	4,323,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1,586,329,300			1,744,973,890					
2	1 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	%	%	75 %	40,604,450					75 %	44,665,885		
2	1 1	3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	%	%	75 %	27,711,800					75 %	30,482,980		
2	1 1	3	2.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			2 Dokumen	5,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	pelaku kegiatan/usaha	2 Dokumen	5,720,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.1.3.2.0.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 dokumen	22,511,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	pelaku kegiatan/usaha	1 dokumen	24,762,980	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.1.3.2.0.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hiduap	%	%	18 %	12,892,650						18 %	14,182,905		
2.1.3.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			1 dokumen	12,892,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	25 Ha areal bekas tambang yang direklamasi	1 dokumen	14,182,905	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	%	%	100 %	287,841,200						100 %	316,625,320		
2.1.4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas taman dan lampu hias taman yang terpelihara (%)	%	%	100 %	287,841,200						100 %	316,625,320		
2.1.4.2.0	Pengelolaan	Luas Taman			5 ha	16,813,200	Semua	Dana	Membang	Penyelesaian	Kelompok	5 ha	18,494,520	DINAS	



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	un Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	masyarakat dan Instansi Pemerintah			PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			6.4 Ha	227,387,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kelompok masyarakat dan Instansi Pemerintah	6.4 Ha	250,125,700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			1 unit	43,641,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kelompok masyarakat dan Instansi Pemerintah	1 unit	48,005,100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	%	75 %	8,549,500						75 %	9,404,450	



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		HIDUP (PPLH)															
2	1 1	6 1	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha berizin yang dibina dan diawasi	%	%	75 %	8,549,500				75 %	9,404,450		
2	1 1	6 1	2.0 1	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	8,549,500	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Pelaku usaha/kegiatan	1 laporan	9,404,450	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)	%	%	100 %	72,420,600					100 %	79,673,330	
2	1 1	8	2.0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti	orang	orang	70 orang	72,420,600					70 orang	79,673,330	



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	diklat lingkungan														
2	1 1	8 1	2.0 1	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			3 Lembaga	17,430,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	lembaga kemasyarakatan tingkat kota/kecamatan/desa/kelurahan	3 Lembaga	19,173,660	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	8 1	2.0 1	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			4 Dokumen	54,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	lembaga kemasyarakatan tingkat kota/kecamatan/desa/kelurahan	4 Dokumen	60,499,670	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh			1	22,000,100					1	24,200,110	
2	1 1	9	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	penghargaan	penghargaan	1 penghargaan	22,000,100					1 penghargaan	24,200,110	
2	1 1	9	2.0 1	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang			4 Entitas	22,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	4 Entitas	24,200,110	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH												LINGKUNGAN HIDUP	
2	1 1	1 1			22 %	1,154,913,450						22 %	1,270,404,795		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%)	%	%	22 %	1,154,913,450						22 %	1,270,404,795		
		Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	%	%	77 %									77 %	
2	1 1	1 1	2.0 1		99 %	1,154,913,450						99 %	1,270,404,795		
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (ton)	%	%	99 %	1,154,913,450						99 %	1,270,404,795		
2	1 1	1 1	2.0 1	3			6950 Ton	756,604,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota		Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dah Sekolah	6950 Ton
2	1 1	1 1	2.0 1	5		1 Dokumen	398,308,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dah Sekolah	1 Dokumen	438,139,460	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi			1 Dokumen	398,308,600					Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dah Sekolah	1 Dokumen	438,139,460	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	4								320,020,965				352,023,089				
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	%	%	90 %	320,020,965			90 %	352,023,089			
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terkelolanya rumah susun	bulan	bulan	12 bulan	320,020,965			12 bulan	352,023,089			
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1 Laporan	162,499,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat penghuni rumah susun	1 Laporan	206,709,789	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun	Jumlah Dokumen Pemanfaatan			1 Dokumen	157,521,925	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Penyelesaian Permasalahan Layanan	Masyarakat penghuni rumah susun	1 Dokumen	145,313,300	DINAS PERUMAHAN,



OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		Infrastruktur Kota				KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2	1	3			75 %	236,512,980						75 %	260,164,278	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	%	%	75 %	236,512,980						75 %	260,164,278	
2	1	3	2.0		75 %	236,512,980						75 %	260,164,278	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	%	%	75 %	236,512,980						75 %	260,164,278	
2	1	3	2.0	3	1 Dokumen	236,512,980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan lingkungan	1 Dokumen	260,164,278	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL						17,650,449,463						17,644,853,130		

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										9,827,717,872				9,931,166,483	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	9,170,928,122							12 Bulan	9,211,402,245		
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan administrasi keuangan (Bulan)	Bulan	Bulan	14 Bulan	5,848,313,537							14 Bulan	6,037,656,930		
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	5,848,313,537	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	ASN Satpol PP dan Damkar yang menerima Gaji dan Tunjangan		14 Orang/bulan	6,037,656,930	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Perentase ASN Berpakaian dinas dengan Adribut lengkap (Persen)	Persen	Persen	100 Persen	468,880,000							100 Persen	492,324,000		
					2. Persentase aparatur yang meningkat SDM Nya (persen)))	Persen	Persen	100 Persen											100 Persen	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Satpol PP dan Damkar yang terpenuhi (Stel Lengkap)			1 Tahun	428,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Seluruh Pegawai Satpol PP dan damkar dan Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan uji kopetensi		1 Tahun	450,324,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut			0 Paket								0 Paket			



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kelengkapan																
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan (Paket)			1 Paket							1 Paket						
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Megikuti diklat dan Uji kopetensi (Orang)			10 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Seluruh Pegawai Satpol PP dan damkar dan Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan uji kopetensi	10 Orang	42,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terfasilitasinya pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	354,121,100						12 Bulan	371,827,155	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	1 Paket	5,775,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	1 Paket	157,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan			1 Paket	70,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Penyelesaian	Terpenuhinya kebutuhan	1 Paket	73,500,000	SATUAN POLISI



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Logistik Kantor yang Disediakan					a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	di kantor Satpol PP dan damkar			PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	28,499,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	1 Paket	29,924,055	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	100,122,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya kebutuhan di kantor Satpol PP dan damkar	12 Laporan	105,128,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	2,378,143,235						12 Bulan	2,182,050,397	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	6,529,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya penerangan dan Air Di kantor Satpol PP dan damkar	12 Laporan	6,856,448	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Jasa	Jumlah			12 Laporan	56,131,685	Semua	Dana	Memperkuat	Penyelesaian	Terpenuhinya	12 Laporan	58,938,269	SATUAN



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			an		Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	t Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	n Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	a penerangan dan Air Di kantor Satpol PP dan damkar	an		POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.08	4	12 Laporan	2,315,481,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Terpenuhinya penerangan dan Air Di kantor Satpol PP dan damkar	12 Laporan	2,116,255,680	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09		12 Bulan	121,470,250						12 Bulan	127,543,763	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	106,110,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kendaraan dinas gedung kantor atau bangunan lainnya yang ada di kantor satpol PP dan damkar	11 Unit	111,415,763	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	1	11 Unit	106,110,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kendaraan dinas gedung kantor atau bangunan lainnya yang ada di kantor satpol PP dan damkar	11 Unit	111,415,763	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	1	40 Unit	15,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kendaraan dinas gedung kantor atau bangunan lainnya yang	40 Unit	16,128,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			40 Unit	15,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Kendaraan dinas gedung kantor atau bangunan lainnya yang	40 Unit	16,128,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi					Semua Kelurahan		Publik		ada di kantor satpol PP dan damkar			M KEBAKARAN	
1	5	2			100 %	284,516,000						100 %	298,741,800		
1	5	2	2.0 1		100 Persen	167,620,000						100 Persen	176,001,000		
1	5	2	2.0 1	1		0 Kasus	65,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Semua Kabupaten/ Kota Kecamatan dan semua desa kelurahan	0 Kasus	68,796,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						65 Kasus							65 Kasus		



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (Kasus)																	
1	5	2	2.0	1	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			0 Kasus	32,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Semua Kabupaten/ Kota Kecamatan dan semua desa kelurahan	0 Kasus	33,705,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan			8 Kasus						8 Kasus				



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Kasus)																	
1	5	2	2.0	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (Orang)			490 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Semua Kabupaten/ Kota Kecamatan dan semua desa kelurahan	490 Orang	73,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	2	2.0		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan perkada yang ditegakkan (Perda)	Kasus	Kasus	220 Kasus	91,896,000						220 Kasus	96,490,800		
1	5	2	2.0	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (Laporan)			4 Laporan	30,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat dan penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur Kota	4 Laporan	31,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.0	2	Pengawasan Atas Kepatuhan	Terlaksananya Pengawasan			25 Laporan	21,896,000		Semua Kab/Kot	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Penyelesaian	Masyarakat dan	25 Laporan	22,990,800	SATUAN POLISI



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (Laporan)					a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur Kota			PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1	5	2	2.0 2	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP (Laporan)			48 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat dan penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur Kota	48 Laporan	42,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	2.0 3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	terpenuhinya aparatur yang mengikuti pembinaan PPNS (Orang)	Orang	Orang	1 Orang	25,000,000						1 Orang	26,250,000	
1	5	2	2.0 3	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			0 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dal Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0 Laporan	26,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		serta Penegakan Perda dan Perkada									Serta Penegakan Perda dan Perkada			
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Laporan)			1 Laporan							1 Laporan		
1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kerjasama penanganan pencegahan kebakaran (%)	%	%	100 %	372,273,750				100 %	421,022,438
					Persentase penanganan kebakaran (%)	%	%	100 %					100 %	
1	5	4	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SOP penanganan bahaya kebakaran (Laporan))	Kasus	Kasus	50 Kasus	333,273,750				50 Kasus	380,072,438



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.4.2.0.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya (Dokumen)			4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Laporan dari masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	30,135,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.5.4.2.0.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			0 Laporan	254,573,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Laporan dari masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	0 Laporan	267,302,438	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			25 Laporan							25 Laporan		
1.5.4.2.0.3	Penyelamatan dan	Jumlah			1 Dokumen	28,700,000		Dana	Memperkuat	Penyelesaian	Laporan dari	1 Dokumen	30,135,000	SATUAN



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			men			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	n Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	men		POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			5 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Laporan dari masyarakat dan kasus kebakaran yang ada di Kabupaten/ Kota	5 Orang	52,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	tersedianya data penyebab kejadian kebakaran (Laporan)	Laporan	Laporan	25 Laporan	10,500,000						25 Laporan	11,025,000	
1	5	4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian			0 Dokumen	10,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat	0 Dokumen	11,025,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian							Publik					M KEBAKARAN			
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dokumen)			25 Dokumen							25 Dokumen					
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Sosialisasi yang diadakan (Kegiatan)	Orang	Orang	80 Orang	28,500,000				80 Orang	29,925,000		
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap			0 Orang	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelesaian Permasalahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya.	0 Orang	29,925,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tahunnya												
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)			80 Orang							80 Orang		
TOTAL						9,827,717,872						9,931,166,483		

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
1	6													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6,162,764,434							6,365,750,000	



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pendidikan dan Pelatihan							Berkualitas Dan Berdaya Saing					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.06		100 0	279,000,000						100 0	333,000,000	
1	6	1	2.06	1	2 Paket	3,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DinsosPMD PPA	2 Paket	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.06	2	2 Paket	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	DinsosPMD PPA	2 Paket	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.06	4	2 Paket	60,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	DinsosPMD PPA	2 Paket	65,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									Dasar								
1	6	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	45,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DinsosPMD PPA	2 Paket	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	1,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DinsosPMD PPA	2 Dokumen	3,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			70 Laporan	120,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DinsosPMD PPA	70 Laporan	155,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya barang daerah milik kantor	0	0	100 0	20,000,000					100 0	25,000,000	
1	6	1	2.0	1	Pengadaan Sarana	Jumlah Unit			5 Unit	20,000,000	Kota	Dana	Memperk	DinsosPMD	5 Unit	25,000,000	DINAS



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	uat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban g Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPA			SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	2.0 8	0	0	100 0	865,466,000					100 0	1,010,000,000	
1	6	1	2.0 8	1		1 Lap oran	3,500,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	DinsosPMD PPA	1 Lapo ran	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	2.0 8	2		3 Lapo ran	50,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	DinsosPMD PPA	3 Lapo ran	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	2.0 8	4		12 La poran	811,966,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita	DinsosPMD PPA	12 Lapo ran	950,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Disediakan							s Dan Berdaya Saing					DAN PERLINDUNG AN ANAK				
1	6	1	2.0 9			100 0	145,000,000					100 0	152,000,000					
1	6	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20 Un it	125,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan DinsosPMD PPA	20 Uni t	130,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
1	6	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			4 Unit	20,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan DinsosPMD PPA	4 Unit	22,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan	%	%	100 %	55,400,000					100 %	59,400,000		
1	6	2	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TKSK yang dikembangka n	0	0	41 0	55,400,000					41 0	59,400,000		
1	6	2	2.0	1	Peningkatan	Jumlah Orang			37 Or	50,400,000	Kota	Dana	Meningkat	Peningkata	PSM dan	37 Ora	52,400,000	DINAS



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		yang terfasilitasi																
1	6	4	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi (orang)	0	0	315 0	516,350,000				315 0	577,350,000			
1	6	4	2.0 1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			35 Orang	11,900,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	PMKS Kota Sawahlunto	35 Orang	13,900,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	2.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			35 Orang	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	PMKS Kota Sawahlunto	35 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.4.2.0.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	8,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	PMKS Kota Sawahlunto	10 Orang	10,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.6.4.2.0.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			8 Orang	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	PMKS Kota Sawahlunto	8 Orang	6,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.6.4.2.0.1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			25 Orang	45,450,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	PMKS Kota Sawahlunto	25 Orang	47,450,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.6.4.2.0.8	Pemberian Akses ke	Jumlah Orang			80 Orang	176,000,000	Kota	Dana	Memperkuat	Peningkatan	PMKS Kota	80 Orang	200,000,000	DINAS



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			ang		Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	uat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	n Kualitas SDM yang berdaya Saing	Sawahlunto	ng		SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			150 Orang	270,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	PMKS Kota Sawahlunto	150 Orang	300,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani (Orang)	0	0	225 0	100,000,000						225 0	150,000,000	
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Orang	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	PMKS Kota Sawahlunto	60 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang			220 Orang	100,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat	Peningkatan	PMKS Kota Sawahlunto	220 Orang	150,000,000	DINAS SOSIAL,



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					to, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Produktivitas Sektor Ekonomi				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	5										100 %	54,000,000	
1	6	5	2.0									1582 0	54,000,000	
1	6	5	2.0	1								1582 0	17,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	5	2.0	3								35 Keluarga	37,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kewenangan Kabupaten/K ota							n						
1	6	6			100 %	80,000,000						100 %	100,000,000		
1	6	6	2.0 1		100 0	30,000,000						100 0	35,000,000		
1	6	6	2.0 1	1		30 Or ang	30,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper uat Ketahan an Econo mi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Peningkata n Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Kota Sawahlunto	30 Ora ng	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	6	2.0 2		100 0	50,000,000						100 0	65,000,000		
1	6	6	2.0 2	2		29 Or ang	50,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper uat Ketahan an Econo mi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita	Peningkata n Kualitas SDM yang berdaya Saing	Tagana Kota Sawahlunto	29 Ora ng	65,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							s dan Berkeadilan					PERLINDUNGAN ANAK
1	6	7												
1	6	7												
1	6	7	2.01											
1	6	7	2.01	2										
1	6	7	2.01	2										
2														
2	8													
2	8	2												
2	8	2	2.01											



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Kabupaten/Kota																	
2	8	2	2.0 1	3					26 Perangka t Daerah	18,162,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa/kel se Kota Sawahlunto	26 Per angkat Daerah	20,162,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.0 2		0	0			100 0	70,000,000						100 0	0	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2	8	2	2.0 2	2					28 Organisasi	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Perempuan se Kota Sawahlunto	28 Organisasi	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/K ota																
2	8	2	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaa n perempuan	0	0	10	50,000,000				10	52,000,000			
2	8	2	2.0 3	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota yang Tersedia			2 Dok umen	50,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran gi Kesenjang an Dan Menjamin Pemerataa n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Lembaga di Kota Sawahlunto	2 Doku men	52,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)	%	%	100 %	0					100 %	0		
2	8	3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	0	0	120	0					120	0		
2	8	3	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan			2 Dok umen	0	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Anak dan Perempuan Kota Sawahlunto	2 Doku men	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
									Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kelurahan	Umum	gi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan					, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	3	2.0 2		0	0	10	0				10	0			
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan														
2	8	3	2.0 2	2			3 Layanan	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perempuan Kota Sawahlunto	3 Layanan	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3	2.0 3		0	0	10	0								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan														



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Daerah Kabupaten/Kota																	
2	8	3	2.0	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			3 Orang	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Perempuan Kota Sawahlunto	3 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)	%	%	100 %	126,700,000						100 %	32,700,000	
2	8	4	2.0	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak (bulan)	0	0	120	111,700,000						120	13,700,000	
2	8	4	2.0	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan			26 Perangkat Daerah	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Keluarga se Kota Sawahlunto	26 Perangkat Daerah	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Berkeadilan					AN ANAK				
2	8	4	2.0 1	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Dokumen	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Keluarga se Kota Sawahlunto	2 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.0 1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	11,700,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Keluarga se Kota Sawahlunto	2 Dokumen	13,700,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	0	0	20	15,000,000						20	19,000,000	



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Lembaga)																
2	8	4	2.0 2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			1 Lem baga	10,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	lembaga se Kota Sawahlunto	1 Lem baga	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	4	2.0 2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Ora ng	5,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	lembaga se Kota Sawahlunto	3 Oran g	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	4	2.0 3		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak (lembaga)			10	0						10	0	
2	8	4	2.0 3	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi	Jumlah Layanan Komprehensif			2 Laya nan	0	Kota Sawahlun to, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperk uat Ketahan an	Pemantapa n Reformasi	Keluarga se Kota Sawahlunto	2 Laya nan	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Birokrasi Pemerintah				AAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6												
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (%)	%	%	Utama %	10,000,000						Utama %	12,000,000	
2	8	6	2.0											
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang terpenuhi haknya	0	0	100 0	10,000,000						100 0	12,000,000	
2	8	6	2.0	1										
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,			37 Organisasi	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa/Kel se Kota Sawahlunto	37 Organisasi	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																
2	8	6	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/K ota			1 Dok umen	10,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran gi Kesenjang an Dan Menjamin Pemerataa n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa/Kel se Kota Sawahlunto	1 Doku men	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	6	2.0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	0	0	42 0	0						42 0	0	
2	8	6	2.0 2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota			1 Dok umen	0	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran gi Kesenjang an Dan Menjamin Pemerataa n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa/Kel se Kota Sawahlunto	1 Doku men	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase perlindungan	%	%	100 %	154,551,750						100 %	76,551,750	



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		KHUSUS ANAK	khusus bagi anak (%)															
2	8	7	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	0	0	12 0	0				12 0	0			
2	8	7	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Anak se Kota Sawahlunto	2 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7	2.0 2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0	1 0	74,551,750						1 0	76,551,750	
2	8	7	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan			1 Layanan	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Lembaga anak Kota Sawahlunto	1 Layanan	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Khusus Kewenangan Kabupaten/K ota																
2	8	7	2.0 2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/K ota			1 Dok umen	74,551,750	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran gi Kesenjang an Dan Menjamin Pemerataa n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Lembaga anak Kota Sawahlunto	1 Doku men	76,551,750	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	7	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)	0	0	42 0	80,000,000						42 0	0	
2	8	7	2.0 3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan			1 Dok umen	80,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran gi Kesenjang an Dan Menjamin Pemerataa n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Anak se Kota Sawahlunto	1 Doku men	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Khusus Kewenangan Kabupaten/K ota																
2	1 3					1,910,170,618							981,824,618					
2	1 3	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi desa yang dibina	%	%	100 %	965,984,118				100 %	531,638,118			
2	1 3	4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	0	0	27 0	965,984,118				27 0	531,638,118			
2	1 3	4	2.0 1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa			27 DO KUME N	5,346,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berqualita s dan Berkeadila n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa se Kota Sawahlunto	27 DO KUME N	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	1 3	4	2.0 1	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			27 Do kume n	5,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berqualita s dan Berkeadila n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa se Kota Sawahlunto	27 Dok umen	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	1 3	4	2.0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan			27 Do kume n	32,184,700	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa se Kota Sawahlunto	27 Dok umen	34,184,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Desa					Kelurahan	Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	1 3	4	2.0 1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			342 Orang	393,006,168	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	342 Orang	395,006,168	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.0 1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			24 Dokumen	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	24 Dokumen	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.0 1	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			9 Laporan	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	9 Laporan	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1 3	4	2.0 1	1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa			27 Dokumen	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan	Peningkatan Kualitas SDM yang	Desa se Kota Sawahlunto	27 Dokumen	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		yang tersusun						Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	berdaya Saing				AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK				
2	1 3	4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			27 Do kume n	13,600,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Peningkata n Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	27 Dok umen	15,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	1 3	4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			37 Do kume n	51,847,250	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualita s dan Berkeadila n	Peningkata n Kualitas SDM yang berdaya Saing	Desa se Kota Sawahlunto	37 Dok umen	53,847,250	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	1 3	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	%	%	100 %	944,186,500						100 %	450,186,500	
2	1 3	5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang	0	0	185 0	944,186,500						185 0	450,186,500	



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	pemberdayaan desa													
2.1.5.2.0.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			41 Lembaga	419,186,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Lembaga Adat, LPM, Posyandu, PKK se Kota Sawahlunto	41 Lembaga	71,186,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.1.5.2.0.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			37 Laporan	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Lembaga Adat, LPM, Posyandu, PKK se Kota Sawahlunto	37 Laporan	22,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	



OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Saing					AN ANAK
2.1.3.5.2.0.1.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			37 Laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Lembaga Adat, LPM, Posyandu, PKK se Kota Sawahlunto	37 Laporan	7,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.1.3.5.2.0.1.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			42 Dokumen	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Lembaga Adat, LPM, Posyandu, PKK se Kota Sawahlunto	42 Dokumen	350,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TOTAL						8,502,348,802							7,540,988,368	

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Target Akhir Periode	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	



					Kegiatan	Kegiatan	RPJMD	RKPD Tahun 2022	2023						Dana	Nasional	Daerah			ung Jawab			
1					2		3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12,774,893,714	12,269,393,714								12 Bulan	14,224,202,141	13,559,202,141		
2	9	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program / kegiatan RPJMD ke dalam RKPD	%	%	100 %	10,000,000									100 %	11,000,000			
2	9	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	10,000,000		Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen			11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	9	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9,689,416,714										10,477,202,141			
2	9	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			80 Orang/bulan	9,689,416,714		Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						80 Orang/bulan	10,477,202,141	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	9	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase aparatur yang meningkat SDMnya	%	%	20 %	65,000,000									20 %	75,000,000			
2	9	1	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	65,000,000		Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		ASN DKP3	10 Orang			75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	9	1	2.0 6						12 bulan	815,000,000					12 bulan	980,000,000		
2	9	1	2.0 6	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib	bulan	bulan	12 bulan	815,000,000					12 bulan	980,000,000		
2	9	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan			1 Paket	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DKP3	1 Paket	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	185,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	ASN DKP3	1 Paket	175,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60 Paket	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DKP3	60 Paket	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DKP3	6 Paket	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.0	9	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan			150 Lap	500,000,000	Semua	Dana	Memperkuat		ASN DKP3	150 Lap	650,000,000	DINAS



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					oran		Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			oran		KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
2	9	1	2.08			12 bulan						12 bulan	1,106,000,000	
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi perkantoran berjalan lancar dan tertib								
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					ASN DKP3	1 Laporan	6,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					ASN DKP3	12 Laporan	150,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					ASN DKP3	1 Laporan	50,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					ASN DKP3	12 Laporan	900,000,000	DINAS KETAHAN AN



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kantor yang Disediakan					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.09			12 bulan	685,000,000					12 bulan	910,000,000	
2	9	1	2.09	2		87 Unit	477,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Asset DKP3	87 Unit	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.09	5		20 Unit	8,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Asset DKP3	20 Unit	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	1	2.09	9		3 Unit	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Asset DKP3	3 Unit	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	2				75 %	20,000,000					75 %	40,000,000	



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)														
2	9	2	2.0 1			20 %	20,000,000						20 %	40,000,000			
2	9	2	2.0 1	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			2 Unit	20,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Muaro Kalaban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kelompok tani	2 Unit	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH			86	353,000,000				86	440,000,000		
2	9	3	2.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan pangan pokok	Kg/Kap/Thn	Kg/Kap/Thn	142 Kg/Kap/Thn	16,000,000					142 Kg/Kap/Thn	25,000,000	
2	9	3	2.0 1	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani			1 Unit	16,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Masyarakat	1 Unit	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Indonesia yang Dikembangkan					Mudiak	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan					AN DAN PERIKAN AN			
2	9	3	2.0			36,000,000							100,000,000				
2	9	3	2.0	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			2 Ton	36,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyaraka t Terdampak	2 Ton	100,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
2	9	3	2.0	4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi	Kkal/Kapita/Tahun	Kkal/Kapita/Tahun	1.812 Kkal/Kapita/Tahun	301,000,000					1.812 Kkal/Kapita/Tahun	315,000,000	
						Protein	Gr/Kapit	Gr/Kapit	55 Gr/Kapit								55 Gr/Kapit
2	9	3	2.0	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			5 Laporan	290,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyaraka t	5 Laporan	300,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
2	9	3	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			1 Laporan	11,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyaraka t	1 Laporan	15,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	9	4			6 %	57,500,000						6 %	75,000,000	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	%									
2	9	4	2.0 1		1	7,500,000						1	10,000,000	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan											
2	9	4	2.0 1	1	1 Doku men	7,500,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyaraka t	1 Doku men	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	4	2.0 2		1	50,000,000						1	65,000,000	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa rawan Pangan yang ditangani											
2	9	4	2.0 2	1	12 Lapo ran	50,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyaraka t/Desa Rawan Pangan	12 Lapo ran	65,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota											
2	9	5			91 %	75,000,000						91 %	110,000,000	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	%	%									



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 9 5 2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komoditi Kelompok Pangan Konsumsi yang diawasi			30	75,000,000						30	110,000,000	
2 9 5 2.0 1 2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Sertifikat	30,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	1 Sertifikat	45,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 9 5 2.0 1 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	4 Dokumen	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 9 5 2.0 1 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			5 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	5 Dokumen	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 2 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					308,500,000						415,000,000		
3 2 5 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan (ton)	Ton	Ton	218 Ton	248,500,000						218 Ton	325,000,000	
3 2 5 4 2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan					248,500,000							325,000,000	



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Ikan																
3	2 5	4	2.0 4	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	106,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 5	4	2.0 4	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	135,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	1 Unit	145,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 5	4	2.0 4	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			1 Dokumen	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 5	4	2.0 4	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			1 Orang	2,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	1 Orang	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 5	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	kg/kap/tahun	kg/kap/tahun	36,67 kg/kap/tahun	60,000,000						36,67 kg/kap/tahun	90,000,000	
3	2	6	2.0		Pembinaan Mutu	Jumlah produksi	Kg	Kg	275 Kg	60,000,000						275 Kg	90,000,000	



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab		
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
									Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		terhadap lahan pertanian														
3	2 7	2 2.0 1			100 %	99,474,200						100 %	175,000,000			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok penerima sarana yang didampingi	%	%							95 %				
			Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang disalurkan	%	%	95 %										
3	2 7	2 2.0 1	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			12 Laporan	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	12 Laporan	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	2 2.0 1	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			4 Laporan	84,474,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	4 Laporan	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	2 2.0 2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktifitas Kakao	Ton/Ha	Ton/Ha	1.13 Ton/Ha	454,000,000					1.13 Ton/Ha	700,000,000	
				Produktifitas Karet	Ton/Ha	Ton/Ha	1.28 Ton/Ha							1.28 Ton/Ha		
				Produktifitas Padi	Ton/GKG/Ha	Ton/GKG/Ha	5.19 Ton/GKG/Ha							5.19 Ton/GKG/Ha		
3	2 7	2 2.0 2	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			1 VUB	86,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Masyarakat	1 VUB	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
							Utara Sikabu		Berkualitas dan Berkeadilan					PERIKAN AN			
3	2 7	2	2.0 2	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			3 Dokumen	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	3 Dokumen	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	2	2.0 2	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			2 Dokumen	298,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	2 Dokumen	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	2	2.0 3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kategori lomba yang dimenangkan Presentase benih unggul layak edar	kategori %	kategori %	0 kategori 95 %	50,000,000					0 kategori 95 %	75,000,000	
3	2 7	2	2.0 3	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			1 Laporan	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	1 Laporan	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	2	2.0 5		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran	Persentase Kelahiran sapi yg di IB	%	%	37 %	100,000,000					37 %	135,000,000	



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota																
3	2 7	2	2.0 5	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar			300 Ekor	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Peternak	300 Ekor	135,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	2	2.0 6		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi Ternak Ayam Kampung Jumlah Populasi Ternak Itik Ternak Kambing	ekor ekor ekor	ekor ekor ekor	49845 ekor 15022 ekor 2275 ekor	2,395,000,000					49845 ekor 15022 ekor 2275 ekor	1,700,000,000	
3	2 7	2	2.0 6	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1500 Ekor	2,395,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Peternak	1500 Ekor	1,700,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	%	%	2,5 %	3,075,000,000					2,5 %	2,710,000,000	
3	2 7	3	2.0 1		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Realisasi Perencanaan	%	%	66 %	180,000,000					66 %	210,000,000	
3	2 7	3	2.0 1	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2			1 Dokumen	30,000,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	35,000,000	DINAS KETAHANAN



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Berkelanjutan/LP2B	B					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
3	2	3	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			6 Laporan	150,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	6 Laporan	175,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2	3	2.0		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi yang Terpenuhi	%	%	60 %	2,895,000,000					60 %	2,500,000,000	
3	2	3	2.0	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara			4 Unit	960,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	4 Unit	900,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2	3	2.0	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	1 Unit	340,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2	3	2.0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	725,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Masyarakat	2 Unit	360,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									Berkualitas dan Berkeadilan					PERIKAN AN			
3	2 7	3	2.0 2	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	800,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	2 Unit	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	3	2.0 2	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	10,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	2 Unit	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	3	2.0 2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	1 Unit	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)	%	%	10 %	388,000,000					10 %	465,000,000	
3	2 7	4	2.0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Ternak yang aman dari penyakit PHMS dan Zoonosis	%	%	100 %	95,000,000					100 %	125,000,000	



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab		
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
									Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota															
3	2 7	4 2.0 1	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			4 Laporan	95,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	4 Laporan	125,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	4 2.0 3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang terlayani	ekor	ekor	3500 ekor	238,000,000					3500 ekor	275,000,000	
3	2 7	4 2.0 3	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			4 Laporan	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Peternak	4 Laporan	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	4 2.0 3	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			4 Laporan	223,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Peternak	4 Laporan	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	4 2.0 4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat	Jumlah UPH yang berstatus Pra NKV	UPH	UPH	2 UPH	55,000,000					2 UPH	65,000,000	



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Veteriner																	
3	2 7	4	2.0 4	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			3 Laporan	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Unit Pengolahan Hasil	3 Laporan	35,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	4	2.0 4	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			2 Laporan	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Unit Pengolahan Hasil	2 Laporan	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	%	%	10 %	160,000,000					10 %	200,000,000	
3	2 7	5	2.0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis komoditi yang dikendalikan	jenis	jenis	5 jenis	160,000,000					5 jenis	200,000,000	
3	2 7	5	2.0 1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			320 Ha	160,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	320 Ha	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	2 7	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan	kelompok / Wilayah Binaan	kelompok / Wilayah Binaan	5 kelompok / Wilayah Binaan	405,000,000					5 kelompok / Wilayah Binaan	265,000,000	



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		(kelompok / Wilayah Binaan)															
		Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	%	%	5,55 %							5,55 %					
3	2 7	7	2.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	kelembag aan	kelembag aan	1 kelem bagaan	405,000,000			1 kelem bagaan	265,000,000			
						Jumlah ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	ketenaga an	ketenaga an	1 keten agaan				1 ketena gaan				
3	2 7	7	2.0 1	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			4 Unit	330,000,000	Kota Sawahlun to, Barangin, Kolok Nan Tuo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	4 Unit	150,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
3	2 7	7	2.0 1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			170 Uni t	35,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	170 Unit	55,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN
3	2 7	7	2.0 1	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			2 Unit	20,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	2 Unit	35,000,000	DINAS KETAHAN AN PANGAN, PERTANI AN DAN PERIKAN AN



OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3	2	7	2.0	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk			1 Unit	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyuluh DKP3 dan Kelompok Tani	1 Unit	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
TOTAL										20,209,867,914						21,064,202,141		

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	3,916,752,515						12 Bulan	4,732,718,280			
2	1	2	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah			20	2,534,393,468						20	2,970,000,000			
2	1	2	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21 Orang/bulan	2,534,393,468	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan	ASN Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	21 Orang/bulan	2,970,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										Berkualitas Dan Berdaya Saing	an TIK dan MPP							
2	1 2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan	laporan	1 laporan	17,000,000			1 laporan	33,000,000				
2	1 2	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	17,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	2 Paket	33,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			100	274,189,000				100	315,150,000			
2	1 2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	1 Paket	4,950,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	102,189,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	1 Paket	121,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										Berkualitas Dan Berdaya Saing	an TIK dan MPP							
2	1 2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	24,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	12 Paket	27,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	45,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	2 Paket	51,700,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	15 Laporan	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang			1	409,670,047						1	565,000,000	
2	1 2	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas			1 Unit	309,670,047	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pegawai Dinas DUKCAPIL	1 Unit	400,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan					Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Kota Sawahlunto			DAN PENCATAN SIPIL				
2	1 2	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	6 Unit	165,000,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			99	436,500,000						99	552,568,280	
2	1 2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	12 Laporan	46,568,280	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	105,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	12 Laporan	132,000,000	DINAS KEPENDUKAN DAN PENCATAN SIPIL



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Saing									
2	1 2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			14 Laporan	330,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	14 Laporan	374,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara, persentase peralatan yang terpelihara, persentase bagian gedung yang terpelihara			100	245,000,000						100	297,000,000	
2	1 2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14 Unit	120,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	14 Unit	132,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	80,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto	1 Unit	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Reh	Jumlah Sarana			15 Unit	45,000,000	Kota	Dana	Meningka	Peningkata	Pegawai	15 Unit	55,000,000	DINAS



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	2	9	0	abilisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	1	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	%	100 %	267,751,210					100 %	410,062,451				
2	1	2	2.0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan dan persentase pengaduan yang diselesaikan	%	%	100 %	100,000,000					100 %	150,000,000				
2	1	2	2.0	1	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12 Laporan	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	12 Laporan	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	2	2.0	2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase blanko, tonner, ribbon, cleaning kit dan bahan-bahan lainnya yang diadakan			100	138,330,800				100	220,000,000			
2	1	2	2.0	2	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan			7000 Dokumen	138,330,800	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Penduduk Kota Sawahlunto	7000 Dokumen	220,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan					Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP				DAN PENCATATAN SIPIL	
2	1 2	2	2.0 3		100	29,420,410						100	40,062,451		
2	1 2	2	2.0 3	2		3000 Dokumen	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	3000 Dokumen	16,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	2	2.0 3	8		48 Dokumen	14,420,410	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	48 Dokumen	23,562,451	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	3			100 %	80,000,000							100 %	304,700,000	
2	1 2	3	2.0 2		100	80,000,000							100	304,700,000	



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	1 2	3	2.0 2	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				60 Laporan	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	60 Laporan	72,600,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	3	2.0 2	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				3500 Laporan	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	3500 Laporan	154,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	3	2.0 2	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				4 Laporan	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	4 Laporan	78,100,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	1 2	4			100 %	60,060,000						100 %	137,668,100		
2	1 2	4	2.0 1		4	26,500,000						4	54,650,000		
2	1 2	4	2.0 1	1		3 Dokumen	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	3 Dokumen	36,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4	2.0 1	2		50 Dokumen	16,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Penduduk Kota Sawahlunto	50 Dokumen	18,150,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2	4	2.0 3		1	33,560,000						1	83,018,100		
2	1 2	4	2.0 3	7		1 Laporan	33,560,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan Kualitas	Seluruh OPD/	1 Laporan	83,018,100	DINAS KEPENDUDUKAN



OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat					o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Instansi yang ada di Kota Sawahlunto			DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												66,000,000
5	4	1			30,000,000							12 Bulan	66,000,000	
5	4	1			30,000,000							1 laporan	66,000,000	
5	4	1	2.05		30,000,000							5 Orang	66,000,000	
5	4	1	2.05	9								5 Orang	66,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL													4,354,563,725	5,651,148,831

OPD : DINAS PERHUBUNGAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



OPD : DINAS PERHUBUNGAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	1 5													10,973,303,148			10,486,605,083		
2	1 5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	8,286,103,083							12 Bulan	8,297,605,083	
2	1 5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan	Bulan	Bulan	14 Bulan	2,777,035,083							14 Bulan	2,777,035,083	
2	1 5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Oran g/bulan	2,777,035,083	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas SDM yang berdaya a Saing	ASN Di Lingkungan Dinas Perhubunga n	22 Oran g/bulan	2,777,035,083	DINAS PERHUBUN GAN	
2	1 5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	Persen	Persen	100 Pers en	161,461,900							100 Pers en	163,000,000	
2	1 5	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	116,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas SDM yang berdaya a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubunga n	1 Paket	117,000,000	DINAS PERHUBUN GAN	
2	1 5	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Oran g	45,461,900	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas SDM yang berdaya a Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubunga n	10 Oran g	46,000,000	DINAS PERHUBUN GAN	



OPD : DINAS PERHUBUNGAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2 1 5	1 1 2.0 6	1 1 2.0 6	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	306,506,100					12 Bulan	310,500,000		
2 1 5	1 1 2.0 6	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Paket	6,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 1 5	1 1 2.0 6	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	88,941,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Paket	90,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 1 5	1 1 2.0 6	4	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bulan	23,460,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	12 Bulan	24,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 1 5	1 1 2.0 6	5	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	12,105,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Paket	12,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 1 5	1 1 2.0 6	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan			1 Dokumen	1,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas SDM	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PERHUBUNGAN



OPD : DINAS PERHUBUNGAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan					n, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	yang berdaya Saing	n							
2	1 5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	175,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Laporan	176,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum	Bulan	Bulan	12 Bulan	4,834,220,000						12 Bulan	4,839,570,000	
2	1 5	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	7,650,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Laporan	8,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	3,750,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	12 Laporan	3,755,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,076,570,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubungan	12 Laporan	1,076,570,000	DINAS PERHUBUNGAN



OPD : DINAS PERHUBUNGAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2 1 5	1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi umum perkantoran	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	206,880,000						1 Kegiatan	207,500,000	
2 1 5	1 1 2.0 9	1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan motor yang dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	142,880,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubunga n	10 Unit	143,000,000	DINAS PERHUBUN GAN
2 1 5	1 1 2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		2 Unit	27,500,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubunga n	2 Unit	28,000,000	DINAS PERHUBUN GAN
2 1 5	1 1 2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		50 Unit	36,500,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Kualitas SDM yang berdaya Saing	ASN di lingkungan Dinas Perhubunga n	50 Unit	36,500,000	DINAS PERHUBUN GAN
2 1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Persentase penurunan angka	%	%	45 %	2,207,200,065						45 %	1,704,000,000	



OPD : DINAS PERHUBUNGAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kecelakaan lalu lintas (%)																
2	1 5	2	2.0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian wahana tata ngraha	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	7,150,000				1 Dokumen	7,200,000			
2	1 5	2	2.0 1	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 Kegiatan	7,150,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	1 Kegiatan	7,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	2	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia	Persen	Persen	70 Persen	1,565,000,000					70 Persen	1,047,000,000		
2	1 5	2	2.0 2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			0 Unit	350,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	0 Unit	210,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Terbangunnya prasarana jalan di jalan kab/kota dan Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			22 Unit						22 Unit			
2	1 5	2	2.0 2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan kab/kota dan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			771 Unit	640,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur	Masyarakat Kota Sawahlunto	771 Unit	260,000,000	DINAS PERHUBUNGAN



OPD : DINAS PERHUBUNGAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		yang Tersedia							Dasar	Kota									
2	1 5	2	2.0 2	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			1 Jenis	50,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyel esaian Permas alahan Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	1 Jenis	51,000,000	DINAS PERHUBUN GAN	
2	1 5	2	2.0 2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			0 Unit	525,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyel esaian Permas alahan Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	0 Unit	526,000,000	DINAS PERHUBUN GAN	
		Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perengkapan jalan dan Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dan Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						1 Unit											
2	1 5	2	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor	Persen	Persen	70 Perse n	556,588,600							70 Perse n	570,000,000	
2	1 5	2	2.0 5	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor dan Jumlah			1 Unit	56,588,600	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi	Penyel esaian Permas alahan Layana n	Masyarakat Kota Sawahlunto	1 Unit	60,000,000	DINAS PERHUBUN GAN	



OPD : DINAS PERHUBUNGAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar								Dan Pelayanan Dasar	Infrastr uktur Kota								
2	1 5	2	2.0 5	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			6 Unit	500,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyel esaian Permas alahan Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	6 Unit	510,000,000	DINAS PERHUBUN GAN	
2	1 5	2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angka kecelakaan lalulintas perseribu kendaraan	Persen	Persen	3 Persen	67,036,250							3 Persen	68,000,000	
2	1 5	2	2.0 6	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu			1 Dokum en	21,240,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyel esaian Permas alahan Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	1 Doku men	22,000,000	DINAS PERHUBUN GAN	



OPD : DINAS PERHUBUNGAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
2	1 5	2	2.0 6	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan lalu lintas di jalan raya dan terkendalinya efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota dan Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			12 Laporan	45,796,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	12 Laporan	46,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	2	2.0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan angkutan umum	Persen	Persen	15 Persen	11,425,215						15 Persen	11,800,000	
2	1 5	2	2.0 9	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			3 Laporan	11,425,215	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Perumahan Layanan Infrastruktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	3 Laporan	11,800,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	5			PROGRAM	persentase	%	%	65 %	480,000,000						65 %	485,000,000	



OPD : DINAS PERHUBUNGAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	PENGLOLAAN PERKERETAAPIAN	sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)													
2 1 5	5 2.0 2	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalur kereta api yang diaktifkan	Km	Km	3 Km	480,000,000						3 Km	485,000,000	
2 1 5	5 2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan dan dipelihara dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		5 Laporan	480,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyel esaian Permas alahan Layana n Infrastr uktur Kota	Masyarakat Kota Sawahlunto	5 Laporan	485,000,000	DINAS PERHUBUN GAN
TOTAL							10,973,303,148							10,486,605,083	

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/	Target Akhir	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah	



1	Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kegiatan/ Sub Kegiatan	Periode RPJMD	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab					
	2	3	4								Nasional	Daerah				10	11	12	13	14
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	1	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6,780,408,648							8,105,000,001					
2	1	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	6,410,408,648					12 Bulan	7,435,000,000					
2	1	7	1	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan	bulan	bulan	12 bulan	3,591,676,877				12 bulan	3,600,000,000					
2	1	7	1	2.0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Laporan	3,591,676,877	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Perangkat Daerah	12 Laporan	3,600,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	1	7	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	%	%	38 %	30,000,000					38 %	60,000,000			
2	1	7	1	2.0	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Perangkat Daerah	10 Orang	60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1	7	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	bulan	bulan	12 bulan	633,785,000					12 bulan	750,000,000			
2	1	7	1	2.0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Paket	30,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
														N				
2	1 7	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	218,785,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Paket	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Paket	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	40,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Paket	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	250,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	100 Laporan	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan dinas yang tersedia	unit	unit	1 unit	25,000,000						1 unit	275,000,000	
2	1 7	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas			1 Unit	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Infrastruktur Untuk		Barang milik daerah	1 Unit	275,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
2	1712.08	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dana layak pakai (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	1,829,946,771				12 bulan	2,305,000,000				
2	1712.08	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Laporan	5,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1712.08	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Laporan	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1712.08	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,624,946,771	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Laporan	2,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1712.09	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	bulan	bulan	12 bulan	300,000,000						12 bulan	445,000,000	



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Daerah	Daerah												
2	1 7 1 2.0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	18 Unit	220,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7 1 2.0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	4 Unit	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7 1 2.0 9 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 Unit	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	100 Unit	75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	%	%	26,47 %						26,47 %	225,000,000	
2	1 7 3 2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	%	74 %						74 %	225,000,000	



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
2	1 7	3	2.0 1	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			70 Unit Usaha	152,145,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Koperasi	70 Unit Usaha	175,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	3	2.0 1	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja			70 Unit Usaha	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Koperasi	70 Unit Usaha	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat (%)	%	%	26 %	57,854,500						26 %	110,000,000	
2	1 7	4	2.0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat	%	%	80 %	57,854,500						80 %	110,000,000	
2	1 7	4	2.0 1	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian			70 Unit Usaha	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Produktivitas	Koperasi	70 Unit Usaha	60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kesehatan					, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sektoral Ekonomi				PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan			1 Unit Usaha	27,854,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Koperasi	1 Unit Usaha	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	%	%	60 %	0						60 %	5,000,001	
2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	%	74 %	0						74 %	1	
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			68 Orang	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	0	68 Orang	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang bersertifikat	UMKM	UMKM	10 UMKM	0						10 U MKM	5,000,000	
2	Peningkatan Pemahaman dan	Jumlah UMKM yang bersertifikat			105 U MKM	0	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan	UMKM	105 U MKM	5,000,000	DINAS KOPERASI,



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro						o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas SDM yang berdaya Saing				USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	7			53 %	70,000,000						53 %	230,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	%	%										
2	1 7	7	2.0 1		4 %	70,000,000						4 %	230,000,000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	%										
2	1 7	7	2.0 1	4	4 persen	25,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	4 persen	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	7	2.0 1	5	200 Orang	45,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	200 Orang	80,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam												



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
									Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Pemberdayaan Usaha Mikro														
2	178	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	%	%	1,5 %	70,000,000					1,5 %	100,000,000			
2	178	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	UMKM	50 UMKM	70,000,000				50 U MKM	100,000,000			
2	178	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		200 Unit Usaha	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	UMKM	200 Unit Usaha	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1,015,000,000						870,000,000			
3	303			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	%	%	50 %	500,000,000				50 %	180,000,000		
3	303	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	%	%	80 %	500,000,000				80 %	180,000,000		
3	303	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		2 Unit	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Sarana dan Prasarana Pasar	2 Unit	180,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														N
3	304					27015,91	100,000,000						27015,91	200,000,000
3	304	2.02			80 %	100,000,000						80 %	200,000,000	
3	304	2.02	1		12 Laporan	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Pedagang pasar	12 Laporan	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	304	2.02	3		2 Laporan	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Pedagang pasar	2 Laporan	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	305				60 %	200,000,000						60 %	250,000,000	
3	305	2.01			2 Produk	200,000,000						2 Produk	250,000,000	



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
3	305	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				8 Pelaku Usaha	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Produk UMKM	8 Pelaku Usaha	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	306			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	%	%		30 %	80,000,000							30 %	120,000,000	
3	306	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase timbangan yang ditera	%	%		70 %	80,000,000							70 %	120,000,000	
3	306	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				391 Unit	80,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	Tera ulang timbangan	391 Unit	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	307			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)	Juta Rupiah	Juta Rupiah		125 Juta Rupiah	135,000,000							125 Juta Rupiah	120,000,000	
3	307	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan	Persentase produk lokal yang dipromosikan	%	%		50 %	135,000,000							50 %	120,000,000	



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														
3	3072011	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		15 UMKM	135,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	Produk	15 UMKM	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					375,000,000						525,000,000		
3	312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	%	%	2%						2%	420,000,000		
3	31201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri	%	%	100%						100%	420,000,000		
3	312014	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi			4 IKM	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	IKM	4 IKM	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	312015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 dokumen	140,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	IKM	1 dokumen	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 3 1 2 2.0 1 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1 Dokumen	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	IKM	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 3 1 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	%	%	30 %	35,000,000						30 %	75,000,000	
3 3 1 3 2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekomendasi	rekomendasi	50 rekomendasi	35,000,000						50 rekomendasi	75,000,000	
3 3 1 3 2.0 1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	IKM	1 Dokumen	75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
3	3 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis (%)	%	%	100 %	0							100 %	30,000,000	
3	3 1	4	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUJ, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis database industri yang dipublis	database	database	1 database	0							1 data base	30,000,000	
3	3 1	4	2.0 1	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			1 Dokumen	0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Sektoral Ekonomi	IKM	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TOTAL										8,170,408,648								9,500,000,001	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	



					Kegiatan		RPJMD	RKPD Tahun 2022	2023			Dana	Nasional	Daerah					g Jawab	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	7	1								7,308,839,140										6,123,426,385
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bul an	5,973,758,270									12 Bul an	4,898,345,515
2	7	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan OPD yang berkualitas	Bulan	Bulan	12 Bul an	7,500,000									12 Bul an	7,500,000
2	7	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Doku men	7,500,000	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Perangkat Daerah	1 Doku men	7,500,000		DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
2	7	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi keuangan	Bulan	Bulan	12 Bul an	3,544,643,378									12 Bul an	2,765,574,623
2	7	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			27 Ora ng/bul an	3,544,643,378	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Aparatur	27 Ora ng/bul an	2,765,574,623		DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
2	7	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase Aparatur yang meningkat SDM nya	%	%	50 %	26,500,000								50 %	26,500,000	
2	7	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas			5 Oran g	26,500,000	Kota Sawahl	Dana Transfer	Meningkat an Sumber	Peningkata n Kualitas	Aparatur	5 Oran g	26,500,000		DINAS PENANAM	



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						umto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP			AN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
2	7	1	2.06			12 Bulan	560,730,642					12 Bulan	560,730,642					
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	21,249,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Paket	21,249,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	299,971,442	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Paket	299,971,442	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	46,936,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	12 Paket	46,936,000	DINAS PENANAMAN MODAL,



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
2	7	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	48,151,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Paket	48,151,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85 Laporan	144,423,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	85 Laporan	144,423,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang diadakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	300,000,000						12 Bulan	300,000,000	
2	7	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 Unit	300,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan	Aparatur	3 Unit	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Semua Kelurahan			Dan Berdaya Saing	an TIK dan MPP			TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
2	7	1	2.08			12 Bulan	1,215,113,600					12 Bulan	918,769,600					
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	Bulan	12 Bulan	6,655,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Laporan	6,655,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	234,108,600	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Laporan	234,108,600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	974,350,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Aparatur	12 Laporan	678,006,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							han		Saing					PINTU DAN TENAGA KERJA				
2	7	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang dipelihara	Bulan	Bulan	12 Bul an	319,270,650			12 Bul an	319,270,650				
					Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	Bulan	12 Bul an					12 Bul an					
2	7	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Uni t	114,050,650	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Perangkat Daerah	12 Unit	114,050,650	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi			2 Unit	150,000,000	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Perangkat Daerah	2 Unit	150,000,000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi			4 Unit	55,220,000	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Perangkat Daerah	4 Unit	55,220,000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
														DAN TENAGA KERJA				
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)	%	%	100 %	110,000,000				100 %	110,000,000			
2	7	2	2.0 1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Dokume n	Dokume n	1 Doku men	110,000,000				1 Doku men	110,000,000			
2	7	2	2.0 1	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			1 Doku men	55,000,000	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Tenaga Kerja, Perusahaa n	1 Doku men	55,000,000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	2	2.0 1	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro			5 Peru sahaan	55,000,000	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Tenaga Kerja, Perusahaa n	5 Peru sahaan	55,000,000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	%	%	70 %	996,920,870					70 %	886,920,870		
2	7	3	2.0 1		Pelaksanaan Pelatihan	Persentase peserta pelatihan yang	%	%	50 %	996,920,870					50 %	886,920,870		



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	berdasarkan Unit Kompetensi	bersertifikat kompetensi Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru	%	%	10 %							10 %						
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			96 Orang	775,523,070	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	96 Orang	665,523,070	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			4 Lembaga	71,397,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	4 Lembaga	71,397,800	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			3 Unit	150,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	3 Unit	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	%	75,35 %	180,000,000					75,35 %	180,000,000		
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja	%	%	80 %	160,000,000					80 %	160,000,000		
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			200 Orang	40,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Siswa, Masyarakat	200 Orang	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			20 Orang	120,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Siswa, Masyarakat	20 Orang	120,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	%	35 %	20,000,000					35 %	20,000,000		
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			20 Orang	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Angkatan Kerja	20 Orang	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
							han		Saing					PINTU DAN TENAGA KERJA					
2	7	5				10 Per usaha an	48,160,000					10 Per usaha an	48,160,000						
2	7	5	2.0 1			100 %	31,000,000					100 %	31,000,000						
2	7	5	2.0 1	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Per usaha an	15,000,000	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Perusaha an	10 Per usaha an	15,000,000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.0 1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				4 Lapo ran	16,000,000	Kota Sawahl unto, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaat an TIK dan MPP	Perusaha an	4 Lapo ran	16,000,000	DINAS PENANAM AN MODAL, PELAYANA N TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
														KERJA				
2	7	5	2.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan	%	%	80 %	17,160,000				80 %	17,160,000			
2	7	5	2.0 2	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			4 Perkiraan	7,160,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Tenaga Kerja, Pemberi Kerja (Perusahaan)	4 Perkiraan	7,160,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.0 2	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			3 Perkiraan	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Tenaga Kerja, Pemberi Kerja (Perusahaan)	3 Perkiraan	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					790,214,500					790,214,500			
2	1	8	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	%	%	25 %	150,000,000					25 %	150,000,000		
2	1	8	2.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi	Persentase ketersediaan peta	%	%	100 %	150,000,000					100 %	150,000,000		



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Kabupaten/Kota	potensi investasi																		
2	1 8	2	2.0 2	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1 Dokumen	150,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat, Investor	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
2	1 8	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	Milyar Rupiah	1 Milyar Rupiah	31,250,400						1 Milyar Rupiah	31,250,400			
					Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	Milyar Rupiah	30 Milyar Rupiah										30 Milyar Rupiah		
					Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	Milyar Rupiah	10 Milyar Rupiah										10 Milyar Rupiah		
2	1 8	3	2.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang berinvestasi	Perusahaan	Perusahaan	25 Perusahaan	31,250,400						25 Perusahaan	31,250,400			
2	1 8	3	2.0 1	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 Dokumen	31,250,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat, Investor	1 Dokumen	31,250,400	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
2	1 8	4			PROGRAM PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat			B	108,964,100						B	108,964,100			



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		PENANAMAN MODAL	terhadap Pelayanan DPMPSTPNaker															
2	1 8	4	2.0 1			80 %	108,964,100						80 %	108,964,100				
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	%	%													
2	1 8	4	2.0 1	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			300 Pelaku Usaha	80,509,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat	300 Pelaku Usaha	80,509,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	1 8	4	2.0 1	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			4 Kegiatan Usaha	25,335,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat	4 Kegiatan Usaha	25,335,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2	1 8	4	2.0 1	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu			4 Orang	3,119,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat	4 Orang	3,119,900	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU



OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Perizinan dan Non Perizinan					han		Saing					PINTU DAN TENAGA KERJA	
2	18	6			B	500,000,000						B	500,000,000		
2	18	6	2.01												
2	18	6	2.01												
2	18	6	2.01	1											
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan perizinan yang terintegrasi pada MPP	%	%	56 %	500,000,000					56 %	500,000,000		
2	18	6	2.01	1											
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			1 Dokumen	500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
TOTAL						8,099,053,640							6,913,640,885		

OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	



					Kegiatan		RPJMD	RKPD Tahun 2022	2023		Dana	Nasional	Daerah			ng Jawab				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										6,616,685,866				7,489,550,000	
2	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	4,717,468,256						12 Bulan	4,993,550,000			
2	2	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	Persen	100 Persen	7,500,000						100 Persen	10,000,000			
2	2	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	7,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN		
2	2	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	Bulan	12 Bulan	2,472,832,633						12 Bulan	2,500,000,000			
2	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21 Orang/bulan	2,472,832,633	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	21 Orang/bulan	2,500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN		
2	2	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya	Persen	Persen	65 Persen	75,000,000						65 Persen	114,000,000			
2	2	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pegawai Dinas Kebudayaan,	2 Paket	32,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGG		



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kantor yang Disediakan					to, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	r Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman			AAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.0	5	4 Paket	25,075,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	4 Paket	31,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.0	6	1 Dokumen	2,190,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1 Dokumen	2,250,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.0	9	125 Laporan	265,183,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	125 Laporan	280,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.0		12 Bulan	1,469,711,383						12 Bulan	1,514,500,000	



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 2 1 2.0 1 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	6,340,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	12 Laporan	6,500,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2 2 1 2.0 2 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	271,497,383	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	12 Laporan	308,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2 2 1 2.0 4 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,191,874,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	12 Laporan	1,200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2 2 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	Bulan	Bulan	12 Bulan	177,397,050						12 Bulan	264,300,000	
2 2 1 2.0 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya			11 Unit	121,147,050	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah	11 Unit	200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							n		s Dan Berdaya Saing	Budaya Dunia dan Geopark Nasional	dan Permuseuman			PERMUSEUMAN	
2	2	1	2.0	5		20 Unit	3,750,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	20 Unit	6,300,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.0	9		1 Unit	17,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1 Unit	20,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	1	2.0	0		12 Unit	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	12 Unit	38,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	2				31,1 %	422,935,100						31,1 %	840,000,000	
2	2	2	2.0	1		75 %	229,105,100						75 %	375,000,000	



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 2 2 2.0 1	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		25 Objek	144,105,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembang unan Kebudaya an	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyaraka t dan Tokoh Masyaraka t	25 Objek	200,000,000	DINAS KEBUDAY AAN, PENINGG ALAN BERSEJAR AH DAN PERMUSE UMAN
2 2 2 2.0 1	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		100 Orang	85,000,100	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembang unan Kebudaya an	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyaraka t dan Tokoh Masyaraka t	100 Ora ng	175,000,000	DINAS KEBUDAY AAN, PENINGG ALAN BERSEJAR AH DAN PERMUSE UMAN
2 2 2 2.0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Palaku Kesenian Tradisional Yang lestari	Persen	Persen	55,56 Per sen	193,830,000					55.56 Per sen	465,000,000	
2 2 2 2.0 2	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		10 Objek	120,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembang unan Kebudaya an	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyaraka t, Mahasiswa , Siswa dan Tokoh Masyaraka t	10 Objek	275,000,000	DINAS KEBUDAY AAN, PENINGG ALAN BERSEJAR AH DAN PERMUSE UMAN
2 2 2 2.0 2	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		4 Lapora n	53,830,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamata n, Semua	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembang unan Kebudaya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan	Masyaraka t, Mahasiswa , Siswa dan Tokoh Masyaraka	4 Lapora n	115,000,000	DINAS KEBUDAY AAN, PENINGG ALAN BERSEJAR



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Kelurahan	Umum	an	Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	t			AH DAN PERMUSEUMAN				
2	2	2	2.0	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			10 Sertifikat	20,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat, Mahasiswa, Siswa dan Tokoh Masyarakat	10 Sertifikat	75,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	%	%	13.3 %	172,572,000						13.3 %	185,000,000	
2	2	3	2.0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					172,572,000							185,000,000	
2	2	3	2.0	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			125 Orang	172,572,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat, Mahasiswa, Siswa	125 Orang	185,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	%	%	60 %	135,000,000						60 %	145,000,000	
2	2	4	2.0		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mengetahui	%	%	58 %	135,000,000						58 %	145,000,000	



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sejarah Lokal												
2.2.2.4.2.0.3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			1 Dokumen	135,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	1 Dokumen	145,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2.2.2.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase budaya benda yang lestari (%)	%	%	63,92 %	801,855,000						63,92 %	891,000,000	
2.2.2.5.2.0.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Budaya Benda Yang Dilindungi	%	%	97.28 %	23,000,000						97.28 %	41,000,000	
2.2.2.5.2.0.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			15 Objek	8,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan permuseuman	15 Objek	14,500,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2.2.2.5.2.0.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			8 Objek	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan permuseuman	8 Objek	26,500,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2.2.2.5.2.0.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Budaya Benda Yang Dimanfaatkan	Persentase	Persentase	60.55 Persentase	778,855,000						60.55 Persentase	850,000,000	



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	2	5	2.0	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			2 Objek	213,855,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	2 Objek	250,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	5	2.0	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			1 Objek	565,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum	1 Objek	600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	Orang	Orang	33000 Orang	366,855,510						33000 Orang	435,000,000	
2	2	6	2.0		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koleksi Museum Yang Lestari	%	%	62.32 %	366,855,510						62.32 %	435,000,000	
2	2	6	2.0	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya			6 Orang	40,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum Masyarakat	6 Orang	85,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
2	2	6	2.0	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			6 Unit	326,855,510	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-	Revolusi Mental dan Pembangunan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pegawai Dinas Kebudayaan,	6 Unit	350,000,000	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGG



OPD : DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	unan Kebudayaan	melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Peninggalan Bersejarah dan Permuseum Masyarakat			ALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN
TOTAL						6,616,685,866						7,489,550,000		

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	2					3,810,994,039							4,546,500,000					
2	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	3,529,407,359			12 Bulan	4,046,500,000				
2	2	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	14 0	2,806,722,727			14 0	3,100,000,000				
2	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN/PNS yang Difasilitasi			14 Bulan	2,806,722,727	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil (ASN)	14 Bulan	3,100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Saing					
2 3	1	2.0 5			12 0	24,350,000						12 0	60,000,000	
2 3	1	2.0 5	9		10 Orang	24,350,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil (ASN)	10 Orang	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 3	1	2.0 6			12 0	180,495,750						12 0	242,000,000	
2 3	1	2.0 6	1		12 Bulan	6,652,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 3	1	2.0 6	2		12 Bulan	50,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 3	1	2.0 6	4		12 Paket	20,000,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Pemantapan Reformasi	Fasilitas Umum Organisasi	12 Paket	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		Disediakan					Barangi n, Durian II	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah (OPD)			KEARSIPAN						
2	2 3	1	2.0 6	5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bulan	18,043,750	Kota Sawahlunto, Barangi n, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	1	2.0 6	6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			12 Bulan	10,800,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	1	2.0 6	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah			12 Bulan	75,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Fasilitas Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Bulan	95,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	1	2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di Adakan	0	0	12 0	15,000,000						12 0	18,000,000	
2	2	1	2.0	1			Pengadaan Sarana	Jumlah Peralatan			2 Unit	15,000,000	Kota	Dana	Meningkat	Pemantapa	Barang Milik	2 Unit	18,000,000	DINAS



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	0	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Tersedia					Sawahlunto, Barangi, Durian II	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	n Reformasi Birokrasi Pemerintah	Daerah			PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang disediakan	0	0	12 0	392,850,932						12 0	469,000,000	
2	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya yang Disediakan			12 Bulan	3,500,000	Kota Sawahlunto, Barangi, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Yang Dibayarkan			12 Bulan	74,596,932	Kota Sawahlunto, Barangi, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	12 Bulan	115,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Pegawai Tetap yang Dibayarkan			14 Bulan	314,754,000	Kota Sawahlunto, Barangi, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	14 Bulan	350,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Berdaya Saing									
2	2 3	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	0	0	12 0	109,987,950				12 0	157,500,000			
2	2 3	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Bulan	79,987,950	Kota Sawahlunto, Barangi, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	12 Bulan	105,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	1	2.0 9	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang Dipelihara		12 Bulan	15,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	12 Bulan	22,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	1	2.0 9	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara		12 Bulan	15,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang Milik Daerah	12 Bulan	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	276,586,680						12 Bulan	490,000,000	



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.3.2.0.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Di Kelola dan di Bina (Unit)			108	69,816,780						108	320,000,000	
2.2.3.2.0.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			2 Paket	9,236,080	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pengelola Perpustakaan	2 Paket	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.2.0.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			68000 orang	7,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pengelola Perpustakaan	68000 orang	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.2.0.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			106 Unit	7,557,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pengelola Perpustakaan	106 Unit	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.2.0.6	Peningkatan	Jumlah Tenaga			60 Ora	6,641,750	Kota	Dana	Meningkat	Peningkata	Pengelola	60 Oran	30,000,000	DINAS



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	1	Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			ng		Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	n Kualitas SDM yang berdaya Saing	Perpustakaan	g		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 3	2 1	8 Pengembangan Bahan Pustaka			10 Klasifikasi	31,981,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pengelola Perpustakaan	10 Klasifikasi	180,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 3	2 1	9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			2000 Eksemplar	7,400,450	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pengelola Perpustakaan	2000 Eksemplar	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 3	2 2				50	206,769,900						50	170,000,000		
2 3	2 2	1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			37 Lokasi	20,975,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Umum	37 Lokasi	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
							an		Berdaya Saing								
2 2 3	2 2 2	2.0 2	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2 Perustakaan Umum	66,516,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Umum	2 Perustakaan Umum	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 2 3	2 2 2	2.0 2	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			7 Lomba	19,278,900	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Umum	7 Lomba	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 2 3	2 2 2	2.0 2	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			2 Perustakaan Umum	100,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat Umum	2 Perustakaan Umum	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 2 3	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)	Naskah	Naskah	4 Naskah	5,000,000						4 Naskah	10,000,000	
2 2 3	3	2.0 1		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan (naskah)			4	5,000,000						4	10,000,000	
2 2 3	2.0 1		1	Peningkatan Peran	Jumlah			20 Ora	5,000,000	Kota	Dana	Meningkat	Peningkata	Masyarakat	20 Oran	10,000,000	DINAS



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	1					Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	n Kualitas SDM yang berdaya Saing	Umum	g		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2					119,876,900							175,000,000	
2	2													
2	2	2												
2	2	2	2.0											
2	2	2	2.0	1										
2	2	2	2.0	1										
2	2	2	2.0	1										
2	2	2	2.0	1										
2	2	2	2.0	1										
2	2	3												



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	perlindungan & penyelamatan arsip (Bulan)		n										
2	2 4	3	2.0 2		55	8,462,500						55	30,000,000		
2	2 4	3	2.0 2	1		26 OPD	8,462,500	Kota Sawahlunto, Barangi n, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Arsip Akibat Bencana	26 OPD	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	3	2.0 4		1	20,000,000						1	33,000,000		
2	2 4	3	2.0 4	2		1 Paket	20,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Arsip Penting Kota Sawahlunto	1 Paket	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	3	2.0 5		1	20,000,000						1	40,000,000		



OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Hilang	arsip yang sesuai NSPK (paket)																		
2	2	3	2.0	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan	Penetapan dan Pengumuman			100 Arsip	20,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Arsip Yang Bernilai Sejarah	100 Arsip	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
TOTAL											3,930,870,939								4,721,500,000	

OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
									Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													15,061,318,201					14,208,498,761	
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	8,400,198,701						12 Bulan	7,832,398,941				
2	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	14,154,140						1 Dokumen	15,569,554				
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	14,154,140	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan Kualitas	Pegawai ASN dan	1 Dokumen	15,569,554	DINAS PARIWIS			



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah					nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	NON ASN Disparpora			ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA				
2	1 9	1	2.0 2		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana Pelayanan administrasi Keuangan (Bulan)	bulan	bulan	25 bulan	3,781,777,913				25 bulan	4,159,955,704			
2	1 9	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Oran g/bulan	3,781,777,913	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	25 Oran g/bulan	4,159,955,704	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
2	1 9	1	2.0 5		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	99,000,000					12 Bulan	108,900,000		
2	1 9	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Oran g	99,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	20 Oran g	108,900,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
2	1 9	1	2.0 6		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan	bulan	bulan	12 bulan	632,871,455					12 bulan	712,781,901		



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Administratral Umum Perangkat Daerah (Bulan)												
2.1.9.1.2.0.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	6,245,030	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 paket	6,869,533	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
2.1.9.1.2.0.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	139,179,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 paket	169,597,780	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
2.1.9.1.2.0.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 paket	30,317,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 paket	33,408,210	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
2.1.9.1.2.0.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 paket	43,683,525	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 paket	48,047,378	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							an		Berdaya Saing	dan Geopark Nasional					
2 1 9	1 1 2.0 6	6			20 Doku men	4,136,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	20 Doku men	4,549,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA	
2 1 9	1 1 2.0 6	9			350 Lap oran	409,310,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	350 Lap oran	450,310,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA	
2 1 9	1 1 2.0 7		bulan	bulan	10 bulan	50,000,000						10 bulan	55,000,000		
2 1 9	1 1 2.0 7	6			10 Unit	50,000,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	10 Unit	55,000,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA	
2 1 9	1 1 2.0 8		bulan	bulan	12 bulan	3,598,484,000						12 bulan	2,533,889,470		



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2 1 9	1 1 2.0 8	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 Laporan	5,500,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 1 9	1 1 2.0 8	2	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	74,976,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 Laporan	82,473,600	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 1 9	1 1 2.0 8	4	4	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	3,518,508,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 Laporan	2,445,915,870	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 1 9	1 1 2.0 9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Kendaraan, Mobiler Kantor dan Gedung	bulan	bulan	12 bulan	223,911,193						12 bulan	246,302,312	



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kantor (Bulan)																
2 1 9	1 2.0 9	1	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	153,801,193	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban g Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	12 Unit	169,181,312	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
2 1 9	1 2.0 9	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	4,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban g Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	4 Unit	4,400,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
2 1 9	1 2.0 9	1	5	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			10 Unit	5,808,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban g Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	10 Unit	6,388,800	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
2 1 9	1 2.0 9	1	6	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	37,078,800	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukung	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	30 Unit	40,786,680	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							an, Semua Kelurah an	Umum	g Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				OLAHRA GA				
2	1 9	1 2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	23,223,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pegawai ASN dan NON ASN Disparpora	2 Unit	25,545,520	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	1 9	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Orang	Orang	Orang	15 Orang	698,619,500						15 Orang	763,349,820	
2	1 9	2 2.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda Sawahlunto menjadi utusan pemuda pelopor (Kegiatan)	kegiatan	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan	668,619,500						2 kegiatan	735,481,450	
					Jumlah Pengurus Organisasi Kepemudaan yang Terlatih (Orang)	Orang	Orang	Orang	85 Orang							85 Orang		
2	1 9	2 2.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh				5 Orang	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pemuda dan Pelajar	5 Orang	33,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Daya Saing Pemuda Pelopor	Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				DAN OLAHRAGA				
2	1 9	2	2.0 1	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			100 Orang	338,619,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pemuda dan Pelajar	100 Orang	372,481,450	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	1 9	2	2.0 1	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			85 Orang	300,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pemuda dan Pelajar	85 Orang	330,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	1 9	2	2.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif (Organisasi)	Organisasi	Organisasi	19 Organisasi	30,000,000						19 Organisasi	27,868,370	
2	1 9	2	2.0 2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	0	1 Dokumen	27,868,370	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2 1 9	3					160 Atlit	5,527,500,000						160 Atlit	5,117,750,000			
2 1 9	3	2.0 1		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/ regional/nasional/internasional (atlit)	Unit	Unit	1 Unit	700,000,000					1 Unit	1,100,000,000		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	Unit	Unit	6 Unit								6 Unit	
2 1 9	3	2.0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Unit	700,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat	1 Unit	1,100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 1 9	3	2.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit yang Berprestasi Tingkat Daerah (Orang)	Orang	Orang	80 Orang	217,500,000						80 Orang	239,250,000	
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi (Orang)	orang	orang	80 orang							80 orang		
2 1 9	3	2.0 2	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan			80 Orang	217,500,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Masyarakat	80 Orang	239,250,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Penyelenggaraan Kejuaraan					Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				DAN OLAHRAGA	
2	19	3	2.03												
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit yang Berprestasi (Atlet)	Atlet	Atlet	160 Atlet	150,000,000						160 Atlet	165,000,000	
			Jumlah Atlit yang Berprestasi Tingkat Provinsi (Orang)	Orang	Orang	150 Orang							150 Orang		
2	19	3	2.03	4											
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			150 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat	150 Orang	165,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
								Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				
											Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing				
											Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata				



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional								
2	1 9	3	2.0 4		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang aktif (Organisasi)	Organisasi	Organisasi	1 Organi sasi	3,835,000,000			1 Organi sasi	3,063,500,000				
2	1 9	3	2.0 4	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			1 Organi sasi	3,835,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyaraka t	1 Organi sasi	3,063,500,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
2	1 9	3	2.0 5		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya Event Olahraga Rekreasi (Kegiatan)	Kegiatan	Kegiatan	5 Kegiat an	625,000,000				5 Kegiat an	550,000,000			
2	1 9	3	2.0 5	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			3 Doku men	245,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyaraka t	3 Doku men	132,000,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
2	1 9	3	2.0 5	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang			1 Unit	50,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan	Masyaraka t	1 Unit	55,000,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penang gung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Memadai					Kelurahan		Dan Berdaya Saing	Budaya Dunia dan Geopark Nasional								
2	1 9	3	2.0 5	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			1 Dokumen	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
2	1 9	3	2.0 5	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			1 Dokumen	230,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Masyarakat	1 Dokumen	253,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
2	1 9	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	%	%	75 %	435,000,000						75 %	495,000,000	
2	1 9	4	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	%	%	100 %	435,000,000						100 %	495,000,000	
						Terfasilitasinya kegiatan pembinaan kepramukaan (kegiatan)	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
2	1 9	4	2.0 1	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Jumlah Organisasi			1 Organisasi	435,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Peningkatan Kualitas	Komunitas	1 Organisasi	495,000,000	DINAS PARIWISATA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					nto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				ATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	2	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7,890,824,675						7,744,907,142					
3	2	6	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Objek Wisata (%)	%	%	14.7 %	6,444,402,745			14.7 %	6,153,843,019				
						Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata (%)	%	%	10 %				10 %					
3	2	6	2	2.0	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Objek Wisata (%)	%	%	14.7 %	2,200,000,000			14.7 %	2,420,000,000				
						Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata (%)	%	%	10 %				10 %					
3	2	6	2	2.0	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			2 Dokumen	200,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	2 Dokumen	220,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 2 2 2.0 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			1 Lokasi	2,000,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	1 Lokasi	2,200,000,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
3 2 2 2.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan yang Terkelola (%)	%	%	10 %	2,469,278,180						10 %	2,441,205,998	
		Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (%)	%	%	10 %							10 %		
3 2 2 2.0 2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Doku men	100,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	1 Doku men	110,000,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
3 2 2 2.0 2	Pengadaan/Pemelihar aan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3 Unit	2,349,278,180	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	3 Unit	2,309,205,998	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
3 2 2 2.0 2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan			4 Doku men	10,000,000	Kota Sawahlun to,	Dana Transfer Umum-	Meningkat kan Sumber	Peningkatan Kualitas Pengelolaan	Kawasan Wisata	4 Doku men	11,000,000	DINAS PARIWIS ATA,



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pariwisata Kabupaten/Kota	Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2	2	2.0	6	4 Laporan	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	4 Laporan	11,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2	2	2.0		10 %	1,531,924,565						10 %	1,234,117,021	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata (%)	%	%	32.14 %							32.14 %		
		Persentase Destinasi yang Terkelola (%)	%	%										
3	2	2	2.0	2	1 Dokumen	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2	2	2.0	4	3 Unit	1,471,924,565	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	3 Unit	1,168,117,021	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara												



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
									Saing	Nasional									
3	2 6	2	2.0 3	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			4 Doku men	10,000,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Kawasan Wisata	4 Doku men	11,000,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA	
3	2 6	2	2.0 4		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota (Dokumen)	Dokumen	Dokumen	10 Doku men	243,200,000							10 Doku men	58,520,000	
3	2 6	2	2.0 4	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			10 Doku men	6,600,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Industri Usaha Pariwisata	10 Doku men	7,260,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA	
3	2 6	2	2.0 4	2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			10 Doku men	6,600,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Industri Usaha Pariwisata	10 Doku men	7,260,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA	
3	2 6	2	2.0 4	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha	Jumlah Unit Usaha			2 Unit Usaha	230,000,000	Kota Sawahlu	Dana Transfer	Meningkat kan	Peningkatan Kualitas	Industri Usaha	2 Unit Usaha	44,000,000	DINAS PARIWIS	



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi					nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Pariwisata			ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
3	2 6	3			130000 0 Orang	1,301,048,650						130000 0 Orang	1,431,153,515	
3	2 6	3	2.0 1		70 Rom bongan	1,301,048,650						70 Rom bongan	1,431,153,515	
3	2 6	3	2.0 1	1	5 Doku men	201,963,490	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Wisatawan dan Masyaraka t	5 Doku men	222,159,839	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
3	2 6	3	2.0 1	2	10 Lapo ran	989,085,160	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Wisatawan dan Masyaraka t	10 Lapo ran	1,087,993,676	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
3	2 6	3	2.0 1	3	1 Doku men	40,000,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Meningkat kan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui	Wisatawan dan Masyaraka t	1 Doku men	44,000,000	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					an, Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional				OLAHRA GA				
3	2 6	3	2.0 1	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3 Dokumen	70,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark Nasional	Wisatawan dan Masyarakat	3 Dokumen	77,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
3	2 6	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	%	%	0,50 %	40,000,000						0,50 %	44,000,000	
3	2 6	4	2.0 2		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekraf yang telah Mandiri (Dokumen)	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	40,000,000						1 Dokumen	44,000,000	
						Jumlah Ekosistem Ekraf yang Telah Mandiri (Kelompok)	Kelompok	Kelompok	1 Kelompok							1 Kelompok		
3	2 6	4	2.0 2	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada			5 Dokumen	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia	Masyarakat	5 Dokumen	33,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku					an		Berdaya Saing	dan Geopark Nasional								
3	2 6	4 2 0	2.0 2	1 0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			4 Dokumen	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark	Masyarakat	4 Dokumen	11,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2 6	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasii, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	Laporan	Laporan	1 Laporan	105,373,280						1 Laporan	115,910,608	
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Orang)	Orang	Orang	20 Orang											20 Orang		
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	%	%	20 %											20 %		
3	2 6	5 1	2.0 1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Mandiri (%)	0	0	25 0	70,373,280						25 0	77,410,608	



OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2.5.2.0.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			20 Orang	20,373,280	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark	Masyarakat	20 Orang	22,410,608	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.2.5.2.0.5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 Laporan	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark	Masyarakat	1 Laporan	55,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.2.5.2.0.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang Berbadan Usaha (Orang)	Orang	Orang	5 Orang	35,000,000						5 Orang	38,500,000	
3.2.5.2.0.3	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif			5 Orang	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pariwisata melalui Keunggulan Warisan Budaya Dunia dan Geopark	Masyarakat	5 Orang	38,500,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TOTAL						22,952,142,876							21,953,405,903	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	1 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							3,229,234,525		3,229,234,525				
2	1 6	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)	%	%	95 %	1,064,234,525					95 %	1,064,234,525		
2	1 6	2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah inormasi yang disebarluaska n			12	1,064,234,525					12	1,064,234,525		
2	1 6	2	2.0 1	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik			2 Dokume n	5,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 Doku men	5,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	2	2.0 1	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah dokumen hasil monitoringopi ni dan aspirasi publik			2 dokume n	50,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 doku men	50,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	2	2.0 1	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah			2 dokume n	5,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 doku men	5,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		daerah																
2	1 6	2	2.0 1	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik			12 dokumen	75,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 dokumen	75,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	2	2.0 1	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik			12 dokumen	295,272,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 dokumen	295,272,200	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	2	2.0 1	6	Pelayanan Informasi Publik	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik			4 dokumen	48,546,400	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	4 dokumen	48,546,400	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	2	2.0 1	7	Layanan Hubungan Media	jumlah layanan hubungan media			19 layanan	426,195,925	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	19 layanan	426,195,925	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	2	2.0 1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya			5 orang	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	5 orang	10,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1	2	2.0	1	Penyelenggaraan	Jumlah			12 Dokum	114,220,000	Kota	Dana	Memperkuat	Pemantapan	Pemerintah	12 Doku	114,220,000	SEKRETAR



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6	1	2	2.0	1	Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			en		Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	an Reformasi Birokrasi Pemerintah	Daerah	men		IAT DAERAH
2	1	2	2.0	1	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota			10 unit	35,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	10 unit	35,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	%	%	95 %	2,165,000,000						95 %	2,165,000,000	
2	1	3	2.0	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan domain dan sub domain (bulan)			12	1,805,000,000						12	1,805,000,000	
2	1	3	2.0	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan			12 Dokumen	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 Dokumen	5,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kelurahan	Alokasi Umum	si Pelayanan Publik	ah								
2	1 6	3	2.0 1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah			62 unit	1,800,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	62 unit	1,800,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	3	2.0 2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya aplikasi publik yang terintegrasi			12	360,000,000						12	360,000,000	
2	1 6	3	2.0 2	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota			2 dokumen	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 dokumen	15,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2	1 6	3	2.0 2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem			2 Dokumen	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	5,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Publik				
2 1 6	3 2.0 2	6			25 perangkat daerah	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	25 perangkat daerah	5,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2 1 6	3 2.0 2	7			5 unit	250,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	5 unit	250,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2 1 6	3 2.0 2	9			2 Dokumen	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2 1 6	3 2.0 2	10			2 Dokumen	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
2 1 6	3 2.0 2	11			2 dokumen	30,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Pemantapan	Pemerintah Daerah	2 dokumen	30,000,000	SEKRETAR IAT



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Information Officer (GCIO)	pengelolaan government chief information officer (GCIO)					o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	r Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Pemerint ah				DAERAH					
2	1 6	3	2.0 2	1 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggara an SPBE			2 Dokume n	10,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 Doku men	10,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH	
2	2 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					81,110,600				81,110,600					
2	2 0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)	%	%	90 %	81,110,600							90 %	81,110,600	
2	2 0	2	2.0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data statistik sektoral yang tersusun (dokumen)			7	81,110,600							7	81,110,600	
2	2 0	2	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan dieminasi data statistik sektoral			7 dokume n	47,123,420	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	7 doku men	47,123,420	SEKRETAR IAT DAERAH	
2	2 0	2	2.0 1	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik			37 orang	8,324,100	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	37 oran g	8,324,100	SEKRETAR IAT DAERAH	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		daerah yang terintegrasi							Publik						
2 2 0	2 2 1	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		1 Dokumen	12,877,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	12,877,800	SEKRETAR IAT DAERAH
2 2 0	2 2 1	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		26 Orang	11,049,080	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	26 Orang	11,049,080	SEKRETAR IAT DAERAH
2 2 0	2 2 1	5	Pengembangan Infrastruktur	jumlah infrastruktur statistik		1 unit	1,736,200	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	1 unit	1,736,200	SEKRETAR IAT DAERAH
2 2 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				104,107,850							104,107,850	
2 2 1	2 2 1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	104,107,850					12 Bulan	104,107,850	
2 2 1	2 2 1	2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan informasi (kegiatan)		10	85,907,850						10	85,907,850	
2 2 2	2 2 2.0 1	1	Penetapan Kebijakan	jumlah		1 dokumen	3,465,000	Kota	Dana	Memperkuat	Pemantapan	Pemerintah	1 dokumen	3,465,000	SEKRETAR



OPD : SEKRETARIAT DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen kebijakan tata kelola kemanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/ko ta yang ditetapkan			n		Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Daerah	men		IAT DAERAH
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya kemanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ko ta			2 laporan	19,996,350	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 lapora n	19,996,350	SEKRETAR IAT DAERAH
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/ko ta berbasis elektronik dan non elektronik			2 laporan	21,246,500	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 lapora n	21,246,500	SEKRETAR IAT DAERAH
2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan			25 perangk at daerah	41,200,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	25 pera ngkat daerah	41,200,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		keamanan informasi						Umum	Pelayanan Publik									
2	2 1	2 2	2.0 2			26	18,200,000					26	18,200,000					
2	2 1	2 2	2.0 2	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi			25 OPD	18,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	25 OPD	18,200,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH									35,211,718,184				
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	22,295,514,718						12 Bulan	22,671,212,394	
4	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			12	19,000,000						12	19,000,000	
4	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	2,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	9 Dokumen	2,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokume n	3,500,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 Doku men	3,500,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokume n	3,500,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 Doku men	3,500,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokume n	3,500,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 Doku men	3,500,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokume n	3,500,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 Doku men	3,500,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			23 Laporan	3,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfe r Umum- Dana	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint	Pemerintah Daerah	23 Lapo ran	3,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kelurahan	Alokasi Umum	si Pelayanan Publik	ah								
4	1	1	2.0 2			12	9,717,392,182					12	10,274,226,908					
4	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			1232 orang/bulan	9,712,392,182	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	1232 orang/bulan	10,269,226,908	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	5,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian			12	88,640,000						12	88,640,000	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			10 orang	88,640,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	10 orang	88,640,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi			12	4,083,758,635						12	3,841,020,525	
4.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	100,190,425	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 Paket	40,190,425	SEKRETAR IAT DAERAH
4.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4 paket	400,806,275	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	4 paket	551,242,900	SEKRETAR IAT DAERAH
4.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			2 paket	339,751,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 paket	291,101,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 paket	123,227,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 paket	152,500,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
								Umum	Pelayanan Publik									
4	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan			10 dokumen	10,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	10 doku men	10,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			12 laporan	1,181,167,735	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	12 lapor an	867,370,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 laporan	1,928,616,200	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	12 lapor an	1,928,616,200	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan penunjang kegiatan			39	503,055,658						39	345,914,718	
4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			35 unit	503,055,658	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	35 unit	345,914,718	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran			12	3,082,016,640						12	3,300,758,640	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12 laporan	31,254,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	31,254,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	707,022,640	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	707,022,640	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	2,343,740,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	2,562,482,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran			12	2,096,620,000						12	2,096,620,000	
4	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			170 unit	1,364,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	170 unit	1,364,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	jumlah peralatan dan			250 unit	74,620,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Pemantapan	Pemerintah Daerah	250 unit	74,620,000	SEKRETAR IAT



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Lainnya	mesin lainnya yang dipelihara							o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	r Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintah			DAERAH			
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi			8 unit	658,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	8 unit	658,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah			12	1,112,940,623						12	1,112,940,623	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah			28 orang/bulan	273,840,623	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	28 orang/bulan	273,840,623	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan			2 paket	379,600,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 paket	379,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan			7 orang	59,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	7 orang	59,500,000	SEKRETARIAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		wakil kepala daerah						Umum	Pelayanan Publik									
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			24 orang/bulan	400,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	24 orang/bulan	400,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.1		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah			12	810,842,380						12	810,842,380	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan			12 paket	427,442,680	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 paket	427,442,680	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan			12 paket	335,482,260	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 paket	335,482,260	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.1	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			12 Paket	47,917,440	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 Paket	47,917,440	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	1	2.1		Penataan Organisasi	Terciptanya			27	373,040,600						27	373,040,600	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran																
4	1	1	2.1 3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan			7 dokumen	48,560,100	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	7 dokumen	48,560,100	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 3	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			1 laporan	95,512,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	1 laporan	95,512,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi			2 dokumen	128,968,500	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	2 dokumen	128,968,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah			1 dokumen	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	1 dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah			12	408,208,000						12	408,208,000	



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		(laporan)																		
4	1	1	2.1 4	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	314,358,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 Laporan	314,358,000	SEKRETAR IAT DAERAH		
4	1	1	2.1 4	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan			12 laporan	93,850,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 laporan	93,850,000	SEKRETAR IAT DAERAH		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)			60	13,700,983,590						60	11,923,333,590			
					Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen)	%	%	100 %										100 %		
					Persentase santri rumah/pondok tahfiz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)	%	%	50 %										50 %		
4	1	2	2.0 1		Administrasi Tata Pemerintahan	Terselenggaranya kegiatan administrasi pemerintahan			12	645,682,300						12	645,682,300			



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		an (bulan)																
4	1	2	2.0 1	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan			5 dokume n	201,774,300	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	5 doku men	201,774,300	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	2	2.0 1	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan			6 dokume n	131,024,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	6 doku men	131,024,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	2	2.0 1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah			1 dokume n	312,884,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	1 doku men	312,884,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	2	2.0 2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya kegiatan bidang kesejahteraan rakyat			12	11,536,372,090						12	9,758,722,090	
4	1	2	2.0 2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12 Dokum en	1,655,038,340	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Masyarakat	12 Doku men	1,725,038,340	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	2	2.0 2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,			11 Dokum en	6,714,074,250	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan	Dana Transfe r Umum-	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan		Masyarakat	11 Doku men	6,581,424,250	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Kesejahteraan Sosial	Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transforma si Pelayanan Publik									
4	1	2	2.0 2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,			11 Dokum en	3,167,259,500	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilita s Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Masyarakat	11 Doku men	1,452,259,500	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kearsipan, Trantibum Linmas																
4	1	2	2.0 3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terselenggara nya kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum (bulan)			12	326,129,200					12	326,129,200		
4	1	2	2.0 3	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun			450 doku men	37,755,500	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	450 dok umen	37,755,500	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	2	2.0 3	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			10 Kasus	255,400,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	10 Kasus	255,400,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	2	2.0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentas i			350 doku men	32,973,700	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	350 dok umen	32,973,700	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	2	2.0 4		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Meningkatnya kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga (kegiatan)			20	1,192,800,000						20	1,192,800,000	
4	1	2	2.0 4	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam			20 doku men	1,192,800,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan	Dana Transfe r Umum-	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan	Pemantap an Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah	20 doku men	1,192,800,000	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		negri					, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transforma si Pelayanan Publik	Pemerint ah								
4	1	3			12 Bulan	617,010,150						12 Bulan	617,172,200					
4	1	3	2.0 1			12	200,018,750					12	200,180,800					
4	1	3	2.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD			10 dokume n	93,925,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	10 doku men	93,925,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	3	2.0 1	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian			2 laporan	85,766,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 lapora n	85,766,000	SEKRETAR IAT DAERAH
4	1	3	2.0 1	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil			1 dokume n	20,327,750	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	1 doku men	20,489,800	SEKRETAR IAT DAERAH



OPD : SEKRETARIAT DAERAH															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										Publik					
4	1	3	2.0 2			12	111,766,150						12	111,766,150	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan													
		Terselenggara nya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan													
4	1	3	2.0 2	1		2 dokumen	83,170,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	2 dokumen	83,170,000	SEKRETAR IAT DAERAH
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
		jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah													
4	1	3	2.0 2	2		12 Laporan	28,596,150	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	12 Lapo ran	28,596,150	SEKRETAR IAT DAERAH
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
4	1	3	2.0 3			3	305,225,250						3	305,225,250	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
		Hasil penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP (level)													
4	1	3	2.0 3	1		12 dokumen	50,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerint ah	Pemerintah Daerah	12 dokumen	50,000,000	SEKRETAR IAT DAERAH
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
		jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa													
4	1	3	2.0 3	2		12 dokumen	113,709,500	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamatan	Dana Transfe r Umum-	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan	Pemantap an Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah	12 dokumen	113,709,500	SEKRETAR IAT DAERAH
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
		jumlah dokumen hasil layanan pengadaan													



OPD : SEKRETARIAT DAERAH																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		secara elektronik					, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah							
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		9 orang	141,515,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	9 orang	141,515,750	SEKRETARIAT DAERAH
TOTAL								40,027,961,433					38,626,171,159				

OPD : SEKRETARIAT DPRD																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	2				SEKRETARIAT DPRD										34,007,000,000			
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	16,024,795,771					12 bulan	18,042,000,000		
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	11,833,795,771					12 bulan	13,015,000,000		
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang			40 Orang	11,818,795,771	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Pemantapan	Sekretariat DPRD	40 Orang	13,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD



OPD : SEKRETARIAT DPRD																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD (orang/bulan)					o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Pemerintah	dan DPRD								
4	2	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun			5 buah	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	5 buah	15,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	130,000,000						12 bulan	200,000,000		
4	2	1	2.0	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut yang Disediakan			2 paket	30,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 paket	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			12 Orang	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0		Administrasi Umum	Tersedianya	bulan	bulan	12 bulan	885,500,000							12 bulan	915,000,000	



OPD : SEKRETARIAT DPRD																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
					n							an							
4	2	1	2.0 6	1	Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	18,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Paket	20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	42,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	1 Paket	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	240,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	3 Paket	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	265,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	3 Paket	275,000,000	SEKRETARIAT DPRD



OPD : SEKRETARIAT DPRD																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
4	2	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			10 Dok umen	20,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Sekretari at DPRD dan DPRD	10 Do kume n	20,000,000	SEKRETARI AT DPRD	
4	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 Lap oran	300,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Sekretari at DPRD dan DPRD	150 L apora n	300,000,000	SEKRETARI AT DPRD	
4	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda (%)	%	%	100 %	400,000,000						100 %	600,000,000		
4	2	1	2.0 7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			8 jenis	400,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Sekretari at DPRD dan DPRD	8 jenis	600,000,000	SEKRETARI AT DPRD	
4	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	bulan	bulan	12 bula n	1,135,500,000							12 bul an	1,137,000,000	



OPD : SEKRETARIAT DPRD																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		daerah (bulan)																
4	2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Lapo ran	7,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 La poran	7,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lapo ran	180,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 La poran	180,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Lapo ran	48,500,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 La poran	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Lapo ran	900,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	12 La poran	900,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.0		Pemeliharaan Barang	Terpeliharaan	bulan	bulan	12 bula	740,000,000						12 bul	825,000,000	



OPD : SEKRETARIAT DPRD														
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					n							an		
4	2	1	2.09	1	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ya Barang Milik Daerah (bulan)								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara								
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara								
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								



OPD : SEKRETARIAT DPRD																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Saing									
4	2	1	2.1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	%	%	100 %	350,000,000					100 %	700,000,000		
4	2	1	2.1 5	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			2 Paket	250,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Paket	550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1 5	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			20 Orang	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	20 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1 6		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (bulan)	bulan	bulan	12 bulan	550,000,000						12 bulan	650,000,000	
4	2	1	2.1 6	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			120 Laporan	250,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	120 Laporan	330,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	4	Penyediaan	Jumlah			2 Paket	300,000,000	Kota	Dana	Meningkatkan	Pemantapan	Sekretari	2 Pak	320,000,000	SEKRETARI



OPD : SEKRETARIAT DPRD														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dokumen Hasil Pembahasan APBD			men		Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	an Reformasi Birokrasi Pemerintah	dan Sekretariat DPRD	umen		AT DPRD
4	2	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 Dokumen	60,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	DPRD dan Sekretariat DPRD	1 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	Peningkatan Kapasitas DPRD	%	%	100 %	1,735,000,000						100 %	2,040,000,000	
4	2	Pendalaman Tugas DPRD			120 Dokumen	1,500,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	120 Dokumen	1,750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			20 Dokumen	175,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD dan DPRD	20 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD



OPD : SEKRETARIAT DPRD																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan					Kelurahan	Umum	Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	h								
4	2	2	2.0 4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Hubungan Masyarakat			4 Doku men	50,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Sekretari at DPRD dan DPRD	4 Dok umen	75,000,000	SEKRETARI AT DPRD
4	2	2	2.0 4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			2 Doku men	10,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Sekretari at DPRD dan DPRD	2 Dok umen	15,000,000	SEKRETARI AT DPRD
4	2	2	2.0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)	%	%	100 %	300,000,000						100 %	350,000,000	
4	2	2	2.0 5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			60 Dok umen	300,000,000	Kota Sawahlunt o, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Sekretari at DPRD dan DPRD	60 Dok umen	350,000,000	SEKRETARI AT DPRD
4	2	2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksanan ya Koordinasi	%	%	100 %	6,229,760,000						100 %	12,500,000,000	



OPD : SEKRETARIAT DPRD																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
4	2	2	2.0	1	8	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			432 Dokumen	6,229,760,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	DPRD dan Sekretariat DPRD	432 Dokumen	12,500,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
TOTAL											25,249,555,771								34,007,000,000	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1					7,402,127,803								7,996,819,454				
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	6,254,750,984					12 Bulan	6,582,750,529		
5	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	bulan	bulan	12 bulan	4,830,750,520					12 bulan	5,030,750,529		
5	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan			37 Orang/bulan	4,830,750,520	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Pemantapan Reformasi	ASN Barenlitbangda	37 Orang/bulan	5,030,750,529	BADAN PERENCANAAN,



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Tunjangan ASN					Barangi n, Lubang Panjang	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Birokrasi Pemerintah				PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
5	1	1	2.05												
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian	bulan	bulan	12 bulan									
5	1	1	2.05	9											
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 Orang	30,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	8 Orang	60,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	1	2.06												
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	bulan	12 bulan	596,996,164								
5	1	1	2.06	1											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,500,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	1 Paket	11,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	1	2.06	2											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	179,121,164	Kota Sawahlunto, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	2 Paket	195,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	48,375,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	12 Paket	50,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	54,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	2 Paket	56,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	305,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	12 Laporan	330,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang Diadakan	bulan	bulan	12 bulan	175,000,000						12 bulan	200,000,000	
5	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5 Unit	175,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN Barenlitbangda	5 Unit	200,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0		Penyediaan Jasa	Tersedianya	bulan	bulan	12 bulan	400,004,300						12 bul	405,000,000	



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran									an		
5	1	1	2.0	1	12	4,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN Barenlitbangda	12	4,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0	2	12	55,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN Barenlitbangda	12	56,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0	4	12	341,004,300	Kota Sawahlunto, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN Barenlitbangda	12	345,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0		12	222,000,000						12	245,000,000	
5	1	1	2.0	1	19	172,000,000	Kota Sawahlunto, Barangi n, Lubang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Asset Barenlitbangda	19	185,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Panjang		Berkualitas dan Berkeadilan					NGAN DAERAH				
5	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	20,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Asset Barenlitbangda	1 Unit	25,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15 Unit	30,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Asset Barenlitbangda	15 Unit	35,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD (%)	%	%	100 %	831,405,069						100 %	1,030,000,000	
5	1	2	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Sistematis Dokumen Perencanaan dengan Aturan	%	%	100 %	685,877,709						100 %	810,000,000	
5	1	2	2.0 1	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan			1 Dokumen	62,632,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Teknokratik)																
5	1	2	2.0 1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Berita Acara	43,116,660	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			2 Berita Acara	9,261,035	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan TIK dan MPP	Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	147,446,035	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	60,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)			3 Dokumen	423,421,179	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	3 Dokumen	500,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Persentase Data Perencanaan yang Terpenuhi	%	%	100 %	92,733,900						100 %	155,000,000	



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
5	1	2	2.0 2	2	Perencanaan Pembangunan Daerah															
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				26 Oran g	64,882,000	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Perangkat Daerah	26 Ora ng	125,000,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
5	1	2	2.0 2	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	27,851,900	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Perangkat Daerah	1 Buku	30,000,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
5	1	2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	lap	lap		1 lap	52,793,460							1 lap	65,000,000	
5	1	2	2.0 3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Lapora n	52,793,460	Kota Sawahlun to, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Perangkat Daerah	1 Lapo ran	65,000,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan	%	%		100 %	315,971,750							100 %	384,068,925	



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kewilayahan kedalam RKPD (%)																
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)	%	%	100 %							100 %						
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	%	%	100 %							100 %						
5	1	3	2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedalam RKPD	%	%	100 %	75,000,000				100 %	86,000,000				
5	1	3	2.0 1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Doku men	14,000,000	Kota Sawahlu nto, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku a Ketahan an Economi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Perangkat Daerah	1 Doku men	16,000,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.3.2.0.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan			4 Perangkat Daerah	12,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	14,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.1.3.2.0.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			4 Laporan	10,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	4 Laporan	11,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.1.3.2.0.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)			1 Dokumen	16,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.1.3.2.0.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			4 Perangkat Daerah	14,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	16,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.1.3.2.0.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Perangkat			4 Perangkat	9,000,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Pemantapan	Perangkat Daerah	4 Perangkat	11,000,000	BADAN PERENCANAAN



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/ Renja bidang Pembangunan Manusia			Daerah		nto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Pemerintah		Daerah		AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH					
5	1	3	2.0	2		100 %	140,971,750					100 %	171,568,925						
5	1	3	2.0	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPKD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)			1 Dokumen	43,768,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Dokumen	17,600,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	3	2.0	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			6 Perangkat Daerah	15,278,300	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	16,806,130	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	3	2.0	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan			6 Perangkat Daerah	18,500,000	Kota Sawahlunto, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	16,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian					Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemerintah				DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
5	1	3	2.0	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)			1 Dokumen	22,193,450	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	24,412,795	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			2 Perangkat Daerah	28,131,250	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	82,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			2 Perangkat Daerah	13,100,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	13,750,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.0	3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	onsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kedalam RKPJMD	%	%	100 %	100,000,000						100 %	126,500,000	
5	1	3	2.0	1		Koordinasi	Jumlah			1 Dokumen	22,500,000	Kota	Dana	Memperkuat	Pemantapan	Perangkat	1 Dokumen	16,500,000	BADAN



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			men		Sawahlun- to, Barangi n, Lubang Panjang	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berualitas dan Berkeadilan	an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Daerah	men		PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	3	2.0 3	2	5 Peran gkat Daerah	18,000,000	Kota Sawahlun- to, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berualitas dan Berkeadilan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Perangkat Daerah	5 Pera ngkat Daera h	22,000,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	3	2.0 3	3	5 Peran gkat Daerah	12,000,000	Kota Sawahlun- to, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berualitas dan Berkeadilan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Perangkat Daerah	5 Pera ngkat Daera h	16,500,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	3	2.0 3	4	1 Lapora n	0	Kota Sawahlun- to, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berualitas dan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Perangkat Daerah	1 Lapo ran	11,000,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH
5	1	3	2.0 3	5	1 Doku men	22,500,000	Kota Sawahlun- to, Barangi n,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta	Perangkat Daerah	1 Doku men	16,500,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPJ)					Lubang Panjang	Umum	an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	h				PENGEMBA NGAN DAERAH					
5	1	3	2.0 3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			5 Peran gkat Daerah	15,000,000	Kota Sawahlun to, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	5 Pera ngkat Daera h	16,500,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
5	1	3	2.0 3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			5 Peran gkat Daerah	10,000,000	Kota Sawahlun to, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	5 Pera ngkat Daera h	16,500,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
5	1	3	2.0 3	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	"Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Kewilayahan"			1 Lapora n	0	Kota Sawahlun to, Barangi n, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	1 Lapo ran	11,000,000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					320,831,000							400,000,000		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	Proposa l	Proposal	40 Prop osal	320,831,000							40 Pro posal	400,000,000	



OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	5	2	2.0 4			100 dok	320,831,000						100 dok	400,000,000				
5	5	2	2.0 4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	164,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.0 4	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan	156,831,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.0 4	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			1 Laporan	0	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TOTAL							7,722,958,803							8,396,819,454				

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3				KEPEGAWAIAN										7,537,421,023		7,537,459,104		
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	5,735,654,004						12 Bulan	5,735,654,004		
5	3	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	bulan	bulan	13 bulan	4,823,251,439						13 bulan	4,823,251,439		
5	3	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	4,823,251,439	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara	30 Orang/bulan	4,823,251,439	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	bulan	bulan	12 bulan	375,290,000						12 bulan	375,290,000		
5	3	1	2.0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 paket	8,400,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	5 paket	8,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.0	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			80 paket	71,980,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	80 paket	71,980,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Berdaya Saing									
5	3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			50 paket	17,800,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	50 paket	17,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			50 paket	44,750,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	50 paket	44,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.0 6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	30,440,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	12 Laporan	30,440,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80 Laporan	201,920,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	80 Laporan	201,920,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit	unit	20 unit	68,700,000						20 unit	68,700,000	



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5 3 1 2.0 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			14 paket	11,700,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	14 paket	11,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 1 2.0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	57,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	6 Unit	57,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	bulan	bulan	12 bulan	335,839,815						12 bulan	335,839,815		
5 3 1 2.0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			120 Laporan	5,775,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	120 Laporan	5,775,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 1 2.0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	35,651,815	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	36 Laporan	35,651,815	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.3.1.2.0.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	294,413,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	12 Laporan	294,413,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.3.1.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	bulan	bulan	12 bulan	132,572,750						12 bulan	132,572,750	
5.3.1.2.0.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10 Unit	90,926,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	10 Unit	90,926,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.3.1.2.0.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			40 Unit	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	40 Unit	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.3.1.2.0.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28 Unit	13,010,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan ASN	28 Unit	13,010,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.3.1.2.0.9	Pemeliharaan/Rehabet	Jumlah Gedung			1 Unit	23,636,000	Kota	Dana	Meningkatkan	Peningkat	Masyarakat	1 Unit	23,636,000	BADAN



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	an Kualitas SDM yang berdaya Saing	at dan ASN			KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)	%	%	100 %	1,801,767,019						100 %	1,801,805,100		
5	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	persen	persen	98 persen	306,589,019						98 persen	306,589,100		
5	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			3 dokumen	241,215,269	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	3 dokumen	241,215,350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 lembaga	35,200,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	1 lembaga	35,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Laporan	30,173,750	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	30,173,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Saing									
5	3	2	2.0 2		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	persen	persen	99 persen	331,000,000				99 persen	331,000,000			
5	3	2	2.0 2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			4 dokumen	250,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara	4 dokumen	250,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2 dokumen	75,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara	2 dokumen	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			1 dokumen	6,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen	6,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 3		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan	orang	orang	130 orang	1,098,212,000						130 orang	1,098,250,000	



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
5	3	2	2.0 3	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kompetensi ASN			130 Orang	499,962,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	130 Orang	500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 3	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	75,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	1 Dokumen	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 3	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				35 Dokumen	150,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	35 Dokumen	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 3	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	40,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	2 Orang	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 3	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				12 Dokumen	183,250,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	12 Dokumen	183,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Kelurahan	Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Saing				DAYA MANUSIA				
5	3	2	2.0 3	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			2 Dokumen	100,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	2 Dokumen	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 3	1 2	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			1 Laporan	50,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Pegawai negeri Sipil	1 Laporan	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang di evaluasi dan di bina	Orang	Orang	2150 Orang	65,966,000						2150 Orang	65,966,000	
5	3	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2150 Dokumen	40,341,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil negara	2150 Dokumen	40,341,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.0 4	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			6 Orang	15,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil negara	6 Orang	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun																
5	4	2	2.0	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			2 Laporan	133,486,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	133,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TOTAL										7,720,907,023							7,720,959,104	

OPD : INSPEKTORAT																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	1				INSPEKTORAT DAERAH					7,354,979,004							8,473,576,000		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	7,180,905,654							12 Bulan	7,911,576,000	
6	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD	Bulan	Bulan	13 Bulan	6,327,300,516							13 Bulan	6,500,000,000	
6	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang			42 Ora	6,327,300,516	Kota	Dana	Meningkat	Pemantap	Pegawai	42 Oran	6,500,000,000	INSPEKTOR	



OPD : INSPEKTORAT															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			ng/bulan		Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	an Reformasi Birokrasi Pemerintah	Inspektorat Kota Sawahlunto	g/bulan		AT	
6	1	1	2.05			12 Bulan	150,000,000					12 Bulan	433,576,000		
6	1	1	2.05	9		48 orang	150,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat	48 orang	433,576,000	INSPEKTOR AT	
6	1	1	2.06			12 Bulan	226,501,728					12 Bulan	237,000,000		
6	1	1	2.06	1		12 Paket	7,434,669	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Paket	8,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.06	2		12 Paket	35,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Paket	40,000,000	INSPEKTOR AT



OPD : INSPEKTORAT																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
								Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing									
6	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	29,322,059	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Paket	31,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan		12 Paket	27,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Paket	28,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	127,745,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perlengkapan dan peralatan kerja aparatur	12 Laporan	130,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan peralatan dan mesin	Unit	Unit	22 Unit	40,000,000						22 Unit	112,000,000	
6	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 unit	40,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pembelian peralatan kantor	4 unit	112,000,000	INSPEKTOR AT



OPD : INSPEKTORAT																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Segar, Aur Mulio	Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintah								
6	1	1	2.08															
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Kebutuhan Jasa Kantor	Bulan	Bulan	12 Bulan	240,548,910					12 Bulan	312,000,000		
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Memfasilitasi kebutuhan jasa kantor	1 Laporan	4,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	33,198,910	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Memfasilitasi kebutuhan jasa kantor	12 Laporan	50,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	7,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Memfasilitasi kebutuhan jasa kantor	12 Paket	8,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			12 Laporan	195,350,000	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan	Pemantapan	Memfasilitasi	12 Laporan	250,000,000	INSPEKTOR AT



OPD : INSPEKTORAT														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Pemerintah	kebutuhan jasa kantor			
6	1	1	2.09									12 Bulan	317,000,000	
6	1	1	2.09	1								11 unit	270,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.09	6								10 Unit	17,000,000	INSPEKTOR AT
6	1	1	2.09	1								1 unit	30,000,000	INSPEKTOR AT



OPD : INSPEKTORAT																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Saing									
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	%	%	100 %	120,549,350				100 %	370,000,000			
6	1	2	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obriik Beresiko Tinggi Yang Terawasi	Persentase	Persentase	100 Persentase	120,549,350				100 Persentase	370,000,000			
6	1	2	2.0 1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			121 laporan	83,319,350	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pengawasan pada OPD, Desa dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	121 laporan	300,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.0 1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			12 dokumen	37,230,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pengawasan pada OPD, Desa dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	12 dokumen	70,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai APIP (Level)	Level	Level	4 Level	53,524,000						4 Level	192,000,000	
6	1	3	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan SKOR IPAK	Persentase	Persentase	100 Persentase	53,524,000						100 Persentase	192,000,000	
6	1	3	2.0 2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan			4 Kegiatan	53,524,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	OPD, Desa dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	150,000,000	INSPEKTORAT



OPD : INSPEKTORAT																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
									Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Korupsi	Pemberantasan Korupsi						Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kota Sawahlunto									
6	1	3	2.0	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			26 per angkat daerah	0	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	OPD, Desa dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	26 per angkat daerah	42,000,000	INSPEKTORAT	
TOTAL													7,354,979,004						8,473,576,000	

OPD : KECAMATAN BARANGIN																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1					KECAMATAN													
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	5,949,520,000					12 Bulan	6,544,472,000		
7	1	1	2.0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	40 orang/bulan	4,800,000,000					40 orang/bulan	5,280,000,000		
7	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	4,800,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	40 Orang/bulan	5,280,000,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Santua	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintah								
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Paket	Paket	1 Paket	35,720,000				1 Paket	39,292,000			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	3,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanipulan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	3,850,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	32,220,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemanipulan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	4 Orang	35,442,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan umum	bulan	bulan	12 bulan	119,200,000						12 bulan	131,120,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	45,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemanipulan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	49,500,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										Berdaya Saing								
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	5,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	5,500,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	20,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	22,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	8,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	8,800,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			6 Dokumen	1,200,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	1,320,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1.1.2.0.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	40,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparatur Sipil Negara	12 laporan	44,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	30,000,000						12 Bulan	33,000,000	
7.1.1.2.0.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	30,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	6 Unit	33,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	389,600,000						12 Bulan	428,560,000	
7.1.1.2.0.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	3,600,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 bulan	3,960,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1.1.2.0.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 bulan	30,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 bulan	33,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.0.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Bulan	356,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	13 Bulan	391,600,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	75,000,000						12 Bulan	82,500,000	
7.1.1.2.0.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 bulan	55,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 bulan	60,500,000	KECAMATAN BARANGIN
7.1.1.2.0.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha			12 bulan	10,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 bulan	11,000,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		bilitasi						Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	h								
7	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 bulan	10,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah	12 bulan	11,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	45,000,000						100 %	49,500,000	
7	1	2	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Terlaksana dengan baik	%	%	100 %	30,000,000						100 %	33,000,000	
7	1	2	2.0	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12 Bulan	30,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	12 Bulan	33,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	2	2.0		Pelaksanaan Urusan	Pelimpahan kegiatan	kegiatan	kegiatan	172 keg	15,000,000						172 keg	16,500,000	



OPD : KECAMATAN BARANGIN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									as Dan Berdaya Saing					
7	1	4			100 %	20,000,000						100 %	22,000,000	
7	1	4	2.0 1		100 Pers en	20,000,000						100 Pers en	22,000,000	
7	1	4	2.0 1	1	12 Lapo ran	20,000,000	Kota Sawahlun to, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat	12 Lapo ran	22,000,000	KECAMAT AN BARANGI N
7	1	5			100 %	35,000,000						100 %	38,500,000	
7	1	5	2.0 1		12 Bula n	35,000,000						12 Bulan	38,500,000	
7	1	5	2.0 1	1	100 Ora ng	25,000,000	Kota Sawahlun to, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat	100 Ora ng	27,500,000	KECAMAT AN BARANGI N



OPD : KECAMATAN BARANGIN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							Berdaya Saing									
7	1	5	2.0	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100 Orang	10,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	100 Orang	11,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	%	%	100 %	20,000,000						100 %	22,000,000	
7	1	6	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik	%	%	4 %	20,000,000						4 %	22,000,000	
7	1	6	2.0	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka			12 Dokumen	20,000,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Pemantapan Reformasi	Masyarakat	12 Dokumen	22,000,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Barangin, Santua	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Birokrasi Pemerintah				N
7														
7														
7	1	2				629,500,000							692,450,000	
7	1	2				479,500,000						100 %	527,450,000	
7	1	2	2.0											
7	1	2	4											
7	1	2	2.0	3										
7	1	2	4											
7	1	2	2.0	3										
7	1	2	4											
7	1	3												
7	1	3	2.0											
7	1	3	2											
7	1	3	2.0	2										
7	1	3	2											



OPD : KECAMATAN BARANGIN																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Terbangun					Barangin, Durian I	Dana Alokasi Umum	tur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Birokrasi Pemerintah				N			
7	1 3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	12 Pokmas / Ormas	55,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1			KECAMATAN													
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	479,500,000						100 %	527,450,000	
7	1 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	kegiatan	kegiatan	172 kegiatan	479,500,000						172 kegiatan	527,450,000	
7	1 2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 laporan	479,500,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat dan ASN	12 laporan	527,450,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Berdaya Saing					
7	1	3			100 %	150,000,000						100 %	165,000,000	
7	1	3	2.0	2								12 Bulan	165,000,000	
7	1	3	2.0	2								2 kegiatan	110,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	3	2.0	3								2 Pokmas / Ormas	55,000,000	KECAMATAN BARANGIN
7														
7														
7	1					627,000,000							689,700,000	
7	1	2			100 %	477,000,000						100 %	524,700,000	



OPD : KECAMATAN BARANGIN															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		terlaksana dengan baik (%)													
7	1 2 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	kegiatan	kegiatan	172 kegi iatan	477,000,000						172 kegi atan	524,700,000	
7	1 2 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 lapor an	477,000,000	Kota Sawahlun to, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat dan ASN	12 lapor an	524,700,000	KECAMAT AN BARANGI N
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	150,000,000						100 %	165,000,000	
7	1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	Bulan	Bulan	12 Bula n	150,000,000						12 Bulan	165,000,000	
7	1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 kegiat an	100,000,000	Kota Sawahlun to, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastruk tur Untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat	2 kegiat an	110,000,000	KECAMAT AN BARANGI N
7	1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pok mas / Ormas	50,000,000	Kota Sawahlun to, Barangin, Lubang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastruk tur Untuk Menduku ng	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat	12 Pokm as / Ormas	55,000,000	KECAMAT AN BARANGI N



OPD : KECAMATAN BARANGIN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar									
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1												884,838,782					
7	1	2				804,398,893							720,500,000					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	655,000,000				100 %	720,500,000			
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan yang di Laksanakan di Kecamatan	kegiatan	kegiatan	172 kegiatan	655,000,000				172 kegiatan	720,500,000			
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 laporan	655,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Sarangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat dan ASN	12 laporan	720,500,000	KECAMATAN BARANGIN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	149,398,893					100 %	164,338,782		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Difasilitasi	Bulan	Bulan	12 Bulan	149,398,893					12 Bulan	164,338,782		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 kegiatan	100,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	2 kegiatan	110,000,000	KECAMATAN BARANGIN



OPD : KECAMATAN BARANGIN																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Saringan	Alokasi Umum	Menduku ng Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pemerinta h								
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pok mas / Ormas	49,398,893	Kota Sawahlun to, Barangin, Saringan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Infrastruk tur Untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat	12 Pokm as / Ormas	54,338,782	KECAMAT AN BARANGI N
TOTAL										8,639,918,893							9,503,910,782	

OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Target Akhir Periode	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu
					Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	



					Kegiatan	Kegiatan	RPJMD	RKPD Tahun 2022	2023		r Dana	Nasional	Daerah			ng Jawab			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN													6,736,056,320	7,437,061,992
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	6,325,136,020						12 Bulan	7,038,199,662		
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan (orang/bulan)			756	5,783,336,020						756	6,361,669,662		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			56 Orang/bulan	5,783,336,020	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	56 Orang/bulan	6,361,669,662	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peersentase Aparatur yang meningkat SDMnya %			38	33,500,000						38	64,350,000		
						Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)			100							100			
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	3,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	1 Paket	9,350,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
7	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	30,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	5 Orang	55,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan			12	140,000,000						12	160,350,000		



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		administrasi umum (bulan)																
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3,500,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	12 Paket	3,850,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	49,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	12 Paket	60,500,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	2,500,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	1 Paket	2,500,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	25,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	12 Paket	27,500,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	10,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	12 Paket	11,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	50,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua	Dana Transf er Umum -Dana	Mengembang kan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta	ASN	12 Laporan	55,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Menjamin Pemerataan	h				
7	1	1	2.07		2	77,500,000						2	77,500,000	
7	1	1	2.07	10	2 paket	30,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	2 paket	30,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.07	11	1 paket	47,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	1 paket	47,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.08		12	179,800,000						12	195,030,000	
7	1	1	2.08	1	12 Laporan	1,500,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	12 Laporan	1,650,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.08	2	12 Laporan	30,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	12 Laporan	33,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	148,300,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	12 Lapo ran	160,380,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerntahan Daerah (bulan)			12	111,000,000						12	179,300,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	83,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	12 Unit	99,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	3,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	12 Unit	3,300,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi			1 paket	15,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	1 paket	66,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			12 unit	10,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar,	Dana Transf er Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Pemantap an Reformasi Birokrasi	ASN	12 unit	11,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi					Semua Kelurahan	-Dana Alokasi Umum	Dan Berdaya Saing	Pemerinta h				
7	1	2			100 %	122,920,300						100 %	78,012,330	
7	1	2	2.0 1		12	101,000,000						12	53,900,000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28,000,000	Kota Sawahlun to, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	4 Lapora n	48,400,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73,000,000	Kota Sawahlun to, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	1 Doku men	5,500,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	21,920,300						1	24,112,330	



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		(kegiatan)																
7	1	2	2.0	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	21,920,300	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN	12 Laporan	24,112,330	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	240,000,000						100 %	260,950,000	
7	1	3	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)			6	240,000,000						6	260,950,000	
7	1	3	2.0	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)			5 lembaga	5,000,000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	5 lembaga	7,700,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 Laporan	235,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	9 Laporan	253,250,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	%	%	100 %	20,000,000						100 %	22,000,000	



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	1	4	2.0 1			1	20,000,000						1	22,000,000	
7	1	4	2.0 1	1		1 Laporan	20,000,000	Kota Sawahlun to, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarak at	1 Lapora n	22,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR
7	1	5				n/a %	11,000,000						n/a %	16,500,000	
7	1	5	2.0 1			1	11,000,000						1	16,500,000	
7	1	5	2.0 1	1		250 Ora ng	6,000,000	Kota Sawahlun to, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	250 Ora ng	11,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			1 tim	5,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	1 tim	5,500,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	%	%	100 %	17,000,000						100 %	21,400,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (bulan)			12	17,000,000						12	21,400,000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka			5 Dokumen	6,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar,	Dana Transfer Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi	Pemantapan Reformasi Birokrasi	ASN	5 Dokumen	9,900,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab								
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
									Nasional	Daerah												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
		Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Semua Kelurahan	-Dana Alokasi Umum	Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerinta h												
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5 Doku men	5,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemant apan Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	5 Doku men	5,500,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR				
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			2 Doku men	6,000,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemant apan Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN	2 Doku men	6,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN													852,899,000			865,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	640,650,750										100 %	650,000,000	
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)			1	640,650,750										1	650,000,000	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Lapor an	640,650,750	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transf er Umum -Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Pemant apan Reformasi Birokrasi Pemerinta	ASN	12 Lapor an	650,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR				



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
									Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								Alokasi Umum	Saing	h						
7	1	3			100 %	212,248,250						100 %	215,000,000			
7	1	3	2.0 2		100 %	212,248,250						100 %	215,000,000			
7	1	3	2.0 2	2		3 Unit	129,350,000	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarak at	3 Unit	130,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR	
7	1	3	2.0 2	3		2 Pokma s / Ormas	82,898,250	Kota Sawahlunt o, Lembah Segar, Aia Dingin	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarak at	2 Pokma s / Ormas	85,000,000	KECAMAT AN LEMBAH SEGAR	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1												852,899,000		865,000,000	
7	1	2			100 %	550,899,000							100 %	575,000,000		
7	1	2	2.0 4			1	550,899,000						1	575,000,000		
7	1	2	2.0 4	3		12 Laporan	550,899,000	Kota Sawahlunt	Dana Transf	Meningkatkan Sumber Daya	Pemantap an	ASN	12 Laporan	575,000,000	KECAMAT AN	



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					o, Lembah Segar, Aur Mulio	er Umum -Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Pemerintah				LEMBAH SEGAR	
7	1	3			100 %	302,000,000						100 %	290,000,000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	302,000,000						100 %	290,000,000		
7	1	3	2.0 2		100 %	302,000,000						100 %	290,000,000		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	%	100 %	302,000,000						100 %	290,000,000		
7	1	3	2.0 2	2		3 Unit	282,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	3 Unit	255,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2.0 2	3		2 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	35,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7															
	UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1						852,899,000						865,000,000		
7	1	2			100 %	695,788,900						100 %	700,000,000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	695,788,900						100 %	700,000,000		
7	1	2	2.0 4		1	695,788,900						1	700,000,000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di			1	695,788,900						1	700,000,000		



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kecamatan (kegiatan)													
7	1 2 2.0 3 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	695,788,900	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	12 Laporan	700,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	100 %	157,110,100						100 %	165,000,000		
7	1 3 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	%	100 %	157,110,100						100 %	165,000,000		
7	1 3 2.0 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	114,400,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	3 Unit	120,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
7	1 3 2.0 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	42,710,100	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	45,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1	KECAMATAN					852,899,000							880,000,000	
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	100 %	552,899,000						100 %	560,000,000		
7	1 2 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelimpahan Urusan		1	552,899,000						1	560,000,000		



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)																
7	1	2	2.0	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	552,899,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	12 Laporan	560,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	300,000,000						100 %	320,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	%	100 %	300,000,000						100 %	320,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	250,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	3 Unit	260,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	60,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN					852,899,000							880,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang	%	%	100 %	573,048,800						100 %	580,000,000	



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
									Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		terlaksana dengan baik (%)															
7	1 2	2.04			1	573,048,800						1	580,000,000				
7	1 2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	573,048,800	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	12 Laporan	580,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	279,850,200					100 %	300,000,000		
7	1 3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	%	100 %	279,850,200					100 %	300,000,000		
7	1 3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	212,450,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	3 Unit	230,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1 3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	67,400,200	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	70,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1			KECAMATAN					852,899,000						885,000,000		
7	1 2			PROGRAM	Persentase	%	%	100 %	570,899,000					100 %	580,000,000		



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)																
7	1	2	2.0 4			1	570,899,000						1	580,000,000				
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)			12 Laporan	570,899,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	12 Laporan	580,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	282,000,000						100 %	305,000,000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	%	100 %	282,000,000						100 %	305,000,000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	250,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	3 Unit	270,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	32,000,000	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	35,000,000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR



OPD : KECAMATAN LEMBAH SEGAR															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
TOTAL						11,853,450,320							12,677,061,992		

OPD : KECAMATAN SILUNGKANG																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7					KECAMATAN														
7	1	1				3,011,845,604							3,578,477,184						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	2,787,645,404				12 Bulan	3,284,757,184				
7	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan			266	2,263,554,004				266	2,694,257,184				
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			266 Orang/bulan	2,263,554,004	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN Kecamatan Silungkang	266 Orang/bulan	2,694,257,184	KECAMATAN SILUNGKANG	
7	1	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap			100	29,350,000				100	35,500,000				
7	1	1	2.0	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut			31 Paket	5,500,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Pemantapan Reformasi	ASN	31 Paket	5,500,000	KECAMATAN SILUNGKANG



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kelengkapan					Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Birokrasi Pemerintah				NG	
7	1	1	2.05	9		5 Orang	23,850,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	5 Orang	30,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.06			12	106,861,400						12	131,000,000	
7	1	1	2.06	1		12 Paket	1,431,200	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	3,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.06	2		12 Paket	39,913,200	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	45,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.0	3		2 Paket	830	Kota	Dana	Meningkat	Pemantapan	ASN	2 Paket	1,000,000	KECAMAT



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	n Reformasi Birokrasi Pemerintah				AN SILUNGKANG
7	1	1	2.0	4	12 Paket	23,670,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	25,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.0	5	12 Paket	10,261,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Paket	12,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.0	9	12 Laporan	30,756,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	45,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.0		12	53,000,000						12	65,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Barang Milik Daerah												



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit	53,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	6 Unit	65,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12	238,746,000						12	276,000,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	800	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	35,688,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan			12 Laporan	202,258,000	Kota Sawahlunto,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber	Pemantapan Reformasi	ASN	12 Laporan	225,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Umum Kantor yang Disediakan					Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Birokrasi Pemerintah				NG				
7	1	1	2.09			12	96,134,000					12	83,000,000					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	58,604,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	9 Unit	60,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	2,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	12 Unit	3,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi			1 Unit	30,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	1 Unit	10,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Berdaya Saing									
7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			16 Unit	5,530,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	ASN	16 Unit	10,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	17,219,900						100 %	22,000,000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			12	12,219,900						12	16,500,000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan	8,320,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	4 Laporan	12,500,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	3,899,900	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Masyarakat	1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
									an Dan Menjamin Pemerataa n										
7	1	2	2.0 4			1	5,000,000					1	5,500,000						
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan													
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Lapo ran	5,000,000	Kota Sawahlun to, Silungkan g, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran gi Kesejang an Dan Menjamin Pemerataa n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat	12 Lapo ran	5,500,000	KECAMAT AN SILUNGKA NG
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	179,505,300							100 %	205,000,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	kegiatan	kegiatan	10 kegia tan	179,505,300							10 kegia tan	205,000,000	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			0 Lemba ga Kemasy arakatan	3,760,000	Kota Sawahlun to, Silungkan g, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengemb angkan Wilayah Untuk Menguran gi Kesejang an Dan Menjamin Pemerataa n	Pemantapa n Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Masyarakat , Lembaga Pemberday aan Masyarakat	0 Lemb aga Kemasy arakata n	5,000,000	KECAMAT AN SILUNGKA NG	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan			7 Lapora n	175,745,300	Kota Sawahlun	Dana Transfer	Mengemb angkan	Pemantapa n	Masyarakat , Lembaga	7 Lapo ran	200,000,000	KECAMAT AN	



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					to, Silungkang, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemberdayaan Masyarakat			SILUNGKANG
7	1	4			100 %	9,465,000						100 %	10,400,000	
7	1	4	2.01		1	9,465,000						1	10,400,000	
7	1	4	2.01	1										
7	1	4	2.01	1	1 Laporan	9,465,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Aparat Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	10,400,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	5			100 %	2,500,000						100 %	36,300,000	
7	1	5	2.01		1	2,500,000						1	36,300,000	



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Kepala Daerah	kecamatan																
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			250 Orang	2,500,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	250 Orang	36,300,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	%	%	100 %	15,510,000						100 %	20,020,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan			12	15,510,000						12	20,020,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata			5 Dokumen	3,000,000	Kota Sawahlunto, Silungkang	Dana Transfer Umum-Dana	Mengembangkan Wilayah Untuk	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Desa	5 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN SILUNGKANG



OPD : KECAMATAN SILUNGKANG															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Pemerintahan Desa					g, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerintah					
7	1	6	2.0	3	1	5 Dokumen	5,010,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa	5 Dokumen	10,020,000	KECAMATAN SILUNGKANG
7	1	6	2.0	6	1	0 Dokumen	7,500,000	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Desa	0 Dokumen	0	KECAMATAN SILUNGKANG
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen							3 Dokumen		
TOTAL								3,011,845,604					3,578,477,184		

OPD : KECAMATAN TALAWI														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7		UNSUR KEWILAYAHAN												



OPD : KECAMATAN TALAWI																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
													Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
7	1	1			KECAMATAN										3,275,004,433				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan		12 Bulan	3,336,163,278					12 Bulan	2,928,296,718		
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasi urusan keuangan	%	%		100 %	2,276,504,568					100 %	2,276,504,568		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	2,276,504,568	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	252 Orang/bulan	2,276,504,568	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya urusan kepegawaian	%	%		100 %	40,250,000					100 %	44,275,000		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3,500,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN dan Non ASN	1 Paket	3,850,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 orang	36,750,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	ASN dan Non ASN	5 orang	40,425,000	KECAMATAN TALAWI



OPD : KECAMATAN TALAWI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya urusan umum	%	%	100 %	145,100,000				100 %	159,610,000			
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	2,100,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 paket	2,310,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	63,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 paket	69,300,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 paket	20,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 paket	22,000,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	10,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	12 Paket	11,000,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan			12 Laporan	50,000,000	Kota	Dana	Meningkatkan	Pemantapan	Perangkat	12 Lapo	55,000,000	KECAMATAN



OPD : KECAMATAN TALAWI																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			6		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			an			Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	an Reformasi Birokrasi Pemerintah	Daerah	ran		AN TALAWI
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	bulan	bulan	12 bulan	22,439,710							12 bulan	21,100,000	
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 unit	15,898,000		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	2 unit	15,000,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	6,541,710		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Perangkat Daerah	3 Unit	6,100,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk menunjang pelayanan	%	%	100 %	795,369,000							100 %	364,657,150	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	2,500,000		Kota Sawahlunto, Talawi,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Pemantapan Reformasi Birokrasi	ASN dan non ASN	12 Laporan	2,750,000	KECAMATAN TALAWI



OPD : KECAMATAN TALAWI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										Semua Kelurah an	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerinta h					
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lapo ran	56,000,000	Kota Sawahl unto, Talawi, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN dan non ASN	12 Lapo ran	61,600,000	KECAMAT AN TALAWI
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Lapo ran	736,869,000	Kota Sawahl unto, Talawi, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	ASN dan non ASN	12 Lapo ran	300,307,150	KECAMAT AN TALAWI
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	%	%	100 %	56,500,000						100 %	62,150,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	45,000,000	Kota Sawahl unto, Talawi, Semua Kelurah an	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantap an Reformasi Birokrasi Pemerinta h	Barang dan Asset Milik Daerah	9 Unit	49,500,000	KECAMAT AN TALAWI
7	1	1	2.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	1,500,000	Kota Sawahl unto,	Dana Transfer Umum-	Meningkat kan Sumber	Pemantap an Reformasi	Barang dan Asset Milik Daerah	12 Unit	1,650,000	KECAMAT AN TALAWI



OPD : KECAMATAN TALAWI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
											Talawi, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Birokrasi Pemerintah				
7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	5,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang dan Asset Milik Daerah	12 Unit	5,500,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	5,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Barang dan Asset Milik Daerah	1 Unit	5,500,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)	%	%	100 %	12,499,850						100 %	13,750,000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	keg	keg	1 keg	7,499,850						1 keg	8,250,000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan			4 Laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi,	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatkan Sumber Daya	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	4 Laporan	5,500,000	KECAMATAN TALAWI



OPD : KECAMATAN TALAWI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerintah				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	2,499,850	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,750,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	%	%	100 %	5,000,000						100 %	5,500,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Masyarakat	12 Laporan	5,500,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	%	%	100 %	287,318,255						100 %	288,957,715	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	buah	buah	100 buah	287,318,255						100 buah	288,957,715	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi	Jumlah lembaga Kemasyarakatan			5 Lembaga	15,000,000	Kota Sawahl	Dana Transfer	Meningkatkan	Pemantapan	Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	16,500,000	KECAMATAN



OPD : KECAMATAN TALAWI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan					unto, Talawi, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Pemerintah	tan			TALAWI
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9 Laporan	272,318,255	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Lembaga Kemasyarakatan	9 Laporan	272,457,715	KECAMATAN TALAWI
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	%	%	100 %	5,000,000						100 %	5,500,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	kali	kali	100 kali	5,000,000						100 kali	5,500,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			2 Laporan	5,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Linmas Desa	2 Laporan	5,500,000	KECAMATAN TALAWI



OPD : KECAMATAN TALAWI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
						Kecamatan												
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	%	%	100 %	11,300,000					100 %	13,750,000		
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di kecamatan	kegiatan	kegiatan	100 kegiatan	11,300,000					100 kegiatan	13,750,000		
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			300 Orang	6,300,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintahan Desa	300 Orang	8,250,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	5	2.0 1	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			25 Orang	5,000,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pemerintahan Desa	25 Orang	5,500,000	KECAMATAN TALAWI



OPD : KECAMATAN TALAWI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	h					
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)	%	%	100 %	22,499,900				100 %	24,750,000			
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	desa	desa	11 desa	22,499,900				11 desa	24,750,000			
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			11 Dokumen	7,499,900	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Pemerintahan Desa	11 Dokumen	8,250,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11 Dokumen	7,500,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Pemerintahan Desa	11 Dokumen	8,250,000	KECAMATAN TALAWI
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			4 Dokumen	7,500,000	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Pemerintahan Desa	4 Dokumen	8,250,000	KECAMATAN TALAWI



OPD : KECAMATAN TALAWI														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Dan Berdaya Saing				
TOTAL						3,674,781,283						3,275,004,433		

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								8,401,711,825					
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	5,382,037,988				12 Bulan	5,543,023,700			
1	5	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	1 dokumen	6,648,400				1 dokumen	6,980,820			
1	5	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	6,648,400	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	badan kesbangpo I & PBD	1 Dokumen	6,980,820	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	bulan	bulan	12 bulan	3,612,024,088				12 bulan	3,747,009,105			
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima			14 Orang/bulan	3,612,024,088	Kota Sawahlunto	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Peningkatan Kualitas	PNS	14 Orang/bulan	3,747,009,105	BADAN KESATUAN	



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Gaji dan Tunjangan ASN					lunto, Baran gin, Duria n II	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM yang berdaya Saing				BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	5	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	paket	1 paket	164,647,500					1 paket	115,379,875		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	tahun	tahun	8 tahun								8 tahun					
1	5	1	2.0	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	14,647,500	Kota Sawah lunto, Baran gin, Duria n II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD kota sawahlunt o	1 Paket	15,379,875	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	150,000,000	Kota Sawah lunto, Baran gin, Duria n II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	asn badan kesbangpo I & PBD kota sawahlunt o	0 Orang	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							15 Oran g						15 Oran g			



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																	
1	5	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	344,577,000				12 bulan	309,305,850				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	bulan	12 bulan					12 bulan					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan					12 bulan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan					12 bulan					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan					12 bulan					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan					12 bulan					
1	5	1	2.0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	6,825,000	Kota Sawahlunto, Baranjin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	1 Paket	7,166,250	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
									Nasional	Daerah												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
									Berdaya Saing													
1	5	1	2.0	2	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	89,800,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	1 Paket	94,290,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	4	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	22,827,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	1 Paket	23,968,350	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	5	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36,750,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	1 Paket	38,587,500	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	6	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	4,500,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	24 Dokumen	4,725,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	9	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				120 orang	183,875,000	Kota Sawahlunto, Baran	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	120 orang	140,568,750	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		SKPD					gin, Durian II	Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	2.07												
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	%	%	100 %	0						100 %	100,000,000	
1	5	1	2.07	2											
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	0	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya Saing	sarana operasional kantor	1 Unit	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan	924,254,000						12 bulan	970,466,700	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	bulan	12 bulan							12 bulan		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	bulan	12 bulan							12 bulan		
1	5	1	2.08	1											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	15,000,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Semu a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	12 Laporan	15,750,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
									Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
							Kelurahan		Berdaya Saing												
1	5	1	2.0	2	8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	65,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	12 Laporan	68,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	2.0	4	8		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	844,254,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	asn badan kesbangpo I & PBD	12 Laporan	886,466,700	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	2.0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	bulan	12 bulan	329,887,000							12 bulan	293,881,350	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	bulan	12 bulan								12 bulan		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah	bulan	bulan	12 bulan								12 bulan		



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
1	5	1	2.0	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	235,000,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	badan kesbangpo I & PBD	18 Unit	194,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	75,000,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	badan kesbangpo I & PBD	1 Unit	78,750,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			37 Unit	19,887,000	Kota Sawahlunto, Baran gin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	badan kesbangpo I & PBD	37 Unit	20,881,350	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar (%)	%	%	100 %	3,388,462,450						100 %	2,858,688,125	
1	5	3	2.0	1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP,	dokumen	dokumen	1 dokumen	147,949,800						1 dokumen	28,749,800	



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Kabupaten/Kota	Informasi Pra Bencana yang tersusun																
		Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan	%	%	100 %							100 %						
1	5	3	2.0	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			390 Orang	147,949,800	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat	390 Orang	28,749,800	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	%	%	100 %	2,917,512,450						100 %	2,424,357,975	
1	5	3	2.0	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			150 Orang	47,653,000	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan bencana	150 Orang	50,035,650	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Perubahan Iklim									
1	5	3	2.0	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			12 Dokumen	399,999,900	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	12 Dokumen	110,248,950	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			4 Unit	88,639,500	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	4 Unit	157,677,975	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			5 Kawasan	393,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	5 Kawasan	105,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana			3 dokumen	1,908,725,550	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	3 dokumen	1,908,725,550	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		(JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)							Bencana Dan Perubahan Iklim									
1	5	3	2.0	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			11 Orang	79,494,500	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat kawasan rawan bencana	11 Orang	92,669,850	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani	%	%	100 %	323,000,200						100 %	405,580,350	
1	5	3	2.0	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			350 Orang	305,000,700	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat	350 Orang	353,100,300	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.0	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			500 Orang	17,999,500	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	masyarakat	500 Orang	52,480,050	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Durian II	Umum							GAN BENCANA DAERAH
8	1	2	2.0	4											
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			150 Orang	75,000,000	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	pelajar, aparatur dan tokoh masyarakat	150 Orang	78,750,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
8	1	3			100 %	834,664,124						100 %	876,397,330		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalui Forum Strategis (%)	%	%	65 %							65 %			
		Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur	%	%	80 %							80 %			
		Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala fdaerah	%	%	85 %							85 %			
		Tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu	%	%											
8	1	3	2.0	1								11 dokumen	876,397,330		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah Dokumen program kerja di Bidang Pendidikan	dokumen	dokumen	11 dokumen	834,664,124						11 dokumen	876,397,330		



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun																	
		Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Kegiatan)	bulan	bulan	12 bulan							12 bulan							
8	1	3	2.0	1	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			11 Dokumen	634,664,124	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Parpol, Pelajar, Aparatur dan Tokoh Masyarakat	11 Dokumen	666,397,330	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.1.3.2.0.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			250 Orang	200,000,000	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Parpol, Pelajar, Aparatur dan Tokoh Masyarakat	250 Orang	210,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi masyarakat yang diawasi	%	%	100 %	15,000,000						100 %	15,750,000	
		Persentase Penurunan Angka Krimilalitas (%)	%	%	15 %							15 %		
8.1.4.2.0.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	org	org	3 org	15,000,000						3 org	15,750,000	
		jumlah dokumen	dokum	dokumen	4 doku							4 doku		



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
									Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		program kerja monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kem	en		men							men						
8	1	4	2.0	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			4 Laporan	15,000,000	Kota Sawahlunto, Baran Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	organisasi kemasyarakatan	4 Laporan	15,750,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan pembinaan melalui forum strategis	%	%	100 %	540,015,300						100 %	882,016,065	
					Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur	%	%	65 %								65 %		
					Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Kepala Daerah	%	%	80 %								80 %		
					Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	%	%	85 %								85 %		
8	1	5	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah dokumen program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	dokumen	dokumen	3 dokumen	540,015,300						3 dokumen	882,016,065	



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
									Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	dan Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah																	
		Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU (kasus)	dokumen	dokumen	11 dokumen							11 dokumen							
8	1	5	2.0	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	335,000,000	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	FKUB, Tim Terpadu P4GN, Forkopimda dan Tim koordinasi keamanan	3 Dokumen	666,750,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	1	5	2.0	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di				168 Orang	205,015,300	Kota Sawahlunto, Baranagin, Durian II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	FKUB, Tim Terpadu P4GN, Forkopimda dan Tim koordinasi keamanan	168 Orang	215,266,065	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
									Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
8	1	6			100 %	566,560,700						100 %	594,888,735		
8	1	6	2.0 1		12 bulan	566,560,700						12 bulan	594,888,735		
8	1	6	2.0 1	1		12 Doku men	350,000,000	Kota Sawah lunto, Baran gin, Duria n II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintah	FKDM, Tim Kewaspada an Dini Pemerinta h daerah, PUSKOMIN	12 Doku men	367,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
8	1	6	2.0 4			240 Ora	216,560,700	Kota	Dana	Memperku	Pemantapan	FKDM, Tim	240 Ora	227,388,735	BADAN



OPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			ng		Sawah lunto, Baran gin, Duria n II	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah, PUSKOMIN	ng		KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL													11,112,013,955	

5.2 RENCANA INOVASI TAHUN 2023

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 388 ayat (7) menyatakan bahwa “Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri” dan pasal (8) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam visi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yaitu “Dengan kebersamaan mewujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang kreatif, **inovatif**, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera”.

Inovasi Daerah pada hakikatnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan alokasi DID (Dana Insentif Daerah) yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto, Praktik inovasi perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi Perangkat Daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah. Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan sebagai langkah awal yang dilakukan, salah satunya adalah melalui perencanaan yang baik terhadap inovasi daerah dengan menuangkan kedalam dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana inovasi yang akan dilaksanakan.

Tabel 5.2
Rencana Inovasi Daerah
Tahun 2023

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN/PENJELASAN INOVASI	BENTUK INOVASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	SIP ONLINE	Untuk mempercepat penghimpunan data - data Posyandu ke Dinas Sosial PMDPPA , maka perlu dibuat SIP Online	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2	Buku Saku Profil Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Untuk mengetahui Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
3	SIPPEKA (Sistem Informasi Pelaporan dan Pencatatan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Merupakan aplikasi secara online yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik sebagai korban atau pelapor. Sehingga kasus dapat tertangani lebih cepat. Karena masih adanya keengganan atau ketakutan masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya. Sehingga dengan aplikasi ini terjamin keamanannya.	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
4	"SI MANJA DESA" Sistem Manajemen Keuangan Desa	"SI MANJA DESA" merupakan singkatan dari Sistem Manajemen Keuangan Desa. Sistem ini memuat seluruh informasi-informasi atau laporan-laporan realisasi keuangan seluruh kegiatan desa secara online. Setiap transaksi keuangan, desa menginput ke dalam sistem ini. Selain itu didalam sistem manajemen keuangan desa ini, termuat schedule atau anggaran desa per semester anggaran. Diharapkan melalui sistem ini tercipta manajemen keuangan desa dengan baik seiring dengan kemajuan teknologi.	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
5	E-PILKADES	E-Pilkades ini maksudnya adalah pemilihan kepala desa secara online. Hal ini Seiring dengan kemajuan teknologi dan rencana menuju Smart Village di Desa	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN / PENJELASAN INOVASI	BENTUK INOVASI
(1)	(2)	(3)	(4)
		se-Kota Sawahlunto. Pemilih Desa bisa kapan dan dimanapun untuk memberikan hak pilih dalam pelaksanaan pilkades dengan menggunakan Handphone. Sehingga bisa mengirit biaya dan waktu masyarakat. Melalui E-Pilkades inipun bisa langsung memonitor pelaksanaan pilkades secara langsung dan update.	Daerah
6	DESA CERDAS	Inovasi berupa dibuatnya buku yang didesain semenarik mungkin dan sederhana biar lebih dimengerti dan bisa dibawa kapanpun yang memuat aturan-aturan tentang desa. Tujuannya sebagai pedoman pemerintah desa. Mulai dari Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa.	Inovasi Pelayanan Publik
7	e-PPRG	Merupakan aplikasi yang berguna untuk penyusunan serta penginputan dokumen GAP dan GBS dari seluruh OPD sehingga memudahkan dalam persiapan penilaian APE.	Inovasi Pelayanan Publik
8	SIYANPEG " SISTIM PELAYANANARSIP KEPEGAWAIAN "	Mewujudkan Layanan Arsip Kepegawaian yang sistimatis praktis berbasis teknologi	Inovasi Pelayanan Publik
2.	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN		
1	Layanan Gratis Kesehatan Hewan Kota Sawahlunto (LAKEH SATO)	Pelayanan dengan menggunakan pendekatan by name by adres yang dilakukan petugas teknis dengan mendatangi kandang ternak milik masyarakat kota sawahlunto	Inovasi Pelayanan Publik
2	Peternak Bertanya Puskesmas Menyilau (PENA WAMEN)	Keterlibatan langsung antara petugas pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas dengan masyarakat pemilik hewan di Kota Sawahlunto, Layanan diberikan melalui media Facebook, Instagram, Massenger serta WhatsApp pada Call Centre UPTD Puskesmas	Inovasi Pelayanan Publik
3	Layanan Call POPT	Penggunaan pengendalian hama penyakit tanaman (HPT) perkebunan dan organisme pengganggu tanaman (OPT) melalui layanan Call POPT	Inovasi Pelayanan Publik
4	Blender Sunto	Pelayanan masyarakat dalam pengolahan lahan sawah dengan biaya murah dan cepat dengan menggunakan alsintan yang dikelola Brigade Alsintan Kota Sawahlunto	Inovasi Pelayanan Publik
5	Mamareso Ka Ladang (MAK ADANG)	Pemeriksaan cemaran pestisidapada lahan-lahan petani terpilih di Kota Sawahlunto sehingga cemaran pestisida terdeteksi	Inovasi Pelayanan Publik
6	Informasi Via Billboard Running Text (INFO BAREK)	Penyampaian Info Harga Pasar Pangan hasil survey pada 2 Pasar Utama di Kota Sawahluntosebagai bahan informasi Harga Pangan dan Fluktuasi harga sehingga diketahui masyarakat	Inovasi Pelayanan Publik
7	Gerakan Sawahlunto Administrasi Ternak dan Ikan (GESAKIN)	Pendataan Ternak (KK), Register Kandang, Pendataan Luas Kolam Ikan (KK)	Inovasi Pelayanan Publik
8	Sapu Bersih Anjing Liar (SABER ANJAL)	Eliminasi Anjing Liar di Kota Sawahlunto, Bekerjasama Dengan Desa/Kelurahan serta Pengamanan dari kepolisian, TNI dan satpol PP	Inovasi Pelayanan Publik
9	Pelestarian Padi Gadang Rumpun Kumbayau	Padi Varietas Unggul dari Kumbayau Kota Sawahlunto yang telah dilepas Kementerian Pertanian. Untuk menjaga kelestarian padi gadang rumpun kumbayau dilakukan upaya-upaya pelestarian yang ditangkarkan oleh kelompok tani dan dikembangkan di Kota Sawahlunto atau daerah tetangga	Inovasi Bentuk Lainnya
10	Agroeduwisata Kebun Buah Kandi	Menjadikan Kebun Buah Kandi sebagai Agroeduwisata di lahan bekas tambang batu bara serta pengenalan teknik reklamasi lahan bekas tambang batu bara, pengenalan budidaya tanaman buah di lahan kritis, budidaya tabulanpot, hidroponik, pelatihan perbanyak tanaman, pelatihan OPT tanaman mangga dan Wisata Edukasi anak dengan cara wisata memancing, menangguk dan wisata melukis	Inovasi Bentuk Lainnya
3	DINAS PENDIDIKAN		
1	MEMANG ASIK	Melaksanakan manasik haji dengan semangat bersama SMP Kota Sawahlunto Terbaik	Inovasi Bentuk Lainnya
2	SNAKERS	Sistem Layanan Prediksi kepribadian siswa	Inovasi Bentuk Lainnya
3	CHECKLIST CLEAN	Cekricek Sekali 3 Jam Kebersihan Kantor	Inovasi Bentuk

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN / PENJELASAN INOVASI	BENTUK INOVASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			Lainnya
4	GERAKAN CINTA USIA DINI	Gerakan Cinta sekolah usia dini	Inovasi Bentuk Lainnya
5	PAUD S1	Pendidikan Untuk kenaikan kualifikasi pendidik ke jenjang S1	Inovasi Bentuk Lainnya
4	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO		
1	Pemberdayaan PPNS yang Solid, Integritas dan Handal	Pemberdayaan PPNS yang Solid,Integritas dan Handal dalam melakukan Tugas Penegakan Perda di Satpol PP	Inovasi Pelayanan Publik
2	Satpol PP Masuk Sekolah	Satpol PP hadir sebagai Pembina Upacara di Sekolah	Inovasi Pelayanan Publik
3	Peta dan Kantong Air	Fasilitasi Damkar dalam Memfasilitasi Kebutuhan Air Untuk Kepentingan masyarakat Umum	Inovasi Pelayanan Publik
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO		
1	NIKMAH SEKALI (Nikah Mantap Dokumen Sekali Jadi)	Pelayanan terintegrasi dengan KUA dalam penerbitan Dokumen Kependudukan bagi pasangan yang baru menikah	Inovasi Pelayanan Publik
6	KECAMATAN SILUNGKANG		
1	GAMES ROTAN (Gathering positif bermedia sosial dalam birokrasi kecamatan)	Pelayanan publik yang diberikan kecamatan melalui aplikasi Whatsapp Group	Inovasi Pelayanan Publik
2	CCKS (col center kecamatan silungkang)	Sistem pelayanan dan informasi secara daring /online melalui Whatsapp CallCentre Kecamatan Silungkang	Inovasi Pelayanan Publik
3	Website Kecamatan Silungkang (WKSC)	Situs web yang memuat data,profil dan informasi-informasi seputar Kecamatan Silungkang yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat	Inovasi Pelayanan Publik
4	TAS BERCORAK (Kecamatan Silungkang Bercorak Tanam dan Berkebun)	Pemanfaatan lahan pekarangan di lahan kosong area Kantor Camat Silungkang	Inovasi Bentuk Lainnya
7	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Bank Inovasi Pelayanan Publik	Melakukan Identifikasi terhadap seluruh inovasi yang ada pada unit organisasi Pemerintah Kota Sawahlunto	Inovasi Pelayanan Publik
8	KECAMATAN TALAWI		
	Penangkaran Buaya	Pembuatan Tempat Penangkaran Buaya	Inovasi Bentuk Lainnya
	Bukit Shaun The Sheep	Taman Wisata rumput dengan Domba di Desa Sikalang	Inovasi Bentuk Lainnya
9	DINAS KEBUDAYAAN PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN		
1	Aplikasi Android & IOS	Menyediakan aplikasi pada sistem android IOS untuk pemetaan informasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ada di kota Sawahlunto	Inovasi Pelayanan Publik
2	Sekolah Masuk Museum	Mensosialisasikan keberadaan museum sebagai wahana yang bernuansa edukasi serta untuk menanamkan nilai-nilai sejarah perjuangan, wawasan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme kepada anak-anak	Inovasi Pelayanan Publik
3	Media Masuk Museum	Media Promosi Museum Kepada Pers, sehingga menjadi bahan informasi yang akan di sampaikan di media cetak dan elektronik	Inovasi Pelayanan Publik
4	Museum Keliling	Mensosialisasikan Museum dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berada di Luar Kota Sawahlunto, sehingga menumbuhkan keingintahuan untuk berkunjung ke Museum Kota Sawahlunto	Inovasi Pelayanan Publik
5	Lomba Menggambar	Sebagai wadah ekspresi bagi siswa dan siswi terutama tentang museum dan bangunan bersejarah di Kota Sawahlunto	Inovasi Pelayanan Publik
6	Permainan Anak Nagari	Media edukasi bagi anak tentang kekayaan budaya indonesia salah satunya permainan tradisional sehingga dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai moral yang ada dalam permainan tradisional dalam kehidupan sehari-hari	Inovasi Pelayanan Publik
7	Lomba Cerdas Cermat Sejarah	Kegiatan ini dapat mengasah wawasan siswa dan siswi tentang sejarah bangsa pada umumnya dan Kota Sawahlunto sebagai Kota Tambang khususnya	Inovasi Pelayanan Publik
8	Rangking 1	Menjadikan kegiatan ini sebagai mesia edukatif, kompetitif, dan menyenangkan bagi siswa dan siswi	Inovasi Pelayanan

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN / PENJELASAN INOVASI	BENTUK INOVASI
(1)	(2)	(3)	(4)
		sehingga menimbulkan minat siswa /siswi untuk mengenal sejarah bangsa.	Publik
10	BARENLITBANGDA		
1	LAB INOVASI	Pembentukan Laboratorium Inovasi	Inovasi Tatakelola Pemerintah
2	ACT ID (Aksi Cepat Tanggap Inovasi Daerah)	Pemberntukan Agen-agen Inovasi Daerah pada setiap OPD yang ada di Kota Sawahlunto sehingga pengemasan Inovasi Pada Setiap OPD lebih baik	Inovasi Tatakelola Pemerintah
3	CPNS AIPD (Agen Inovasi Perangkat Daerah)	Menjadikan Inovasi sebagai salah satu Tugas dalam diklat Prajabatan CPNS Baru pada OPD yang ditempati oleh Masing-masing CPNS	Inovasi Tatakelola Pemerintah
4	Pojok Inovasi	Pertemuan dengan Agen-agen Inovasi membahas perkembangan inovasi pada setiap OPD dengan jadwal yang berkesinambungan	Inovasi Tatakelola Pemerintah
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
1	Kejar Literasi (Kelompok Belajar Literasi)	Membuka kelas/kelompok belajar dan keterampilan dalam rangka menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan sasaran pelajar, mahasiswa, umum dan disabilitas yang bekerjasama dengan komunitas baca/ penggiat literasi.	Inovasi Pelayanan Publik
2	Dokter Online (Dokumentasi Terdigitalisasi secara Online)	Melakukan digitalisasi koleksi/dokumen terbitan pemerintah daerah dan dilayankan secara online kepada pengunjung melalui aplikasi perpustakaan.	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
3	Lib Tour (Library Tour)	Kunjungan wisata edukasi di perpustakaan guna mengoptimalkan pemahaman pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan seluruh layanan perpustakaan serta arti penting pengenalan sejarah pahlawan kota Sawahlunto (M.Yamin dan Adinegoro)	Inovasi Pelayanan Publik
4	Geng Puskel (Mendongeng di Layanan Pustaka Keliling)	Meluaskan minat baca masyarakat terutama anak sekolah melalui kehadiran pustaka keliling sambil mendongeng	Inovasi Pelayanan Publik
5	Teras Bara (Telusur arsip sejarah batu bara)	Melakukan penelusuran arsip sejarah tambang batu bara mulai dari berdirinya sampai berkembang saat ini, karena tambang batu bara sangat mempunyai peran penting dalam sejarah kota Sawahlunto sehingga menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Sumber Data: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 11 dari 26 Perangkat Daerah yang ada di Kota Sawahlunto atau 42,3 persen Perangkat Daerah yang sudah melaporkan rencana inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, nilai tersebut terus didorong setidaknya lebih 60 persen. Perangkat Daerah telah merencanakan inovasi dengan baik dan dituangkan kedalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan inovasi lebih terarah dalam peningkatan daya saing daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga dapat mempermudah dalam permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan inovasi yang mengharuskan adanya pembebanan anggaran pada pelaksanaannya dimana pada umumnya masalah yang sering diutarakan oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan inovasi adalah tidak adanya ketersediaan anggaran.

5.3 INOVASI UNGGULAN LAMBANG MATA (LAHAN TAMBANG MENJADI AGROEDUWISATA)

Sawahlunto dulunya merupakan kota tambang, mempunyai visi mendatang menjadikan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya yang mendorong Sawahlunto untuk tidak lagi identik dengan aktivitas penambangan di masa lalu. Kegiatan penambangan meninggalkan banyaknya lahan-lahan tambang yang tidak lagi produktif terbengkalai dan tidak termanfaatkan lagi, berangkat dari masalah tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto berinisiatif menjadikan bekas lahan tambang menjadi lahan perkebunan yang diisi oleh berbagai buah-buahan Diatas lahan seluas 3,1 hektar. dibilangan Kandi dikembangkan beranekaragam buah yang siap memanjakan wisatawan. Sejak 2102 lalu disulap menjadi lahan produktif dengan

koleksi buah-buahan hingga 719 jenis. Setelah itu Dinas Ketanahan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto kembali berinovasi untuk mengembangkannya dimana inovasi tersebut diberi nama **LAMBANG MATA (Lahan Tambang Menjadi Agroeduwisata)** dengan lahan bekas tambang batu bara serta pengenalan teknik reklamasi lahan bekas tambang batu bara, pengenalan budidaya tanaman buah di lahan kritis, budidaya tabulanpot, hidroponik, pelatihan perbanyak tanaman, pelatihan OPT tanaman mangga dan Wisata Edukasi anak dengan cara wisata memancing, menangguk dan wisata melukis. Tentunya pelaksanaan inovasi melibatkan para *stakeholder* dalam eksekusi program ini, mulai dari ide, gagasan, diskusi, eksekusi sampai evaluasi selalu melibatkan para pemangku kebijakan di Kota Sawahlunto. Beberapa hambatan alur birokrasi maupun rintangan lainnya dalam implementasi program.

5.3.1 Keterkaitan Inovasi Dengan Tema RKP 2022

Pandemi covid-19 yang melanda meruntuhkan sendi-sendi ekonomi seluruh dunia pada umumnya, begitupun dengan Kota Sawahlunto dimana dampak ekonomi dari pandemi ini memiliki efek dramatis pada kesejahteraan banyak keluarga dan masyarakat. Bagi keluarga yang rentan, hilangnya penghasilan akan berakibat pada meningkatnya kemiskinan, kebijakan pembatasan sosial yang di terapkan pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19 menanggung pendapatan masyarakat terlebih terhadap profesi-profesi yang berdampak langsung seperti pekerja upah rendah, pedagang, pelaku UMKM dan usaha-usaha swasta lainnya dimana masyarakat menggantungkan hidupnya dalam geliat ekonomi berbasis kepariwisataan..

Dengan dikembangkannya inovasi LAMBANG MATA (Lahan Tambang menjadi Agroeduwisata) di Kebun buah kandi meningkatkan diharapkan meningkatkan ketertarikan wisata lokal maupun luar daerah untuk melaksanakan wisata sambil belajar kegiatan-kegiatan edukasi di kebun buah kandi sehingga berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di kota sawahlunto, disamping itu tentunya menjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota sawahlunto, sehingga menjadi salah satu jalan yang bagus dalam pemulihan perekonomian untuk masyarakat Sawahlunto.

5.3.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dari Inovasi LAMBANG MATA (Lahan Tambang menjadi Agroeduwisata) adalah:

1. Membangun model percontohan sistem pemanfaatan lahan kritis dengan mengintegrasikan antar komoditas terkait terutama florikultura, biofarmaka, buah-buahan dan sayur-mayur dalam satu siklus hulu hingga hilir secara berkelanjutan;
2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian guna mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan dengan cakupan komoditas unggulan setempat. Dengan demikian, bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menjadi tempat pelatihan inkubasi bisnis, serta model diseminasi inovasi teknologi pertanian;
3. Meningkatkan jenis wisata edukasi sebagai daya tarik sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal;
4. Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. Meningkatkan konservasi lingkungan.

Sasaran dari Inovasi EKSEBISI :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kritis bekas pertambangan dalam mengembangkan agribisnis yang terintegrasi lintas sektoral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan wilayah;

2. Meningkatkan nilai tambah, daya tarik dan pilihan kepariwisataan sebagai salah satu unggulan daerah;
3. Mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi kepada masyarakat dalam usaha budidaya hulu dan pengolahan hasil.

5.3.3 Kebaharuan Inovasi

Inovasi LAMBANG MATA (Lahan Tambang Menjadi Agroeduwisata) ini merupakan gagasan asli dari pemerintah Kota Sawahlunto melalui dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto. Pembaharuan dari Inovasi ini dapat dilihat dari pengembangan yang dilakukan dimana kebun buah kandih bukan hanya sekedar tempat wisata melainkan berkembang menjadi tempat belajar dengan mengedepankan prinsip *field experience* bagi wisatawan, kelompok tani dan masyarakat secara luas dalam teknik reklamasi lahan bekas tambang batu bara, pengenalan budidaya tanaman buah di lahan kritis, budidaya tabulanpot, hidroponik, pelatihan perbanyak tanaman, pelatihan OPT tanaman mangga yang belum pernah ada di Kota. Inovasi ini mampu Memberikan nilai tambah dalam bidang kepariwisataan, Peningkatan SDM dan peningkatan perekonomian.

Metode pelaksanaan kegiatan LAMBANG MATA (Lahan Tambang menjadi Agroeduwisata) berupa praktek langsung dilapangan, penyuluhan langsung serta penyuluhan melalui media spanduk, social dan media elektronik lainnya guna mencapai maksud dan tujuan dari inovasi LAMBANG MATA.

5.3.4 Outcame dan dampak

Pelaksanaan kegiatan LAMBANG MATA (Lahan Tambang menjadi Agroeduwisata) tentukan akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Kota Sawahlunto, dimana dampak tersebut diharapkan akan menyasar langsung pada peningkatan jumlah kunjungan wisata kota sawahlunto, yang mana kunjungan wisata akan memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian pedagang, pelaku UMKM dan usaha-usaha swasta lainnya dimana masyarakat menggantungkan hidupnya sehingga menggerakkan kembali roda perekonomian, selain itu dampak lain yang tidak kalah penting menyasar kepada edukasi pemanfaatan lahan kritis guna penunjang kebutuhan rumah tangga setiap harinya menjadi lahan produktif sehingga meringankan pengeluaran rumah tangga yang semakin hari semakin meroket.

Peningkatan SDM dari petani, anak sekolah dan wisatawan lainnya dalam program edukasi melalui penyuluhan langsung, *field experience* berbagai rencana edukasi yang menjadi sasaran lainnya yang diharapkan dalam pelaksanaan inovasi LAMBANG MATA (Lahan Tambang menjadi Agroeduwisata).

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja makro merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan Dario indicator kinerja yang berlaku secara nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Untuk mengukur tujuan pembangunan Kota Sawahlunto secara makro, baik itu dari pendapatan masyarakat, kemampuan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pemerataan pendapatan dan pengangguran dapat dari pencapaian Indicator Kinerja Makro. Berikut capaian Indicator Kinerja Makro tahun 2021 dan target Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto tahun 2023 dengan tetap memperhatikan arahan dari Provinsi Sumatera Barat

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Makro Kota sawahlunto
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2021			Target Kinerja tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target RPJMD tahun 2023	Arahan Provinsi pada RPKD Provinsi Tahun 2023	RKPD 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	2,9	2,49	85,86	4,53	4,63	4,53
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	59,99	58,62	97,72	66,03	46,16	66,03
3	Gini Ratio	Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang dikeluarkan BPS	0,28	0,30	95,02	0,278	0,278	0,278
4	Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,1	2,38	86,67	2,01	1,87	2,01

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2021			Target Kinerja tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target RPJMD tahun 2023	Arahan Provinsi pada RPKD Provinsi Tahun 2023	RKPD 2023
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	7,55	6,38	115,50	6,43	5,59	6,00
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	73,17	72,88	99,60	74,09	73,67	74,09
	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	10.307,58	10.195,00	98,91	11.024,59	10.390,00	11.024,59
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,75	10,32	96	11,3	10,56	11,3
	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,18	13,18	100	13,2	13,58	13,2
	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,14	70,10	99,94	70,42	70,22	70,35

Sumber Data : Olahan Barenlitbangda tahun 2023

Untuk target Indikator Makro Kota Sawahlunto sudah mengacu kepada Target yang ditetapkan pada RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Beberapa indikator yang tidak sama, tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditargetkan sebesar 5,59 persen sedangkan RPKD Kota Sawahlunto Tahun 2023 menargetkan 6,00 persen. Berdasarkan realisasi capaian Kota Sawahlunto Tahun 2021 bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Sawahlunto sebesar 6,38 persen dengan capaian tersebut, maka target 6,00 persen pada tahun 2023 diperkirakan masih dapat dicapai. Hal ini juga dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran untuk intervensi program kegiatan yang relevan dengan penurunan angka pengangguran.

- (2) Angka kemiskinan Kota Sawahlunto pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun posisi Sawahlunto secara nasional adalah daerah dengan persentase kemiskinan terendah di Indonesia. Artinya, secara umum Kota Sawahlunto dapat lebih bertahan terhadap dampak Pandemi. Oleh karena itu target angka kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 2,01 persen.
- (3) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,63 persen sedangkan pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 ditargetkan 4,53 persen. Dengan mempertimbangkan capaian LPE Kota Sawahlunto tahun 2021 yang mengalami penurunan menjadi 2,49 persen akibat menurunnya kontribusi sektor pertambangan secara signifikan. Namun secara umum kontribusi sektor lainnya sudah kembali menunjukkan tren positif. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Kota Sawahlunto untuk menargetkan LPE Kota Sawahlunto untuk Tahun 2023 adalah sebesar 4,23 persen.

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota sawahlunto
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2021			Target Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/ 2022	RKPD 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN								
1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	1,23	4,56	370,73	1,77		1,77
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	2,9	2,49	85,86	4,53		4,53
3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	59,99	58,62	97,72	66,03		66,03

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2021			Target Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/ 2022	RKPD 2023
4.	Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,1	2,38	86,67	2,01		2,01
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,28	0,30	95,02	0,278		0,278
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	73,17	72,88	99,60	74,09		74,09
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	52,93	NA		61,54		61,54 (B)
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	0,046	-3300	7174113,04	0,049		0,049
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/ tiga	79,69	84,42	105,94	83,57		83,57
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,5	95,73	100,24	95,52		95,52
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN								
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	76			88		88
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	7,55	6,38	115,50	6,43		6,00
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	401.862,74	432.174,39	107,54	418.106,23	7,70	418.106,23

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2021			Target Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/ 2022	RKPD 2023
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	10.307,58	10.195,00	98,91	11.024,59		11.024,59
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	556.832,20	564.865,95	101,44	615.823,20		615.823,20
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	329.730,34	345.211,69	104,70	344.355,30		344.355,30
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	68,91	68,91	100	72,33		72,33
8.	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	36	45	125	41		41
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,18	13,18	100	13,2		13,2
10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,75	10,32	96	11,3		11,3
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	20	15	75	30		30
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	B (64,57)	NA		BB (72,83)		BB (72,83)
13.	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100	WTP		WTP
14.	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1))/ PAD tahun (n-1)) x 100%	4,04	-0,14	-3,47	4,45		0,50
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam	66	63	95,45	75		75

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2021			Target Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/ 2022	RKPD 2023
		melakukan tugas jabatannya						
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,14	70,10	99,94	70,42		70,35
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	6,1	6,1	100,00	5,9		5,9
18.	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	80.359,32	84.016,90	104,55	95.714,10		95.714,10
19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	1,86	1,86	100,00	2,13		2,13
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	79,69	84,42	105,94	83,57		83,57
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	63,42	66,90	105,49	66,73		69,00
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	47,72	46,84	98,16	51,22	110672 Ha	51,22
23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,53	0,56	105,66	0,57		0,65
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	65,18	62,39	95,72	66,22		66,22

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2021			Target Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/ 2022	RKPD 2023
		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)						
25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	88	84,15	95,63	90		90
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	10,08	10,51	104,27	7,5		7,5
27.	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	83,54	85,84	102,75	19,08		19,08
28.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	88,01	96,83	110,02	90,1		97,55
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	89,84	89,52	99,64	100		100
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,92	2,07	70,89	3,1		3,1
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	83,34 (B)	81,21 (B)	97,44	89,87 (A)		89,87 (A)

Sumber Data : Olahan Barenlitbangda Tahun 2022

6.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan pula Indikator Kinerja Daerah sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah disusun berdasarkan penetapan kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing daerah dan pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang terkait dengan kependudukan, ketenagakerjaan dan gender. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup fokus pelayanan urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, serta urusan pilihan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota sawahlunto
Tahun 2023

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/2022	RKPD 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	%	2,9	2,49	85,86	4,53		4,53
1.2	Gini Ratio	Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang dikeluarkan BPS	%	0,281	0,295	95,02	0,278		0,278
1.3	PDRB Perkapita	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	Juta/Jiwa	59,99	58,62	97,72	66,03		66,03
2	KESEJAHTERAAN SOSIAL								
2.1	Tingkat kemiskinan	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	%	2,1	2,38	86,67	2,01		2,01
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	Skor	73,17	72,88	99,60	74,09		74,09
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	Skor	95,5	95,73	100,24	95,52		96,00
2.4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal	Tahun	10,75	10,32	96,00	11,3		10,72

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/2022	RKPD 2023
		(tidak termasuk tahun yang mengulang)							
2.5	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Tahun	13,18	13,18	100,00	13,2		13,2
2.6	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	70,14	70,10	99,94	70,42		70,35
2.7	Tingkat Pengangguran	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	%	7,55	6,38	115,50	6,43		6,00
2.8	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	%	20	15	75,00	30		30
2.9	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	%	6,1	6,1	100,00	5,9		5,9
2.10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	Ribu Rupiah	10.307,58	10.195,00	98,91	11.024,59		11.024,59
2.11	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	%	1,23	4,56	370,73	1,77		1,77
ASPEK PELAYANAN UMUM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR									
1	PENDIDIKAN								
1.1	Angka Harapan lama sekolah (AHLs)	lama sekolah dalam tahun yang diharapkan yang akan dilaksanakan oleh anak pada umur tertentu	Tahun	13,18	13,18	100,00	13,2		13,2
1.2	Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS)	Jumlah tahun belajar penduduk umur 15 keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal tidak termasuk tahun mengulang	Tahun	11,01	10,32	93,73	11,3		10,72
1.3	Persentase lulusan SD Hafiz Alquran	lulusan SD Hafiz Alquran Minimal juz 30 / total lulusan SD x 100 %	%	20	15	75,00	30		30

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
1.4	Persentase Siswa dengan Nilai Asesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum	(Jumlah Siswa dengan Nilai Asesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	%	100	56,87	56,87	100		65
1.5	Persentase Siswa dengan Nilai Asesment kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum	(Jumlah Siswa dengan Nilai Asesment Kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	%	100	64	64,00	100		75
1.6	Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan assesment nasional (SPM)	Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan assesment nasional (SPM)						1,9	1,9
1.7	Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan assesment nasional (SPM)	Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan assesment nasional (SPM)						1,8	1,8
1.8	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan assesment nasional (SPM)	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan assesment nasional (SPM)						1,8	1,8
1.9	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan assesment nasional (SPM)	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan assesment nasional (SPM)						1,8	1,8
1.10	Angka Partisipasi Kasar								
1.10.1	APK PAUD	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	%	60	83,47	139,12	62		62
1.10.2	APK SD/MI/Paket A	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	%	101	99,94	98,95	103		103
1.10.3	APK SMP/MTs/Paket B	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	%	91,9	97,67	106,28	91,99		99
1.11	Angka Partisipasi Murni								
1.11.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Murni SD	%	100	91,69	91,69	100		95
1.11.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka Partisipasi Murni SMP	%	100	91,69	91,69	100		95
1.11.3	Rasio Siswa SD/MI Perkelas	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI tidak	Siswa Perkelas	17,50:1	18,30:1	104,87	17,65:1		19,00:1

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		melebihi 32 orang siswa							
1.11.4	Rasio Siswa SMP/MTS Perkelas	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMP tidak melebihi 32 orang siswa	Siswa Perkelas	22,60:1	21,55:1	95,35	22,70:1		22,70:1
1.11.5	Persentase sekolah yang berakreditasi A	sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan	%	25	41,27	165,08	30		45
1.11.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah Lembaga PAUD/PAUD yang terdaftar di BAN PAUD	%	22	80,46	365,73	24		83
1.11.7	Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B	(Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B/ jumlah PAUD) x 100%	%					63,64	63,64
1.11.8	Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan DIV	Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan DIV	%					69	69
1.11.9	Rasio Pengawas PAUD	Rasio Pengawas PAUD						3,2	3,2
1.11.10	Angka kelulusan	(jumlah anak yang mengikuti ujian/ jumlah anak yang lulus)x100 %	%	100	100	100,00	100		100
1.12	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PUD (SPM)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar di satuan PUD / anak usia5-6 Kota Sawahlunto	%	18	100	555,56	20	100	100
1.13	Jumlah Warga Negara usia7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM)	(Jumlah Warga Negara usia7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar/ Jumlah Warga Negara usia7-15 tahun) x 100%	%					100	100
1.13.1	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM)	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	%	49	100	204,08	52		100
1.13.2	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (SPM)	Jumlah anak usia13-15 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar Sekolah Menengah Pertama / anak usia13-15 Kota Sawahlunto	%	25	100	400,00	30		100
1.14	Jumlah Warga Negara usia7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (SPM)	Jumlah anak usia7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar pada kesetaraan sedang belajar sekolah	%	0	70,64		0	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		Dasar / anak usia 7-18 Kota Sawahlunto							
2	KESEHATAN								
2.1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x100	%	100	71,70	71,70	100	100	100
2.2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan / jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x100	%	100	79,9	79,90	100	100	100
2.3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan / jumlah Bayi baru lahir di Kota Sawahlunto x100	%	100	83,66	83,66	100	100	100
2.4	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan / jumlah Balita di Kota Sawahlunto x100	%	77	74,6	96,88	79	100	100
2.5	Jumlah Anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (SPM)	Jumlah anak usia pendidikan dasaryang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / jumlah anak usia Pendidikan dasar di Kota Sawahlunto x100	%	100	68,36	68,36	100	100	100
2.6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (SPM)	Jumlah anak usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / jumlah anak usia 15-59 di Kota Sawahlunto x100	%	100	49,83	49,83	100	100	100
2.7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (SPM)	Jumlah warga usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / jumlah warga usia 60 di Kota Sawahlunto x100	%	70	44,50	63,57	72	100	100
2.8	Jumlah warga negara penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (SPM)	Jumlah penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / jumlah Penderita Hipertensi di Kota Sawahlunto x100	%	100	7,95	7,95	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/2022	RKPD 2023
2.9	Jumlah warga negara penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita DM di Kota Sawahlunto x100	Jumlah penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita DM di Kota Sawahlunto x100	%	100	50,59	50,59	100	100	100
2.10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (SPM)	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita ODGJ berat di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100,00	100	100	100
2.11	Jumlah warga negara terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita TBC di Kota Sawahlunto x100	%	100	26,03	26,03	100	100	100
2.12	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita HIV di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100,00	100	100	100
2.13	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (SPM)		%					90	90
2.14	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan moralitas menurut umur	tahun	70,14	70,1	99,94	70,42		70,35
2.15	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah	19	13	68,42	18		10
2.16	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	Jumlah	0	1	0,00	0		0
2.17	Persentase Balita Gizi Buruk	jumlah Balita Gizi buruk / Jumlah Bayi di Kota Sawahlunto x 100	%	7,8	0,04	0,51	7,3		0,03
2.18	Jumlah kasus Kematian Balita	Jumlah kasus Kematian Balita	Jumlah	0	16	0,00	0		10
2.19	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	(jumlah cakupan pelayanan kesehatan dasar / jumlah layanan kesehatan dasar) 100%	%	100	100	100,00	100		100
2.20	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	(jumlah cakupan pelayanan kesehatan rujukan / jumlah layanan kesehatan rujukan) 100%	%	100	100	100,00	100		100
2.21	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia / Jumlah Penduduk		0,0015	0,0016	103,33	0,0014		0,0014

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
2.22	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk						Rasio TT 1:4:1000 (sesuai revisi renstra kementerian)	1:4:1000
2.23	Porsentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi/jumlah RS Kota Sawahlunto x100	%	utama	utama	100,00	utama		utama
2.24	Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	Jumlah RS yang terakreditasi/jumlah RS Kota Sawahlunto x100	%					95	95
2.25	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Jumlah Kasus stunting pada Balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	%	6,1	6,1	100,00	5,9	16	5,9
2.26	Jumlah penurunan kematian ibu	Jumlah penurunan kematian ibu	%					3.274 (penurunan 22% dari baseline)	0
2.27	Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	(jumlah orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV/jumlah orang dengan HIV) x 100%	%					90	90
2.28	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Jumlah kasus wasting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	%					7,3	7,3
2.29	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	(jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap/ jumlah bayi usia 0-11 bulan) x 100%	%					94,6	94,6
2.30	Persentase puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	(jumlah puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar/ jumlah puskesmas) x 100%	%					83	83
2.31	Persentase tatanan yang menerapkan kawasan tanpa rokok	(jumlah kawasan yang menerapkan tanpa rokok/ jumlah kawasan) x 100%	%					80	80
2.32	Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan UBM	(Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan UBM/ jumlah puskesmas) x 100%	%					40	40
2.33	Annual Paracite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	Annual Paracite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	penduduk					<1/1000	<1/1000
2.34	Persentase posyandu aktif	(jumlah posyandu aktif/ jumlah posyandu) x 100%	%					80	80
2.35	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	(jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat esensial/ jumlah puskesmas) x 100%	%					94	94
2.36	Persentase capaian 8 aksi konvergensi penurunan stunting	(jumlah capaian 8 aksi konvergensi penurunan stunting/ jumlah capaian) x 100%	%					100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
2.37	Persentase FKTP terakreditasi	(jumlah FKTP terakreditasi/ jumlah FKTP) x 100%	%					90	90
2.38	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian	(waktu pelayanan kefarmasian/ rata-rata waktu pelayanan kefarmasian) x 100%	%					79	79
2.39	Persentase sarana produksi usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	(jumlah sarana produksi usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan perizinan/ jumlah sarana produksi usaha mikro obat tradisional (UMOT)) x 100%	%					80	100
3	PEKERJAAN UMUM								
3.1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	%	89	96,83	108,80	93	97,55	97,55
3.2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	(Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik/ jumlah penduduk) x 100%	%	89	87	97,75	91	86,03	91,00
3.3	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) (SPM)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	%	78	92,23	118,24	79		93
3.4	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	%	46,75	44,21	94,57	52,34		52,34
3.5	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar: jumlah bangunan pemerintah yang ada kali 100 %	%	66,98	81,71	121,99	65		85
3.6	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	%	48,35	45,95	95,04	50,35		50,35
3.7	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	%	11,11	11,11	100,00	22,22		22,22
3.8	Persentasi air limbah yang ditangani (%)	Persentasi air limbah yang ditangani (%)	%	89	87	97,75	91		91
3.9	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota / luas kawasan	%	100	0	0,00	100		100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		permukiman rawan banjir x 100 %							
3.10	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya/jumlah IMB yang berlaku x 100 %	%	96,3	62,32	64,71	98,3		70,00
3.11	Tingkat kemandapan jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	%	68,75	69,43	100,99	72,21	73	72,21
3.12	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator di wilayah kabupaten/kota/ jumlah kebutuhan/analisis di wilayah kabupaten/kota x 100 %	%	10	0	0,00	30		10
3.13	Ineks pembangunan infrastruktur wilayah	Jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	%	79,69	84,42	105,94	83,57		86,00
3.14	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik/5	%	63,42	66,90	105,49	66,73		69,00
3.15	Persentase luas sawah kewenangan kab/kota yang dilayani jaringan irigasi (%)	(Luas lahan sawah kewenangan kab/kota yang dilayani jaringan irigasi/total luas sawah) x 100 %	%	47,72	46,84	98,16	51,22	110.672 (Ha)	51,22
3.16	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	Perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan ruang	%	88	84,15	95,63	90		90,00
3.17	Persentase RT yang menempati hunian dengan akses air minum aman	(Jumlah RT yang menempati hunian dengan akses air minum aman/Jumlah RT) x 100 %	%					14,22	14,22
3.18	Persentase RT dengan akses air minum jaringan perpipaan	(Jumlah RT dengan akses air minum jaringan perpipaan/Jumlah RT) x 100 %	%					28,01	28,01
3.19	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	(Jumlah PDAM dengan kinerja sehat/ Jumlah PDAM) x 100%	%					91,8	100
3.20	Persentase angka BABS di tempat terbuka	(Jumlah masyarakat yang melakukan BABS/ Jumlah penduduk) x 100%	%					1,49	1,49

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
3.21	Persentase Rt yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	(Jumlah RT yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan/Jumlah RT) x 100 %	%					92,21	92,21
3.22	Penyelesaian materi teknis RTRW	berdasarkan usulan						target bimtek 2023: 43	target bimtek 2023: 43
3.23	Penyelesaian materi teknis RDTR	berdasarkan usulan						target bimtek 2023:18 9	target bimtek 2023:1 89
3.24	Penetapan RTRW	target persub						target persub 2023 43	target persub 2023 43
3.25	Penetapan RDTR	target persub						target persub 2023: 132	target persub 2023: 132
3.30	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi							0
3.31	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi / Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya							0
4	PERUMAHAN RAKYAT								
4.1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Jumlah rumah korban bencana yang ditangani / Jumlah rencana yang akan dibangun x 100 %	%	100	100	100,00	100	100	100
4.2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM)	Rumah tangga penerima fasilitas pengendalian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100 %	%	100	100	100,00	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/2022	RKPD 2023
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani	Luas Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha x100 %	%	85	75	88,24	90	1459 Ha	90
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni)	Jumlah unit RTLH / jumlah total unit rumah x 100 %	%	10,08	10,08	100,00	7,5	satuan diganti unit	7,5
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	%	75	75,00	100,00	85		85
4.6	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH / Jumlah rumah x 100 %	%	10,08	10,08	100,00	7,5		7,5
4.7	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs)	Luas kawasan kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	Ha	83,54	85,84	102,75	19,08		19,08
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/ kota (SPM)	(Jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/ kota/ Jumlah penduduk) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	(Jumlah Masyarakat yang menerima informasi kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Pera ngkat Daerah ditambah jumlah layanan	%	100	100	100,00	100		100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/2022	RKPD 2023
		pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk							
5.6	Jumlah dokumen dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan tribumtranmas	Jumlah dokumen dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan tribumtranmas	dokumen					10	1
5.7	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	%	0,046	-3300	7173913,04	0,049		0,049
5.8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.9	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum yang ditetapkan	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum yang ditetapkan	dokumen					1	1
5.10	Persentase aparat Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	(jumlah aparat Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional/ jumlah aparat satpol PP) x 100%	%					50	10
5.11	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	(Jumlah pengaduan yang ditangani/ jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.12	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	(Jumlah kasus diselesaikan/jumlah laporan kasus masuk) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.13	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	%	100	100	100,00	100		100
5.14	Jumlah Linmas per desa/kelurahan	Jumlah Linmas per desa/kelurahan	Orang	10	10	100,00	370		370
5.15	Jumlah Satgas Linmas yang ditetapkan dengan SK Walikota	Jumlah dokumen penetapan satgas linmas yang ditetapkan dengan SK Walikota	dokumen					1	1

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
5.16	Angka kriminalitas	(jumlah kasus kriminal/jumlah penduduk) x 100%	%	0,049	0,031	63,27	0,035		0,035
5.17	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	(jumlah anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya/jumlah anggota Satlinmas) x 100%	%					100	100
5.18	Persentase ketersediaan posko linmas tingkat kecamatan	(jumlah posko linmas tingkat kecamatan/ jumlah kecamatan) x 100%	%					20	100
5.19	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	orang					7	2
5.20	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
5.21	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	menit	20	15	75,00	20		15
5.22	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	(Jumlah aparatur pemadam yang mempunyai sertifikat keahlian/jumlah aparatur pemadam) x 100%	%	40	33	82,50	60	25	60
5.23	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	(jumlah tim relawan pemadam kebakaran di desa/ kel/ jumlah desa/ kel) x 100%	%					50	100
5.24	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	(jumlah pos pemadam kebakaran di kecamatan/ jumlah kecamatan) x 100%	%					50	100
5.25	Indeks Ketahanan Daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah		0,53	0,56	105,66	0,57		0,65
5.26	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	(jumlah dokumen kebencanaan meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang terselesaikan/ jumlah kebutuhan dokumen) x 100%	%					100	100
5.27	Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya	Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya	%					20	20
5.28	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	%					20	20
5.29	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	(Jumlah Fasum yang tertangani/Jumlah Fasum yang terdampak) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
5.30	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	(jumlah penanganan tanggap darurat bencana/ jumlah kejadian bencana) x 100%	%					100	100
6	SOSIAL								
6.1	Angka Kemiskinan	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	%	2,1	2,38	86,67	2,01		2,01
6.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Rekapitulasi SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	%	89,84	89,52	99,64	100		100
6.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. (Rekapitulasi SPM)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100	100	100,00	100	100	100
6.4	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	(Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti /Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.1.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi (SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi/ Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.1.2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di luar panti (SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di luar panti/Jumlah	%	100	100	100,00	100	50	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%							
6.1.3	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan reunifikasi keluarga (SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan reunifikasi keluarga /Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	1360 orang	100
6.1.4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga (SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga /Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	2720 orang	100
6.1.5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti (SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti /Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.1.6	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (SPM)	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial /Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.1.7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti /Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%		100	100	100,00	100		100
6.2.1	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak di luar panti (SPM)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak di luar panti /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
6.2.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.2.3	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di luar panti (SPM)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di luar panti /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.2.4	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi (SPM)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	3400 orang	100
6.2.5	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasa (SPM)	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasa /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	1700 orang	100
6.2.6	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga (SPM)	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	340 orang	100
6.2.7	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga (SPM)	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	680	100
6.2.8	Persentase anak terlantar yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (SPM)	Persentase anak terlantar yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial /Jumlah warga negara anak terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%		100	100	100,00	100		100
6.3.1	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di luar panti (SPM)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di luar panti /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
6.3.2	Jumlah lansia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga (SPM)	Jumlah lansia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	10 orang	100
6.3.3	Persentase lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (SPM)	Persentase lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.3.4	jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar (SPM)	jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	3.400 orang	100
6.3.5	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di luar panti (SPM)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di luar panti /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	50	100
6.3.6	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan (SPM)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	2	100
6.3.7	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga (SPM)	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	25	100
6.3.8	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.3.9	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi (SPM)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi /Jumlah warga negara lanjut usia terlantar) x 100%	Orang	100	100	100,00	100	3.400 orang	100
6.4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di		100	100	100,00	100		100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
	dasar tuna sosial di luar panti (SPM)	luar panti /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%							
6.4.1	Jumlah gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi (SPM)	Jumlah gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%	orang	100	100	100,00	100	100	100
6.4.2	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga (SPM)	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%	orang	100	100	100,00	100	25	100
6.4.3	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan keterampilan dasar (SPM)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan keterampilan dasar /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%	orang	100	100	100,00	100	100	100
6.4.4	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (SPM)	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%	orang	100	100	100,00	100	340 Orang	100
6.4.5	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga (SPM)	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%	orang	100	100	100,00	100	25	100
6.4.6	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat nikah dan/ atau KIA di luar panti (SPM)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat nikah dan/ atau KIA di luar panti /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%	orang	100	100	100,00	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
6.4.7	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti /Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis terlantar) x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
6.4.8	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di luar panti (SPM)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di luar panti /Jumlah gelandangan dan pengemis) x 100%	orang	100	100	100,00	100	100	100
6.5	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota (SPM)	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota /Jumlah warga negara korban bencana) x 100%		100	100	100,00	100		100
6.5.1	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan diluar panti (SPM)	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan diluar panti /Jumlah pekerja sosial profesional) x 100%	orang	100	100	100,00	100	2	100
6.5.2	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial (SPM)	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial /Jumlah korban bencana sosial) x 100%	orang	100	100	100,00	100	50.000 orang	100
6.5.3	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial /Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana) x 100%	kelompok	100	100	100,00	100	375 orang	100
6.5.4	Persentase korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan dan/ atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	Persentase korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan dan/ atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti /Persentase korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	%	100	100	100,00	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		dan/ atau korban tindak kekerasan) x 100%							
6.5.5	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme (SPM)	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme /Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana) x 100%	kelompo k	100	100	100,00	100	250	100
6.5.6	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (SPM)	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi /Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam) x 100%	orang	100	100	100,00	100	204.330 orang	100
6.5.7	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti (SPM)	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti /Jumlah tenaga kesehatan) x 100%	orang	100	100	100,00	100	100	100
6.5.8	Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti (SPM)	Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti /Jumlah alat bantu) x 100%	buah	100	100	100,00	100	68	100
6.5.9	Jumlah perbekalan kesehatan (obat- obatan) yang disediakan di luar panti (SPM)	Jumlah perbekalan kesehatan (obat- obatan) yang disediakan di luar panti /Jumlah perbekalan kesehatan (obat- obatan)) x 100%	paket	100	100	100,00	100	136	100
6.5.10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti (SPM)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti /Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari) x 100%	paket	100	100	100,00	100	136	100
6.5.11	Jumlah paket bimbngn fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di luar panti (SPM)	Jumlah paket bimbngn fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di luar panti /Jumlah paket bimbngn fisik, mental, spiritual dan sosial) x100%	paket	100	100	100,00	100	1	100
6.6	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan /Jumlah tenaga pelopor perdamaian) 100%	Orang	100	100	100,00	100	1000 orang	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
6.7	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan /Jumlah lembaga di bidang kesos) 100%	lembaga	100	100	100,00	100	850	100
6.8	Jumlah SDM PKH yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah SDM PKH yang mendapatkan peningkatan kapasitas /Jumlah SDM PKH) 100%	orang	100	100	100,00	100	39.351	100
6.9	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat /Jumlah keluarga) 100%	KK	100	100	100,00	100	10.000.000	100
6.10	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial /Jumlah daerah) 100%	desa/kel	100	100	100,00	100	34	100
6.11	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan kewirausahaan sosial	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan kewirausahaan sosial /Jumlah keluarga miskin dan rentan) 100%	KK	100	100	100,00	100	15.000	100
6.12	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin di tanda datar lembaga di bidang kesejahteraan sosial (SPM)	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin di tanda datar lembaga di bidang kesejahteraan sosial /Jumlah daerah) 100%	desa/kel	100	100	100,00	100	34	100
6.13	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) /Jumlah daerah) 100%	desa/kel	100	100	100,00	100	34	100
6.14	Jumlah SDM Kesos yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan profesional	Jumlah SDM Kesos yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan profesional /Jumlah SDM Kesos) 100%	orang	100	100	100,00	100	38.000	100
6.15	Jumlah tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang mendapatkan penguatan	Jumlah tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang mendapatkan penguatan /Jumlah tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha) 100%	KK	100	100	100,00	100	200	100
6.16	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang disediakan	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang disediakan	%					133.000	100
6.17	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	%					514	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
6.18	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	(Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang/Jumlah korban bencana)x 100%	%					133.000	100
6.19	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan paket permakanaan	(Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan paket permakanaan/Jumlah kelompok rentan)x 100%	%					1.000	100
6.20	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial	(Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial/Jumlah pekerja sosial)x 100%	%					10.230	100
6.21	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	(Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial/Jumlah korban bencana) x100%	%					1.000	100
6.22	Persentase TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	(Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS/ Jumlah TKSK) x 100 %	%	100	100	100,00	100		100
6.23	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan data kemiskinan	(Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan data kemiskinan/Persentase daerah) x 100%	%					70	100
6.24	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%					100	100
6.25	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang dikembangkan kapasitasnya	(Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang dikembangkan kapasitasnya/Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK))x100%	%					7.230	100
6.26	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) yang ditingkatkan kapasitasnya	(Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) yang ditingkatkan kapasitasnya/Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM))x 100%						3.000	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR									
7	TENAGA KERJA								
7.1	Tingkat Pengangguran	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	%	7,55	6,38	115,50	6,43		6,00
7.2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dunia usaha formal	Orang	10	29	290,00	25		35
7.3	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha non formal	Orang	28	31	110,71	35		35

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
7.4	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	(Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan/jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya)x 100%	%					72	75
7.5	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya	(Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya/Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas)x 100%	%					1.546.370 orang	100
7.6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	%	80	100	125,00	90		100
7.7	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan) x 100%	%	15	65,63	437,53	25		70
7.8	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan / jumlah tenaga kerja	juta/ jiwa	93,14	93,74	100,64	98,77		98,77
7.9	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak / jumlah perusahaan) x 100%	%	73,75	77,27	104,77	82,56		82,56
7.10	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Keerja dalam wilayah kabupaten/kota)	(Jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker terdaftar) x 100%	%	3,97	9,67	243,58	7,1		10
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM Perempuan/IPM laki-laki	%	95,5	95,73	100,24	95,52	meningkat at min 0,1 dari 2022	95,83
8.2	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	%	95,5	n/a	0,00	95,52	meningkat at min 0,5 dari 2021	95,52
8.3	Persentase Penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak (IKU OPD)	Jumlah penanganan & penyelesaian pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak / Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak x 100%	%	100	100	100,00	100		100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
8.4	Persentase PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/jumlah total PKK x 100%	%	100	100	100,00	100		100
8.5	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD)	Jumlah anggota DPRD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	%	20	20	100,00	20		20
8.6	Rasio KDRT		Rasio	0	0,015	1,50	0		0
8.7	Persentase Kelurahan ramah anak	Jumlah kelurahan ramah anak/ jumlah kelurahan x 100%	%	100	51,35	51,35	100		100
8.8	Total fertility rate	Jumlah rata-rata kelahiran anak per seorang wanita sepanjang usia produktifnya	Rata-rata anak lahir hidup	2,2	2,2	100,00	2,2		2,2
8.9	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	%	3,4	3,4	100,00		meningkat 25% dari kondisi 2021	4,25
8.10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komperhensif)	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) korban kekerasan yg ditangani instansi tingkat kab/kota yg didampingi : jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) x 100%	%	100	100	100,00	100	75	100
8.11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yg mengalami kekerasan : jumlah penduduk perempuan x 100.000		0,012	0,019	41,67	0,019	90	0,019
8.12	Indeks perlindungan anak (IPA)		%						
9	PANGAN								
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	Indeks	68,91	68,91	100,00	72,33		72,33
9.2	Konsumsi keragaman pangan								
9.2.1	padi-padian	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan padi perkapita perhari	kkal/kapita/hari	944	944	100,00	943		943
9.2.2	Umbi-umbian	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan umbi-umbian perkapita perhari	kkal/kapita/hari	32,2	32,2	100,00	113,2		113,2
9.2.3	Pangan Hewani	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan pangan hewani perkapita perhari	kkal/kapita/hari	236,3	236,3	100,00	226,3		226,3
9.2.4	Minyak dan Lemak	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan minyak dan lemak perkapita perhari	kkal/kapita/hari	348,3	343	98,48	250		250
9.2.5	Buah/Biji Berminyak	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan buah/bij berminyak perkapita perhari	kkal/kapita/hari	39,9	39,9	100,00	56,6		56,6
9.2.6	Kacang-kacangan	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan	kkal/kapita/hari	71,8	71,8	100,00	94,3		94,3

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		kacang-kacangan perkapita perhari							
9.2.7	Gula	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan gula perkapita perhari	kkal/kap ita/hari	21,3	21,3	100,00	94,3		94,3
9.2.8	Sayur dan buah	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan sayur dan buah perkapita perhari	kkal/kap ita/hari	106,7	106,7	100,00	113,2		113,2
9.2.9	lain-lain	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan lainnya perkapita perhari	kkal/kap ita/hari	9,5	9,5	100,00	56,6		56,6
9.2.10	Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi	(Jumlah Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi/Jumlah Pangan Segar) x 100 %	%	90,14	95,14	105,55	91		91
9.2.11	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	%	165,00	165,00	100,00	11.584,4 6		11.584 ,46
9.2.12	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya	Skor	84	84,5	100,60	86	94	86
9.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	(Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan/ Jumlah pangan segar asal tumbuhan) x 100%	%					85	85
9.4	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	80% x cad. Beras total prov x rasio jumlah penduduk	%						
9.5	Persentase daerah rentan rawan pangan		%					12	12
10	PERTANAHAN								
10.1	Persentase permanfaat tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbit kan	(Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi / seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi) x 100 %	%	100		0,00	100		100
10.2	Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	Jumlah Penetapan tanah pembangunan / jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100 %	%	0			100		100
10.3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%	%	100		0,00	100		100
10.4	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian	(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/	%	100		0,00	100	355.157 bidang	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
	tanah yang dilaksanakan (%)	usulan ganti rugi dari OPD) x 100%							
10.5	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria	(jumlah KK penerima akses reforma agraria/ jumlah KK) x 100%	%					144.200 KK	100
10.6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ha						393
10.7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Ha						0
10.8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Ha						0
11	LINGKUNGAN HIDUP								
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKL)	%	65,18	62,39	95,72	66,22	69,48	69,48
11.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	%	75,1	76,64	102,05	77		77
		Persentase sampah berkurang dengan timbulan sampah (%)	%	20	23,36	116,80	22		25
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin pph dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	(jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLh yang diterbitkan pemerintah kab/kota / usaha dan/kegiatan dilakukan pemeriksaan Kegiatan Usaha) x 100 %	%	80		0,00	84	75	84
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/pemerintahan (Governance) dan indeks efektifitas dan efisiensi terkait pengelolaan sampah	%	67,95		0,00	68,27	72	72
12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
12.1	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	%	55	38,53	70,05	70		45,00

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
12.2	Cakupan KTP	Banyaknya kepemilikan KTP	%	98	97,87	99,87	99		99
12.3	Cakupan Akte kelahiran	Banyaknya kepemilikan akte kelahiran	%	60	67,32	112,20	62		70
12.4	Cakupan KK	Banyaknya kepemilikan KK	%	100	99,52	99,52	100		100
12.5	Cakupan akte kematian	Banyaknya kepemilikan akte kematian	%	100	100	100,00	100	100	100
12.6	Validitas database kependudukan	Pelaksanaan validasi data kependudukan	%	100	100	100,00	100	80	100
12.7	Perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP : jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	%	99	97,49	98,47	99,2		99,2
12.8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA : Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	%	63	63,87	101,38	66		66
12.9	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir : Jumlah anak usia 0-18 th x 100%	%	99	98,73	99,73	99,5	98	99,5
12.10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	%	50	83,33	166,66	50		90
12.11	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	(jumlah cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan/ jumlah pasangan yang perkawinannya dilaporkan) x 100%	%					100	100
12.12	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	(jumlah cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraianannya dilaporkan/ jumlah pasangan yang perceraianannya dilaporkan) x 100%	%					100	100
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yg memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100%	%	100	100	100,00	100		100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
13.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	%	3,7	3,7	100,00	3,7		3,7
13.2.1	Jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri	desa		1		1	sesuai target daerah	1
13.2.2	Jumlah desa berkembang	Jumlah desa berkembang	desa		9		9		9
13.2.3	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	desa		17		17		17
13.3	Jumlah aparatur/ pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	(Jumlah aparatur/ pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa/ Jumlah aparatur/ pengurus kelembagaan desa) x 100%	%					sesuai target daerah	80
13.4	jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	desa					sesuai target daerah	27
13.5	jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	desa					sesuai target daerah	27
13.6	Jumlah BUMDes bersama (BUMDESMA) berkembang	Jumlah BUMDes bersama (BUMDESMA) berkembang	bumdes ma					sesuai target daerah	1
13.7	Jumlah BUMDes yang berkembang	Jumlah BUMDes yang berkembang	bumdes					sesuai target daerah	10
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persentase jumlah rata-rata anak yang dilahirkan wanita selama usia subur	%	2,29	2	1,13	2,22	2,19	2
14.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	(Jumlah Peserta KB Aktif Modern/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 %	%	67,78	71,92	106,11	69,21	62,92	72
14.3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/ Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100 %	%	15,97	10,87	1,32	13,4	7,7	7,7
14.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility Rate)/ ASFR 15-19	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility Rate)/ ASFR 15-20	%					20 kelahiran/ 1000 WUS	2 kelahiran/ 1000 WUS
14.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks					59/100	59
15	PERHUBUNGAN								

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
15.1	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang	unit	2	2	100,00	2		2
15.2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	%	0,18	0,56	311,11	0,18	0,725	0,725
15.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10.000 keberangkatan	Jumlah kejadian kecelakaan transportasi per 10.000 keberangkatan						26,39	10
15.4	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	%	65	65	100,00	65		65
15.5	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	%	100	100	100,00	100		100
15.6	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	Jumlah kendaraan laik jalan/jumlah kendaraan	%	40	40	100,00	70		70
15.7	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n-tahun n-1 / jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	%	35	35	100,00	25		25
15.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelauanan publik sektor transportasi	Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap pelauanan publik sektor transportasi	indeks					88,4	88,4
15.9	On time performance layanan transportasi	Ketepatan layanan transportasi terhadap waktu	%					80,26	80,26
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
16.1	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK / Jumlah OPD) x 100 %	%	70	60	85,71	95		95
16.2	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100%	%	75	50	66,67	95	80	80
16.3	Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/ jumlah OPD x 100%	%	100	100	100,00	100		100
16.4	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	Nilai	2,92	2,07	70,89	3,1		3,1

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
16.5	Persentase masyarakat yang mendapatkan literasi dan/ atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi dinas	(jumlah penduduk yang mendapatkan literasi dan/ atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi dinas/jumlah penduduk) x 100%	%					2	2
16.6	Jumlah ASN pengelola SPBE di pemda yang mendapatkan pelatihan/ bimbingan teknis pengelola SPBE yang difasilitasi oleh dinas	Jumlah ASN pengelola SPBE di pemda yang mendapatkan pelatihan/ bimbingan teknis pengelola SPBE yang difasilitasi oleh dinas	Orang					10	2
16.7	Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi	jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online/ jumlah layanan publik x 100%	%	100	100	100,00	100	65	100
16.8	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh pemda	(Jumlah aplikasi SPBE yang digunakan oleh pemda/ Jumlah aplikasi SPBE) x 100%	%					100	100
16.9	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota/ Jumlah Penduduk) x 100 %	%	100	100	100,00	100	80	100
16.10	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional sesuai strategi komunikasi	(Jumlah masyarakat yang terpapar informasi terkait program kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional sesuai strategi komunikasi/ jumlah penduduk) x 100%	%					85	85
16.11	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%					74	75
16.12	Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	(jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan/ jumlah permohonan informasi publik yang disampaikan) x 100%	%					100	100
16.13	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kab/ kota cerdas sesuai dengan masterplan kab/ kota cerdas	(jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kab/ kota cerdas sesuai dengan masterplan kab/ kota cerdas	%					100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permendagri 81/2022	RKPD 2023
	yang sudah ditetapkan	yang sudah ditetapkan/ jumlah perangkat daerah) x 100%							
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ jumlah seluruh koperasi) x 100%	%	78	10,29	13,19	80		12
17.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi Wirausaha	(jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100%	%	2,03	36,17	1781,77	4,09	3,5	4,09
17.3	Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015)	(Jumlah Koperasi sehat/ jumlah total koperasi) x 100%	%	22	9,37	42,59	26		11
17.4	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/Jumlah UMKM) x 100%	%	0,8	0,4	50,00	1,5		1,5
17.5	Pertumbuhan volume usaha koperasi	jumlah peningkatan volume usaha koperasi/ jumlah volume usaha koperasi tahun sebelumnya) x 100%	%					18	10
17.6	Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	(jumlah peningkatan usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal/ jumlah usaha mikro) x 100%	%					4	4
17.7	terfasilitasinya UKM yang berpotensi masuk ke dalam rantai pasok dan ekspor	(jumlahUKM yang berpotensi masuk ke dalam rantai pasok dan ekspor/ jumlah UKM) x 100%	%					70	70
18	PENANAMAN MODAL								
18.1	Persentase Kenaikan jumlah nilai investasi	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	%	55,79	62,08	111,27	83,77		83,77
18.2	Persentase Kenaikan jumlah investor	(jumlah investor tahun n dikurangi jumlah investor tahun n-1) / jumlah investor tahun n-1 x 100%	%	-9,09	509,09	-5600,55	25		25
18.3	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	milyar	36	45	125,00	41		50

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
18.4	Persentase masyarakat yang menggunakan aplikasi	(Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan melalui Aplikasi x 100%/Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan)	%	95	85	89,47	100		90
18.5	Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP	(Jumlah layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP x 100 %/ Jumlah Layanan PTSP)	%	98	95	96,94	100		100
18.6	Nilai Survey kepuasan masyarakat	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Nilai	86,29	88,29	102,32	95		95
18.7	Persentase penurunan pengaduan masyarakat	(Jumlah Pengaduan Tahun (n-1)-Jumlah Pengaduan n)/Jumlah Pengaduan Tahun n x 100 %	%	40	50	125,00	20		20
18.8	tercapainya target realisasi penanaman modal	(realisasi penanaman modal/ target penanaman modal) x 100%	%					1200 Triliun	100
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	%	16	16	100,00	17		17
19.2	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat kab/ kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat kab/ kota	Orang				100		100
19.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	148	148	100,00	160		160
19.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	%	1	1	100,00	1,25	0,5	1,25
19.5	Jumlah atlet yang berasal dari kab/ kota yang masuk pelatda	Jumlah atlet yang berasal dari kab/ kota yang masuk pelatda	Orang					10	1
19.6	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Orang					300	300
19.7	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD)	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD)	dokumen					1	1

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
	pelayanan di tingkat kab/ kota	pelayanan di tingkat kab/ kota							
20	STATISTIK								
20.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	Ketersediaan dokumen statistik daerah dan OPD	Buah	2	2	100,00	2		2
20.2	Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah	Ketersediaan data statistik daerah dan OPD	dokumen	1	1	100,00	1		1
20.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
20.4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	%	100	100	100,00	100	100	100
20.5	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	(jumlah perangkat daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik/ jumlah perangkat daerah) x 100%	%					100	100
20.6	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	(jumlah perangkat daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar/ jumlah perangkat daerah) x 100%	%					100	100
21	PERSANDIAN								
21.1	Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)	Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	bulan	12	12	100,00	12		12
21.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100,00	100		100
21.3	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT	Orang					sesuai target daerah	2
21.4	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang					sesuai target daerah	1
21.5	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (SPE) pada sektor pemda dengan tingkat kematangan keamanan siber pada skor minimal 2,69	(jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (SPE) pada sektor pemda dengan tingkat kematangan keamanan siber pada skor minimal 2,70/ jumlah Penyelenggara	%					69,2	69,2

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		Sistem Elektronik (SPE)) x 100%							
22	KEBUDAYAAN								
22.1	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	%	76		0,00	88		88
22.2	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	%	40,28	69,44	172,39	69,44		69,44
22.3	Persentase Penampilan kelompok seni budaya	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	%	27,78	55,56	200,00	55,56		55,56
22.4	Persentase cagar Budaya (budaya Benda) yang Lestari	Jumlah cagar budaya (Budaya Benda) Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100	%	66,37	70,56	106,31	70,56	58,86	70,56
22.5	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Orang	18.598	22.504	121,00	22.504		22.504
22.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	(jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni/ jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas) x 100%	%					2	2
22.7	persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	(jumlah rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat/ jumlah rumah tangga) x 100%	%					22,82	100
22.8	persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	(jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni/ jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas) x 100%	%					36,00	36,00
22.9	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	(jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/ jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas) x 100%	%					12,00	12,00
22.10	persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni	(jumlah penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni/ jumlah penduduk) x 100%	%					0,50	0,50
22.11	persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	(jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan/	%					0,46	0,46

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		jumlah satuan pendidikan) 100%							
23	PERPUSTAKAAN								
23.1	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	%	89,64	12,9	14,39	91,65		15
23.2	Persentase perpustakaan aktif	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	%	100	100	100,00	100		100
23.3	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai kebiasaan masyarakat memperoleh pengetahuan /informasi	nilai	51	52,4	102,75	53	67,3	67,3
23.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai kondisi semua jenis perpustakaan	indeks	75	72,45	96,60	80	14	14
24	KEARSIPAN								
24.1	Persentase peningkatan arsip statis yang diakuisisi	(Jumlah arsip statis yang diakuisisi/Jumlah Arsip Statis) x 100 %	%	65		0,00	75		75
24.2	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku/ jumlah total OPD & kelurahan x 100%	%	50	11,5	23,00	65		15
24.3	Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan)	$T = (a+i+s+j)/4$ T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	%	100	25	25,00	100		40
24.4	Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK,	%	50,3		0,00	50,46		50,46

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK							
24.5	Indeks Kearsipan (ANRI)	Jumlah berkas arsip yg berhasil di buat daftar & tersimpan di depo arsip	Nilai	B			A		A
24.6	jumlah pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	jumlah pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	nilai					B	B
24.7	jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa	jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa	Orang					411.095 pengguna	5
24.8	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip					8.051 arsip	1
24.9	jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti pemerintah kab/ kota	jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti pemerintah kab/ kota	rekomendasi					123 rekomendasi	1
URUSAN PILIHAN									
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
25.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	207	189,79	91,69	208		208
25.2	Persentase Peningkatan Produksi Ikan	(jumlah produksi ikan tahun ini- jumlah produksi ikan tahun lalu/ jumlah produksi ikan tahun lalu) x 100%	%	0,3		0,00	0,97		0,97
26	PARIWISATA								
26.1	PDRB sektor Pariwisata	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	Juta rupiah	80.359,32	80.359,32	100,00	95.714,10		95.714,10
26.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,12	2,12	100,00	2,28	4,40	2,28
26.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,86	1,86	100,00	2,13		2,13

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
26.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	%	2	2	100,00	3		3
26.5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	%	14,59	14,59	100,00	15,38		15,38
26.6	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual / jumlah kamar yang tersedia X 100%	%	19,27	19,27	100,00	25,81		25,81
26.7	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata	%	75	75	100,00	90		90
26.8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %	%	50	50	100,00	61,76		61,76
26.9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	%	64,26	64,26	100,00	66,85		66,85
26.10	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	Orang	110.000	110.000	100,00	150.000		150.000
26.11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	%	15,3	15,30	100,00	16,87		16,87
27	PERTANIAN								
27.1	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan	juta rupiah	329.730,34	345.211,69	104,70	344.355,30		344.355,30
27.2	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan	(Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	%	8,7	8,96	102,99	8,21		8,96
27.3	Produksi padi	jumlah produksi padi	Ton	14.700,00	16.691,72	113,55	15.747,00		15.747,00
27.4	Produksi Kakao	jumlah produksi kakao	Ton	540	572,44	106,01	569		569
27.5	Produksi karet	jumlah produksi karet	Ton	1260	2223,86	176,50	1730		1730
27.6	Jumlah produksi ikan konsumsi	jumlah produksi ikan	Ton	207	215,92	104,31	208		208
27.7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun/luas panen) x 100%	%	4,85	5,56	114,64	5,19		6
27.8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan(t)- jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) /	%	20	0	0,00	10		10

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)							
27.9	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi	(Jumlah produksi tanaman padi tahun ini -jumlah produksi tanaman padi tahun lalu/jumlah produksi tahun lalu) x 100 %	%	0,3	-6,61	-2203,33	0,97		0,97
27.10	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	(Jumlah produksi tanaman kakao tahun ini -jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu/jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu) x 100 %	%	0,15	1,11	740,00	0,17		0,17
27.11	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet	(Jumlah produksi tanaman karet tahun ini -jumlah produksi tanaman karet tahun lalu/jumlah produksi tanaman karet tahun lalu) x 100 %	%	0,04	10,48	26200,0 0	0,057		0,057
27.12	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi	(Jumlah produksi Daging Sapi tahun ini -jumlah produksi Daging Sapi tahun lalu/jumlah produksi Daging sapi tahun lalu) x 100 %	%	0,32	-4,45	-1390,63	1,18		1,18
27.13	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam	(Jumlah produksi Daging Ayam tahun ini -jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu/jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu) x 100 %	%	5,5	33,30	605,45	7,14		7,14
27.14	Indeks Penanaman (IP)	Perbandingan antara julan luas pertanaman dalam pola tanam setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami		2,08	2,12	101,92	2,1		2,2
27.15	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%					71,87	71,87
27.16	persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	(jumlah luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)/ jumlah areal penanaman) x 100%	%					50,20	50,20
27.17	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis/ jumlah wilayah x 100%	(jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis/ jumlah wilayah) x 100%	%					81	81

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
28	PERDAGANGAN								
28.1	PDRB sektor perdagangan	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	juta rupiah	556.832,20	564.865,95	101,44	615.823,20		615.823,20
28.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100)	(Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	%	14,7	14,67	99,80	14,67		14,67
28.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	(jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/jumlah pelaku usaha diwilayah kab/kota) x 100%	%	5	10	200,00	30		30
28.4	Persentase kinerja realisasi pupuk	realisasi/RDKK x 100%	%	80	98	122,50	80		100
28.5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%	%	70	37,7	53,86	70	72	72
28.6	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	rupiah	25.837,33	25.048,00	96,95	25.837,33		25.837,33
28.7	persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	(jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang stabil/jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok) x 100%	%					5,90	5,90
29	PERINDUSTRIAN								
29.1	Nilai PDRB sektor Industri	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	juta rupiah	401.862,74	432.174,39	107,54	418.106,23	7,70	418.106,23
29.2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100)	(Nilai PDRB ADHB sektor Industri / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	%	10,61	11,22	105,75	9,96	18,40	12
29.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota	(jumlah industri kecil dan menengah tahun n jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%	%	12,06	10,62	88,06	16,04		16,04
29.4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP/Jumlah Seluruh Indikator Pembangunan Industri yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0,00	70		70

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
29.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	%	100	100	100,00	100		100
29.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	%	100	100	100,00	100		100
29.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	%	100	100	100,00	100		100
29.7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	%	100	100	100,00	100		100
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	%	100			100		
		Informasi produksi dan kapasitas produksi	%	100			100		
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	%	100			100		
		informasi bahan bakar/energy	%	100			100		
		informasi tenaga kerja	%	100			100		
		informasi investasi	%	100			100		
29.8	Persentase Produk IKM yang mempunyai standar mutu	(Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu/jumlah produk IKM)x 100%	%	0,001	0,004	400,00	0,001		0,005
29.9	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	(jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri/jumlah IKM)x 100%	%	0,02	0,007	35,00	0,02		0,02
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
30	PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
30.1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat PPD tingkat Provinsi		3	4	66,67	2		2
30.2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Program Pada RKPD x 100 % /Jumlah Program pada RPJMD	%	100	99	99,00	100		100
30.3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang	Jumlah OPD Yang memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan	%	100	99	99,00	100		100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
	baik, konsisten dan selaras	selaras x 100 %/ Jumlah OPD							
30.4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	(Jumlah Usulan Desa/Kel yang disampaikan/Jumlah Usulan yang diakomodir)x100	%	28,3	28,3	100,00	30		30
30.5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	(Jumlah Peserta yang hadir/Jumlah Undangan)x100%	%	100	100	100,00	100		100
30.6	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian terhadap SPIP Kota Sawahlunto	Level	Level 3 (3.0)	level 3 (3,0)	100,00	-		level 3 (3,0)
30.7	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Penilaian SPIP Terintegrasi Kota Sawahlunto	Level	-			Level 2 (2.7)		level 2
30.8	Persentase OPD SPIP Level 3	(Jumlah OPD SPIP level 3/OPD SPIP level 2) x 100	%	-			-		
30.9	Persentase OPD SPIP RTP Level 3	(Jumlah OPD SPIP RTP level 3/OPD SPIP level 2) x 100	%	52	52	100,00	72		72
30.10	Persentase OPD Nilai SAKIP B	Penilaian terhadap SAKIP OPD	%	-	96,15		100		100
30.11	Persentase OPD Nilai SAKIP A	Penilaian terhadap SAKIP OPD	%	4%	4%	95,00	12%		12
30.12	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP	Level	Level 2	level 2+	100,00	Level 3		Level 3
30.13	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP		WTP
30.14	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Tepat Waktu		Tepat Waktu
30.15	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	%	4,04	-0,14	-3,47	4,45		0,50
30.16	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	(realisasi belanja/anggaran belanja)x100%	%	90	92,11	102,34	95		95
30.17	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	(Total Belanja Pegawai/Total Belanja)x100%	%	49,99	96,21	192,46	49,99		49,99
30.18	Persentase belanja modal terhadap total belanja	(Total Belanja Modal/Total Belanja)x100%	%	20	13,16	65,80	20		20
30.19	Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan keuangan berbasis akrual	Ada/tidak ada	Ada	ada	100,00	Ada		Ada
30.20	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	(Total PAD/Total Pendapatan)x100%	%	11,38	8,44	74,17	13,65		10
30.21	Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah	(Realisasi Penerimaan Pajak daerah/Target Penerimaan Pajak)x100%	%	100	97,71	97,71	100		100
30.22	Persentase realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	(Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah/Target Penerimaan Retribusi Daerah)x100%	%	91	83,54	91,80	93		93
30.23	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	buah	19	20	105,26	19		20

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
30.24	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD x 100%	%	20,55	20,55	100,00	20,55		20,55
30.25	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah APBD Non Migas x 100%	%	1,86	1,95	104,84	2,34		2,34
30.26	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures / jumlah belanja APBD x 100%	%	60,02	10,15	16,91	60,02		60,02
30.27	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / total belanja APBD dikurangi satu x 100%	%	90	91,10	101,22	95		95
30.28	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD dikurangi satu x 100%	%	99	100,94	101,96	99		99
30.29	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA / total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	%	4,5	6,37	141,56	4,5		6,37
30.30	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	Indeks	75	0	0,00	80		80
30.31	Apakah ada daftar aset tetap?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	ya	100,00	Ya		Ya
30.32	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	ya	100,00	Ya		Ya
30.33	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	ya	100,00	Ya		Ya
30.34	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	ya	100,00	Ya		Ya
32	KEPEGAWAIAN								
32.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Ijazah/Sertifikat Terakhir/Jumlah Jabatan) x 100 %	%	93	93	100,00	95		95
32.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi/Jumlah Pegawai yang membutuhkan sertifikat diklat teknis kompetensi) x 100 %	%	100	85	85,00	100		100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
32.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Struktural Peningkatan kompetensi/Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural) x 100 %	%	100	76	76,00	100		100
32.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi	(Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi/Jumlah Pegawai yang mengikti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	%	100	100	100,00	100		100
32.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik	Jumlah aparatur dg nilai SKP min baik/jumlah aparatur yg memiliki nilai SKP	%	100	100	100,00	100		100
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	%	100	72,72	72,72	100		100
32.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100,00	100		100
32.8	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Indeks	66	63	95,45	75		75
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah	Indeks	0,75	103,5	13800,00	0,825		0,825
32.10	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (%) (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah x 100%	%	2,51	2,56	101,99	2,51		2,51
32.11	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100%	%	0,03	0,20	666,67	0,03		0,03
32.12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100%	%	0,7	0,21	30,00	0,8		0,8
33	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
33.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	(Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda/Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite pemda)x100%	%	95	95	100,00	97		97
33.2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	(Jumlah Dokumen yang dipublikasi diwebsite pemda/Total Jumlah dokumen yang dirinci)x100%	%	100	100	100,00	100		100
34	KESEKRETARIATAN DAERAH								
34.1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	Nilai	B	B	100,00	BB		BB
34.2	Peringkat LPPD	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	Peringkat	SB	SB	100,00	SB		SB
34.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	83,34 (B)	81,21 (B)	97,44	89,87 (A)		89,87 (A)
31.1	PENGADAAN								
31.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif	%	55	98,24	178,62	60		60
31.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah Nilai Belanja Langsung yang melalui pengadaan/Total belanja langsung)x100%	%	60	62,4	104,00	65		65
31.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Pengukuran pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ	%	100	60	60,00	100		100
35	KESEKRETARIATAN DPRD								
35.1	Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	buah	100	100	100,00	100		100
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
36.1	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder	(jumlah penelitian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh	%	-	-		75%		75%

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	2021			Target Kinerja 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD tahun 2023	Permend agri 81/ 2022	RKPD 2023
		penelitian dikali 100%)							
36.2	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	-	Sangat Inovatif	Inovatif	75,00	Sangat Inovatif		Sangat Inovati f
37	KEWILAYAHAN								
37.1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	%	100		0,00	100		100

Sumber : Data Olahan Barenlitbangda 2022

BAB VII PENUTUP

7.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

RKPD Tahun 2023 menjadi bagian dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 pada tahun terakhir. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2023, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program, kegiatan dan subkegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2023 dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
2. Terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan sepanjang merupakan program/kegiatan/subkegiatan yang bersumber dana yang bersifat peruntukan khusus atau merupakan instruksi/permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang, merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, dapat diproses dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD;
3. Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Tahun 2023 merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan sebagai pedoman penentuan plafon anggaran;
4. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/subkegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2023 merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan perkiraan/asumsi;
5. Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah merupakan perkiraan, sedangkan kepastian lokasi mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
6. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023, Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Sawahlunto wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas;
7. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong.

7.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun 2023 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang hasilnya dibahas lebih lanjut bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Sawahlunto guna mendapatkan kesepakatan bersama;



2. RKPd Tahun 2023 ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

06 JUL 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH, MH

NIP. 19820411 201001 1 001



BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

R K P D

KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO